



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

**WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2019**



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd
WALIKOTA MADIUN



INDA RAYA AMS, SE, MIB
WAKIL WALIKOTA MADIUN

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun Tahun 2019 disamping merupakan aktualisasi dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, juga merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2019, dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan terselesaikannya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun Tahun 2019, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbang saran dan pemikiran. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan guna perumusan kebijakan dalam pembangunan dimasa mendatang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Madiun, Maret 2020

WALIKOTA MADIUN



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum	I-2
B. Visi dan Misi	I-3
C. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	I-9
D. Prioritas Pembangunan Daerah	I-11
E. Gambaran Umum	
1. Kondisi Geografis	I-12
2. Kondisi Demografis	I-14
3. Kondisi Ekonomi	I-16
4. Inflasi	I-23
5. Indeks Pembangunan manusia (IPM)	I-25
6. Kemiskinan	I-30
7. Ketenagakerjaan	I-32
C. Sistematika	I-37
 BAB II : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	II-2
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.	II-2
2. Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah	II-8
3. Permasalahan dan Solusi	II-22
B. Pengelolaan Belanja Daerah	II-24
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	II-24
2. Alokasi dan Realisasi Belanja	II-26
C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah	II-37
 BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
I. GAMBARAN MAKRO KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	
A. Indikator Kinerja berdasarkan Misi Daerah	III-1
B. Indikator Kinerja Daerah	III-6

A. Urusan Wajib yang dilaksanakan	
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	III-35
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	III-68
✚ Pengelola RSUD	III-124
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-140
4. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	III-159
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	III-168
6. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	III-181
7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan .	III-203
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	III-221
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III-229
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	III-236
11. Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	III-241
12. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	III-254
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	III-273
14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	III-278
15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	III-291
16. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM	III-308
17. Urusan Penanaman Modal	III-315
18. Urusan Pemerintahan Bidang kepemudaan Dan Olahraga.....	III-320
19. Urusan Statistik	III-330
20. Urusan Pemerintahan Bidang Budaya	III-333
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	III-348
22. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	III-349
23. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	III-354
B. Urusan Wajib yang dilaksanakan	
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	III-357

1. Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	III-377
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	III-382
3. Urusan Perdagangan	III-386
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	III-397
5. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	III-405
C. Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
1. Urusan Staf	III-407
2. Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	III-448
3. Pengawas	III-453
4. Kepegawaian, Pendidikan serta Pelatihan	III-460
5. Keuangan	III-471
6. Perencanaan	III-487
7. Penelitian dan Pengembangan	III-498
8. Kecamatan	III-500
BADAN USAHA MILIK NEGARA	
✚ PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun	III-520
✚ Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari	III-525
✚ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun	III-531
✚ Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	III-535
BAB IV : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Kegiatan Peanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	IV-1
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-3
BAB V : PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kota Madiun 2014-2019.....	I-8
Tabel I.2	: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun	I-14
Tabel I.3	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2019	I-15
Tabel I.4	: Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2019..	I-15
Tabel I.5	: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019.....	I-15
Tabel I.6	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2019...	I-16
Tabel I.7	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2019	I-16
Tabel I.8	: Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	I-19
Tabel I.9	: Perkembangan PDRB Kota Madiun Menurut Harga Berlaku Tahun 2015-2019	I-20
Tabel I.10	: Perkembangan PDRB Kota Madiun Menurut Harga Konstan Tahun 2015-2019	I-21
Tabel I.11	: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2015-2019 (%).....	I-22
Tabel I.12	: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2015-2019	I-23
Tabel I.13	: Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015-2019	I-26
Tabel I.14	: Angka Harapan Hidup Tahun 2015-2019	I-27
Tabel I.15	: Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	I-29
Tabel I.16	: Paritas Daya Beli (Rp) Kota Madiun Tahun 2015-2019 .	I-29
Tabel I.17	: Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Madiun	I-30
Tabel I.18	: Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Madiun.	I-31
Tabel I.19	: Kantong Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2019.	I-31

Tabel I.20	: Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut kegiatan Agustus Tahun 2018-2019.	I-35
Tabel II.1	: Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019	II-1
Tabel II.2	: Target dan Realisasi PAD Kota Madiun Tahun 2018 s.d. 2019	II-8
Tabel II.3	: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 s.d. 2019	II-9
Tabel II.4	: Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2018 s.d. 2019.....	II-10
Tabel II.5	: Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 s.d. 2019	II-11
Tabel II.6	: Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2018 s.d. 2019	II-12
Tabel II.7	: Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Madiun Tahun 2018 s.d. 2019	II-13
Tabel II.8	: Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2018-2019	II-14
Tabel II.9	: Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak Tahun 2018 s.d. 2019.....	II-15
Tabel II.10	:	
Tabel II.11	: Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2018 s.d. 2019	II-17
Tabel II.12	: Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2018 s.d. 2019	II-19
Tabel II.13	: Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Tahun 2018 s.d 2019	II-20
Tabel II.16	: Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 s.d 2019	II-26
Tabel II.17	: Realisasi Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Pegawai Tahun 2018 s.d 2019	II-27
Tabel II.18	: Realisasi Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 s.d 2019	II-30
Tabel II.19	: Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018 s.d 2019.....	II-31

Tabel II.20	: Realisasi Belanja Langsung Jenis Belanja Pegawai Tahun 2018 s.d 2019	II-32
Tabel II.21	: Realisasi Belanja Langsung Jenis Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 s.d 2019	II-34
Tabel II.22	: Alokasi dan Realisasi Komponen Belanja Langsung Jenis Belanja Modal Tahun 2018 s.d 2019	II-35
Tabel II.23	: Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2018 s.d 2019	II-38
Tabel III.1	: Capaian Kinerja Indikator Berdasarkan Misi Kota Madiun Laporan keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2019	III-2
Tabel III.2	: Indikator Kinerja berdasarkan Misi Daerah Tahun 2019	III-4
Tabel III.3	: Keterkaitan Aspek Pembangunan dan Misi Daerah	III-6
Tabel III.4	: Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Berdasarkan RPJMD Periode Tahun 2014-2019 beserta suplemen	III-7
Tabel III.5	: Capaian Indikator Urusan Pembangunan daerah Tahun 2019	III-32
Tabel III.6	: Capaian aspek Pembangunan Daerah Tahun 2019	III-33
Tabel III.7	: Perkembangan Capaian Aspek Pembangunan Daerah Tahun 2015 s.d 2019	III-34
Tabel III.8	: Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-35
Tabel III.9	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan di Kota Madiun tahun 2018-2019	III-37
Tabel III.10	: Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-69
Tabel III.11	: Angka Kematian Ibu di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-71
Tabel III.12	: Angka Kematian Bayi di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-72
Tabel III.13	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-73
Tabel III.14	: Angka Keberlangsungan Hidup Bayi di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-75
Tabel III.15	: Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-77

Tabel III.16	: Pelayanan Kesehatan Dasar Sesuai Standar di Kota Madiun tahun 2019	III-78
Tabel III.17	: Balita Gizi sangat Kurang di Kota Madiun Tahun 2016-2019.....	III-80
Tabel III.18	: Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-81
Tabel III.19	: Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Madiun tahun 2014-2018	III-82
Tabel III.20	: Jumlah Dokter di Kota Madiun tahun 2016-2019..	III-82
Tabel III.21	: Tenaga Kesehatan di Kota Madiun tahun 2016-2019	III-83
Tabel III.22	: Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya di Kota Madiun Tahun 2019	III-84
Tabel III.23	: SOP Pelayanan Kesehatan di Kota Madiun tahun 2019	III-85
Tabel III.24	: Cakupan Masyarakat Miskin Yang Terlayani di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-86
Tabel III.25	: Cakupan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-87
Tabel III.26	: Rumah Tangga Ber-PHBS di Kota Madiun Tahun 2019	III-88
Tabel III.27	: Cakupan Imunisasi di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-89
Tabel III.28	: Cakupan Pertemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Madiun Tahun 2019	III-90
Tabel III.29	: Angka Kematian Ibu di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-91
Tabel III.30	: Rumah Tangga Sehat / Ber-PHBS di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-93
Tabel III.31	: Jumlah Kasus KLB di Kota Madiun Tahun 2019....	III-95
Tabel III.32	: Capaian Penanganan Penyakit di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-96
Tabel III.33	: Capaian Indikator Pilar STBM di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-99
Tabel III.34	: Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-100
Tabel III.35	: Capaian Kinerja Puskesmas di Kota Madiun Tahun 2019	III-100
Tabel III.36	: Capaian Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-101
Tabel III.37	: Capaian Penduduk yang Diskrining Faktor Resiko PTM di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-102

Tabel III.38	: Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun.....	III-103
Tabel III.39	: Sarana Pelayanan Kesehatan yang Beroperasi Sesuai Perundangan di Kota Madiun Tahun 2016-2019....	III-104
Tabel III.40	: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-105
Tabel III.41	: TTU danTPM Sehat di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-106
Tabel III.42	: Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya di Kota Madiun tahun 2019.....	III-107
Tabel III.43	: Prosentase Kematian Akibat Penyakit Potensial Wabah di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-107
Tabel III.44	: Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun Tahun 2016-2019	III-108
Tabel III.45	: Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di RSUD Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	III-124
Tabel III.46	: Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD Kota Madiun Tahun 2015-2019	III-125
Tabel III.47	: Proposal asal Kunjungan Pasien di RSUD Kota Madiun Tahun 2015-2019	III-125
Tabel III.48	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Penunjang di RSUD Kota Madiun Tahun 2015-2019	III-126
Tabel III.49	: Perkembangan Pelayanan Laboratorium dan Radiologi di RSUD Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	III-127
Tabel III.50	: Tingkat Efisiensi dan Mutu Pelayanan RSUD Kota Maadiun Tahun 2015-2019.....	III-128
Tabel III.51	: Distribusi Tempat Tidur berdasarkan Ruang Kelas Perawatan di RSUD Kota Madiun Tahun 2019.....	III-131
Tabel III.52	: Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) Per Kelas di RSUD Kota Madiun tahun 2019.....	III-132
Tabel III.53	: Tingkat pertumbuhan Pendapatan (SGR) di RSUD Kota Madiun Tahun 2019.....	III-132
Tabel III.54	: Perkembangan Cost Recovery RSUD Kota Madiun tahun 2015-2019	III-133
Tabel III.55	: Tingkat Kematian RSUD Kota Madiun Tahun 2015-2019	III-134
Tabel III.56	: Perkembangan Kunjungan Masyarakat Miskin RSUD Kota Madiun Tahun 2019	III-135

Tabel III.57	: Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-140
Tabel III.58	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-142
Tabel III.59	: Perkembangan Kinerja sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-159
Tabel III.60	: Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kota Madiun tahun 2018-2019.....	III-160
Tabel III.61	: Perkembangan Kinerja sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-168
Tabel III.62	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun.....	III-169
Tabel III.63	: Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-181
Tabel III.64	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-182
Tabel III.65	: Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun tahun 2018-2019	III-204
Tabel III.66	: Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut kegiatan Agustus Tahun 2018-2019.....	III-205
Tabel III.67	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-206
Tabel III.68	: Upah Minimum Kota (UMK) Kota Madiun	III-208
Tabel III.69	: Perkembangan Penetapan Tenaga Kerja di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-210
Tabel III.70	: Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut kegiatan Agustus Tahun 2018-2019.....	III-212
Tabel III.71	: Jumlah Perusahaan di Kota Madiun Tahun 2018 dan Tahun 2019	III-213

Tabel III.72	: Jumlah Pekerja Tahun 2018 dan Tahun 2019	III-213
Tabel III.73	: Perkembangan Kinerja sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun tahun 2018-2019	III-222
Tabel III.74	: Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-223
Tabel III.75	: Jumlah Ketersediaan pangan Utama.....	III-225
Tabel III.76	: Ketersediaan Energi dan Protein Kota Madiun	III-225
Tabel III.77	: Perkembangan Kinerja sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-229
Tabel III.78	: Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2017-2018.....	III-230
Tabel III.79	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-236
Tabel III.80	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Madiun	III-244
Tabel III.81	: Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Bidang Lingkungan Hidup dalam RPJMD Tahun 2014-2019 terhadap 2019-2024.....	III-254
Tabel III.82	: Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-254
Tabel III.83	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2018-2019	III-257
Tabel III.84	: Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-273
Tabel III.85	: Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visis Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-278
Tabel III.86	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-279

Tabel III.87	: Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-291
Tabel III.88	: Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-292
Tabel III.89	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-308
Tabel III.90	: Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-315
Tabel III.91	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal di Kota Madiun.....	III-316
Tabel III.92	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-320
Tabel III.93	: Perkembangan Kinerja Pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kota Madiun Tahun 2018 s.d 2019	III-330
Tabel III.94	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Budaya di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-333
Tabel III.95	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-350
Tabel III.96	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembanguna Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-354
Tabel III.97	: Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-357
Tabel III.98	: Data Kelompok Tani di Kota Madiun Tahun 2019..	III-359
Tabel III.99	: Jumlah Populasi Ternak Kota Madiun	III-360
Tabel III.100	: Jumlah Pemotongan Ternak Sapi dan Kambing /Domba Kota Madiun	III-360

Tabel III.101 : Produktivitas sapi perah per ekor per hari (L).....	III-361
Tabel III.102 : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian di Kota Madiun	III-362
Tabel III.103 : Analisa Pendapatan Petani Padi Per Hektar Per Tahun	III-363
Tabel III.104 : Jenis Produk Pertanian yang Dipasarkan.....	III-363
Tabel III.105 : Jenis Sub Kegiatan Pada Kelompok Tani Tahun 2019	III-364
Tabel III.106 : Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Kota Madiun	III-364
Tabel III.107 : Jumlah Produksi Daging Kota Madiun.....	III-366
Tabel III.108 : SDM Peternakan Kota Madiun	III-366
Tabel III.109 : Produksi Padi Per Kecamatan di Kota Maadiun.....	III-367
Tabel III.110 : Nilai Tukar Petani Kota Madiun	III-368
Tabel III.111 : Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-377
Tabel III.112 : Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-382
Tabel III.113 : Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-386
Tabel III.114 : Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-387
Tabel III.115 : Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019.....	III-398
Tabel III.116 : Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-399
Tabel III.117 : Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-405
Tabel III.118 : Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-407
Tabel III.119 : Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	III-413
Tabel III.120 : Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Unsur Staf pada Tahun 2018 s.d 2019	III-414

Tabel III.121 : Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s.d 2018	III-415
Tabel III.122 : Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	III-419
Tabel III.123 : Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2019	III-429
Tabel III.124 : Perkembangan Kegiatan DPRD Kota Madiun	III-448
Tabel III.125 : Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang Pemerintahan di Kota Madiun pada Tahun 2018-2019	III-453
Tabel III.126 : Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-461
Tabel III.127 : Data Kegiatan Diklat Tahun 2019	III-464
Tabel III.128 : Data Capaian Penataan Pegawai Tahun 2019	III-465
Tabel III.129 : Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-471
Tabel III.130 : Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-472
Tabel III.131 : Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-487
Tabel III.132 : Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-498
Tabel III.133 : Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2018-2019	III-501
Tabel III.134 : Perkembangan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun Tahun 2018 - Tahun 2019	III-532
Tabel III.135 : Jumlah Karyawan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Tahun 2019	III-533

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	: Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2015 - 2019	I-24
Grafik I.2	: Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Madiun Tahun 2015-2019	I-33
Grafik I.3	: Perkembangan Tingkat Pembangunan Terbuka Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	I-35
Grafik III.1	: Tren Angka Harapan Hidup Kota Madiun.....	III-70
Grafik III.4	: Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun Tahun 2016-2019.....	III-92
Grafik III.5	: Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) di RSUD Kota Madiun Tahun 2019	III-131
Grafik	: Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Madiun Tahun 2015 – 2019	III-409
Grafik	: Perkembangan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	III-413
Grafik	: Perkembangan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	III-420
Grafik	: Nilai Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Kota Madiun Tahun 2015-2019.....	III-422

BAB I

PENDAHULUAN

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban kepala daerah juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada pasal 15 disebutkan ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya, serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil rekomendasi pertanggungjawaban Walikota Madiun tahun lalu dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam perumusan kebijakan yang tertuang kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Madiun Tahun 2019 dan Rancangan Awal dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Madiun Tahun 2020.

Hal ini penting, mengingat dengan mengacu pada hasil tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya akan diketahui :

1. Untuk mengetahui dan memastikan, bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai sesuai dengan target tiap tahun anggaran, serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah; dan
2. Untuk mengetahui berbagai kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan yang lalu sekaligus merumuskan berbagai alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan tahun-tahun mendatang.

Memasuki tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 serta guna menjamin adanya kesinambungan dalam perumusan kebijakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun 2019-2024 yang memuat visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka perumusan berbagai kebijakan juga tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota ini.

A. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
-

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Madiun Tahun 2014-2019 ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019.

B. VISI DAN MISI

Visi Kota Madiun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Madiun Tahun 2014-2019 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2014 Tahun 2014 adalah **“Terwujudnya Kota Madiun yang lebih Maju dan Sejahtera”**.

Lebih Maju diartikan bahwa Kota Madiun senantiasa meningkatkan kualitas pembangunan disegala bidang untuk mewujudkan daerah yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama, tidak bertentangan dengan adat istiadat dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

Sedangkan inti dari **kesejahteraan** adalah kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Implementasinya adalah mewujudkan Kota Madiun yang maju, sehingga diharapkan akan memberi dampak pada upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakatnya.

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah. Dengan rumusan misi yang baik akan dapat membantu memberi gambaran tentang visi yang ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi.

Dan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Madiun, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat (Partisipatoris).
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2018 Kota Madiun telah melaksanakan pesta demokrasi dengan terpilihnya **Walikota Madiun Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd dan Wakil Walikota Madiun INDA RAYA AYU MIKO SAPUTRI, SE, MIB** yang dilantik pada tanggal 29 April 2019 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2019-2024 setelah terbit keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 49/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018. Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut juga diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah strategis serta penetapan prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun adalah :

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih
Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Makna substantif visi di atas diturunkan dari pokok-pokok visi sebagaimana berikut :

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA : PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu : **PENDEKAR**.

Berbagai misi dan orientasi pembangunan akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali tentang visi dan misi RPJMD Kota Madiun secara lebih detil, terinci, serta tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Selanjutnya **masih** tetap berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilaporkan dalam tahun terakhir LKPJ 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tujuan “Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Pembangunan” ditetapkan sasaran :
 - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan ;
 - b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
 2. Berdasarkan tujuan “Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik” ditetapkan sasaran :
 - a. Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ;
 - b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 3. Berdasarkan tujuan “Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan” ditetapkan sasaran : meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan.
 4. Berdasarkan tujuan “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” ditetapkan sasaran : meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
 5. Berdasarkan tujuan “Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan” ditetapkan sasaran :
-

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota ;
 - b. Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Berdasarkan tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat” ditetapkan sasaran :
- a. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja ;
 - b. Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah ;
 - c. Meningkatnya kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah ;
 - d. Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
7. Berdasarkan tujuan “Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif” ditetapkan sasaran :
- a. Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya ;
 - b. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
-

Tabel I.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Kota Madiun 2014 – 2019

VISI : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
<i>MISI 1 : Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat</i>			
1	Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan (stake holder) dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Jumlah kelompok Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
<i>MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa</i>			
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
<i>MISI 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Publik</i>			
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf
2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB)
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik Rasio Rumah layak Huni Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)
<i>Misi 4 : Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat</i>			
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Nilai realisasi Investasi Tingkat Pengangguran Terbuka

VISI : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
	rataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor serta industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB
		Meningkatnya Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB
		Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap PDRB
			Rasio Ketersediaan Pangan Utama PDRB Perkapita Indeks Gini
2	Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif	Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan
		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas tertangani Angka pelanggaran ketertiban umum

Sumber data : RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Untuk mencapai tujuan dan sasaran atas misi yang telah ditetapkan diperlukan arah misi atau orientasi pembangunan. Adapun kebijakan umum pembangunan sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014–2019 adalah sebagai berikut :

1. Strategi dalam misi mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat meliputi :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan melalui arah kebijakan Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

- b. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan melalui arah kebijakan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan
 2. Strategi dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa meliputi :
 - a. Meningkatkan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui arah kebijakan Peningkatan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
 - b. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui arah kebijakan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Strategi dalam misi meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik meliputi :
 - a. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan pada semua jenjang pendidikan melalui arah kebijakan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
 - b. Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui arah kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - c. Meningkatkan kualitas infrastruktur, permukiman dan Sarana Prasarana transportasi melalui arah kebijakan Peningkatan kualitas infrastruktur, permukiman dan Sarana prasarana transportasi.
 - d. Meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup melalui arah kebijakan Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
 4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan misi keempat. Strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran antara lain:
 - a. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif serta penyerapan tenaga kerja melalui arah kebijakan Peningkatan iklim investasi yang kondusif serta penyerapan tenaga kerja.
 - b. Meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah melalui arah kebijakan Peningkatan kontribusi
-

sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah.

- c. Meningkatkan kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah melalui arah kebijakan Peningkatan kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah.
- d. Meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui arah kebijakan Peningkatan stabilitas ketersediaan pangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- e. Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya melalui arah kebijakan Peningkatan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya.
- f. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui arah kebijakan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Madiun merupakan integrasi kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Capaian Kinerja program daerah serta permasalahan tantangan yang harus dihadapi.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 Kota Madiun dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, Prioritas Pembangunan Tahun 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan ;
 2. Peningkatan Infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan Ekonomi dan Sanitasi Kota untuk meningkatkan kualitas hidup ;
 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah ;
 4. Peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup ;
 5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses
-

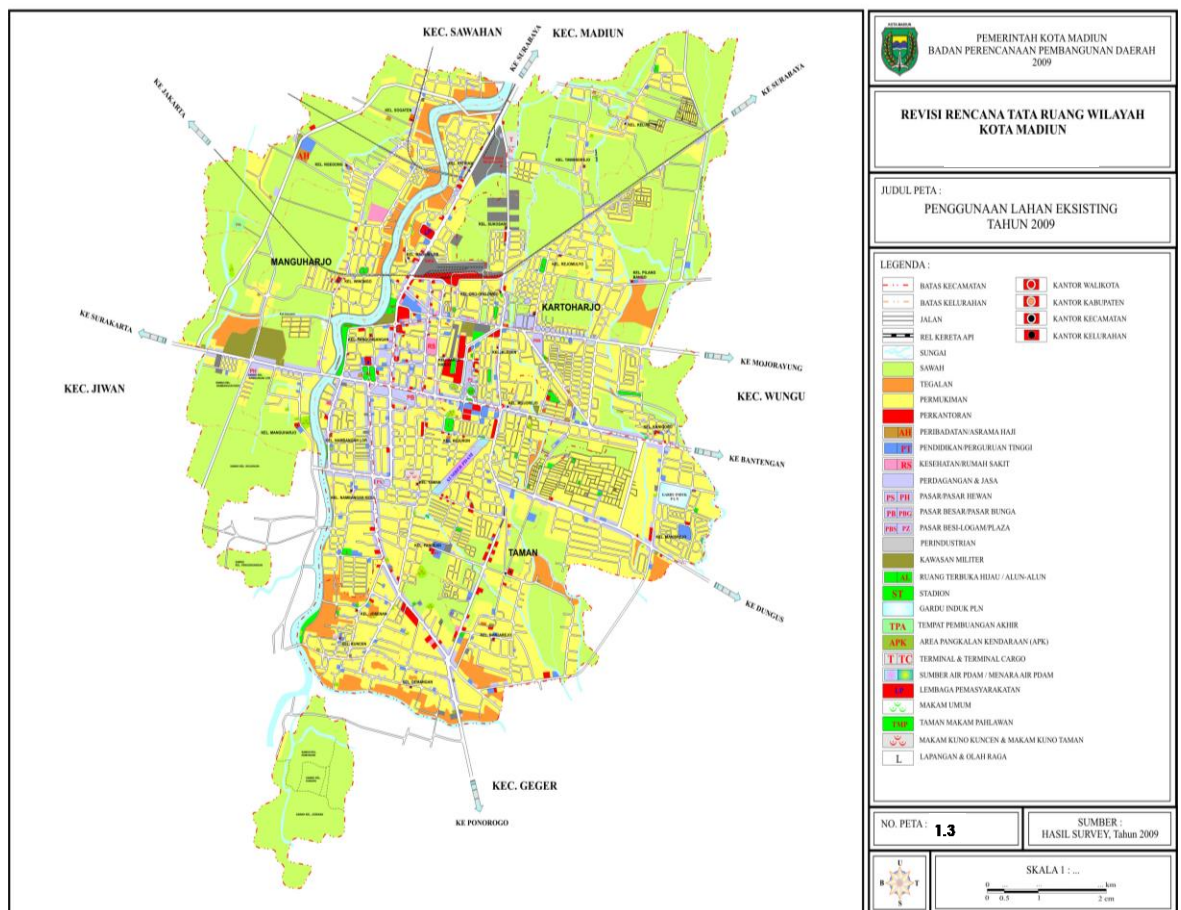
E. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa Kota Madiun terletak pada 111° BT – 112° BT dan 7° LS – 8° LS dengan batas meliputi :

- Sebelah utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Sebelah selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Sebelah timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Sebelah barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Gambar I.1
Peta Administrasi Kota Madiun



Secara geografis, letak Kota Madiun termasuk sangat strategis karena jalur Kota Madiun adalah jalur penghubung antara Pusat Jawa Timur dan Pusat perekonomian di Jawa Tengah dan Jogjakarta. Letak geografis Kota Madiun juga memberi pengaruh terhadap Wilayah se eks-Karesidenan Madiun yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.

Ditinjau menurut topografinya, wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian \pm 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 77 meter dpl dan di bagian utara selanjutnya menurun hingga 64 meter dpl, sedang di bagian tengah kota, ketinggian rata-rata mencapai 63 meter dpl. Secara rinci, Kecamatan Manguharjo berada pada ketinggian 76 meter dpl, Kecamatan Taman di ketinggian 77 meter dpl, dan Kecamatan Kartoharjo di ketinggian 68 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata $1-2^\circ$ atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 33,23 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,46 km² (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km² (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km² (30,21%). Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu :

- Kecamatan Manguharjo terdiri dari 324 RT dan 88 RW ;
- Kecamatan Taman terdiri dari 392 RT dan 105 RW ;
- Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

Secara rinci untuk luas wilayah dan jumlah RT, RW di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah	
			RW	RT
I.	Manguharjo	10,04	88	324
1.	Manguharjo	1,40	8	36
2.	Sogaten	1,12	9	29
3.	Patihan	0,84	6	22
4.	Ngegong	1,34	5	17
5.	Winongo	2,00	11	37
6.	Madiun Lor	0,73	9	41
7.	Pangongangan	0,61	9	26
8.	Nambangan Lor	0,98	16	70
9.	Nambangan Kidul	1,02	15	46
II.	Taman	12,46	105	393
1.	Mojorejo	1,54	14	64
2.	Pandean	0,32	18	60
3.	Banjarejo	1,92	8	32
4.	Kuncen	1,83	4	9
5.	Manisrejo	0,92	12	60
6.	Kejuron	1,59	15	50
7.	Josenan	1,06	9	31
8.	Demangan	1,26	10	36
9.	Taman	2,02	15	51
III.	Kartoharjo	10,73	74	309
1.	Kartoharjo	0,94	9	38
2.	Oro-Oro Ombo	0,81	9	43
3.	Klegen	0,84	10	48
4.	Kanigoro	1,62	12	52
5.	Pilangbango	1,21	5	22
6.	Rejomulyo	2,03	11	38
7.	Sukosari	0,55	6	18
8.	Tawangrejo	1,77	6	24
9.	Kelun	0,96	6	26
Jumlah		33,23	267	1.026

Sumber : Buku Kecamatan Dalam Angka 2019

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2019 berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sebanyak 210.115 jiwa. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 102.851 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 107.264 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Kota Madiun sebanyak 71.995 KK tersebar di tiga wilayah kecamatan.

Jumlah penduduk Kota Madiun Tahun 2019 menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	30.824	32.193	63.017
2.	Taman	43.751	45.599	89.350
3.	Kartoharjo	28.276	29.472	57.748
Jumlah		102.851	107.264	210.115

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Tabel I.4
Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	16.400	5.875	22.275
2.	Taman	22.805	7.154	29.959
3.	Kartoharjo	14.963	4.798	19.761
Jumlah		54.168	17.827	71.995

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Tabel I.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019

No	Kelompok Umur (Tahun)	Uraian		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	4.970	5.929	10.899
2.	5 – 9	7.062	5.522	12.584
3.	10 – 14	7.721	7.470	15.191
4.	15 – 19	8.604	8.084	16.688
5.	20 – 24	8.084	7.712	15.796
6.	25 – 29	7.163	7.217	14.380
7.	30 – 34	6.883	6.914	13.796
8.	35 – 39	8.336	8.367	16.703
9.	40 – 44	8.548	8.604	17.152
10.	45 – 49	7.988	7.874	15.862
11.	50 – 54	6.946	7.475	14.421
12.	55 – 59	5.971	6.851	12.822
13.	≥ 60	14.576	19.245	33.821
Jumlah		102.851	107.264	210.115

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Tabel I.6
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ Belum Sekolah	31.374
2.	Belum Tamat SD/ Sederajat	19.887
3.	Tamat SD/ Sederajat	29.266
4.	SLTP/ Sederajat	28.787
5.	SLTA/ Sederajat	73.045
6.	D-I/ II	498
7.	Akademi/ D-III/ Sarjana Muda	5.761
8.	D-IV/ Strata-I	20.071
9.	Strata-II	1.391
10.	Strata-III	35
Jumlah		210.115

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Tabel I.7
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2019

NO	Nama Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/ Tidak Bekerja	36.390
2	Mengurus Rumah Tangga	34.412
3	Pelajar/ Mahasiswa	44.940
4	Pensiunan	6.095
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6.826
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1.771
7	Kepolisian RI (POLRI)	1.027
8	Jasa	8.653
9	Karyawan	46.311
10	Buruh/ Tukang	4.390
11	Wiraswasta	18.994
12	Lain	306
Jumlah		210.115

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Kondisi karakteristik wilayah Kota Madiun dari aspek fisik dan non fisik, bahwa Kota Madiun sebagai pusat wilayah pengembangan Madiun dan sekitarnya memiliki fungsi antara lain pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan bagi daerah hinterland. Kota Madiun sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) di Jawa Timur bagian barat yang berfungsi sebagai pelayanan dalam lingkup provinsi. Kondisi Topografi & geografi Kota Madiun yang mendukung sebagai kota transit adalah dengan adanya fasilitas berupa sarana transportasi kereta api (DAOP VII) dan terminal Tipe A yang

mendukung potensi pengembangan wilayah Kota Madiun sebagai pusat perdagangan, jasa dan pendidikan.

Luas wilayah yang relatif kecil di Kota Madiun memudahkan akses komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, kondisi topografi yang landai atau datar, serta dilewati jaringan jalan kereta api lintas utama Pulau Jawa bagian selatan menjadi potensi bagi Kota Madiun dalam mempermudah pembangunan fisik untuk pembangunan daerah, dengan harapan dapat mendukung peran Kota Madiun sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang dapat menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya mendorong pertumbuhan perekonomian, Kota Madiun mengandalkan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan Kota Madiun yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) dan lahan pertanian yang terbatas. Potensi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa tumbuh paling tinggi dan kontribusinya paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun. Sebagai kota transit, Kota Madiun mempunyai berbagai sarana dan prasarana akomodasi yang memadai antara lain hotel berbintang, penginapan dan biro perjalanan serta sarana umum lainnya. Kota Madiun mempunyai kekhasan dalam makanan yaitu berupa nasi pecel, lempeng, madumongso dan roti bluder yang mempunyai daya tarik tersendiri. Berdasarkan nilai perbandingan absolut antar kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kota Karismatik Madiun sebagai Sub Sentra pengembangan Wilayah Jawa Timur di Bagian Barat mengembangkan Gerakan UMKM Naik Kelas yang merupakan upaya Pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas produksi, kapasitas produksi dan pemasaran hasil produksi melalui kemudahan legalitas usaha mikro kecil, fasilitasi permodalan, fasilitasi pelatihan dan fasilitasi pemasaran.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pendapatan perkapita juga terus mengalami kenaikan serta inflasi yang cenderung menurun dan didukung oleh kondisi

keamanan, politik, sosial budaya dan pemerintahan yang stabil dan kondusif merupakan potensi yang baik bagi perkembangan Kota Madiun. Namun kedepan masih terdapat tantangan besar untuk meningkatkan daya saing, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, efisiensi pasar tenaga kerja, penguasaan teknologi dan inovasi, serta kelembagaan.

b. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Beragamnya kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat telah memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu.

PDRB dapat juga diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Tabel I.8
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2019**	14.208.213,5	10.635.464,3
2018	13.150.858,7	10.053.582,4
2017	12.140.200,5	9.486.136,6
2016	11.185.109,4	8.954.697,1
2015	10.192.067,5	8.455.436,3

Sumber : BPS Kota Madiun

**) Angka sangat sementara

Selama 5 tahun terakhir PDRB Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Terlihat dari nilai PDRB pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku 10,19 triliun rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 14,21 triliun rupiah tahun 2019 atau naik sebesar 39,4%. Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir.

Tahun 2015 sebesar 8,45 triliun rupiah terus meningkat menjadi 10,63 triliun rupiah tahun 2019.

Secara terperinci pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor pada Tahun 2015 dan Tahun 2019 ditunjukkan tabel berikut:

Tabel I.9
Perkembangan PDRB Kota Madiun Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015-2019

SEKTOR		NILAI PDRB ADHB (Rp. JUTA)				
		2015	2016	2017	2018	2019*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	98.020,1	102.288,5	100.958,5	99.191,8	106,813.50
B	Pertambangan dan Penggalian	2.477,4	2.616,4	2.727,4	2.906,6	3,049.10
C	Industri Pengolahan	1.637.081,5	1.807.895,0	1.991.440,2	2.095.797,2	2,290,021.70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.775,3	8.393,3	9.820,3	10.454,7	11,222.20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.645,1	24.461,4	26.744,4	29.109,5	29,039.70
F	Konstruksi	664.080,2	718.117,5	767.940,9	823.107,1	834,712.10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.529.951,0	2.791.973,3	3.051.458,8	3.289.129,5	3,658,646.60
H	Transportasi dan Pergudangan	321.165,2	360.088,4	407.727,1	459.090,9	498,887.00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464.842,5	523.628,0	574.364,4	629.380,0	705,629.50
J	Informasi dan Komunikasi	1.393.956,6	1.524.590,8	1.660.030,1	1.834.504,9	1,851,667.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.056.626,6	1.177.737,2	1.259.761,0	1.388.196,0	1,432,481.00
L	Real Estate	274.014,6	297.817,3	318.811,7	355.584,5	374,195.00
M,N	Jasa Perusahaan	69.258,5	75.725,3	82.453,6	90.302,3	98,169.60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329.408,9	350.207,4	366.763,0	384.280,7	438,156.30
P	Jasa Pendidikan	802.998,2	862.990,1	923.493,1	1.008.647,1	1,067,457.60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131.102,2	141.938,6	155.984,0	174.231,7	189,687.40
R,S, T,U	Jasa lainnya	386.663,5	413.640,8	439.721,9	476.944,2	518,484.30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		10.192.067,5	11.184.109,4	12.140.200,5	13.150.858,7	14,108,321.50

Sumber : BPS Kota Madiun

*) Angka sementara

Struktur lapangan usaha masyarakat Kota Madiun tetap bertumpu pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini dapat terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori ini terhadap total PDRB yang memberikan sumbangan terbesar selama tahun 2015-2019. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/ lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Tabel I.10
Perkembangan PDRB Kota Madiun Menurut Harga Konstan
Tahun 2015-2019

Kategori		NILAI PDRB ADHK (Rp. JUTA)				
		2015	2016	2017	2018	2019*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	75.389,8	76.374,6	75.018,4	72.663,3	75,634.0
B	Pertambangan dan Penggalian	2.039,0	2.077,9	2.125,9	2.148,6	2,200.5
C	Industri Pengolahan	1.448.902,0	1.553.358,8	1.677.594,5	1.757.359,9	1,878,541.2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.024,1	7.295,2	7.653,3	8.083,5	8,610.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.381,8	19.084,3	20.389,4	21.294,6	22,256.2
F	Konstruksi	548.471,1	572.823,2	604.746,4	636.993,4	647,196.1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.979.784,5	2.080.949,4	2.202.184,4	2.333.116,8	2,515,131.3
H	Transportasi dan Pergudangan	242.757,2	260.069,3	281.347,3	303.628,2	332,996.8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	407.814,0	437.587,7	470.288,2	504.321,3	559,236.8
J	Informasi dan Komunikasi	1.332.551,5	1.421.031,9	1.517.253,9	1.617.457,4	1,671,410.6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	780.748,8	836.281,7	868.721,0	933.812,2	947,538.7
L	Real Estate	217.675,2	229.959,0	239.665,2	255.826,4	263,019.0
M,N	Jasa Perusahaan	61.455,1	65.102,8	69.233,1	74.912,0	77,362.4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	281.384,6	289.960,1	297.094,3	310.961,0	322,375.7
P	Jasa Pendidikan	623.549,4	655.602,4	685.126,0	727.149,8	768,654.8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107.794,6	114.103,3	120.873,7	131.001,3	139,551.3
R,S, T,U	Jasa lainnya	319.713,7	333.035,5	346.821,7	362.852,6	392,098.8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8.455.436,	8.954.697,1	9.486.136,6	10.053.582,4	10,623,814.3

Sumber : BPS Kota Madiun

*) Angka Sementara

Tabel I.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2015-2019 (%)

Kategori		2015	2016	2017	2018	2019*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,31	-1,78	1,78	-0.94
B	Pertambangan dan Penggalian	1,98	1,91	2,31	1,07	2.41
C	Industri Pengolahan	6,51	7,21	8,00	7,01	4.64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,73	3,86	4,91	5,45	6.69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,58	3,82	6,84	4,44	4.52
F	Konstruksi	5,48	4,44	5,57	2,03	4.90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,48	5,11	5,83	7,54	6.20
H	Transportasi dan Pergudangan	6,78	7,13	8,18	8,48	9.11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,28	7,30	7,47	9,23	8.86
J	Informasi dan Komunikasi	8,13	6,64	6,77	5,34	4.58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,52	7,11	3,88	4,08	4.79
L	Real Estate	6,76	5,64	4,22	3,57	5.96
M,N	Jasa Perusahaan	8,41	5,94	6,34	5,31	6.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,05	2,46	4,48	3.85
P	Jasa Pendidikan	6,30	5,14	4,50	4,21	7.65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,35	5,85	5,93	7,38	7.52
R,S,T, U	Jasa lainnya	4,28	4,17	4,14	5,74	6.92
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,15	5,90	5,93	5,98	5.69

Sumber : BPS Kota Madiun

*) Angka Sementara

Jika dilihat pada tahun 2019, pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor transportasi dan pergudangan (9,11%), disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (8,86%), dan sektor jasa pendidikan (7,65%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang lebih baik.

Pertumbuhan yang tinggi pada sektor transportasi dan pergudangan disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena ditopang oleh status Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan. Sedang sektor dengan pertumbuhan terendah yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (-0,94%).

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama

kurun waktu 2015-2019 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel I.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019**
Kota Madiun	6,15	5,91	5,93	5,96	5,69
Madiun	5,26	5,27	5,42	5,10	
Magetan	5,17	5,30	5,09	5,25	
Ngawi	5,08	5,21	5,07	5,26	
Pacitan	5,10	5,21	4,98	5,51	
Ponorogo	5,25	5,29	5,10	5,31	

Sumber : BPS Kota Madiun

***) Angka Sangat Sementara

4. Inflasi

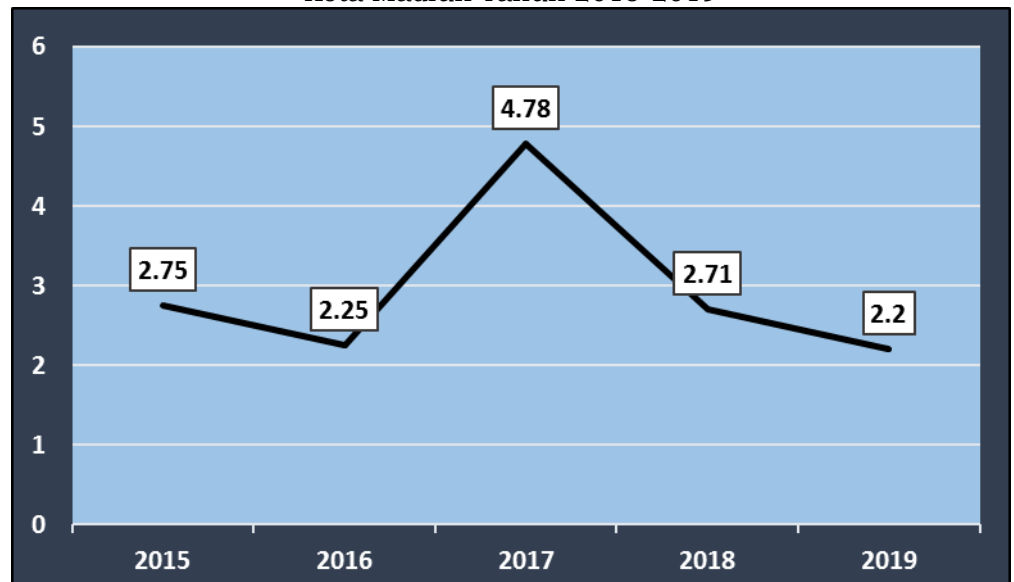
Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat.

Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu inflasi ringan ketika laju inflasi kurang dari 10% per tahun, inflasi sedang ketika laju inflasi antara 10-30% per tahun,

inflasi berat saat lajunya berada di kisaran 30-100% per tahun, dan inflasi sangat berat/hiperinflasi ketika laju inflasi lebih dari 100% per tahun. Pengukuran inflasi di Indonesia hanya dilakukan di 66 kota dan salah satunya adalah Kota Madiun yang dijadikan rujukan bagi beberapa daerah di sekitar Kota Madiun.

Grafik I.1
Perkembangan Tingkat Inflasi
Kota Madiun Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kota Madiun

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen pada kelompok Bahan Makanan sebesar 1,05 persen, kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa sebesar 0,59 persen, kelompok Kesehatan sebesar 0,23 persen, dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,17 persen. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga mengalami deflasi sebesar 0,01 persen, kelompok Sandang sebesar 0,06 persen dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,07 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2019 dan inflasi tahun ke tahun (Desember 2019 terhadap Desember 2018) masing-masing sebesar 2,20 persen.

Kenaikan Indeks Harga Konsumen di Kota Madiun dipicu oleh naiknya harga pada beberapa komoditas yang dominan diantaranya: telur ayam ras, tarip kereta api, bawang merah, pepaya, dan tomat sayur.

Berdasarkan kelompok komoditas, dari 7 (tujuh) kelompok yang ada, 4 (empat) kelompok mengalami inflasi dan 3 (tiga) kelompok mengalami deflasi. Kelompok Bahan Makanan memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,1992 persen, disusul kelompok Transportasi, Komunikasi dan jasa Keuangan sebesar 0,1007 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,0342 persen dan kelompok Kesehatan memberikan andil inflasi terendah sebesar 0,0131 persen. Kelompok yang mengalami deflasi tertinggi adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar dengan andil sebesar -0,0168 persen, disusul kelompok Sandang dengan andil sebesar -0,0036 persen dan kelompok Pendidikan Rekreasi dan Olah raga dengan andil sebesar -0,0006 persen.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Untuk menganalisis seberapa tinggi pembangunan manusia di suatu daerah dapat pula diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM terdiri dari tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Aspek kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup, aspek pendidikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedang aspek ekonomi ditunjukkan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Perhitungan IPM dalam ketiga aspek tersebut bukan hanya diterapkan di Indonesia tetapi juga menjadi rujukan negara-negara di dunia karena dianggap mampu merepresentasikan pembangunan manusia.

IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan di daerah tersebut. Selain itu, IPM juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi keefektifan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Dan untuk perkembangan IPM di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel I.13
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015-2019

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019**
Kabupaten Pacitan	64,92	65,74	66,51	67,33	68,16
Kabupaten Ponorogo	68,16	68,93	69,26	69,91	70,56
Kabupaten Madiun	69,39	69,67	70,27	71,01	71,69
Kabupaten Magetan	71,39	71,94	72,60	72,91	73,69
Kabupaten Ngawi	68,32	68,96	69,27	69,91	70,41
Kota Madiun	79,48	80,01	80,13	80,33	80,88
Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77	71,50

Sumber : BPS Kota Madiun

***) Angka Sangat Sementara

IPM Kota Madiun mengalami kenaikan secara signifikan selama rentang waktu lima tahun terakhir, dan terus meningkat setiap tahunnya. Capaian IPM Kota Madiun sebesar 79,48 persen pada 2015 silam, dan pada Tahun 2019 IPM Kota Madiun mencapai 80,88. IPM di atas 80 persen merupakan kategori sangat tinggi. Sedang, dibawah 60 masuk kategori rendah.

IPM Kota Madiun terus mengalami tren positif, dan diprediksi juga masih terjadi beberapa tahun kedepan. Hal itu dapat dilihat dari capaian sejumlah item yang mengalami tren serupa seperti bidang kesehatan dan pendidikan.

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) Kota Madiun juga mengalami peningkatan setiap tahun.

Angka Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2019 mencapai 72,75 tahun. Artinya, rata-rata masyarakat Kota Madiun dapat mencapai usia 72 tahun lebih. Capaian ini juga terus mengalami peningkatan sejak 2015 lalu yang angkanya hanya 72,41. Ini tak terlepas dari peran Pemerintah dalam bidang kesehatan. Baik sejak bayi hingga lansia. Posyandu balita dan lansia cukup berjalan baik.

Tabel I.14
Angka Harapan Hidup Tahun 2015-2019

Tahun	AHH
2015	72,41
2016	72,44
2017	72,48
2018	72,59
2019*	72,75

Sumber : BPS Kota Madiun

**) Angka sementara

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Angka Harapan Lama Sekolah menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Derajat pendidikan suatu daerah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduknya. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah penduduk suatu daerah, maka dapat diartikan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk daerah tersebut dan diyakini memiliki sumber daya manusia lebih berkualitas.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Madiun selama periode 2015-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015, angka HLS Kota Madiun hanya sebesar 14,06 tahun, kemudian meningkat setiap tahun menjadi 14,39 tahun pada tahun 2019. HLS sebesar 14,39 tahun pada tahun 2019 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 14,39 tahun atau telah mencapai pendidikan

di level perguruan tinggi. HLS di Kota Madiun masih berada di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kota Madiun harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kota Madiun.

Selama periode 2015-2019, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kota Madiun pada tahun 2015 adalah sebesar 11,08 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 11,13 tahun pada tahun 2019. Berarti bahwa rata-rata penduduk di Kota Madiun baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA. Angka RLS Kota Madiun pada tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 7,59 tahun. Walaupun angka RLS Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan angka RLS Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Madiun harus terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Berbagai pelayanan pendidikan memang menjadi prioritas Pemerintah Kota Madiun. Peningkatan akses masyarakat pada layanan pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat. Wajib belajar (Wajar) sembilan tahun hingga Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM). Sarana dan prasarana pendidikan juga terus ditingkatkan diantaranya adalah wifi gratis di sejumlah fasilitas umum. Harapannya, masyarakat dapat meningkatkan kapasitas pendidikan secara mandiri dengan akses informasi yang mudah. Disisi lain, juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dimana selain peningkatan akses pada layanan pendidikan, Kemendikbud juga merevitalisasi fungsi sekolah, baik secara infrastruktur fisik maupun nonfisik. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk pertama kalinya menggunakan zonasi. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meratakan kualitas pendidikan, salah satunya adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah.

Tabel I.15
Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kota Madiun Tahun 2015-2019

Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah
2015	14,06	11,08
2016	14,19	11,09
2017	14,20	11,10
2018	14,21	11,10
2019*	14,39	11,13

Sumber : BPS Kota Madiun

*) Angka sementara

Paritas Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah, karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding, untuk itu perlu dibuat standarisasi. Dengan standarisasi ini perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan. Kemampuan setiap orang untuk membeli/ mendapatkan barang dan jasa berbeda-beda tergantung dari pendapatan dan kebutuhannya.

Tabel I.16
Paritas Daya Beli (Rp) Kota Madiun
Tahun 2015-2019

Tahun	Daya Beli
2015	14.723
2016	15.300
2017	15.415
2018	15.616
2019*	16.040

Sumber : BPS Kota Madiun

**) Angka sementara

Perekonomian yang semakin membaik berdampak pada naiknya kemampuan daya beli masyarakat Kota Madiun. Tren peningkatan perekonomian tersebut tercemin dari peningkatan rata-rata pengeluaran riil per kapita. Dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dari 14.723 rupiah pada tahun 2015 menjadi 16.040 rupiah pada tahun 2019, sehingga mengalami kenaikan sebesar 1.317 rupiah.

6. Kemiskinan

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Berbagai upaya nyata di berbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun demi tercapainya upaya pengentasan kemiskinan, mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil.

Tabel I.17
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Madiun

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2015	359.771	8.550	4,89
2016	376.956	9.050	5,16
2017	404.959	8.700	4,94
2018	446.525	7.920	4,49
2019*	468.304	7.690	4,35

Sumber : BPS Kota Madiun

Perkembangan penduduk miskin di Kota Madiun menunjukkan hasil yang menggembirakan dilihat dari terus menurunnya baik jumlah maupun persentase penduduk miskin selama periode 2015-2019. Hal ini tentunya disebabkan adanya pembangunan yang terus dilaksanakan dan memberikan hasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Garis kemiskinan Kota Madiun pada Tahun 2019 berada pada level Rp 468.304,- per Kapita per Bulan atau meningkat hampir 24 ribu rupiah dibanding Garis kemiskinan pada tahun 2019. Walaupun terjadi kenaikan Garis Kemiskinan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 di Kota madiun justru berkurang 230 jiwa dari 2018 sebesar 7,92 ribu orang (4,49%) menjadi 7,69 ribu orang (4,35%) di 2019.

Tabel I.18
Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di wilayah karesidenan Madiun

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019*
Kabupaten Pacitan	92,08	85,53	85,26		
Kabupaten Ponorogo	103,22	102,06	99,03		
Kabupaten Madiun	84,74	85,97	83,43		
Kabupaten Magetan	71,16	69,24	65,87		
Kabupaten Ngawi	129,32	126,65	123,76		
Kota Madiun	8,55	9,05	8,70	7,92	7,69

Sumber : BPS Kota Madiun

Tren penurunan kemiskinan di Kota Madiun hingga tahun 2019 terus menunjukkan kinerja yang sangat baik karena pada tahun ini kembali terjadi penurunan persentase penduduk miskin hingga level 4,35%, meski pada 2015 dan 2016 sempat mengalami sedikit kenaikan. Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun akan mengalami peningkatan lagi jika banyak penduduk Kota Madiun masuk dalam golongan rawan miskin (*vulnerable*). Golongan *vulnerable* merupakan penduduk yang pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena adanya guncangan misalnya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok naik dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penduduk miskin.

Tabel I.19
Kantong Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2019

Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk Miskin (Jiwa)
Kecamatan Kartoharjo	57.748	10,73	2.368
1. Kelurahan Kartoharjo	5.215	0,94	359
2. Kelurahan Oro oro ombo	6.922	0,81	292
3. Kelurahan Klegen	8.871	0,84	253
4. Kelurahan Kanigoro	9.328	1,62	291
5. Kelurahan Pilangbango	4.606	1,21	315
6. Kelurahan Rejomulyo	10.797	2,03	432
7. Kelurahan Sukosari	3.106	0,55	114
8. Kelurahan Tawangrejo	4.224	1,77	159
9. Kelurahan Kelun	4.679	0,96	153
Kecamatan Manguharjo	63.017	10,04	2.655
1. Kelurahan Nambangan kidul	10.322	1,02	456
2. Kelurahan Nambangan lor	13.411	0,98	719

Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk Miskin (Jiwa)
3. Kelurahan Manguharjo	7.958	1,4	344
4. Kelurahan Pangongangan	3.706	0,61	254
5. Kelurahan Winongo	7.861	2,00	310
6. Kelurahan Madiun lor	6.898	0,73	208
7. Kelurahan Patihan	5.480	0,84	149
8. Kelurahan Ngegong	3.156	1,34	111
9. Kelurahan Sogaten	4.225	1,12	104
Kecamatan Taman	89.350	12,46	3.439
1. Kelurahan Josenan	7.483	1,06	487
2. Kelurahan Kuncen	1.434	1,83	93
3. Kelurahan Demangan	9.551	1,26	603
4. Kelurahan Banjarejo	9.179	1,92	463
5. Kelurahan Pandean	10.641	0,32	261
6. Kelurahan Kejuron	9.951	1,59	378
7. Kelurahan Taman	13.172	2,02	374
8. Kelurahan Mojorejo	11.669	1,54	427
9. Kelurahan Manisrejo	16.270	0,92	353

Sumber data : Dinas Sosial dan PPPA

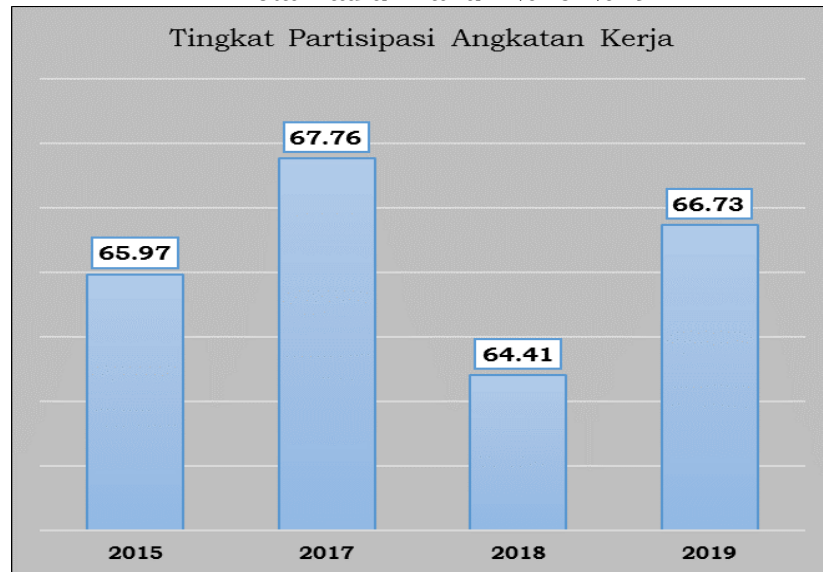
7. Ketenagakerjaan

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Salah satu indikator yang biasa dipakai dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap di lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

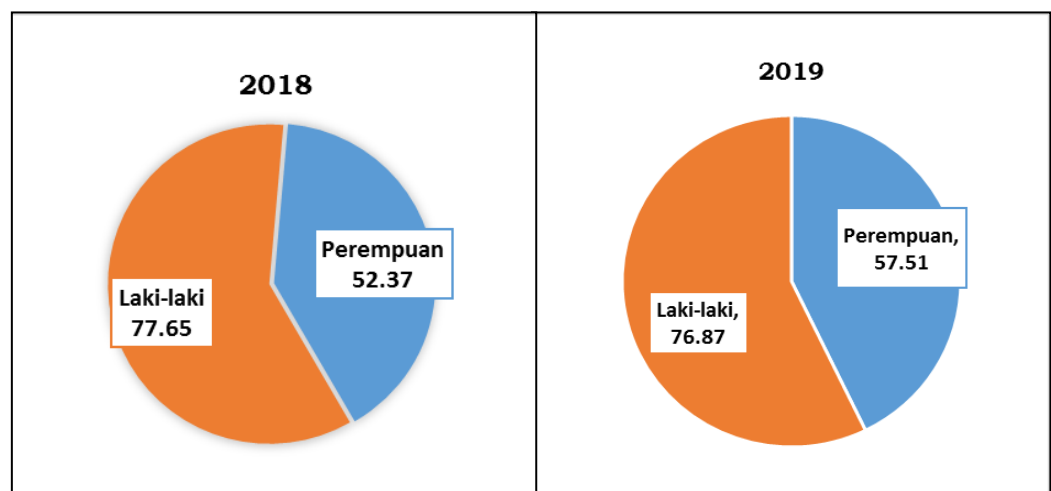
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah situasi yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.

Grafik I.2
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Madiun Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kota Madiun

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Madiun dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2015 adalah sebesar 65,95 persen menjadi 66,73 persen pada tahun 2019. TPAK merupakan indikator yang menggambarkan seberapa banyak dari penduduk usia kerja yang aktif bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Daya serap pasar kerja terbatas serta masalah permintaan tenaga kerja dengan tingkat keahlian khusus menyebabkan banyaknya angkatan kerja tidak terserap atau menganggur.



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) jika dilihat berdasarkan jenis kelamin seperti grafik di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 ke tahun 2019 TPAK laki-laki selalu lebih besar

dibandingkan perempuan, TPAK laki-laki pada tahun 2018 sebesar 77,66 persen sedangkan perempuan hanya 52,37 persen, demikian juga pada tahun 2019 TPAK laki laki sebesar 76,87 persen sementara perempuan hanya 57,51 persen. TPAK perempuan pada tahun 2019 mencapai 57,51 persen menggambarkan bahwa dari 100 orang usia kerja perempuan (perempuan 15 tahun ke atas) 58 orang masuk dalam kategori angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) sedangkan 42 orang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya selain kegiatan pribadi).

✚ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

TPT di Kota Madiun tercatat 5,1 di tahun 2015 dan terus mengalami penurunan dan pada tahun 2019 TPT Kota Madiun mencapai 4,01 persen, meskipun TPT ini sedikit mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2018 yang TPT nya 3,85 persen atau naik sebesar 0,16 persen.

Grafik I.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Madiun Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS Kota Madiun

Kenaikan angka TPT di Kota Madiun terjadi karena jumlah angkatan kerja yang ada juga mengalami kenaikan pada periode yang sama, ada pergeseran dari mereka yang statusnya bukan angkatan kerja pada tahun 2018 menjadi angkatan kerja pada tahun 2019.

Lebih detailnya penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2018 sebagian besar adalah penduduk yang bekerja dengan jumlah mencapai 86.875 jiwa, mengurus rumah tangga sebesar 32.708 jiwa, sekolah sebesar 11.526 jiwa, lainnya 5.698 jiwa dan pengangguran sebesar 3.483 jiwa. Sedangkan untuk kondisi tahun 2019 penduduk bekerja sebesar 90.329 jiwa, mengurus rumah tangga sebesar 28.445, sekolah 13.199, lainnya 5.273 dan pengangguran 3.776 jiwa.

Tabel I.20
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut kegiatan Agustus
Tahun 2018-2019

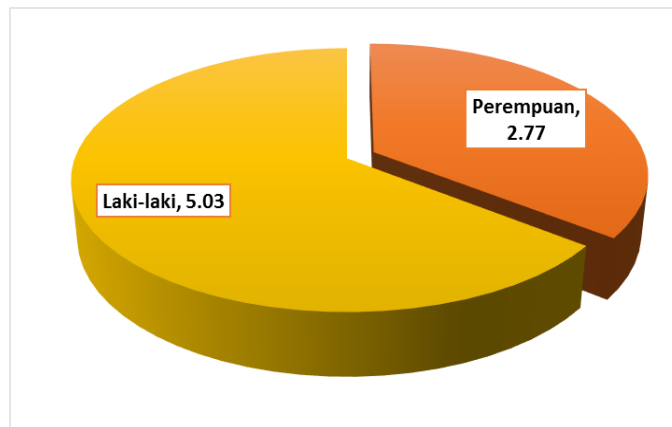
Kegiatan	2018	2019
Angkatan Kerja	90.358	94.105
- Bekerja	86.875	90.329
- Pengangguran	3.483	3.776
Bukan Angkatan Kerja	49.932	46.917
- Sekolah	11.526	13.199
- Mengurus Rumah tangga	32708	28.445
- Lainnya	5.698	5.273
Jumlah	140.290	141.022

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Kenaikan jumlah angkatan kerja juga dibarengi dengan jumlah Bekerja dan pengangguran yang naik pada tahun 2019 jumlah penduduk bekerja naik sebesar 3.454 jiwa atau naik sebesar 3.97 persen. Sedangkan pengangguran naik dari 3.483 menjadi 3.776 atau naik sebesar 293 jiwa atau 8.41 persen.

Penurunan bukan angkatan kerja dari 2018 ke 2019 dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Penduduk yang mengurus rumah tangga turun dari 32.708 jiwa menjadi 28.445 turun sebesar 4.263 jiwa atau 13,03 persen. Untuk penduduk yang melakukan kegiatan lainnya turun dari 5.698 menjadi 5.273, turun sebesar 425 jiwa atau 7,45 persen. Sedangkan untuk penduduk sekolah justru mengalami kenaikan sebesar 1.673 jiwa (14,51 persen) atau naik dari 11.526 menjadi 13.199 jiwa.

Untuk tahun 2019 keadaan ketenagakerjaan apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin maka kelompok angkatan kerja lebih didominasi oleh laki-laki dengan penduduk bekerja laki laki yaitu sebanyak 49.032 jiwa sedangkan pekerja perempuan hanya 41.297 jiwa. Untuk pengangguran juga lebih banyak pengangguran laki-laki daripada pengangguran perempuan yaitu laki laki sebanyak 2.598 dan perempuan 1.178. Sedangkan perempuan lebih mendominasi pada kelompok bukan angkatan kerja yaitu pada kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.



Sumber Data : BPS Kota Madiun

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin maka TPT laki-laki pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan TPT perempuan. Dari 100 orang angkatan kerja laki-laki yang berusia 15 tahun keatas ada sekitar 5 orang yang menganggur sedangkan pada perempuan dari 100 orang angkatan kerja perempuan hanya ada 3 orang yang menganggur.

Jumlah pengangguran terbuka tahun 2019 sejumlah 3.776 orang tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

No	Kategori	Jumlah
1	Tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan	2.735
2	Tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha	272
3	Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan	171
4	Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja	598

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Madiun

F. Sistematika

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun Tahun 2019, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/479/OTDA tanggal 22 Januari 2020 Perihal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), bahwa peraturan pelaksana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum terbit, maka dalam penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2019 menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian tentang Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah (Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan), Data Umum Daerah (Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Ekonomi, IPM, Angka Kemiskinan dan Ketenagakerjaan) Kota Madiun.

BAB II : PENJABARAN APBD

Uraian tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2019.

BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Uraian tentang Implementasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Kebijakan Strategis Tahun 2019 serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2018.

BAB IV : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Uraian tentang implementasi kebijakan dan hasil-hasil pembangunan terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Tahun 2019.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Pemerintah Kota Madiun telah merumuskan tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan daerah yaitu meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan profesional. Dari tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan meningkatnya kualitas hasil perencanaan.

Berkaitan dengan sasaran strategis tersebut, dikembangkan beberapa indikator sebagai cerminan kinerja keuangan daerah. Pengukuran capaian kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja tujuan/sasaran yaitu dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi anggaran. Berikut ini disajikan tabel data tentang realisasi APBD.

Tabel II.1
Ringkasan Realisasi APBD
Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
I	Pendapatan	1.007.446.240.137,64	1.100.017.042.506,00	1.094.312.970.048,58	99,49
1	PAD	230.847.977.146,73	226.448.081.506,00	252.048.556.223,83	111,31
2	Dana Perimbangan	678.417.066.007,00	733.188.381.000,00	681.537.181.650,00	92,96
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	98.181.196.983,91	140.380.580.000,00	160.794.406.072,37	114,54
II.	Belanja	1.036.658.830.595,88	1.377.795.868.937,22	1.148.509.555.883,37	83,36
1	Belanja Tidak Langsung	407.189.652.660,00	544.763.013.542,14	406.498.199.329,08	74,62
2	Belanja Langsung	629.469.177.935,88	833.032.855.395,08	742.013.356.554,29	89,07
	Surplus/ (defisit)	(29.212.590.458,24)	(277.778.826.431,22)	(54.129.411.307,17)	19,49
III	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	279.278.826.431,22	100
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100
	Pembiayaan Netto	308.491.416.889,46	277.778.826.431,22	277.778.826.431,22	100
	Sisa Lebih Anggaran (SILPA)	279.278.826.431,22		223.649.415.124,05	

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Rumusan tujuan/sasaran strategis tersebut diturunkan dan dirumuskan dalam kebijakan umum APBD. Penetapan kebijakan umum APBD meliputi penetapan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengacu pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang ingin dicapai dengan asumsi-asumsi perkembangan kondisi makro ekonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Bahwa peranan sektor Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan, tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan baik ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kota Madiun. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana kota yang ada seperti saat ini.

Untuk itu, kedepan, prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di kota Madiun.

Dalam merencanakan pendapatan daerah, arah kebijakan pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a. perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama dua tahun terakhir, serta potensi dari sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. optimaliasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
- d. meningkatkan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- e. meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
- f. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
- g. melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Penetapan formulasi kebijakan di atas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Potensi Pendapatan Daerah :

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Dengan adanya ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah, serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pemerintah Kota Madiun telah berupaya melaksanakannya dengan menetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) beserta perubahannya dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang BPHTB ;
2. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah beserta perubahannya dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah ;
3. Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah beserta Perubahannya dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan beserta perubahannya dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang PBB Perkotaan.

Secara umum, komponen PAD Kota Madiun memiliki tren yang fluktuatif. Meskipun demikian, pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 target PAD Kota Madiun terus mengalami peningkatan ditunjang oleh peningkatan pada komponen pajak daerah

dan Lain-lain PAD yang Sah utamanya setelah puskesmas sudah menjadi BLUD.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1) Pajak Daerah

Adalah pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel ;
- b. Pajak Restoran ;
- c. Pajak Hiburan ;
- d. Pajak Reklame ;
- e. Pajak Penerangan Jalan ;
- f. Pajak Parkir ;
- g. Pajak Air Tanah ;
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Retribusi Daerah

Penerimaan dari Retribusi Daerah masih dimungkinkan peluang untuk pengembangannya, utamanya Retribusi Jasa Usaha (Pemanfaatan Aset/Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan jenis-jenis retribusi lain yang memberikan jasa, manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan retribusi tidak membebani masyarakat, bahkan sebaliknya masyarakat memperoleh manfaatnya.

Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kontribusi terhadap PAD Kota Madiun dari retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kesehatan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan

persampahan/ kebersihan, retribusi pelayanan pasar meliputi retribusi pasar, fasilitas pendukung pasar, biaya administrasi pengelolaan dan sewa bangunan/toko.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Kontribusi terhadap PAD Kota Madiun dari retribusi jasa usaha ini terdiri dari retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi rumah potong hewan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kontribusi Retribusi perijinan tertentu ini terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan/ keramaian dan retribusi izin trayek.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah yang merupakan suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa dan menyelenggarakan pemanfaatan umum.

Pendapatan yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD masuk dalam kategori Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kota Madiun diperoleh dari : Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah

BPR Bank Daerah, Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dan penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun pada Bank Jatim.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba dari BUMD dan investasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri hasil penjualan aset daerah, penjualan hasil perikanan, pendapatan jasa giro atas rekening kas umum daerah dan pemegang kas, bagi hasil laba Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK), pendapatan angsuran/cicilan bangunan pasar, pendapatan BLUD dan pendapatan lain-lain yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja, temuan inspektorat dan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak
 - 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam
 - 3) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 5) Dana Bagi Hasil Cukai
-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan kelompok pendapatan yang menampung pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

- 1) Hibah
- 2) Dana Darurat
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
- 4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
- 5) Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

2. Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Target dan realisasi PAD pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel II.2
Target dan Realisasi PAD Kota Madiun
Tahun 2018 s.d. 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
PAD	230.847.977.146,73	226.448.081.506,00	252.048.556.223,83	111,31
1. Pajak Daerah	83.454.704.361,41	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	110,62
2. Retribusi Daerah	19.138.960.648,50	18.471.738.200,00	20.301.325.919,00	109,90
3. Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.365.402.573,59	14.641.711.306,00	14.641.711.340,55	100,00
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114.888.909.563,23	111.002.632.000,00	126.028.327.308,83	113,54

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah, semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk melaksanakan pembangunan daerahnya, termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah :

1) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp 83.454.704.361,41. Adapun realisasi tahun 2019 sebesar Rp 91.077.191.655,45. Terdapat kenaikan sebesar 9,13%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Anggaran tahun 2019 sebesar Rp 82.332.000.000,00 terealisasi 110,62%.

Berikut realisasi komponen pajak daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2018 s.d 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
1	Pajak Hotel	6.194.574.076,00	6.505.000.000,00	6.626.179.761,00	101,86
2	Pajak Restoran	9.105.087.235,13	10.750.000.000,00	12.986.705.054,18	120,81
3	Pajak Hiburan	1.193.681.396,00	1.802.000.000,00	2.332.473.974,00	129,44
4	Pajak Reklame	2.786.643.986,33	1.500.000.000,00	1.837.373.634,87	122,49
5	Pajak Penerangan Jalan	19.722.287.098,64	20.125.000.000,00	20.627.903.089,64	102,50
6	Pajak Parkir	1.619.842.220,00	1.750.000.000,00	1.911.580.014,00	109,23
7	Pajak Air Tanah	314.745.611,31	300.000.000,00	330.002.129,20	110,00
8	Pajak BPHTB	21.964.631.908,00	20.100.000.000,00	23.753.115.140,56	118,17
9	PBB	20.553.210.830,00	19.500.000.000,00	20.671.858.858,00	106,01
	J u m l a h	83.454.719.361,41	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	110,62

Sumber : BPKAD Kota Madiun

2) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp 19.138.960.648,50. Adapun realisasi tahun 2019 sebesar Rp 20.301.325.919,00. Ada kenaikan sebesar 6,07%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 18.471.738.200,00 terealisasi 109,90%.

Kenaikan ini didukung oleh semakin meningkatnya tanggungjawab wajib retribusi untuk membayar atas pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun terhadap jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.

Perincian Retribusi Daerah pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel II.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun 2018 s.d 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	202.595.500,00	210.000.000,00	227.944.000,00	108,54
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.444.118.500,00	3.201.000.000,00	2.761.329.000,00	86,26
Retribusi Pelayanan Pasar	4.088.180.471,00	3.810.190.000,00	4.170.236.890,00	109,45
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	752.609.600,00	505.000.000,00	474.996.800,00	94,06
Retribusi Tera Ulang	17.427.500,00	61.060.000,00	67.322.500,00	110,27
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.882.639.067,50	7.445.420.200,00	8.442.093.638,00	113,39
Retribusi Tempat Khusus Parkir	717.042.500,00	823.920.000,00	992.301.956,00	120,44
Retribusi Rumah Potong Hewan	53.286.000,00	52.700.000,00	40.418.000,00	76,69
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.064.714.410,00	860.468.000,00	1.188.443.910,00	138,12
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.763.945.500,00	1.500.000.000,00	1.934.259.225,00	128,95
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek	2.401.600,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
J u m l a h	19.138.960.648,50	18.471.738.200,00	20.301.325.919,00	109,90

Sumber : BPKAD Kota Madiun

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2018 adalah sebesar Rp 13.365.402.573,59. Adapun realisasi tahun 2019 sebesar Rp 14.641.711.340,55. Ada kenaikan sebesar 9,55%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target anggaran tahun 2019 sebesar Rp 14.641.711.306,00 terealisasi 100%.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada kurun tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh realisasi atas bagian laba penyertaan modal BUMD PDAM, BPR Bank Daerah dan PD Aneka Usaha Kota Madiun yang telah memenuhi kewajibannya atas setoran PAD berdasarkan laporan keuangan audited tahun 2018.

Perincian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel II.5
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 s.d. 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
1	P D A M	5.670.606.735,00	5.711.547.090,00	5.711.547.090,00	100,00
2	PD. BPR Bank Daerah	1.374.749.943,89	2.121.736.367,05	2.121.736.367,05	100,00
3	PD. Aneka Usaha	407.804.664,00	693.742.565,45	693.742.600,00	100,00
4	Bank Jatim	5.912.241.230,70	6.114.685.283,50	6.114.685.283,50	100,00
	Jumlah	13.365.402.573,59	14.641.711.306,00	14.641.711.340,55	100,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipisahkan tahun 2018 dalah sebesar Rp 114.888.909.563,23. Adapun realisasi tahun 2019 sebesar Rp 126.028.327.308,83. Ada kenaikan sebesar 9,64%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target anggaran tahun 2019 sebesar Rp 111.002.632.000,00 terealisasi sebesar 113,54%.

Realisasi ini dipengaruhi oleh realisasi dari hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan, pendapatan jasa giro kasda, pendapatan bunga deposito, Pendapatan dari angsuran/cicilan bangunan, hasil pengelolaan dana bergulir dan pendapatan lain-lain dari pengembalian belanja atas realisasi belanja tahun sebelumnya.

Perincian realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel II.6
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Tahun 2018 s.d 2019

S K P D	U r a i a n	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
BPKAD	1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.228.868.784,00	17.500.000,00	25.017.000,00	142,95
	2. Jasa Giro (Kasda + Pemegang Kas)	1.834.243.072,84	1.500.000.000,00	1.626.637.139,79	108,44
	3. Pendapatan Bunga Deposito	14.890.136.985,44	9.000.000.000,00	18.031.369.861,98	200,35
	4. Pendapatan atas denda keterlambatan pekerjaan	329.598.270,00	0,00	847.441.442,46	0,00
	5. Pendapatan atas denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	3.682,00	0,00
	6. Hasil pengelolaan Dana Bergulir (LKK)	126.325.374,67	100.000.000,00	125.232.086,26	125,23
	7. Pendapatan Lain-Lain terdiri dari :				
	• Pendapatan dari Pengembalian Belanja	45.058.566,00	0,00	104.875.185,41	0,00
	• Pendapatan Lain lain	1.536.575.426,04	0,00	2.121.099.055,84	0,00
Dinas Pasar	Angsuran/Cicilan Penjualan Bangunan	77.033.072,00	192.000.000,00	83.502.300,00	43,49
RSUD	Pendapatan BLUD	84.813.324.736,96	90.000.000.000,00	92.096.175.060,81	102,33
Dinas Kesehatan	Pendapatan BLUD	10.007.739.510,96	10.193.132.000,00	10.966.974.494,28	107,59
	J u m l a h	114.888.909.563,23	111.002.632.000,00	125.961.152.781,21	113,48

Sumber : BPKAD Kota Madiun

b. Dana Perimbangan

Target dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel II.7
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Madiun
Tahun 2018 s.d. 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Dana Perimbangan	678.417.066.007,00	733.188.381.000,00	681.537.181.650,00	92,96
1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	92.855.131.348,00	125.628.352.000,00	82.701.952.831,00	65,83
a. Bagi Hasil Pajak	25.390.798.853,00	25.371.694.000,00	16.076.390.385,00	63,36
b. Bagi Hasil Bukan Pajak. SDA	67.464.332.495,00	86.329.381.000,00	52.685.578.633,00	61,03
c. Dana Bagi Hasil Cukai	0,00	13.927.277.000,00	13.939.983.813,00	100,09
2. Dana Alokasi Umum	501.753.246.649,00	522.596.024.000,00	522.596.024.000,00	100,00
3. Dana Alokasi Khusus	70.689.542.010,00	84.964.005.000,00	76.239.204.819,00	89,73
4. Dana Bagi Hasil Cukai	13.119.146.000,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2018 adalah sebesar Rp 25.390.798.853,00. Adapun realisasi tahun 2019 sebesar Rp 16.076.390.385,00. Ada penurunan sebesar 36,68%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 25.371.694.000,00 terealisasi lebih rendah sebesar 63,36%.

Penurunan ini disebabkan oleh Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena sangat tergantung realisasi pajak Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil pajak merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian dana bagi hasil pajak pada kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel II.8
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun 2018 s.d 2019

U R A I A N	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.049.484.520,00	4.475.453.000,00	3.507.795.600,00	78,38
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 Wajib Pajak Orang	21.341.314.333,00	20.896.241.000,00	12.568.594.785,00	60,15
J u m l a h	25.390.798.853,00	25.371.694.000,00	16.076.390.385,00	63,36

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 sebesar Rp 3.507.795.600,00 atau 78,38% lebih rendah dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp 4.475.453.000,00.

Hal ini dipengaruhi oleh Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak PBB merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena sangat tergantung realisasi pajak Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil pajak merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Tahun 2018 sebesar Rp 12.568.594.785,00 atau 60,15% lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp 20.896.241.000,00.

Hal ini dipengaruhi oleh Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak orang merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena sangat tergantung realisasi pajak Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil pajak merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Perincian dana bagi hasil bukan pajak kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel II.9
Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak
Tahun 2018 s.d 2019

U R A I A N	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	250.178.053,00	234.970.000,00	140.982.000,00	60,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	701.234.591,00	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00
Bagi Hasil Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	65.667.268.617,00	84.265.715.000,00	51.351.710.360,00	60,94
Bagi Hasil Minerba	814.447.240,00	811.364.000,00	567.954.800,00	70,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	31.203.994,00	33.739.000,00	34.775.673,00	103,07
J u m l a h	67.464.332.495,00	86.329.381.000,00	52.685.587.633,00	61,03

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2018 adalah sebesar Rp 67.464.332.495,00. Adapun realisasi tahun 2019 sebesar Rp 52.685.587.633,00. Ada penurunan sebesar 21,91% apabila dibandingkan dengan target anggaran tahun 2019 sebesar Rp 86.329.381.000,00 terealisasi sebesar 61,03%.

Hal ini dipengaruhi oleh Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil bukan pajak merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena sangat tergantung realisasi pendapatan Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil bukan pajak merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

- Realisasi Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Tahun 2019 adalah sebesar Rp 140.982.000,00 atau terealisasi sebesar 60% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 234.970.000,00.
- Realisasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Tahun 2019 adalah sebesar Rp 590.155.800,00 atau sebesar 60,00% yang

berarti lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 983.593.000,00.

- Realisasi Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2019 adalah sebesar Rp 51.351.710.360,00 atau sebesar 60,94% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 84.265.715.000,00.
- Realisasi Bagi Hasil Minerba Tahun 2019 adalah sebesar Rp 567.954.800,00 atau sebesar 70,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 811.364.000,00.
- Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun 2019 adalah sebesar Rp 34.775.673,00 atau terealisasi sebesar 103,07% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 33.739.000,00.

3) Dana Bagi Hasil Cukai

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai tahun 2018 adalah sebesar Rp 13.119.146.000,00. Adapun realisasi tahun 2019 sebesar Rp 13.939.983.813,00, atau terealisasi sebesar 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran tahun 2019 sebesar Rp 13.927.277.000,00.

Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil cukai merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil cukai merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

4) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2018 adalah sebesar Rp 501.753.246.649,00. Adapun realisasi tahun 2019 sebesar Rp 522.596.024.000,00. Ada kenaikan sebesar 4,15%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target anggaran tahun 2019 sebesar Rp 522.596.024.000,00 terealisasi sebesar 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh pendapatan yang berasal dari dana alokasi umum merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi umum merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menyajikan

data-data berkaitan dengan penghitungan dana alokasi umum namun tidak berhak menentukan seberapa besar dana yang akan diterima.

5) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 adalah sebesar Rp 70.689.542.010,00. Adapun realisasi tahun 2019 sebesar Rp 76.239.204.819,00. Ada kenaikan sebesar 7,85%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target anggaran tahun 2019 sebesar Rp 84.964.005.000,00 terealisasi sebesar 89,18%.

Hal ini dipengaruhi oleh pendapatan yang berasal dari dana alokasi umum merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi khusus merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian Dana Alokasi Khusus pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel II.11
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Tahun 2018 s.d. 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
REGULER :				
Jalan	0,00	9.896.100.000,00	8.953.419.000,00	90,47
Kesehatan	0,00	957.238.000,00	4.467.310.349,00	466,69
Bidang Keluarga Berencana	0,00	298.924.000,00	0,00	0,00
Bidang Rujukan	0,00	1.452.549.000,00	0,00	0,00
NON REGULER :				
DAK Penurunan Stunting	0,00	156.052.000,00	0,00	0,00
DAK Pengendalian Penyakit	0,00	1.761.830.000,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
NON FISIK :				
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.080.160.000,00	4.456.800.000,00	3.948.600.000,00	88,60
Tunjangan Profesi Guru	60.594.945.660,00	59.959.146.000,00	54.369.533.120,00	90,68
Tambahan penghasilan Guru	181.500.000,00	200.350.000,00	142.850.000,00	71,30
Bantuan Operasional Kesehatan	4.508.014.850,00	3.332.562.000,00	2.678.626.700,00	80,38
Jaminan Persalinan	00,00	374.000.000,00	0,00	0,00
Jaminan Persalinan	00,00	374.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional KB	640.134.500,00	725.243.000,00	336.437.450,00	46,39
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	684.787.000,00	837.511.000,00	786.728.200,00	93,94
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	555.700.000,00	555.700.000,00	100,00
Jumlah	70.689.542.010,00	84.964.005.000,00	76.239.204.819,00	89,73

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana tersebut merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan kelompok pendapatan yang menampung pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Target dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel II.12
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun
Tahun 2018 s.d. 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	98.181.196.983,91	140.380.580.000,00	160.794.406.702,37	114,54
Pendapatan Hibah	19.028.068.367,91	19.356.661.000,00	19.202.124.769,37	99,20
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	78.161.078.616,00	64.366.614.000,00	84.934.976.933,00	131,96
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		55.542.726.000,00	55.542.726.000,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	992.050.000,00	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	100,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

1) Pendapatan Hibah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 bahwa Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018 mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD), akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah, jenis hibah, obyek hibah dana BOS, rincian obyek dana hibah BOS masing-masing satuan pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan. Realisasi Hibah Dana BOS pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 19.202.124.769,37 atau sebesar 99,20% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 19.356.661.000,00.

2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;

Perincian pendapatan bagi hasil pajak dari propinsi tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel II.13
Realisasi Dana Bagi hasil Pajak dari propinsi
Tahun 2018 s.d 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Bagi Hasil Pajak dari Kendaraan Bermotor/ PKB	24.305.453.345,00	16.600.776.000,00	27.502.812.146,00	165,67
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/ BBNKB	13.042.285.979,00	8.188.188.000,00	12.671.773.186,00	154,76
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/ PBB-KB	16.649.136.992,00	15.745.593.000,00	22.404.927.429,00	142,29
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	203.947.369,00	163.486.000,00	250.651.372,00	153,32
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	23.960.254.931,00	23.668.571.000,00	22.104.812.800,00	93,39
J u m l a h	78.161.078.616,00	64.366.614.000,00	84.934.976.933,00	131,96

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada kurun waktu tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan. Yaitu sebesar Rp. 78.161.078.616,00 pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan sebesar 8,67% menjadi Rp 84.934.976.933,00 pada tahun anggaran 2019. Atau sebesar 131,96% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 64.366.614.000,00.

Hal ini disebabkan Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan bagi hasil pajak dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi.

3) Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Realisasi Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya pada kurun waktu tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan. Yaitu sebesar Rp 992.050.000,00 pada tahun 2018 naik sebesar 12,35% menjadi Rp 1.114.579.000,00 pada tahun anggaran 2019. Atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 1.114.579.000,00.

Hal ini disebabkan Hal ini disebabkan Pendapatan yang berasal dari dana Bantuan keuangan dari Propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan bagi dana Bantuan keuangan dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi.

Uraian	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Penyelenggaraan pendidikan madraah diniyah dan guru swasta	476.850.000,00	476.850.000,00	476.850.000,00
Pelaksanaan hari aksara	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Puskesmas Rawat Inap standart	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Pemenuhan honor kinerja kepala guru/Tk/Paud Non PNS	163.200.000,00	163.200.000,00	163.200.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS (TK)	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
BOP Madin	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Peringkatan Hari Jadi Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS SD	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS SMP	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Pengembangan Taman Posyandu	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
Bantuan Propinsi Pendampingan Poskestren	0,00	121.029.000,00	121.029.000,00
Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Pusk.rawat Inap	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total	992.050.000,00	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Dinas Perhubungan terkait realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp2.762.060.000,00 atau sebesar 86,24% atau lebih kecil sebesar 13.76% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.201.000.000,00 ;
2. Dinas Perhubungan terkait Realisasi Pendapatan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp 474.996.800,00 atau sebesar 94,06% atau lebih kecil sebesar 5,94% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp505.000.000,00 ;
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terkait realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp40.418.000,00 atau sebesar 76,69% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp57.700.000,00 ;
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terkait realisasi pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan di tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp21.765.800,00 atau sebesar 74,91% atau lebih kecil sebesar 25,09% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.056.600,00 ;

Solusi

Telah diupayakan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Namun memperhatikan realisasi PAD tahun 2019, perlu adanya peningkatan kinerja pada OPD Penghasil khususnya dibebberapa sektor pendapatan yang tidak memenuhi target dan capaian ini menjadi evaluasi guna perbaikan pada tahun 2019, dengan upaya sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan terkait realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum menunjukkan bahwa hasil Lelang Parkir Tepi Jalan Umum Mundur, sehingga pelaksanaan dimulai pada 1 Pebruari 2019, setor ke Kas Daerah Mulai Bulan Maret 2019. Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum bulan Desember 2019 disetor pada Bulan Januari 2020.
Bulan Januari 2019 dikelola oleh Pengelola lama dan setoran hanya sebesar Rp. 94.560.000,00. Realisasi pemungutan retribusi Parkir di Tepi

Jalan Umum tercapai sebesar 86,29 %, hal ini karena Setoran Pihak ketiga sampai dengan bulan Desember hanya 10 bulan, Setoran Bulan Desember 2019 disetor bulan Januari 2020.

Telah ada pemenang Lelang Pengelolaan Parkir di tepi jalan Umum, sehingga Pendapatan Parkir di Tepi jalan Umum diharapkan dapat maksimal.

2. UPTD PKB belum mempunyai Penguji dengan Kualifikasi PT5, sehingga untuk menguji Kendaraan dengan JBB s/d 16.200 kg, Mobil Bus dengan tempat duduk 60, dan Mobil Barang n2 sumbu/lebih, Gandengan, Tempelan harus direkomendasi keluar daerah yang sudah mempunyai Penguji dengan Kualifikasi PT5.

Bulan Agustus baru mempunyai Penguji dengan Kualifikasi.

Dengan dihapusnya Retribusi Rekom Mutasi Numpang Uji Keluar, sehingga pendapatan Retribusi Rekom menjadi 0 ;

Dengan mengikutsertakan Diklat bagi Penguji untuk bisa mempunyai Kualifikasi PT5, Pelaksanaan Pemungutan Retribusi kendaraan wajib Uji telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan pencapaian target tidak lepas dari pelaksanaan operasi penertiban kendaraan angkutan umum telah meningkatkan kedisiplinan pemilik kendaraan angkutan umum untuk melaksanakan uji KIR ;

3. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tercapai 74,90%, lebih rendah dari target pendapatan yang ditetapkan dikarenakan tidak ada penyewa kolam dan kafe di Pasar Ikan, juga disebabkan karena kondisi kolam yang mulai rusak ;
 4. Pada awal tahun 2019 jagal di RPH sebanyak 2 orang, namun sejak maret 2019 berkurang tinggal 1 orang. Jagal 1 orang ini menyembelih 2 s/d 3 hari sekali, sehingga menyebabkan retribusi menurun.
-

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan untuk Tahun 2019 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD 2014-2019 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja.

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun ;
 2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
 3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
-

Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

a. Belanja Langsung

- 1) Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun.
- 2) Kebijakan belanja dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2016 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing SKPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja SKPD.
- 3) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai pengendalian, evaluasi dan sistem pelaporan yang akuntabel.
- 4) Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- 5) Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing SKPD.
- 6) Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.

Semuanya dianggarkan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Tidak Langsung

- 1) Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan publik;
 - 3) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai system pelaporan yang akuntabel;
 - 4) Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*;
-

- 5) Seluruh belanja tidak langsung harus dianggarkan dan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam alokasi belanja tidak langsung Kota Madiun pada tahun 2019 secara proporsional terdiri dari 92,39% untuk belanja pegawai; 3,63% untuk belanja hibah; 3,72% untuk belanja bantuan sosial dan 0,16% untuk belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Sedangkan untuk alokasi belanja bunga, belanja subsidi, belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa, nilainya nol sedangkan belanja tidak terduga 0,11%. Hal ini didasari perhitungan sesuai dengan kebutuhan belanja daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

Gambaran realisasi pengelolaan belanja tidak langsung pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.16
Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun 2018 s.d 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	407.189.651.557,00	544.763.013.542,14	406.498.199.329,08	74,62
Belanja Pegawai	371.699.267.636,00	446.900.407.136,00	375.303.304.387,00	83,98
Belanja Hibah	21.318.545.231,00	16.489.695.000,00	15.422.819.810,08	93,53
Belanja Bantuan Sosial	12.043.991.990,00	17.630.500.000,00	15.001.277.870,00	85,09
Belanja Bantuan Keuangan	2.127.846.700,00	651.920.000,00	651.920.000,00	100
Belanja Tidak Terduga	0,00	63.090.491.406,14	118.877.262,00	0,19

Sumber : BPKAD Kota Madiun

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai meliputi realisasi belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Madiun termasuk gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota dan anggota DPRD yang dibayarkan selama kurun tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019.

Pada tahun 2019 pemerintah Kota Madiun melanjutkan melaksanakan **remunerasi untuk Tahun yang kedua**, dalam rangka semakin meningkatkan kinerja pegawai, yaitu remunerasi akan diberikan dengan output kinerja yang terukur. Dengan adanya remunerasi ini diharapkan akan terjadi efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja pegawai serta peningkatan kinerja pemerintah Kota Madiun secara umum.

Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada kurun tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan. Yaitu sebesar Rp. 371.699.268.739,00 pada tahun 2018 dan naik sebesar 11,01% menjadi Rp 375.303.304.387,00 pada tahun anggaran 2019. Atau sebesar 83,98% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 446.900.407.136,00.

Perincian realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel II.17
Realisasi Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Pegawai
Tahun 2018 s.d. Tahun 2019

S K P D	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Dinas Pendidikan	180.114.940.238,00	212.081.812.866,00	181.739.167.319,00	85,69
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.008.750.322,00	2,310,152,000.00	2,088,357,987.00	90.40
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga	2.611.203.680,00	3,309,929,000.00	2,516,182,211.00	76.02
Dinas Kesehatan dan KB	25.239.223.748,00	26.780.554.000,00	26.786.820.062,00	100,02
RSUD	16.912.253.885,00	18.797.763.560,00	18.091.001.812,00	96,24
Dinas PU dan TR	6.686.088.897,00	7.680.082.600,00	6.757.047.780,00	87,98
Dinas Perkotaan	3.849.458.149,00	4.359.744.000,00	3.977.391.721,00	91,23
BAPPEDA	3.755.083.897,00	4.196.966.000,00	3.853.818.315,00	91.82
Dinas Perhubungan	5.478.684.650,00	6,183,448,500.00	5,066,708,163.00	81.94
Dinas Kominfo	3.440.261.963,00	3,714,289,500.00	3,745,371,661.00	100.84
Dinas Lingkungan Hidup	10.349.076.917,00	11,274,878,000.00	10,223,570,302.00	90.66
Dinas Dukcapil	3.013.499.861,00	5,157,955,064.00	3,163,683,946.00	61.34
Dinas Tenaga Kerja	2.726.015.298,00	3,928,600,000.00	2,626,764,922.00	66.86
Dinas Sosial, PP dan PA	3.482.054.171,00	5,058,728,600.00	3,395,295,024.00	67.12

S K P D	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Badan Kesbangpolinmas	2.846.489.502,00	3,120,929,685.00	2,631,302,205.00	84.30
Satpol PP	4.184.704.368,00	5,410,738,000.00	3,903,725,038.00	72.15
BPBD	936.181.504,00	1,171,454,336.00	933,623,301.00	79.70
D P R D	0,00			
KDH dan Wakil KDH	659.314.045,00	807,208,000.00	629,404,684.00	77.97%
Bagian Pemerintahan	434.685.457,00	490,157,500.00	460,354,110.00	93.92%
Bagian Organisasi	414.859.741,00	481,967,500.00	389,533,694.00	80.82%
Bagian Umum	8.749.040.807,00	9,873,118,000.00	9,393,763,274.00	95.14%
Bagian Hukum	680.106.667,00	479,055,000.00	454,605,771.00	94.90%
Bagian Perekonomian	477.065.829,00	556,175,000.00	445,001,266.00	80.01%
Bagian Administrasi Pembangunan	1.053.224.630,00	1,208,185,000.00	1,145,681,920.00	94.83%
Sekretariat DPRD	13.956.492.676,00	14,957,386,000.00	14,328,434,142.00	95.80%
BPKAD	12.136.988.311,00	31,487,927,250.00	12,337,614,854.00	39.18%
SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	3.178.433.088,00	3,714,770,000.00	3,553,274,630.00	95.65%
Kecamatan Kartoharjo	8.001.900.006,00	10,873,916,900.00	7,587,014,484.00	69.77%
Kecamatan Taman	8.738.069.386,00	9,257,746,664.00	8,424,220,416.00	91.00%
Kecamatan Manguharjo	8.408.169.230,00	9,670,037,000.00	7,870,436,000.00	81.39%
Badan Kepegawaian Daerah	3.628.096.055,00	4,016,039,500.00	3,890,320,610.00	96.87%
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan UKM	3.288.399.237,00	3,831,707,620.00	3,166,902,864.00	82.65%
Bapenda	8.588.286.956,00	8,493,089,478.00	8,068,302,358.00	95.00%
Dinas Pertanian	3.899.336.028,00	4,216,163,500.00	3,883,476,307.00	92.11%
Dinas Perdagangan	7.772.828.437,00	7,947,731,513.00	7,775,131,234.00	97.83%
J u m l a h	371.699.268.739,00	446,900,407,136.00	375,303,304,387.00	83.98%

Sumber : BPKAD Kota Madiun

2) Belanja Hibah

Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja hibah pada kurun waktu tahun anggaran 2018 dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan. Yaitu sebesar Rp 21.318.545.231,00 pada tahun 2018 dan mengalami penurunan sebesar 27,66% menjadi

Rp 15.422.819.810,00 pada tahun anggaran 2019. Pada tahun 2019 terealisasi sebesar 93,53% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 16.489.695.000,00.

Penyebab belanja hibah yang hanya terealisasi sebesar 78,78% karena sampai dengan tahun 2019 Dewan Kesenian belum mempunyai Surat Keputusan (SK) sehingga tidak dapat dicairkan dan Badan Wakaf Indonesia yang tidak merealisasi serta terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi seperti Hibah kepada KONI, Pramuka, PMI, PAUD (DAK) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK).

3) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial pada kurun tahun anggaran 2018 dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan. Yaitu sebesar Rp. 12.043.991.990,00 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 24,55% menjadi Rp 15.001.277.870,00 pada tahun anggaran 2018 sebesar 85,09% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 17.630.500.000,00.

Penyebab belanja bantuan sosial yang hanya terealisasi sebesar 85,09% adalah sisa anggaran yang tidak terealisasi seperti Bantuan Sosial kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia, Bantuan Beasiswa Mahasiswa, Bansos RTLH, Bantuan Beasiswa Mahasiswa Politeknik Madiun, Bantuan Beasiswa Mahasiswa Akademi Perkeretaapian Indonesia (API), Bantuan Sosial Pengabdian Tokoh Masyarakat, Jambanisasi, Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Daerah, Bantuan Sosial Guru dan Tenaga Kependidikan Swasta (PAUD, SD, SMP), Bantuan Sosial Akibat Bencana, Bantuan Orang Terlantar, Bantuan Jaminan Persalinan.

Perincian realisasi belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.18
Realisasi Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Bantuan Sosial
Tahun 2018 s.d. 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	5.203.221.415,00	9,565,600,000.00	7,841,779,870.00	81.98
Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	6.695.930.575,00	7,380,900,000.00	7,092,630,000.00	96.09
Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan	144.840.000,00	84,000,000.00	66,868,000.00	9.78
J u m l a h	12.043.991.990,00	17,630,500,000.00	15,001,277,870.00	85.09

Sumber : BPKAD Kota Madiun

4) Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan pada kurun waktu tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.127.846.700,00, sedangkan untuk Tahun 2019 terrealisasi sebesar 651.920.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 651.920.000,00.

5) Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja tidak terduga pada kurun waktu tahun 2018 tidak dicairkan, sedangkan pada Tahun 2019 terrealisasi sebesar Rp 118.877.262,00 atau sebesar 18,84% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 63.090.491.406,41.

Perincian realiasi belanja tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tanggal	Uraian	Jumlah
15 Maret 2019	Pengembalian sisa dana belanja bantuan keuangan propinsi Jawa Timur Tahun 2018	58.004.462,00
15 Maret 2019	Pengembalian pembayaran/Restitusi pajak BPHTB	15.600.000,00
15 April 2019	Pengembalian bantuan dari propinsi sisa dana BPPDGS	60.000,00
15 November 2019	Pembayaran kelebihan pajak BPHTB	45.212.800,00
	Jumlah Total	118.877.262,00

b. Belanja Langsung

Realisasi belanja langsung pada kurun waktu tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Yaitu sebesar Rp. 629.469.177.935,88 pada tahun 2018 dan naik sebesar 17,88% menjadi Rp 742.013.101.222,29 pada tahun anggaran 2019, atau sebesar 89,07% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 833.032.855.395,08.

Perincian pengelolaan belanja langsung tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disampaikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.19
Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun 2018 s.d. 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
BELANJA LANGSUNG	629.469.177.935,88	833.032.855.395,08	742.013.101.222,29	89,07
Belanja Pegawai	63.427.705.867,00	80.661.962.645,00	64.919.057.388,00	80,48
Belanja Barang dan Jasa	305.475.751.519,41	407.719.198.568,00	369.278.910.242,30	90,57
Belanja Modal	259.087.612.258,47	344.651.694.182,08	307.800.742.344,06	89,31

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Berdasarkan data pada tabel di atas, untuk masing-masing jenis belanja pada belanja langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai pada kurun tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan. Yaitu sebesar Rp. 63.427.705.867,00 pada tahun 2018 dan naik sebesar 2,35% menjadi Rp 64.919.057.388,00 pada tahun anggaran 2019. Atau sebesar 80,48% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 80.661.962.645,00.

Tabel II.20
 Realisasi Belanja Langsung Jenis Belanja Pegawai
 Tahun 2018 s.d. Tahun 2019

S K P D	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Dinas Pendidikan	8.277.719.749,00	11,044,654,640.00	8,859,095,061.00	80.21%
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	431.299.347,00	723,632,160.00	504,900,273.00	69.77%
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga	795.055.746,00	1,602,779,914.00	831,016,243.00	51.85%
Dinas Kesehatan dan KB	9.581.903.185,00	11,909,325,000.00	8,116,116,601.00	68.15%
RSUD	13.326.552.448,00	9,306,500,000.00	8,800,040,000.00	94.56%
Dinas PU dan TR	3.446.619.574,00	3,789,698,400.00	3,495,624,014.00	92.24%
Dinas Perkotaan	1.354.471.363,00	1,702,879,320.00	1,288,151,099.00	75.65%
BAPPEDA	1.150.293.627,00	1,300,074,180.00	1,137,325,431.00	87.48%
Dinas Perhubungan	2.346.599.221,00	3,014,479,000.00	2,526,695,569.00	83.82%
Dinas Kominfo	1.223.680.170,00	1,339,291,560.00	1,165,356,565.00	87.01%
Dinas Lingkungan Hidup	2.578.291.575,00	3,093,982,500.00	2,446,428,909.00	79.07%
Dinas Dukcapil	878.552.834,00	1,081,967,120.00	881,876,008.00	81.51%
Dinas Tenaga Kerja	766.114.928,00	1,043,855,760.00	821,620,911.00	78.71%
Dinas Sosial, PP dan PA	1.040.083.360,00	1,615,049,170.00	1,265,770,573.00	78.37%
Badan Kesbangpolinmas	668.515.366,00	916,025,167.00	607,230,014.00	66.29%
Satpol PP	2.741.405.553,00	3,595,365,720.00	3,136,226,898.00	87.23%
BPBD	215.788.792,00	295,455,880.00	241,098,605.00	81.60%
D P R D	0,00	0,00	0,00	0,00
KDH dan Wakil KDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	442.885.015,00	460,359,720.00	434,351,444.00	94.35%
Bagian Organisasi	272.366.078,00	324,697,240.00	270,332,461.00	83.26%
Bagian Umum	2.461.432.648,00	3,404,160,540.00	2,968,475,223.00	87.20%
Bagian Hukum	422.042.761,00	430,372,544.00	363,264,025.00	84.41%
Bagian Perekonomian	293.529.538,00	411,178,680.00	262,564,237.00	63.86%
Bagian Administrasi Pembangunan	345.555.516,00	465,178,360.00	433,987,652.00	93.29%
Sekretariat DPRD	786.215.557,00	904,654,864.00	755,909,280.00	83.56%
BPKAD	1.087.966.920,00			
SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	1.015.410.727,00	1,378,389,000.00	1,320,336,361.00	95.79%
Kecamatan Kartoharjo	1.955.314.850,00	2,606,672,200.00	1,808,680,385.00	69.39%
Kecamatan	2.534.893.331,00	2,824,748,464.00	2,316,524,699.00	82.01%

S K P D	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Taman				
Kecamatan Manguharjo	2.165.113.952,00	2,596,063,680.00	1,736,393,953.00	66.89%
Badan Kepegawaian Daerah	1.047.793.265,00	1,396,175,840.00	1,234,747,233.00	88.44%
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan UKM	1.015.981.431,00	1,221,816,380.00	995,148,498.00	81.45%
Bapenda	93.910.000,00	156,340,000.00	154,170,000.00	98.61%
Dinas Pertanian	1.218.396.098,00	1,388,710,890.00	1,140,314,849.00	82.11%
Dinas Perdagangan	1.684.693.791,00	2,106,284,112.00	1,659,739,703.00	78.80%
J u m l a h	63.427.705.868,00	80,661,962,645.00	64,919,057,388.00	80.48%

Sumber : BPKAD Kota Madiun

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja langsung jenis belanja barang dan jasa pada kurun tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan. Yaitu sebesar Rp. 306.953.859.810,41 pada tahun 2018 dan naik sebesar 20,31% menjadi Rp 369.293.301.490,23 pada tahun anggaran 2019. Atau realisasi capaian sebesar 90,58% apabila dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 407.719.198.568,00.

Kenaikan realisasi belanja langsung belanja barang dan jasa dibanding tahun 2018 dipengaruhi oleh kenaikan kinerja OPD atas penyerapan belanja barang dan jasa pada masing-masing kegiatan.

Tabel II.21
Realisasi Belanja Langsung Jenis Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2018 s.d. Tahun 2019

S K P D	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Dinas Pendidikan	37.968.868.718,98	43,763,326,290.00	37,964,405,535.11	86.75%
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.083.921.450,00	1,711,943,784.00	1,615,261,340.00	94.35%
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga	9.333.092.943,00	12,981,784,889.00	11,399,687,635.00	87.81%
Dinas Kesehatan dan KB	49.204.523.822,31	55,253,058,460.00	49,204,523,822.31	89.05%
RSUD	83.043.388.153,80	74,838,270,000.00	80,320,022,544.15	107.32%
Dinas PU dan TR	6.989.947.522,09	12,139,523,680.00	10,960,409,014.00	90.29%
Dinas Perkim	12.904.617.285,00	15,747,445,960.00	14,241,185,229.73	90.43%
BAPPEDA	1.534.371.102,00	2,424,480,860.00	2,223,046,926.00	91.69%
Dinas Perhubungan	3.661.175.371,00	6,243,869,000.00	5,569,586,209.00	89.20%
Dinas Kominfo	13.353.169.719,00	24,124,528,440.00	23,555,032,665.00	97.64%
Dinas Lingkungan Hidup	5.065.039.209,00	7,631,222,500.00	5,711,959,909.32	74.85%
Dinas Dukcapil	3.824.320.000,00	4,620,575,870.00	4,389,393,318.00	95.00%
Dinas Tenaga Kerja	2.878.885.180,00	4,269,457,560.00	3,970,259,677.00	92.99%
Dinas Sosial, PP dan PA	4.792.939.896,00	8,507,295,564.00	7,815,765,251.00	91.87%
Badan Kesbangpolinmas	1.547.280.920,00	2,158,049,137.00	1,950,475,890.00	90.38%
Satpol PP	3.069.554.695,00	4,563,361,800.00	4,203,437,741.00	92.11%
BPBD	1.275.854.745,00	1,466,222,120.00	1,409,019,278.00	96.10%
D P R D	0,00	0,00	0,00	0,00
KDH dan Wakil KDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	1.539.760.586,00	1,846,698,280.00	1,725,409,112.00	93.43%
Bagian Organisasi	1.466.009.150,00	1,949,540,276.00	1,803,808,393.00	92.52%
Bagian Umum	9.708.631.462,00	14,721,906,470.00	12,868,135,490.00	87.41%
Bagian Hukum	724.656.360,00	1,042,808,900.00	942,228,740.00	90.35%
Bagian Perekonomian	2.801.067.369,00	5,343,214,620.00	4,312,595,900.00	80.71%
Bagian Administrasi Pembangunan	866.558.806,00	1,111,974,180.00	1,087,445,862.00	97.79%
Sekretariat DPRD	14.814.352.687,00	24,029,350,994.00	18,060,960,033.00	75.16%
BPKAD	17.991.391.769,10			
SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	828.205.263,00	1,405,157,000.00	1,344,464,438.00	95.68%
Kecamatan Kartoharjo	3.711.634.603,00	4,885,933,896.00	4,514,382,343.00	92.40%

S K P D	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
Kecamatan Taman	2.806.519.281,00	5,151,455,766.00	4,632,941,886.00	89.93%
Kecamatan Manguharjo	3.904.220.100,00	7,295,357,010.00	6,405,768,972.00	87.81%
Badan Kepegawaian Daerah	2.785.011.641,00	6,715,152,160.00	5,802,457,020.00	86.41%
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan UKM	2.827.461.113,00	3,730,415,620.00	3,493,424,874.00	93.65%
Bapenda	1.186.093.480,00	1,769,422,000.00	1,502,443,773.00	84.91%
Dinas Pertanian	2.183.761.331,00	3,266,271,190.00	3,066,498,264.00	93.88%
Dinas Perdagangan	4.270.449.849,00	5,005,585,662.00	4,505,906,800.00	90.02%
J u m l a h	306.958.379.044,28	407,719,198,568.00	369,293,301,490.23	90.58%

Sumber : BPKAD Kota Madiun

3) Belanja Modal

Realisasi belanja langsung jenis belanja modal pada kurun waktu tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan. Yaitu realisasi sebesar Rp. 259.087.612.258,47 pada tahun 2018 menjadi Rp 307.800.742.344,06 pada tahun anggaran 2019, atau capaian realisasi sebesar 89,31% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 344.651.694.182,08.

Kenaikan realisasi belanja langsung belanja modal dibanding tahun 2018 dipengaruhi oleh kenaikan kinerja atas penyerapan belanja modal fisik dan non fisik pada masing-masing OPD.

Tabel II.22

Alokasi dan Realisasi Komponen Belanja Langsung jenis Belanja Modal Tahun 2018 s.d 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
BELANJA MODAL	259.087.612.258,47	344,651,694,182.08	307,800,742,344.06	89.31%
Belanja Peralatan dan Mesin	47.310.430.082,75	74,366,924,601.64	68,460,669,520.00	92.06%
Belanja Gedung dan Bangunan	69.451.180.450,00	56,572,341,463.00	48,758,211,485.26	86.19%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	151.593.750.650,00	206,393,491,687.44	184,022,541,935.80	89.16%
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.003.440.910,00	3,253,207,630.00	2,888,082,876.00	88.78%
Belanja Aset Lainnya	5.964.502.000,00	4,065,728,800.00	3,671,236,527.00	90.30%

Sumber : BPKAD Kota Madiun

3. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

Permasalahan masih terdapat pada angka SILPA yang masih cukup tinggi yang terdiri dari :

- a. SiLPA Mandatory sebesar Rp 18.824.825.317,00 yang terdiri dari :
 - Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp.11.025.888.900,00
 - Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp.1.688.075.667,00
 - Sisa Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp.5.974.973.250,00
 - Sisa Dana BOS sebesar Rp.135.887.500,00
- a. SiLPA Murni terdiri dari :
 - Pelampauan Pendapatan sebesar Rp.5.636.897.929,80
 - Belanja Tidak Langsung yang tidak terserap sebesar Rp.138.264.812.213,06 meliputi :
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.71.597.102.749,00
 - 2) Belanja Hibah sebesar Rp.1.066.875.189,92
 - 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.2.629.222.130,00
 - 4) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.104.650.015.677,46
 - Belanja Langsung yang merupakan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.62.971.614.144,14

Solusi

Dari sisi pelaksanaan APBD tetap melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan, merupakan bagian anggaran yang dipergunakan untuk mengadministrasikan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yaitu untuk menampung transaksi keuangan guna menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum Pembiayaan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut

- a. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas ;
- b. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja ;
- c. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan ;
- d. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Adapun struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah bersumber dari SiLPA tahun lalu.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Tabel II.23
Alokasi dan Realisasi Pembiayaan
Tahun 2018 s.d 2019

URAIAN	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	Krg/lbh	%
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
a.Penggunaan SiLPA	2018	308.490.756.889,46	308.490.756.889,46	0,00	0,00
	2019	279.278.826.431,22	279.278.826.431,22	0,00	0,00
b.Pencairan Dana Cadangan	2018- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2018- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
d.Penerimaan Pinjaman Daerah	2018- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2018	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2018	308.490.756.889,46	308.491.416.889,46	660.000,00	0,00
	2019	279.278.826.431,22	279.278.826.431,22	0,00	0,00
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
a.Pembentukan Dana Cadangan	2017- 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Penyertaan Modal Pemda	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
c.Pembayaran Pokok Utang	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
d.Pemberian Pinjaman Daerah	2017- 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	2018	308.490.756.889,46	308.491.416.889,46	660.000,00	100
	2019	277.778.826.431,22	277.778.826.431,22		
SILPA	2018	0,00	279.455.131.726,76	0,00	0,00
	2019		223.649.415.124,05		

Sumber : BPKAD Kota Madiun

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

I. GAMBARAN MAKRO KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Indikator Kinerja berdasarkan Misi Daerah

Berkenaan dengan pembangunan daerah telah digariskan, bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan jangka menengah nasional. Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan agenda utama dalam pencapaian pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera. Sedangkan misinya adalah (i) Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat, (ii) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan beribawa, (iii) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas pelayanan publik, (iv) Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan diatas dan dengan mempedomani rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka capaian kinerja berdasarkan misi daerah dengan rincian jumlah indikator pengukuran masing-masing sebagai berikut :

Misi	Jumlah
1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat	3
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan beribawa	4
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	11
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	11
Jumlah	29

Adapun perkembangan capaian kinerja berdasarkan kategori Misi daerah pada tahun terakhir RPJMD 2014-2019 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.1
Capaian Kinerja Indikator Berdasarkan Misi Kota Madiun
Laporan keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1: Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat						
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah kelompok Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	108 kelompok	108 kelompok	108 kelompok	100%
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82,19	82.5	82.59	100,11%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66	93.8	94.05	100,27%
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa						
1.	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	B	BB	B	96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82.85	79.5	88.45	111,26%
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	100%
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat						
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,10 Tahun	12 Tahun	11,13 Tahun	92,75%
		Angka Harapan Lama Sekolah	14.2	14.15	14.39	101,70%
		Angka Melek Huruf	100%	100%	100%	100,00%
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,59 Tahun	72,59 Tahun	72,75 Tahun	100,22%
		Angka Kematian Ibu (AKI)	0%	38.59%	39.53%	98%
		Angka Kematian Bayi (AKB)	6.64%	6.95%	6.32%	109,01%
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	94.51%	93%	93.64%	100,69%

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	
			TAHUN 2018	TAHUN 2019			
1	2	3	4	5	6	7	
	prasarana transportasi kota	Rasio Rumah layak Huni	99.65%	99.42%	99.95%	100,53%	
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	1.61%	1.50%	1.64%	109,33%	
	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.22%	68.51%	63.87%	93,23%	
		Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	19.55%	19%	20.01%	105,32%	
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat							
1.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Nilai realisasi Investasi	966,734 M	361 M	968 M	268,14%	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	0.81	5.08	4.01	121,06%	
	Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor serta industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB	23,21%	23.86%	25,93%	108,68%	
		Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	17,48%	17.20%	17.83%	103,66%	
	Meningkatnya Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap PDRB	16,09%	16.54%	15.72%	95,04%	
	Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	154.48	46.5	154.44	332,13%	
		PDRB Perkapita	68,94	70.84	74.74	105,50%	
		Indeks Gini	0.36	0.32	0.33	96,86%	
2.	Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan	100%	100%	100%	100,00%	
		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas tertangani	100%	100%	100%	100,00%
			Angka pelanggaran ketertiban umum	98.95%	98%	100%	102,04%

Sumber : Tim Teknis dan Tim Perumus LKPJ 2019

Pelaksanaan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kategori hasil penilaian capaian kinerja adalah sebagai berikut :

No	Nilai Angka	Interpretasi
1	76 – 100%	Tinggi , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
2	56 – 75%	Cukup atau Sedang , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
3	0 – 55%	Rendah , Akuntabilitas kerjanya kurang baik, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan dan perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

Capaian indikator kinerja berdasarkan kategori Misi daerah bahwa pelaksanaan misi daerah pada Tahun 2019 sebagai berikut : dari 29 Indikator kinerja berdasarkan misi tersebut diatas, terdapat capaian yang melampaui target sebesar 23 indikator dengan tingkat ketercapaian sebesar 79,3% dan sebesar 6 indikator tidak mencapai target. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III.2
Indikator Kinerja berdasarkan Misi Daerah
Tahun 2019

Misi	Jumlah	Tercapai	Tidak tercapai	%
1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat	3	3	0	100
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	4	3	1	75
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	11	8	3	72,7
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	11	9	2	81,8
Jumlah Indikator	29	23	6	79,3

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan capaian Misi daerah pada Tahun kelima RPJMD yaitu LKPJ tahun 2019, Pemerintah Kota Madiun periode tahun 2014-2019, bahwa :

1. **Berhasil dengan prestasi tinggi mewujudkan target kinerja pada misi ke-1, 2 dan 4** yaitu :
 - ✚ Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat
 - ✚ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
 - ✚ Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat
 2. **Berhasil dengan prestasi cukup/ sedang mewujudkan target kinerja pada misi ke-3**, yaitu :
 - ✚ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
-

B. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada Tahun 2019. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya diukur dari Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan. Pencapaian indikator kinerja merupakan penjabaran dari keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2014-2019, sehingga diperlukan upaya dari seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mendorong tercapainya target-target indikator yang meliputi (i) indikator aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) indikator aspek pelayanan dasar, (iii) indikator aspek daya saing daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.3
Keterkaitan Aspek Pembangunan dan Misi Daerah

Aspek	Misi
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Misi 1 Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat
	Misi 4 Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat
Aspek Pelayanan Umum	Misi 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
Aspek Daya Saing Daerah	Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
	Misi 4 Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah diukur dari sejauhmana capaian setiap daerah mampu meningkatkan tiga aspek tersebut.

Tabel III.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kota Madiun
Berdasarkan RPJMD Periode Tahun 2014-2019 beserta Suplemen

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Otonomi Daerah							
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	6.15	5.9	5.93	5.96	6.8	5.69	84%
1.2	Indeks Pembangunan Manusia	79.48	80.01	80.13	80.15	79.91	80.88	101%
1.3	Laju Inflasi	4.3	3.07	4,78	2.11	2-4	2.2	100%
1.4	PDRB Perkapita	58.24	63.69	68.94	68.94	70.84	74,74	105,5%
2	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
2.1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
2.2	Angka Pelanggaran Ketertiban Umum	98.35%	94.72%	98.01%	98.95%	98%	100%	102%
B	Fokus Kesejahteraan Sosial							
1	Pendidikan							
1.1	Angka Melek Huruf	100	100	100	100	100	100	100%
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11.08	11.09	11.10	11.1	12	11.13	93%
1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	117.24	117.6	118.01	145.18	100	143.28	143%
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	107.88	109.69	108.14	171.14	100	170.76	171%
1.5	Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A	106.24	107.92	108.91	134.84	100	135.45	135%
1.6	Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B	80.43	92.78	87.81	136.19	90	131.33	146%
1.7	Pendidikan yang Ditamatkan :							
1.8	Pendidikan Dasar	30.3	29.84	29.1	28.44	31.73	27.65	113%
1.9	Angka Harapan Lama Sekolah	14.06	14.19	14.2	14.2	14.15	14.39	102%
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kelangsungan Hidup bayi	993.25	992.7	992.64	993.7	993.03	993.68	100,02%
2.2	Angka Harapan Hidup	72.41	72.44	72.48	72.59	72.59	72.75	100,22%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	0.135	0.112	0.047	0.038	0.01	0.038	(180%)
2.4	Prosentase Pelayanan Kesehatan Dasar pada Bayi, Balita, Anak Remaja dan Ibu sesuai standart yang mencapai target	86.67	86.67	85.71	100	92.85	92.86	100%
2.5	Prosentase Balita Gizi Kurang	9.94	0.44	0.47	0.42	10.92	0.45	196%
3	Pertanahan							
3.1	Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	4	20	4	27	8	25	313%
4	Tenaga Kerja							
	Rasio Penduduk yang Bekerja	93.69	94.9	96.32	99.1	93.54	96	103%
C	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga							
1	Kebudayaan							
1.1	Jumlah grup kesenian	64	88	93	93	93	97	104%
1.2	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1	1	100%
2	Pemuda dan Olah Raga							
2.1	Jumlah Klub Olah Raga	14	17	152	152	152	152	100%
2.2	Jumlah gedung olahraga	3	3	5	5	5	5	100%
II	ASPEK PELAYANAN UMUM							
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Dasar							
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	117.93	115.49	124.4	140.16	100	135.75	136%
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:38	1:38	1:38	1:39	01:38	1:52	114%
1.1.3	Rasio guru/murid	1:16	1:16	1:17	1:16	01:20	1:16	116%
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:28	1:26	1:33	1:22	01:32	1:28	133%
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	100	100	129.65	134.78	100	133.39	133%

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1.2	Fasilitas Pendidikan							
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	98	98.24	96.89	96.95	85	95.24	112%
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	99	99.1	98.41	96.36	72	98.68	137%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	73	74.53	114.35	106.66	100	109	109%
1.4	Angka Putus Sekolah							
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs SMA/SMK/MA	0.03	0.01	0	0	0	0	100%
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0.18	0.01	0	0	0	0	100%
1.5	Angka Kelulusan							
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	99.97	100	100	100	100	100	100%
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	122	172.55	129.05	128.52	100	111.35	111%
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	97	96.21	92.04	98.02	92	96.1	104%
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100	100	100	100	100%
1.6	Manajemen Pelayanan Pendidikan							
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100	100	100%
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah	100	100	100	100	100	100	100%
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	2025	2938	1539	1250	1250	1427	114%
2	Kesehatan							
2.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	115%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1	1	1	1	100%
2.3	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0.0384	0.0456	0.0383	0.0381	0.0284	0.0381	134%
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	112.85	103.32	151.09	136.32	48	138.02	288%
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	770.72	719.87	996.14	906.59	9.27	818.12	8825%
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	6	0	0	0	0	0%
2.7	SOP Pelayanan	203	233	439	444	445	457	103%
2.8	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani	118.93	84.02	100	100	100	100	100%
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100	100	100	100	100%
2.10	Prosentase Rumah Tangga ber-PHBS	63.87	63.9	64.87	65.19	65.5	68.21	104%
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	100%
2.12	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100%
2.13	angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	38.37	0	0	38.59	39.53	98%
2.14	Prosentase Rumah Tangga Sehat	63.87	63.9	64.87	65.19	65.5	68.21	104%
2.15	Prosentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Pra Bayar	100	100	100	100	100	100	100%
2.16	Jumlah Kasus KLB	12	14	9	14	12	9	125%
2.17	Prosentase Penanganan Penyakit	66.67	58.33%	100	100	100	87.5	88%
2.18	Prosentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	0	0	33.33	44.4	55.5	59.26	107%
2.19	Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100%
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	80.37	83.43	78.71	81.32	81	81.84	101%
2.21	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	78.93	79.07	94.83	100	100	100	100%
2.22	Prosentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	81.87	78.2	79.51	84.01	85	85.12	100%

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
	dari tindakan kekerasan							
8.6	Indeks Pemberdayaan Gender	81.48	82.23	82.19	82.19	82.5	82.59	100,11%
8.7	Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan Swasta	99.94	99.94	99.99	99.99	93.61	99.73	107%
8.8	Indeks pembangunan Gender	92.95	92.95	93.83	93.66	93.8	94.05	100%
9	Pangan							
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%
9.2	ketersediaan pangan utama	67.79	69.62	183.03	183.38	46.5	154.44	100%
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	93.26	95.89	138.59	138.61	82	138.63	169%
10	Pertanahan							
10.1	Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan	4	4	4	2	2	2	100%
11	Lingkungan Hidup							
11.1	Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah per satuan penduduk	2.65	2.82	2.82	2.896	3	2.96	99%
11.2	Prosentase penanganan sampah	93.47	93.55	93.62	93.678	93.7	94.001	100%
11.3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100	100	100	100	100	100	100%
11.4	Prosentase pencemaran (penetapan) status mutu air	100		100	100	100	100	100%
11.5	Tingkat Pencegahan Pencemaran Air	100		100	100	90.81	100	110%
11.6	Volume Sampah yang Tertangani	103,606.36	110,599.55	111,065.59	111,662.07	106,390.20	119,780.08	113%
11.7	Prosentase Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Madiun	100	100	129.2	100	100	100	100%
11.8	Prosentase Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber-sumber Air yang berfungsi dengan layak dan baik	100	100	100	100%	100	100	100%
11.9	Tingkat Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	100	100	100	100	100	100	100%
11.10	Jumlah Industri yang dibina	20	25	54	56	54	56	104%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
12.1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	96.42	96.88	97.11	97.1	98	98.35	100%
12.2	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	78.78	82.94	90.56	98.44	90	100	111%
12.3	Rasio pasangan berakte nikah	100	100	100	100	100	100	100%
12.4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	31.33	50.88	72.9	99.86	70	100	143%
12.5	Ketersediaan data base kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	ada	100%
12.6	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	96.29	100	100	100	100	100	100%
12.7	Ketersesuaian database Kependudukan Skala Nasional	100	100	100	99.99	100	100	100%
12.8	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil di Kota Madiun	100	85.54	87.82	99.51	100	100	100%
12.9	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Regulasi	75.71	86.14	92.114	98.87	94	99.67	106%
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
13.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.66	1.59	1.97	1.91	1.95	1.94	101%
13.2	Rasio akseptor KB	10.75	10.79	7.38	13.66	11.8	14.08	119%
13.3	Cakupan peserta KB aktif	77.49	77.69	77.5	77.2	76	78.8	104%
13.4	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	10.85	14.88	7.87	13.22	15	11.8	121%
13.5	Cakupan Peserta KB Baru	3,183	3,141	2,073	3,599	3,710	3,866	104%
14	Perhubungan							
14.1	Jumlah arus penumpang angkutan	6,600,600	6,320,400	5,824,523	6457890	5,824,523	6,460,900	111%
14.2	Rasio ijin trayek	0.0005	0.00051	0.0004	0.000996	0.0004	0.00085	213%
14.3	Jumlah uji kir angkutan umum	6,296	6,428	6,219	8682	6,218	6,449	104%
14.4	Jumlah terminal	3	3	2	2	2	2	100%
14.5	Angkutan darat	252	300	242	559	230	549	239%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
14.6	Kepemilikan kir angkutan umum	6,296	6,428	6,428	8682	4,805	6,449	134%
14.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum	30 menit	27 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	100%
14.8	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	59%	71%	82%	95%	100%	10400%	104%
14.9	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	#1=30.000	#A=65.000	#1=65.000	#1=65.000	#1=30.000	#1=65.000	217%
		#2=35.000	#B=70.000	#2=70.000	#2=70.000	#2=35.000	#2=70.000	200%
		#3=45.000	#C=80.000	#3=80.000	#3=80.000	#3=45.000	#3=80.000	178%
		#4=50.000	#D=85.000	#4=85.000	#4=85.000	#4=50.000	#4=85.000	170%
14.10	Angka Kecelakaan Sarana Transportasi Angkutan Darat	331	253	248	244	231	240	96%
14.11	Jumlah Pengendara Kendaraan yang memiliki Surat Ijin Mengemudi	21,748	0	27,884	28,041	22,100	28,056	127%
14.12	Prosentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	65	73	89	91	88	100	114%
14.13	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	79.26	83.23	71.42	78.08	80	85.08	106%
14.14	Jumlah Kendaraan yang lulus uji (KIR)	6,296	6,428	6,219	8,682	6,219	6,449	104%
14.15	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	0.07	0.3	1.59	1.61	1.5	1.64	109%
15	Komunikasi dan Informatika							
15.1	Jumlah jaringan komunikasi	7/5	7/5	6/6	6/5	6/6	6/5	83,3%
15.2	Rasio warnet/gameonline terhadap penduduk	0.3	0.3	0.37	0.37	0.3	0.1	33,33%
15.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	16	50	75	80	14	80	571%
15.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	16	13	13	13	13	13	100%
15.5	Web site milik pemerintah daerah	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	100%
15.6	Pameran/expo per tahun	34	19	23	18	18	25	138,8%
15.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan komunikasi dan informasi	80.17	80.17	77.03	82.8	80.5	83.25	103%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
15.8	Jumlah Media Elektronik Milik Pemerintah	1	1	1	4	1	4	400%
15.9	Jumlah SDM Penyiaran	3	3	3	3	3	7	233%
15.10	Jumlah Menara Telekomunikasi	68	72	83	84	70	84	120%
15.11	Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi	1,077	1,739	3,064	4,164	3,051	3,127	102%
15.12	Web Site PPID Kota Madiun	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	100%
15.13	Persentase PD yang telah mempunyai sistem informasi berbasis WEB	85%	90%	100.00%	100	61.76	100	162%
15.14	Persentase PD yang telah menggunakan layanan sistem LPSE dalam pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100	100	100	100%
15.15	Jumlah Kelompok User yang memanfaatkan Teknologi Informasi	3	3	3	3	3	3	100%
15.16	Ketersediaan Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah	57	57	72	106	61	89	146%
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
16.1	Persentase koperasi aktif	97.64	97.69	98.04	98.05	98.05	98.05	100%
16.2	Jumlah UKM	2,369	2,419	926	597	825	878	106%
16.3	Usaha mikro dan kecil	23,094	23,189	23,276	23,360	23,426	23,461	100%
16.4	Persentase Peningkatan Omset KUMKM	1.06	2.9	2.97	2.97	2.9	3.08	106%
16.5	Cakupan Bina UKM	2.64	2.7	4.44	2.55	3.08	3.74	121%
16.6	Jumlah Koperasi Aktif	289	297	300	301	302	302	100%
16.7	Jumlah Promosi KUMKM	12	10	11	11	11	11	100%
16.8	Jumlah Koperasi	296	304	306	307	308	308	100%
16.9	UKM Non BPR/LKM UKM	23,094	23,189	23,276	23,360	23,000	23,457	102%
17	Penanaman Modal							
17.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	661	666	478	417	399	442	111%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
17.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1537,879 M	347,348 M	1338,509 M	966.734	361 M	960.81	266%
17.3	Rasio daya serap tenaga kerja	2.83	1.67	1.51	10	7	8	114%
17.4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	1,168.999	-1,190.531	1,041,161	-421,775	11	6.1	145%
17.5	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	317%	-77.41%	74.98%	-30,38	3.14	0.63	180%
17.6	Rasio Izin yang diterbitkan	98	98	95.3	98.68	97	97.79	101%
17.7	Nilai Realisasi Investasi	1.537,88 M	347,348 M	1388.509	966.734	361 M	968.702	268%
17.8	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
18	Pemuda dan Olahraga							
18.1	Jumlah organisasi pemuda	3	3	6	3	3	6	200%
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	3	3	3	3	100%
18.3	Jumlah kegiatan olahraga	4	4	8	8	8	18	225%
18.4	Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3	3	100%
18.5	Lapangan olahraga	83	83	83	83	83	83	100%
18.6	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28	28	28	28	28	100%
18.7	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	2	2	7	11	6	7	117%
18.8	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	6	7	8	34	5	50	1000%
18.9	Jumlah Peserta Olah Raga	11,000	38,000	19,501	20394	19,000	19,266	101%
18.10	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	50	60	100	100	100	100	100%
19	Statistik							
19.1	Jumlah dokumen statistik Daerah yang tersedia	2	2	4	5	3	5	167%
19.2	Ada/tidaknya buku statistik tentang Kota Madiun	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	100%

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
19.3	Dokumen Statistik daerah yang tersusun	2	3	2	3	2	3	150%
20	Kebudayaan							
20.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11	11	100	100	100	100	100%
20.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	100	100	100	100	100%
20.3	Jumlah Seni Budaya, Benda/situs/ kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2	2	21	21	21	21	100%
20.4	Jumlah Prestasi di bidang Seni dan Kebudayaan	6	2	10	12	7	8	114%
20.5	Seni Budaya Lokal yang dikompetisikan	6	6	9	40	35	42	120%
20.6	Jumlah Budaya Lokal yang dipentaskan	12	12	62	75	62	70	113%
20.7	Jumlah Budaya Lokal yang dilestarikan	5	5	16	25	25	25	100%
20.8	Jumlah Penonton dalam Pentas seni	3,500	7,000	22,120	81100	22,150	38,473	174%
21	Perpustakaan							
21.1	Jumlah perpustakaan	37	37	37	37	36	36	100%
21.2	Jumlah pengunjung perpustakaan	26,124	39,324	55,633	56,648	26,600	81,284	306%
21.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	30,373	33,373	36,397	49172	45,255	51,986	115%
21.4	Prosentase Peningkatan Jumlah Anggota Perpustakaan	26.03	173	24.76	25.23	8.76	15.43	176%
21.5	Prosentase Pengunjung Perpustakaan	14.68	16.42	31.3	32.03	15	45.95	306%
22	Kearsipan							
22.1	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang mendapatkan pelatihan	200	565	765	965	200	1165	583%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
22.2	Jumlah Berkas Arsip in aktif yang dikelola	40,048		51,430	53,613	44,671	57,615	129%
22.3	Persentase Unit kearsipan yang menyerahkan arsip in aktifnya	32.50%		39.7%	43.51%	41.10%	48.00%	117%
C	Urusan Pemerintahan Pilihan							
23	Kelautan dan Perikanan							
23.1	Jumlah Produksi perikanan	229.47	234.14	322.07	343.9	361	361.3	100,1%
23.2	Tingkat Konsumsi Ikan	14.2	14.7	14.81	15.1	15.4	15.41	100,06
23.3	Jumlah SDM (Petani Ikan)	80	240	245	247	200	250	125%
24	Pariwisata							
24.1	Kunjungan wisata	219,659	245,525	268,803	411,237	269,000	421,753	157%
24.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	5.4	5.66	8.61	8.63	6.29	8.68	138%
24.3	Jumlah Promosi Pariwisata	5	4	3	5	3	5	167%
24.4	Jumlah Event Kepariwisataaan	3	4	10	12	10	12	120%
25	Pertanian							
25.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (persentase capaian produktivitas padi terhadap target RPJMD)	67.79	95.62	94.79	104	96	104	108%
25.2	Cakupan bina kelompok petani	100	100	100	100	100	100	100%
25.3	jumlah populasi ternak	98,732	93,658	89,562	85,813	82,362	89,052	108%
25.4	jumlah hewan ternak yang halal dipotong per tahun (sapi dan kambing)	2,508	3,427	3,149	3,203	1,950	3,007	154%
25.5	Rata-rata produktivitas sapi perah per ekor per hari (L)	10	10	10.82	11.67	11	11.67	106%
25.6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	0.89	0.86	0.83	0.75	0.8	0.82	103%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
27	Perindustrian							
27.1	Pertumbuhan industri	2.67	2.67	7.21	7.4	5.25	7.43	142%
27.2	Cakupan bina kelompok pengrajin	6	7	12	18	18	18	100%
27.3	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	17.14	17.34	17.68	17.48	17.16	17.83	104%
27.4	Frekuensi Pemeriksaan Kadar Tar dan Nikotin dalam satu Tahun	4	4	4	4	4	4	100%
27.5	Jumlah IKM dan IRT	271	281	338	363	295	390	132%
27.6	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	100%
27.7	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang ESDM	2	1	1	2	2	2	100%
28	Ketransmigrasian							
28.1	Jumlah Sosialisasi	3	4	3	1	1	1	100%
28.2	Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja	1	1	1	1	1	1	100%
D	Fungsi Penunjang Pemerintahan							
29	Unsur Staf							
29.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	77.84	78.54	79.57	82.85	79.5	88.45	111%
29.2	Prosentase capaian SPM	85.71	82.85	79.1	89.58	81.5	82.76	102%
29.3	Perubahan kelembagaan dan Tupoksi SKPD	Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%
29.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	BB	B	96%
29.5	Persentase SKPD yang memiliki SOTK sesuai standart yang ditetapkan	100%	100%	100%	100	100	100	100%
29.6	Jumlah Pedoman dan Prosedur Kerja Ketatalaksanaan	1	64	1	1	1	1	100%
29.7	Prosentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sesuai dengan Road Map RB	20	40	60	78.46	100	100	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
29.8	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu	73.52%	85.29%	100.00%	100	85	100	118%
29.9	Persentase Jumlah Kelembagaan yang sesuai dengan Perundang-undangan	100	100	100	100	100	100	100%
29.10	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kota yang baik	100	100	100	100	100	100	100%
29.11	Nilai EKPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	N/A	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	100%
29.12	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bidang Pemerintahan	42	47	446	356	582	605	103,95%
29.13	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan daerah Lain	4	4	4	4	4	4	100%
29.14	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Otoda	3	6	10	12	5	12	240%
29.15	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	100	100	100	100	100	100	100%
29.16	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100%
29.17	Persentase PD yang telah dilakukan Anjab dan ABK	96		100	100	100	100	100%
30	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
30.1	Persentase Entitas yang melakukan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja dengan Baik	74.75	76.19	86.07	83.33	84	84.26	100%
30.2	Persentase temuan (kasus) Keuangan Hasil audit yang telah ditindak lanjuti	88.21	87.59	87.56	100	100	100	100%
30.3	Persentase SKPD yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja secara baik	100%	100	100%	100	100	100	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
31	Perencanaan							
31.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda	ya	Ya	ya	ya	Ya	ya	100%
31.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	100%
31.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	100%
31.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100%
31.5	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100%
31.6	Persentase hasil musrenbang yang di akomodasi	30	34	41	47	50	50	100%
31.7	Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja	100	100	100	100	100	100	100%
31.8	Persentase SKPD bidang ekonomi yang menyusun RENJA	100	100	100	100	100	100	100%
31.9	Persentase SKPD bidang sosial budaya yang menyusun RENJA	100	100	100	100	100	100	100%
31.10	Persentase SKPD Bidang Fisik dan Prasarana yang menyusun RENJA	100	100	100	100	100	100	100%
31.11	Persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD	100	100	100	100	100	100	100%
31.12	Dokumen data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersedia	4	6	6	6	5	5	100%
31.13	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengakomodir Kepentingan Masyarakat Kota Madiun	88	157	11	21	57	57	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
31.14	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	2	2	2	7	7	7	100%
31.15	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	4	4	4	16	15	15	100%
31.16	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	4	4	4	7	5	5	100%
32	Keuangan							
32.1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	100%
32.2	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	ya	Ya	ya	ya	ya	ya	100%
32.3	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan Tepat Waktu	73.52	85.29	85.29	100	100	100	100%
32.4	Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu	ya	Ya	ya	ya	ya	ya	100%
32.5	Persentase peningkatan PAD	36.29	5.18	32.98	0.42	20	9.15	45,75%
32.6	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Landasan Hukum	100	100	100	100	100	100	100%
32.7	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100%
32.8	Persentase Peningkatan Pajak daerah	120.42	112.56	135.16	107.07	100	112.05	112.05%
32.9	Persentase Penerimaan PBB	113.51	111.89	115.35	112.62	95	106.01	112%
33	Kepegawaian, Pendidikan serta Pelatihan							
33.1	Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai	0.24	0.19	0.42	0.39	0.43	0.18	158%
33.2	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	73	84.13	76.74	80.79	82.5	85.63	104%
33.3	Persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016	98.5	99.29	95.01	89.13	95	98.71	104%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
33.4	Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi	100	100	100	100	100	100	100%
33.5	Persentase Peningkatan SDM Aparatur	100	100	100	100	100	118.14	118%
33.6	Persentase Realisasi Penataan Pegawai	5.61	7	12.44	43.12	9	22.63	251%
33.7	Persentase Penyelesaian administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan	90	92	83	100	93	135.36	146%
34	Penelitian dan Pengembangan							
34.1	Jumlah Kajian dan Penelitian	2	2	2	2	2	4	200%
35	Kesatuan Bangsa dan Politik							
35.1	jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan	10	10	10	16	16	11	68,7%
35.2	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	7	7	7	7	7	10	143%
35.3	Jumlah Kemitraan dengan elemen Masyarakat	9	9	9	9	9	9	100%
35.4	Prosentase Parpol yang memahami Regulasi	100	100	100	100	100	100	100%
35.5	Prosentase Gangguan Kamtibmas yang Terpantau	78	100	100	100	100	100	100%
36	Kecamatan							
36.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan (LPM)	5	5	5	5	5	5	100%
36.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	37,161	37,161	38,413	43,436	37.226	43436	117%
36.3	LPM berprestasi	14.8	11.11	11.11	11.11	11	11.11	101%
36.4	PKK aktif	31	31	31	31	31	31	100%
36.5	Posyandu aktif	270	270	399	389	270	389	144%
36.6	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	4	4	3	3	3	3	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
36.7	Prosentase LPMD/Organisasi Pemberdayaan yang aktif menjalankan fungsinya	100%	100	100%	100	100	100	100%
36.8	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100	100%	100	100	100	100%
36.9	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100%	100	100%	100	100	100	100%
36.10	Jumlah LPMK Aktif	27	27	27	27	27	27	100%
36.11	Jumlah Posyandu Balita	270	270	270	270	270	270	100%
36.12	Jumlah Alat yang dipromosikan	1	1	1	1	1	1	100%
36.13	Jumlah LKK Sehat	26	27		27	27	27	100%
III ASPEK DAYA SAING DAERAH								
A Fokus Kemampuan Ekonomi daerah								
1 Otonomi Daerah								
1.1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0.0009412	0.0026805	0.0027	0.0033877	0.00341908	0.0028883	84%
1.2	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100%
2 Pertanian								
2.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	679,830		3,007,963	1465568	507,477	604,752	119%
2.2	Pengeluaran konsumsi pangan per kapita	53.7		32.57	42.91	44.9	41.9	107%
2.3	Nilai Tukar Petani (NTP)	1.04	1.04	1.05	1.06	1.06	1.068	101%
2.4	Luas wilayah produktif	1,041	1,038	1,031	1,015	1,007	1,010	100%
B Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1 Perhubungan								
1.1	Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum	5.987.264 org/12.333 ton	5.887.254 org/11.505 ton	5.824.523 org/ 13.015	6.770.650 org/13.020 ton	5.824.523 org/ 13.018	6.460.900 org/ 13.030 ton	116%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1.2	Jumlah Orang/barang melalui terminal per tahun	5.987.264 org/12,333 ton	5.887.254 org/11.505 ton	5.824.523 org/ 13.015	6.770.650 org/13.020 ton	5.824.523 org/ 13.018	6.460.900 org/ 13.030 ton	116%
2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	100	100	100	100%
2.2	Luas wilayah banjir	11	9	8	4	0	0	100%
2.3	Luas Wilayah Perkotaan	3,323	3,323	3,323	3323	33	33	100%
2.4	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW	100	100	100	100	100	100	100%
2.5	Meningkatnya Jumlah Kawasan Bebas Banjir	100	100	100	100	100	100	100%
2.6	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	3	3		8	3	17	567%
2.7	Tersedianya Pedoman Perencanaan Teknis Tata Ruang	3	3	7	3	3	16	533%
2.8	Persentase Pemanfaatan Ruang	100	100	100	100	100	100	100%
3	Tenaga Kerja							
3.1	Luas wilayah industri	65.33	65.33	75	83.22	80	83.22	104%
4	Lingkungan Hidup							
4.1	Pencemaran Status Mutu Air	100	100	100	100	100	100	100%
4.2	Hasil Penilaian Memenuhi passing Grade yang ditetapkan Tim Penilai Adipura	ya	Ya	ya	ya	Ya	ya	100%
4.3	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	100	100	100	100	100	100	100%
4.4	Persentase Masyarakat yang Peduli dan Berbudidaya Lingkungan	100	100	214	100	100	100	100%
4.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54.04	60.15	61.42	64.22	68.51	63.87	93.23%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	4	5	6
D	Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Rasio ketergantungan	18.44	18.36	42.08	43.08	44.79	42.69	105%
1.2	Rasio lulusan S1/S2/S3	16.96	19.3	14.61	10.56	9.68	10.26	106%
1.3	Rasio Tenaga Kerja Terdidik terhadap tenaga kerja tidak terdidik	100	100	100	100	91.67	99.88	109%

Tabel III.5
Capaian Indikator Urusan Pembangunan Daerah Tahun 2019

Urusan	Jumlah	Tercapai	Tidak tercapai	%
1. Pendidikan	25	24	1	96.0
2. Kesehatan	36	33	3	91.7
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	21	0	100
4. Sosial	7	5	2	71.4
5. Perumahan Rakyat dan Permukiman	14	14	0	100
6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16	16	0	100
7. Pangan	5	5	0	100
8. Ketenagakerjaan	11	10	1	90.9
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	8	0	100
10. Pertanahan	2	2	0	100
11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	9	0	100
12. Lingkungan Hidup	15	13	2	86.7
13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	5	0	100
14. Perhubungan	17	16	1	94.1
15. Komunikasi dan Informatika	20	17	3	85.0
16. Koperasi dan UKM	9	9	0	100
17. Penanaman Modal	10	10	0	100
18. Kepemudaan dan Olah Raga	12	12	0	100
19. Statistik	3	3	0	100
20. Kebudayaan	10	10	0	100
21. Perpustakaan	5	5	0	100
22. Kearsipan	3	3	0	100
23. Kelautan dan Perikanan	3	3	0	100
24. Pariwisata	4	4	0	100
25. Pertanian	16	16	0	100
26. Perdagangan	9	9	0	100
27. Perindustrian	7	7	0	100
28. Transmigrasi	2	2	0	100
29. Unsur Staf	23	21	2	91.3
30. Pengawasan	3	3	0	100
31. Pendidikan dan Pelatihan	7	7	0	100
32. Keuangan	10	9	1	90.0
33. Perencanaan	16	16	0	100
34. Penelitian dan Pengembangan	1	1	0	100
35. Kecamatan	13	13	0	100
36. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11	10	1	90.9
Jumlah	388	371	17	95,62

Sumber : Tim Teknis dan Perumus LKPJ

Hasil evaluasi berdasarkan aspek pembangunan daerah sebanyak 388 Indikator kinerja, yang mencapai/ melampaui target sebesar 371 indikator (tingkat ketercapaian 95,62%), sebanyak 17 indikator tidak mencapai target. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III.6
Capaian Aspek Pembangunan Daerah Tahun 2019

Aspek	Jumlah	Tercapai	Tidak tercapai	%
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	26	23	3	88,46
Aspek Pelayanan Umum	327	315	12	96,33
Aspek Daya Saing Daerah	35	33	2	94,29
Jumlah	388	371	17	95,62

Sumber : Tim Teknis dan Perumus LKPJ

Dari rekapitulasi data capaian matrik tersebut diatas bahwa terdapat 388 indikator pengukuran kinerja berdasarkan aspek pembangunan RPJMD, dimana 371 indikator telah mencapai target dan sebesar 17 indikator belum mencapai target, maka capaian masing masing aspek sbb :

- Aspek Kesejahteraan Masyarakat capaiannya **tinggi** (88,46%)
- Aspek Pelayanan Umum capaiannya **tinggi** (96,33%)
- Aspek Daya Saing capaiannya **tinggi** (95,62%)

Dengan demikian bahwa berdasarkan pengukuran aspek pembangunan daerah Tahun 2019, Pemerintahan Kota Madiun telah **Berhasil dalam meningkatkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan umum dan Aspek Daya Saing Daerah dengan PRESTASI TINGGI.**

Adapun perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat terjadi karena adanya perubahan besaran persen/ rate dari satu atau lebih indikator pendukung tiap aspek pembangunan dalam periode tersebut.

Tabel III.7
Perkembangan Capaian Aspek Pembangunan Daerah
Tahun 2015 s.d. 2019

Aspek	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	56%	60%	72,0%	96,15%	88,46%
Aspek Pelayanan Umum	75%	63%	82%	96,33%	96,33%
Aspek Daya Saing Daerah	75%	63%	89%	97,14%	94,29%
Jumlah	74%	63%	82%	96,39%	95,62%

Sumber : Tim Teknis dan Perumus LKPJ

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran aspek kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019, capaian kinerja pembangunan daerah pada periode RPJMD 2014-2019 terus mengalami perbaikan. Artinya telah dilakukan percepatan pembangunan pada tiap-tiap aspek dengan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Madiun melalui kebijakan anggaran yang memadai.

Tabel III.1.1
 Capaian Kinerja Indikator Berdasarkan Misi Kota Madiun
 Laporan keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1: Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat						
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah kelompok Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	108 kelompok	108 kelompok	108 kelompok	100%
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82,19	82.5	82.28	99.73%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66	93.8	93.47	99.65%
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa						
1.	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	B	BB	B	96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82.85	79.5	88.45	111.26%
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	100%
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat						
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,10 Tahun	12 Tahun	11,13 Tahun	92.75%
		Angka Harapan Lama Sekolah	14.2	14.15	14.39	101.70%
		Angka Melek Huruf	100%	100%	100%	100.00%
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,59 Tahun	72,59 Tahun	72,59 Tahun	100.00%
		Angka Kematian Ibu (AKI)	0%	38.59%	39.53%	102.44%
		Angka Kematian Bayi (AKB)	6.64%	6.95%	7.51%	108.06%

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	94.51%	93%	93.64%	100.69%
		Rasio Rumah layak Huni	99.65%	99.42%	99.95%	100.53%
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	1.61%	1.50%	1.64%	109.33%
	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.22%	68.51%	63.80%	93.13%
		Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	19.55%	19%	20.01%	105.32%
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat						
1.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga	Nilai realisasi Investasi	966,734 M	361 M	968 M	268.14%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	0.81	5.08	4.01	121.06%
	Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor serta industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB	23,21%	23.86%	26.06%	109.22%
		Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	17,48%	17.20%	17.83%	103.66%
Meningkatnya Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap PDRB	16,09%	16.54%	15.72%	95.04%	
	Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	154.48	46.5	154.44	332.13%
		PDRB Perkapita	68,94	70.84	72.09	101.76%
		Indeks Gini	0.36	0.32	0.36	112.50%
2.	Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan	100%	100%	100%	100.00%
		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas tertangani	100%	100%	100%
	Angka pelanggaran ketertiban umum	98.95%	98%	100%	102.04%	

Sumber : Tim Teknis dan Perumus LKPJ 2019

*Data sementara

A. Urusan Wajib yang dilaksanakan

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, Dinas pendidikan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.

Tujuan dan Sasaran urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatnya kualitas Pendidikan Dasar yang berkualitas;
3. Meningkatnya kualitas pembelajaran Non Formal;
4. Meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan dasar yang berorientasi pada pembentukan karakter;
5. Meningkatnya pendidikan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan PAUD;
2. Meningkatnya kualitas Lembaga PAUD;
3. Meningkatnya akses Pendidikan Dasar;
4. Meningkatnya kapasitas Pendidikan Masyarakat;
5. Meningkatnya mutu lulusan Pendidikan Dasar dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Pendidikan Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.8
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun
Tahun 2018 - 2019

No	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
			Tahun 2018	Tahun 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat						
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,11 Tahun	12 Tahun	11,13 Tahun	92,27
		Angka Harapan Lama Sekolah	14,20 Tahun	14,15 Tahun	14,39 Tahun	101,17
		Angka Melek Huruf	100%	100%	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata – rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal.

Angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 adalah 11,11. Tahun 2019 untuk rata-rata lama sekolah yaitu 11,13.

Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,13 maka artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun telah menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya suport dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan Program BOS dari Pemerinah Pusat.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2018 adalah 14,20, sedangkan capaian harapan lama sekolah pada tahun 2019 adalah 14,39.

Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kota Madiun sudah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa.

3. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf usia 15 tahun keatas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional)

Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, tahun 2018 sudah mencapai 100% demikian juga pada tahun 2019 angka melek huruf sudah 100%

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran masing-masing.

Tabel III.9
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2018 – 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
A	Fokus Kesejahteraan Sosial				
1	Pendidikan				
1.1	Angka Melek Huruf	100	100	100	100%
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,10	12	11,13	92,27%
1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	145,18	100	143,28	134,28%
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	171,14	100	170,76	170,76%
1.5	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	134,84	100	135,45	135,45%
1.6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	136,19	90	131,33	145,92%
1.7	Pendidikan yang ditamatkan :				
1.8	Pendidikan Dasar	28,44	31,73	27,65	87,14%
1.9	Angka Harapan Lama Sekolah	14,2	14,15	14,39	101,17
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan				
1.1	Pendidikan Dasar				
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	140,16	100	135,75	135,75%
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:39	1:38	1:52	136,84%
1.1.3	Rasio guru/murid	1:16	1:20	1:16	116%
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:22	1:32	1:28	133%
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	134,78	100	133,39	133,39%
1.2	Fasilitas Pendidikan				
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	96,95	85	95,24	112,05 %
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	96,36	72	98,68	137,05%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	106,66	100	109	109%
1.4	Angka Putus Sekolah				
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0	0	0	100%
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0	0	0	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
1.5	Angka Kelulusan				
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan	100	100	100	100%
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	128,52	100	111,35	111,35%
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	98,02	92	96,1	104,46%
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100	100%
1.6	Manajemen Pelayanan Pendidikan				
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100%
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah	100	100	100	100%
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	1250	1.250	1.427	114%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional)

Angka Melek Huruf usia 15 tahun keatas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional)

Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, tahun 2018 sudah mencapai 100% demikian juga pada tahun 2019 angka melek huruf sudah 100%

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal.

Angka rata-ata lama sekolah adalah rata –rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal.

Angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 adalah 11,11. Sedangkan data sementara dari BPS Kota Madiun tahun 2019 untuk rata-rata lama sekolah yaitu 11,13.

Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,13 maka artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun telah menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya suport dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan Program BOS dari Pemerinah Pusat.

3. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI** menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang SD/MI yang secara umum tidak memperhatikan mengenai usia sekolah.

Capaian tahun 2018 adalah sebesar 145,18, sedangkan capaian tahun 2019 adalah sebesar 143,28. Tahun 2019 ada penurunan sebesar 1,9 dari capaian tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya peraturan penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun 2019 menggunakan sistim Zonasi sehingga penduduk sekitar Kota Madiun pada tahun 2018 masih bebas mendaftar sekolah di kota Madiun maka dengan adanya regulasi baru maka penduduk sekitar Kota Madiun sangat terbatas mendaftar sekolah di Kota Madiun. Selain dari itu juga adanya usia di 12 tahun sudah bersekolah di jenjang SMP/MTs dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2019 ada penurunan di banding tahun 2018. Penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2018 sebanyak 14.668 orang sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 14.534 orang.

4. **APK SMP/MTs/Paket B**

Capaian APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2019 adalah sebesar 170,76, dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang capaiannya adalah sebesar 171,14 maka pada tahun 2019 capaian APK SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan sebesar 0,38. Sama dengan APK SD/MI penurunan capaian ini dikeranakan adanya perubahan peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru yang menggunakan sistim Zonasi. Selain dari itu juga ada penurunan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Selain itu juga dikeranakan ada penduduk usia 13-15 tahun sudah bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MTs.

5. **Angka Partisipasi Murni (APM)** menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang SD/MI dengan memperhatikan mengenai usia sekolah atau menunjukkan anak yang sekolah tepat usia sekolah.

Realisasi capaian tahun 2019 adalah sebesar 135,45 sedangkan capaian tahun 2018 adalah 136,19, maka pada tahun 2019 ada penurunan capaian sebesar 0,74. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah penduduk usia 7-12 tahun, pada tahun 2018 jumlah penduduk usia 7-12 sebanyak 14.668 orang sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 14.534 orang.

6. **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**

Realisasi capaian tahun 2018 adalah sebesar 136,19 sedangkan capaian tahun 2019 adalah sebesar 131,33. Pada tahun 2019 ada penurunan sebesar 4,86. Hal ini disebabkan karena ada Regulasi baru tentang Penerimaan Peserta Didik baru yang menggunakan zonasi sehingga penduduk sekitar Madiun tidak dapat mendaftar sekolah di Kota Madiun.

7. **Pendidikan yang ditamatkan meliputi Pendidikan Dasar yang Ditamatkan.**

Pendidikan yang ditamatkan Pendidikan Dasar pada tahun 2018 capaiannya adalah sebesar 28,44, sedangkan capaian tahun 2019 sebesar 27,65. Untuk indikator Pendidikan yang ditamatkan Pendidikan dasar setiap tahunnya mengalami penurunan tetapi hal ini adalah penurunan yang positif. Maksudnya adalah bahwa tamatan pendidikan penduduk Kota Madiun sudah tidak pada jenjang pendidikan dasar lagi tetapi sudah tamatan Pendidikan Menengah bahkan tamatan D-II, D-III, S1, S2 dan bahkan S3.

No	Tamatan	Jumlah	Prosentase
1	Pendidikan Dasar	58.096	27,65
2	Pendidikan Menengah	73.032	34,75
3	Diploma-II	497	0,24
4	Diploma-III	5.755	2,74
5	S1	20.042	9,54
5	S2	1.384	0,65
6	S3	34	0,02

8. **Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)**

Digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs.

Untuk usia sekolah dasar yaitu usia 7-12 tahun capaiannya pada tahun 2018 adalah sebesar 134,97% sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 135,75%. Dibandingkan dengan tahun 2018 ada kenaikan sebesar 0,78%. Jumlah penduduk usia sekolah Menengah Pertama usia 13-15 di Kota Madiun sebanyak 6.428 orang, sedangkan jumlah siswa sekolah Menengah Pertama usia 13-15 adalah sejumlah 8.442 orang. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Sekolah dasar di Kota Madiun sebanyak 14.534 orang, sedangkan jumlah jumlah siswa Sekolah Dasar usia 7-12 tahun adalah sejumlah 19.687 orang.

Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun. Banyaknya jumlah siswa usia 7-12 dan usia 13-15 tahun karena ada siswa dari luar Kota Madiun yang sekolah di Kota Madiun.

9. **Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar**

Adalah untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan.

Rasio ini adalah merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk tahun 2018 capaiannya adalah sebesar 39, sedangkan pada tahun 2019 capainnya adalah sebesar 52. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 52 siswa per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi.

10. **Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar**

Capaian pada tahun 2018 adalah 1:20, artinya bahwa satu orang guru menangani 20 siswa, sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah 1:16. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio

minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta didik.

11. **Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tahun 2018 adalah 1:22 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 22 siswa. Untuk tahun 2019 capainnya adalah 1:28. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Dibandingkan dengan tahun 2018 rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata ada peningkatan yaitu kalau tahun 2018 1 (satu) orang guru menangani 22 anak tetapi pada tahun 2019 satu orang guru menangani 28 anak, hal ini dikarenakan adanya perekrutan guru CPNS guru di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 tahun 2011 tentang penataan guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu minimal 20 peserta didik/kelas.

12. **Kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik**

Capaian kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik tahun 2018 96,36%, sedangkan capaian tahun 2019 adalah sebesar 96,88%. Dibandingkan dengan tahun 2018 maka capaian tahun 2019 ada kenaikan sebesar 0,52%. Hal ini karena ada perhatian dari Pemerintah Kota Madiun untuk rehab dan pembangunan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan maupun penambahan ruang sekolah.

13. **APK Pendidikan anak usia dini (PAUD) disini adalah APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak.**

Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2018 capainnya adalah 106,66%. Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2019 adalah sebesar 109%, sehingga ada kenaikan sebesar 2,34%. Jumlah penduduk usia 4-6 tahun pada tahun 2019 sebanyak 5.306 dan jumlah siswa TK/RA usia 4-6 tahun adalah 5.766.

14. **Angka putus sekolah pendidikan dasar**

Angka putus sekolah pendidikan dasar pada tahun 2018 adalah 0. Angka Putus sekolah pada tahun 2019 adalah 0, atau dengan kata lain bahwa di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat.

15. **Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)** adalah persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2018 capainya adalah 100%, demikian juga angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2019 capainya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi siswa SD dan SMP baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota.

16. **Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**

Capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2018 adalah 98,02, sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah 98,07%. Dengan jumlah total guru TK, SD dan SMP sebanyak 1.972 guru.

No	Kualifikasi	Tahun 2018	Tahun 2019
1	SMA	11	11
2	D1	1	4
3	D2	15	17
4	D3	1	6
5	DIV/S1	1.277	1.818
6	S2	109	116

17. **Pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK**

Capaian pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada tahun 2018 adalah 100%. Dan pada tahun 2019 capainya adalah 100%.

Pengelolaan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai

informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai informasi pendidikan tingkat Kota yang dapat dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien.

Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan terkoneksi dengan Pusat data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru serta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Mulai tahun 2015 hingga saat ini Data Pokok Pendidikan menjadi dsatu-satunya basis data bagi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di update terus menerus. Data tersebut harus di perbaharui setiap saat dengan sistem online yang terkoneksi langsung dengan server Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan di upload secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis web dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.

18. Sekolah Semua Jenjang Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan NBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari :

- a. Sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
 - b. Sekolah menyusun Rencana Kerja tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
 - c. Sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan
-

pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Di Kota Madiun semua sekolah sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap tahun anggaran dan tahun ajaran.

19. **Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional**

Capaian pada tahun 2018 adalah 1.250 guru, sedangkan pada tahun capaian 2019 adalah sebanyak 1.472 guru telah sesuai dengan target RPJMD. Hal ini disebabkan adanya guru CPNS tahun 2019 sejumlah 76 orang guru.

b. **Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang dilaksanakan di **Dinas Pendidikan** Kota Madiun pada Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
4	Program manajemen pelayanan pendidikan	1	kegiatan operasional BOS tingkat kota
		2	kegiatan pengembangan dan implementasi informasi pendidikan berbasis IT
		3	kegiatan operasional BOS madrasah diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov
		4	kegiatan BOP bantuan beasiswa mahasiswa (BBM)
5	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1	kegiatan sertifikasi guru
		2	kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru
		3	kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan

No	Program	Kegiatan	
		4	kegiatan seleksi guru berprestasi, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi dan OSN
		5	kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah
		6	kegiatan bantuan pendidikan S1/S2/S3 PGSD
		7	kegiatan peningkatan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
6	Program pendidikan dasar	1	kegiatan penerimaan peserta didik baru
		2	kegiatan penyelenggaraan SMP terbuka
		3	kegiatan penyelenggaraan SMPN 1
		4	kegiatan penyelenggaraan SMPN 2
		5	kegiatan penyelenggaraan SMPN 3
		6	kegiatan penyelenggaraan SMPN 4
		7	kegiatan penyelenggaraan SMPN 5
		8	kegiatan penyelenggaraan SMPN 6
		9	kegiatan penyelenggaraan SMPN 7
		10	kegiatan penyelenggaraan SMPN 8
		11	kegiatan penyelenggaraan SMPN 9
		12	kegiatan penyelenggaraan SMPN 10
		13	kegiatan penyelenggaraan SMPN 11
		14	kegiatan penyelenggaraan SMPN 12
		15	kegiatan penyelenggaraan SMPN 13
		16	kegiatan penyelenggaraan SMPN 14
		17	kegiatan pembangunan gedung sekolah
		18	kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah
		19	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice
		20	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajaran
		21	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo
		22	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo
		23	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo
		24	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen
		25	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen
		26	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen
		27	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen
		28	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo
		29	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo
		30	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo
		31	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro

No	Program	Kegiatan			
		32	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kanigoro	02	
		33	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kanigoro	03	
		34	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari		
		35	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pilangbango		
		36	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Tawangrejo	01	
		37	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Tawangrejo	02	
		38	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun		
		39	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Manguharjo	01	
		40	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Nambangan Lor	01	
		41	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Nambangan Lor	02	
		42	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Madiun Lor	01	
		43	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Madiun Lor	02	
		44	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Madiun Lor	03	
		45	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Madiun Lor	04	
		46	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Madiun Lor	05	
		47	Kegiatan Penyelenggaraan Nambangan Kidul	01	
		48	Kegiatan Penyelenggaraan Nambangan Kidul	02	
		49	Kegiatan Penyelenggaraan Nambangan Kidul	03	
		50	Kegiatan Penyelenggaraan Nambangan Kidul	04	
		51	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Winongo	01	
		52	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Winongo	02	
		53	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong		
		54	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan		
		55	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pangongangan	01	
		56	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pangongangan	02	
		57	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten		
		58	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Taman	01	
		59	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Taman	02	
		60	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Taman	03	
		61	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pandean	01	

No	Program	Kegiatan			
		62	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pandean	02	
		63	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo		
		64	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Mojorejo	01	
		65	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Mojorejo	02	
		66	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Manisrejo	01	
		67	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Manisrejo	02	
		68	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Manisrejo	03	
		69	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Manisrejo	04	
		70	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Demangan	01	
		71	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Demangan	02	
		72	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Josenan	01	
		73	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Josenan	02	
		74	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Josenan	03	
		75	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron		
		76	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen		
		77	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kartoharjo	01	
		78	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kartoharjo	02	
		79	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kartoharjo	03	
		80	Kegiatan Dana BOS pada SDN Klegen	01	
		81	Kegiatan Dana BOS pada SDN Klegen	02	
		82	Kegiatan Dana BOS pada SDN Klegen	03	
		83	Kegiatan Dana BOS pada SDN Klegen	04	
		84	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo		
		85	Kegiatan Dana BOS pada SDN Rejomulyo	01	
		86	Kegiatan Dana BOS pada SDN Rejomulyo	02	
		87	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kanigoro	01	
		88	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kanigoro	02	
		89	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kanigoro	03	
		90	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari		
		91	Kegiatan Dana BOS pada SDN		

No	Program	Kegiatan
		Pilangbango
		92 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo
		93 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo
		94 Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun
		95 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo
		96 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor
		97 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor
		98 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor
		99 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor
		100 Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor
		101 Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor
		102 Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor
		103 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul
		104 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul
		105 Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul
		106 Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul
		107 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo
		108 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo
		109 Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong
		110 Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan
		111 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan
		112 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan
		113 Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten
		114 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman
		115 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman
		116 Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman
		117 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean
		118 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean
		119 Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo
		120 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo
		121 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02

No	Program	Kegiatan	
			Mojorejo
		122	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo
		123	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo
		124	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo
		125	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo
		126	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan
		127	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan
		128	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan
		129	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan
		130	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan
		131	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron
		132	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen
		133	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1
		134	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2
		135	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3
		136	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4
		137	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5
		138	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6
		139	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7
		140	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8
		141	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9
		142	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10
		143	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11
		144	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12
		145	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13
		146	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14
		147	Kegiatan pelaksanaan Uji coba, USBN dan UN SD dan SMP
		148	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat
		149	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP
		150	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival lomba seni siswa nasional SD dan SMP
7	Program pendidikan anak usia dini	1	kegiatan bantuan BOP PAUD
		2	kegiatan seleksi dan pembinaan apresiasi PTK PAUDNI berprestasi
		3	kegiatan pusat kegiatan gugus PAUD terpadu kota madiun
		4	kegiatan workshop kurikulum PAUD
		5	kegiatan penyelenggaraan TK pembina

No	Program	Kegiatan	
		6	kegiatan pagelaran Hari Anak Nasional
8	Program pendidikan non formal	1	kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C
		2	kegiatan akreditasi pendidikan non formal dan PAUD
		3	kegiatan workshop peningkatan pengelolaan perpustakaan sekolah
		4	kegiatan bimbingan teknis ekstra kurikuler pembina pramuka
		5	kegiatan pembinaan lembaga non formal, kursus dan pendidikan masyarakat
		6	kegiatan gebyar PNF dalam rangka hari aksara internasional (HAI)
		7	kegiatan workhop penyusunan bahan ajar mulok bahasa daerah

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang direalisasikan **Dinas Pendidikan** Kota Madiun pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	4.608.027.380,00	3.252.832.231,00
	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	4.204.616.780,00	2.849.421.631,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas pendidikan bernilai baik	1 lembaga	1 lembaga
	2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	403.410.600,00	403.410.600,00
	Output : Jumlah perjalanan dinas	105 kali	200 kali
	Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas pendidikan bernilai baik	105 kali	200 kali
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	384.957.800,00	246.141.800,00
	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	63.868.000,00	63.855.050,00
	Output : Jumlah lembaga lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas pendidikan bernilai baik	1 lembaga	1 lembaga
	2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	123.744.800,00	79.611.750,00
	Output : Jumlah kendaraan	155 unit kendaraan dinas	3 unit mobil, 216 sepeda motor
	Outcome : Akuntabilitas	155 unit	3 unit mobil, 216

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	kinerja dinas pendidikan bernilai baik	kendaraan dinas	sepeda motor
3	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor	197.345.000,00	102.675.000,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : Anknuntabilitas kinerja dinas pendidikan bernilai baik	1 lembaga	1 lembaga
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74.961.680,00	67.688.319,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	74.961.680,00	67.688.319,00
	Output : Jumlah dokumen	9 dokumen	9 dokumen
	Outcome : Satuan Pendidikan menerapkan manajemen berbasis pendidikan	9 dokumen	9 dokumen
4	program manajemen pelayanan pendidikan	434.981.370,00	395.345.229,00
1	kegiatan operasional BOS tingkat kota	79.990.600,00	79.420.800,00
	Output : jumlah lembaga	92 lembaga	92 lembaga
	Outcome : Satuan Pendidikan menerapkan manajemen berbasis pendidikan	92 lembaga	92 lembaga
2	kegiatan pengembangan dan implementasi informasi pendidikan berbasis IT	200.000.000,00	172.770.922,00
	Output : Jumlah lembaga	142 lembaga	142 lembaga
	Outcome : Satuan Pendidikan menerapkan manajemen berbasis pendidikan	201 lembaga	201 lembaga
3	kegiatan operasional BOS madrasah diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	99.990.770,00	95.246.076,00
	Output : Jumlah lembaga	49 lembaga	49 lembaga
	Outcome : Satuan Pendidikan menerapkan manajemen berbasis pendidikan	49 lembaga	49 lembaga
4	kegiatan BOP bantuan beasiswa mahasiswa (BBM)	55.000.000,00	47.907.431,00
	Output : Jumlah Mahasiswa	300 orang	392 orang
	Outcome : Meningkatnya mahasiswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi	300 orang	392 orang
5	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1.802.910.000,00	1.105.929.125,00
1	kegiatan sertifikasi guru	213.385.000,00	143.339.588,00
	Output : Jumlah guru	16 guru	7 guru
	Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatihan	16 guru	7 guru

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	profesional berkelanjutan		
2	kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru	137.500.000,00	89.897.288,00
	Output : Jumlah guru	500 guru	157 guru
	Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan	500 guru	157 guru
3	kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan	100.349.000,00	37.871.398,00
	Output : Jumlah lembaga	75 lembaga	134 lembaga
	Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan	75 lembaga	134 lembaga
4	kegiatan seleksi guru berprestasi, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi dan OSN	300.237.000,00	237.127.915,00
	Output : Jumlah orang	313 orang	313 orang
	Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan	313 orang	313 orang
5	kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah	92.772.000,00	55.582.290,00
	Output : Jumlah kepala sekolah	85 kepala sekolah	85 kepala sekolah
	Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan	85 kepala sekolah	85 kepala sekolah
6	kegiatan bantuan pendidikan S1/S2/S3 PGSD	140.899.000,00	76.015.054,00
	Output : Jumlah guru	9 guru	9 guru
	Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan	4 guru	4 guru
7	kegiatan peningkatan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	817.768.000,00	466.095.592,00
	Output : Jumlah guru	572 guru	572 guru
	Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan	572 guru	572 uru
6	Program pendidikan dasar	97.066.791.389,00	88.719.927.373,18
1	kegiatan penerimaan peserta didik baru	228.851.920,00	172.766.163,00
	Output : Jumlah lembaga	71 lembaga	71 lembaga
	Outcome : Rata-rata nilai sikap jujur pada peserta didik SD dan SMP minimal baik	71 lembaga	71 lembaga

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
2	kegiatan penyelenggaraan SMP terbuka	74.815.000,00	36.597.000,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : Operasional penyelenggaraan sekolah	1 lembaga	1 lembaga
3	kegiatan penyelenggaraan SMPN 1	2.148.658.000,00	2.100.856.943,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
4	kegiatan penyelenggaraan SMPN 2	1.413.239.000,00	1.241.079.387,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
5	kegiatan penyelenggaraan SMPN 3	1.240.281.000,00	1.201.128.773,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
6	kegiatan penyelenggaraan SMPN 4	1.715.615.100,00	1.635.441.975,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
7	kegiatan penyelenggaraan SMPN 5	791.852.000,00	771.504.915,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
8	kegiatan penyelenggaraan SMPN 6	1.126.710.000,00	1.049.446.143,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
9	kegiatan penyelenggaraan SMPN 7	1.678.064.000,00	1.587.250.368,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
10	kegiatan penyelenggaraan SMPN 8	1.311.331.000,00	1.184.875.022,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
11	kegiatan penyelenggaraan SMPN 9	1.119.828.000,00	1.057.674.925,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
12	kegiatan penyelenggaraan SMPN 10	1.631.927.000,00	1.365.730.964,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
13	kegiatan penyelenggaraan SMPN 11	1.058.936.000,00	997.169.233,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
14	kegiatan penyelenggaraan SMPN 12	1.385.408.000,00	1.240.649.627,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
15	kegiatan penyelenggaraan SMPN 13	1.095.932.000,00	983.922.658,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
16	kegiatan penyelenggaraan SMPN 14	886.695.000,00	819.345.442,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
17	kegiatan pembangunan gedung sekolah	13.387.450.000,00	12.249.750.440,87
	Output : Jumlah paket	7 paket	7 paket
	Outcome : APS SD dan SMP	7 paket	7 paket
18	kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah	19.170.453.840,00	17.122.421.927,25
	Output : Jumlah paket	21 paket	21 paket
	Outcome : APS SD dan SMP	21 paket	21 paket
19	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice	930.957.250,00	719.037.712,00
	Output : Jumlah lembaga	106 lembaga	135 lembaga
	Outcome : APS SD dan SMP	106 lembaga	135 lembaga
20	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajar	867.361.720,00	516.882.678,00
	Output : Jumlah lembaga	93 lembga	95 lembaga
	Outcome : APM SD dan SMP	93 lembaga	95 lembaga
21	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo	537.917.300,00	501.112.949,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : APM SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
22	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo	297.531.000,00	243.834.353,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
23	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo	164.743.000,00	154.726.366,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
24	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen	531.986.400,00	525.242.725,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
25	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen	257.823.000,00	247.748.026,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
26	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen	495.590.000,00	465.880.114,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
27	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen	208.635.000,00	203.761.624,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
28	Kegiatan Penyelenggaraan SDN	468.924.000,00	462.723.738,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Oro Oro Ombo		
	Output : jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
29	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo	173.109.000,00	171.280.247,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
30	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo	156.055.000,00	148.405.914,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
31	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro	205.984.000,00	202.498.051,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
32	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro	286.629.000,00	284.015.458,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
33	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro	338.671.000,00	326.067.534,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
34	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari	120.442.000,00	115.025.447,00
	Output : jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
35	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pilangbango	363.741.000,00	354.838.774,00
	Output : Jumlah1 lembaga	1 Lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
36	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo	280.264.000,00	276.990.500,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
37	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo	209.517.500,00	204.425.246,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
38	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun	284.930.000,00	277.054.013,00
	Output : jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
39	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo	552.894.000,00	552.146.679,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
40	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor	450.061.000,00	402.455.593,00
	Output : Jumlah lembaga		
	Outcome : AMP SD dan SMP		
41	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor	316.617.000,00	299.383.368,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
42	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor	384.799.000,00	375.464.586,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
43	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor	273.877.000,00	269.796.045,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
44	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor	1.009.824.000,00	929.529.335,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
45	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor	454.554.000,00	442.933.815,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
46	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor	596.868.000,00	507.139.118
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
47	Kegiatan Penyelenggaraan 01 Nambangan Kidul	283.280.000,00	266.097.355,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
48	Kegiatan Penyelenggaraan 02 Nambangan Kidul	200.827.000,00	193.299.978,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
49	Kegiatan Penyelenggaraan 03 Nambangan Kidul	541.555.000,00	455.967.165,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
50	Kegiatan Penyelenggaraan 04 Nambangan Kidul	254.142.000,00	252.140.183,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
51	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo	452.762.000,00	449.987.647,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
52	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo	223.075.000,00	208.980.962,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
53	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong	247.345.000,00	230.122.543,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
54	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan	578.550.000,00	575.790.580,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
55	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan	202.762.000,00	202.609.338,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
56	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan	437.861.000,00	391.639.250,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
57	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten	421.420.000,00	407.232.041,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
58	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman	655.101.000,00	618.241.866,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
59	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman	221.905.500,00	215.559.790,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
60	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman	220.360.000,00	215.693.335,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
61	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean	493.676.000,00	454.331.847,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
62	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean	508.446.000,00	465.173.508,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
63	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo	629.326.000,00	606.737.282,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
64	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo	363.086.000,00	353.527.122,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
65	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo	807.787.400,00	773.732.725,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
66	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo	588.983.000,00	566.653.185,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
67	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo	448.893.000,00	402.721.622,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
68	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo	305.535.000,00	280.743.957,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
69	Kegiatan Penyelenggaraan SDN	434.155.000,00	416.447.574,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	04 Manisrejo		
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
70	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan	287.043.000,00	283.799.351,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
71	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan	299.111.000,00	275.782.411,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
72	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan	287.041.000,00	273.348.553,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
73	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan	286.628.000,00	245.175.323,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
74	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan	265.808.000,00	255.082.823,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
75	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron	181.931.000,00	181.471.173,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
76	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen	197.099.000,00	187.388.628,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
77	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	293.910.000,00	287.391.183,35
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
78	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	52.877.000,00	49.944.927,50
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
79	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	66.731.000,00	61.971.216,55
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
80	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	296.265.000,00	283.475.363,30
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
81	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	130.933.000,00	116.511.057,23
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
82	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	292.353.000,00	287.066.901,05
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
83	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen	85.986.000,00	83.092.180,01
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
84	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	228.887.000,00	219.591.432,40
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
85	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	87.130.000,00	83.519.704,54
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
86	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	54.130.000,00	49.3443.433,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
87	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	111.701.000,00	101.436.155,67
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
88	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	136.870.000,00	133.692.424,56
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
89	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	144.090.000,00	140.024.089,70
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
90	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	38.707.000,00	35.617.456,47
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
91	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	195.203.000,00	174.806.507,68
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
92	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	133.709.000,00	132.714.754,43
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
93	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	86.472.000,00	79.748.281,70
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
94	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	142.426.000,00	140.545.188,67
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
95	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	272.191.000,00	265.016.256,02
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
96	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	248.286.000,00	244.534.628,06

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
97	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	124.648.000,00	120.593.742,59
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
98	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	105.762.000,00	104.885.900,09
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
99	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	123.298.000,00	119.665.117,29
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
100	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	429.345.000,00	406.281.642,34
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
101	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	318.389.000,00	303.981.516,22
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
102	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	372.672.000,00	369.553.878,53
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
103	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	125.070.000,00	120.055.281,60
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
104	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	91.430.000,00	87.598.401,17
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
105	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	247.994.000,00	247.451.832,31
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
106	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	122.823.000,00	117.686.253,26
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
107	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	287.803.000,00	280.492.176,77
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
108	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	60.622.000,00	50.966.473,70
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
109	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	128.224.000,00	127.741.642,59
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
110	Kegiatan Dana BOS pada SDN	291.212.000,00	284.828.920,41

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Patihan		
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
111	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	77.921.000,00	72.561.710,76
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
112	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	257.885.000,00	250.426.72-,880
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
113	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	146.022.000,00	143.093.604,20
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
114	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	367.227.000,00	363.467.550,83
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
115	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	71.120.000,00	59.827.636,58
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
116	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	86.179.000,00	82.908.985,48
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
117	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean	290.872.000,00	282.590.116,08
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
118	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	271.960.000,00	266.325.875,16
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
119	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	378.982.000,00	370.333.976,37
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
120	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	110.214.000,00	103.042.417,90
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
121	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	440.083.000,00	431.775.739,79
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
122	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	284.729.000,00	281.461.320,61
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
123	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	261.902.000,00	250.590.239,04
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
124	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	149.216.000,00	146.734.269,92
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
125	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	195.743.000,00	185.226.546,27
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
126	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	131.233.000,00	124.261.859,86
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
127	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan	141.639.000,00	140.025.264,70
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
128	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	153.135.000,00	151.882.214,98
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
129	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	155.089.019,00	152.706.691,96
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
130	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	86.594.000,00	83.915.013,80
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
131	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	50.641.000,00	48.853.325,25
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
132	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	71.660.000,00	66.173.341,01
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
133	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	828.326.000,00	810.550.948,35
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
134	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	830.497.000,00	747.164.084,30
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
135	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	578.939.000,00	576.753.336,34
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
136	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	941.158.000,00	913.097.871,88
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
137	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	475.864.000,00	470.117.687,83

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
138	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	682.643.000,00	586.663.912,56
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
139	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	862.921.000,00	766.763.365,31
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
140	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	566.117.000,00	537.478.237,38
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
141	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	608.966.000,00	351.011.557,80
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
142	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	774.917.000,00	646.716.4454,80
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
143	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	733.151.000,00	671.652.494,39
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
144	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	891.422.000,00	851.667.800,33
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
145	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	787.469.000,00	687.404.639,00
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
146	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	426.175.000,00	372.540.847,18
	Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
147	Kegiatan pelaksanaan Uji coba, USBN dan UN SD dan SMP	1.006.230.000,00	855.273.838,50
	Output : Jumlah lembaga	93 lembaga	112 lembaga
	Outcome : APS SD dan SMP	93 lembaga	112 lembaga
148	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat	471.723.920,00	364.126.680,00
	Output : Jumlah lembaga	106 lembaga	106 lembaga
	Outcome : APS SD dan SMP	106 lembaga	106 lembaga
149	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP	322.191.920,00	293.059.330,00
	Output : Jumlah siswa	322 siswa	293 siswa
	Outcome : APS SD dan SMP	322 siswa	293 siswa
150	Kegiatan Olimpiade Olah Raga	1.158.039.600,00	707.291.888,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Siswa Nasional dan Festival lomba seni siswa nasional SD dan SMP		
	Output : Jumlah siswa	309 siswa	425 siswa
	Outcome : APS Sd dan SMP	309 siswa	425 siswa
151	program pendidikan anak usia dini	1.739.905.000,00	1.377.185.712,00
152	kegiatan bantuan BOP PAUD	166.800.000,00	107.959.765,00
	Output : Jumlah lembaga	177 lembaga	180 lembaga
	Outcome : APK PAUD	177 lembaga	180 lembaga
153	kegiatan seleksi dan pembinaan apresiasi PTK PAUDNI berprestasi	171.600.000,00	98.888.536,00
	Output : Jumlah orang	200 orang	97 orang
	Outcome : APK PAUD	200 orang	97 orang
154	kegiatan pusat kegiatan gugus PAUD terpadu Kota Madiun	275.000.000,00	186.696.912,00
	Output : Jumlah gugus	22 gugus	22 gugus
	Outcome : APK PAUD	22 gugus	22 gugus
155	kegiatan workshop kurikulum PAUD	200.200.000,00	134.274.259,00
	Output : Jumlah lembaga	177 lembaga	180 lembaga
	Outcome : APK PAUD	177 lembaga	180 lembaga
156	kegiatan penyelenggaraan TK Pembina	308.705.000,00	285.639.320,00
	Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
	Outcome : APK PAUD	1 lembaga	1 lembaga
157	kegiatan pagelaran Hari Anak Nasional	617.600.000,00	563.726.920,00
	Output : Jumlah anak	2.000 anak	2.000 anak
	Outcome : APK PAUD	2.000 anak	2.000 anak
158	program pendidikan non formal	1.654.850.000,00	1.092.559.096,00
159	kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C	150.000.000,00	75.565.295,00
	Output : Jumlah wajib belajar	120 wajib belajar	150 wajib belajar
	Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksanakan uji kopetensi	120 wajib belajar	150 wajib belajar
160	kegiatan akreditasi pendidikan non formal dan PAUD	162.300.000,00	81.898.793,00
	Output : Jumlah lembaga	30 lembaga	30 lembaga
	Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksanakan uji kopetensi	30 lembaga	30 lembaga
161	kegiatan workshop peningkatan pengelolaan perpustakaan sekolah	251.350.000,00	188.497.820,00
	Output : Jumlah lembaga	95 lembaga	95 lembaga
	Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksanakan uji kopetensi	95 lembaga	95 lembaga
162	kegiatan bimbingan teknis ekstra kurikuler pembina pramuka	578.450.000,00	407.452.783,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah orang	324 orang	330 orang
	Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksanakan uji kopetensi	324 orang	330 orang
163	kegiatan pembinaan lembaga non formal, kursus dan pendidikan masyarakat	130.000.000,00	59.269.610,00
	Output : Jumlah lembaga	154 lembaga	50 lembaga
	Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksanakan uji kopetensi	154 lembaga	50 lembaga
164	kegiatan gebyar PNF dalam rangka hari aksara internasional (HAI)	144.800.000,00	110.225.945,00
	Output : Jumlah lembaga	80 lembaga	80 lembaga
	Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksanakan uji kopetensi	80 lembaga	80 lembaga
165	kegiatan workshop penyusunan bahan ajar mulok bahasa daerah	237.950.000,00	169.648.850,00
	Output : Jumlah lembaga	95 lembaga	95 lembaga
	Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksanakan uji kopetensi	95 lembaga	95 lembaga

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Terdapat beberapa kegiatan perlombaan dengan anggaran sampai tingkat Nasional, namun dikarenakan kejuaraan sampai tingkat Propinsi maka anggaran tidak dapat diserap.
2. Terdapat perbedaan penganggaran honorarium narasumber.
3. Kegiatan Lomba dianggarkan sampai dengan lomba ke tingkat Nasional namun kejuaraan hanya menang sampai tingkat propinsi sehingga anggaran untuk tingkat Nasional tidak terserap.
4. Pelaksanaan ujian Paket A, B dan C yang semula dianggarkan dua tahap namun pelaksanaannya hanya sampai dengan tahap I karena peserta UNBK sudah lulus pada tahap I.

Solusi

2. Kegiatan tahun yang akan datang dilaksanakan sesuai DPA yang ada dan akan mengadakan perubahan di PAK apabila ada perubahan pelaksanaan kegiatan

e. Penghargaan yang diterima

Penghargaan yang diterima Dinas Pendidikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Juara I Nasional Lomba UKS (TK Negeri Pembina)
 - b. Juara I Nasional Kepala Sekolah Berinovasi dalam penjaminan mutu sekolah rujukan (Dra. Sri Mugi Lestari, M.Si Ka. SDN 02 Mojorejo)
 - c. Juara I Nasional PAUD Aku Anak Indonesia Gemar Makan Ikan (KB Joy)
 - d. Juara II Nasional SDN 02 Mojorejo Lomba Budaya Mutu
 - e. Juara II Nasional Lomba FLSSN kategori menyanyi solo (Bernaditta Salwa)
 - f. Juara I Propinsi Jawa Timur Lomba POCIL SDN 03 Madiun Lor.
 - g. Juara I Propinsi Lomba Pelopor Keselamatan Lalu Lintas SMPN
 - h. Juara I Propinsi Lomba Pengawas Sekolah Berprestasi (Sri Mulyani, S.Pd)
 - i. Juara II Propinsi Jawa Timur Kepala Sekolah Berprestasi (Sri Istiana S.Pd PAUD Ka. TK Kartika IX/3)
 - j. Juara III Propinsi Jawa Timur Guru Berprestasi TK Kartika IX/3 (Supini, S.Pd PAUD)
-

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

a. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan di capai Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah :

1. Dalam mewujudkan Misi Kesatu yaitu “Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”, tujuan yang ingin dicapai adalah **“Meningkatkan pertumbuhan penduduk seimbang dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan”**, dengan indikator :
 - a. Prosentase Keluarga Sejahtera Mandiri
2. Dalam mewujudkan Misi Kedua yaitu “Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan yang paripurna, merata, bermutu dan terjangkau“ , tujuan yang ingin dicapai adalah **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**, dengan indikator :
 - a. Angka Harapan Hidup
 - b. Angka Kematian Ibu
 - c. Angka Kematian Bayi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Dalam mewujudkan tujuan *“Meningkatkan pertumbuhan penduduk seimbang dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan”* maka ditetapkan sasaran **“Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga”** dengan indikator :
 - 1) Persentase keluarga sejahtera
2. Dalam mewujudkan tujuan *“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat“* maka ditetapkan sasaran **“Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat serta upaya pelayanan**

kesehatan yang bermutu dan terjangkau dalam penanggulangan penyakit dengan indikator :

- 1) Persentase keluarga sehat
- 2) Persentase penanganan penyakit
- 3) Indeks kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.10
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat						
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,59 Tahun	72,59 Tahun	72,75 Tahun	100,22
		Angka Kematian Ibu (AKI)	0	38,59	39,53	97,56
		Angka Kematian Bayi (AKB)	6,64	6,95	6,32	109,01

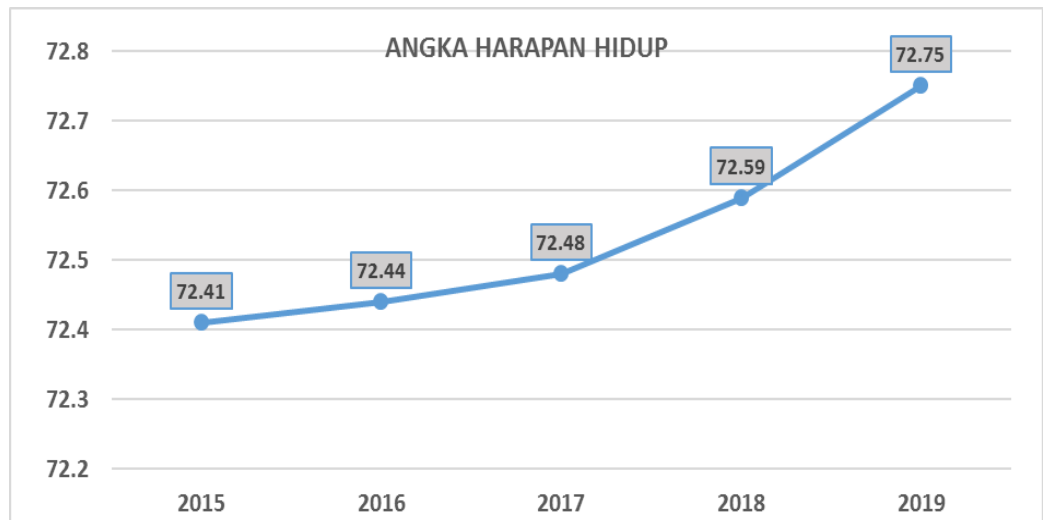
Sumber :Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Data Angka Harapan Hidup (AHH) perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun 2019 yaitu sebesar 72,75 Tahun, diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,59 Tahun. Adapun tren Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Madiun pada Tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik III.1
Tren Angka Harapan Hidup
Kota Madiun



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun

Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun, dari Tahun 2016 ke Tahun 2019 mengalami kenaikan, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor kesehatan berupa:

1. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
2. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia, dimana adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.
3. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.11
 Angka Kematian Ibu
 Di Kota Madiun Tahun 2016 – 2019

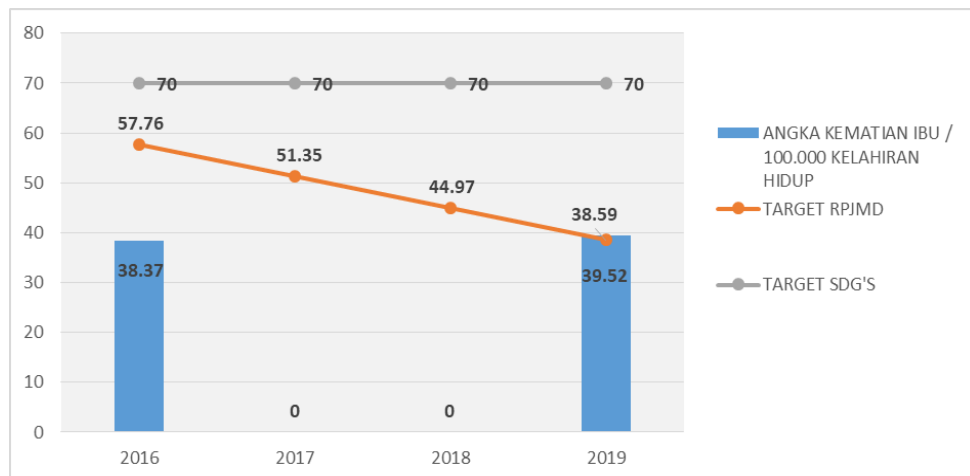
No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Lahir Hidup	2.602	2.583	2.561	2.530
2	Jumlah Kematian Ibu	1	0	0	1
3	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	38,43	0	0	39,53
4	Target RPJMD Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	57,76	51,35	44,97	38,59

Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2019 sebesar 39,53, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang ibu. Kematian tersebut disebabkan adanya penyakit penyerta berat yaitu Kanker pada Hati (Ca Hepar) yang ditemukan pada saat pelaksanaan operasi kelahiran di Rumah Sakit.

Perhitungan Angka Kematian Ibu dipengaruhi jumlah kelahiran hidup. Pada Tahun 2019 perkiraan kelahiran hidup sebanyak 2.530, lebih rendah dari Tahun 2018 yang menyebabkan jika terdapat 1 kematian ibu maka Angka Kematian Ibu sebesar 39,53.

Adapun tren Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik III.2
 Tren Angka Kematian Ibu (AKI)
 Kota Madiun Tahun 2016 –2019



Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa AKI di Tahun 2019 masih dibawah target RPJMD tetapi masih dibawah target SDG'S yaitu sebesar 70 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu adalah:

- a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal.
- b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi.
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas.
- d. Memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC terpadu yaitu 10 T plus skrining Diabetes Militus (DM), Hipertensi, jantung, hepatitis dan HIV/AIDS di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.
- e. Menjalani kerjasama dengan SpOG terkait pelayanan rujukan pada ibu hamil.
- f. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan.

3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12
Angka Kematian Bayi
Di Kota Madiun Tahun 2016 – Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Bayi Lahir Hidup	2606	2583	2561	2530
2	Jumlah Kematian Bayi	19	19	17	16
3	Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 Kelahiran Hidup	7.29	7.36	6.64	6.32

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Tahun 2019 sebesar 6,32 artinya terdapat 6 kematian bayi dari 1.000 Kelahiran Hidup. Jika secara absolut jumlah kematian sebanyak 16 bayi. Hal tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di

Tahun 2018 yaitu sebesar 6,64 dengan jumlah absolut sebanyak 17 kematian bayi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- a. PMT bagi ibu hamil untuk mencegah bayi BBLR.
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (edukasi kontrol sesuai jadwal).
- c. Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah:

- a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal.
- b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi.
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas.
- d. Berkoordinasi dengan Dokter Spesialis Anak terkait pelayanan rujukan bayi dengan kelainan.
- e. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran masing-masing.

Tabel III.13
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan di Kota Madiun Tahun 2018 – 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
B	Fokus Kesejahteraan Sosial				
2	Kesehatan				
2.1	Angka Kelangsungan Hidup bayi	993.7	993.03	993.68	100,02
2.2	Angka Harapan Hidup	72,59	72,59	72,75	100 ,22
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,038	0,01	0.038	(180)
2.4	Prosentase Pelayanan Kesehatan Dasar pada Bayi, Balita, Anak Remaja dan Ibu sesuai standart yang mencapai target	100	92,85	92,86	100,01

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
2.5	Prosentase Balita Gizi Sangat Kurang	0,42	10,92	0,45	195,88
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1 Pendidikan					
2 Kesehatan					
2.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk	0,11	0,13	0,11	115
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1	100
2.3	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,0381	0,0284	0,0381	134,15
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	136,32	48	138,02	287,54
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	906,59	9,27	818,12	8825
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0	0	100
2.7	SOP Pelayanan	444	445	457	102,7
2.8	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani	100	100	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100	100
2.10	Prosentase Rumah Tangga ber-PHBS	65,19	65,5	68,21	104,14
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100
2.12	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100
2.13	angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	38,59	39,53	97,56
2.14	Prosentase Rumah Tangga Sehat	65,19	65,5	68,21	104,14
2.15	Prosentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Pra Bayar	100	100	100	100
2.16	Jumlah Kasus KLB	14	12	9	125
2.17	Prosentase Penanganan Penyakit	100	100	87,5	87,5
2.18	Prosentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	44,4	55,5	59,26	106,77
2.19	Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100	100
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	81,32	81	81,84	101,04
2.21	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	100	100
2.22	Prosentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi Syarat	84,01	85	85,12	100,14

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
2.23	Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standart	100	100	100	100
2.24	Prosentase Penduduk yang di skrining Faktor Resiko PTM	94,84	100	104,67	104,67
2.25	Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI	81,48	70	88,89	126,99
2.26	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	369	200	200	100
2.27	Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart	100	100	100	100
2.28	Prosentase TTU dan TPM sehat	84,12	85	85,61	100,72
2.29	Prosentase Kecukupan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya (sesuai Permenkes 75/2014)	60,8	52	69,79	134,21
2.30	Prosentase Kematian Akibat Penyakit Potensial Wabah	0	<1%	0,82	118
2.31	Angka Kematian Bayi	6,64	6,95	6,32	109,01

Sumber :Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Realisasi capaian angka keberlangsungan hidup bayi Tahun 2019 adalah sebesar 993,68, angka tersebut didapatkan dari 1.000 kelahiran hidup dikurangi angka kematian bayi. Ini menunjukkan bahwa dari 1.000 kelahiran terdapat 993 bayi yang memiliki kelangsungan hidup. Dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III.14
Angka Keberlangsungan Hidup Bayi
Di Kota Madiun Tahun 2016 – Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Angka Kematian Bayi	7,29	7,36	6,64	6,32
2	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi	992,71	992,64	993,36	993,68

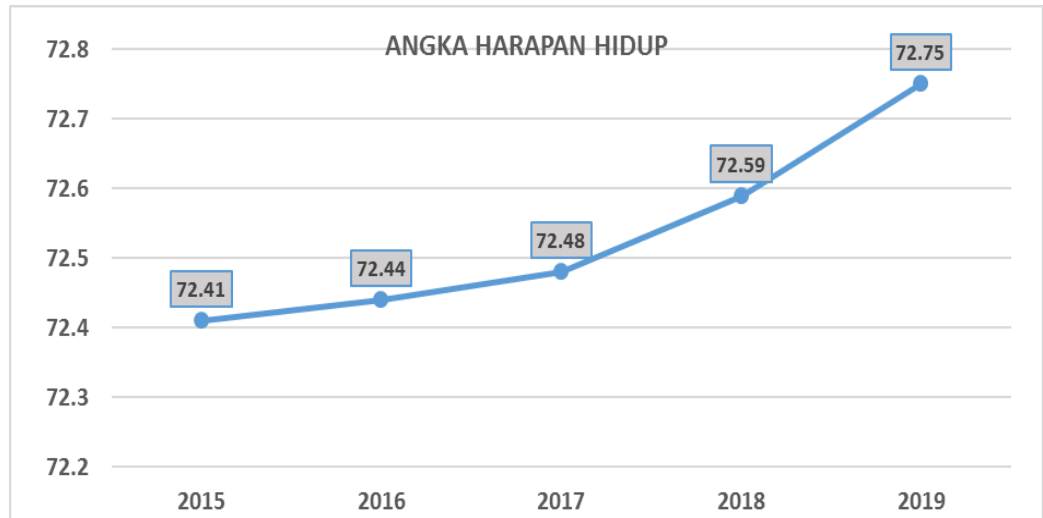
Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

2. Angka Harapan Hidup

Data Angka Harapan Hidup (AHH) perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun 2019 yaitu sebesar 72,75 Tahun, diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,59 Tahun. Adapun tren Angka Harapan

Hidup (AHH) Kota Madiun pada Tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik III.3
Tren Angka Harapan Hidup
Kota Madiun



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun

Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun, dari Tahun 2016 ke Tahun 2019 mengalami kenaikan, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor kesehatan berupa:

1. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
2. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia, dimana adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.
3. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit.

3. Prosentase Balita Gizi Buruk

Prosentase balita gizi buruk pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.15
Balita Gizi Buruk
Di Kota Madiun Tahun 2016 – Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Balita	12.443	12.271	12.117	11.956
2	Jumlah Balita Yang Ditimbang	10.716	10.594	10.497	10.471
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	12	5	4	4
4	Prosentase Balita Gizi Buruk (%)	0,112	0,047	0,038	0,038

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa prosentase Balita Gizi Buruk di Tahun 2019 sebesar 0,038% dengan jumlah absolut sebanyak 4 balita gizi buruk. Angka tersebut masih sama dengan prosentase balita gizi buruk di Tahun 2018. Penyebab terjadinya Balita gizi buruk dikarenakan adanya bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang kurang dari 2500 gram sehingga balita tersebut berpotensi tidak maksimal dalam penyerapan nutrisi makanan yang menyebabkan berat badan tidak naik secara signifikan. Selain itu masih adanya pola asuh dan pola makan yang kurang tepat pada keluarga.

Langkah yang dilakukan untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk adalah:

1. Penimbangan balita di Posyandu setiap bulan sebagai deteksi dini terjadinya penyimpangan pertumbuhan sehingga lebih mudah dalam intervensi sebelum menjadi balita gizi buruk.
2. Pelaksanaan kelas ibu balita.
3. Edukasi kepada masyarakat tentang BBLR dan upaya perbaikan gizi keluarga.
4. Pelatihan cara Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) untuk petugas Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat.
5. Pemberian Makanan Tambahan dan vitamin bagi balita BGM dan 2T sampai tuntas.

6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil mulai ditemukan KEK sampai dengan masa nifas untuk mencegah kelahiran bayi BBLR.
4. Prosentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Bayi, Balita, Anak Remaja Dan Ibu Sesuai Standart Yang Mencapai Target

Pada indikator ini didukung oleh beberapa indikator program kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, dimana diberikan skoring pada indikator yang telah mencapai target dan selanjutnya dirata-rata sebanyak indikator yang mendukung. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.16
Pelayanan Kesehatan Dasar Sesuai Standar
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Uraian	Target Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2019	Skor Tahun 2019
I	KESEHATAN IBU			
1	Kunjungan Bumil K4	100	100	1
2	Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	100	100,04	1
3	Pelayanan Ibu Nifas	99	99,13	1
4	Penanganan Komplikasi Kebidanan	100	99,62	0
II	KESEHATAN BAYI			
5	Kunjungan Neonatus 3 Kali (KN Lengkap)	100	100	1
6	Penanganan Komplikasi Neonatal	90	97,2	1
7	Bayi Yang Diberi ASI Eksklusif	77	77,26	1
8	Desa/Kelurahan UCI	100	100	1
9	Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi	93	98,63	1
III	KESEHATAN BALITA			
10	Balita Paripurna	98	100,1	1
11	DDTK Balita	98	100,1	1
IV	KESEHATAN ANAK			
12	Cakupan Penjaringan Kesehatan/Screening Kelas 1 Baru Siswa SD/MI	100	100	1
13	Cakupan Penjaringan Kesehatan/Screening Kelas 7 Baru Siswa SMP/MTs	100	100	1
V	KESEHATAN REMAJA			
14	Angka Kehamilan Pada Usia Remaja (15-19 Tahun)	21/1000	0,32/1000	1
Prosentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Bayi, Balita, Anak Remaja Dan Ibu Sesuai Standar Yang Mencapai Target				92,86%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Pada tabel diatas terlihat adanya beberapa indikator yang mendukung dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak remaja dan ibu sesuai standar yang mencapai target.

Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian prosentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak remaja dan ibu sesuai standar yang mencapai target sebesar 92,86%. Capaian tersebut sudah memenuhi target Tahun 2019 yaitu sebesar 92,85%. Terdapat satu indikator yang tidak mencapai target yaitu penanganan komplikasi kebidanan. Capaian pada indikator penanganan komplikasi kebidanan di Tahun 2019 sebesar 99,62% dimana tidak mencapai target 100% dari yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena sasaran dari penanganan komplikasi ibu hamil adalah perkiraan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan sebesar 20% dari jumlah ibu hamil yang ada, dimana jumlah ibu hamil disini adalah perhitungan proyeksi estimasi dari Pusdatin Kementerian Kesehatan. Capaian 99,62% ini bukan berarti ada ibu hamil dengan komplikasi tidak ditangani tetapi karena tidak adanya atau tidak diketemukannya ibu hamil dengan komplikasi di masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan capaian di Tahun 2021 adalah:

1. Pelayanan kesehatan ibu sesuai standart.
 2. Pelayanan kesehatan bayi secara paripurna.
 3. Pelayanan kesehatan balita secara paripurna.
 4. Pelayanan skrining pada siswa baru jenjang SD, SMP, SMA.
 5. Pelayanan kesehatan peduli remaja.
 6. Pelatihan kader tiwisada dan kader kesehatan remaja (UKS).
 7. Lomba kader tiwisada dan kader kesehatan remaja.
 8. Pembentukan KP-ASI di masing-masing kelurahan
5. Prosentase Balita Gizi Sangat Kurang (BGM)

Data yang didapat pada pengukuran ini didapatkan dari pengukuran status gizi balita Berat Badan menurut Umur (BB/U), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.17
Balita Gizi Sangat Kurang
Di Kota Madiun Tahun 2016 – Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Balita	12.443	12.271	12.117	11.956
2	Jumlah Balita Yang Ditimbang	10.716	10.594	10.495	10.471
3	Jumlah Balita Gizi Sangat Kurang (BGM)	47	50	44	47
4	Prosentase Balita Gizi Sangat Kurang (BGM)	0,44	0,47	0,42	0,45

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa prosentase Balita Gizi Sangat Kurang (BGM) di Tahun 2019 sebesar 0,45% dengan jumlah absolut sebanyak 47 balita BGM. Angka tersebut mengalami kenaikan yang disebabkan adanya bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang kurang dari 2500 gram sehingga balita tersebut berpotensi tidak maksimal dalam penyerapan nutrisi makanan yang menyebabkan berat badan tidak naik secara signifikan. Langkah yang dilakukan untuk menurunkan jumlah balita gizi sangat kurang (BGM) adalah:

1. Penimbangan balita di Posyandu setiap bulan sebagai deteksi dini terjadinya penyimpangan pertumbuhan sehingga lebih mudah dalam intervensi sebelum menjadi balita gizi buruk.
2. Pelaksanaan kelas ibu balita.
3. Edukasi kepada masyarakat tentang BBLR dan upaya perbaikan gizi keluarga.
4. Pelatihan cara Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) untuk petugas Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat.
5. Pemberian Makanan Tambahan dan vitamin bagi balita BGM dan 2T sampai tuntas.
6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil mulai ditemukan KEK sampai dengan masa nifas untuk mencegah kelahiran bayi BBLR.

Aspek Pelayanan Umum

1. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 1.000 Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.18
Puskesmas Dan Pustu
Di Kota Madiun Tahun 2016 – Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6
2	Jumlah Pustu	18	18	18	18
3	Jumlah Penduduk	210.037	209.809	209.797	210.115
4	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per 1.000 Penduduk	0,11	0,11	0,11	0,11

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per 1.000 penduduk pada Tahun 2018 dengan rasio di Tahun 2019 masih sama disebabkan jumlah dari Puskesmas dan Pustu masih sama. Di setiap Kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan Rumah Sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Dimana terdapat 8 RS yaitu 2 RS Umum milik pemerintah, 1 RS Paru milik pemerintah, 1 RS Umum milik TNI AD, 1 RS Bersalin milik swasta serta 3 RS Umum milik swasta, sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi.

2. Jumlah Puskesmas Poned

Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) terdapat 1 Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo, dan sampai sekarang masih belum ada penambahan.

3. Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk

Pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, jumlah Rumah Sakit di Kota Madiun masih sama yaitu sebanyak 8 Rumah Sakit. Rasio Rumah Sakit di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel III.19
Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta
Di Kota Madiun Tahun 2014 –Tahun 2018

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Milik TNI/AD	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3
5	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2
6	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	8
7	Jumlah Penduduk	210.037	209.809	209.797	210.115
8	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk	0,0381	0,0383	0,0381	0,0381

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio jumlah Rumah Sakit terhadap 1.000 penduduk pada Tahun 2019 sebesar 0,0381. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 masih sama dikarenakan secara absolute jumlah RS masih sama yaitu 8 RS.

4. Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk

Jumlah dokter di wilayah kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.20
Jumlah Dokter
Di Kota Madiun Tahun 2016 – Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Dokter	217	317	286	290
2	Jumlah Penduduk	210.037	209.809	209.797	210.115
3	Rasio Jumlah Dokter Per 100.000 Penduduk	103,32	151,09	136,32	138,02

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio dokter per Tahun 2019 sebesar 138,02 per 100.000 penduduk. Dibandingkan dengan rasio di Tahun 2018 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena sistem pencatatan dan pelaporan data SDM Kesehatan mulai berbenah menjadi lebih baik, yaitu dengan menggunakan data base per NIK sehingga pencatatan semakin baik, dimana setiap dokter berhak mendapatkan 3 SIP (Surat Ijin Praktek) maksimal di 3 tempat serta kebutuhan dokter yang meningkat yang disertai dengan perekrutan tenaga dokter di Puskesmas dan RS untuk menjadikan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.

Jumlah dokter ini merupakan penjumlahan dari dokter, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter spesialis dari 8 Rumah Sakit, 6 Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan yang ada di Kota Madiun, kontribusi terbesar adalah dari RS dr. Sudono mengingat RS tersebut merupakan RS rujukan di tingkat provinsi.

5. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya Per 100.000 Penduduk

Tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Madiun selain dokter. Jumlah tenaga kesehatan lainnya pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.21
Tenaga Kesehatan
Di Kota Madiun Tahun 2016 – Tahun 2019

No	Tenaga Kesehatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Perawat	894	1,043	1108	1065
2	Bidan	231	259	262	273
3	Asisten Apoteker	120	328	154	316
4	Apoteker	23	113	32	112
5	Kesehatan Masyarakat	16	28	13	13
6	Sanitarian	27	28	29	30
7	Nutrisisionis	52	54	70	60
8	Fisioterapis	16	13	17	26
9	Radiografer	30	37	36	36
10	Teknisi Elektromedis	13	16	21	16
11	Teknisi Gigi	5	4	11	3
12	Analisis Kesehatan	37	108	91	115
13	Refraksionis Optisien	1	18	18	18
14	Ortetik Prostetik	1	4	1	1
15	Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan	46	37	39	40
16	Administrator Kesehatan				6
17	Epidemiolog Kesehatan				9
18	Okupasi Terapis				2
19	Penata Anastesi				4
20	Promosi Kesehatan				18
21	Psikolog Klinis				2
22	Terapis Gigi dan Mulut (Perawat Gigi)				25
23	Terapis wicara				3
Jumlah		1.512	2.090	1.902	2.193

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Rasio jumlah tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.22
Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	1.512	2.090	1.902	2.193
2	Jumlah Penduduk	210.037	209.809	209.797	210.115
3	Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Per 100.000 Penduduk	719,87	996,14	906,59	1043,71

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio jumlah tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk pada Tahun 2019 sebesar 1043,71. Rasio jumlah tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2018, hal ini disebabkan karena pendataan tenaga kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta sudah tercatat keseluruhan sehingga jumlahnya masih akan terus bertambah yaitu seperti data tenaga kesehatan di apotek dan laboratorium klinik swasta serta adanya rekrutmen CPNS di Puskesmas yang menambah jumlah tenaga kesehatan di Kota Madiun.

6. Puskesmas ber Standar ISO

Untuk standar pelayanan di Puskesmas tidak menggunakan standar ISO tetapi menggunakan standar akreditasi Puskesmas (Permenkes 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri, Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi). Pada Tahun 2019 keseluruhan dari Puskesmas di Kota Madiun yaitu sebanyak 6 Puskesmas telah terakreditasi.

7. SOP Pelayanan

Terdapat 444 SOP yang diterapkan di 6 Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun pada Tahun 2019.

SOP pelayanan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.23
SOP Pelayanan Kesehatan
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan / Program	Jumlah SOP
1	Pelayanan (UKP)	42
2	Farmasi	49
3	Laboratorium	52
4	Gizi	17
5	Kesehatan Lingkungan	14
6	KIA-KB	22
7	Imunisasi	10
8	Kesehatan Lansia	9
9	P2 DBD	10
10	P2 Diare	2
11	P2 IMS	11
12	P2 ISPA	2
13	P2 Kusta	4
14	P2 TB Paru	11
15	P2 Malaria	10
16	PTM	3
17	UKS/UKGS	9
18	Promosi Kesehatan	20
19	Surveilans Epidemiologi	15
20	Kesehatan Olah Raga	1
21	Kesehatan Jiwa	2
22	Kesehatan Haji	2
23	Kesehatan Indera (Mata Telinga)	3
24	Tata Usaha Puskesmas	79
25	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	58
	Jumlah	457

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah SOP yang diterapkan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebanyak 457 SOP, jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebanyak 444 SOP mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin penting akan perlunya standarisasi yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya, terlebih lagi sebagian besar SOP di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sehingga harus memberikan standart pelayanan yang sesuai standar.

8. Cakupan Masyarakat Miskin Yang Terlayani

Cakupan masyarakat miskin yang terlayani di Kota Madiun Tahun 2019 dapat terlihat di tabel berikut :

Tabel III.24
Cakupan Masyarakat Miskin Yang Terlayani
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Kunjungan Masyarakat Miskin	48.295	49.581	48.691	44.691
2	Jumlah Kepesertaan PBI APBN (Jamkesmas) Dan Jamkesda	57.478	49.581	48.691	44.691
3	Prosentase Masyarakat Miskin Yang Terlayani	84,02	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Pada tabel diatas terlihat bahwa 100% masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan, dimana jumlah kepesertaan sebanyak 44.691 terdiri dari 24.459 peserta PBI APBN (Jamkesmas) dan 20.232 peserta PBI APBD (Jamkesda). Dimana Jamkesmas dan Jamkesda sudah menjadi anggota JKN melalui BPJS.

Pada Tahun 2019 Kota Madiun telah melaksanakan program JKN / Universal Health Coverage (UHC) yaitu seluruh penduduk Kota Madiun telah mendapatkan jaminan kesehatan yang preminya dibiayai oleh pemerintah Kota Madiun.

Kegiatan di Tahun 2019 untuk mendukung pelaksanaan JKN adalah:

1. Melakukan pendataan bagi warga Kota Madiun yang masih belum terdaftar seperti mutasi penduduk atau kelahiran diajukan untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
2. Melakukan pembaharuan data yang sudah ada seperti penduduk yang telah meninggal atau sudah tidak berdomisili di Kota Madiun, sehingga data jumlah kepesertaan yang di jamin asuransi kesehatan adalah warga Kota Madiun yang berdomisili di Kota Madiun.
9. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Cakupan kelurahan siaga aktif di Kota Madiun pada Tahun 2019 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.25
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Puskesmas	Jumlah Kelurahan	Kelurahan Siaga					Jumlah	%
			Pratama	Madya	Purnama	Mandiri			
1	Oro-Oro Omba	5	0	0	3	2	5	100	
2	Tawangrejo	4	0	0	4	0	4	100	
3	Banjarejo	4	0	0	1	3	4	100	
4	Demangan	5	0	0	4	1	5	100	
5	Manguharjo	4	0	0	1	3	4	100	
6	Patihan	5	0	3	2	0	5	100	
Jumlah		27	0	3	15	9	27	100	

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif Tahun 2019 bahwa 100% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2019 sebesar 88,89% yaitu sebanyak 24 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun.

Kelurahan siaga aktif merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan secara mandiri. Dalam KEPMENKES No. 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dijelaskan bahwa kelurahan siaga aktif adalah kelurahan yang mempunyai komponen :

1. Penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dengan mudah.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat.
3. Peduduknya Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Di Kota Madiun sejak Tahun 2015 semua kelurahan siaga sudah aktif semua dan sampai sekarang masih aktif karena ketiga komponen sudah terpenuhi semua dan tetap dilaksanakan dengan dukungan kader-kader kelurahan siaga aktif. Dalam kegiatan UKBM juga telah disediakan dana upah kader sebagai reward kader dengan metode point berbasis kegiatan yang telah dilaksanakan, disamping itu tersedianya tenaga kesehatan Puskesmas yaitu tenaga promosi kesehatan di semua kelurahan yang aktif membantu terlaksananya semua kegiatan yang bersumberdaya masyarakat.

Sebagai upaya mempertahankan capaian kelurahan siaga aktif, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tetap melaksanakan berbagai kegiatan yang mempunyai daya ungkit capaian diantaranya dilaksanakannya koordinasi dalam Pokjanal Kelurahan siaga aktif dan kegiatan-kegiatan lain yang selalu melibatkan kader Kelurahan Siaga.

10. Prosentase Rumah Tangga ber-PHBS

Cakupan rumah tangga ber-PHBS Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.26
Rumah Tangga Ber-PHBS
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Puskesmas	Rumah Tangga				
		Jumlah	Jumlah Dipantau	% Dipantau	Jumlah Ber-PHBS	% Ber-PHBS
1	Oro-Oro Ombo	11.501	4.360	37,91	3.044	69,82
2	Tawangrejo	8.128	3.960	48,72	2.702	68,23
3	Banjarejo	15.676	8.120	51,80	5.564	68,52
4	Demangan	13.886	5.220	37,59	3.725	71,36
5	Manguharjo	13.836	7.104	51,34	4.960	69,82
6	Patihan	8.126	4.200	51,69	2.489	59,26
Jumlah		70.110	16.251	23,18	22.484	68,21

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian rumah tangga ber-PHBS Tahun 2019 sebesar 68,21%. Hasil capaian rumah tangga ber-PHBS telah memenuhi target Tahun 2019 yaitu sebesar 65,5% dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian di Tahun 2018 yaitu 65,19%. Kegiatan yang dilakukan di Tahun 2019 untuk mendukung terlaksananya Rumah Tangga ber PHBS adalah:

1. Promosi kesehatan dengan berbagai media informasi yang ada diantaranya media cetak, media elektronik, media pameran, media kegiatan lainnya disamping penyuluhan secara langsung kepada sasaran kelompok potensial maupun kelompok non potensial (masyarakat umum).
2. Kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program berjalan dengan baik, sehingga semua materi dan upaya penerapan PHBS bisa dilaksanakan. Diantaranya dengan PKK, kelurahan dan OPD terkait sehingga semua materi bisa disebarluaskan.

3. Kegiatan sekolah promkes untuk meningkatkan kesadaran perilaku ber PHBS anak usia sekolah.
 4. Kegiatan emotional demonstration yaitu dengan sasaran kader kesehatan dimana diberikan pengetahuan tentang indikator yang ada di penilaian survei PHBS untuk diterapkan di masyarakat.
 5. Kegiatan UBM (Upaya Berhenti Merokok) di Puskesmas.
11. Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan imunisasi pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.27
Cakupan Imunisasi
Di Kota Madiun Tahun 2016 – Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	HB 0	90,80%	70,73%	91,20%	96,21%
2	BCG	95,22%	91,06%	96,47%	97,25%
3	Polio 1	93,29%	88,82%	97,26%	97,63%
4	DPT – HB 1	94,53%	86,07%	96,55%	98,91%
5	Polio 2	92,28%	83,05%	95,95%	98,39%
6	Polio 3	90,50%	82,34%	95,67%	97,87%
7	DPT – HB 2	91,97%	84,89%	94,96%	97,91%
8	DPT – HB 3	91,89%	84,11%	95,47%	96,90%
9	Polio 4	91,04%	78,61%	94,40%	96,50%
10	Campak	91,54%	63,93%	96,55%	98,71%
11	Imunisasi Dasar Lengkap	95,93%	97,84%	96,55%	98,63%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat dilihat cakupan imunisasi per antigen pada Tahun 2019. Capaian UCI dapat dikatakan 100% jika capaian imunisasi dasar lengkap $\geq 80\%$ untuk semua jenis antigen. Cakupan Imunisasi dengan indikator cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2019 sebesar 100%. Adapun upaya dan strategi yang telah dilakukan di Tahun 2019 adalah:

- a. Pelaksanaan akselerasi imunisasi bayi dan baduta dengan berbasis kohort bayi dan balita untuk mendapatkan data sasaran yang belum lengkap imunisasinya untuk selanjutnya dilakukan sweeping (mencari bayi dan baduta yang belum pernah mendapatkan imunisasi) dan DOFU (Droup out Follow up) melengkapi imunisasi bagi bayi dan baduta.
- b. Melalui kegiatan bintek dengan jejaring imunisasi (Rumah Sakit, RSB, Bidan praktek mandiri, Dokter praktek swasta) diharapkan dapat memberikan daya ungkit dalam meningkatkan capaian imunisasi.

- c. Kegiatan sinkronisasi data imunisasi dilakukan puskesmas dengan kader dan Bidan wilayah sebagai upaya validitas sasaran dan cakupan imunisasi. Bila ada perbedaan data maka selanjutnya akan dilakukan kunjungan ke sasaran.

Strategi yang dilakukan untuk mendapatkan capaian kelurahan UCI di Tahun 2020 adalah dengan tetap melaksanakan kegiatan yang telah dilakukan di Tahun 2019 serta meningkatkan koordinasi peran serta masyarakat, tokoh masyarakat dan TPPKK untuk memantau perkembangan kesehatan balita di lingkungan sekitarnya.

12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.28
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Puskesmas	Demam Berdarah Dengue (DBD)								
		Jumlah Kasus			Meninggal			CFR (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Oro-Oro Ombo	20	17	37	0	0	0	0	0	0
2	Tawangrejo	19	15	34	0	0	0	0	0	0
3	Banjarejo	35	12	47	1	0	1	2,9	0	2,1
4	Demangan	37	16	53	0	0	0	0	0	0
5	Manguharjo	26	19	45	0	0	0	0	0	0
6	Patihan	13	16	29	1	0	1	7,7	0	3,4
Jumlah		150	95	245	2	0	2	1,3	0	0,82
Incidence Rate Per 100.000 Penduduk		84,74	53,67	138,41						

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat dilihat pada Tahun 2019 terdapat 245 kasus DBD dan keseluruhannya 100% mendapatkan penanganan. Tahun 2019 *Case Fatality Rate* (CFR) DBD sebesar 0,82%, yang berarti 0,82% kasus kematian akibat penyakit DBD. Hasil capaian ini sudah mencapai target nasional dimana untuk target CFR sebesar <1%.

Untuk cakupan penanganan kasus DBD mencapai target 100%, hal ini ditunjang dari keterlibatan lintas program dan lintas sektor terkait mulai dari koordinasi dengan Rumah Sakit yang ada di Kota Madiun dalam pelaporan kasus serta penanganan yang cepat dari pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan & KB mulai dari Penyelidikan Epidemiologi, Penyuluhan Pemberantasan Sarang

Nyamuk, Larvasidasi maupun Fogging fokus sehingga tidak terjadi penularan penyakit DBD secara luas. Peran serta dari para kader jumentik RT dan lintas sektor terkait (OPD, sekolah, PKK, FKMS, Kelurahan dan Kecamatan) dalam menggerakkan PSN di masyarakat juga penting dalam meningkatkan Angka Bebas Jentik di Kota Madiun.

13. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

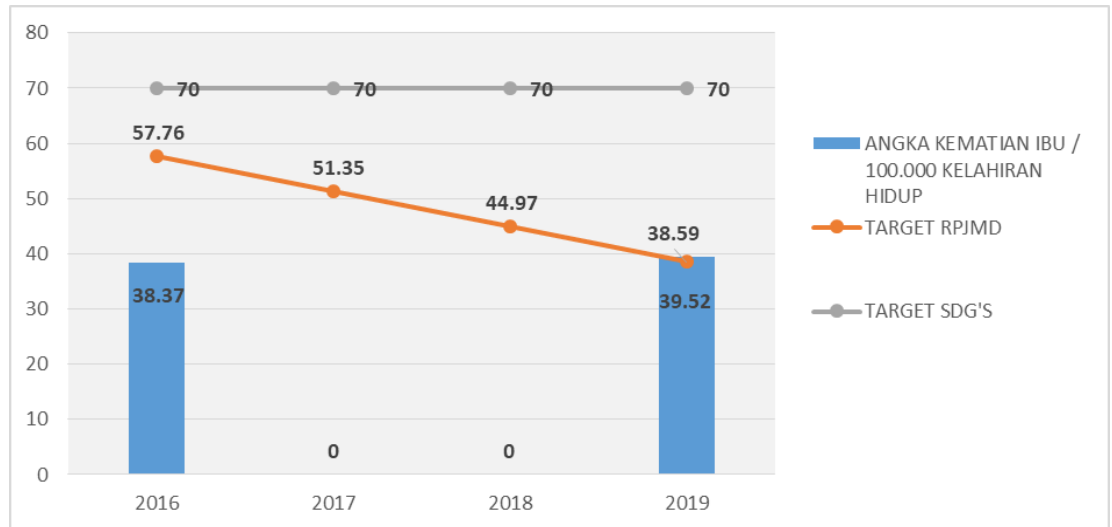
Tabel III.29
Angka Kematian Ibu
Di Kota Madiun Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Lahir Hidup	2,602	2,583	2,561	2,530
2	Jumlah Kematian Ibu	1	0	0	1
3	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	38.43	0	0	39.53
4	Target RPJMD Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	57.76	51.35	44.97	38.59

Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2019 sebesar 39,52, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 39,52 orang ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang ibu. Kematian tersebut disebabkan karena adanya penyakit penyerta berat yaitu Kanker pada Hati (Ca Hepar) yang ditemukan pada saat pelaksanaan operasi kelahiran di Rumah Sakit. Hal itu terjadi dengan pemeriksaan kehamilan sesuai standar yang direkomendasikan oleh kementerian kesehatan belum bisa mendeteksi adanya kanker pada hati. Capaian ini masih diatas target 2019 yaitu sebesar 38,59 hal ini disebabkan perkiraan kelahiran pada tahun 2019 sebanyak 2.591 kelahiran hidup, tetapi dari nilai absolut tidak melebihi target yaitu sebanyak 1 kematian ibu.

Adapun tren Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik III.4
Tren Angka Kematian Ibu (AKI)
Kota Madiun Tahun 2016 –2019



Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa AKI di Tahun 2019 masih dibawah target RPJMD tetapi masih dibawah target SDG'S yaitu sebesar 70 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu adalah:

- a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal.
- b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi.
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas.
- d. Memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC terpadu yaitu 10 T plus skrining Diabetes Militus (DM), Hipertensi, jantung, hepatitis dan HIV/AIDS di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.
- e. Menjalin kerjasama dengan SpOG terkait pelayanan rujukan pada ibu hamil.
- f. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan.

14. Prosentase Rumah Tangga Sehat

Capaian prosentase rumah tangga sehat sama dengan capaian rumah tangga ber-PHBS. Tabel capaian rumah tangga sehat, atau sama dengan rumah tangga ber-PHBS pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III.30
Rumah Tangga Sehat / Ber-PHBS
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Puskesmas	Rumah Tangga				
		Jumlah	Jumlah Dipantau	% Dipantau	Jumlah Rumah Tangga Sehat	% Rumah Tangga Sehat
1	Oro-Oro Ombo	11.501	4.360	37,91	3.044	69,82
2	Tawangrejo	8.128	3.960	48,72	2.702	68,23
3	Banjarejo	15.676	8.120	51,80	5.564	68,52
4	Demangan	13.886	5.220	37,59	3.725	71,36
5	Manguharjo	13.836	7.104	51,34	4.960	69,82
6	Patihan	8.126	4.200	51,69	2.489	59,26
Jumlah		70.110	16.251	23,18	22.484	68,21

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian rumah tangga sehat Tahun 2019 sebesar 68,21%. Hasil capaian rumah tangga sehat telah memenuhi target Tahun 2019 yaitu sebesar 65,5% dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian di Tahun 2018 yaitu 65,19%.

Kegiatan yang dilakukan di Tahun 2019 untuk mendukung terlaksananya Rumah Tangga sehat adalah:

1. Promosi kesehatan dengan berbagai media informasi yang ada diantaranya media cetak, media elektronik, media pameran, media kegiatan lainnya disamping penyuluhan secara langsung kepada sasaran kelompok potensial maupun kelompok non potensial (masyarakat umum).
2. Kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program berjalan dengan baik, sehingga semua materi dan upaya penerapan PHBS bisa dilaksanakan. Diantaranya dengan PKK, kelurahan dan OPD terkait sehingga semua materi bisa disebarluaskan.
3. Kegiatan sekolah promkes untuk meningkatkan kesadaran perilaku ber PHBS anak usia sekolah.
4. Kegiatan emotional demonstration yaitu dengan sasaran kader kesehatan dimana diberikan pengetahuan tentang indikator yang ada di penilaian survei PHBS untuk diterapkan di masyarakat.
5. Kegiatan UBM (Upaya Berhenti Merokok) di Puskesmas.

15. Prosentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Pra Bayar

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Madiun, mulai Tahun 2019 pemerintah Kota Madiun telah mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu dengan melaksanakan Program UHC (Universal Health Coverage) dimana menyediakan anggaran yang dipergunakan untuk membayar premi asuransi kesehatan BPJS untuk seluruh penduduk yang ber KTP Kota Madiun yang belum memiliki jaminan kesehatan dan bersedia dirawat di kelas III. Adapun jenis segmentasi asuransi di BPJS adalah:

1. PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN
2. PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD
3. PPU (Pekerja Penerima Upah)
4. PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) (Pekerja Informal)
5. BP (Bukan Pekerja)

Anggaran yang disediakan oleh pemerintah Kota Madiun adalah membiayai jenis segmentasi PBI APBD.

Sampai dengan akhir Tahun 2019 data yang masuk kepesertaan BPJS yang mengikuti program JKN sebanyak 196.682, jumlah tersebut masih belum 100% dari jumlah penduduk di Kota Madiun dikarenakan:

1. Penduduk sudah memiliki jaminan kesehatan milik swasta.
2. Adanya mutasi penduduk yang tidak diikuti tertib administrasikependudukan.

Sampai saat ini Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana masih terus menerima pendaftaran peserta baru apabila ada penduduk mutasi atau kelahiran di Kota Madiun. Dari data tersebut maka dapat dimasukkan bahwa keseluruhan 100% penduduk Kota Madiun telah mempunyai jaminan kesehatan. Untuk Tahun 2020 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana akan terus melakukan pembaharuan data baik untuk data yang lama ataupun pendaftaran peserta yang baru.

16. Jumlah Kasus KLB

Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2019 sebanyak 9 kasus yang terjadi pada 7 kelurahan di Kota Madiun. Dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.31
Jumlah Kasus KLB
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Jenis Kasus KLB	Kelurahan Tempat Kejadian	Waktu Kejadian Diketahui
1	Suspek Difteri	Kelurahan Mojorejo	4 Januari 2019
2	Suspek Difteri	Kelurahan Kelun	1 Februari 2019
3	DSS	Kelurahan Manisrejo	13 Februari 2019
4	AFP	Kelurahan Kelun	26 April 2019
5	DBD	Kelurahan Ngegong	13 Mei 2019
6	Suspek Difteri	Kelurahan Pangongangan	27 Juni 2019
7	Keracunan Makanan	Kelurahan Ngegong	30 Juli 2019
8	AFP	Kelurahan Manisrejo	9 Agustus 2019
9	AFP	Kelurahan Sukosari	4 November 2019

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Jumlah Kasus KLB di Tahun 2019 sebanyak 9 kasus, mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2018, penurunan kasus KLB ini terutama banyak terjadi pada kasus-kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), menunjukkan sebagai salah satu keberhasilan dari pelaksanaan Outbreak Response Imunization (ORI) difteri tahun 2018 dimana kekebalan kelompok meningkat sehingga kasus difteri ditahun 2019 menurun. Dari 9 kasus KLB keseluruhan telah ditanggulangi dalam waktu ≤ 24 Jam.

Kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat adalah:

1. Meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/ menurun.
2. Meningkatkan KIE kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi.
3. Meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan dini dan respon.

17. Prosentase Penanganan Penyakit

Prosentase penanganan penyakit merupakan indikator yang didukung oleh beberapa indikator. Dimana penilaiannya berdasarkan jumlah indikator yang memenuhi target dibagi dengan jumlah indikator pendukung. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.32
Capaian Penanganan Penyakit
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Uraian	Target 2019	Capaian Kinerja Tahun 2019	Skor 2019
1	Angka Kesembuhan BTA positif	≥ 85%	89%	1
2	Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) BTA+	≥ 90%	93%	1
3	Jumlah kunjungan testing HIV dalam 1 tahun	2.250	7.587	1
4	AFP Rate (non polio) < 15 tahun	2 per 100.000 pddk < 15 th	8,3 per 100.000 pddk < 15 th	1
5	Incidence Rate DBD	50 per 100.000 penduduk	138,41 per 100.000 penduduk	0
6	Case Fatality Rate DBD	< 1%	0,82%	1
7	Persentase obese pada penduduk usia produktif (15-59 tahun)	44,2%	16,38%	1
8	Prosentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini Ca Cervik dan payudara	5%	8,32%	1
Rata-Rata Skor Penilaian				87,5%

Sumber: Dinas kesehatan dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data pada tabel diatas capaian prosentase penanganan penyakit pada Tahun 2019 sebesar 87,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 8 indikator penanganan penyakit yang ada, terdapat 7 indikator mencapai target. Indikator yang tidak mencapai target adalah indikator Incident Rate DBD.

Capaian program TB Tahun 2019 telah mencapai target yang ditentukan, hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya : penguatan fasilitas kesehatan yang ada untuk lebih meningkatkan capaian program, peningkatan koordinasi antar poli di faskes tersebut, supervisi ke layanan, pertemuan koordinasi antar UPK, validasi data dan penyisiran data yang ada di rekam medis faskes, pembukaan layanan baru (poli DOTS baru) sehingga dapat menunjang capaian program yang ada, meningkatnya KIE baik pada organisasi profesi maupun kelompok masyarakat, jejaring internal maupun eksternal sudah berjalan, dukungan dana kegiatan pendukung terpenuhi khususnya melalui APBD, peran serta kader dan paguyuban TB, meningkatnya komitmen dari semua pihak dengan terbentuknya PPM (Public Private Mix) yaitu dengan melibatkan organisasi profesi, LSM, Organisasi Keagamaan, PKK, Kader TB, BPJS serta OPD yang

terkait untuk membantu program TB, serta didukung kualitas laboratorium mikroskopis sebagai sarana diagnosa utama penyakit TB yang bagus.

Pada program HIV/AIDS, jumlah kunjungan testing HIV dalam 1 tahun mencapai 7.587 kunjungan di Tahun 2019 dari target 2.250 kunjungan. Hal ini didukung oleh petugas laboratorium puskesmas sudah melakukan on job training pemeriksaan testing HIV/AIDS di BBLK Surabaya dan sudah terdapat konselor HIV/AIDS yang terlatih sehingga sekarang semua Puskesmas di Kota Madiun sudah dapat melayani testing HIV/AIDS.

Pada indikator penemuan kasus AFP rate (non polio) telah memnuhi target yang ditentukan, dimana di Tahun 2019 ditemukan 3 kasus sehingga AFP rate sebesar 8,3 orang per 100.000 penduduk yang berumur ≤ 15 Tahun. Hal ini disebabkan adanya peningkatan dalam kegiatan surveilans epidemiologi untuk menemukan sedini mungkin kasus AFP non polio. Selain itu dengan adanya kegiatan pemantauan deteksi dini tumbuh kembang anak, meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit untuk kewaspadaan dini dan respon terhadap kasus lumpuh layuh, sehingga apabila terjadi KLB langsung bisa tertanggulangi.

Pada indikator Incident Rate DBD di Tahun 2019 adalah 138,41 per 100.000 penduduk, hal ini menunjukkan rata-rata kejadian DBD 138 kasus pada 100.000 penduduk. Mengalami kenaikan kasus DBD disebabkan:

1. Musim hujan yang tidak menentu dan tingginya curah hujan pada tahun 2019 ini menyebabkan meningkatnya kasus DBD di seluruh Jawa Timur.
2. PSN belum dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat sehingga kasus DBD masih terus meningkat.
3. Peran dari lintas sektor masih belum maksimal.

Strategi yang dilakukan di Tahun 2020 untuk menurunkan kejadian kasus DBD:

1. Membudayakan PSN 4M Plus dimasyarakat dan gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.
2. Sosialisasi ke masyarakat secara rutin dan terus menerus pentingnya PSN 4M plus.
3. Koordinasi dengan lintas sektor untuk penanggulangan penyakit DBD dengan ikut serta menggerakkan masyarakat dalam PSN.

Pada indikator obesitas yaitu mempertahankan kondisi obesitas penduduk dengan capaian di Tahun 2019 adalah 16,38% dengan target sebesar 44,2%. Angka cakupan obesitas tersebut menunjukkan bahwa angka obesitas penduduk dapat ditekan. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan deteksi dini pada anak sekolah, untuk masyarakat dengan layanan Posbindu PTM, pembentukan Posbindu PTM di OPD dan pada usia lanjut melalui upaya senam lansia.

Deteksi dini Ca Cervik pada perempuan usia 30-50 tahun dengan target Tahun 2019 adalah 5% dengan hasil cakupan sebesar 8,32%. Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan melalui penyuluhan dan promosi kesehatan dan gerakan pemeriksaan IVA pada WUS di moment Hari Kartini dan Hari Kesehatan Nasional. Hal ini diikuti dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat melalui penambahan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular sehingga masyarakat semakin mudah untuk melakukan deteksi dini, meningkatkan kemitraan dengan jejaring pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit pemerintah dan swasta serta rumah sakit bersalin yang ada di Kota Madiun.

18. Prosentase Kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Pada Tahun 2019 prosentase kelurahan ber STBM di Kota Madiun sebesar 59,26% yaitu sejumlah 16 kelurahan yang telah terverifikasi sebagai kelurahan ber STBM. Adanya peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu 44,44% (12 kelurahan) hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan pemicuan secara berkala pada komunitas-komunitas dengan capaian pilar STBM rendah terus dilakukan agar capaian prosentase kelurahan ber-STBM meningkat. Untuk mendapatkan predikat kelurahan ber-STBM harus memenuhi seluruh kriteria dalam perilaku higiene sanitasi meliputi 5 pilar, yaitu melaksanakan gerakan stop buang air besarsembarangan, melaksanakan cuci tangan pakai

sabun, mengelola air minum dan makanan dengan benar, mengelola sampah rumah tangga dengan benar, mengelola limbah cair rumah tangga dengan benar melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan dan melakukan kerjasama dengan lintas sektor.

Capaian 5 pilar STBM di Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.33
Capaian Indikator Pilar STBM
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Pilar STBM	Capaian Tahun 2019
1	Stop BABS	100%
2	Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	99,25%
3	Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga	100%
4	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	98,64%
5	Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga	99,26%

Sumber: Dinas kesehatan dan Keluarga Berencana

Kelurahan yang sudah diverifikasi STBM sebanyak 16 kelurahan yaitu Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sogaten, Kelurahan Patihan, Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Pandean, Kelurahan Demangan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Winongo dan Kelurahan Nambangan Kidul.

19. Prosentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan pada Tahun 2019 sebesar 100%, dimana seluruh kebutuhan obat dan perbekalan dari pelayanan kesehatan di Puskesmas kesemuanya 100% telah terpenuhi. Hal tersebut didukung dengan status Puskesmas di Kota Madiun sebagai Puskesmas BLUD, dimana anggaran BLUD juga mendukung anggaran APBD untuk pemenuhan kebutuhan obat di Puskesmas.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.34
Indeks Kepuasan Masyarakat
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Penyedia Jasa Layanan Kesehatan	IKM Tahun 2017	IKM Tahun 2018	IKM Tahun 2019
1	Puskesmas Manguharjo	78,00	79,41	80,67
2	Puskesmas Banjarejo	78,92	78,99	79,14
3	Puskesmas Demangan	80,26	80,3	80,37
4	Puskesmas Patihan	78,45	83,67	83,73
5	Puskesmas Oro-Oro Ombo	78,50	82,65	84,7
6	Puskesmas Tawangrejo	78,99	83,82	83,85
7	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	77,88	80,38	80,43
	Rata-Rata	78,71	81,32	81,84

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IKM Tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian di Tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan apa yang menjadi saran perbaikan di Tahun 2018 sudah diperbaiki di Tahun 2019, yaitu pembuatan SOP sederhana mungkin dan termudah dalam pelaksanaannya, macam dan jenis produk pelayanan tertuang dan terpampang secara jelas dan nyata di sekitar tempat pelayanan sehingga ada kejelasan dan kepastian. Adanya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana di puskesmas sehingga pelayanan berjalan dengan baik. Pelatihan dan refreshing yang dilakukan secara berkala untuk petugas pelayanan agar kemampuan petugas pelayanan tetap terjaga dengan baik sehingga dapat dengan mudah dan cepat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan.

21. Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah

Pada Tahun 2015 seluruh Puskesmas di Kota Madiun telah menjadi Puskesmas BLUD. Capaian kinerja puskesmas dihitung menggunakan prosentase penanganan pengaduan masyarakat di Puskesmas. Capaian kinerja puskesmas pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.35
Capaian Kinerja Puskesmas
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Capaian Kinerja	Tahun 2019
1	Puskesmas Manguharjo	100%
2	Puskesmas Patihan	100%
3	Puskesmas Oro-Oro Ombo	100%
4	Puskesmas Tawangrejo	100%
5	Puskesmas Banjarejo	100%
6	Puskesmas Demangan	100%
	Capaian Kinerja BLUD	100%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Rata-rata capaian kinerja puskesmas di Tahun 2019 sebesar 100%, hal tersebut dikarenakan adanya penilaian akreditasi pada Puskesmas, dimana penanganan pengaduan masyarakat termasuk dalam penilaian akreditasi sehingga mendukung pencapaian indikator ini.

22. Prosentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat

Prosentase produk IRTP yang dinilai memenuhi syarat pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.36
Capaian Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah IRTP	578	615	719	746
2	Jumlah IRTP Yang Memenuhi Syarat	452	489	604	635
3	Prosentase IRTP Yang Memenuhi Syarat	78,20	79,51	84,01	85,12

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian prosentase IRTP yang memenuhi syarat sebesar 84,58% di Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 sebesar 84,01% mengalami peningkatan. Hal yang telah dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja tersebut adalah dengan memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang syarat IRTP yang memenuhi standar oleh Sanitarian Puskesmas secara berkala, sehingga ketika IRTP mengajukan permohonan bisa memenuhi persyaratan, adanya kerjasama lintas sektor, lintas program dan jejaring dalam pembinaan IRTP.

23. Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar

Prosentase sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar sebesar 100%, dimana setiap Rumah Sakit yang berdiri harus memenuhi syarat ijin melakukan pelayanan ke masyarakat. Rumah Sakit yang ada di Kota Madiun sudah mengikuti penilaian akreditasi, dimana RS dr. Sudono, RSUD Kota Madiun, RS Tingkat IV dan RSI Siti Aisyah mendapatkan nilai Akreditasi Paripurna, RS Paru Manguharjo dan RSIA Al Hasanah mendapatkan nilai Akreditasi Perdana sedangkan RS Santa Clara dan RS Griya Husada mendapatkan nilai akreditasi Utama.

Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan (Permenkes No.12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit).

24. Prosentase Penduduk yang di Skrining faktor resiko PTM

Prosentase penduduk yang diskriking faktor resiko PTM pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.37
Capaian Penduduk Yang Diskriking Faktor Resiko PTM
Di Kota Madiun Tahun 2016 - Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Penduduk Yang Diskriking Faktor Resiko PTM	47.631	98.067	132.937	147.459
2	Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Faktor Resiko PTM	138.345	115.637	140.169	140.877
3	Prosentase Penduduk Yang Diskriking PTM	34,43	84,81	94,84	104,67

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Capaian di Tahun 2019 yaitu sebesar 104,67%, capaian ini merupakan skrining pada penduduk yang berusia diatas 15 tahun, merupakan perpaduan skrining kesehatan penduduk usia produktif (15 – 59 tahun) dan skrining kesehatan usia lanjut (\geq 60 tahun) yang keduanya merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pada capaian tersebut melebihi 100% dikarenakan capaian yang didapatkan tidak hanya dari penduduk dalam kota tetapi juga dari luar Kota Madiun, didapatkan dari skrining kesehatan usia produktif di LAPAS dan acara yang diadakan oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu di acara Health Carnival, Bola Volley Cup, Sunday Market, Lomba Cerdas Cermat Tingkat OPD dan dari kegiatan lintas program di internal Dinas Kesehatan dan KB.

25. Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri

Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata puri pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.38
Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Desa Siaga	27	27	27	27
2	Jumlah Desa Siaga Puri	17	21	22	24
3	Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Puri	62,96	77,78	81,48	88,89

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di Tahun 2019 bahwa 100% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2019 sebesar 88,89% yaitu sebanyak 24 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya peningkatan 2 kelurahan dibandingkan Tahun 2018. Capaian tersebut dikarenakan:

1. Peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif
2. Adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI.
3. Kerjasama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan.

26. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang Beroperasi Sesuai Perundangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat informasi bahwa fasilitas pelayanan kesehatan terdapat perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, adapun fasilitas kesehatan yang dimaksud meliputi:

- a. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan
- b. Pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS)
- c. Klinik
- d. Rumah Sakit
- e. Apotek
- f. Unit Transfusi Darah
- g. Laboratorium kesehatan

h. Optikal

i. Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum

j. Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.39
Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Beroperasi Sesuai Perundangan
Di Kota Madiun Tahun 2016 - Tahun 2019

No	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Sarana	Jumlah	Sarana	Jumlah	Sarana	Jumlah	Sarana	Jumlah
1	Rumah Sakit	8	Rumah Sakit	8	Rumah Sakit	8	Rumah Sakit	8
2	Lab Klinik	11	Lab Klinik	9	Lab Klinik	7	Lab Klinik	7
3	Apotek	99	Apotek	86	Apotek	81	Apotek	83
4	Klinik	24	Klinik	24	Klinik	23	Klinik	26
5	TokoObat	6	Toko Obat	6	Toko Obat	6	Toko Obat	5
6	PBF	4	PBF	10	PBF	10	PBF	10
7	Optik	17	Optik	18	Optik	18	Optik	18
8	Puskesmas	6	Puskesmas	6	Puskesmas	6	Puskesmas	6
9					Unit transfusi darah	1	Unit transfusi darah	1
10					Tempat praktek mandiri tenaga kesehatan:		Tempat praktek mandiri tenaga kesehatan:	
					Bidan	20	Bidan	18
					Fisioterapi	15	Fisioterapi	11
					Ortotik Prostetik	1	Ortotik Prostetik	1
					Perawat	7	Perawat	21
					Okupasi Terapis	2	Okupasi Terapis	2
					Dokter Gigi	42	Dokter Gigi	52
					Dokter Umum	63	Dokter Umum	72
					Dokter Spesialis	59	Dokter Spesialis	67
	Jumlah	175		167		369		408

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah sarana pada Tahun 2019 sebesar 408 sarana.

Jumlah sarana tersebut sudah memenuhi target Tahun 2019 yaitu sebanyak 200 sarana.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Pembinaan terhadap tenaga kesehatan melalui organisasi profesi.

27. Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standart

Prosentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.40
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar
Di Kota Madiun Tahun 2016 - Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Ibu Hamil	2.739	2.706	2.676	2.643
2	Pelayanan Bumil Sesuai Standar	2.739	2.694	2.676	2.643
3	Prosentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar	100	99,6	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian prosentase pelayanan bumil sesuai standar di Tahun 2019 sebesar 100%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standart sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun. Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah:

- a. Sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin
- b. Optimalisasi kelas Ibu Hamil di Puskesmas
- c. Terjalin kerjasama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu
- d. Pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan
- e. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.

28. Prosentase TTU dan TPM sehat

Prosentase TTU dan TPM sehat pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.41
TTU Dan TPM Sehat
Di Kota Madiun Tahun 2016 – Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Prosentase TTU Memenuhi Syarat	90,95	93,86	88,2	86,87
2	Prosentase TPM Memenuhi Syarat	78,20	81,38	80,03	84,35
3	Rata-Rata	84,58	87,62	84,12	85,61

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat yang meliputi : sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas), sarana sekolah (SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA), dan hotel (bintang dan non bintang).

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasa boga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan.

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata prosentase TTU dan TPM yang sehat di Tahun 2019 sebesar 85,61% dan sudah mencapai target Tahun 2019 yaitu sebesar 85%. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 mengalami peningkatan karena:

1. Sudah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi dari tenaga kesehatan di Puskesmas untuk memantau TTU dan TPM di wilayah kerjanya.
2. Adanya kerjasama lintas sektor, lintas program dan jejaring yang terbina.
3. Dilaksanakannya pembinaan secara berkala terhadap pemilik TTU dan TPM.

29. Prosentase Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

Prosentase kecukupan alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.42
Kecukupan Alat Kesehatan Di Puskesmas Dan Jaringannya
Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Puskesmas	Jumlah Jenis Alkes Sesuai Standar	Jumlah Jenis Alkes Yang Harus Ada	Prosentase Kecukupan (%)
1	Oro-Oro Ombo	572	937	61,05
2	Tawangrejo	670	1049	63,87
3	Banjarejo	653	1049	62,25
4	Demangan	734	937	78,34
5	Manguharjo	798	937	85,17
6	Patihan	638	937	68,09
RATA-RATA				69,79

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa prosentase kecukupan alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Tahun 2019 sebesar 69,79%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu 60,80% karena di Tahun 2019 dilakukan kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk melengkapi kekurangan alat sesuai standar.

30. Prosentase Kematian Akibat Penyakit Potensial Wabah

Prosentase kematian akibat penyakit potensial wabah pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.43
Prosentase Kematian Akibat Penyakit Potensial Wabah
Di Kota Madiun Tahun 2016 –Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Kematian DBD	4	0	0	2
2	Jumlah Kasus DBD	267	45	78	245
3	Prosentase Kematian Potensial Wabah	1,50	0	0	0,82

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Pada tabel diatas terlihat bahwa prosentase kematian potensial wabah di Tahun 2019 sebesar 0,82%. Menunjukkan adanya kematian 0,82% dari 245 kasus DBD yang ada. Prosentase kematian akibat penyakit potensial wabah tahun 2019 (2 kasus) dibanding dengan tahun 2018 (0 kasus) terjadi peningkatan. Adanya tren peningkatan kasus DBD diawal tahun 2019 di Indonesia menjadikan dampak di semua wilayah di Jawa Timur termasuk Kota madiun. Upaya pencegahan dan penanggulangan sudah dilakukan sesuai dengan standart termasuk gerakan PSN satu rumah satu jumentik.

Hal yang harus dilakukan untuk menjaga supaya tidak terjadi kematian yang disebabkan oleh penyakit DBD adalah dengan ditingkatkannya sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit potensial wabah dilakukan kurang dari 24 jam. Upaya pencegahan dilakukan mulai dari membudayakan PSN 4M Plus dimasyarakat dan gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, sosialisasi ke masyarakat secara rutin dan terus menerus pentingnya PSN 4M plus dan koordinasi dengan lintas sektor untuk penanggulangan penyakit dbd dengan ikut serta menggerakkan masyarakat dalam PSN.

31. Angka Kematian Bayi

Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.44
Angka Kematian Bayi
Di Kota Madiun Tahun 2016 – Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Bayi Lahir Hidup	2606	2583	2561	2530
2	Jumlah Kematian Bayi	19	19	17	16
3	Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 Kelahiran Hidup	7.29	7.36	6.64	6.32

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Tahun 2019 sebesar 6,32, artinya terdapat 6 kematian bayi dari 1.000 Kelahiran Hidup. Jika secara absolut jumlah kematian sebanyak 16 bayi. Hal tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2018 yaitu sebesar 6,64 dengan jumlah absolut sebanyak 17 kematian bayi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- a. PMT bagi ibu hamil untuk mencegah bayi BBLR.
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (edukasi kontrol sesuai jadwal).
- c. Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah:

- a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal.

- b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi.
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas.
- d. Berkoordinasi dengan Dokter Spesialis Anak terkait pelayanan rujukan bayi dengan kelainan.
- e. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun pada tahun 2019, sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan rehab gedung dan bangunan
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	Program peningkatan pelayanan dan sumberdaya kesehatan	1	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
		2	Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun
		3	Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan
		4	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
		5	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)
		6	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional

No	Program	Kegiatan	
		7	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan
		8	kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)
		9	Kegiatan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah dinas medis dan paramedis
		10	Kegiatan penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (DBH-CHT)
		11	Kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas (DAK)
6	Program upaya kesehatan masyarakat	1	Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga
		2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
		3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita
		4	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah
		5	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		6	Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
		7	Kegiatan Pengembangan Kota Sehat
		8	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo
		9	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan
		10	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan
		11	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo
		12	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo
		13	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo
		14	Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia
		15	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat
		16	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas manguharjo (DAK)
		17	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas patihan (DAK)
		18	kegiatan bantuan operasional

No	Program	Kegiatan	
			kesehatan puskesmas demangan (DAK)
		19	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas banjarejo (DAK)
		20	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas oro-oro ombo (DAK)
		21	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas tawangrejo (DAK)
		22	kegiatan dukungan manajemen BOK (DAK)
		23	kegiatan pengembangan taman posyandu (BK.Prov)
7	Program pencegahan dan pengendalian penyakit	1	Kegiatan Pencegahan Gangguan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA
		2	Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)
		3	Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)
		4	Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS
		5	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
		6	Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)
		7	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita
		8	Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular
8	Program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD	1	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo
		2	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan
		3	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo
		4	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-oro Ombo
		5	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan
		6	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang direalisasikan **Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun** pada tahun 2019, sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,079,429,000.00	2,182,977,005.00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,659,429,000.00	1,763,382,247.00
	Output : Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	420,000,000.00	419,594,758.00
	Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	339,072,800.00	327,307,060.00
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	70,508,800.00	70,327,000.00
	Output : Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	100%	100%
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	189,240,000.00	178,731,310.00
	Output : Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	100%	100%
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	79,324,000.00	78,248,750.00
	Output : Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	100%	100%
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2,476,387,000.00	2,051,631,808.00
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2,452,687,000.00	2,051,631,808.00
	Output : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	100%	100%
	Outcome : Akuntabilitas kinerja	75 BB	A

No	Uraian	Target	Realisasi
	Dinas Kesehatan		
2	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	23,700,000.00	-
	Output : Jumlah gedung yang direhabilitasi	1 gedung	0 gedung
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	307,901,000.00	259,573,754.00
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	307,901,000.00	259,573,754.00
	Output : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	11 dokumen	16 dokumen
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
5	Program Peningkatan Pelayanan Dan Sumberdaya Kesehatan	38,864,076,000.00	29,177,458,673.10
1	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	944,283,000.00	780,090,598.00
	Output : Persentase puskesmas dan klinik terakreditasi	71%	35%
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
2	Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	26,132,356,000.00	18,518,516,567.22
	Output : Persentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar	100%	97.87%
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
3	Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan	323,648,000.00	282,719,090.00
	Output : Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	200 sarana	200 sarana
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
4	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	116,599,000.00	71,014,752.00
	Output : Persentase puskesmas dan puskesmas pembantu yang telah melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100%	100%
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas	80.09	81.84

No	Uraian	Target	Realisasi
	Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun		
5	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)	31,500,000.00	30,000,000.00
	Output : Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	1 orang	1 orang
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
6	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional	40,825,000.00	39,395,100.00
	Output : Jumlah sarana pelayanan kesehatan tradisional yang dibina	20 sarana	20 sarana
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
7	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan	225,852,000.00	179,700,245.00
	Output : Persentase obat kadaluarsa	< 1%	0.01%
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
8	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	31,050,000.00	27,568,500.00
	Output : Persentase pengelolaan obat sesuai standar	100%	100%
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
9	Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas Medis dan Paramedis	1,201,323,000.00	1,142,586,764.88
	Output : Jumlah gedung yang direhabilitasi	5 gedung	5 gedung
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
10	Kegiatan Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (DBH-CHT)	6,791,746,000.00	5,152,465,931.00

No	Uraian	Target	Realisasi
	Output : Jumlah kegiatan penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasyankes	3 kegiatan	3 kegiatan
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
11	Kegiatan Pengadaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	3,024,894,000.00	2,953,401,125.00
	Output : Jumlah paket yang diadakan	2 paket	2 paket
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15,556,211,000.00	13,131,157,400.00
1	Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga	122,138,000.00	118,492,072.00
	Output : Persentase SD/MI yang melakukan test kebugaran pada siswa kelas IV	100%	95.60%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	527,550,000.00	432,098,884.00
	Output : Persentase kunjungan ibu hamil paripurna	100%	100%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	404,395,000.00	366,755,074.00
	Output : Cakupan kunjungan balita paripurna	98%	100.10%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
4	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah	82,954,000.00	63,939,884.00
	Output : Persentase sekolah sehat	100%	100%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
5	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,122,571,000.00	1,041,961,617.00
	Output : Persentase kelurahan yang mendapatkan promosi kesehatan minimal 18 kali	80%	100%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
6	Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	121,090,000.00	111,262,127.00
	Output : Persentase TTU dan TPM sehat	85%	85%

No	Uraian	Target	Realisasi
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
7	Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	381,491,000.00	286,772,047.00
	Output : Persentase kelurahan yang menerapkan 3 tatanan kota sehat	66.67%	66.67%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
8	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manguharjo	887,208,000.00	687,264,406.00
	Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	91.36%	90.65%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
9	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Patihan	957,759,000.00	783,658,525.00
	Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	92%	92.60%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
10	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Demangan	728,280,000.00	549,957,535.00
	Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	93%	92.41%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
11	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Banjarejo	980,112,000.00	706,175,247.00
	Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	91%	92%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
12	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Oro-Oro Ombo	938,112,000.00	660,832,029.00
	Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	91.50%	95%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
13	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tawangrejo	958,776,000.00	713,009,271.00
	Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	94.10%	94.97%

No	Uraian	Target	Realisasi
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
14	Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia	112,800,000.00	96,234,563.00
	Output : Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan	60%	93.20%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
15	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	3,239,946,000.00	2,790,742,519.00
	Output : Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	75%	88.89%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
16	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Manguharjo (DAK)	515,000,000.00	510,623,900.00
	Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	75%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
17	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patihan (DAK)	428,000,000.00	407,908,900.00
	Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	66.67%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
18	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Demangan (DAK)	532,000,000.00	494,765,150.00
	Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	41.67%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
19	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banjarejo (DAK)	521,000,000.00	519,643,150.00
	Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	58%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
20	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Oro-Oro Ombo (DAK)	511,000,000.00	498,020,000.00
	Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	66.70%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%

No	Uraian	Target	Realisasi
21	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tawangrejo (DAK)	484,000,000.00	474,685,100.00
	Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	66.67%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
22	Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	824,000,000.00	655,327,100.00
	Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	66.67%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
23	Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (BK. Prov)	176,029,000.00	161,028,300.00
	Output : Persentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	44%	39.62%
	Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
7	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	15,556,211,000.00	13,131,157,400.00
1	Kegiatan Pencegahan Gangguan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA	99,470,000.00	63,210,107.00
	Output : Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa melalui UKJBM	100%	100%
	Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
2	Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)	511,620,000.00	450,733,498.00
	Output : Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)	< 50 per 100.000 penduduk	138,66 / 100.000 penduduk
	Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
3	Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)	80,667,000.00	71,169,838.00
	Output : Persentase kenaikan Case Notification Rate pada TB	5%	2.46%
	Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
4	Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	302,277,000.00	268,736,698.00
	Output : Persentase penemuan kasus HIV	4%	12.24%
	Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
5	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	64,632,000.00	52,056,801.00
	Output : Persentase respon sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) kurang dari 24	100%	100%

No	Uraian	Target	Realisasi
	jam		
	Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
6	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)	32,264,000.00	15,369,578.00
	Output : Persentase imunisasi TT pada wanita usia subur	90%	86.98%
	Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
7	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita	156,365,000.00	130,634,407.00
	Output : Persentase kelurahan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	100%	100%
	Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
8	Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular	495,047,000.00	448,124,381.00
	Output : Persentase penduduk usia > 15 tahun diskriming faktor resiko PTM	100%	90.25%
	Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
8	Program Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan BLUD	10,814,708,000.00	9,586,477,123.00
1	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo	1,943,198,000.00	1,773,386,653.00
	Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
2	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan	2,062,932,000.00	1,900,132,426.00
	Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
3	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo	2,291,990,000.00	1,929,884,799.00
	Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84

No	Uraian	Target	Realisasi
4	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-Oro Ombo	1,700,000,000.00	1,509,616,502.00
	Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
5	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan	1,199,000,000.00	1,066,971,655.00
	Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
6	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo	1,617,588,000.00	1,406,485,088.00
	Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84

d. Permasalahan dan Solusi

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Permasalahan:

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.659.429.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.762.382.247,00, sekitar 48,19% dikarenakan adanya belanja pegawai untuk Uang Kinerja Jasa terdapat 20% pagu dari UKK seluruh Dinas Kesehatan dianggarkan di kegiatan ini dan tidak terserap karena penyerapan UKK tidak sampai 100%, belanja barang dan jasa tidak bisa terserap keseluruhan karena menyesuaikan dengan kebutuhan, tagihan rekening yang ada dan efisiensi anggaran.

Solusi:

Anggaran dikembalikan ke Kas Daerah, mengajukan usulan penganggaran untuk UKK tidak 100% supaya tidak membebani serapan di OPD.

2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Permasalahan:

Kegiatan pemeliharaan sifatnya kondisional sesuai dengan kerusakan yang terjadi, sehingga tidak bisa dihitung secara pasti jumlah dan jadwal kegiatan. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana di Tahun 2019 pindah ke Wisma Haji, sehingga masih belum mengetahui kebutuhan menganggarkan pemeliharaan gedung yang akan dipergunakan.

Solusi:

Berkoordinasi dengan seluruh karyawan untuk segera mealaporkan apabila terjadi kerusakan baik itu berupa gedung, kendaraan dan sarana prasarana, sehingga dapat diketahui sedini mungkin dan segera dijadwalkan untuk perbaikannya.

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Permasalahan:

Adanya anggaran Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 23.700.000.00 yang dipergunakan untuk reuiu DED Gedung Dinas Kesehatan dan KB di Jalan Trunojoyo yang tidak dapat terlaksana karena belum ada kejelasan terkait jadwal pembangunan gedung.

Solusi:

Perencanaan kegiatan dianggarkan kembali di Tahun 2021 dan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai pembongkaran gedung di Jalan Trunojoyo.

4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tidak ada permasalahan dalam penyerapan anggaran kegiatan. Sisa anggaran merupakan sisa dari efisiensi pelaksanaan kegiatan, bukan karena kegiatan yang tidak dilaksanakan. Selain itu sisa anggaran merupakan anggaran UKK di semua kegiatan yang tidak dapat terserap 100%.

5. Program Peningkatan Pelayanan Dan Sumberdaya Kesehatan

Permasalahan:

Adanya Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun sebesar Rp. 26.132.356.000.00 dan terserap sebesar Rp. 18.518.516.567,22. Pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai premi

asuransi peserta PBID sebanyak 20.188 orang dan perkiraan jumlah penduduk yang belum terdaftar peserta BPJS sebanyak 73.300 orang. Dalam pelaksanaannya masyarakat ber KTP Kota Madiun dan masyarakat yang sudah memiliki kartu BPJS/KIS tertunggak tidak bisa secara otomatis menjadi anggota BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Madiun.

Selain itu adanya potongan pembayaran langsung oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp. 3.484.493.683,00 sehingga mengurangi serapan dari pagu yang sudah direncanakan.

Solusi:

Rapat koordinasi baik Forum Kepesertaan, Tim Koordinasi Tingkat Kota serta BPJS Kesehatan.

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tidak ada permasalahan dalam penyerapan anggaran kegiatan. Sisa anggaran merupakan sisa dari efisiensi pelaksanaan kegiatan, bukan karena kegiatan yang tidak dilaksanakan. Selain itu sisa anggaran merupakan anggaran UKK di semua kegiatan yang tidak dapat terserap 100%.

7. Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Pada Kegiatan ini tidak ada permasalahan dalam penyerapan anggaran. Sisa anggaran merupakan sisa dari efisiensi pelaksanaan kegiatan seperti uang transport peserta yang tidak hadir serta penggunaan anggaran fogging fokus sesuai dengan kasus yang ada, bukan karena kegiatan yang tidak dilaksanakan. Selain itu sisa anggaran merupakan anggaran UKK di semua kegiatan yang tidak dapat terserap 100%.

8. Program Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan BLUD

Tidak ada permasalahan dalam penyerapan anggaran dikarenakan penggunaan anggaran ini menyesuaikan dengan kebutuhan operasional Puskesmas.

e. Penghargaan yang diterima

Penghargaan yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana di Tahun 2019 adalah:

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Tanda penghargaan Swasti Saba Wistara, keberhasilan penyelenggaraan Kota Sehat Tahun 2019
 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Puskesmas Banjarejo Kota Madiun sebagai Pembina dan Mengembangkan Usaha Kesehatan Sekolah sehingga menjadi Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2019.
 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Tanda Penghargaan Sanitarian / Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Terbaik Kabupaten SBS (ODF) Tahun 2019 atas nama Mitia Febrianti, A.Md KL (tenaga sanitarian Puskesmas Manguharjo).
 4. Gubernur Jawa Timur, penghargaan KBK Sekar Larasati, UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo sebagai Terbaik I Kreativitas Kategori Pelayanan Jasa Medis.
 5. Gubernur Jawa Timur, penghargaan kepada SEGAR SARI – Sarana Edukasi Agar Masyarakat Sadar Kesehatan Reproduksi, UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo sebagai Top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 kategori Kesehatan.
-

✚ PENGELOLAAN RSUD

a. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Kota Madiun di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dicapai melalui tujuan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan indikator tujuan Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan sasaran Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.45
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
di RSUD Kota Madiun Tahun 2015-2019

No.	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	2015	2016	2017	2018	2019
1	Target	74,04%	78,03%	82,02%	86,01%	90,00%
2	Realisasi	70,97%	72,04%	74,19%	75,26%	78,26%
	% Capaian	95,85%	92,32%	90,45%	87,50%	86,96%

Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal tahun 2019 dari target 90% tercapai 78,26%, atau 86,96%. Beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan faktor prosedural dan keterbatasan sumber daya, contohnya seperti waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax dan waktu tunggu dokter spesialis di rawat jalan. Sedangkan capaian sasaran Meningkatnya Mutu Dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun yang juga merupakan penilaian kinerja sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun yaitu Kinerja Pelayanan, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Manfaat sesuai target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis setiap tahunnya.

1. Kinerja Pelayanan

Pelayanan yang diberikan RSUD Kota Madiun kepada masyarakat merupakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat melalui poliklinik dan IGD, serta pelayanan penunjang. Peningkatan jumlah kinerja pelayanan pasien di RSUD Kota Madiun pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 naik sebesar 13,47%. Kunjungan di

Instalasi Rawat Jalan sebanyak 166.377 kunjungan atau naik sebesar 19,11% dibanding tahun 2019, sedangkan kunjungan di Instalasi Rawat Inap menjadi 15.033 kunjungan atau turun sebesar 16,30%, serta kunjungan di Instalasi Gawat Darurat di tahun 2019 sebanyak 31.912 kunjungan atau naik sebesar 5,10%, sesuai tabel berikut:

Tabel III.46
Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD Kota Madiun
Tahun 2015-2019

No.	Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	% Peningkatan
1	Instalasi Rawat Jalan	83.107	101.967	116.828	139.675	166.377	19,11
2	Instalasi Rawat Inap	14.533	17.486	17.513	17.960	15.033	-16,30
3	Instalasi Gawat Darurat	21.192	27.444	28.847	30.362	31.912	5,10%
Jumlah		118.832	146.897	163.188	187.997	213.322	13,47

Sumber: Data Kunjungan Rekam Medik RSUD Kota Madiun

Untuk proporsi asal kunjungan pada tahun 2019, 56,44% dari penduduk Kota Madiun sedangkan kunjungan pasien dari Luar Kota Madiun sebesar 43,56% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Atau bisa diartikan pada tahun 2019 ada 92.930 kunjungan yang berasal dari penduduk luar Kota Madiun, sesuai dengan posisi RSUD Kota Madiun yang berbatasan dengan kabupaten Madiun sehingga banyak diminati oleh masyarakat sekitar Kota Madiun

Tabel III.47
Proporsi Asal kunjungan Pasien di RSUD
Kota Madiun Tahun 2015-2019

No.	Kunjungan	2015	2016	2017	2018	2019	% Peningkatan 2018 - 2019
1	Dalam Kota	73,71%	63,37%	63,44%	63,32%	56,44%	-6,88%
2	Luar Kota	26,29%	36,63%	36,56%	36,68%	43,56%	
Jumlah		100%	100%	100%	100%	100%	

Sedangkan untuk perkembangan pelayanan penunjang di di RSUD Kota Madiun pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 ada 2.091.190 pelayanan atau naik sebesar 15,64% sesuai rincian pada tabel berikut:

Tabel III.48
Pencapaian Kinerja Pelayanan Penunjang di RSUD Kota Madiun
Tahun 2015-2019

No	Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	% Peningkatan
1	Instalasi Radiologi	11.451	13.639	14.797	17.715	19.348	9,22
2	Instalasi Laboratorium	156.159	182.508	193.211	216.292	260.438	20,41
3	Instalasi Bedah	3428	4194	3991	4162	4423	6,27
Jumlah		171.038	200.341	211.999	238.169	284.209	19,33
4	Instalasi Farmasi	749.545	1.798.907	2.408.280	1.485.095	1.773.706	19,43
Jumlah Total		920.583	1.999.248	2.620.279	1.808.411	2.091.190	15,64

Sumber: RSUD Kota Madiun

Jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi RSUD Kota Madiun pada tahun 2019 adalah sebanyak 19.348 kali atau naik sebesar 9,22% dibanding tahun 2018 sedangkan untuk Pemeriksaan di Instalasi Laboratorium adalah sebanyak 284.209 kali atau naik sebesar 20,41% karena naiknya jumlah pasien yang memerlukan pemeriksaan pada Instalasi laboratorium seiring dengan semakin lengkapnya alat kesehatan di laboratorium RSUD Kota Madiun . Instalasi Laboratorium ini merupakan salah satu Instalasi Penunjang Medis untuk menunjang diagnosis, serta memonitor penyakit dan pengobatan meliputi Laboratorium Patologi Klinik dan Laboratorium Patologi Anatomi. Sedangkan kinerja pelayanan di Instalasi Kamar Operasi untuk tindakan bedah di Instalasi Bedah dari 4162 tindakan di tahun 2018 menjadi 4423 tindakan pada tahun 2019 naik 6,27% karena kasus yang memerlukan tindakan bedah bertambah sehubungan dengan pemberlakuan rujukan berjenjang dan kepuasan masyarakat terhadap RSUD Kota Madiun meningkat sehingga menjadi pilihan dari masyarakat untuk penanganan kasus yang memerlukan tindakan bedah. Untuk jumlah pelayanan obat di Instalasi Farmasi tahun 2019 dihitung berdasarkan resep mengalami peningkatan sebesar 19,43% dari tahun 2018. Berikutnya, untuk rincian jenis pemeriksaan di Laboratorium dan Radiologi RSUD Kota Madiun pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sesuai rincian pada tabel berikut:

Tabel III.49
Perkembangan Pelayanan Laboratorium dan Radiologi
di RSUD Kota Madiun Tahun 2015-2019

No.	Jenis Pemeriksaan	2015 (kali)	2016 (kali)	2017 (kali)	2018 (kali)	2019 (kali)	% Kenaikan
1.	LABORATORIUM :						
	PATOLOGI						
	KLINIK						
	Kimia	81.118	93.950	94.914	102.885	112.184	-22,64
	Gula Darah	21.465	26.194	26.593	30.916	33.194	7,37
	Hematologi	31.406	33.807	38.041	32.672	43.841	34,19
	Bakteriologi	226	272	302	338	177	-47,63
	Urine	5.856	6.300	5.541	4.858	9.620	98,02
	Tinja	562	598	610	506	728	43,88
	Golongan darah	1.064	1.375	1.309	903	851	-5,76
	Immunologi	6.224	8.828	9.815	9.882	13.171	33,28
	Mikrobiologi	0	0	0	17	0	-1
	kllinik	698	1.139	1.313	1.503	1.324	-11,90
	Narkotika	7.540	10.027	12.717	30.065	43.638	45,14
	Elektrolit						
	PATOLOGI	-	-	1.127	890	776	-12,80
	ANATOMI	-	-	819	755	802	6,23
FNAB	-	-	110	102	132	0,30	
Hispatologi							
Sitologi							
	Jumlah	156.159	182.508	193.211	216.292	260.438	20,41
2.	RADIOLOGI :						
	Foto tanpa bahan kontras	8.558	10.133	10.774	12.635	13.660	8,11
	Foto dengan bahan kontras	148	108	119	108	106	-1,85
	Foto Gigi	558	490	592	781	1.054	34,96
	USG	2.164	2.353	2.393	2.425	2.699	11,30
	Mammografi	23	23	61	89	203	128,09
	CT Scan	0	532	858	1.677	1.683	0,36
	Jumlah	11.451	13.639	14.797	17.715	19.405	9,54

Pada tahun 2019 ini juga telah dibuka pelayanan baru yaitu pelayanan untuk Geriatri, sehingga sampai tahun 2019 pelayanan yang ada di RSUD Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Instalasi Rawat Jalan (Klinik Umum, Klinik Obgyn, Klinik Bedah, Klinik Mata, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Anak (termasuk pelayanan Tumbuh Kembang), Klinik Gigi Periodontia, Klinik Saraf, Klinik Kesehatan Jiwa, Klinik THT, Klinik Orthopedi, Klinik Kulit & Kelamin, Klinik Paru, Klinik Jantung, Klinik Anestesi, Klinik VCT, Klinik Rehabilitasi Medik dan Klinik Geriatri);
- b. Instalasi Rawat Inap (Ruang Mawar/Ruang Perawatan Penyakit Dalam Laki-Laki Kelas 1, 2, dan 3, Ruang Dahlia/Ruang Perawatan Penyakit Dalam Perempuan Kelas 1, 2, dan 3, Ruang Melati/Ruang Perawatan

Anak, Ruang Anggrek/Ruang Perawatan Bedah Laki-Laki Kelas 1, 2, dan 3, Ruang Seruni/Ruang Perawatan Bedah Perempuan kelas 1, 2, dan 3, Ruang Bersalin, Ruang Cendana/Ruang Perawatan VIP, Ruang Perinatologi/Ruang Perawatan Bayi Sakit, Ruang Bougenville/Ruang Nifas/Ruang Rawat Gabung Ibu dan Anak, Ruang Wijaya Kusuma/Ruang Perawatan Kelas 1, Ruang Intensif ICU/ICCU dan Ruang Pulih Sadar ;

- c. Instalasi Gawat Darurat (24jam, 7hari dalam seminggu);
- d. Instalasi Penunjang (Instalasi Bedah, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi, Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, Instalasi Radiologi, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Pemeliharaan Alat Medis, Instalasi Penyehatan Lingkungan, Instalasi Laundry, Instalasi Hemodialisis, Instalasi Pemulasaran Jenazah, BDRS, Unit SIM RS dan Instalasi CSSD);
- e. Pelayanan Ambulance.

Dari sisi efisiensi dan mutu pengelolaan RSUD Kota Madiun Tahun 2019 dapat dilihat dari indikator pelayanan rumah sakit berupa BOR, TOI, BTO, ALOS, GDR, dan NDR pada tabel berikut:

Tabel III.50
Tingkat Efisiensi dan Mutu Pelayanan RSUD
Kota Madiun Tahun 2015-2019

Indikator	Standar	Realisasi					Naik/ Turun	Ket
		2015	2016	2017	2018	2019		
BOR (%)	60-85%	78,59	74,25	58,79	67,19	68,11	0,92	Sesuai Standar
aLOS (Per hari)	3 – 12 hari	3,58	3,52	3,49	3,47	4,52	1,05	Sesuai Standar
TOI (Per hari)	1 – 3 hari	1,21	1,29	2,00	1,37	1,72	0,35	Sesuai Standar
BTO (x/tt)	≥ 30 kali	64,59	72,86	75,16	87,6	67,72	-19,88	Sesuai Standar
NDR (‰)	<25/1.000	16,24	26,71	23,01	22,88	24,00	1,12	Sesuai Standar
GDR (‰)	≤ 45/1.000	27,66	15,15	33,92	37,36	44,40	7,04	Sesuai Standar

Sumber: RSUD Kota Madiun

1. **Bed Occupancy Rate (BOR)** adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu dipakai (terisi) oleh pasien atau prosentase tingkat penggunaan Tempat Tidur pada satu satuan waktu tertentu. Pada tahun 2019 tercapai 68,11%, naik 0,92 dibandingkan tahun

2018 dan ada pada batas ideal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar 60% - 85%. Salah satu upaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun untuk meningkatkan BOR ini adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan dengan mematuhi SPO, pemenuhan sarana prasarana, meningkatkan kelengkapan jenis pelayanan serta menambah jumlah dan jenis tenaga.

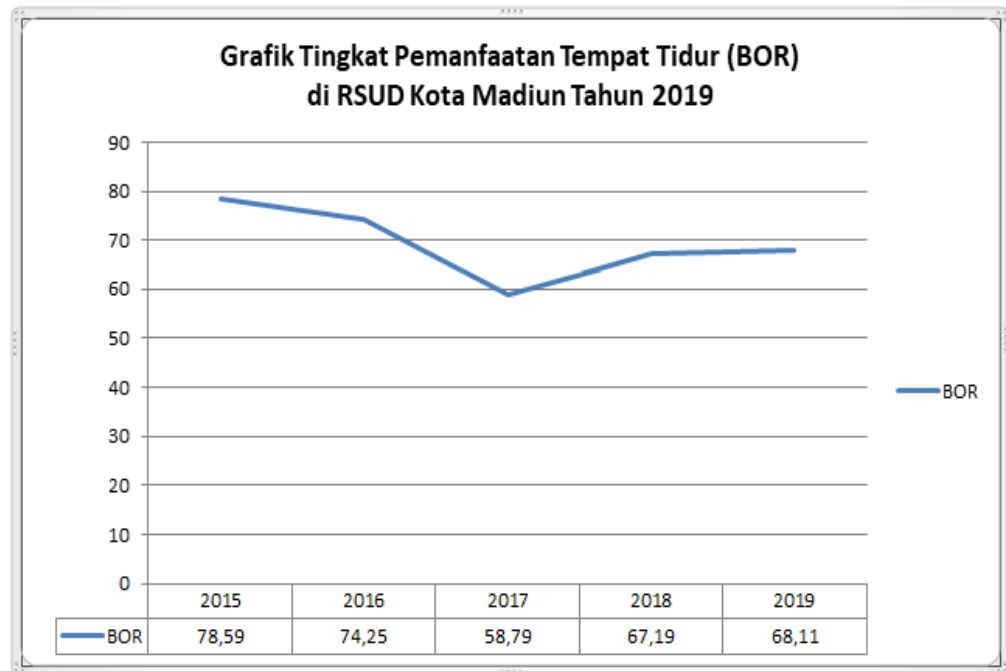
2. **Alos (Average Length of Stay)** jumlah hari kalender dimana pasien mendapatkan perawatan rawat inap di rumah sakit, sejak tercatat sebagai pasien rawat inap hingga keluar dari rumah sakit. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu layanan, semakin lama angka aLOS maka bisa menunjukkan kinerja mutu pelayanan yang kurang baik karena pasien harus dirawat lebih lama (lama sembuhnya). Dari segi ekonomis, semakin lama nilai aLOS berarti semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar oleh pasien kepada pihak rumah sakit. Jadi diperlukan adanya keseimbangan antara sudut pandang medis dan ekonomis untuk menentukan nilai aLOS yang ideal. aLOS di RSUD Kota Madiun tahun 2019 adalah sebesar 4,52 hari, naik 1,05 hari dibanding tahun 2018 dan masih sesuai standar aLOS yang ideal yaitu 3-12 hari.
 3. Angka **TOI (Turn Over Interval)** rerata hari sebuah Tempat Tidur tidak ditempati untuk perawatan pasien dari saat terisi ke saat berikutnya. Semakin besar angka TOI, berarti semakin lama saat menganggurnya Tempat Tidur atau semakin lama Tempat Tidur tidak digunakan oleh pasien. Hal ini berarti tempat tidur semakin tidak produktif. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1-3 hari. Capaian TOI di RSUD Kota Madiun tahun 2019 tercapai 1,72 hari dan sudah sesuai standar ideal yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.
 4. Pencapaian **BTO (Bed Turn Over)** tahun 2019 sebesar 67,72 kali, turun 19,88 kali dibanding tahun 2018 yang sebesar 87,6 kali. Angka Bed Turn Over (BTO) ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dari setiap Tempat Tidur yang tersedia di RSUD Kota Madiun rata-rata digunakan oleh 67 pasien secara bergantian. Meskipun turun tapi
-

masih sesuai standar ideal dari BTO yang seharusnya yaitu minimal 30 pasien dalam periode 1 tahun.

5. **NDR (Net Death Rate)** yaitu angka kematian bersih yang menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapatkan perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir yang kemudian meninggal. Angka NDR ini sangat sensitif dan lebih bisa menunjukkan kualitas pelayanan medis dibandingkan GDR. Pada tahun 2019, capaian NDR di RSUD Kota Madiun adalah 24,00/1000 atau sudah sesuai standar ideal yang telah ditetapkan yaitu <math><25/1.000</math>. Artinya RSUD Kota Madiun sudah mendapatkan waktu cukup untuk berusaha memberikan pelayanan dan pertolongan kepada pasien sehingga mutu pelayanan medis masih sesuai standar, tetapi karena angkanya meningkat 1,12 dibanding tahun 2018 yang sebesar 22,88/1000, harus dilakukan evaluasi terhadap angka NDR yang trend nya mengalami peningkatan.
6. **GDR (Gross Death Rate)** yaitu angka kematian kasar yang menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir yang kemudian meninggal. Indikator ini menunjukkan mutu pelayanan Rumah Sakit. Standar GDR yang ideal adalah $\leq 45/1000$, sedangkan pencapaian GDR RSUD Kota Madiun pada tahun 2019 adalah sebesar 44,40/1000, naik 7,04 dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 37,36/1000. Meskipun angka kematian kasar di RSUD Kota Madiun tidak tercapai target tapi masih sesuai standar, tetapi karena trendnya meningkat, harus terus berupaya untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi sehingga mutu pelayanan rumah sakit juga semakin meningkat.

Perkembangan tingkat pemanfaatan Tempat Tidur di RSUD Kota Madiun selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Grafik III.5
Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) di RSUD Kota Madiun Tahun 2019



Sumber: RSUD Kota Madiun

Sedangkan kapasitas Tempat Tidur yang ada di RSUD Kota Madiun adalah sebanyak 275 TT dengan 222 Tempat Tidur Perawatan sesuai rincian tabel berikut:

Tabel III.51
Distribusi Tempat Tidur berdasarkan Ruang Kelas Perawatan di RSUD Kota Madiun Tahun 2019

Ruang	Kelas Perawatan					Ruang Tindakan	TT	TT
	VIP	I	II	III	Tanpa Kelas		RUMAH SAKIT	PERAWATAN
CENDANA	13	-	-	-	-	-	13	13
MAWAR	-	-	11	10	-	-	21	21
MELATI	-	4	6	16	4	-	30	27
ANGGREK	-	-	8	14	-	-	22	22
DAHLIA	-	-	6	16	2	-	24	24
WIJAYA KUSUMA	-	14	-	-	2	-	16	16
SERUNI	-	2	8	12	1	-	23	23
NIFAS	-	2	2	13	25	-	42	34
VK	-	-	-	-	5	6	11	6
ICU/ICCU	-	-	-	-	19	-	19	19
IGD	-	-	-	-	-	17	17	0
HEMODIALISA	-	-	-	-	-	12	12	0
RUANG OPERASI	-	-	-	-	-	4	4	0
PACU	-	-	-	-	-	4	4	0
PERINATOLOGI	-	-	-	-	17	-	17	17
JUMLAH	13	22	41	81	75	43	275	222

Sumber: Laporan Tahunan RSUD Kota Madiun

Sedangkan untuk BOR per kelas yang ada di RSUD Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel III.52
Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) Per Kelas
di RSUD Kota Madiun Tahun 2019

No.	Kelas	Jumlah TT	BOR (%)	Standar (%)	Keterangan
1	VIP	13	68,13	60-85	Ideal
2	I	22	90,80		Tidak Ideal
3	II	41	78,90		Ideal
4	III	81	101,61		Tidak Ideal

Sumber: RSUD Kota Madiun

Untuk tempat tidur di Rumah Sakit, selain tempat tidur untuk perawatan juga terdapat tempat tidur yang dipakai untuk tindakan dan ada juga tempat tidur perawatan yang tanpa mempertimbangkan kelas perawatan, sehingga ketika dihitung per kelas akan terlihat bahwa sebenarnya meskipun BOR Rumah Sakit ideal yaitu ada pada nilai 68,11%, tetapi untuk rincian BOR per kelas ada yang tidak ideal yaitu untuk kelas I dan kelas III diatas standar, sedangkan BOR Kelas II dan VIP sesuai standar ideal.

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan bisa dilihat dari tingkat Pertumbuhan pendapatan atau *Sales Growth Rate* (SGR), *Cost Recovery Rate* (CRR) maupun Tingkat Kemandirian Keuangan. Tingkat Pertumbuhan pendapatan merupakan selisih pendapatan tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya. Perkembangannya Tingkat Pertumbuhan Pendapatan di RSUD Kota Madiun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.53
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (SGR) di RSUD Kota Madiun Tahun 2019

No.	Tahun	Pendapatan tahun ini	Pendapatan Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Pdptn Th ini} - \text{Pdptn Th sblumnya}}{\text{Pendapatan Tahun Sebelumnya}}$	SGR (%)
1	2015	52.726.130.370,48	38.388.100.517,75	0,3735	37,35
2	2016	61.955.324.303,09	52.726.130.370,48	0,1750	17,50
3	2017	71.556.439.458,64	61.955.324.303,09	0,1549	15,49
4	2018	84.840.437.457,96	71.376.966.768,64	0,1886	18,86
5	2019	92.102.521.928,81	84.840.437.457,96	0,0856	8,56

Sumber: RSUD Kota Madiun

Tingkat pertumbuhan pendapatan RSUD Kota Madiun pada tahun 2019 adalah sebesar 8,56%, Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan pendapatan tahun 2019 sesuai rencana strategis bisnis adalah sebesar 3,27% sehingga pertumbuhan pendapatan untuk tahun 2019 ini adalah tercapai sudah tercapai.

Cost Recovery Rate adalah merupakan perbandingan antara penerimaan fungsional serta penerimaan usaha lainnya di RSUD Kota Madiun dibanding seluruh biaya operasional non modal. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasionalnya dari pendapatan murni rumah sakit. Perkembangan *Cost Recovery* diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.54
Perkembangan *Cost Recovery* RSUD Kota Madiun Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan (Fungsional)	52.726.130. 370,48	61.955.324. 303,09	71.556.439. 458,64	84.840.437. 457,96	92.102.521. 928,81
Biaya Operasional Dgn Gaji BLUD	52.139.575. 901,00	69.310.921. 723,40	81.574.017. 315,73	96.888.951. 088,80	106.098.284. 356,15
Biaya Operasional Tanpa Gaji	39.798.779. 970,00	53.189.868. 611,40	64.548.643. 842,73	73.275.347. 203,80	80.745.282. 544,15
Cost Recovery (dengan Gaji Pegawai)	101,12%	89,39%	77,48%	87,54%	86,81%
Target Cost recovery (dgn Gaji Pegawai)	>80 %	>80 %	>80 %	92,74%	92,08%
Cost recovery (tanpa Gaji Pegawai)	132,48%	116,48%	110,55%	115,78%	114,07%
Target Cost recovery (tanpa Gaji Pegawai)	≥ 110 %	≥ 110 %	≥ 110 %	110,01%	108,50%

Sumber: RSUD Kota Madiun

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa *Cost Recovery* (tidak termasuk gaji) pada tahun 2019 sebesar 114,07%. Sedangkan untuk *Cost Recovery* (dengan gaji pegawai) untuk tahun 2019 sebesar 86,81%, turun 0,73% dibanding tahun 2018. Capaian *Cost Recovery* ini menurun karena jumlah pegawai juga semakin meningkat sehingga belanja pegawai juga semakin tinggi. Selain itu juga dikarenakan adanya belanja tidak langsung yaitu Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang juga dibebankan pada belanja operasional RSUD, sedangkan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2019 hanya 8,56%.

Tingkat Kemandirian Rumah Sakit adalah ukuran seberapa mampu rumah sakit membiayai seluruh belanjanya baik pengeluaran operasional maupun investasi dari pendapatan fungsional rumah sakit sendiri. Tingkat kemandirian RSUD Kota Madiun pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.55
Tingkat Kemandirian RSUD Kota Madiun Tahun 2015-2019

URAIAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Pendapatan Fungsional	52.726.130. 370,48	61.955.324. 303,09	71.087.987. 715,21	84.840.437. 457,96	92.102.521. 928,81
Total Belanja (APBD+APBN)	75.342.382. 150,32	101.505.467. 666,40	92.097.327. 220,73	97.907.689. 000,00	124.244.189. 872,90
Tingkat Kemandirian	69,98%	61,04%	77,18%	86,65%	74,13%

Sumber: RSUD Kota Madiun

Pada tahun 2019 Tingkat Kemandirian rumah sakit turun 12,52% dibanding tahun 2018 dan masih dibawah target yaitu 100% karena seluruh pembiayaan selain belanja modal untuk investasi sarana dan prasarana kesehatan dibiayai dari dana operasional RSUD dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pasien.

Rumah Sakit dikatakan memiliki kinerja keuangan paling bagus bila capaian CRR dan Tingkat Kemandirian di atas 100%. Dan itu berarti seluruh pengeluaran rumah sakit dibiayai dari satu sumber saja yaitu pendapatan fungsional. Hal ini belum bisa diwujudkan karena RSUD juga harus mengoptimalkan pembiayaan yg bersumber dari dana diluar operasional BLUD seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBHCHT dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dan sudah seharusnya Rumah Sakit Umum Daerah masih mendapatkan pembiayaan dari APBD – APBN untuk investasi karena bukan berorientasi bisnis , untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1, Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Tipe C serta standar pelayanan publik.

3. Kinerja Manfaat

RSUD Kota Madiun tetap harus memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang karena sebagai suatu unit usaha jasa yang memberikan jasa pelayanan sosial di bidang medis, pengelolaan unit usaha rumah sakit juga

memiliki keunikan tersendiri yaitu selain sebagai unit bisnis, usaha rumah sakit juga memiliki misi sosial. Kunjungan masyarakat miskin di RSUD Kota Madiun tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 mengalami kenaikan dari 51.692 kunjungan menjadi 64.007 kunjungan sesuai tabel berikut :

Tabel III.56
Perkembangan Kunjungan Masyarakat Miskin RSUD Kota Madiun
Tahun 2019

No	Pelayanan Maskin	2015	2016	2017	2018	2019	% Peningkatan
1	Instalasi Rawat Jalan	42.124	48.511	54.661	61.401	65.914	7,35
2	Instalasi Rawat Darurat	14.309	17.930	17.937	16.767	12.560	-25,09
3	Instalasi Rawat Inap	8.959	10.099	9.028	8.811	8.268	-6,16
Jumlah Kunjungan Maskin		51.692	65.392	76.540	86.979	86.742	-0,27
Jumlah Kunjungan Total		95.673	118.832	146.897	187.997	181.410	-3,50
Proporsi Kunjungan Maskin		54,03	55,03	52,10	46,27	47,82	3,35

Proporsi kunjungan masyarakat miskin dibanding tahun 2018, meningkat 3,35% di tahun 2019 menjadi 47,82 dan trendnya meningkat karena penerapan sistem rujukan berjenjang sehingga untuk pasien sebelum dirujuk ke RSUD Tipe B harus melalui RSUD Kota Madiun.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan **RSUD** pada tahun 2019, sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
3	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	1 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD RSUD
4	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	1 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
		2 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
		3 Kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah Sakit
		4 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direalisasikan **RSUD** pada tahun 2019, sebagai berikut :

No.	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.121.400.000,00	1.112.750.000,00
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.121.400.000,00	1.112.750.000,00
	Output : Honorarium PNS dan non PNS yang disediakan	40 orang	40 orang
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja RSUD Kota Madiun	BB	A
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.648.233.700,00	1.376.245.740,00
	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.648.233.700,00	1.376.245.740,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor	35 jenis	35 jenis
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja RSUD Kota Madiun	BB	A
3	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	82.927.220.000,00	87.924.890.924,15
	1 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD RSUD	82.927.220.000,00	87.924.890.924,15
	Output : Jenis barang dan jasa yang disediakan, jumlah dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang disusun	57 jenis	56 jenis
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	78,8	80,35
4	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	17.875.933.950,00	15.738.309.776,75
	1 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	13.914.327.000,00	11.981.095.098,00
	Output : Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang dadakan	63 jenis	48 jenis
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	78,8	80,35

No.	URAIAN	TARGET	REALISASI
2	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	347.050.000,00	334.327.316,75
	Output : Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab	1 paket	1
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	78,8	80,35
3	Kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah Sakit	2.075.756.950,00	1.960.919.050,00
	Output : Jumlah gedung Instalasi Farmasi dan gudang obat rumah sakit yang dibangun	1 unit	1
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	78,8	80,35
4	Kegiatan pengadaan alat kesehatan rumah sakit (DAK)	1.538.800.000,00	1.461.968.312,00
	Output : Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	1 jenis	1 jenis
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	78,8	80,35

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Madiun, adalah sebagai berikut:

1. Hasil survey akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari target Paripurna, tercapai Madya
2. Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit belum optimal
3. Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisionis, Dietisien Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan Tenaga Administrasi di ruangan
4. Implementasi SIMRS belum optimal
5. Jaminan Kesehatan Nasional

- a. Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019 Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dimana rumah sakit harus melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya agar tidak terjadi “defisit” tanpa meninggalkan kualitas layanan atau memberikan layanan yang sub-standar
- b. Setiap tahun terdapat hutang klaim pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan RSUD Kota Madiun terhadap pasien peserta BPJS, sehingga kemungkinan hutang BPJS juga akan semakin besar dan dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan di RSUD Kota Madiun

Solusi atau Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 melalui:
 - a. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit baik penambahan sarana prasarana baru maupun untuk mengganti sarana prasarana yang sudah rusak atau perlu peremajaan;
 - b. Pemenuhan kekurangan Sumber Daya Manusia, baik jumlah maupun jenis tenaganya melalui beberapa cara yaitu melaksanakan reposisi dan/atau rekrutmen pegawai non PNS BLUD, mengusulkan rekrutmen PNS, dan menerima mutasi pegawai dari luar RSUD;
 - c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit untuk memastikan tersedianya sarana prasarana kesehatan yang aman, bermutu dan layak pakai serta efisien sehingga meminimalkan resiko yang terkait penggunaan sarana prasarana yang ada;
 - d. Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan melalui kegiatan *assessment* internal dan kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - e. Membentuk Unit SIM RS serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIM RS untuk mendukung pelayanan.
-

2. Komitmen seluruh SDM mulai dari pimpinan sampai dengan seluruh staf dan unsur pendukung terhadap implementasi SNARS Edisi 1.1 sehingga bisa memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien/patient safety dan meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan;
3. Mengoptimalkan budaya organisasi melalui kelompok budaya kerja untuk meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan ;
5. Menyelenggarakan Forum Pertemuan dan Focus Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai penerima layanan untuk memberikan saran, pendapat dan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan sehingga berperan aktif dalam mengawasi kinerja pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang telah ditetapkan;
6. Melakukan evaluasi penilaian kinerja secara terus menerus melalui kegiatan rapat evaluasi, pertemuan dan audit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kota Madiun baik antar bidang maupun lintas sektor dengan *stake holder* serta Dewan Pengawas.

e. Penghargaan yang diterima

1. Juara I tingkat Nasional Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Kategori Rumah Sakit tipe C dari BKKBN Pusat
 2. Peringkat II Clinical Service Improvement Project dalam rangka PERSI Award
-

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pelaksanaan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 merupakan upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat”**. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Memantapkan Kualitas Infrastruktur Kota Madiun

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan gedung dan bangunan
2. Tersedianya aksesibilitas kota yang merata
3. Menurunkan potensi terjadinya banjir
4. Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.57

Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018- 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat						
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	94,51%	93%	93,64%	100,68%
	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	19,55%	19%	20,01%	105,31%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 93,64 % atau 405,540 Km, jika dibandingkan dengan tahun 2018 terealisasi 94,51 % atau 397,480 Km sehingga ada peningkatan jalan dalam 8,060 Km, dimana pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengaspalan jalan/overlay dan peningkatan kapasitas jalan (pelebaran).

2. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tahun 2019 Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) terealisasi 20,01 % dan tahun 2018 terealisasi 19,55 % sehingga ada peningkatan 0,46 %.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2019 sebagai Pengendalian Pemanfaatan Ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau Privat. Dalam penyelenggaraan tupoksi dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memberikan rekomendasi terkait permohonan pendirian bangunan baru/rehabilitasi. Dalam hal penyediaan tanah untuk RTH Publik diarahkan/disarankan pada pemenuhan RTH Publik di masing-masing kelurahan melalui pemanfaatan dan penggunaan tanah bengkok yang ada di wilayah Kelurahan masing-masing. Disamping tanah bengkok juga diutamakan pengembang untuk memenuhi RTH.

Tabel RTH

RTH	Luas	Satuan
RTH Jalur Jalan Kota	57,90	Ha
RTH Taman, Monumen, Gerbang Kota	59,62	Ha
RTH Lapangan Olahraga dan Makam	40,61	Ha
RTH Hutan	14,62	Ha
RTH Pengaman Jalur KA, SUTT dan Sungai	120,33	Ha
RTH Privat		
- Lahan Pekarangan	365,52	Ha
- RTH Taman	1,66	Ha
- RTH Jalur Jalan	4,67	Ha
Jumlah Total	664,93	Ha

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2019 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.58
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
di Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik	94,51	93	93,64	100,68
3.2	Rasio Panjang jalan yang bisa dilalui roda 4	100	100	100	100
3.3	Rasio Panjang jalan yang memiliki trotoar	20,1	20,39	20,59	100,98
3.4	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90,3	90	90,96	101,07
3.5	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	6	6	6	100
3.6	Panjang jalan memiliki drainase	83,4	83	83,4	100
3.7	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima	6,33	6,33	6,33	100
3.8	Jumlah Ruas Jalan yang diusulkan Pemeliharaannya	54	200	207	103,5
3.9	Prosentase Tersedianya Informasi Data Base Jalan	100	100	100	100
3.10	Persentase Kualitas Pelayanan Jasa Konstruksi Berdasarkan SPM	100	100	100	100
3.11	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	71,71	80	80,06%	100,07
3.12	Persentase Bangunan Ber IMB	100	100	100	100
3.13	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	19,55	19	20,01	105,31
III ASPEK DAYA SAING DAERAH					
B Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
2 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang					
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	100
2.2	Luas wilayah banjir	4	0	0	100
2.3	Luas Wilayah Perkotaan	33,23	33,23	33,23	100
2.4	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW	100	100	100	100
2.5	Meningkatnya Jumlah Kawasan Bebas Banjir	100	100	100	100
2.6	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	8	16	17	106,25
2.7	Tersedianya Pedoman Perencanaan Teknis Tata Ruang	3	15	16	106,67

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
2.8	Persentase Pemanfaatan Ruang	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Panjang Jalan dalam kondisi baik

Data panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 93,64% atau 405,540 Km, jika dibandingkan dengan tahun 2018 terealisasi 94,51% atau 397,480 Km sehingga ada peningkatan jalan dalam 8,060 Km.

Lebih rinci mengenai total panjang jalan di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perkembangan Kondisi Jalan di Kota Madiun (Km)

Uraian	2018	2019
Kondisi Baik	397,480	405,540
Kondisi Sedang	31,520	26,250
Rusak Ringan	1,470	-
Rusak (Tanah)	2,625	1,305
Panjang Jalan Total	433,095	433,095

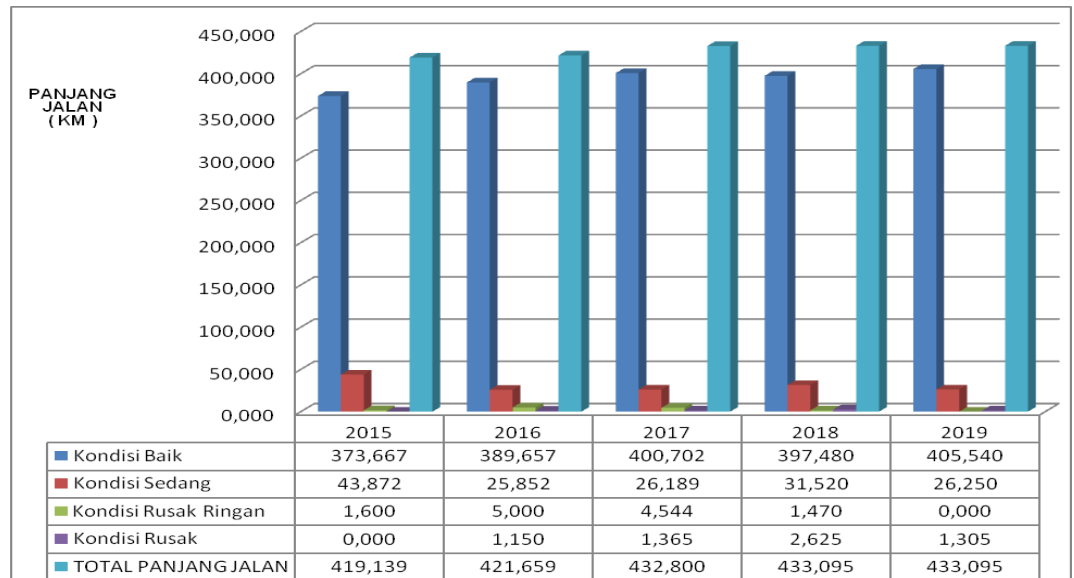
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan.

Panjang jalan Kota pada tahun 2019 adalah 405,540 km atau 93,64 % dalam kondisi baik, 6,06 % dalam kondisi sedang, dan sisanya sebesar 0,30 % dalam keadaan rusak ringan.

Untuk informasi lebih rinci kondisi jalan di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

KONDISI JALAN DI KOTA MADIUN



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

NO	TYPE PERKERASAN	KONDISI	JALAN		
			PANJANG RUAS KONDISI JALAN (KM)	PANJANG TYPE JALAN TOTAL (KM)	
Jalan Nasional di Kota Madiun					
1	ASPAL	a	Baik	4,295	4,295
		b	Sedang	12,245	12,245
		c	Rusak Ringan	-	-
		d	Rusak Berat	-	-
TOTAL					16,540
Jalan Propinsi di Kota Madiun					
2	ASPAL	a	Baik	-	
		b	Sedang	-	
		c	Rusak Ringan	-	
		d	Rusak Berat	-	
TOTAL					
Jalan Kota di Kota Madiun					
3	ASPAL	a	Baik	405,540	433,095
		b	Sedang	26,250	
		c	Rusak Ringan	-	
		d	Rusak Berat	1,305	
TOTAL					449,635

Dengan selesainya Kegiatan Pemeliharaan Jalan, maka kegiatan penyelenggaraan jalan sekarang menjadi berubah penekanannya, jalan yang selesai dibangun ataupun setelah dilaksanakan pemeliharaan berkala pada tahun sebelumnya akan

mengalami penurunan kondisi sesuai dengan bertambahnya umur sehingga dari jalan kondisi baik menjadi kondisi sedang, kondisi sedang menjadi kondisi rusak ringan dan seterusnya.

Sedangkan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada tahun 2019 dilaksanakan pekerjaan penambalan jalan berlubang, pengedukan saluran, pengeprasan bahu jalan, pembersihan trotoar, perbersihan semak disekitar jembatan, pemasangan trotoar keramik pada jembatan, pengecatan leuneng dan kanstin, pembersihan gorong-gorong dengan tujuan untuk mempertahankan kondisi konstruksi dan kelengkapan jalan dan jembatan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas sehingga keselamatan dan kenyamanan lalu lintas pengguna jalan terjamin dan pelayanan kinerja jalan meningkat.

- Memperkecil biaya operasi kendaraan yang dipengaruhi oleh jenis kendaraan, geometrik dan kondisi jalan.
- Mencegah kerusakan atau mengurangi laju kerusakan (*rate of deterioration*) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur rencana.

Dampak positif kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Madiun :

1. Kelancaran lalu lintas

Manfaat langsung dari pemeliharaan jalan baik perkerasan jalan maupun pada bangunan pelengkap jalan adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya dalam menghubungkan daerah satu ke daerah lainnya di wilayah Kota Madiun. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya.

2. Merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian

Manfaat langsung ini terlihat ketika diadakannya kegiatan trotoarisasi yang bebasiskan lantai keramik dengan ditandai tumbuhnya aktivitas perekonomian berupa aktivitas PKL di sekitar trotoar yang selesai dibangun.

3. Pertumbuhan PDRB daerah

Semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang maupun barang. Dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya permintaan barang dan

jasa. Selanjutnya akan merangsang meningkatnya kegiatan perekonomian, berkembangnya usaha di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatnya arus barang masuk ke Kota Madiun.

Pemeliharaan Rutin Jembatan merupakan bagian penting dari kegiatan pembinaan jalan untuk mengurangi atau mencegah laju kerusakan jalan yang lebih besar. Konstruksi jembatan yang telah dibangun sangat diperlukan pemeliharaan rutin yang terencana, terprogram dan dilaksanakan sesuai ketentuan teknis sebagaimana mestinya agar dapat memenuhi fungsi nilai manfaat yang diharapkan.

Dari program kerja kegiatan selama ini, dimana kondisi jembatan yang mantap adalah jembatan yang dipelihara secara terus menerus sepanjang tahun, yang dilaksanakan sesuai persyaratan teknis dan administrasi dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada peranan dan posisi pemeliharaan rutin jembatan pada saat ini dan akan datang serta berpedoman kepada pengalaman pelaksanaan pemeliharaan rutin jembatan di masa lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun khususnya pada bidang Bina Marga perlu mengambil langkah konkrit dalam pemantapan pemeliharaan rutin jembatan dengan melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas terhadap kinerja kemampuan pelaksana pekerjaan dilapangan.

2. Rasio panjang jalan yang bisa dilalui roda 4

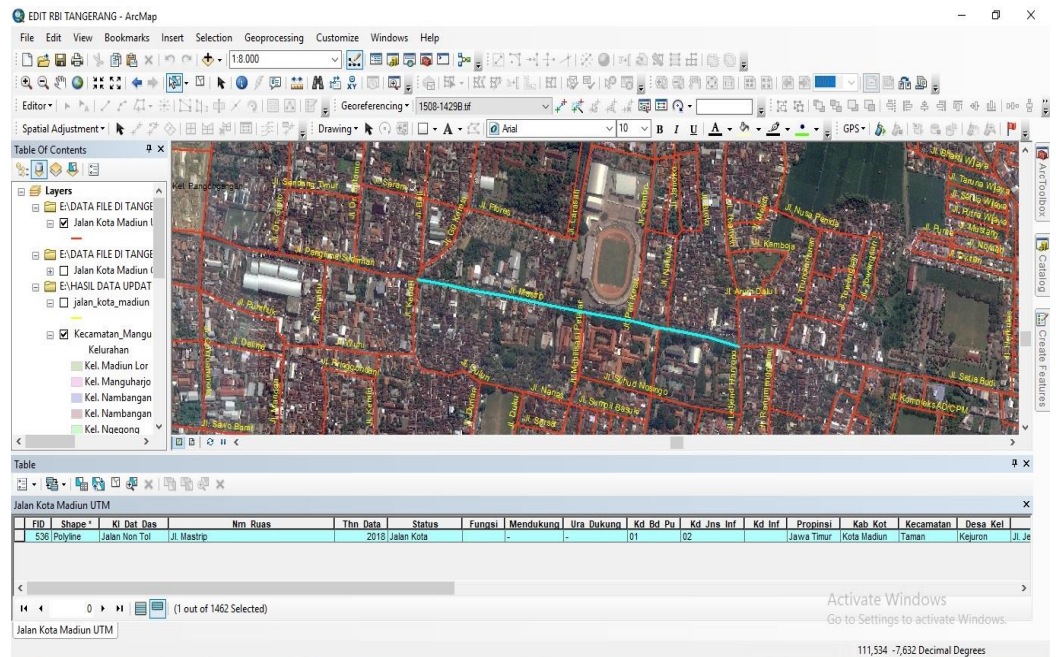
Pada tahun 2019 terealisasi 100 % sedangkan pada tahun 2018 terealisasi 100 % dan tidak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena semua jalan di Kota Madiun lebar jalannya minimal 3 m.

3. Rasio panjang jalan yang memiliki trotoar

Pada tahun 2019 panjang jalan yang memiliki trotoar kiri-kanan 92,61 km sedangkan panjang jalan seluruhnya (kota + nasional) 449,635 km terealisasi 20,59 %, dikarenakan setiap tahun selalu mengalokasikan alokasi dana khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan khususnya trotoar guna meningkatkan kenyamanan bagi pejalan kaki.

4. Persentase jumlah drainase dalam kondisi baik/pembuangan tidak tersumbat
Pada tahun 2019 panjang drainase dalam kondisi baik 72,796 km sedangkan panjang seluruh drainase 80,031 km terealisasi 90,96 %. Pada tahun 2019 ada penambahan pembangunan saluran 0,945 km dan pemeliharaan dan normalisasi saluran 8,266 km.
 5. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar/ pedagang kaki lima
Pada tahun 2019 sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan pedagang kaki lima ada 6 lokasi yaitu Kalisono, Sumber Umis, Terate, Kali Catur, Kali Maling dan Kali Piring. Dari 6 lokasi tersebut sudah memenuhi target. Hal ini dikarenakan adanya penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.
 6. Panjang jalan memiliki drainase
Pada tahun 2019 panjang jalan yang memiliki drainase 374,995 km sedangkan panjang jalan seluruhnya 449,635 km sehingga terealisasi 83,40 % dan tidak mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan drainase dioptimalkan pada normalisasi dan peningkatan kapasitas.
 7. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima
Pada tahun 2019 sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima sepanjang 6,33 km dan berlokasi di Jl. Diponegoro, Jl. Agus Salim dan Seputaran Alun-alun sehingga tidak ada perubahan. Namun para pedagang tersebut sampai saat ini masih taat pada Peraturan Daerah yang hanya memperbolehkan berdagang pada jam-jam tertentu.
 8. Jumlah ruas jalan yang diusulkan pemeliharannya
Jumlah ruas jalan yang diusulkan pada tahun 2019 sebanyak 200 ruas jalan dan terealisasi 207 ruas jalan. Hal ini disebabkan karena jumlah anggaran yang sangat besar untuk pemeliharaan jalan dan dari tahun ke tahun sehingga dapat menangani jalan-jalan protokol dan jalan lingkungan.
 9. Prosentase tersedianya informasi data base jalan
Pada tahun 2019 persentase tersedianya informasi data base jalan sudah terealisasi 100%, dikarenakan seluruh data jalan yang ada di Kota Madiun sudah tercover dalam GIS (Geographic Information System) sehingga tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
-

Berikut ini contoh tampilan aplikasi GIS (Geographic Information System) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun :



10. Persentase Kualitas Pelayanan Jasa Konstruksi Berdasarkan SPM

Pada tahun 2019 jumlah pemohon rekomendasi IUJK 32 pemohon dengan syarat lengkap mendapatkan rekomendasi semuanya sehingga terealisasi 100 %, sehingga tahun 2019 jumlah pemohon rekomendasi IUJK dengan persyaratan lengkap sudah 100 %.

11. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Pada tahun 2019 jumlah bangunan yang ber IMB yang diterbitkan 46.089 sedangkan jumlah bangunan seluruhnya 57.568 sehingga terealisasi 80,06%. Sehingga memenuhi target tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung sehingga pelayanan IMB menjadi lebih efektif dan efisien antara lain tata kelola kelembagaan yang baik khususnya perijinan, adanya pedoman teknis dari Kementerian ATR BPN RI terkait sistem pengawasan teknis serta adanya layanan publik online dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI) untuk pemrosesan IMB.

12. Persentase Bangunan Ber IMB

Pada tahun 2019 jumlah pengajuan rekomendasi IMB 407 pemohon dengan persyaratan lengkap terealisasi semuanya, sehingga persentase bangunan yang ber IMB 100 % dari pemohon yang ada pada tahun 2019.

13. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2019 terealisasi 20,01 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 terealisasi 19,55 % sehingga ada peningkatan 0,46 % hal ini dikarenakan dalam pemberian rekomendasi terkait permohonan pendirian bangunan disarankan untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau.

14. Ketaatan terhadap RTRW

Pada pelaksanaan tahun 2019 Ketaatan terhadap RTRW mencapai target 100% dengan realisasi 100%. Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan ruang telah dilaksanakan diseluruh wilayah Kota Madiun. Terdapat rekomendasi yang dikeluarkan karena sudah terpenuhinya kesesuaian terhadap RTRW dan sudah memenuhi target.

15. Luas wilayah banjir

Luas wilayah banjir di Kota Madiun sudah sesuai dengan target walaupun masih ada beberapa genangan di daerah Jl. Mastrip dan Winongo hanya air yang tergenang ≤ 30 cm selama 1 jam, hal ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi.

16. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah Kota Madiun 33,23 Ha

17. Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW

Pada tahun 2019 jumlah alih fungsi lahan wilayah Kota Madiun terus bertambah. Jumlah permohonan rekom ijin pemanfaatan ruang sebanyak 62 pemohon. Berdasarkan RTRW Kota Madiun 2010-2030, 17 pemohon ditolak, 39 pemohon diberikan rekom/disetujui dan 6 masih dalam proses sehingga pemohon yang mengajukan ijin pemanfaatan ruang sudah 100 %.

18. Meningkatnya Jumlah Kawasan Bebas Banjir

Pada tahun 2019 terealisasi 100% karena Kota Madiun sudah terbebas dari banjir walaupun masih terdapat beberapa genangan.

19. Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah dokumen perencanaan tata ruang berjumlah 17 (tujuh belas) dokumen diantaranya :

- a. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) Kota Madiun
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Madiun
-

- c. Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau
 - d. Rencana pemanfaatan aset eks Taman Harapan kawasan Jl. Puter
 - e. Rencana penataan kawasan alun-alun
 - f. Rencana penataan bunderan taman
 - g. Perda tentang Pemasangan Reklame
 - h. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
 - i. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - j. Kajian Peninjauan Kembali RTRW Kota Madiun
 - k. Sistem Pengawasan Teknis Penataan Ruang (Siwastek)
 - l. Kajian Peil Banjir, Perumahan Bukit Cemara Hijau Demangan
 - m. Kajian Peil Banjir Perumahan Citra Puri Kalingga
 - n. Kajian Peil Banjir Perumahan Marshall Mansion
 - o. Siteplan Perumahan Citra Puri Kalingga
 - p. Siteplan Perumahan Marshall Mansion
 - q. Perda tentang Retribusi Pengendalian Menara
20. Tersedianya Pedoman Perencanaan Teknis Tata Ruang
- Jumlah pedoman perencanaan teknis tata ruang pada tahun 2019 sebanyak 16 (enam belas) dokumen yang masih dalam proses penyusunan yaitu :
- a. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Madiun
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Madiun
 - c. Rancangan Peraturan Walikota tentang Ruang Terbuka Hijau
 - d. Perda tentang Pemasangan Reklame
 - e. Raperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah
 - f. Raperwal tentang Hunian Berimbang
 - g. One Map One Policy (Kebijakan Satu Data Satu Peta)
 - h. Dokumen Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur
 - i. Raperwal tentang Pengesahan Rencana Tapak
 - j. Raperwal tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 - k. Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Perda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah
 - l. Feasibility Study (FS) Underpass/Flyover Jalan Basuki Rahmat
-

- m. Feasibility Study (FS) Underpass/Flyover Jalan Yos Sudarso
- n. Feasibility Study (FS) Underpass/Flyover Jalan Ring Road Timur
- o. Feasibility Study (FS) Pelebaran Jembatan Manguharjo
- p. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTRK

21. Persentase Pemanfaatan Ruang

Pada pelaksanaan tahun 2019 Persentase Pemanfaatan Ruang mencapai target 100 %. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya sudah dilakukan pengendalian melalui monitoring, pendataan dimana 100 % wilayah perkotaan sudah dimanfaatkan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum di **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** pada tahun 2019 sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota	1	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi
		2	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan
6	program pengendalian banjir	1	Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu Air
		2	Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai.
		3	Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air
		4	Kegiatan pengadaan pompa banjir
7	program pembangunan saluran/ drainase/ gorong-gorong;	1	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Madiun
		2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin

No	Program	Kegiatan
		Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan
		3 Kegiatan Perencanaan Saluran Baru Drainase/Gorong-Gorong Tahun 2020
		4 program pembangunan Jalan dan Jembatan
		5 Kegiatan Pembangunan Jembatan
		6 Kegiatan Pemutakiran Data Jalan dan Jembatan
		7 Kegiatan Peningkatan Jalan Inspeksi di Kota Madiun
		8 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
		9 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)
		10 Kegiatan Peningkatan Jalan
		11 Kegiatan Inspeksi Jembatan
		12 kegiatan Inspeksi Jalan
8	program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I
		2 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II
		3 Kegiatan Pemeliharaan Jembatan
		4 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III
		5 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kartoharjo
		6 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Manguharjo
		7 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Taman
		8 Kegiatan Pemeliharaan jalan Ring Road
		9 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IV
9	program perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	1 Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)
		2 Kegiatan Pendataan IMB
		3 Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)
		4 Kegiatan Survey dan Pemetaan

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum yang direalisasikan **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** pada tahun 2019 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	3.322.767.520,00	3.120.778.782,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	3.072.767.520,00	2.870.778.782,00
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	10 Jenis
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	250.000.000,00	250.000.000,00
	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 Kali	50 Kali
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
2	program pemeliharaan barang milik daerah	2.546.994.000,00	2.484.113.643,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	1.761.500.000,00	1.745.925.826,00
	Output : Jumlah gedung	4 Gedung	4 Gedung
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	185.494.000,00	169.811.050,00
	Output : Jumlah kendaraan dinas	63 Unit	63 Unit
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	600.000.000,00	568.376.767,00
	Output : Jumlah sarpras kantor	6 Jenis	6 Jenis
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	607.725.000,00	605.061.000,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	607.725.000,00	605.061.000,00
	Output : Jumlah sarpras kantor	4 Paket	4 Paket
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.000.000,00	46.427.110,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	50.000.000,00	46.427.110,00
	Output : Jumlah dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
5	program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota	37.041.496.080,0 0	32.637.106.666,0 0
1	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	557.800.000,00	361.251.809,00
	Output : Jumlah peserta	200 Orang	200 Orang
	Outcome : Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %
2	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	36.483.696.080,0 0	32.275.854.857,0 0
	Output : Jumlah lokasi	22 Lokasi	22 Lokasi
	Outcome : Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %
6	program pengendalian banjir	46.850.054.160,00	38.680.202.018,00
1	Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu Air	200.000.000,00	192.852.000,00
	Output : Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	90 %	90 %
	Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
2	Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	41.250.404.160,0 0	38.092.039.018,0 0
	Output : Jumlah daerah bebas banjir	11 Lokasi	11 Lokasi
	Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
3	Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	399.650.000,00	395.311.000,00
	Output : Jumlah infrastruktur pendukung pompa pengendali banjir	1 Unit	1 Unit
	Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
4	Kegiatan pengadaan pompa banjir	5.000.000.000,00	-
	Output : Jumlah pompa	3 Unit	-
	Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
7	program pembangunan saluran/ drainase/ gorong-gorong	24.952.679.720,00	22.541.544.147,00
1	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota	22.552.679.720,00	20.547.186.300,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Madiun		
	Output : Panjang saluran yang di bangun	6,6 Km	6,6 Km
	Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	900.000.000,00	802.329.647,00
	Output : Jumlah daerah bebas banjir	3 Lokasi	3 Lokasi
	Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
3	Kegiatan Perencanaan Saluran Baru Drainase/Gorong-Gorong Tahun 2020	1.500.000.000,00	1.192.028.200,00
	Output : Jumlah dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
8	program pembangunan Jalan dan Jembatan	54.532.818.280,00	50.664.994.975,00
1	Kegiatan Pembangunan Jembatan	390.300.000,00	352.884.960,00
	Output : Jumlah jembatan yang dibangun	1 Jembatan	1 Jembatan
	Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
2	Kegiatan Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan	63.000.000,00	61.300.000,00
	Output : Persentase data yang up to date	100 %	100 %
	Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
3	Kegiatan Peningkatan Jalan Inspeksi di Kota Madiun	12.327.737.000,00	11.545.605.000,00
	Output : Panjang jalan yang ditingkatkan	0,475 Km	0,475 Km
	Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
4	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.896.150.000,00	2.434.840.737,00
	Output : Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	9 Dokumen	9 Dokumen
	Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
5	Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)	9.991.681.280,00	9.035.369.278,00
	Output : Panjang jalan yang ditingkatkan	4 Km	4 Km
	Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
6	Kegiatan Peningkatan Jalan	28.732.700.000,00	27.107.045.000,00
	Output : Panjang jalan yang ditingkatkan	12,7 Km	12,7 Km
	Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
7	Kegiatan Inspeksi Jembatan	55.000.000,00	53.800.000,00
	Output : Jumlah dokumen survey dan kondisi jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
8	kegiatan Inspeksi Jalan	76.250.000,00	74.150.000,00
	Output : Jumlah dokumen survey dan kondisi jalan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
9	program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	42.216.380.080,00	38.292.922.508,00
1	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I	9.982.583.000,00	9.249.026.960,00
	Output : Jumlah lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi
	Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
2	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II	11.278.008.080,00	10.383.948.431,00
	Output : Jumlah lokasi	12 Lokasi	17 Lokasi
	Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
3	Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	149.750.000,00	149.017.000,00
	Output : Jumlah jembatan yang dipelihara	10 Lokasi	10 Lokasi
	Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
4	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III	9.939.000.000,00	9.097.182.428,00
	Output : Jumlah lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi
	Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
5	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kartoharjo	359.750.000,00	346.356.464,00
	Output : Jumlah lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
6	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan Manguharjo	359.750.000,00	348.550.062,00
	Output : Jumlah lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
	Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
7	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan Taman	359.750.000,00	346.895.000,00
	Output : Jumlah lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
	Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
8	Kegiatan Pemeliharaan jalan Ring Road	249.750.000,00	243.861.043,00
	Output : Jumlah lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
	Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
9	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IV	9.538.039.000,00	8.128.085.120,00
	Output : Jumlah lokasi	14 Lokasi	14 Lokasi
	Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
10	program perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	775.039.920,00	600.656.009,00
1	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	300.000.000,00	219.879.968,00
	Output : Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang di Perdakan	100 %	100 %
	Outcome : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	100 %	100 %
2	Kegiatan Pendataan IMB	158.346.640,00	125.494.174,00
	Output : Data bangunan ber IMB	500 Bangunan	500 Bangunan
	Outcome : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	100 %	100 %
3	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	158.346.640,00	108.696.207,00
	Output : Persentase surat teguran yang diterbitkan	100 %	100 %
	Outcome : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	100 %	100 %
4	Kegiatan Survey dan Pemetaan	158.346.640,00	146.585.660,00
	Output : Jumlah dokumen SKRK	500 Dokumen	755 Dokumen
	Outcome : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	100 %	100 %

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Kegiatan Pengadaan Pompa Banjir tahun anggaran 2019 tidak dapat terserap karena barang yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan barang import dari Amerika dan mengingat barang tersebut datangnya bulan maret tahun 2020 maka pengadaannya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena melewati tahun anggaran dan melebihi dari 50 hari kalender setelah melewati tahun anggaran. Apabila dilanjutkan maka akan menyalahi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Solusi

- Pengadaan pompa banjir diusulkan di tahun anggaran selanjutnya.

e. Penghargaan yang diterima

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun tidak ada penghargaan yang diterima baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

a. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.59
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun
Tahun 2018 s.d. 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2019	
1	2	3	4	5	6	7
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat						
1	Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	0,34	0,32	0,33	98,86

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Gini

Tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk, diukur dengan menggunakan indikator Gini Ratio dan Distribusi pengeluaran menurut World Bank. Pada Tahun 2019 Gini Ratio Kota Madiun tercatat sebesar 0,33 hal ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Jawa Timur sebesar 0,37 sedangkan Nasional sebesar 0,38.

Adapun perkembangan indikator kinerja pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun dapat dilihat dibawah ini :

Tabel III.60
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kota Madiun Tahun 2018- 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
6 Sosial					
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	100 %
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	12936	4,700	10.612	225,8 %
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	10594	1,600	10.573	660,8 %
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	100.1	97	100,3%	103,40%
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12936	824	10.612	1287,9 %
6.6	Angka Kemiskinan	4,49	4,01	4,35	92,2 %
6.7	Indeks Gini	0,34	0,32	0,33	96,86%

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Terdapat 15 Panti Asuhan dan 1 Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial permakanan hanya 8 lembaga. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh, total anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 148.700.000.
2. Jumlah Penerima Bantuan

Penerima Bantuan selama tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

PENERIMA BANTUAN	SATUAN	JUMLAH
1. Bansos Lansia Non Potensial	orang	101
2. Bantuan Permakanan Anak Terlantar	Orang	365
3. BPNT	keluarga	4.833
4. PKH	keluarga	3.269
5. BPNTD	keluarga	2.044
Jumlah		10.612

Penerima bantuan lebih sedikit dari tahun sebelumnya karena ada bantuan yang pada tahun 2018 ada untuk tahun 2019 bantuan tersebut tidak ada lagi yaitu bantuan beras subsidi (TUAN RASIDI) dari Provinsi Jawa Timur.

Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pusat, sehingga bantuan yang diterima jumlahnya dibawah pagu. Untuk Bansos Lansia non potensial, bantuan tidak tersalurkan karena penerima bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris. Lansia nonpotensial penerima bansos yang meninggal sejumlah 35 orang.

3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang dahulu disebut dengan PMKS.

Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel jenis PPKS berikut :

JENIS PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	JML	TERTANGANI
ANAK BALITA TERLANTAR (ABT)	20	20
ANAK TERLANTAR (AT)	135	135
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	17	17
ANAK JALANAN (ANJAL)	7	26
ANAK DENGAN KEDISABILITASAN (ADK)	81	81
ANAK MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN	1	1
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	3	3
LANJUT USIA TERLANTAR (LUT)	643	652
PENYANDANG DISABILITAS (PD)	491	583
TUNA SUSILA (TS)	6	
GELANDANGAN (GLDG) termasuk OT dari luar Kota	8	28
PENGEMIS (PGMS)	18	23
PEMULUNG (PMLG)	50	55
KELOMPOK MINORITAS (KM)	2	2
BEKAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BWBP)	43	
ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)	1	1
KORBAN PENYALAHGUNAAN NAFZA (KPGN)	4	
KORBAN TRAFFICKING (KTRF)	0	0
KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)	0	0
PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL (PMBS)	0	0
KORBAN BENCANA ALAM (KBA)	10	10
KORBAN BENCANA SOSIAL (KBS)	0	0
PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI (PRSE)	926	926
KORBAN BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGI (KBSP)	37	
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)		
KELUARGA YANG TINGGAL DI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (KTRLH)	33	
JUMLAH	2.536	2.563
PPKS LAINNYA		
FAKIR MISKIN (FM)	8166	8166
TOTAL	10.702	10.729

4. PMKS yang tertangani

Pada tahun 2019 capaian penanganan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai 10.729 orang atau sebesar 100,3%, hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan social asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian : 92 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/ orang terlantar,

5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang Anak jalanan dan 5 orang pemulung.

5. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

JENIS PMKS	SATUAN	JUMLAH	BANTUAN
1. Lanjut Usia Terlantar/ Non potensial	orang	101	Berupa bantuan uang @ Rp 2.000.000,-
2. Anak Terlantar	orang	365	Berupa bantuan permakanan @ Rp 300.000,-
3. Fakir Miskin dengan rincian :	orang	10.146	
- Fakir Miskin KPM BPNT		4.833	APBN
- Fakir Miskin KPM PKH		3.269	APBN
- Fakir Miskin KPM BPNTD		2.044	APBD II
Jumlah		10.612	

6. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Sesuai release BPS “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019”, angka kemiskinan Kota Madiun sebesar 4,35% atau sekitar 7.690 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp. 478,304,-/jiwa/bln). Angka tersebut merupakan rangking ketiga di Jawa Timur, Kabupaten/kota dengan angka kemiskinan terendah setelah Kota Batu (3,81%) dan Kota Malang (4.07%). Capaian tersebut meningkat 0,14 poin dari tahun sebelumnya, dengan berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat, sangat efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

7. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2019 tercatat pada angka 0,33 dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan pada Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	1 kegiatan pembinaan perintis kemerdekaan/ keluarganya dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
		2 Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
		3 Kegiatan Pemantapan TAGANA
		4 Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia
		5 Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS
		6 kegiatan pembinaan PSKS se Kota Madiun
		7 kegiatan sunat dan nikah massal
		8 kegiatan peningkatan dan penanganan PMKS

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun pada Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	2.104.816.380	1.802.458.404
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1.549.453.380	1.247.113.001
	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 paket	10 paket

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	555.363.000	555.345.403
	Output : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang dilaksanakan	70 kali	182 kali
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
2	program pemeliharaan barang milik daerah	433.742.000	406.791.850
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	246.209.000	244.702.000
	Output : Jumlah Gedung yang dipelihara	2 unit	2 unit
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	131.733.000	106.312.650
	Output : Jumlah Kendaraan yang dirawat	25 unit	25 unit
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	55.800.000	55.777.200
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	5 paket	5 paket
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	385.733.711	291.974.500
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	385.733.711	291.974.500
	Output : Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	1 paket
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	72.277.064	69.744.104
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	72.277.064	69.744.104
	Output : Jumlah Dokumen	8 dokumen	8 dokumen
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
5	program pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	4.438.925.508	4.102.047.603
1	kegiatan pembinaan perintis	38.633.900	37.483.000

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	kemerdekaan/ keluarganya dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan		
	Output : Jumlah peserta sarasehan perintis kemerdekaan	78 orang	78 orang
	Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
2	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.	1.074.719.096	963.398.452
	Output : berfungsinya kompetensi sosial dan penanganan PMKS	8645 orang	8645 orang
	Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
3	Kegiatan Pemantapan TAGANA	189.040.000	163.899.500
	Output : Jumlah kesiapsiagaan penanganan bencana	22 orang	22 orang
	Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
4	Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	1.370.996.104	1.353.524.130
	Output : Jumlah kesejahteraan LU dan tertib administrasi karang werdha dan lanjut usia	1800 orang	1800 orang
	Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
5	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS	624.846.000	553.500.760
	Output : tersedianya data fakir miskin Kota Madiun	27 kelurahan	27 kelurahan
	Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
6	kegiatan pembinaan PSKS se Kota Madiun	335.493.792	313.426.749
	Output : Jumlah peserta bimbingan kewirausahaan UEP, motivasi UKS dan pemberdayaan PSM	4 PSKS	4 PSKS
	Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
7	kegiatan sunat dan nikah massal	151.272.880	150.654.000
	Output : Jumlah Peserta sunat dan nikah massal	90 peserta	56 peserta
	Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
8	kegiatan peningkatan dan penanganan PMKS	653.923.736	566.161.012
	Output : Jumlah penerima bimbingan motivasi, peningkatan dan pelayanan PMKS	320 orang	320 orang
	Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %

d. Permasalahan dan Solusi

Penanganan permasalahan sosial di Kota Madiun terus menunjukkan peningkatan kualitas pelayanannya, beberapa hal yang memerlukan perbaikan di tahun selanjutnya antara lain :

1. Belum optimalnya sinergi Komda PPKS, masih terdapat beberapa celah penghambat dalam penanganan PPKS seperti mekanisme rujukan ke RSJ Spesialis.
2. Terbatasnya daya tampung UPT Panti Sosial Provinsi, sehingga menyulitkan daerah untuk menyalurkan Orang Terlantar, dimana kewenangan panti ada di provinsi bukan di kab/kota.
3. Masih ada fakir miskin yang belum mendapat bantuan. Kecepatan update data daerah belum dapat di akomodir oleh Pusat, sehingga secara administrasi fakir miskin sudah tercatat dalam DTKS dan layak mendapat bantuan tetapi belum mendapatkan bantuannya karena penetapan penerima bantuan dari Pusat belum dapat seiring dengan proses finalisasi dari daerah.

Solusi

Dalam meningkatkan penanganan PPKS diperlukan beberapa upaya terkait dengan permasalahan yang ada, seperti :

1. Meningkatkan sinergi Komda PPKS sehingga masing-masing berperan maksimal dalam penanganan PPKS.
2. Koordinasi dengan provinsi untuk menambah daya tampung panti.
3. Pemberian bantuan sosial mengikuti syarat dan ketentuan masing-masing bantuan, terus diupayakan pemutakhiran data agar masyarakat yang terdata dalam DTKS tepat sasaran.

e. Penghargaan yang diterima

- Juara 2 Kota Ramah Lansia Tingkat Provinsi Jawa Timur
 - Juara 2 KUBE Tingkat Provinsi
 - Juara 2 Pendaping KUBE Tingkat Provinsi
-

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 merupakan upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat”. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.61
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat						
	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Rumah layak Huni	99,65%	99,42%	99,95%	100,53%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Rasio Rumah layak Huni

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2019 didapatkan sebanyak 132 rumah yang berhak menerima Bansos RTLH.

Adapun dari 430 unit rumah yang tidak layak masih terdapat 20 unit rumah yang tidak menerima bantuan RTLH disebabkan beberapa hal antara lain : target sasaran penerima bantuan yang tidak masuk pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, warga melakukan perbaikan sendiri serta adanya penolakan dari penerima bantuan yang menolak program tersebut. Perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{42.849}{42.869} \times 100\% = 99,95\%$$

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan.

Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.62
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
di Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar				
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	99,71	99	99,71	100,72
4.2	Rumah tangga pengguna listrik	97,24	85	97,24	114,40
4.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	98,87	98	99,00	101,02
4.4	Rasio rumah layak huni	99,65	96,5	99,95	103,58
4.5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	587	585	586	100,17
4.6	Lingkungan pemukiman kumuh	0	0	0	100
4.7	Ruang Terbuka Hijau Kondisi Baik	78,19	56,1	81,75	145,72
4.8	Rasio Tempat Pemakaman Umum yang dikelola	2,5	2,5	2,5	100
4.9	Rasio rumah layak huni	99,65	99,42	99,95	100,53

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
4.10	Rasio pemukiman layak huni	100	96	100	104,17
4.11	Prosentase penduduk berakses air minum	93.81	93.75	96,00	102,4
4.12	Prosentase luas pemukiman yang tertata	2,758.67	1,500	2,758.67	183,91
4.13	Luas Area Lahan Kritis	0	2.5	0	250
4.14	Luas Areal Lahan Penghijauan	78.19	31	81,75	263,71

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Rumah tangga pengguna air bersih

Berdasarkan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, disebutkan bahwa definisi air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dengan kata lain air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Data rumah tangga pengguna air bersih masih menggunakan data RPLP 2017 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$$

$$= \frac{41.836}{41.958} \times 100\% = 99,71\%$$

2. Rumah tangga pengguna listrik

Data rumah tangga pengguna listrik masih menggunakan data RPLP 2017 dengan Perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sambungan listrik (unit rumah)}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$$

$$= \frac{41.687}{42.869} \times 100\% = 97,24\%$$

3. Persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (98,87% dengan rumah tangga bersanitasi sebanyak 41.483) seiring dengan penyaluran Bansos kepada 59 unit penerima bantuan sehingga total rumah tangga bersanitasi sebesar 41.542 unit rumah. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\% = \frac{41.542}{41.958} \times 100\% = 99,00\%$$

4. Rasio rumah layak huni

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2019 didapatkan sebanyak 132 rumah yang berhak menerima Bansos RTLH. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{42.849}{42.869} \times 100\% = 99,95\%$$

5. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, dihitung dari :

$$\frac{\text{Daya tampung}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000 = \frac{123.185}{210.115} \times 1000 = 586$$

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1000 jumlah penduduk adalah 586 unit lubang makam. Rasio tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas lahan makam/daya tampung makam pada tahun tertentu. Diperlukan penambahan luas makam seiring dengan proyeksi jumlah penduduk yang semakin bertambah.

6. Lingkungan pemukiman kumuh

Sesuai dengan SK Walikota Madiun Nomor : 050-401.204/254/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun dengan luas penetapannya 94,3 Ha. Tahun 2019 ini kawasan lingkungan kumuh sudah dilakukan penanganan semua. Tingkat kekumuhan kawasan permukiman ditentukan berdasarkan score kekumuhan yang dihitung dari komponen permukiman antara lain jalan lingkungan, drainase, persampahan, kondisi bangunan, sanitasi, dan sebagainya. Nilai kumuh paling rendah adalah 19. Score dibawah nilai 19 diartikan sebagai kawasan tidak

kumuh. Sedangkan nilai rata-rata kawasan permukiman di tingkat kelurahan di Kota Madiun kurang dari 19. Namun demikian masih ada komponen kawasan permukiman yang perlu ditangani untuk mencegah munculnya kawasan kumuh.

7. Ruang Terbuka Hijau Kondisi Baik

No	Nama Tempat	Luas (ha)
1	Taman	10,40
2	Patung	0,01
3	RTH	38,55
4	Monumen	0,25
5	Makam yang dipelihara	2,20
6	Luas Median	1,16
7	Lapangan	16,20
8	Hutan Kota	12,34
Jumlah		81,75

8. Rasio Tempat Pemakaman Umum yang dikelola

$$\frac{\text{Jumlah pemakaman yang dikelola}}{\text{Jumlah makam seluruh kota}} = \frac{2}{80} \times 100\% = 2,5$$

Rasio Tempat Pemakaman Umum yang dikelola tidak mengalami perubahan dikarenakan makam yang dikelola tetap. Pada tahun 2019 ini belum ada penyerahan fasum fasos perumahan berupa lahan makam yang diserahkan pengembang perumahan ke Pemerintah Kota Madiun (masih berproses) sehingga setelah dilakukan pendataan makam, jumlah makam seluruh Kota Madiun tetap yaitu 80 makam.

9. Rasio rumah layak huni

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2019 didapatkan sebanyak 132 rumah yang berhak menerima Bansos RTLH. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{42.849}{42.869} \times 100\% = 99,95\%$$

10. Rasio permukiman layak huni

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau

kawasan pedesaan serta Perda Kota Madiun No.6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Mengacu pada point 6 diatas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan tahun 2019 sudah tertangani semua sehingga ditingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100\% = \frac{2758,67}{2758,67} \times 100\% = 100\%$$

11. Prosentase penduduk berakses air minum

Prosentase penduduk berakses air minum didasarkan pada jumlah masyarakat yang terlayani melalui jaringan PDAM. Pada tahun 2019 masyarakat yang terlayani sebanyak 201.715 dari jumlah penduduk 210.115 sehingga didapatkan prosentase sebesar 96,00%. Sedangkan pada tahun 2018 mencapai 92,06 % dengan masyarakat yang terlayani sebesar 196.810 dari penduduk berjumlah 209.797. Adapun perhitungan Prosentase penduduk berakses air minum sebagai berikut :

$$\frac{\text{Masyarakat terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\% = \frac{201.715}{210.115} \times 100\% = 96,00\%$$

12. Prosentase luas pemukiman yang tertata

Pada tahun 2019 luas permukiman yang tertata mencapai 2758,67_ha dari target sebesar 1.500 ha. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu keberhasilan dalam melaksanakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) serta partisipasi/kepedulian masyarakat dalam penataan lingkungan.

13. Luas Area Lahan Kritis

Lahan kritis dikota madiun tidak ada (0 ha)

14. Luas Areal Lahan Penghijauan

Luas areal penghijauan mencapai 81,75 ha terdiri dari beberapa lokasi baik di median,taman,makam dan hutan kota.

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun tahun 2019 sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program lingkungan sehat perumahan	1	Kegiatan Updating Data Kawasan Permukiman Kumuh
		2	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi)
		3	Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan
		4	Kegiatan Pembangunan Landscape Rusunawa
		5	Kegiatan Operasional Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat
		6	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi ijin Perumahan
		7	Kegiatan BOP RTLH
		8	Kegiatan BOP Sanitasi Rumah Tangga
		9	Kegiatan Pemeliharaan MCK, IPAL Wilayah Kota Madiun
		10	kegiatan inventarisasi fasum fasos perumahan
6	program pengelolaan ruang terbuka hijau	1	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman
		2	Kegiatan Sosialisasi Pertamanan, PJU, Pemakaman
		3	Kegiatan Program Taman Bersih (Protasih)
		4	Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau Jalan/Median Jalan
		5	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
		6	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP
		7	Kegiatan pemeliharaan makam Pace Keras
		8	Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota
		9	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota
		10	Kegiatan Prometer (Program Madiun Terang)
		11	Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau.
		12	Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJU.

No	Program	Kegiatan	
		13	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.
		14	Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun
		15	Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran
		16	Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi
		17	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan
		18	kegiatan pengadaan kendaraan operasional pertamanan dan PJU

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang direalisasikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1.845.638.000	1.622.023.936,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1.661.758.000	1.438.342.336
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	75 jenis	75 jenis
	Outcome : Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	183.880.000	183.681.600
	Output : Jumlah Perjalanan Dinas	50 kali	51 kali
	Outcome : Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah	2.266.939.400	1.357.425.215,88
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	244.900.000	238.283.093,88
	Output : Jumlah Gedung	2	2
	Output : Prosentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	1.531.973.000	870.725.372
	Output : Jumlah Kendaraan	26	26
	Output : Prosentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	490.066.400	248.416.750
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dimaintain	16	16
	Output : Prosentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi	100%	100%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Baik		
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.041.850.000	995.556.962,92
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	1.041.850.000	995.556.962,92
	Output : Jumlah Jenis	4 jenis	4 jenis
	Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31.630.000	27.333.744
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	31.630.000	27.333.744
	Output : Jumlah Dokumen	10 dokumen	10 dokumen
	Outcome : Prosentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
5	program lingkungan sehat perumahan	7.409.753.840	6.822.002.291,21
1	Kegiatan Updating Data Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	98.526.461
	Output : Jumlah Paket	1 paket	1 paket
	Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
2	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi)	6.242.739.600	5.728.837.826,21
	Output : Jumlah Lokasi	27 lokasi	27 lokasi
	Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
3	Kegiatan Pembangunan Landscape Rusunawa	359.622.240	313.670.580
	Output : Jumlah Unit	1 unit	1 unit
	Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
4	Kegiatan Operasional Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat	227.400.000	223.404.023
	Output : Jumlah Paket	1 paket	1 paket
	Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
5	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi ijin Perumahan	16.772.000	9.716.377
	Output : Jumlah Unit	1 lokasi	1 lokasi
	Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
6	Kegiatan BOP RTLH	150.000.000	147.651.710
	Output : Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
7	Kegiatan BOP Sanitasi Rumah Tangga	100.000.000	97.213.490
	Output : Jumlah Lokasi	1 lokasi	1 lokasi
	Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
8	Kegiatan Pemeliharaan MCK, IPAL Wilayah Kota Madiun	172.220.000	169.058.518
	Output : Jumlah Paket	1 paket	1 paket
	Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
9	kegiatan inventarisasi fasum fasos perumahan	41.000.000	33.923.306
	Output : Jumlah lokasi	25 lokasi	25 lokasi
	Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
6	program pengelolaan ruang terbuka hijau	28.216.081.500	24.655.980.551
1	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman	422.000.000	384.328.185,85
	Output : Jumlah Lokasi	6 lokasi	6 lokasi
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
2	Kegiatan Sosialisasi Pertamanan, PJU, Pemakaman	643.500.000	601.940.604
	Output : Jumlah Kegiatan Sosialisasi	3 jenis	3 jenis
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
3	Kegiatan Program Taman Bersih (Protasih)	2.983.880.000	2.964.145.350
	Output : Jumlah Tenaga	105 orang	105 orang
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
4	Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau Jalan/Median Jalan	599.620.000	578.917.514
	Output : Jumlah Jenis	3 jenis	3 jenis
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
5	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	268.500.000	264.131.321
	Output : Jumlah Titik	4502 titik	4502 titik
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
6	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	723.500.000	658.659.178,38
	Output : Jumlah Lokasi	1 lokasi	1 lokasi
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
7	Kegiatan pemeliharaan makam Pace Keras	191.000.000	183.267.881
	Output : Jumlah Lokasi	1 lokasi	1 lokasi
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
8	Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota	620.450.000	569.075.486
	Output : Luas areal Kawasan Hutan Kota yang terpelihara	2 ha	2,76 ha
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
9	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota	7.979.679.120	5.534.483.823,65
	Output : Jumlah lokasi	8 lokasi	13 lokasi
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
10	Kegiatan Promater (Program Madiun Terang)	532.039.040	507.635.186
	Output : Jumlah tenaga	16 orang	16 orang
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
11	Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau.	952.600.000	924.487.641
	Output : Jumlah lokasi	7 lokasi	7 lokasi
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
12	Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJU.	2.894.270.000	2.743.275.143
	Output : Jumlah titik	350 titik	404 titik
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
13	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.	4.223.297.500	3.822.990.500,56
	Output : Jumlah lokasi	11 lokasi	11 lokasi
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
14	Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun	619.049.960	586.218.557
	Output : Jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
15	Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran	229.000.000	211.938.123
	Output : Jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
16	Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi	1.656.650.000	1.630.406.707
	Output : Jumlah lampu hemat energi	300 buah	300 buah
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
17	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan	271.200.000	259.901.750
	Output : Jumlah jenis	4 jenis	4 jenis
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
18	kegiatan pengadaan kendaraan operasional pertamanan dan PJU	2.405.845.880	2.230.177.600
	Output : Jumlah kendaraan operasional	5 unit	5 unit
	Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha

c. Permasalahan dan Solusi

Dengan pelaksanaan beberapa program dan kegiatan ditemukan beberapa permasalahan antara lain :

- Terdapat permasalahan gagal tender pada RTH Cokrobasonto (Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota) dikarenakan rekanan/penyedia tidak memenuhi kualifikasi serta rencananya akan dilakukan retender waktu tidak mencukupi. RTH cokrobasonto tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2020. Walaupun terjadi gagal tender capaian kinerja Kegiatan

Peningkatan Fasilitas Taman Kota melebihi dari target (8 lokasi) dengan realisasi 13 lokasi yaitu meliputi 7 lokasi pembangunan RTH baru (RTH Tlogo Mas, RTH Taman Kelir/Asabri Selo, RTH Nusa Penida, RTH Kelapa Sari, RTH Klegen, RTH Adi Sucipto, RTH Ngebrak) dan 6 rehabilitasi RTH yang sudah ada (Taman UKS, Taman Depan INKA, RTH Monumen TGP, RTH Kapten Saputro, Taman Perempatan Jalan Bali, Pembenahan Timur Pos Polisi)

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus melakukan peningkatan RTH baik melakukan pemeliharaan dan pembangunan. Pemeliharaan dilakukan melalui perapihan, peremajaan, pengendalian pertumbuhan tanaman Ruang Terbuka Hijau dapat berfungsi dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan RTH meliputi penambahan fasilitas yang tersebar diberbagai wilayah dikota madiun dengan memakai konsep taman tematik yang artinya taman tematik tersebut disesuaikan dengan icon wilayah yang akan dibangun. Peran serta masyarakat sangatlah diperlukan untuk turut menjaga agar tidak terjadi aksi vandalisme dan memanfaatkan sarana prasarana taman tersebut baik untuk kegiatan olah raga maupun wisata. RTH saat ini masih terasa kurang dan kedepan akan dilakukan pembangunan secara bertahap. Selain Ruang Terbuka Hijau, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun terus membenahi Penerangan Jalan Umum baik dengan melakukan penambahan titik PJU baru maupun melakukan konversi ke LED yang lebih terang dan hemat energi.
 - Disamping RTH dan PJU terdapat 2 lokasi makam yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun yaitu Makam Pace Keras dan Taman Makam Pahlawan. Selain 2 makam tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun juga menangani makam yang ada dikota madiun yang merupakan asset Pemerintah Kota Madiun dengan meningkatkan fasilitas makam seperti pemagaran, rehabilitasi maupun pengecatan. Sampai pada tahun 2019 sudah 60 makam yang telah ditingkatkan fasilitasnya. Kedepan akan dilakukan kembali peningkatan fasilitasnya demi menjaga asset Pemerintah Kota Madiun.
 - Salah satu indikator dalam peningkatan permukiman yang sehat adalah rumah yang layak huni. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011
-

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat didefinisikan untuk menuju permukiman yang sehat, dilakukan upaya untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH dan baru tahun 2018 ini dilaksanakan. Pada tahun 2019 dari 430 unit rumah yang tidak layak masih terdapat 20 unit rumah yang tidak menerima bantuan RTLH disebabkan beberapa hal antara lain : target sasaran penerima bantuan yang tidak masuk pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, warga melakukan perbaikan sendiri serta adanya penolakan dari penerima bantuan yang menolak program tersebut.

d. Penghargaan yang diterima

Penghargaan yang diterima tingkat provinsi/nasional nihil

6. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RPJMD 2014-2019 yang berkaitan dengan pelaksanaan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif

Sasaran :

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran masing-masing, inovasi serta strategi kebijakan.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Satpol PP Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.63
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018- 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat						
2.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka pelanggaran ketertiban umum	98,95%	98%	100%	100%

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas untuk Indikator kinerja sasaran :

1. Angka Pelanggaran Ketertiban Umum

Adalah jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang tertangani dibandingkan dengan pelanggaran K3 yang masuk mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 100%.

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Angka Pelanggaran Ketertiban dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 98,95% mengalami kenaikan sebesar 1,05%.

Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 98% sehingga telah mencapai target RKT tahun 2019. Kenaikan ini terjadi dikarenakan bahwa isu strategis pelanggaran ketertiban umum ditahun 2019 pada pelanggaran reklame. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun untuk penataan reklame di Kota Madiun agar wilayah Kota Madiun indah dan bersih, selain itu juga menuju Kota Smartcity dimana reklame ditata sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Sehingga pelanggaran reklame yang ada baik reklame insidental dan permanen yang sudah rusak, melanggar dan tidak berijin ditindaklanjuti oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan patroli wilayah pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja pembangunan daerah yang diukur dengan indikator kinerja adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.64
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
di Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
2 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
2.2	Angka Pelanggaran Ketertiban Umum	98,95%	98%	100%	100%
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
5.1	Persentase Penegakan Perda	100	100%	100%	100%
5.2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	4.6	4.4	4.6	100%
5.3	Jumlah Anggota linmas per jumlah 10.000 penduduk	62	66	66,01	100%
5.4	Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan	30.01	15	29,7	100%
5.5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota	98.95	98	100%	100%
5.6	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP per hari	9	9	9	100%
5.7	Petugas Perlindungan Masyarakat	1300	1299	1387	107%
5.8	Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota	100	100	100	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
5.9	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Madiun	62	66	66,01	100%
5.10	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban	868	868	868	100%
5.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	100	100	100%	100%
5.12	Tingkat waktu tanggap (renpons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100	100%
5.13	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standart	85	85	100	100%
5.14	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada WMK	100%>	100%>	100%>	100%
5.15	Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100	100	100	100

Sumber Data : Satpol PP dan BPBD Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas untuk Indikator kinerja sasaran :

1. Angka Pelanggaran Ketertiban Umum

Dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.628}{3.628} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Angka Pelanggaran Ketertiban Umum ditahun 2019 sebesar 100% dan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 98,95% sehingga mengalami kenaikan sebesar 1,05%.

Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 98% sehingga telah mencapai target RKT tahun 2019. Kenaikan ini terjadi dikarenakan bahwa isu strategis pelanggaran ketertiban umum ditahun 2019 pada pelanggaran reklame. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun untuk penataan reklame di Kota Madiun agar wilayah Kota Madiun indah dan bersih, selain itu juga menuju Kota Smartcity dimana reklame ditata sesuai dengan aturan

dan peruntukannya. Sehingga pelanggaran reklame yang ada baik reklame insidental dan permanen yang sudah rusak, melanggar dan tidak berijin ditindaklanjuti oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan patroli wilayah pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. Persentase penegakan perda

Dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Persentase Penegakan Peraturan Daerah ditahun 2019 sebesar 100% dan ditahun 2018 sebesar 100%.

Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 100% sehingga mencapai target RKT tahun 2019, bahwa pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, dengan ruang lingkup meliputi :

- a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah
- b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum
- c. Prefentif non yustisial
- d. Penindakan yustisial

Pada tahapan Penindakan Yustisi dilakukan penyidikan dan penuntutan ke Pengadilan melalui Korwas PPNS Polres Madiun Kota. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan penegakkan Perda.

3. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Polisi Pamong Praja}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$$

$$= \frac{97 \times 10.000}{210.115} = 4,6$$

Dengan demikian indikator kinerja sasaran jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk ditahun 2019 sebesar 4,6 sama dengan capaian ditahun 2018 sebesar 4,6.

Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 4,4 sehingga telah mencapai target RKT tahun 2019 sebesar 4,6 yang terdiri dari 41 PNS dan 45 tenaga kontrak dan 11 tenaga upahan.

Hal ini mencapai target karena di Tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya tenaga upahan dari Relawan BPBD yang masuk menjadi anggota Balakar / Barisan Relawan Kebakaran yang menjadi satu dengan Pemadam Kebakaran dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kota Madiun dan kabupaten penyangga disekitarnya. Sesuai dengan misi kemanusiaan petugas pemadam kebakaran ini bekerja dengan moto pantang pulang sebelum api padam.

4. Jumlah Anggota linmas per jumlah 10.000 penduduk

Dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$$

$$= \frac{1.387 \times 10.000}{210.115} = 66,01$$

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Jumlah Anggota linmas per jumlah 10.000 penduduk pada tahun 2019 sebesar 66,01 dan telah mencapai target RPJMD. Namun tetap perlu diperhatikan untuk regenerasi penambahan anggota melalui pengkaderan Linmas aktif. Kesulitan yang menjadi kendala dalam pengkaderan adalah karena partisipasi pemuda untuk menjadi anggota Linmas masih rendah. Anggota Linmas yang ada sekarang masih cenderung didominasi dengan masyarakat yang berusia diatas 50 tahun. Untuk itu menjadikan tugas kita bersama untuk memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi aktif menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

5. Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan

Dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah pos siskamling}}{\text{Jumlah kelurahan}} = \frac{803}{27} = 29,7$$

Dengan demikian indikator kinerja sasaran pos siskamling per jumlah kelurahan ditahun 2019 sebesar 29,7 dan sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 30,1 mengalami penurunan sebesar 0,4.

Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 15 sehingga telah mencapai target RKT tahun 2019 dan melebihi target sebesar 14,7.

Hal ini dikarenakan adanya pos kamling yang sudah tidak aktif lagi, untuk itu perlu diadakan peningkatan kegiatan Lomba Pos Kamling yang meliputi peningkatan nilai hadiah Juara Lomba Pos Kamling yang bertingkat baik tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun di Tingkat Kota, dan pemberian hadiah kepada pos kamling aktif se Kota Madiun. Sehingga meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap Lomba Pos Kamling dengan berlomba-lomba membangun pos kamling baru dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui Pos Kamling.

6. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota

Dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.628}{3.628} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota ditahun 2019 sebesar 100% dan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 98,95% sehingga mengalami kenaikan sebesar 1,05%.

Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 98% sehingga telah mencapai target RKT tahun 2019. Kenaikan ini terjadi dikarenakan bahwa isu strategis pelanggaran ketertiban umum ditahun 2019 pada pelanggaran reklame. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun untuk penataan reklame di Kota Madiun agar wilayah Kota Madiun indah dan bersih, selain itu juga

menuju Kota Smartcity dimana reklame ditata sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Sehingga pelanggaran reklame yang ada baik reklame insidental dan permanen yang sudah rusak, melanggar dan tidak berijin ditindaklanjuti oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan patroli wilayah pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

7. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP per hari

Dihitung dengan rumus :

= Jumlah Patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam

= 9 kali patroli dalam sehari

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Cakupan Patroli Petugas Satpol PP per hari sebesar 9 kali per hari sehingga sama dengan capaian di tahun 2018 sebanyak 9 kali patroli dalam sehari.

Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 9 kali per hari sehingga telah mencapai target tahun 2019.

Patroli rutin pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 yang dilaksanakan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja oleh Regu Praja Wibawa dengan jumlah regu sebanyak 3 regu dan setiap regu melaksanakan patroli sebanyak dua kali dalam setiap kali masuk shift. Dan patroli regu pemadam kebakaran dengan jumlah regu sebanyak 3 regu dan setiap regu melaksanakan patroli sebanyak satu kali dalam setiap masuk shift. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kejadian pelanggaran keindahan dan keamanan Kota dari bencana kebakaran. Sehingga dalam waktu 24 jam anggota Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan patroli sebanyak 9 kali dalam sehari.

8. Petugas Perlindungan Masyarakat

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Petugas Perlindungan Masyarakat ditahun 2019 sebesar 1.387 orang meningkat dari tahun 2018 sebesar 1.300 orang.

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Jumlah Anggota linmas per jumlah 10.000 penduduk pada tahun 2019 sebesar 66,01 dan telah mencapai target RPJMD

Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 1.299 orang sehingga mencapai target tahun 2019.

Hal ini telah mencapai target dikarenakan data yang ada ditahun 2019 cenderung sama dengan tahun 2018 karena tahun 2018 merupakan tahun pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun.

9. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ditahun 2019 sebesar 100% dan ditahun 2018 sebesar 100%.

Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 100% sehingga mencapai target RKT tahun 2019, bahwa pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, dengan ruang lingkup meliputi :

- a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah
- b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum
- c. Prefentif non yustisial
- d. Penindakan yustisial

Pada tahapan Penindakan Yustisi dilakukan penyidikan dan penuntutan ke Pengadilan melalui Korwas PPNS Polres Madiun Kota. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan penegakkan Perda.

10. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Madiun

Dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$$

$$= \frac{1.387 \times 10.000}{210.115} = 66,01$$

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Jumlah Anggota linmas per jumlah 10.000 penduduk pada tahun 2019 sebesar 66,01 dan telah mencapai target RPJMD. Namun tetap perlu diperhatikan untuk regenerasi penambahan anggota melalui pengkaderan Linmas aktif. Kesulitan yang menjadi kendala dalam pengkaderan adalah karena partisipasi pemuda untuk menjadi anggota Linmas masih rendah. Anggota Linmas yang ada sekarang masih cenderung didominasi dengan masyarakat yang berusia diatas 50 tahun. Untuk itu menjadikan tugas kita bersama untuk memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi aktif menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

11. Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban

Untuk tahun 2019 Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban adalah 868 orang peserta. Dengan capaian sama dengan di tahun 2018 sebesar 868.

Sedangkan untuk Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 868 sehingga telah mencapai target RKT tahun 2019.

Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban sangat tinggi. Selain itu juga dengan adanya pemberdayaan dari para pendekar yang ada di Kota Madiun yang bersinergi menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah Kota Madiun. Hal ini terbukti dengan terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan nyaman di masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan selalu mendapat apresiasi dari masyarakat dan keterlibatan tiga pilar dalam rangka mendukung kegiatan ini. Sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat yang semakin kondusif.

12. Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah luas WMK Kota}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran Kota}} \times 100\% \\
 & \frac{30,25 \text{ km}^2}{30,25 \text{ km}^2} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Untuk tahun 2019 Cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2019 sebesar 100% dan sama ditahun 2018 sebesar 100%. Sehingga telah memenuhi target di tahun 2019.

Hal ini dikarenakan wilayah Kota Madiun berpotensi kejadian bencana kebakaran, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 mengalami kemarau yang panjang sehingga itu diperlukan kegiatan patroli dan pelatihan rutin anggota Pemadam Kebakaran serta peningkatan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Pembekalan dan pelatihan pemadam kebakaran dilaksanakan secara rutin dan adanya kegiatan inspeksi penanggulangan kebakaran. Sehingga diharapkan dapat mencegah adanya peristiwa kebakaran. Dan melaksanakan operasi pemadaman kebakaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pemadaman Kebakaran untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya seperti kabupaten penyangga di Kota Madiun seperti Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo sesuai pengaduan peristiwa kebakaran yang masuk di Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di Pemadam Kebakaran. Dengan kontak telpon di nomor 0351 462255 atau kontak person ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya.

13. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajamen Kebakaran (WMK)

Dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yg tertangani dlm tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dlm jangkauan WMK}} \times 100\% = 100\% \\
 & \frac{90 \text{ kali}}{90 \text{ kali}} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Untuk tahun 2019 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 100% sehingga pencapaiannya sama dengan tahun 2018. Dan telah memenuhi target tahun 2019.

Hal ini dikarenakan setiap adanya laporan pengaduan kejadian kebakaran yang dilaporkan oleh masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta baik secara langsung maupun melalui telepon segera ditindaklanjuti oleh Petugas Pemadam Kebakaran dengan langsung kelokasi kebakaran dan melaksanakan Operasi Pemadaman Kebakaran sesuai Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Pemadaman Kebakaran. Dengan misi kemanusiaan anggota Pemadam Kebakaran dengan sigap dan tanggap dalam melaksanakan tugas.

14. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi}}{\text{Jumlah Satgas Damkar}} \times 100\% \\
 & = \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Untuk tahun 2019 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebesar 100% sehingga pencapaiannya lebih besar dari tahun 2018 sebesar 85%. Aparatur ini terdiri dari PNS dan Tenaga Upahan Balakar/ Barisan Relawan Pemadam Kebakaran. Semua anggota sudah memiliki sertipikat standar kualifikasi.

15. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada WMK

Dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah WMK memiliki mobil dan/ atau mesin damkar yg laik pakai}}{\text{Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100\% \\
 & = \frac{9 \text{ buah}}{0,33625 \text{ WMK}} \times 100\% = \text{diatas } 100\%
 \end{aligned}$$

Untuk tahun 2019 Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada WMK sebesar diatas 100% dan capaiannya sama dengan tahun 2018.

Di tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja telah memenuhi sarana dan prasarana. Sehingga jumlah mobil pemadam kebakaran mencapai target 100% dengan jumlah mobil pemadam kebakaran sebanyak 9 (Sembilan) unit.

16. Persentase Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam

Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam telah memenuhi target dalam melakukan penanganan bencana dimana semua kejadian bencana sudah selesai tertangani dengan melibatkan para Relawan Piket Siaga Bencana yang langsung bereaksi cepat tiba di lokasi guna melakukan penanganan bencananya dengan di dukung peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sehingga bisa dipergunakan sesuai peruntukannya untuk misi kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya dengan tangguh.

Berikut data bencana yang sudah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selama Tahun 2019 :

No.	Nama Bencana	Jumlah kejadian	Jumlah yang tertangani	Ket.
1.	Angin Puting Beliung/Angin Kencang	72 kali	72 kali	
2.	Kebakaran	38 kali	38 kali	
3.	Pencarian dan Pertolongan	41 kali	41 kali	
4.	Banjir/Genangan Air	33 kali	33 kali	
5.	Kekeringan	2 kali	2 kali	
6.	Sosial	1 kali	1 kali	

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja** Kota Madiun pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		2 kegiatan pembangunan gedung
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota	1 Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
		2 Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
6	program pemberdayaan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugas	1 Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP
		2 Kegiatan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur
		3 Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur
7	program peningkatan pemberdayaan perlindungan masyarakat	1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		2 Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		3 Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam Memperingati hari-hari Besar Nasional dan Lainnya
		4 Kegiatan Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres
		5 Kegiatan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun
		6 Kegiatan Pelepasan dan Penurunan Alat Peraga Peserta Pilkada, Pileg dan Pilpres
8	program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1 Kegiatan Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		2 Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		3 Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP

No	Program	Kegiatan	
		4	Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengamanan Kegiatan Pemerintah
9	program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1	Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran
		2	Kegiatan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Instansi Pemerintah dan Swasta
		3	Kegiatan Operasi Pemadam Kebakaran
		4	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh **BPBD** Kota Madiun pada Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
		2	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
		3	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana

c. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja** Kota Madiun pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	2.676.797.520,00	2.543.590.634,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.396.797.520,00	2.396.797.520,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	280.000.000,00	280.000.000,00
	Output : Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	30 Kali Kegiatan	53 Kali Kegiatan
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah	661.472.000,00	574.643.739,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	50.000.000,00	49.633.000,00
	Output : Gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	76 BB	76 BB
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	581.472.000,00	495.083.879,00
	Output : Kendaraan Dinas yang dipelihara	33 unit	33 unit
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	30.000.000,00	29.926.860,00
	Output : Jenis sarana dan Prasarana Kantor	6 jenis	6 jenis
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	556.050.000,00	544.641.000,00
1	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	381.050.000,00	370.941.500,00
	Output : Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	95 orang	95 orang
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
2	kegiatan pembangunan gedung	175.000.000,00	173.700.00,00
	Output : Jumlah Pagar dan Tempat Parkir	2 jenis	2 jenis
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99.850.000,00	82.867.540,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	99.850.000,00	82.867.540,00
	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan/Pelaporan	9 dokumen	9 dokumen
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
5	program pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota	354.787.000,00	273.806.925,00
1	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	154.787.000,00	124.320.432,00
	Output : Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	100%	100%
	Outcome : Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	100%	100%
2	Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	200.000.000,00	149.486.493,00
	Output : Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	300 orang	300 orang
	Outcome : Cakupan Penegakan Perda dan PERwal	100%	100%
6	program pemberdayaan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugas	475.391.000,00	422.825.073.00
1	Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP	209.429.000,00	201.554.145,00
	Output : Jumlah Peserta Diklat/ Bimtek yang diikuti	86 orang	39 orang
	Outcome : Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	9 kali	9 kali
2	Kegiatan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	224.962.000,00	194.970.928,00
	Output : Jumlah Peserta HUT Satpol PP se Jawa Timur	500 orang	1.639 orang
	Outcome : Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	9 kali	9 kali
3	Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	41.000.000,00	26.300.000,00
	Output : Jumlah Peserta Jambore Satpol PP	20 orang	16 orang
	Outcome : Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	9 kali	9 kali
7	program peningkatan pemberdayaan perlindungan masyarakat	1.173.652.000,00	1.117.297.495,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	98.395.000,00	94.300.000,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	801 orang	801 orang
	Outcome : Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) Kota	2 orang	1.3 orang
2	Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	376.020.000,00	368.352.180,00
	Output : Jumlah Pos Kamling	825 buah	803 buah
	Outcome : Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang	1.3 orang
3	Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam Memperingati hari-hari Besar Nasional dan Lainnya	110.000.000,00	88.759.473,00
	Output : Jumlah Personil Satlinmas yang ikut dalam upacara Hari-hari Besar Nasional	1.300 orang	555 orang
	Outcome : Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang	1.3 orang
4	Kegiatan Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres	180.000.000,00	163.885.842,00
	Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres	621 orang	1.242 orang
	Outcome : Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang	1.3 orang
5	Kegiatan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun	409.237.000,00	402.000.000,00
	Output : Jumlah TPS Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun	30 lokasi	30 lokasi
	Outcome : Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang	1.3 orang
6	Kegiatan Pelepasan dan Penurunan Alat Peraga Peserta Pilkada, Pileg dan Pilpres	0	0
	Output : Alat peraga peserta Pilkada, Pileg dan Pilpres	0 alat peraga	0 alat peraga
	Outcome : Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang	1.3 orang

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
8	program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1.582.006.000,00	1.273.903.747,00
1	Kegiatan Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	778.315.000,00	537.601.302,00
	Output : Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan	1.420 kasus	3.628 kasus
	Outcome : Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 kali	9 kali
2	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	181.590.000,00	159.310.033,00
	Output : Jumlah peserta rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	390 orang	1.760 orang
	Outcome : Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 kali	9 kali
3	Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP	253.442.000,00	240.644.426,00
	Output : Jumlah Patroli per hari	9 kali	9 kali
	Outcome : Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 kali	9 kali
4	Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengamanan Kegiatan Pemerintah	368.659.000,00	336.347.986,00
	Output : Jumlah Pengamanan	240 kali	944 kali
	Outcome : Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 kali	9 kali
9	program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	751.672.000,00	678.587.986,00
1	Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	198.388.000,00	167.290.169,00
	Output : Jumlah Peserta Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	200 orang	200 orang
	Outcome : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	100%	100%
2	Kegiatan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Instansi Pemerintah dan Swasta	91.859.000,00	77.577.279,00
	Output : Jumlah Lokasi Instansi Pemerintah dan Swasta	12 lokasi	109 lokasi
	Outcome : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	100%	100%
3	Kegiatan Operasi Pemadam Kebakaran	375.470.000,00	365.585.542,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah patroli operasi	24 kali	90 kali
	Outcome : Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rite)	100%	100%
4	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	85.955.000,00	68.134.996,00
	Output : Jumlah Peserta Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran	300 orang	300 orang
	Outcome : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	100%	100%

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh **BPBD** Kota Madiun pada Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	570.200.000	529.255.019
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	430.200.000	390.073.069
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	11 jenis
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	140.000.000	139.181.950
	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 kali	34 kali
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah	223.800.000	200.862.012
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	50.000.000	49.500.000
	Output : Jumlah kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	153.000.000	130.615.141
	Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	5 unit
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	20.800.000	20.746.871
	Output : Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	7 unit	7 unit
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	595.400.000	584.373.270
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	595.400.000	584.373.270

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah sarana prasarana kantor dan perahu karet	1 paket	1 paket
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	13.851.829
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	25.000.000	13.851.829
	Output : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	8 dokumen	8 dokumen
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
5	program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	936.028.000	902.749.023
1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	630.353.000	629.454.558
	Output : Jumlah piket siaga bencana	730 shift	730 shift
	Outcome : Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	100	100
2	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	152.175.000	134.445.271
	Output : Jumlah peserta penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bencana alam	750 orang	750 orang
	Outcome : Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	100	100
3	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	153.500.000	138.849.194
	Output : Jumlah peserta pelatihan SAR	120 orang	120 orang
	Outcome : Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	100	100

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Meningkatnya jumlah penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat data sampai dengan bulan Desember 2019 diantaranya :
 - a. Pelanggaran Reklame (baik Rusak, melanggar dan ijin sudah habis) sebanyak 2. 520 buah.
 - b. Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan jumlah pelanggaran 516 kasus.

- c. Anak jalanan sejumlah 277 orang ; dan
 - d. Anak Bolos Sekolah sejumlah 114 pelajar.
2. Adanya perubahan iklim dengan kemarau panjang yang mengakibatkan intensitas kebakaran tinggi dengan jumlah kasus kebakaran sebanyak 86 kasus kejadian kebakaran.
 3. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dimana semenjak urusan Pemadam Kebakaran bukan lagi menjadi tugas dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang beralih ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdampak berkurangnya personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

Solusi

1. Seiring kemajuan teknologi yang rentan pelanggaran maka langkah-langkah yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diantaranya :
 - a. Dengan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun yang tidak mengizinkan pemasangan reklame secara fisik karena akan diganti dengan videotron, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan patroli kawasan pemasangan reklame di wilayah Kota Madiun. Sehingga pelanggaran reklame dapat diatasi dan diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penertiban.
 - b. Sehubungan dengan implementasi Panca Karya Program Kegiatan Bapak Walikota Madiun, utamanya karya membangun. Banyak kebijakan yang dikeluarkan Bapak Walikota Madiun, diantaranya pembangunan taman dan infrastuktur Kota Madiun. Sehingga perlu penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk ditertibkan dan berjualan di tempat yang telah disediakan. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan jajaran samping untuk penertiban pra yustisi pelanggaran Perda dan Perwal.
-

- c. Untuk mengatasi pelanggaran anak jalanan Satuan Polisi Pamong Praja mengoptimalkan patroli wilayah Kota Madiun utamanya di perempatan trafficlight di wilayah Kota Madiun. Sehingga setiap penertiban anak jalanan diberikan pembinaan dan pengarahan untuk tidak mengamen di lampu merah dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - d. Dengan mengoptimalkan patroli dan jejaring sosial untuk mendapatkan informasi pelanggaran anak sekolah yang bolos sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi penertiban anak sekolah yang bolos sekolah di jam belajar. Dan dilakukan pembinaan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolahan melalui Dinas Pendidikan dan memanggil orang tua pelajar.
 2. Dengan banyaknya kasus kebakaran di Kota Madiun maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemadaman kejadian kebakaran sesuai SOP dan melakukan pencegahan dan pelatihan pemadaman kebakaran.
 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah mengoptimalkan petugas yang ada dan memanfaatkan Relawan sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang direkrut dari warga masyarakat peduli kebencanaan dan kemanusiaan guna melaksanakan Piket Siaga Bencana di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
- e. Penghargaan yang diterima
- Juara Favorit Kebersihan dan Kerapian Tenda Jambore Satpol PP Se Jawa Timur Tahun 2019 di Waduk Selorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.
-

7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun. Sesuai dengan bidang kewenangannya, Dinas Tenaga Kerja memiliki tujuan yang hendak dicapai berdasarkan hasil analisa sesuai bidang kewenangan yang telah ditetapkan sesuai pada koridor Visi dan Misi. Adapun Tujuan yang diambil Dinas Tenaga Kerja dalam mengemban tugas di bidang ketenagakerjaan adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagakerjaan
2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis
3. Meningkatkan nilai PDRB di sektor perindustrian.

Dinas Tenaga Kerja dalam menentukan tujuan tersebut memiliki sasaran yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi dan misi dinas. Adapun sasaran Dinas Tenaga Kerja yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kompetensi dan daya saing ketenagakerjaan
2. Terwujudnya Jaminan Kesejahteraan Ketenagakerjaan
3. Meningkatkan nilai PDRB di sektor perindustrian.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.65
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat						
1.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.85 %	5.08%	4.01%	121,06%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 berdasarkan hasil survey di tingkat kelurahan sebesar 0,81 % dengan jumlah pengangguran sebanyak 1394 orang. Namun Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun adalah sebesar 3,85% dengan jumlah pengangguran sebanyak 3.483 orang, sehingga ada ketidaksinkronan

data Tingkat Pengangguran Terbuka dari hasil survey dengan Data dari BPS Kota Madiun.

Menindaklanjuti Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap LKPJ tahun 2018, maka Pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun.

Tabel III.66
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut kegiatan Agustus
Tahun 2018-2019

Kegiatan	2018	2019
Angkatan Kerja	90.358	94.105
- Bekerja	86.875	90.329
- Pengangguran	3.483	3.776
Bukan Angkatan Kerja	49.932	46.917
- Sekolah	11.526	13.199
- Mengurus Rumah tangga	32708	28.445
- Lainnya	5.698	5.273
Jumlah	140.290	141.022

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun tahun 2019 adalah sebesar 4,01 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 3.776 orang dengan angkatan kerja sebesar 94.105 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,16 % dari TPT tahun 2018 yaitu sebesar 3,85 % atau 3.483 orang, dengan kenaikan jumlah pengangguran sebanyak 293 orang.

Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 0,52 % dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 732 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 3.747 orang, 293 orang diantaranya belum tertampung dalam lapangan kerja dan yang 3.454 orang sudah tertampung (bekerja).

Apabila di bandingkan dengan target TPT tahun 2019 sebesar 5,08 %, realisasi TPT tahun 2019 sebesar 4,01 % maka capaian kinerja adalah sebesar 121,06%. Namun apabila Capaian Kinerja TPT lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target.

Jumlah pengangguran terbuka tahun 2019 sejumlah 3.776 orang tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

No	Kategori	Jumlah
1	Tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan	2.735
2	Tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha	272
3	Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan	171
4	Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja	598

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Memperhatikan data di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka di dominasi oleh mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan. Oleh karena itu diharapkan dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kota Madiun.

Adapun perkembangan capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.67

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun Tahun 2018 -2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
B	Fokus Kesejahteraan Sosial				
4	Tenaga Kerja				
	Rasio Penduduk yang Bekerja	99.1	93.59	96 %	102%
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
7	Tenaga Kerja				
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	100	98	100	102
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	64.4%	85	66.7%	78,47%
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	99.1	79	85,52	108%
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	3.85 %	5.08%	4.01%	79%
7.5	Keselamatan dan perlindungan	13968	1500	15.976	1065
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100	100	100	100

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
B	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
3	Tenaga Kerja				
3.1	Luas wilayah industry	83.22	80	83.22	100 %
D	Fokus Sumber Daya Manusia				
1	Tenaga Kerja				
1.1	Rasio ketergantungan	43.08	44.79	42,69	95%
1.2	Rasio lulusan S1/S2/S3	10.56	9.68	10,26	106%
1.3	Rasio Tenaga Kerja Terdidik terhadap tenaga kerja tidak terdidik	100	91.67	99,88	108%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut,

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja atau adalah perbandingan dari angkatan kerja tertampung (jumlah penduduk yang bekerja) dengan penduduk angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja atau **Tingkat Kesempatan Kerja**.

Apabila dibandingkan dengan hasil survey di tingkat kelurahan tahun 2018, Rasio Penduduk Bekerja atau **Tingkat Kesempatan Kerja** mengalami penurunan dari 99,1% menjadi 96%. Namun Berdasarkan data BPS Kota Madiun Rasio Penduduk Bekerja atau **Tingkat Kesempatan Kerja** tahun 2019 adalah 96%, hal ini adalah sama dengan Rasio Penduduk Bekerja atau **Tingkat Kesempatan Kerja** tahun 2018 sebesar 96%.

Pada tahun 2019 rasio penduduk yang bekerja atau **Tingkat Kesempatan Kerja** di Kota Madiun ditargetkan sebesar 93,59% dan terealisasi sebesar 96 % dengan capaian kinerja 102%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang angkatan kerja ada 96 orang yang bekerja sedangkan sisanya 4 orang adalah pengangguran. Untuk perhitungannya sebagai berikut, angkatan kerja tertampung (bekerja) di Kota Madiun sebanyak 90.329 orang, sedangkan

angkatan kerja sebanyak 94.105 orang, sehingga rasio penduduk yang bekerja atau **Tingkat Kesempatan Kerja** adalah 96%.

Pencapaian kinerja rasio penduduk yang bekerja atau **Tingkat Kesempatan Kerja Tingkat Kesempatan Kerja** sebesar 102%, hal ini disebabkan dengan adanya program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, pelatihan-pelatihan, sehingga kemampuan penduduk usia kerja untuk memperoleh penghasilan keluarga meningkat. Disamping itu, minat masyarakat dalam bekerja di Kota Madiun juga dipengaruhi dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Madiun yang dari tahun ketahun yang mengalami kenaikan.

Tabel III.68
Upah Minimum Kota (UMK) Kota Madiun

TAHUN	UMK
2015	Rp. 1.250.000,00
2016	Rp. 1.394.000,00
2017	Rp. 1.509.005,00
2018	Rp. 1.640.439,34
2019	Rp. 1.954.705,75

II. Aspek Pelayanan Umum

1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai pacasila. Dalam era industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh

dengan pengusaha ditahun 2019 yang terdaftar sejumlah 27 pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100% (27 pengaduan dapat terselesaikan). Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama.

Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja antara tahun 2019 dan 2018 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun jumlah kasus yang diselesaikan ditahun 2019 sebanyak 27 kasus sedangkan ditahun 2018 sebanyak 33 kasus.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Apabila dibandingkan dengan hasil survey di tingkat kelurahan tahun 2018, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 89,89% menjadi 66,7%.

Namun Berdasarkan data BPS Kota Madiun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 adalah 66,73%, sehingga TPAK tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,32% apabila dibandingkan dengan TPAK tahun 2018 yang sebesar 64,41%.

Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 66,73 % dengan capaian kinerja 78,47%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu tahun 2018 sampai dengan 2019 cenderung mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan ketrampilan serta menciptakan wirausaha baru.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Gambaran mengenai penempatan tenaga kerja di Kota Madiun, dapat diuraikan sebagai berikut, dari target 79 % di tahun 2019 terealisasi 85,52%. Untuk menghitung besaran pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara prosentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Dengan perhitungan jumlah pencari kerja yang tahun 2019 ditempatkan sebanyak 721 orang sedangkan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 843 orang. Pencapaian kinerja yang melebihi target ini, karena didukung dengan adanya anggaran di kegiatan yang terealisasi dengan baik dan efisien, serta adanya koordinasi dengan dunia usaha untuk mendorong meningkatnya iklim usaha yang kondusif dan harmonis di Kota Madiun, dimana pada tahun ini terdapat beberapa perusahaan – perusahaan lokal yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mengadakan rekrutmen lowongan kerja yang pelaksanaannya di Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun sehingga dinas dapat memantau serta mendata jumlah penempatan tenaga kerja.

Tabel III.69
Perkembangan Penetapan Tenaga Kerja di Kota Madiun
Tahun 2018 – 2019

No	JENIS PMKS	2018	2019
1	Pencari Kerja yang belum di tempat (Pencaker)	1.060	843
2	Penempatan Tenaga Kerja	1.050	721
	a. Penempatan Pencari Kerja Antar Kerja Lokal (AKL)	698	394
	b. Penempatan Antar Kerja Daerah (AKAD)	151	160
	c. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Antar Negara (AKN)	201	167

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 berdasarkan hasil survey di tingkat kelurahan sebesar 0,81 % dengan jumlah pengangguran sebanyak 1394 orang. Namun Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun adalah sebesar 3,85 % dengan jumlah pengangguran sebanyak 3.483 orang, sehingga ada ketidaksinkronan data Tingkat Pengangguran Terbuka dari hasil survey dengan Data dari BPS Kota Madiun.

Menindaklanjuti Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap LKPJ tahun 2018, maka Pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun.

Tabel III.70
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut kegiatan Agustus
Tahun 2018-2019

Kegiatan	2018	2019
Angkatan Kerja	90.358	94.105
Bekerja	86.875	90.329
Pengangguran	3.483	3.776
Bukan Angkatan Kerja	49.932	46.917
Sekolah	11.526	13.199
Mengurus Rumah tangga	32708	28.445
- Lainnya	5.698	5.273
Jumlah	140.290	141.022

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun tahun 2019 adalah sebesar 4,01 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 3.776 orang dengan angkatan kerja sebesar 94.105 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,16 % dari TPT tahun 2018 yaitu sebesar 3,85 % atau 3.483 orang, dengan kenaikan jumlah pengangguran sebanyak 293 orang.

Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 0,52 % dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 732 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 3.747 orang, 293 orang diantaranya belum tertampung dalam lapangan kerja dan yang 3.454 orang sudah tertampung (bekerja).

Apabila di bandingkan dengan target TPT tahun 2019 sebesar 5,08 %, realisasi TPT tahun 2019 sebesar 4,01 % maka capaian kinerja adalah sebesar 121,06 %. Namun apabila Capaian Kinerja TPT lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target.

5. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja) meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pekerja dilingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.

Dapat disampaikan gambaran pekerja Kota Madiun sampai dengan tahun 2019 terdapat 712 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja seluruhnya 16.821 pekerja dengan jumlah pekerja laki- laki sebanyak 11.132 orang dan 5.689 orang pekerja perempuan. Dari 772 perusahaan yang telah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebanyak 588 perusahaan dimana prosentase perusahaan yang telah menerapkan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja adalah 76,16 %. Sedangkan pekerja telah mematuhi peraturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku dengan menerima jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 15.976 pekerja dan telah melampaui target indikator kinerja pada tahun 2019 sebesar 1.500 pekerja.

Tabel III.71
Jumlah Perusahaan di Kota Madiun
Tahun 2018 dan 2019

Perusahaan	2018	2019
Besar	36	36
Sedang	98	112
Kecil	535	564
Jumlah	669	712

Tabel III.72
Jumlah Pekerja
Tahun 2018 dan 2019

Perusahaan	2018	2019
Laki- laki	10.696	11.132
Wanita	4.599	5.689
Jumlah	15.299	16.821

6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), UU NO 21 tahun 2000, KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus di pahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB).

Meskipun sudah adanya PB yang disepakati anatar pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2019 yang terdaftar sejumlah 27 pengaduan dapat terselesaikan semua.

III. Aspek Daya Saing Daerah

1. Rasio ketergantungan

Penduduk berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun.

Penduduk usia 15 - 64 tahun merupakan penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0 - 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan daya saing yang merupakan indikator perbandingan jumlah penduduk usia dibawah 15 tahun dengan penduduk usia 64 tahun keatas dibanding dengan jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2019 di Kota Madiun ditargetkan sebesar 44,79 % dengan realisasi 42,09 %, dibanding dengan realisasi tahun 2018 sebesar 43,08 % dan mengalami penurunan sebesar 0,9 %. Untuk tahun 2019, rasio ketergantungan dapat dianalisa dengan perhitungan sebagai berikut, jumlah penduduk usia 0 tahun sampai dengan jumlah penduduk usia 14 tahun ditambah jumlah penduduk usia 65 tahun keatas dibanding jumlah penduduk usia 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun dikali seratus. Dimana jumlah penduduk usia 0 tahun sampai usia 4 tahun sebanyak 30.073 orang ditambah jumlah penduduk usia 65 tahun keatas sebanyak 62.859 orang, sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun sebanyak 147.256 orang.

Dari perhitungan diatas terdapat kenaikan, hal ini dikarenakan antara lain keberhasilan angka harapan hidup dan rendahnya angka kematian bayi dan Ibu melahirkan serta keberhasilan taman posyandu.

2. Rasio Kelulusan S1/ S2/ S3

Pekerja lulusan S1/ S2/ S3 yang telah bekerja mengalami penurunan sebesar 0,3 % dari 10,56 % ditahun 2018 turun menjadi 10,26 % ditahun 2019. Hal ini disebabkan adanya persyaratan lowongan kerja (kebutuhan). Untuk rasio kelulusan ini dapat dihitung dengan perhitungan jumlah pencari kerja lulusan S1, S2 dan S3 yang ditempatkan dibanding jumlah keseluruhan pencari kerja yang ditempatkan dikali seratus. Untuk jumlah pencari kerja lulusan S1, S2 dan S3 yang ditempatkan di Kota Madiun sebanyak 74 orang sedangkan jumlah keseluruhan pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 721 orang.

3. Rasio Tenaga Kerja Terdidik terhadap tenaga kerja tidak terdidik

Rasio tenaga kerja yang terdidik terhadap tenaga kerja tidak terdidik dapat tercapai 99,9 % karena adanya peraturan formasi lowongan kerja (peningkatan SDM) yang mengharuskan tenaga kerja memiliki ijazah pendidikan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja
		2	Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Tingkat Nasional
		3	Kegiatan Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)

No	Program	Kegiatan	
		4	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH-CHT)
		5	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
		6	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
		7	Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
		8	kegiatan updating data pengangguran tenaga kerja
		9	kegiatan fasilitas pemberdayaan IKM/IRT oleh dekranasda
		10	kegiatan pengembangan industri kreatif
6	program perlindungan dan pengembangan kelembagaan Ketenagakerjaan	1	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		2	Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		3	Kegiatan Pendataan Wajib Laporan Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma Kerja
		4	Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
		5	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		6	Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit
		7	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pembahasan UMK

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	905.312.460,00	768.351.281
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	675.312.460,00	768.351.281
	Output :Penyediaan peralatan bahan penunjang	6 jenis	6 jenis
	Outcome :Meningkatnya kinerja dinas tenaga kerja	100%	100%
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	230.000.000,00	230.000.000,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output :Jumlah perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat dan staf dinas tenaga kerja	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan
	Outcome : Meningkatnya kinerja dinas tenaga kerja	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah	152.546.000,00	151.533.745
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	90.000.000,00	89.210.000
	Output : Pemeliharaan dan perawatan gedung /lingkungan	2 paket	2 paket
	Outcome : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	40.546.000,00	40.323.745
	Output : Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	3 kegiatan	3 kegiatan
	Outcome : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	22.000.000,00	22.000.000
	Output : Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor	1 paket	1 paket
	Outcome : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	108.400.000,00	106.227.000
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	108.400.000,00	106.227.000
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor	100%	100%
	Outcome : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,00	4.179.284
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	25.000.000,00	4.179.284
	Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen
	Outcome : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
5	program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	2.650.088.840,00	2.433.526.861
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	1.125.718.980,00	1.057.005.999
	Output : Jumlah pendidikan dan pelatihan ketrampilan	615 orang	615 orang
	Outcome : Pencari kerja yang ditempatkan	79%	85,52%
2	Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Tingkat Nasional	252.821.720,00	191.632.124
	Output : Jumlah Kegiatan yang	2 Kegiatan	2 Kegiatan

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	dilaksanakan		
	Outcome : Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	85,52%
3	Kegiatan Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)	60.755.280,00	53.656.147
	Output : Tersedianya dokumen informasi pasar kerja sesuai kebutuhan	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	85,52%
4	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH-CHT)	719.866.500,00	707.503.000
	Output : jumlah pelatihan	235 orang	235 orang
	Outcome : pencari kerja yang ditempatkan	79%	85,52%
5	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan	134.328.960,00	130.770.814
	Output : jumlah wira usaha baru	40 orang	40 orang
	Outcome : pencari kerja yang ditempatkan	79%	85,52%
6	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	63.246.240,00	57.690.057
	Output : Jumlah penyuluhan motivasi kerja	10 lokasi	12 lokasi
	Outcome : Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	85,52%
7	Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	42.810.240,00	32.402.651
	Output : Jumlah Pengiriman tenaga kerja siap pakai	150 orang	150 orang
	Outcome : Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	85,52%
8	kegiatan updating data pengangguran tenaga kerja	250.540.920,00	192.596.069
	Output : tersedianya data ketenagakerjaan dan pengangguran	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	85,52%
6	program perlindungan dan pengembangan kelembagaan Ketenagakerjaan	483.527.540,00	442.736.811
1	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	55.000.000,00	52.899.229
	Output : Jumlah penyelesaian perselisihan	10	27
	Outcome : Prosentase penyelesaian pekerja dengan pengusaha	98%	100%
2	Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan	97.897.000,00	90.982.782

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Jaminan Sosial		
	Output :Jumlah pembinaan HI dan Jamsos	100 perusahaan	100 perusahaan
	Outcome : Presentase pekerja yang mendapat jaminan social	3700	15976
3	Kegiatan Pendataan Wajib Lapor Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma Kerja	47.785.000,00	45.784.930
	Output : Jumlah BIMTEK Norma kerja	100 perusahaan	100 perusahaan
	Outcome :Jumlah keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	3700	15976
4	Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	34.288.440,00	28.125.926
	Output : JUmlah BIMTEK penyedia jasa dan pemborongan	5 perusahaan	50 perusahaan
	Outcome : Jumlah keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	3700	15976
5	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	34.474.800,00	31.383.077
	Output : Jumlah BIMTEK perlindungan	3 kegiatan	3 kegiatan
	Outcome : Jumlah keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	3700	15976
6	Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit	166.407.500,00	148.459.196
	Output : jumlah pembahasan masalah ketenagakerjaan	1 paket	1 paket
	Outcome : Jumlah keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	3700	15976
7	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pembahasan UMK	47.674.800,00	45.101.671
	Output : Jumlah sosialisasi Pengupahan bagi Pengusaha dan Pekerja	1 kali	1 kali
	Outcome : Jumlah keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	3700	15976

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan : Masih banyaknya Jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3.776 orang yang didominasi oleh mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan sejumlah 2.735 orang.

Solusi : Dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan dan kerjasama dengan perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan diharapkan dapat mengurangi pengangguran terbuka di Kota Madiun.

8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RPJMD 2009-2014 yang berkaitan dengan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun menetapkan tujuan dalam rencana strategis yaitu “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian”, dan menetapkan sasaran strategis “meningkatkan kesetersediaan pangan dan stabilnya produksi hasil pertanian dan perikanan”.

Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan” dengan sasaran “meningkatkan ketersediaan pangan”. Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.73
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah
Kota Madiun Tahun 2018-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat						
1	Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	154,48	46,5	154,44	277,8
		PDRB Perkapita	68,94	70,84	74,74	105,5

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun
* (proyeksi)

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio Ketersediaan Pangan Utama

Rasio ketersediaan pangan utama dihitung dari jumlah ketersediaan beras dibagi jumlah penduduk Kota Madiun. Ketersediaan beras menggambarkan jumlah produksi beras domestik dikurangi ekspor ditambah dengan impor/ pasokan dari luar daerah serta stok yang ada dalam setahun. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketersediaan Pangan Utama} = \frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan Pangan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Ketersediaan Beras} &= \text{Produksi Domestik} - \text{Ekspor} + \text{Impor (Pasokan)} \\ &+ \text{Stok} \end{aligned}$$

Data rasio ketersediaan pangan utama Januari sampai Desember 2019 adalah 154,44 kg/kapita yang dihitung dari jumlah ketersediaan pangan utama / beras sebesar 32.450 ton dibagi dengan jumlah penduduk 210.115 jiwa (Dispendukcapil, 2019). Seperti halnya data tahun 2018, rasio ketersediaan pangan tahun 2019 melibatkan data produksi dan data pasokan, tetapi tidak memperhitungkan beras yang dijual keluar wilayah Kota Madiun.

Rasio ketersediaan pangan utama tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 15,7% karena pada tahun 2018 diperhitungkan menggunakan jumlah penduduk dari

data BPS Kota Madiun, sedangkan pada tahun 2018 menggunakan penyeragamam data jumlah penduduk dari Dispendukcapil. Walaupun terjadi perbedaan basis data perhitungan jumlah penduduk, namun capaian rasio ketersediaan pangan utama tahun 2018 masih memenuhi target yang telah ditentukan.

Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan, capaian rasio ketersediaan pangan utama tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Hal ini karena penentuan target rasio ketersediaan pangan hanya memperhitungkan jumlah produksi beras di wilayah Kota Madiun. Sedangkan perhitungan capaian rasio ketersediaan pangan tidak hanya memperhitungkan jumlah produksi beras tetapi juga jumlah pasokan.

Adapun perkembangan indikator kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun dapat dilihat dibawah ini :

Tabel III.74
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
9	Pangan				
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	100
9.2	ketersediaan pangan utama	183.38	46.5	154,44	332,1
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138.61	82	138,63	169

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Regulasi ketahanan pangan

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun.
- b. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 520-401.204/23/2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
- c. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun;
- d. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 188-401.2014/27/2015 tentang Pembentukan Tim Bina Kegiatan Rumah Pangan Lestari;
- e. Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 188-401.113/01/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor 060-401.204/001/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.

2. Ketersediaan pangan utama

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama yaitu 154,44 Kg/kapita/tahun yang diperoleh dari pembagian jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan jumlah penduduk 2019 yaitu 210.115 jiwa. Adapun penurunan ketersediaan ketersediaan

pangan utama dari tahun 2018-2019 sekitar 15,7%, Namun ketersediaan pangan utama Tahun 2019 masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th.

Tabel III.75
Jumlah Ketersediaan Pangan Utama

	2018	2019
Produksi Beras (ton)	11.730	9.754
Pasokan Beras dan Cadangan Pangan (ton)	20.674	22.696
Ketersediaan Beras (ton)	32.404	32.450
Rasio Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/tahun)	154,48	154,44

3. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2019 adalah 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini adalah WNPG X tahun 2012., yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan energi per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (129,42%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%). Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk tahun 2019 mengalami kenaikan 0,01% dari ketersediaan energi dan protein tahun 2018.

Tabel III.76
Ketersediaan Energi dan Protein Kota Madiun

Ketersediaan Per Tahun	2018		2019	
	Ketersediaan Energi Per Kapita	3.106 KKal	129,42%	3.106 Kkal
Ketersediaan Protein Per Kapita	93,10 gram	147,83%	93.14 gram	147,84%
Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	138,61%		138,63%	

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang dilaksanakan pada Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1	Kegiatan Jambore Ketahanan Pangan
		2	Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
		3	Kegiatan Promosi Ketahanan Pangan
		4	Kegiatan Survey Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Pedagang Grosir dan Eceran
		5	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL), Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Karang Kitri
		6	Kegiatan Sosialisasi Konsumsi makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Pemilihan Duta Keamanan Pangan
		7	Kegiatan Survey Pola Pangan Harapan
		8	Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
		9	Kegiatan Lomba Cipta Menu.

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun pada Tahun 2019, sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	905.760.000,00	859.464.304
	1 Kegiatan Jambore Ketahanan Pangan	137.000.000,00	128.016.320
	Output : Jumlah kegiatan jambore dan dokumen laporan	1 kegiatan dan 1 dokumen	1 kegiatan dan 1 dokumen
	Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
	2 Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	90.000.000,00	84.962.440
	Output : Jumlah kegiatan dan dokumen laporan	2 kegiatan dan 2 dokumen	2 kegiatan dan 2 dokumen
	Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
3	Kegiatan Promosi Ketahanan Pangan	152.700.000,00	146.664.800
	Output : Jumlah pameran yang diikuti dan jumlah produk yang dipamerkan	2 kali pameran dan 20 produk	2 kali pameran dan 33 produk
	Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
4	Kegiatan Survey Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Pedagang Grosir dan Eceran	25.000.000,00	19.866.260
	Output : Jumlah dokumen laporan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
5	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL), Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Karang Kitri	75.000.000,00	73.027.000
	Output : Jumlah pelatihan dan pekarangan yang dioptimalkan untuk tanaman pangan	1 kegiatan dan 1 monev	1 kegiatan dan 1 monev
	Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
6	Kegiatan Sosialisasi Konsumsi makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Pemilihan Duta Keamanan Pangan	224.060.000,00	212.409.920
	Output : Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah duta keamanan pangan terpilih	700 siswa sosialisasi dan 70 orang duta keamanan	1000 siswa sosialisasi dan 140 orang duta keamanan
	Outcome : : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
7	Kegiatan Survey Pola Pangan Harapan	23.000.000,00	22.948.700
	Output : Jumlah dokumen laporan SPM	1 dokumen 1	1 dokumen
	Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
8	Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.	31.000.000,00	29.058.080
	Output : Jumlah dokumen dan rakor dewan ketahanan pangan	1 kegiatan workshop dan 1 dokumen	1 kegiatan workshop dan 1 dokumen
	Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
9	Kegiatan Lomba Cipta Menu.	148.000.000,00	142.510.764
	Output : jumlah pelaksanaan lomba dan jumlah peserta yang menjadi juara	2 kali lomba dan 1 kegiatan lomba provinsi	2 kali lomba dan 1 kegiatan lomba provinsi
	Outcome : : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44

d. Permasalahan dan Solusi

1. Semakin terbatasnya lahan untuk pertanian, peternakan dan perikanan sehingga produksi pangan domestik semakin menurun dan hanya mencukupi sepertiga dari konsumsi pangan utama penduduk. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan dari sisi akses dan distribusi pangan melalui kegiatan koordinasi dewan ketahanan pangan, survey harga pangan, serta dari sisi produksi pangan rumah tangga yaitu kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dan karang kitri pada Tahun 2020
2. Masih perlunya ditingkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang dan aman melalui kegiatan sosialisasi B2SA, lomba cipta menu, promosi ketahanan pangan, serta jambore ketahanan pangan dan pemilihan duta keamanan pangan sekolah di tahun 2020. Selain itu perlu dilakukan pemantauan konsumsi pangan masyarakat melalui kegiatan penyusunan neraca bahan makanan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan survey pola pangan harapan pada Tahun 2020.
3. Belum termanfaatnya produk hasil pekarangan sebagai sumber pendapatan keluarga, sehingga perlu dikembangkan pemasaran produk olahan hasil pekarangan melalui kegiatan pameran yang diakomodasi dari Kegiatan Promosi Ketahanan Pangan pada Tahun 2020.

e. Penghargaan yang diterima

Pada Tahun 2019 pada Urusan Pangan selalu mengikuti kegiatan lomba pada Tingkat Provinsi. Namun pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Madiun belum mendapatkan kejuaraan. Diharapkan di Tahun yang akan datang sebagai evaluasi perbaikan bisa mendapatkan penghargaan sesuai yang diharapkan.

9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusuteraan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun. Indikator kinerja sasaran yang utama adalah prosentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.77
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1: Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat						
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82,28	82,5	82,59	100,11
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66	93,8	94,05	100,27

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Nilai indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, untuk tahun 2015 sebesar 81,48, tahun 2016 sebesar 82,43, tahun 2017 sebesar 82,19 sedangkan untuk tahun 2018 sebesar 82,28 dan sebesar 82,59 untuk Tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,95 dan ada peningkatan di tahun berikutnya sebesar 93,44. di tahun 2017 sebesar 93,66, sedangkan 2018 mengalami penurunan menjadi 93,47 tetapi nilai tersebut masih lebih tinggi dari provinsi Jawa Timur yang sebesar 90,77. Dan di tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi 94,05. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil.

Adapun perkembangan indikator kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Madiun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel III.78
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2017 - 2018

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	13.32	12.61	12,78	101,35
8.2	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	86.67	81	86,95	107,35
8.3	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0.02	0.022	0,017	129,41
8.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	89.75	80	93,81	117,26
8.5	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
8.6	Indeks Pemberdayaan Gender	82,28	82,5	82,59	100,11
8.7	Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan Swasta	99,99	93,61	99,73	106,54
8.8	Indeks pembangunan Gender	93,47	93,8	94,05	100,27

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi tahun 2018 sebesar 13,32% sedangkan tahun 2019 sebesar 12,78 %.

% Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

$$= \frac{\text{Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah} = \frac{8.745}{68.430} \times 100\% = 12,78\%$$

2. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

Jumlah partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami kenaikan/peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 realisasi sebesar 86,67 sedangkan tahun 2019 sebesar 86,95.

% Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

$$= \frac{\text{Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah} = \frac{59.503}{68.430} \times 100\% = 86,95\%$$

3. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Realisasi untuk tahun 2019 sebesar 0,017, lebih kecil dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang melapor di pusat pelayanan terpadu pada tahun 2019 lebih sedikit yaitu sebanyak 12 kasus.

4. Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami kenaikan/peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi capaian

tahun 2017 sebesar 88,08% untuk tahun 2018 sebesar 89,75% sedangkan untuk tahun 2019 sampai bulan oktober sebesar 93,81%, dengan perhitungan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding jumlah angkatan kerja perempuan.

$$\begin{aligned} & \% \text{ Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan} \\ & = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\% \text{ Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan} = \frac{68.430}{72.940} \times 100\% = 93,81\%$$

5. Jumlah Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak didata dan ditangani semuanya, sehingga capaiannya 100%.

6. Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender

Nilai indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, untuk tahun 2015 sebesar 81,48%, tahun 2016 sebesar 82,43%, tahun 2017 sebesar 82,19% sedangkan untuk tahun 2018 sebesar 82,28 % dan sebesar 82,59 untuk Tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik.

7. Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan swasta

Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta mengalami penurunan sedikit yaitu sebesar 99,73% dan di tahun 2018 sebesar 99,99%.

% Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta

$$= \frac{\sum \text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah} + \text{Lembaga Swasta}}{\sum \text{Pekerja Perempuan}} \times 100\%$$

$$= \frac{8.745 + 59.503}{68.430} \times 100\% = 99,73\%$$

8. Jumlah Indeks Pembangunan Gender

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,95 dan ada peningkatan di tahun berikutnya sebesar 93,44. di tahun 2017 sebesar 93,66, sedangkan 2018 mengalami penurunan menjadi 93,47 tetapi nilai tersebut masih lebih tinggi dari provinsi Jawa Timur yang sebesar 90,77. Dan di tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi 94,05. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang PPPA di Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun pada kurun waktu tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	
1	program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1	Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK
		2	Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu
		3	Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Perempuan
		4	Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan
		5	kegiatan pemantapan kelembagaan PUG
		6	pembinaan dan pelatihan keluarga TKW/TKI
		7	kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat
2	program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak	1	Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
		2	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu
		3	Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, dan Konvensi Hak Anak
		4	Kegiatan Penyusunan Laporan Standart (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
		5	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak

c. Realisasi program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan PPPA di Dinas Sosial, PP dan PA pada tahun 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	2.085.349.318	1.741.673.122
1	Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	272.326.304	155.147.389
	Output : Jumlah Kelurahan yang mengikuti Evaluasi	7 kelurahan	7 kelurahan
	Outcome : Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	93.61%	99,73%
2	Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	134.950.304	128.914.083
	Output : Jumlah peserta kegiatan hari kesatuan gerak PKK dan Hari ibu	600 peserta	600 peserta
	Outcome : Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	93.61%	99,73%
3	Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Perempuan	287.801.304	236.642.519
	Output : Jumlah kegiatan pelatihan dan pembinaan	6 kali	6 kali
	Outcome : Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	93.61%	99,73%
4	Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan	466.490.228	369.086.803
	Output : Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	38 kali	38 kali
	Outcome : Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	93.61%	99,73%
5	kegiatan pementasan kelembagaan PUG	364.844.316	356.342.534
	Output : Jumlah peserta pelatihan, monitoring dan evaluasi	190 peserta	592 peserta
	Outcome : Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	93.61%	99,73%
7	kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat	558.936.862	495.539.794
	Output : Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba, pencaangan, pembinaan serta pameran	27 kelurahan	27 kelurahan
	Outcome : Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	93.61%	99,73%
2	program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak	980.534.464	955.370.741
1	Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	214.687.400	202.246.272

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah relawan dan Pertemuan	17	17
	Outcome : Prosentase Penanganan KDRT terhadap Perempuan dan Anak	100	100
2	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	121.107.688	116.666.043
	Output : Jumlah peserta sosialisasi	462	462
	Outcome : Prosentase Penanganan KDRT terhadap Perempuan dan Anak	100	100
3	Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, dan Konvensi Hak Anak	75.611.292	68.603.216
	Output : Jumlah peserta kegiatan sosialisasi kesetaraan gender dan hak anak	330	330
	Outcome : Prosentase Penanganan KDRT terhadap Perempuan dan Anak	100	100
4	Kegiatan Penyusunan Laporan Standart (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	21.863.396	21.654.200
	Output : Jumlah Dokumen yang disusun	1	1
	Outcome : Prosentase Penanganan KDRT terhadap Perempuan dan Anak	100	100
5	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	547.264.688	546.201.010
	Output : Jumlah Kegiatan Pengembangan KLA	12	12
	Outcome : Prosentase Penanganan KDRT terhadap Perempuan dan Anak	100	100

d. Penghargaan yang diterima

1. Penghargaan Kota Layak Anak dengan Predikat Madya Tk. Nasional
2. Pembina Forum Anak Terbaik Tk. Kota Tahun 2019
3. Juara 2 Lomba Video Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) Tk. Nasional
4. Juara II tk. Provinsi Lomba Gotong Royong terbaik
5. Juara II tk. Provinsi Lomba 10 Program Pokok PKK

10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan. Pelaksanaan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan di dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 merupakan upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat”**.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan. Pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.79
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
di Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
B	Fokus Kesejahteraan Sosial				
3	Pertanahan				
3.1	Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	27	8	25	313%
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
10	Pertanahan				
10.1	Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan	2	2	2	100%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah ijin lokasi dan ijin penggunaan tanah

Realisasi tahun 2019 ini jumlah rekomendasi ijin lokasi mencapai 2 lokasi dan jumlah rekomendasi IPPT (Ijin Perubahan Penggunaan Tanah) mencapai 23 lokasi sebagaimana dengan rincian sebagai berikut :

NO	PEMOHON	LOKASI IJIN LOKASI	LUAS TANAH
1	ANDY SULAKSONO	Jl. Basuki Rahmad Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun	16.441 m ²
2	LESTARIANTO	Jl. Sidodadi Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun	10.534 m ²
NO	PEMOHON	LOKASI IPPT	LUAS TANAH
1	Drs. SUGENG	Jl. Letkol Suwarno Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun	1.380 m ²
2	AGUNG EKA PURWANA	Jl. Banjar Arum No. 1 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun	2.134 m ²
3	JOKO WIJAYANTO, SE	Jl. Adas Pulosari Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun	2.392 m ² dan 1.158 m ²
4	ANDI SOECIPTO	Jl. Ring Road Barat Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun	2.895 m ²
5	Drs. SUGENG	Jl. Letkol Suwarno Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun	625 m ²
6	SUGIARTI HADISISNANTO	Jl. Pucang Baru Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun	283 m ²
7	LUSCY SAERANG	Jl. Letkol Suwarno Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun	954 m ²
8	SIDIK SUPRAPTO	Jl. Pengging Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun	641 m ²
9	NOR LAILA	Jl. Pilang Widya/ Jl. A.M.D Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun	1.846 m ²
10	Drs. YUNAN ADHANI	Jl. Merak Barat Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun	548 m ²
11	MUHAMMAD IRHAM SAFRONI, ST	Jl. Merak Barat Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun	588 m ²
12	WAHYU WIBOWO DWI HARTANTO	Jl. Merak Barat Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun	709 m ²
13	MOH. FATCHUROHMAN	Jl. Merak Barat Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun	477 m ²
14	AHMAD ATANI	Jl. Merak Barat Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun	665 m ²
15	ANATUL HAULI	Jl. Merak Barat Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun	665 m ²
16	RUPIATI	Jl. Pilang Widya Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun	2.082 m ²
17	AGUS HELIANTO S	Jl. Ring Road Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun	390 m ²
18	AGUS HELIANTO S	Jl. Ring Road Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun	346 m ²
19	AGUS HELIANTO S	Jl. Ring Road Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun	191 m ²

NO	PEMOHON	LOKASI IPPT	LUAS TANAH
20	RAHMAYATI	Blok Sawah Jl. Sri Sedono Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun	1.480 m ²
21	SUHANDOKO	Jl. Sido Makmur Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun	4.736 m ²
22	SUPARMANU	Jl. Tawang Suko Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun	1.020 m ²
23	SUSANTO	Jl. Tawang Suko Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun	1.020 m ²

2. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Terdapat penguasaan tanah secara illegal oleh masyarakat Kota Madiun ditanah milik negara :

1. Tanah Aset Milik BBWS Bengawan Solo di Pinggir Bantaran Sungai Madiun

Berlokasi di Kelurahan Nambangan Lor Gg.Klampok tanah tersebut adalah tanah aset milik BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Bengawan Solo. Diatas tanah/lahan tersebut dihuni sekitar 40 KK penghuni ilegal masyarakat Kota Madiun dan dikhawatirkan berpotensi merusak fungsi dari tanah talud sungai. Atas permasalahan tersebut pada tanggal 21 Juni 2019 telah dilakukan penertiban dilanjutkan kerja bakti pembongkaran bangunan bersama-sama oleh pemilik bangunan/penghuni dengan melibatkan instansi terkait seperti Babinsa, Babinkantibmas,BPBD,Dinas Perkim. Atas pendekatan yang baik antara Babinsakantibmas/ Babinsa warga secara sukarela bersedia meninggalkan rumah yang ditempati sekaligus membongkar. Dari 40 KK hanya 25 KK memutuskan untuk pindah ke rusunawa, sedangkan warga yang lain menolaknya dan memilih untuk mencari hunian sendiri.

2. Tanah Aset Makam Budug

Berlokasi di Kelurahan Nambangan Lor Jl.Sriti Kota Madiun. Aset Tanah Pemerintah Kota Madiun tersebut ditempati secara ilegal bertahun-tahun oleh masyarakat Kota Madiun dan apabila dibiarkan berlarut-larut akan berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik sosial yang sulit untuk diatasi. Atas permasalahan tersebut pada tanggal 21 Juni 2019 telah dilakukan penertiban dilanjutkan kerja bakti pembongkaran bangunan bersama-sama oleh pemilik

bangunan/penghuni dengan melibatkan instansi terkait seperti Babinsa, Babinkantibmas, BPBD, Dinas Perkim. Atas pendekatan yang baik antara Babinsakamtibmas/Babinsa warga secara sukarela bersedia meninggalkan rumah yang ditempati sekaligus membongkar. Dari 14 KK hanya 3 KK memutuskan untuk pindah ke rusunawa, sedangkan warga yang lain menolaknya dan memilih untuk mencari hunian sendiri.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan di Kota Madiun pada tahun 2019 sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi
		2	Kegiatan Rekomendasi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
		3	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
		4	Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Pertanahan

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada tahun 2019 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	119.279.640	52.327.970
1	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi	56.229.640	18.117.150
	Output : Jumlah lokasi	1 lokasi	2 lokasi
	Outcome : Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	8 lokasi	25 lokasi
2	Kegiatan Rekomendasi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	14.025.000	8.700.480
	Output : Jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi
	Outcome : Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	8 lokasi	25 lokasi
3	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	14.025.000	6.183.448
	Output : Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	2	2
	Outcome : Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	8 lokasi	25 lokasi
4	Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Pertanahan	35.000.000	19.326.892
	Output : Jumlah sosialisasi	1 kali	1 kali
	Outcome : Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	8 lokasi	25 lokasi

d. Permasalahan dan Solusi

- Dengan Pelaksanaan Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta didukung oleh kegiatan baik yang bersifat layanan maupun sosialisasi masih terdapat berbagai macam permasalahan terutama konflik pertanahan dan rekomendasi ijin. Terkait permasalahan konflik pertanahan diperlukan pendekatan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik antara pemerintah Kota Madiun dan warganya serta dibutuhkan fasilitasi yang optimal agar tidak terjadi konflik pertanahan secara berkelanjutan. Pada tahun 2019 ini telah dilakukan penertiban dan pembongkaran bangunan illegal di 2 lokasi dan dengan total sekitar 54 KK hanya 28 KK yang bersedia pindah ke Rusunawa dan yang lainnya memilih untuk menempati hunian yang lain.
- Mengingat Kota Madiun adalah Kota yang strategis dalam iklim investasi wilayah Jawa Timur Bagian Barat, terdapat permintaan rekomendasi ijin pertanahan cukup tinggi yakni 25 rekomendasi ijin (2 ijin lokasi dan 23 IPPT). Dengan pemberian 25 rekomendasi ijin tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun mengacu regulasi (Peraturan Walikota Madiun No.9 Tahun 2017 tentang Ijin lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah) agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010 – 2030. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan layanan tersebut demi memberikan kemudahan/kenyamanan bagi investor serta dapat mensejahterakan masyarakat Kota Madiun.

e. Penghargaan yang diterima

Penghargaan yang diterima tingkat provinsi/nasional nihil

11. URUSAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun berdasarkan hasil Analisa dan sesuai dengan bidang kewenangan yang telah ditetapkan pada koridor Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun “Peningkatan Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan berbasis SIAK”. Sedangkan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sesuai misi “Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cepat, tepat dan mudah.”

Dalam tujuan tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut:

- 1) Cepat ialah tepat waktu sesuai yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah
- 2) Tepat ialah data yang diberikan harus benar sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Mudah ialah tidak berbelit-belit selama persyaratan lengkap.

Adapun sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah dengan peningkatan pelayanan melalui inovasi-inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2019 diantaranya:

1. Layanan 3 IN 1

Adalah pelayanan pengurusan dokumen dengan membawa persyaratan lengkap dan datang ke dinas sebelum jam 11.00 WIB, maka 3 dokumen akan langsung jadi.

2. Layanan PECEL ANDOK (Pelayanan Cepat Keliling Administrasi dan Dokumen Kependudukan)
Adalah Pelayanan keliling yang diberikan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang menjangkau kelurahan dan kecamatan se Kota Madiun. Pelayanan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil maupun perekaman biometrik untuk KTP Elektronik.
 3. Layanan LEMPENG GAPIT
Pelayanan LEMPENG GAPIT adalah singkatan dari Layanan sEhari Mengurus dokumen kePENDudukan dan catatan sipil petuGas Antar samPai di Tempat. Pelayanan tersebut merupakan layanan antar dokumen kependudukan sampai ke tempat tinggal penduduk. Hal ini khususnya untuk pengurusan akta kematian dan diupayakan ke depan bisa untuk semua dokumen.
 4. LAYANAN SEMEDI (Sehari Mesti Jadi)
Semua pengurusan dokumen kependudukan dengan persyaratan lengkap dan masuk di pelayanan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebelum jam 11 siang, maka dokumen bisa langsung jadi. Antara lain: KK, KTP, Akta-akta. Sedangkan untuk permohonan baru masuk diatas jam 11.00 WIB, maka dokumen akan jadi pada keesokan harinya.
 5. Layanan Perkawinan bagi Penduduk Non Muslim
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun memfasilitasi pencatatan perkawinan bagi penduduk non muslim. Prosesi pernikahan bisa dilaksanakan di ruangan pernikahan yang sudah disediakan oleh dinas, dengan menghadirkan wali dan saksi dari keduaa mempelai dan pegawai dinas akan membacakan naskah perkawinan.
 6. SILADUSIP
Merupakan Sistem Pelaporan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyajikan data mencakup semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan oleh dinas dengan mengakses website 10.35.77.24:8080/reportsiak/ (intranet)
-

7. DIALOG INTERAKTIF MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Bekerja sama dengan stasiun televisi untuk panyangan Dialog Interaktif dengan menghadirkan narasumber narasumber dan melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam dialog interaktif mengenai administrasi kependudukan.

8. IKLAN KEPENDUDUKAN

Bekerja sama dengan stasiun televisi dan radio untuk penayangan maupun penyiaran terkait dengan informasi administrasi kependudukan.

9. LAYANAN MAPAK BESAN

Mapak Besan adalah singkatan dari Mengurus Akte Perkawinan dan perceraian langsung dapAt Kk dan ktp peruBahan Status Perkawinan. Pelayanan tersebut merupakan layanan yang diberikan Dinas Dukcapil Kota Madiun dalam pencatatan perkawinan dan perceraian bagi penduduk Non Muslim, dimana pemohon setelah mencatatkan perkawinan/perceraian saat itu juga langsung mendapatkan dokumen: Akta Perkawinan/Perceraian, KK dan KTP (sesuai dengan perubahan status)

10. LAYANAN PEPES PINDANG (Pelaporan Penduduk Status Pindah Datang)

Sistem Informasi pelaporan yang diberikan kepada kelurahan untuk mengetahui penduduk yang pindah datang dan keluar Kota Madiun (antar kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi) dengan mengakses website 10.35.77.8080/Sipandang/ (intranet)

11. LAYANAN PEMBURU (Pelayanan Bermutu)

Adalah aplikasi layanan sistem informasi pendaftaran kependudukan secara online untuk semua pelayanan di Dinas Dukcapil Kota Madiun dengan mengakses website pemburu.madiunkota.go.id. Setelah berhasil mengajukan permohonan yang telah dilengkapi persyaratannya dan diverifikasi, maka pemohon akan mendapatkan notifikasi untuk bukti pengambilan dokumen sesuai dengan permohonan di kantor Dinas Dukcapil Kota Madiun.

12. SIMELATI (Sistem Informasi Manajemen Kelahiran dan Kematian)

Aplikasi untuk mengetahui laporan kelahiran dan kematian penduduk. 10.35.77.24:8080/Simelati/ (intranet)

13. GADJAH MADA (Petugas Adminduk Berkunjung ke Rumah, Masyarakat Kota Madiun Bahagia)

Adalah layanan perekaman KTP-el ke rumah-rumah bagi penduduk rentan yang belum rekam KTP el dan mempunyai kendala/halangan tetap, misalnya penduduk usia lanjut atau sakit sehingga tidak bisa bepergian keluar rumah.

14. CINTAILAH ANANDA (Catat dan Informasikan Peristiwa Kelahiran anak Anda Melalui WA)

Adalah layanan laporan kelahiran anak melalui WA dengan disertai foto-foto dokumen persyaratan untuk mengurus akta kelahiran, dimana nantinya dokumen persyaratan secara fisik dibawa ke Dinas untuk ditukarkan dengan akta kelahiran, KIA dan KK baru.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.80
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Kota Madiun Tahun 2018 -2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
12.1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	97.1	98	98,35	100,36
12.2	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	98.44	90	100	111,11
12.3	Rasio pasangan berakte nikah	100	100	100	100
12.4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	99.86	70	100	142,86
12.5	Ketersediaan data base kependudukan skala kota	ada	Ada	ada	100
12.6	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	100	100	100
12.7	Ketersesuaian database Kependudukan Skala Nasional	99.99	100	100	100
12.8	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil di Kota Madiun	99.51	100	100	100
12.9	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Regulasi	98.87	94	99,67	106,03

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan kenaikan dan penurunannya sebagaimana berikut :

1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada tahun 2019 adalah 98,35%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 naik sebesar 1,25%. Data diperoleh dari Jumlah perekaman KTP EL dibanding Jumlah Wajib KTP EL dikalikan seratus persen

$$\text{Cakupan penerbitan KTP EL} = \frac{\text{Jumlah perekaman KTP EL}}{\text{Jumlah wajib KTP EL}} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan penerbitan KTP EL} = \frac{158.762}{161.427} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan penerbitan KTP EL} = 98,35\%$$

2. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran pada tahun 2019 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 naik sebesar 1,56%. Data diperoleh dari Jumlah penerbitan akte kelahiran bayi lahir pada tahun 2019 dibanding Jumlah bayi lahir pada tahun 2019 dikalikan seratus persen.

$$\text{Cakupan penerbitan kutipan AL} = \frac{\text{Jumlah penerbitan AL th 2019}}{\text{Jumlah bayi lahir th 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan penerbitan kutipan AL} = \frac{4156}{4156} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan penerbitan kutipan AL} = 100\%$$

3. Rasio pasangan berakta nikah

Rasio pasangan berakta nikah rata-rata setiap tahun 100%. Pasangan berakte nikah yang dijelaskan adalah pasangan non muslim. Sedangkan data untuk pasangan nikah muslim diperoleh dari Kemenag. Rasio pasangan berakta nikah tahun 2019 adalah 100%, Diperoleh dari Jumlah penerbitan akte nikah pada tahun 2019 dibanding Jumlah pemohon akte nikah pada tahun 2019.

$$\text{Rasio pasangan berakte nikah} = \frac{\text{Jml. pasangan berakta nikah th 2019}}{\text{Jml. pemohon akte nikah th 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio pasangan berakte nikah} = \frac{116}{116} \times 100\%$$

$$\text{Rasio pasangan berakte nikah} = 100\%$$

4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian pada tahun 2019 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 naik sebesar 0,14%. Data diperoleh dari Jumlah penerbitan akte kematian pada tahun 2019 dibanding Jumlah Penduduk meninggal pada tahun 2019 dikalikan seratus persen dikalikan seratus persen.

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian

$$= \frac{\text{Jml. penerbitan kutipan akta kematian th 2019}}{\text{Jml. penduduk meninggal th 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan penerbitan kutipan akta kematian} = \frac{2464}{2464} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan penerbitan kutipan akta kematian} = 100\%$$

5. Ketersediaan database kependudukan skala kota selalu ada setiap tahunnya.

6. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga rata-rata 100% setiap tahun. Untuk tahun 2019 data diperoleh dari Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga dibanding Jumlah Pemohon Kartu Keluarga dibagi seratus persen.

$$\text{Cakupan penerbitan KK} = \frac{\text{Jml. Penerbitan KK th. 2019}}{\text{Jml. Pemohon KK th. 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan penerbitan KK} = \frac{17.503}{17.503} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan penerbitan KK} = 100\%$$

7. Ketersesuaian database Kependudukan Skala Nasional

Ketersesuaian database Kependudukan Skala Nasional pada tahun 2019 sebesar 100%. Ketersesuaian database pada tahun 2019 belum mencapai 100% dikarenakan masih ditemukan data ganda sebanyak 88 data. Adapun rumus penghitungan adalah 100% jumlah penduduk dikurangi data ganda dibanding jumlah penduduk dikalikan 100%.

$$\text{ketersesuaian database} = 100\% - \left(\frac{\text{Jml. data ganda th. 2019}}{\text{Jml. penduduk th. 2019}} \right) \times 100\%$$

$$\text{ketersesuaian database} = 100\% - \left(\frac{88}{210.115} \right) \times 100\%$$

$$\text{ketersesuaian database} = 99,99\%$$

8. Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil di Kota Madiun

Persentase Penerbitan Akt Pencatatan Sipil diperoleh dari rata-rata Cakupan penerbitan akte kelahiran, akte kematian dan akte perkawinan.

$$\%Penerbitan Akta Pencapil Th 2019 = \frac{(\% penerbitan AL + Rasio pasangan berakte nikah + \% penerbitan AK)}{100\%}$$

$$\%Penerbitan Akta Pencapil Th 2019 = \frac{(100\% + 100\% + 100\%)}{100\%}$$

$$\%Penerbitan Akta Pencapil Th 2019 = 100\%$$

9. Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Regulasi.

Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Regulasi diperoleh dari rata-rata cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil:

$$Cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Regulasi = \frac{\%penerbitan KTP + \%penerbitan KK + \%penerbitan AL + \%penerbitan A.Kawin + \%penerbitan AK}{5}$$

$$Cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Regulasi = \frac{98,35\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%}{5} \times 100\%$$

$$Cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Regulasi = 99,67\%$$

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 meningkat sebesar 0,8%.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan rehab gedung dan bangunan
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah

No	Program	Kegiatan	
5	program implementasi sistem informasi administrasi kependudukan	1	Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan data Kependudukan
		2	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) updating dan pemeliharaan
6	program pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil	1	Kegiatan Penataan dan Perawatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil) (DAK)
		3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil)
7	program pelayanan dan penataan administrasi kependudukan	1	Kegiatan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan
		2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan

c. Realisasi Program Kegiatan

Realisasi program kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada **Dispendukcapil Kota Madiun** pada tahun 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	2.774.296.560,00	2.535.528.472,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.374.296.560,00	2.140.793.104,00
	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	16
	Outcome : akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil bernilai baik	BB	BB
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	400.000.000,00	394.735.368,00
	Output : Jumlah perjalanan dinas selama setahun	40	82
	Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil bernilai baik	BB	BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah	366.914.580,00	300.200.417,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	80.000.000,00	79.705.000,00
	Output : Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit
	Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil bernilai baik	BB	BB

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	70.346.000,00	42.970.200,00
	Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	26 unit	26 unit
	Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil bernilai baik	BB	BB
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	216.568.580,00	177.525.217,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	6 jenis	11 jenis
	Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil bernilai baik	BB	BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	655.100.000,00	604.210.984,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	630.100.000,00	579.260.984,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor	7 paket	7 paket
	Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil	BB	BB
2	kegiatan rehab gedung dan bangunan	25.000.000,00	24.950.000,00
	Output : Jumlah gedung yang direhab	1 paket	1 paket
	Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil	BB	BB
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	58.461.120,00	54.777.342,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	58.461.120,00	54.777.342,00
	Output : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen
	Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil	BB	BB
5	program implementasi sistem informasi administrasi kependudukan	503.270.770,00	473.250.492,00
1	Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan data Kependudukan	113.493.720,00	90.320.760,00
	Output : Jumlah sub kegiatan	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan
	Outcome : Tingkat akurasi database kependudukan dan pencatatan sipil	98%	99,99%
2	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) updating dan pemeliharaan	389.777.050,00	382.929.732,00
	Output : Jumlah sub kegiatan	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan
	Outcome : Tingkat akurasi database kependudukan dan pencatatan sipil	98%	99,99%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
6	program pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil	1.653.252.440,00	1.604.594.613,00
1	Kegiatan Penataan dan Perawatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.487.520,00	122.126.000,00
	Output : Jumlah dokumen	13 jenis	13 jenis
	Outcome : Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian	97%	99,99%
2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil) (DAK)	837.511.000,00	820.062.400,00
	Output : Bintek dan Pelatihan	4 kegiatan	4 kegiatan
	Outcome : Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian	97%	100%
3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil)	685.253.920,00	662.406.213,00
	Output : Jumlah dokumen	4 dokumen	4 dokumen
	Outcome : Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian	97%	100%
7	program pelayanan dan penataan administrasi kependudukan	335.897.520,00	295.517.900,00
1	Kegiatan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	154.307.760,00	126.407.221,00
	Output : Jumlah penduduk	27 kelurahan	27 kelurahan
	Outcome : Cakupan penerbitan KK, cakupan penerbitan KTP, Indeks kepuasan masyarakat	97%	99,18%
2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan	181.589.760,00	169.110.769,00
	Output : Jumlah penduduk	3 kecamatan	3 kecamatan
	Outcome : Cakupan penerbitan KK, cakupan penerbitan KTP, Indeks Kepuasan Masyarakat	97%	99,18%

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) belum maksimal.
- 2) Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga banyak perpindahan penduduk yang tidak terdeteksi.

- 3) Integrasi dan pemanfaatan data yang masih tergantung pada koneksi jaringan SIAK Daerah ke pusat dikarenakan semua data harus melalui server pusat, padahal kegiatan pelayanan di Daerah harus tetap dilaksanakan.
- 4) Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya.

Solusi

Solusi permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan inovasi-inovasi di bidang pelayanan sebagai berikut:

1. Publikasi dan pelayanan keliling.
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat kota Madiun mengenai pentingnya kelengkapan dokumen Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil. Sosialisasi dilaksanakan secara rutin baik melalui media pertemuan langsung dengan mengundang RT, RW, wakil kelurahan, tokoh masyarakat, sosialisasi melalui media cetak dan sosialisasi melalui media elektronik
 - b. Layanan Pecel Andok (Pelayanan Cepat Keliling Administrasi dan Dokumen Kependudukan).

Adalah layanan Keliling Dinas Dukcapil melalui mobil keliling yang menjangkau semua kelurahan dan kecamatan se-Kota Madiun. Di layanan Pecel Andok masyarakat bisa mendapatkan layanan kependudukan di hari Sabtu/Minggu, baik pengurusan KK maupun perekaman biometrik untuk KTP-elektronik. Inovasi ini utamanya ditujukan bagi penduduk Kota Madiun yang berdomisili di luar kota dan kembali ke Kota Madiun di akhir pekan.



2. mengadakan pendataan penduduk non permanen melalui RT/RW di masing-masing kelurahan.

3. secara rutin mengadakan koordinasi dengan pusat berkaitan dengan jaringan, aplikasi dan regulasi pelaksanaan pelayanan adminduk dan capil
4. setiap triwulan mengadakan validasi data dengan kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan keakuratan data kependudukan.

e. Penghargaan yang diterima

Nasional

1. Role model penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik tahun 2019.



2. Unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



Provinsi

Top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik provinsi Jawa Timur tahun 2019 kategori Tata Kelola Pemerintahan (LEMPENG GAPIT/ Layanan Sehari Mangurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Petugas Antar Sampai di Tempat).



12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun berkaitan erat dengan misi Walikota yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Misi 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.

Tabel III.81
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Bidang Lingkungan Hidup dalam RPJMD Tahun 2014-2019 terhadap 2019-2024

VISI : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera			VISI : Terwujudnya Kota Madiun yang lebih bersih dan berkelanjutan menuju kelestarian lingkungan		
MISI : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat			MISI : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup		
TUJUAN(3)	SASARAN(2)	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN(3)	SASARAN(2)	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan.	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	-Status mutu air -Status mutu udara -Prosentase penanganan sampah

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.82
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018- 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat						
	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.22	68.51	63,87	93,23%

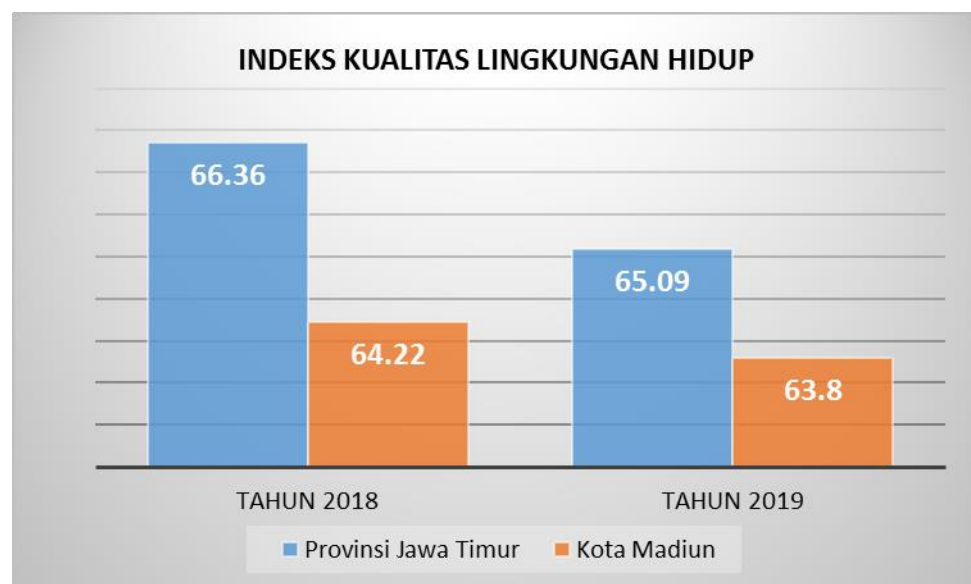
Sumber Data: DLH Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan diatas, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, (2) Kualitas Udara, dan (3) Kualitas Tutupan Lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan.



IKLH Kota Madiun tahun 2019 dengan target yang tidak tercapai dan mengalami penurunan bila dibandingkan IKLH tahun 2018, maka secara otomatis target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) juga dan tidak tercapai. Bila dibandingkan dengan target dan capaian IKLH Provinsi Jawa Timur untuk Kota Madiun masih berada dibawahnya. Penurunan IKLH Kota Madiun dipengaruhi oleh penurunan nilai Indek Kualitas Air (IKA) dan nilai

Indek Kualitas Udara (IKU). Kondisi di Kota Madiun tahun 2019 nilai IKA dan IKU mengalami penurunan sedangkan IKTL mengalami kenaikan.

a. Penurunan IKA

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2019 sebesar 76,70 menurun dibandingkan IKA tahun 2018 sebesar 76,89. Dari data hasil uji laboratorium air sungai selama setahun menunjukkan bahwa beberapa parameter melebihi baku mutu. Penurunan kualitas air dipengaruhi oleh terjadinya kemarau panjang sehingga konsentrasi polutan dalam air sungai tinggi yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai yang dipantau. Selain itu angka parameter total coliform sangat tinggi di atas baku mutu, total coliform merupakan indikasi adanya limbah pembuangan kotoran manusia dan hewan dalam aliran air sungai. Dimana di Kota Madiun belum ada IPLT untuk menampung limbah tinja, sehingga dimungkinkan limbah tinja dibuang ke sungai yang akan mencemari air sungai.

b. Penurunan IKU

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2019 sebesar 84,38 masih berada pada kategori relatif baik meskipun menurun dibandingkan IKU tahun 2018 sebesar 85,50. Namun, secara umum menurunnya curah hujan akibat musim kemarau merupakan penyebab utama penurunan kualitas udara di Kota Madiun. Kemarau panjang menyebabkan tidak ada hujan yang bisa mengurangi pengendapan (pencucian) polutan di udara oleh proses yang dinamakan *rain washing*. Dengan kondisi udara yang stagnan, cuaca cerah, lapisan inversi suhu atau kecepatan angin yang rendah itulah memungkinkan polusi udara tetap berada di udara sehingga mengakibatkan peningkatan konsentrasi polutan yang tinggi. Selain itu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di Wilayah Kota Madiun juga berpotensi meningkatkan emisi gas buang kendaraan bermotor yang dapat mencemari kualitas udara.

c. Peningkatan IKTL

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019 sebesar 38,87 meningkat dibanding tahun 2018 yaitu 38,76. Peningkatan IKTL dipengaruhi adanya penambahan ruang terbuka hijau dari 632,21 Ha menjadi 634,86.

Realisasi tahun 2019 diperoleh dengan rincian sbb:

$$=(\text{Indeks penc. air} \times 30\%) + (\text{Indeks penc. udara} \times 30\%) + (\text{Indeks tutupan lahan} \times 40\%)$$

$$=(30\% \times 76,70) + (30\% \times 84,38) + (40\% \times 38,87)$$

$$= 23,01 + 25,314 + 15,55$$

$$= 63,87$$

Untuk penambahan RTH ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Adapun perkembangan pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.83
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Kota Madiun Tahun 2018- 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
11 Lingkungan Hidup					
11.1	Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah per satuan penduduk	2.896	3	2,96	99
11.2	Prosentase penanganan sampah	93.678	93.7	94,001	100,3
11.3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100	100	100	100
11.4	Prosentase pencemaran (penetapan) status mutu air	100	100	100	100
11.5	Tingkat Pencegahan Pencemaran Air	100	90.81	100	110,1
11.6	Volume Sampah yang Tertangani	111,662.07	106,390.20	119.780,081	112,59
11.7	Prosentase Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Madiun	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
11.8	Prosentase Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber-sumber Air yang berfungsi dengan layak dan baik	100%	100	100	100
11.9	Tingkat Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	100	100	100	100
11.10	Jumlah Industri yang dibina	56	54	56	103
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
B	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
4	Lingkungan Hidup				
4.1	Pencemaran Status Mutu Air	100	100	100	100
4.2	Hasil Penilaian Memenuhi passing Grade yang ditetapkan Tim Penilai Adipura	ya	Ya	Ya	100%
4.3	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	100	100	100	100
4.4	Persentase Masyarakat yang Peduli dan Berbudidaya Lingkungan	100	100	100	100
4.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.22	68.51	63,87	93,23

Sumber Data: DLH Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan diatas, diuraikan sebagaimana berikut :

1. Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah per satuan penduduk

Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah per satuan penduduk, mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi dan target Tahun 2017 dan untuk tahun 2018 realisasinya juga melebihi target yang sudah ditentukan. Adapun perhitungan Rasio TPS per satuan penduduk Tahun 2018 (data sd Des 2018) sebagai berikut :

Daya tampung TPS /tahun : $79 \times 8 \text{ m}^3 \times 12 \text{ bln} \times 30 \text{ hari}$
: $227.520 \text{ m}^3 / \text{thn}$

Daya tampung TPS/hari : $227.520 \text{ m}^3 / 365$
: $623.342 \text{ m}^3 / \text{hari}$

Rasio TPS per satuan penduduk : $\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS} \times 1000}{\text{Jumlah penduduk sd akhir Des}}$
: $\frac{623.342 \text{ m}^3 / \text{hari} \times 1000}{210.115} = 2,96$

Target tidak terpenuhi karena jumlah penduduk bertambah sementara Dinas Lingkungan Hidup tidak menambah jumlah TPS/TPST dan container sehingga target tidak terpenuhi.

2. Prosentase penanganan sampah

Prosentase penanganan sampah untuk realisasi tahun 2019 adalah 94,001% melebihi realisasi tahun 2018 yang 93,68 dan juga melebihi target yang telah ditentukan tahun 2018 yang 93,65%.

Sedangkan berdasarkan data pada akhir Bulan Desember 2018 , Prosentase Penanganan Sampah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume Produksi Sampah}} \times 100\% = \frac{119.970,181}{127.626,508} \times 100\%$$

$$= 94,001\%$$

Sampah rumah tangga di Kota Madiun hampir seluruhnya masuk TPS dan terangkut ke TPA, akan tetapi ada kurang lebih 6 % yang tidak tertangani karena salah satu contohnya diwilayah tersebut belum ada TPS karena penduduknya belum padat, sehingga masyarakat membuang sendiri ke TPA yang kebetulan dekat dengan TPA atau ada yang dipilah sendiri dan ditimbun dan lain lain.

3. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

Rekomendasi amdal yang mengeluarkan adalah provinsi dimana untuk kota Madiun belum bisa mengeluarkan rekomendasi hal ini dikarenakan Kota Madiun belum memiliki tim teknis penyusunan amdal. Adapun perusahaan yang sudah mempunyai rekomendasi amdal adalah :

1. Rejo Agung
2. Pertamina
3. INKA
4. Sun city
5. RS. Soedono
6. Hotel Aston
7. PT Sri Tanaya (PLAZA LAWU)
8. Gedung Perkantoran dan Perkuliahan (UNIV PGRI)

Sehingga pada Tahun 2019 pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Madiun terealisasi 100% dengan rumus :

$$\frac{\text{Perusahaan yang memiliki rekomendasi}}{\text{Seluruh perusahaan yang diawasi}} \times 100\% = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2019 perusahaan yang memiliki rekomendasi mengalami peningkatan begitu pula jumlah perusahaan yang diawasi. Untuk tahun 2018 sebagai berikut :

$$\frac{\text{Perusahaan yang memiliki rekomendasi}}{\text{Seluruh perusahaan yang diawasi}} \times 100\% = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

4. Prosentase pencemaran status mutu air

Pada dasarnya indikator ini adalah menetapkan air badan air yang akhirnya diketahui status mutu airnya. Pada Tahun 2019 jumlah air badan air yang diambil sejumlah 8 titik sampling seluruh kota Madiun. Adapun air badan air yang diambil samplingnya adalah :

1. Sungai Madiun (Ngebrak)
2. Sungai Madiun (Ringroad)
3. Sungai Semawur/jembatan precet
4. Saluran Sono Jl. Tawangrejo
5. Saluran Slarangan jl. Kapt Tendean/ pg Kanigoro
6. Saluran Setia Budi
7. Saluran Wonoasri
8. Saluran Diponegoro

$$= \frac{\text{Jumlah ABA yang diketahui status mutu airnya}}{\text{Jumlah ABA yang dianalisa kualitasnya di Kota Madiun}} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

5. Tingkat Pencegahan Pencemaran Air

kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Kota Madiun mentaati pencegahan pencemaran air.

$$= \frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yg telah mentaati pencemaran air}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yg diawasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Adapun kegiatan usahanya adalah sbb:

1. Hotel Amaris
2. Hotel Fave
3. Hotel Aston

4. Sun hotel
 5. Pabrik tahu Mekar Sari 2
 6. PG Rejo Agung Baru
 7. Pertamina
 8. RS Sogaten
 9. RS Griya Husada
 10. RSI
 11. RS Santa Clara
 12. RS Soedono
 13. RS Paru
 14. RS DKT
 15. RS Aisyah
 16. Matahari Plaza
 17. Lawu Plaza
 18. Giant mall
6. Volume Sampah yang Tertangani
- Volume sampah yang tertangani realisasinya tahun 2019 melebihi target dan juga melebihi realisasi tahun 2018.
- Adapun realisasi 2019 adalah 119.780,081 sedang 2018 adalah 106.390,20. Sampah rumah tangga di Kota Madiun hampir seluruhnya ditangani masuk TPS dan terangkut ke TPA, akan tetapi ada kurang lebih 6 % yang tidak sampai ke TPS/TPA karena salah satu contohnya di wilayah tersebut belum ada TPS karena penduduknya belum padat, sehingga masyarakat membuang sendiri ke TPA yang kebetulan dekat dengan TPA atau ada yang dipilah sendiri dan ditimbun.
7. Prosentase Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Madiun
- Sarana dan prasarana persampahan yang tersedia di Tahun 2019 antara lain terdiri dari pengadaan gerobak sampah dan bin dorong dengan target pengadaan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dengan rumus sbb:
- $$= \frac{\text{Jumlah realisasi pengadaan}}{\text{Jumlah target}} \times 100 \%$$
- $$= \frac{185 \text{ unit}}{185 \text{ unit}} \times 100\%$$
- $$= 100\%$$
-

8. Prosentase Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber-sumber Air yang berfungsi dengan layak dan baik

Untuk sarana dan prasarana Perlindungan Sumber-sumber Air dengan data sd Bulan Desember 2019 terpasang di wilayah Kota Madiun antara lain tersebar di sekolah, Dinas, Kantor Kelurahan, lapangan dan tanah aset Pemkot lainnya, adapun Prosentase Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber-sumber Air yang berfungsi dengan layak dan baik sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Juml.sarpras seluruhnya} - \text{Juml.sarpras yang rusak}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana seluruhnya}} \times 100\% \\
 &= \frac{1002 - 0}{1002} \times 100 \% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

9. Tingkat Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

Hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Kota Madiun mentaati pencegahan pencemaran udara dimana target tahun 2018 adalah 100% dengan realisasi 100%.

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tdak bergerak yg telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara} \\
 &= \frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yg potensial mencemari udara yg telah diinventarisasi}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yg potensial mencemari udara}} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{2} \times 100\% = 100 \%
 \end{aligned}$$

Di Kota Madiun saat ini usaha dan / kegiatan sumber yang potensial mencemari udara dan memenuhi persyaratan administratif administrasi dan tehnis pengendalian pencemaran udara ada 2 antara lain INKA dan Pabrik Gula Rejo Agung.

10. Jumlah Industri yang dibina

Kegiatan usaha/ jumlah industri yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun berjumlah 56 industri antara lain terdiri dari :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Hotel	18
2	Rumah makan	8
3	Industri tahu	3
4	Industri kecap	2
5	INKA	1
6	Rejo agung	1
7	Pertamina	1
8	Rumah sakit	8
9	Klinik	4
10	Puskesmas	6
11	Domestik	4
J U M L A H		56

11. Pencemaran Status Mutu Air

Dalam hal ini kondisi status mutu air di Kota Madiun diketahui status mutu airnya sehingga setiap sungai/saluran mempunyai status mutu airnya dengan target 100% dan terealisasi 100 %.

$$= \frac{\text{Jumlah air badan air yang diketahui status mutu airnya}}{\text{Jumlah badan air yang dianalisa kualitasnya di Kota Madiun}} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

12. Hasil Penilaian Memenuhi passing Grade yang ditetapkan Tim Penilai Adipura

Hasil penilaian memenuhi passing grade yang ditetapkan Tim Penilai Adipura, Indikator ini pada tahun 2019 target ya dan terealisasi ya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan pengelolaan sampah dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tiada lain untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup sehingga diharapkan membawa Kota Madiun meraih penghargaan kota sehat Adipura pada Tahun 2018.

Adapun penghargaan Adipura diraih sebagaimana berikut:

TAHUN	PENGHARGAAN
2009	ADIPURA
2010	ADIPURA
2011	-
2012	ADIPURA
2013	ADIPURA
2014	ADIPURA KENCANA
2015	ADIPURA
2016	ADIPURA KIRANA
2017	ADIPURA
2018	ADIPURA
2019	Belum ada pengumuman

Dengan penerimaan Adipura sejak tahun 2009 tersebut maka dapat dikatakan bahwa Kota Madiun dapat memenuhi passing grade yang ditetapkan kecuali pada tahun 2011.

13. Prosentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Di Kota Madiun pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan dengan upaya menjaga kondisi baik air, udara dan tanah dengan prosentase sbb :

$$\frac{\text{Prosentase pencegahan pencemaran air} + \text{Prosentase pencegahan pencemaran udara} + \text{Prosentase pencegahan pencemaran tanah}}{\text{Jumlah total prosentase}} \times 100 \%$$

$$= \frac{(18/18\% + 2/2\% + 3/3\%)}{300\%} \times 100\%$$

$$= \frac{(100\% + 100\% + 100\%)}{300} \times 100\%$$

$$= 300/300 \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Upaya pengendalian terhadap usaha/ kegiatan penghasil limbah cair dengan pemantauan terhadap usaha/ kegiatan yang secara administrasi mempunyai syarat administrasi teknis antara lain secara administrasi memenuhi dokumen pengelolaan lingkungan dan mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) , alat ukur debit dan saluran pembuangan, kegiatan usaha yang mentaati ada 18 kegiatan usaha.

Upaya pengendalian terhadap usaha/ kegiatan pencegahan pencemaran udara dengan pemantauan terhadap usaha/kegiatan yang memiliki cerobong dengan syarat administrasi memenuhi dokumen pengelolaan lingkungan dan secara teknis ada lubang pengambil sampel, rantai kerja, tangga dan pagar.

Upaya pengendalian pencegahan pencemaran tanah dengan pemantauan terhadap tanah dengan pengujian tanah dengan parameter sesuai PP nomor 150 tahun 2000 di 3 kecamatan.

14. Persentase Masyarakat yang Peduli dan Berbudidaya Lingkungan

Masyarakat yang peduli dan berbudidaya lingkungan adalah adiwiyata dan kelurahan berseri. Untuk tahun 2019 yang dapat Adiwiyata Prov 2 sekolah, Kelurahan berseri 1 (satu) kelurahan tingkat Provinsi , dan

Adiwiyata Nasional 1 (satu) sekolah. Adapun prosentase masyarakat yang peduli dan berbudidaya lingkungan adalah sbb:

$$= \frac{\text{Juml.masy.yang peduli dan berbudidaya lingkungan}}{\text{Target juml.masy.yang peduli dan berbudidaya lingkungan}} \times 100\%$$

$$= 4/4 \times 100\%$$

$$= 100\%$$

15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Realisasi tahun 2019 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan hasil perhitungan sbb:

$$= (\text{Indeks penc. air} \times 30\%) + (\text{Indeks penc. udara} \times 30\%) + (\text{Indeks tutupan lahan} \times 40\%)$$

$$= (30\% \times 76,70) + (30\% \times 84,38) + (40\% \times 38,87)$$

$$= 23,01 + 25,314 + 15,55$$

$$= 63,87$$

IKLH Kota Madiun tahun 2019 dengan target yang tidak tercapai dan mengalami penurunan bila dibandingkan IKLH tahun 2018, maka secara otomatis target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) juga dan tidak tercapai. Penurunan IKLH Kota Madiun dipengaruhi oleh penurunan nilai Indek Kualitas Air (IKA) dan nilai Indek Kualitas Udara (IKU). Kondisi di Kota Madiun tahun 2019 nilai IKA dan IKU mengalami penurunan sedangkan IKTL mengalami kenaikan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di **Dinas Lingkungan Hidup** pada Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan pengadaan pakaian dinas

No	Program	Kegiatan	
			beserta perlengkapannya
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup	1	Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup
		2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)
		3	Kegiatan Peningkatan Edukasi, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Mengenai Izin Lingkungan
		4	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
6	program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru
		2	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup
		3	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Iklim
		4	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penyusunan Laporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
7	program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup	1	Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)
		2	Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan Ekoregion (RPPLH)
		3	Kegiatan Koordinasi Izin TPS B3 dan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair
		4	Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan
8	program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1	Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3
		2	Kegiatan Projasih
		3	Kegiatan Peningkatan TPS
		4	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah
		5	Kegiatan Controlled LandFill TPA Winongo
		6	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengelolaan Persampahan
		7	Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di **Dinas Lingkungan Hidup** Tahun 2019 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1.514.023.000,00	1.194.177.749
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1.348.885.000,00	1.031.255.801
	Output :jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	9 jenis
	Outcome :prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	165.138.000,00	162.921.948
	Output :jumlah perjalanan dinas	38X	135X
	Outcome :prosentase terlaksananya administrasi perkantoran Outcome :	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1.915.354.000,00	1.045.239.865
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	81.000.000,00	75.772.000
	Output :jumlah gedung dan bangunan	3 gedung	3 gedung
	Outcome :Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	100%
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	1.724.354.000,00	895.685.115
	Output :jumlah kendaraan dinas	60 unit	60 unit
	Outcome :Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	100%
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	110.000.000,00	73.782.750
	Output :jumlah sarana dan prasarana kantor	91 unit	91 unit
	Outcome :Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	100%
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	133.900.000,00	118.156.262
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	113.900.000,00	99.842.600
	Output :jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	33 unit	33 unit
	Outcome :prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.000.000,00	18.313.662
	Output :jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	156 orang	159 orang

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.600.000,00	28.455.150
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	30.600.000,00	28.455.150
	Output : jumlah dokumen yang disusun	10 dokumen	12 dokumen
	Outcome : prosentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
5	program peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup	1.039.366.000,00	806.678.660
1	Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	42.000.000,00	34.874.277
	Output : jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	5 pengaduan	7 pengaduan
	Outcome : Prosentase partisipasi kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	86%	100,74%
2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	486.000.000,00	447.097.749
	Output : jumlah kelurahan	2 kelurahan	
	Outcome : Prosentase partisipasi kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	86%	100,74%
3	Kegiatan Peningkatan Edukasi, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Mengenai Izin Lingkungan	173.366.000,00	130.003.445
	Output : jumlah peserta sosialisasi	127 orang	127 orang
	Outcome : Prosentase partisipasi kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	86%	100,74%
4	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	338.000.000,00	194.703.189
	Output : jumlah titik pantau	3 kec	3 kec
	Outcome : Prosentase partisipasi kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	86%	100,74%
6	program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	476.650.000,00	447.380.849
1	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru	50.000.000,00	49.230.244
	Output :	500 kendaraan	1055 kendaraan

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome :	73% dan 79 %	73% dan 79 %
2	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	66.000.000,00	54.001.507
	Output :	1 kali	1 kali
	Outcome :	73% dan 79 %	73% dan 79 %
3	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Iklim	100.000.000,00	96.374.722
	Output :	3 kelurahan	3 kelurahan
	Outcome :	73% dan 79 %	73% dan 79 %
4	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penyusunan Laporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup	260.650.000,00	247.774.376
	Output :	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome :	73% dan 79 %	73% dan 79 %
7	program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup	866.990.000,00	682.611.588
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)	130.845.000,00	97.941.445
	Output : Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Prosentase sarana dan prasarana SDA yang tersedia dan layak	100%	100%
2	Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan Ekoregion (RPPLH)	220.895.000,00	185.281.480
	Output : Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Prosentase sarana dan prasarana SDA yang tersedia dan layak	100%	100%
3	Kegiatan Koordinasi Izin TPS B3 dan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair	74.040.000,00	46.113.216
	Output : Jumlah pelaku usaha yang memasukkan rekomendasi izin TPS B3 dan izin pembuangan limbah cair	5 pemohon	10 pemohon
	Outcome : Prosentase sarana dan prasarana SDA yang tersedia dan layak	100%	100%
4	Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan	441.210.000,00	353.275.447
	Output : jumlah sumur resapan	20 unit	27 unit
	Outcome : Prosentase sarana dan prasarana SDA yang tersedia dan layak	100%	100%
8	program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	6.496.932.000,00	5.329.948.437
1	Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3	30.000.000,00	28.772.005
	Output : jumlah pelaku usaha yang	56 pelaku	60 pelaku

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	mematuhi aturan tentang pengelolaan limbah B3		
	Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
2	Kegiatan Projasih	2.556.000.000,00	2.158.603.103
	Output :jumlah tenaga Projasih	85 orang	85 orang
	Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
3	Kegiatan Peningkatan TPS	458.000.000,00	389.455.580
	Output :jumlah TPS yang dibangun/rehab	7 lokasi	7 lokasi
	Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
4	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah	227.932.000,00	153.918.163
	Output :jumlah mesin pengolah sampah yang beroperasi	9 unit	9 unit
	Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
5	Kegiatan Controlled LandFill TPA Winongo	2.075.000.000,00	1.592.271.866
	Output :jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi
	Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
6	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengelolaan Persampahan	650.000.000,00	564.785.300
	Output :jumlah pengadaan sarpras operasional persampahan	2 jenis/unit	2 jenis/unit
	Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
7	Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo	500.000.000,00	442.142.420
	Output :jumlah lokasi pemeliharaan dan penambahan fasilitas TPA Winongo	1 lokasi	1 lokasi
	Outcome :prosentase penurunan volume samoah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Meningkatnya pencemaran baik tanah, air maupun udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah industri dan/atau usaha lainnya;

2. Meningkatnya volume harian sampah sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi dimasyarakat (pendatang musiman), industri/ kegiatan usaha ,dll;
3. Kurang optimalnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan sehingga terjadi pencemaran baik air dan udara;
4. Adanya usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan wajib usaha;
5. Adanya badan usaha/instansi yang belum memenuhi mengelola limbah B3 sesuai prosedur

Solusi

- Dengan makin banyaknya industri maka Dinas Lingkungan Hidup harus lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap industri-industri tersebut mulai dari awal pendirian sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan ;
 - Sarana dan prasarana sudah banyak di penuhi dan meningkatnya volume sampah dapat ditekan karena banyak berdiri bank-bank sampah baik yang sudah berbadan hukum atau belum, dengan sarana prasarana yang tersedia kinerja meningkat, kerjasama yang baik dengan satgas kebersihan yang masuk ke TPS serta pekerja profesional di TPA yang memilah sampah. Sehingga sampah dari tahun ke tahun yang masuk ke TPA di Winongo dapat di tekan;
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan/pelestarian lingkungan hidup maka Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi dan pendekatan serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, Dinas terkait dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan yang terbaik berkenaan dengan lingkungan hidup Kota Madiun agar semakin baik dan sehat
 - Menghadapi permasalahan adanya badan usaha/instansi yang belum mempunyai dokumen lingkungan maka ditingkatkan sosialisasi , pembinaan dan pengawasan serta pendekatan kepada pelaku usaha agar segera memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai prosedur yang berlaku.
 - Adanya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan limbah B3. Tahun 2018
-

sudah banyak yang melakukan koordinasi pada DLH tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga akan lebih intensif melakukan pembinaan ,sosialisasi dan pemantauan

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas terkait.

e. Penghargaan yang diterima

No.	Hasil Penilaian/Evaluasi, Program/Sertifikat Penghargaan	Tahun perolehan	Keterangan
1.	Adiwiyata Provinsi (2 kelurahan)	2019	Tk. Provinsi
2	Adiwiyata Nasional	2019	Tk. Nasional
3	Kelurahan Berseri(Madya) Kel. Taman	2019	Tk.Provinsi
4	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	2019	Tk. Provinsi

13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Tujuan dan Sasaran

Orientasi pembangunan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan sasaran meningkatkan kualitas pencegahan, pemberantasan, dan penanganan penyakit melalui peningkatan kualitas penanganan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Kesehatan Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.84
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
di Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
13.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,91	1,95	1,94	100,5
13.2	Rasio akseptor KB	13,66	11,8	14,08	119,32
13.3	Cakupan peserta KB aktif	77,2	76	78,8	103,68
13.4	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	13,22	15	11,80	121,33
13.5	Cakupan Peserta KB Baru	3,599	3,710	3.866	104,2

Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per Keluarga merupakan indikator yang hasilnya melalui perhitungan dari BPS. Pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan dan KB bekerjasama dengan tenaga ahli melakukan perhitungan mandiri dan didapatkan rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2018 sebesar 1,94. Terjadi penurunan rata rata jumlah

anak yang dilahirkan oleh seorang ibu selama masa reproduksinya dikarenakan meningkatnya capaian penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dari 42,7% (2018) menjadi 43,6% (2019).

2. Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB)

Rasio Akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB dibandingkan dengan jumlah PUS dikalikan 100%, jumlah akseptor KB sebesar 3.866 dengan jumlah PUS sebesar 27.452 dan didapatkan hasil sebesar 14,08%. Capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar 13,66 dikarenakan penguatan program layanan KB Pasca Persalinan 48 jam di Kota Madiun.

3. Cakupan peserta Keluarga Berencana Aktif

Cakupan peserta Keluarga Berencana Aktif di Tahun 2019 sebesar 78,8% merupakan perbandingan antara peserta KB Aktif sebesar 21.633 dengan jumlah pasangan usia subur sebesar 27.452. Capaian tersebut sudah mencapai target 2019, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian di Tahun 2018 dikarenakan peningkatan upaya penyuluhan ke masyarakat melalui Safari KB, kegiatan momentum, peningkatan program KB PP serta reward bagi akseptor MKJP dan kontap.

4. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

Capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 11,80%. Merupakan perhitungan prosentase perbandingan jumlah keluarga pra KS dan Sejahtera 1 sebesar 6.203 dengan jumlah keluarga sebanyak 52.586. Cakupan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian di Tahun 2018 dikarenakan telah dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan pendapatan melalui pelatihan keterampilan (memasak, membuat kue, merajut,dll) yang sasarannya diperuntukkan untuk kelompok PS dan KS1.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target Tahun 2019 adalah:

1. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS.
 2. Memberikan pelatihan ketrampilan serta pendidikan pada kelompok pra sejahtera untuk dipergunakan sebagai bekal untuk menghasilkan nilai tambah di keluarga.
-

5. Cakupan Peserta Keluarga Berencana Baru

Cakupan peserta keluarga berencana baru Tahun 2019 sebesar 3.866 peserta. Jika dibandingkan dengan cakupan peserta di Tahun 2018 sebesar 3.599 peserta mengalami peningkatan dan sudah memenuhi target 2019 yaitu sebanyak 3.710 peserta. Kenaikan peserta KB Baru dikarenakan adanya penguatan program KBPP, Universal Health Coverage, reward kader penemu akseptor KB, reward bagi Akseptor MKJP dan monev cakupan KB per kelurahan dilakukan secara rutin.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	
1	program keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	1	Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera
		2	Kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga Berencana
		3	Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling
		4	Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi
		5	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tribina
		6	kegiatan bantuan operasional keluarga berencana (KB) (DAK)
		7	kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan keluarga berencana (DAK)

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	2,698,892,200.00	2,103,597,509.00
	1 Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	318,495,000.00	287,420,604.00
	Output : Persentase keluarga Tribina yang ber-KB	75%	80%
	Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)

No.	Uraian	Target	Realisasi
2	Kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga Berencana	282,610,000.00	212,673,981.00
	Output : Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan setiap tahun	100%	100%
	Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)
3	Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling	424,921,000.00	347,098,382.00
	Output : Persentase peserta KB baru MKJP	39.15%	47.16%
	Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)
4	Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi	320,920,000.00	252,423,071.00
	Output : Persentase PUS yang istrinya < 20 tahun	≤ 3,5%	0.17%
	Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)
5	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tribina	324,979,200.00	282,764,308.00
	Output : Jumlah kejuaraan yang diperoleh	4 juara	4 juara
	Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)
6	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK)	725,243,000.00	449,695,623.00
	Output : Jumlah Balai Keluarga Berencana memperoleh bantuan operasional	3 balai	3 balai
	Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)
7	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)	301,724,000.00	271,521,540.00
	Output : Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan KB yang diadakan	5 jenis	3 jenis
	Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Pada program ini ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena:

1. Adanya kegiatan yang tergantung dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi yaitu Kegiatan Pramuka Saka Kencana (Pertida dan Pertinas), Lomba Tribina Tingkat Provinsi dan Lomba UPPKS Tingkat

Provinsi. Pada Tahun 2019 di tingkat provinsi tidak melaksanakan kegiatan tersebut sehingga di Kota Madiun juga tidak melaksanakan.

2. Adanya honor kader dalam pemberian KIE di Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK) tidak terserap karena sudah dimasukkan anggaran ke poin reward kader kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat.
3. Adanya petunjuk teknis pemakaian dana BOKB (DAK) yang tidak fleksible sesuai dengan kebutuhan Kota Madiun yaitu menu kegiatan sudah ditentukan oleh BKKBN Pusat sehingga tidak dapat terserap dengan maksimal.

Solusi:

1. Berkoodinasi dengan Provinsi terkait penyelenggaraan kegiatan sehingga kegiatan yang dianggarkan bisa selaras.
 2. Mengusulkan petunjuk teknis yang lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan Kota Madiun ke BKKBN Provinsi dan Pusat.
-

14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

a. Tujuan dan Sasaran

Uraian mengenai tujuan dan sasaran RPJMD 2014-2019 yang berkaitan dengan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran masing-masing, inovasi serta strategi kebijakan.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Perhubungan Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.85
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat						
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	1,61%	1,50%	1,64%	109%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan

Persentase penurunan angka kecelakaan mengalami peningkatan dari target 1.50% menjadi 1.64% yang berarti capaian kinerjanya adalah 109%. dalam peningkatan kinerja dibanding dari realisasi tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari 1.61 % menjadi 1.64%. persentase ini didapat dari data kecelakaan yaitu berturut-turut dari tahun 2018 dan 2019 yaitu 244 dan 240 kejadian kecelakaan. Dengan rumus :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{Jml\ Laka\ Th.\ 2018 - Jml\ Laka\ Th.\ 2019}{Jml\ Laka\ Th.\ 2018} \\ \% &= \frac{244 - 240}{244} \\ &= 1,64\ \% \end{aligned}$$

Adapun untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.86
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
14 Perhubungan					
14.1	Jumlah arus penumpang angkutan	6,457,890	5,824,523	6.460.900	111%
14.2	Rasio ijin trayek	0.000996	0.0004	0.00085	213%
14.3	Jumlah uji kir angkutan umum	8682	6,218	6.449	104%
14.4	Jumlah terminal	2	2	2	100%
14.5	Angkutan darat	559	230	549	239%
14.6	Kepemilikan kir angkutan umum	8682	4,805	6,449	134%
14.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum	30 menit	30 menit	30 menit	100%
14.8	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	95%	100%	104%	104%
14.9	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	#1=65.000	#1=30.000	#1=65.000	217%
		#2=70.000	#2=35.000	#2=70.000	200%
		#3=80.000	#3=45.000	#3=80.000	178%
		#4=85.000	#4=50.000	#4=85.000	170%
14.10	Angka Kecelakaan Sarana Transportasi Angkutan Darat	244	231	240	96%
14.11	Jumlah Pengendara Kendaraan yang memiliki Surat Ijin Mengemudi	28,041	22,100	28,056	127%
14.12	Prosentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	91	88	100	114%
14.13	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	78.08	80	85,08	106%
14.14	Jumlah Kendaraan yang lulus uji (KIR)	8,682	6,219	6.449	104%
14.15	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	1.61	1.5	1.64	109%
III ASPEK DAYA SAING DAERAH					
B Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
1 Perhubungan					
1.1	Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum	6.770.650 org/13.020 ton	5.824.523 org/13.018	6.460.900 org/13.030 ton	116%
1.2	Jumlah Orang/barang melalui terminal per tahun	6.770.650 org/13.020 ton	5.824.523 org/13.018	6.460.900 org/13.030 ton	116%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun

Penjelasan untuk masing – masing indikator kinerja pada tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah arus penumpang angkutan

Jumlah penumpang angkutan umum telah mencapai target pada tahun 2019, dimana target pada tahun 2019 sebanyak 5,824,523 dan terrealisasi sebanyak 6.460.900. jumlah ini diperoleh dari data penumpang angkutan umum yang melalui terminal Purbaya Madiun baik itu Bus Besar, angkutan kota dan taksi.

2. Rasio ijin trayek

Rasio ijin trayek di Kota Madiun pada tahun 2019 telah mencapai target yaitu target rasio ijin trayek sebesar 0.0004 dan terrealisasi sebesar 0.00085. angka ini diperoleh dari :

Jumlah pengusaha transportasi yang melakukan rekomendasi Ijin trayek di dinas perhubungan tahun 2019 sejumlah 179 dan jumlah penduduk kota Madiun 210.115 jiwa.

$$\text{Rasio Ijin Trayek} = \frac{\text{Jumlah Ijin Angkutan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ijin Trayek} &= \frac{179}{210.115} \\ &= 0.00085 \end{aligned}$$

Adapun rincian perijinan angkutan adalah sebagai berikut :

a. Angkutan Kota	:	32 unit
b. Taxi Bima	:	8 unit
c. Taxi Rajawali	:	16 unit
d. PT. Maju Muda Mandiri	:	99 unit
e. Travel Citra	:	0 unit
f. Taxi Primkopangda	:	24 unit

3. Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah uji kir angkutan umum telah mencapai target 100%. Target tahun 2019 sebanyak 6,218 kendaraan dan terrealisasi sebanyak 6.449 kendaraan.

4. Jumlah terminal

Target jumlah terminal tahun 2019 adalah 2 unit dan realisasi tahun 2019 sebanyak 2 unit. Adapun terminal ini adalah Terminal tipe C Manisrejo dan Terminal tipe C Mayjen Sungkono.

5. Angkutan darat

Target angkutan darat pada tahun 2019 adalah 230 kendaraan dan mencapai realisasi sebesar 549 kendaraan, hal ini berarti telah tercapai 100%. Adapun rincian angkutan darat di Kota Madiun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Angkutan Kota	:	32 unit
b. Taxi Bima	:	8 unit
c. Taxi Rajawali	:	16 unit
d. PT. Maju Muda Mandiri	:	99 unit
e. Travel Citra	:	0 unit
f. Taxi Primkopangda	:	24 unit
g. Angkutan Online (Go-Car)	:	370 unit

6. Kepemilikan kir angkutan umum

Jumlah kepemilikan kir angkutan umum telah mencapai target 100%. Target tahun 2019 sebanyak 4,805 kendaraan dan terrealisasi sebanyak 6.449 kendaraan.

7. Lama pengujian kelayakan angkutan umum

Dalam pengurusan pengujian kelayakan angkutan umum, telah ditetapkan standart pelayanan dengan jangka waktu proses pengujian kendaraan bermotor untuk 1 unit kendaraan memerlukan waktu tahun 30 menit. Dengan target tahun 2019 selama 30 menit berarti untuk lama pengujian kelayakan angkutan umum telah mencapai 100%.

8. Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu

Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2019 tercapai realisasi 104 %, sedangkan target tahun 2019 adalah 100%. Adapun realisasi ini diperoleh dari :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah rambu yang terpasang tahun 2019}}{\text{Jumlah Kebutuhan Rambu}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{2245}{2163} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 104 \%$$

Tercapainya realisasi pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai 104% melebihi kebutuhan yang telah direncanakan dikarenakan adanya beberapa lokasi atau objek baru yang sangat dinamis seperti pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, dll yang membutuhkan pemasangan rambu baru diluar kebutuhan yang telah direncanakan.

9. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Penerapan biaya pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Madiun disesuaikan berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

- a. Untuk pelayanan 1 (satu) kali uji berkala setiap 6 bulan ditetapkan sebagai berikut :

No	JBB Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Biaya (Rp)		
			Biaya (Rp)	Jumlah
1	JBB sampai dengan 3.500 kg	5.000,-	Pendaftaran	30.000,-
2	JBB lebih dari 3.500 kg s/d 8.750 kg	5.000,-	30.000,-	35.000,-
3	JBB lebih dari 8.750 kg s/d 16.200 kg	5.000,-	40.000,-	45.000,-
4	JBB lebih dari 16.200 kg	5.000,-	45.000,-	50.000,-

Penjelasan Biaya Pengujian kelayakan Angkutan Umum Tahun 2018

No	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	Jumlah Biaya JBB Kendaraan Wajib uji (Rp)	Biaya semprot (Rp)	Biaya Plat Uji (Rp)
1.	A=Rp.65.000,-	30.000,-	15.000,-	20.000,-
2.	B=Rp.70.000,-	35.000,-	15.000,-	20.000,-
3.	C=Rp.80.000,-	45.000,-	15.000,-	20.000,-
4.	D=Rp.85.000,-	50.000,-	15.000,-	20.000,-

Untuk tanda bukti lulus uji berkala sekali penggantian :

No	Jenis Tanda Lulus Uji	Biaya Penggantian (Rp)		
		Rusak/ Pembaharuan	Hilang	Habis Masa Berlakunya
1	Buku Uji Penuh/ Rusak	30.000,-	75.000,-	20.000,-
2	Tanda Uji Rusak	25.000,-	60.000,-	20.000,-
3	Tanda Samping	20.000,-		25.000,-

- b. Rekomendasi penumpang uji dan sanksi :

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Rekomendasi mutasi dan numpang uji keluar daerah	50.000,-
2	Keterlambatan uji berkala setiap bulan	25.000,-
3	Tidak datang tepat pada waktunya pada waktu yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah	15.000,-
4	Perubahan fungsi kendaraan	50.000,-

10. Angka Kecelakaan Sarana Transportasi Angkutan Darat

Angka kecelakaan transportasi darat pada tahun 2019 adalah sebanyak 240 kejadian. Untuk target 2018 yaitu 231 kejadian. Data kecelakaan ini dihitung oleh semua jenis kendaraan yang terlibat mulai kendaraan pribadi dan kendaraan umum.

11. Jumlah Pengendara Kendaraan yang memiliki Surat Ijin Mengemudi

Untuk jumlah kepemilikan SIM pada tahun 2019 adalah 28.056, sedangkan target tahun 2018 adalah 22.100. sehingga untuk capaian jumlah pengendara yang memiliki SIM telah mencapai 100%.

12. Prosentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik

Rasio sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik pada tahun 2018 adalah 91 %, sedangkan target pada tahun 2018 adalah 80 %. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	2018			2019		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	TRAFFIC LIGHT	29	27	93%	29	29	100%
2	HALTE	11	10	91%	11	11	100%
3	CCTV	10	9	90%	10	10	100%
JUMLAH		50	46	91%	50	50	100%

Adapun perhitungan persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah sarfas LLAJ tahun 2019}}{\text{Total Sarana dan Fasilitas LLAJ}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{50}{50} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 100 \%$$

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2017 tercapai 89% dan meningkat pada tahun 2018 mencapai 91%.

13. IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas

IKM (Indek kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas tahun 2019 target 80 dan terealisasi 85,08.

14. Jumlah Kendaraan yang lulus uji (KIR)

Jumlah kepemilikan kir angkutan umum telah mencapai target 100%. Target tahun 2019 sebanyak 6.219 kendaraan dan terrealisasi sebanyak 6.449 kendaraan.

15. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan

Persentase penurunan angka kecelakaan mengalami peningkatan dari target 1,50% menjadi 1,64% yang berarti capaian kinerjanya adalah 109%. dalam peningkatan kinerja dibanding dari realisasi tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari 1,61 % menjadi 1,64%. persentase ini didapat dari data kecelakaan yaitu berturut-turut dari tahun 2018 dan 2019 yaitu 244 dan 240 kejadian kecelakaan. Dengan rumus :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{Jml\ Laka\ Th.\ 2018 - Jml\ Laka\ Th.\ 2019}{Jml\ Laka\ Th.\ 2018} \\ \% &= \frac{244 - 240}{244} \\ &= 1,64\ \% \end{aligned}$$

16. Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum

17. Jumlah Orang/barang melalui terminal per tahun

Jumlah orang/barang melalui terminal pada tahun 2019 terrealisasi sebanyak 6.460.900 orang/13.030 ton, sedangkan target pada tahun 2019 adalah 5.824.523 org/ 13.018 ton. Sehingga capaiannya sebesar 100% dari target.

Adapun hasil ini sama seperti realisasi pada jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum karena Kota Madiun memiliki Terminal Tipe A, sehingga untuk semua BUS yang melewati dan/atau memasuki Kota Madiun diwajibkan memasuki terminal terlebih dahulu. Sedangkan untuk angkutan barang dapat didata melalui Ex terminal cargo Kota Madiun.

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun pada tahun 2019 adalah :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1	Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Lalu Lintas
		2	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
		3	Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Jalan
		4	Kegiatan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
		5	Kegiatan Operasi Penertiban Pembatas Kecepatan
		6	Kegiatan Survey Kinerja Ruas Jalan
6	program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	1	Kegiatan Penyusunan Database Perhubungan Darat
		2	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		3	Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan SIM LLAJ
7	program peningkatan pelayanan angkutan	1	Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalin dan Angkutan
		2	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
		3	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
		4	Kegiatan Pembinaan Keselamatan LLAJ
		5	Kegiatan Penyelenggaraan Balik Gratis Angkutan Lebaran
		6	Kegiatan Pemilihan dan Pemberiaan

No	Program	Kegiatan
		Penghargaan Pemuda Pelopor
		7 Kegiatan Pengamanan Insidentil Terpadu
		8 Kegiatan Pelatihan/Pembinaan SDM Perhubungan
		9 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha (WTN)
		10 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan
		11 Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Umum Sekolah Gratis
		12 Kegiatan Pengelolaan Operasional UPTD Pengujian kendaraan bermotor
		13 kegiatan pengelolaan operasional tempat parkir khusus
		14 kegiatan akreditasi PKB

c. Realisasi program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang direalisasi Oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun pada tahun 2019 adalah :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	3.191.174.000,00	2.947.985.195
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.961.174.000,00	2.717.986.312
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket
	Outcome : akuntabilitas kinerja dinas perhubungan	BB	BB
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	230.000.000,00	229.998.883
	Output : jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	137 kali	137 kali
	Outcome : Akuntabilitas kinerja perhubungan	BB	BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1.642.440.000,00	1.408.919.146
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	948.000.000,00	946.386.450
	Output : jumlah gedung	2 unit	2 unit
	Outcome : akuntabilitas kinerja perhubungan	BB	BB
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	624.940.000,00	393.661.704
	Output : jumlah kendaraan dinas	46 unit	46 unit
	Outcome : akuntabilitas kinerja perhubungan	BB	BB
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	69.500.000,00	68.870.992

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : jumlah sarpras kantor	136 kali	136 kali
	Outcome : akuntabilitas kinerja dinas perhubungan	BB	BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.960.130.000,00	1.933.591.858
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	1.766.405.000,00	1.747.958.000
	Output : jumlah sarana dan prasarana kantor	16 unit	16 unit
	Outcome : akuntabilitas kinerja perhubungan	BB	BB
2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	193.725.000,00	185.633.858
	Output : jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	711 buah	711 buah
	Outcome : akuntabilitas kinerja perhubungan	BB	BB
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	88.990.000,00	88.009.680
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	88.990.000,00	88.009.680
	Output : jumlah dokumen	19 Dok	19 Dok
	Outcome : akuntabilitas kinerja perhubungan	BB	BB
5	program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	3.191.761.000,00	3.049.133.929
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Lalu Lintas	2.072.852.000,00	1.972.928.000
	Output : Jumlah perlengkapan lalu lintas yang dipasang	1224 buah	1224 buah
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
2	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	768.593.000,00	735.520.000
	Output : Jumlah marka jalan	1450 m	1450 m
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
3	Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Jalan	14.616.000,00	14.435.929
	Output : Jumlah data	1 dok	1 dok
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
4	Kegiatan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	106.000.000,00	98.900.000
	Output : Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	12 alat	12 alat
	Outcome : persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
5	Kegiatan Operasi Penertiban Pembatas Kecepatan	181.700.000,00	180.250.000
	Output : Jumlah pembatas	36 titik	36 titik
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
6	Kegiatan Survey Kinerja Ruas Jalan	48.000.000,00	47.100.000

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah dokumen	1 dok	1 dok
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
6	program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	709.488.000,00	680.421.759
1	Kegiatan Penyusunan Database Perhubungan Darat	19.488.000,00	6.385.059
	Output : Jumlah dokumen	1 dok	1 dok
	Outcome : Persentase prasarana dan fasilitas llaj yang berfungsi baik	100%	100%
2	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	85.000.000,00	82.932.200
	Output : Jumlah perlengkapan jalan	617 unit	617 unit
	Outcome : Persentase prasarana dan fasilitas llaj yang berfungsi baik	100%	100%
3	Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan SIM LLAJ	605.000.000,00	591.104.500
	Output : Jumlah CCTV dan SIM LLAJ	4 titik	4 titik
	Outcome : Persentase prasarana dan fasilitas llaj yang berfungsi baik	100%	100%
7	program peningkatan pelayanan angkutan	2.890.872.000,00	2.277.510.711
1	Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalin dan Angkutan	301.766.000,00	272.583.795
	Output : Jumlah sosialisasi	1500 peserta	1500 peserta
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
2	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	660.000.000,00	550.299.205
	Output : Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
3	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	48.152.000,00	41.499.440
	Output : Jumlah awak kendaraan yang diberi penghargaan	35 orang	35 orang
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
4	Kegiatan Pembinaan Keselamatan LLAJ	106.307.000,00	84.199.500
	Output : Jumlah pelajar yang diberi penghargaan	75 peserta	75 peserta
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
5	Kegiatan Penyelenggaraan Balik Gratis Angkutan Lebaran	63.638.000,00	34.910.000

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah penumpang	590 pnp	590 pnp
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
6	Kegiatan Pemilihan dan Pemberiaan Penghargaan Pemuda Pelopor	102.551.000,00	101.723.780
	Output : Jumlah pelajar yang terpilih	5 pelajar	5 pelajar
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
7	Kegiatan Pengamanan Insidentil Terpadu	207.727.000,00	139.647.471
	Output : Jumlah pos pengamanan	5 pos	5 pos
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
8	Kegiatan Pelatihan/Pembinaan SDM Perhubungan	40.458.000,00	36.760.000
	Output : Jumlah kegiatan	35 orang	35 orang
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
8	Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha (WTN)	31.337.000,00	2.569.440
	Output : Jumlah penilaian	1 kali	1 kali
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
9	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan	83.594.000,00	79.874.080
	Output : Jumlah angkutan per tahun	23000 kend	25213 kend
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
10	Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Umum Sekolah Gratis	627.440.000,00	406.994.000
	Output : Jumlah pelajar yang terangkut	118560 pnp	118560 pnp
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
11	Kegiatan Pengelolaan Operasional UPTD Pengujian kendaraan bermotor	111.300.000,00	106.750.000
	Output : Jumlah pegawai	6 orang	6 orang
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
12	kegiatan pengelolaan operasional tempat parkir khusus	433.100.000,00	419.700.000
	Output : Jumlah pegawai	12 org	12 org
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%
13	kegiatan akreditasi PKB	73.502.000,00	-
	Output : Jumlah Kegiatan	1	
	Outcome : Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	1,64%

d. Permasalahan dan Solusi

Ada beberapa permasalahan yang terjadi pada kegiatan tahun 2019:

1. Pada kegiatan Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dilakukan realisasi anggaran dikarenakan kegiatan ini menyesuaikan Kementerian Perhubungan, pada tahun 2019 Kementerian Perhubungan tidak melakukan akreditasi pengujian kendaraan bermotor.
2. Anggaran belanja pegawai dalam hak Uang Kinerja Kegiatan tidak optimal dikarenakan banyaknya jabatan struktural yang kosong.
3. Harga BBM non subsidi yang fluktuatif menyebabkan anggaran yang tersedia tidak dapat diserap dengan maksimal, akan tetapi hal ini telah sesuai dengan aturan karena jumlah liter BBM untuk kendaraan dinas telah diatur dan tidak dapat melebihi jumlah yang ditetapkan.
4. Untuk penilaian lomba Wahana Tata Nugraha pada tahun 2019 terjadi perubahan sistem penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Semula direncanakan penilaian dilakukan sebanyak 2 kali di masing-masing daerah kemudian berubah menjadi terpusat di Jakarta dengan mengundang Pemerintah Daerah untuk melakukan paparan di Jakarta.

Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah ;

1. Anggaran akreditasi akan dimunculkan kembali pada anggaran 2020.
2. Pada tahun 2020 jumlah pejabat struktural di Dinas Perhubungan Kota Madiun sudah tercukupi.
3. Untuk penilaian lomba Wahana Tata Nugraha akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

e. Penghargaan yang diterima

Prestasi penghargaan yang diraih oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun pada tahun 2019 yaitu Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan RI.



15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan sasaran meningkatnya kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah dengan indikator kinerja sasaran Kontribusi Sektor Komunikasi dan informatika terhadap PDRB.

Perkembangan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah yang diukur dengan indikator kinerja Kontribusi Sektor Komunikasi dan Informasi terhadap PDRB pada penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.87
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018- 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat						
	Meningkatnya Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap PDRB	16,09%*	16,54%	15,73%	96%

Sumber : Diskominfo Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan bahwa kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap PDRB pada tahun 2018 sampai tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,36%.

Penghitungan PDRB untuk Sektor Informasi dan Komunikasi mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Secara nilai, angka pada lapangan usaha berdasarkan kategori informasi dan komunikasi pada Tahun 2019 mengalami kenaikan. Semula sebesar 1.598.216,2 juta pada tahun 2018 menjadi 1.671.410,6 juta pada Tahun 2019. Namun secara prosentase, kontribusi pada sektor Informasi dan

Komunikasi terjadi penurunan karena adanya kenaikan pada sektor lain, yaitu pada sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta Industri Pengolahan. Bahwa kenaikan dan penurunan prosentase kontribusi tiap sektor terhadap total PDRB saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila terdapat beberapa sektor mengalami kenaikan, maka otomatis sektor yang lain akan mengalami penurunan, dikarenakan jumlah total kontribusi seluruh sektor adalah 100%. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.88
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
di Kota Madiun Tahun 2018 -2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
15 Komunikasi dan Informatika					
15.1	Jumlah jaringan komunikasi	6/5	6/6	6/5	83,3%
15.2	Rasio warnet/gameonline terhadap penduduk	0,37	0,3	0,1	33,33%
15.3	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	80	14	80	571%
15.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	13	13	13	100%
15.5	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada
15.6	Pameran/expo per tahun	18	18	25	138,8%
15.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan komunikasi dan informasi	82,8	80,5	83,25	103,4%
15.8	Jumlah Media Elektronik Milik Pemerintah	4	1	4	400%
15.9	Jumlah SDM Penyiaran	3	3	7	233,3%
15.10	Jumlah Menara Telekomunikasi	84	70	84	120%
15.11	Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi	4.164	3.051	3.127	102,49%
15.12	Web Site PPID Kota Madiun	ada	ada	ada	ada
15.13	Persentase PD yang telah mempunyai sistem informasi berbasis WEB	100	61.76%	100%	161,91%
15.14	Persentase PD yang telah menggunakan layanan sistem LPSE dalam pengadaan barang dan jasa	100	100%	100%	100%
15.15	Jumlah Kelompok User yang memanfaatkan Teknologi Informasi	3	3	3	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
15.16	Ketersediaan Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah	106	61	89	145,90%
III ASPEK DAYA SAING DAERAH					
B Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
5 Komunikasi dan Informatika					
5.1	Rasio ketersediaan daya listrik	96,96	89,6	96,96	108,21 %
5.2	Prosentase penduduk yang menggunakan HP/ Telp	95	90	95,38	105,97%
5.3	Prosentase Rumah tangga yang menggunakan Listrik	100	100	100	100%
5.4	Kontribusi Sektor Komunikasi dan Infomasi terhadap PDRB	16,09%	16,54%	15,72%	96%

Sumber : Diskominfo Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu Pemerintah Daerah.

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu jaringan atau sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu jaringan telekomunikasi di pemerintah daerah.

Jumlah jaringan telepon seluler yang ada di Kota Madiun sebanyak 6 (enam) operator yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Axiata, Smartfren, Three. Sedangkan jumlah jaringan stasioner (Stasiun jaringan/ Kantor Operator Seluler) di Kota Madiun ada 5 yaitu : Telkom, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren, sedangkan kantor operator Three belum ada di Kota Madiun, masih tergabung dengan wilayah Malang. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

2. Rasio warnet/ gameonline terhadap penduduk Rasio wartel / warnet terhadap penduduk atau ketersediaan wartel / warnet adalah jumlah wartel/ warnet per 1.000 penduduk.

Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan

jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Warnet atau warung internet tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Keberadaan wartel saat ini di Kota Madiun sudah menghilang digantikan dengan perkembangan teknologi smartphone yang beredar di masyarakat.

Jumlah Warnet/ game online di Kota Madiun pada tahun 2019 hanya 23 warnet/ game online dan jumlah penduduk sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 210.115 jiwa, sehingga Rasio Warnet terhadap penduduk pada tahun 2019 adalah 0,1 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 77 warnet/ game online dengan rasio 0,3.

Semakin menurun rasio warnet ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan akses internet bagi masyarakat dengan adanya wifi gratis dari Pemerintah Kota Madiun. Dalam arti untuk ketersediaan fasilitas akses internet bagi masyarakat Kota Madiun telah terpenuhi oleh Pemerintah Daerah.

3. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah.

Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan/ saluran komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi) dan bentuk karangan yang lain.

Jumlah Surat kabar Nasional dan Lokal pada tahun 2019 yang masuk di Kota Madiun sejumlah 80 surat kabar, dengan rincian sebagai berikut :

Koran Harian

1. Koran Kompas
2. Koran Jawa Pos
3. Koran Republika
4. Koran Seputar Indonesia
5. Koran Media Indonesia
6. Koran Surya
7. Koran Radar Madiun
8. Koran Birawa
9. Harian Bangsa
10. Duta
11. Surabaya Pagi
12. Memo Kediri
13. Memorandum
14. Pikiran Rakyat

Koran Mingguan

15. Jatim Pos
16. Montera
17. Independen
18. Suksesi

Tabloid/Majalah

40. Tabloid Nova
41. Gaul
42. Keren Beken
43. Teen
44. Nyata
45. Sajiku
46. Bintang
47. Otoport
48. Nikita
49. Buah hati
50. Mom & Kiddie
51. Genie
52. Ototrend
53. Bunda
54. Ultima
55. Agrobis
56. Komputek
57. Nuran
58. Gatra
59. Sindo

19. Metro Jatim
20. Forum Indonesia
21. Jaya Baya
22. Lensa Indonesia
23. Investigasi
24. Mega Pos
25. Awas
26. Suara Rakyat
27. Jagad Pos
28. Bidik Nasional
29. Bisnis Surabaya
30. Koran Rakyat
31. Krida Rakyat
32. Suara Media Nasional
33. News Week
34. Realita
35. Posmo
36. Radar Bangsa
37. Indonesia Pos
38. Sinar Pagi
39. Sindo
60. Gloria
61. Kisah Nyata
62. Hobiku
63. Gardenia
64. Top Phone
65. Probis
66. Gugat
67. PC Plus
68. Femme
69. Kecantikan
70. Gowes
71. Rumah
72. Griya
73. Wedding
74. Bola
75. Pulsa
76. Otomotif
77. Ponsel
78. Burung
79. Trias
80. Tempo

4. Jumlah penyiaran radio/ TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/ TV nasional maupun radio/ TV lokal yang masuk daerah.

Jumlah Penyiaran radio/ TV Lokal di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2019 sejumlah 13 lembaga penyiaran, yang terdiri dari :

- a. Penyiaran Radio Lokal sejumlah 10 lembaga yaitu : RRI, Radio Suara Madiun, DCS FM, Moderato FM, Ge FM, Madya FM, Suara Kasih, Radio Komunitas Kita, Radio Pesona dan Radio Sahabat Kehidupan.
- b. Jumlah TV lokal di Kota Madiun ada 3 yaitu JTV Madiun, SAKTI TV dan BBS TV.

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di Daerah maupun Nasional di Daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah.

5. Web site milik Pemerintah Daerah ada yaitu <http://www.madiunkota.go.id>



6. Jumlah Pameran/expo tahun 2019 sebanyak 25 pameran/ expo, yaitu :
 - a. Pameran Batik Fashion Fair 2019 di Surabaya
 - b. Pameran Kriyanusa Tahun 2019 di Jakarta
 - c. Inacraft 2019 di Jakarta
 - d. Pagelaran Seni Budaya dan Produk Unggulan Kota Madiun Tahun 2019 di Jakarta
 - e. Apeksi, Indonesia City Expo 2019 di Semarang
 - f. Surabaya Great Expo 2019 di Surabaya
 - g. Jogja PPUN Expo 2019 di Yogyakarta
 - h. Pameran Produk Unggulan Perdagangan Pariwisata 2019 di Semarang
 - i. Hinggil Batik Festival di Surabaya
 - j. Festival Batik Bordir dan Tenun Nusantara di Bandung
 - k. Festival UMKM dalam rangka Hari Bhayangkara ke-73 di Surabaya

- l. Harkopnas Expo ke 72 di Purwokerto
 - m. UMKM dan Koperasi Expo di Surabaya
 - n. Pameran UMKM dalam rangka Rapat Evaluasi Nasional BPOM di Surabaya
 - o. Jateng Smesco Expo di Semarang
 - p. Majapahit Travel Fair (MTF) di Surabaya
 - q. Pameran Hari Jadi Provinsi di Surabaya
 - r. Jatim Kominfo Festival di Magetan
 - s. Bazar Takjil Ramadhan 1439 H di Madiun
 - t. Pameran Hari Jadi Kota Madiun di Madiun
 - u. UMKM Vaganza di Sun City Mall Madiun
 - v. Pameran UMKM dalam rangka Djarum Sirnas Premier di GOR Madiun
 - w. Festival Pecel Pincuk di Madiun
 - x. Pameran Madiun Kreatif di Madiun
 - y. Pameran Madiun Tempo Doeloe
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan komunikasi dan informatika pada Tahun 2019 mencapai 83,25%.
Dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai 82,8% mengalami peningkatan, walaupun kategori mutu pelayanan sudah mendapat Nilai Baik (B), namun jika melihat harapan masyarakat yang lebih tinggi, maka sebenarnya masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik pada pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
8. Jumlah Media Elektronik milik Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 terdapat 4 (empat) Media, yaitu : Radio Suara Madiun, Videotron, Website, TV Publikasi.
9. Jumlah SDM Penyiaran ada 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 2 orang ASN dan 5 orang Non ASN untuk melaksanakan tugas sebagai Penyiar, Reporter dan Kontributor Berita.
10. Jumlah Menara Telekomunikasi pada Tahun 2019 di Kota Madiun terdapat 84 menara tidak mengalami kenaikan dari tahun 2018.
11. Jumlah kegiatan penyebaran informasi sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2019 sejumlah 3.127 informasi yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
-

- a. Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Madiun sebanyak 1.919 dokumen;
 - b. Kegiatan Optimalisasi PPID sebanyak 1.208 informasi.
12. Web Site PPID Kota Madiun ada di <http://www.madiunkota.go.id>



13. Persentase Perangkat Daerah yang telah mempunyai sistem informasi berbasis WEB pada Tahun 2019 mencapai 100%, karena semua Perangkat Daerah di Kota Madiun sudah menggunakan sistem informasi berbasis Web.
14. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan sistem LPSE dalam pengadaan barang dan jasa adalah 100% yang berarti bahwa seluruh Perangkat Daerah telah menggunakan layanan sistem LPSE dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan pemanfaatan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).
15. Jumlah Kelompok User yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi ada 3 (tiga) user yaitu : Pemerintah/ Instansi, Swasta dan Masyarakat.
16. Ketersediaan Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Madiun sebanyak 89 aplikasi, yakni :
 - a. Sektor Pendidikan, terdapat 8 aplikasi, yakni : Data Pokok Pendidikan, Penjaminan Mutu Pendidikan, Lembar Individu Sekolah, SIMPKB, Hadir GTK, SIM Aneka Tunjangan, Sergur (Sertifikasi Guru), dan SIM Tenaga Pendidikan.

- b. Sektor Kesehatan, terdapat 27 aplikasi, yakni :
SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS & IMS), SIGIZI (Sistem Informasi Gizi), SIHEPI (Sistem Informasi Hepatitis dan ISP), SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu), Sistem Program Pelaporan ISPA, SIS PTM FKTP, ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan), SIPNAP (Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika & Psikotropika Nasional), SISTEM PWS (Aplikasi Imunisasi Pemantauan Wilayah Setempat), SISKOHATKES SHARI (Sistem Informasi Kesehatan Haji Indonesia), Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Berbasis Puskesmas, Aplikasi Komunikasi Data Kementerian Kesehatan, Perencanaan Berbasis Elektronik (e-Planning Yankes), E-Monev Yankes, Aplikasi KRISNA (Perencanaan Anggaran DAK), E-Link (Elektronik Laporan Informasi Kesehatan Puskesmas), SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit), SISRUITE (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi), Sistem Informasi Data Manajemen Kefarmasian, Aplikasi Pendataan Keluarga BKKBN, Aplikasi Kampung KB, Aplikasi Pengolahan Data Statistik Rutin Program KB Nasional, SISDMK (Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan), Renbut SDMK (Aplikasi Rencana Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan), SIMPUSKESMAS BLUD, Aplikasi Keluarga Sehat, dan SIM RSUD Kota Madiun.
 - c. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat 2 aplikasi, yakni :
SILAT (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Kota Madiun), dan SIM BG (Ijin Pendirian Bangunan).
 - d. Sektor Sosial, tidak ada aplikasi.
 - e. Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, terdapat 1 aplikasi, yakni Sistem Informasi Pelaporan Satpol PP Jatim.
 - f. Sektor Tenaga Kerja, terdiri dari 4 aplikasi, yakni :
IPK (Informasi Pasar Kerja), Pusat Data, dan Informasi Ketenagakerjaan, SISKOTKLN dan SIDAKER.
 - g. Sektor Pertanahan, tidak ada aplikasi.
 - h. Sektor Lingkungan Hidup, tidak ada aplikasi.
-

- i. Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat 7 aplikasi, yakni :
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) Konsolidasi Pusat, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) Konsolidasi Daerah, SIM Cek Duplicate NIK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) Kemendagri, Aplikasi Pendaftaran Kependudukan (Pemburu), Pencatatan Sipil Online, dan Perekaman Data Chip dan Personalisasi.
 - j. Sektor Perhubungan, terdapat 1 aplikasi, yakni E-SIMPKB.
 - k. Sektor Komunikasi dan Informatika, terdapat 7 aplikasi, yakni :
SIMAYA, Madiun Service Desk, SP4 LAPOR, Website PPID, Website Seluruh OPD, Aplikasi Android Maadiun Karismatik, dan Madiun Monitoring.
 - l. Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tidak terdapat aplikasi.
 - m. Sektor Lingkungan Hidup, tidak terdapat aplikasi.
 - n. Sektor Kebudayaan, tidak terdapat aplikasi.
 - o. Sektor Perpustakaan, terdapat 2 aplikasi, yakni :
Inlislite dan Aplikasi Android i-Madiun,
 - p. Sektor Kearsipan, terdapat 1 aplikasi, yakni SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis).
 - q. Sektor Persandian, tidak terdapat aplikasi.
 - r. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tidak terdapat aplikasi.
 - s. Sektor Penanaman Modal, terdapat 4 aplikasi, yakni :
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), Pelayanan Perizinan Kota Madiun, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Sistem Informasi Perizinan Terpadu.
 - t. Sektor Statistik, tidak terdapat aplikasi.
 - u. Sektor Pertanian, terdapat 2 aplikasi, yakni :
SKPG dan Panel Harga.
 - v. Sektor Perdagangan, terdapat 2 aplikasi, yakni :
Siskaperbapo (Harga Konsumen Per Daerah) dan Sistem Informasi Integrasi Penagihan Retribusi.
-

- w. Sektor Administrasi dan Manajemen Umum, terdapat 6 aplikasi, yakni :
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan), SIMJAB (Analisis Jabatan), Sistem Administrasi Internal, SMEP, LPPD, dan Pendekar (Pelayanan Dekati Rakyat).
 - x. Sektor Administrasi Legislasi, terdapat 1 aplikasi, yakni JDIH.
 - y. Sektor Manajemen Pembangunan, terdapat 3 aplikasi, yakni :
SIPP, SIPD (Pembangunan Daerah), dan Website Profil Investasi Madiun.
 - z. Sektor Manajemen Keuangan (siklus yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-Monitoring), terdapat 10 aplikasi, yakni :
SPSEN (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), E-Budgeting, E-Monev, E-Harga, LKPP (Lelang Procurement), E-Katalog, SIKD/ SIKUDA/ SIPKD, E-Kinerja, SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), dan SIRUP (Sistem Rencana Umum dan Pengadaan).
 - aa. Sektor Manajemen Kepegawaian, terdapat 1 aplikasi, yakni SIK (Sistem Informasi Kepegawaian).
17. Rasio Ketersediaan Daya Listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan sampai dengan tahun 2019 masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni 96,96.
Berdasarkan data dari PLN angka dimaksud diperoleh dari jumlah daya listrik PLN dari Gardu Induk dibagi dengan jumlah wilayah.
18. Prosentase penduduk yang menggunakan HP atau Telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk Kota Madiun.
Pada Tahun 2019 mencapai 95,38% dihitung dari jumlah penduduk yang dianggap telah menggunakan/ memanfaatkan HP yaitu penduduk usia 4 tahun sampai dengan keatas sebanyak 200,414 orang dibanding jumlah penduduk seluruhnya sejumlah 210.115 orang dikali 100.
19. Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Madiun Tahun 2019 mencapai 100% yang berarti bahwa seluruh rumah tangga di Kota Madiun sudah menggunakan listrik.
20. Kontribusi Sektor Komunikasi dan Informasi terhadap PDRB tahun 2019 mencapai 15,72% berdasarkan perhitungan BPS Kota Madiun.
-

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan Dinas Kominfo pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	1 Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi
		2 Kegiatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintah Kota Madiun
		3 Kegiatan Bimtek Aplikasi SPSE
		4 Kegiatan Integrasi Sistem Informasi
		5 Kegiatan Bimtek Rencana Umum Pengadaan
		6 Kegiatan Maintenance Aplikasi Berbasis Web
		7 Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan Dibidang Cukai kepada Masyarakat (DBH-CHT)
		8 kegiatan pengelolaan call center 112
		9 kegiatan pemeliharaan kualitas jaringan intranet dan internet Kota Madiun
6	program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	1 Kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Suara Madiun
		2 Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
		3 Kegiatan Pertemuan Forum Koordinasi Kehumasan
		4 Kegiatan Jumpa Pers (Press Conference) secara periodik
		5 kegiatan Penerbitan Tabloid Program Pemerintah
		6 Kegiatan Pemberdayaan Kelompok

No	Program	Kegiatan
		Informasi Masyarakat
		7 Kegiatan Optimalisasi PPID
		8 Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota

c. Realisasi program dan Kegiatan

Realisasi program dan Kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada tahun 2019 adalah :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	2.658.140.000,00	2.527.032.393,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.290.500.000,00	2.160.103.459,00
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket
	Outcome : Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	367.640.000,00	366.928.934,00
	Output : Jumlah perjalanan dinas luar daerah	82 kali	101 kali
	Outcome : Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah	967.990.000,00	955.641.352,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	360.000.000,00	350.364.131,00
	Output : Jumlah gedung yang dipelihara	1 paket	1 paket
	Outcome : Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%
2	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	62.990.000,00	60.917.787,00
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas	25 unit	30 unit
	Outcome : Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%
3	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor	545.000.000,00	544,359.434,00
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana	1 paket	1 paket
	Outcome : Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.927.650.000,00	5.925.281.800,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	5.927.650.000,00	5.925.281.800,00
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana	1 paket	1 paket
	Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.335.000,00	45.050.171,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	45.335.000,00	45.050.171,00
	Output : Jumlah dokumen	5 dokumen	5 dokumen
	Outcome : Persentase jumlah dokumen pelaporan	100%	100%
5	program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	22.088.869.000,00	21.590.147.345,00
1	Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi	346.035.000,00	333.026.737,00
	Output : Jumlah peserta pelatihan TIK	34 OPD	34 OPD
	Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
2	Kegiatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintah Kota Madiun	337.295.000,00	305.407.295,00
	Output : Persentase uptime server LPSE ; ISO270001	98%	98%
	Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
3	Kegiatan Bimtek Aplikasi SPSE	320.145.000,00	286.727.929,00
	Output : Jumlah user aplikasi SPSE	240 user	240 user
	Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
4	Kegiatan Integrasi Sistem Informasi	1.077.539.000,00	1.029.847.686,00
	Output : Jumlah aplikasi sistem informasi	3 sistem	3 sistem
	Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
5	Kegiatan Bimtek Rencana Umum Pengadaan	305.400.000,00	276.468.844,00
	Output : Jumlah user aplikasi	240 user	240 user
	Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
6	Kegiatan Maintenance Aplikasi Berbasis Web	11.519.578.000,00	11.426.447.710,00
	Output : Jumlah aplikasi berbasis web	63 Aplikasi	63 Aplikasi
	Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
7	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan	5.000.000.000,00	4.897.772.547,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Dibidang Cukai kepada Masyarakat (DBH-CHT)		
	Output : Jumlah media online guna melaksanakan penyampaian informasi tentang cukai	5 jenis	5 jenis
	Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
8	kegiatan pengelolaan call center 112	236.050.000,00	229.626.560,00
	Output : Jumlah layanan panggilan	6 layanan	6 layanan
	Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
9	kegiatan pemeliharaan kualitas jaringan intranet dan internet Kota Madiun	2.946.827.000,00	2.804.822.037,00
	Output : Jumlah client intranet dan internet + titik CCTV	301 titik	301 titik
	Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
6	program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	6.104.699.000,00	5.984.914.391,00
1	Kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Suara Madiun	458.131.000,00	422.630.223,00
	Output : Jumlah jam siaran per hari	18 jam/hari	18 jam/hari
	Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
2	Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	2.874.250.000,00	2.870.177.139,00
	Output : Jumlah media informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan Pemda	50 media	50 media
	Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
3	Kegiatan Pertemuan Forum Koordinasi Kehumasan	500.000.000,00	498.197.420,00
	Output : Jumlah pertemuan forum koordinasi kehumasan	12 kali	12 kali
	Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
4	Kegiatan Jumpa Pers (Press Conference) secara periodik	526.417.000,00	525.722.640,00
	Output : Jumlah Kegiatan Jumpa Pers	12 kali	12 kali
	Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
5	kegiatan Penerbitan Tabloid Program Pemerintah	448.800.000,00	431.127.448,00
	Output : Jumlah edisi	13 edisi	13 edisi
	Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	612.601.000,00	607.113.720,00
	Output : Jumlah kegiatan pemberdayaan KIM	12 kali	12 kali
	Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
7	Kegiatan Optimalisasi PPID	285.500.000,00	274.462.277,00
	Output : Jumlah informasi yang dipublikasikan	888 informasi	1208 informasi
	Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
8	Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota	399.000.000,00	355.483.524,00
	Output : Jumlah peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemkot	1584 dokumentasi	1919 dokumentasi
	Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Madiun;
2. Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
3. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
4. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah;
6. Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kota Madiun;
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
8. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;

9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju *e-commerce*;
10. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
11. Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.

Solusi

1. Melakukan pengintegrasian sistem *e-government*;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publikasi informasi ke masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih harmonis dengan media massa dan instansi terkait;
5. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi;
6. Menyediakan saluran informasi dan komunikasi yang memadai bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota;
7. Mengoptimalkan PPID;
8. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder masyarakat;

e. Penghargaan yang diterima

Tingkat Nasional, meliputi :

1. Penghargaan Menteri Kominfo Jonny G. Plate atas Penyelesaian Master Plan Smart City
2. RKCI 2019 kategori *Smart Health* dan RKCI 2019 kategori *Digital Government Readiness*

Tingkat Provinsi, yaitu :

1. Juara III Kategori Infografi pada Anugerah Pewarta Warga (APW) Award Tingkat Provinsi
 2. Juara III Lomba Cerdas Cermat Komunikatif (LCKK) tingkat Provinsi Jawa Timur (KIM Anyelir)
 3. Program Unggulan Radio LPPL Terbaik dalam Anugerah Penyiaran KPID Award Provinsi Jawa Timur
 4. Keterbukaan Informasi Publik Kategori A (Informatif) PPID Award Provinsi Jawa Timur 2019
-

16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM

a. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM di Kota Madiun bertujuan untuk Meningkatkan kapasitas pasar, UM, Koperasi dan Perdagangan regional, Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dan Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi, dengan sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha, Terbangunnya kesetaraan gender yang tergabung dalam kelompok/ Koperasi Wanita dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui KUM.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan KUM Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.89
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM Kota Madiun Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
16.1	Persentase koperasi aktif	98.05	98.05	98,05	100
16.2	Jumlah UKM	597	825	878	106,42
16.3	Usaha mikro dan kecil	23,360	23,426	23.461	100,15
16.4	Persentase Peningkatan Omset KUMKM	2.97	2.9	3,08	106,20
16.5	Cakupan Bina UKM	2.55	3.08	3,74	121,42
16.6	Jumlah Koperasi Aktif	301	302	302	100
16.7	Jumlah Promosi KUMKM	11	11	11	100
16.8	Jumlah Koperasi	307	308	308	100
16.9	UKM Non BPR/LKM UKM	23,360	23,000	23.457	101,98

Sumber : DPM PTSP KUKM Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut dijelaskan/diuraikan per indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase koperasi aktif :

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, dimana keaktifan koperasi menunjukkan eksistensi serta produktivitas koperasi yang ditandai dengan melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Jumlah koperasi yang ada di Kota Madiun sampai dengan akhir Desember 2019 sejumlah 308 unit koperasi, yang aktif sejumlah 302 koperasi dan yang tidak aktif sejumlah 6 unit koperasi. Adapun penghitungan persentase koperasi aktif menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah koperasi keseluruhan}} \times 100\% \\ &= \frac{302}{308} \times 100\% = 98,05\% \end{aligned}$$

2. Jumlah UKM

Jumlah UKM di aspek pelayanan umum tersebut adalah jumlah pelaku usaha mikro yang telah dibina oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro. Adapun realisasi jumlah pelaku usaha mikro yang telah dibina sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah 878 orang. Bentuk pembinaan kepada pelaku usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Permodalan
- b. Fasilitasi Pelatihan
- c. Fasilitasi Kemitraan
- d. Fasilitasi Pemasaran
- e. Fasilitasi Standarisasi

3. Usaha Mikro dan Kecil

Indikator Usaha Mikro dan Kecil didefinisikan sebagai data jumlah total Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk BPR/LKM yang ada di Kota Madiun. Jumlah UMKM pada tahun 2019 mencapai 23.461 unit, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 23.426 unit maka capaian indikator mencapai 100,15%.

4. Persentase peningkatan omset KUMKM

Definisi omset sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual. Berikut adalah tabel perbandingan omset KUMKM

(Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) antara tahun 2017 dan tahun 2018 :

	Tahun 2017	Tahun 2018
Koperasi	Rp. 192.229.685,-	Rp. 207.002.405,-
UMKM	Rp. 4.104.097.241,-	Rp. 4.221.523.850,-
Jumlah	Rp. 4.296.326.926,-	Rp. 4.428.526.255,-

**dalam ribuan*

Persentase peningkatan omset KUMKM pada tahun 2018 mencapai 3,08%, Hal tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 2,9%. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Omset KUMKM 2018} - \text{Omset KUMKM 2017}}{\text{Omset KUMKM 2017}} \times 100\% \\ &= \frac{4.428.526.255 - 4.296.326.926}{4.296.326.926} \times 100\% = 3,08\% \end{aligned}$$

5. Cakupan Bina UKM

Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro sampai dengan bulan Desember 2019 telah membina sebanyak 878 pelaku usaha mikro, sedangkan jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah keseluruhan sejumlah 23.457 unit, sehingga presentase Cakupan Bina Usaha Mikro sebanyak 3,74%. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah pelaku usaha mikro yang telah dibina}}{\text{Jumlah pelaku UMKM}} \times 100\% \\ &= \frac{878}{23.457} \times 100\% = 3,74\% \end{aligned}$$

6. Jumlah Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi aktif posisi sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah 302 unit koperasi.

7. Jumlah Promosi KUMKM

Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro sampai dengan bulan Desember tahun 2019 telah mengikuti pameran promosi sebanyak 11 kali baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Adapun pameran yang diikuti diantaranya:

- a. Hinggil Batik Festival di Surabaya
- b. Festival Batik Bordir dan Tenun Nusantara di Bandung
- c. Pameran UMKM dalam rangka Hari Bhayangkara ke 73 di Surabaya
- d. Harkopnas Expo ke 72 di Purwokerto
- e. UMKM & Koperasi Expo di Surabaya

- f. Pameran UMKM dalam rangka Rapat Evaluasi Nasional BPOM di Surabaya
- g. Jateng Smesco Expo di Semarang
- h. Bazar Takjil Ramadhan di Madiun
- i. UMKM Vaganza di Sun City Mall Madiun
- j. Pameran UMKM di Galeri UMKM Kota Madiun di Lawu Plaza Madiun
- k. Bazar UMKM dalam rangka Djarum Sirnas Premier di GOR Madiun

8. Jumlah Koperasi

Jumlah Koperasi posisi sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah 308 koperasi.

9. UMKM Non BPR/LKM UKM

Data yang disajikan adalah data jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang non BPR / LKM, dikarenakan :

- a. Sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro tidak menangani BPR (Bank Perkreditan Rakyat).
- b. Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM (Lembaga Keuangan Mikro) bahwa pengawasan LKM berada di OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM yang dilaksanakan pada tahun 2019, adalah:

No	Program	Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah

No	Program	Kegiatan
5	program pengembangan sistem Pendukung kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	1 Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun
		2 kegiatan sosialisasi dukungan penyediaan permodalan bagi KUMKM
6	program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1 Kegiatan Peningkatan Koperasi
		2 Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian
		3 kegiatan pelatihan manajemen pengelola koperasi/ KUD

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM yang dilaksanakan pada tahun 2019, adalah:

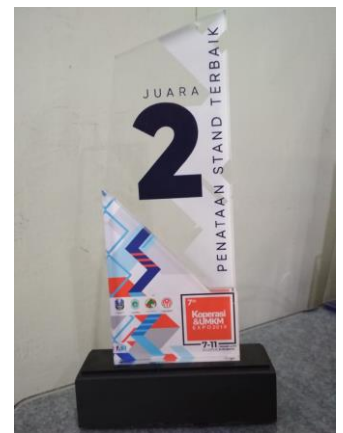
NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1.598.075.000,00	1.425.444.232,00
	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1.198.075.000,00	1.025.566.732,00
	Output : jumlah peralatan kantor yang terpenuhi	14 jenis	14 jenis
	Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
	2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	400.000.000,00	399.877.500,00
	Output : jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	125 kali	125 kali
	Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
2	program pemeliharaan barang milik daerah	182.000.000,00	177.316.600,00
	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00
	Output : jumlah gedung kantor yang bersih dan nyaman	1 unit	1 unit
	Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
	2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	42.000.000,00	37.316.600,00
	Output : jumlah kendaraan dinas yang nyaman	29 unit	29 unit
	Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
	3 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	60.000.000,00	60.000.000,00
	Output : jenis sarana kantor yang memadai	3 jenis	3 jenis
	Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	175.000.000,00	166.169.000,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	175.000.000,00	166.169.000,00
	Output : jumlah sarana prasarana kantor	6 jenis	6 jenis
	Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74.996.000,00	48.336.306,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	74.996.000,00	48.336.306,00
	Output : jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	10 dokumen	10 dokumen
	Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
5	program pengembangan sistem Pendukung kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	1.224.196.000,00	1.172.439.276
1	Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun	1.200.446.000,00	1.152.732.126,00
	Output : Jenis pemberdayaan yang dilaksanakan	20 kegiatan	20 kegiatan
	Outcome : prosentase penumbuhan jumlah usaha mikro	0,40%	0,46%
2	kegiatan sosialisasi dukungan penyediaan permodalan bagi KUMKM	23.750.000,00	19.707.150
	Output : Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	164 orang
	Outcome : prosentase penumbuhan jumlah usaha mikro	0,40%	0,46%
6	program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	475.370.000,00	433.272.268
1	Kegiatan Pemingkatan Koperasi	257.523.000,00	237.521.988
	Output : Jumlah koperasi yang diikuti	210	210
	Outcome : prosentase koperasi aktif	79%	98,05%
2	Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian	158.594.000,00	137.795.280
	Output : Jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi	300	300
	Outcome : prosentase koperasi aktif	79%	98,05%
3	kegiatan pelatihan manajemen pengelola koperasi/ KUD	59.253.000,00	57.955.000
	Output : Jumlah pengelola koperasi / KUD yang mengikuti	100	100

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	pelatihan		
	Outcome : prosentase koperasi aktif	79%	98,05%

d. Penghargaan yang diterima

1. Juara Lomba Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur.
2. Juara Tingkat Nasional Lomba Koperasi Berprestasi di Bidang Usaha Jasa.
3. Juara Favorit Stand Terbaik dalam rangka Harkopnas Expo 2019.
4. Juara 2 Penataan Stand Terbaik dalam rangka Koperasi dan UMKM Exoi 2019.



17. URUSAN PENANAMAN MODAL

a. Tujuan dan Sasaran

Guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada DPM PTSP KUKM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.90
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat						
1.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Nilai realisasi Investasi	966,734 M	361 M	968 M	268,33%

Sumber : DPM PTSP KUKM Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Nilai realisasi Investasi

Nilai realisasi Kota Madiun Tahun 2019 Rp 968.702.041.674,- dengan target RPJMD Rp 361.000.000.000,-maka capaian kerjanya dihitung dengan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{968.702.041.674}{361.000.000.000} \times 100 \%$$

Hasil yang diperoleh dari rumus tersebut 268,33 %

Pengukuran capaian kinerja sasaran pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal di Kota Madiun menggunakan tolok ukur indikator jumlah nilai investasi dan jumlah ijin investasi. Dan perkembangannya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel III.91
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Di Kota Madiun

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
17 Penanaman Modal					
17.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	417	399	442	110,78 %
17.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	966,734	361 M	960,81 M	266,15%
17.3	Rasio daya serap tenaga kerja	10	7	8	113,15%
17.4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	-421,775	11	6,10	145%
17.5	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	-30,38	3.14	0,63%	180%
17.6	Rasio Izin yang diterbitkan	98.68	97	97,79	100,81%
17.7	Nilai Realisasi Investasi	966.734	361 M	968,702 M	268,33%
17.8	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	ada	Ada	Ada	Ada
III ASPEK DAYA SAING DAERAH					
C Fokus Iklim Investasi					
2 Penanaman Modal					
2.1	Lama proses perijinan	5	5	5	100
2.2	Jumlah perda yang mendukung iklim investasi	1	1	1	100

Sumber Data : DPM PTSP, Koperasi dan UKM

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat diuraikan/dijelaskan beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sejumlah 442 investor.

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) sejumlah Rp 960.812.591.674,-

3. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja diperoleh dari jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah unit usaha dikali seratus persen yaitu

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja}}{\text{Jumlah unit usaha}} \times 100 \% = \frac{5.376}{826} \times 100\% = 8$$

4. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN

Tahun 2019 nilai realisasi PMDN naik sebesar Rp 6.105.422.963,-.

Diperoleh dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \text{Investasi PMDN tahun 2019} - \text{Investasi PMDN Tahun 2018} \\
 &= 968.702.041.674 - 962.596.618.711 \\
 &= 6.105.422.963
 \end{aligned}$$

5. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN

Nilai investasi PMDN tahun 2019 naik sebesar 20,06% diperoleh dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Investasi PMDN 2019} - \text{Realisasi investasi PMDN 2018}}{\text{Realisasi PMDN Tahun 2018}} \times 100\% \\
 &= \frac{968.702.041.674 - 962.596.618.711}{962.596.618.711} \times 100\% \\
 &= 0,63\%
 \end{aligned}$$

6. Rasio Izin yang diterbitkan :

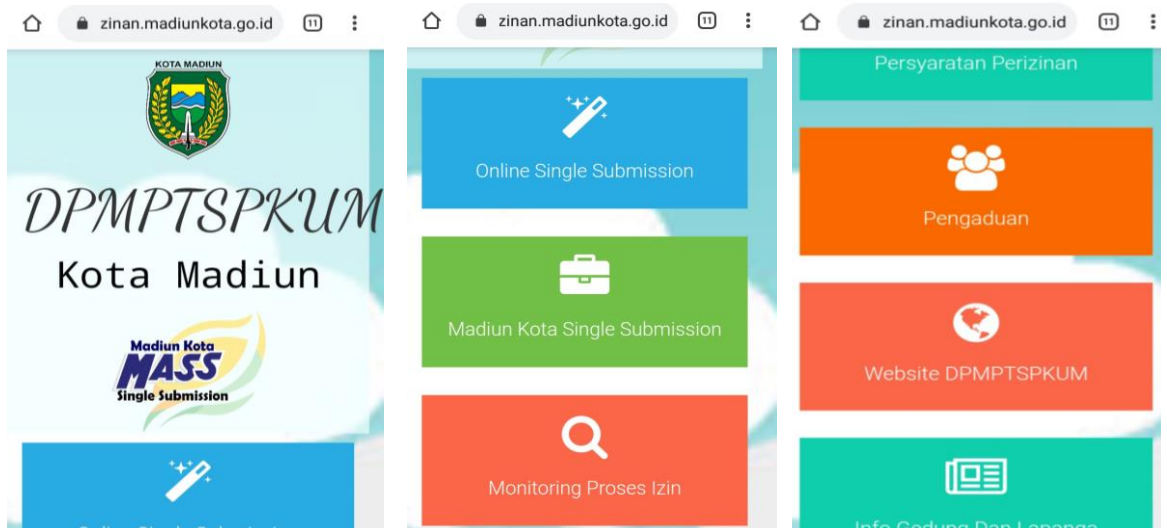
Untuk Rasio Ijin yang diterbitkan tepat waktu dapat dihitung dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah izin diterbitkan tepat waktu} \times 100\%}{\text{Jumlah Izin masuk}} \\
 &= \frac{1.999}{2.044} \times 100\% \\
 &= 97,79\%
 \end{aligned}$$

7. Nilai realisasi investasi

Nilai realisasi Kota Madiun Tahun 2019 Rp 968.702.041.674,-

8. Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah



2.1 Lama proses perizinan :

Adapun lama proses perijinan 5 hari sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun

2.2 Jumlah perda yang mendukung iklim investasi

Pemerintah Kota Madiun sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan Kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1	Kegiatan Promosi Investasi
		2	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi
		3	Kegiatan kerjasama investasi
		4	kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)
2	Program peningkatan pelayanan perizinan	1	Kegiatan Surveylance ISO 9001 :2008
		2	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat
		3	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Perizinan
		4	Kegiatan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pelayanan Perizinan
		5	kegiatan Sosialisasi Tentang Perizinan

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan Kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	969.231.000,00	820.060.472,00
	1 Kegiatan Promosi Investasi	449.872.000,00	373.665.850,00
	Output : Jumlah pameran yang diikuti	1 kali	1 kali
	Outcome : Jumlah nilai realisasi investasi PMDN/PMA dan Non Fasilitas	361 M	968.702.041.674
	2 Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi	84.743.000,00	76.941.053,00
	Output : Jumlah dokumen investasi	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Jumlah nilai realisasi investasi PMDN/PMA dan Non Fasilitas	361 M	968.702.041.674
	3 Kegiatan Kerjasama Investasi	339.744.000,00	275.834.505,00
	Output : Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1 kali	1 kali
	Outcome : Jumlah nilai realisasi	361 M	968.702.041.674

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	investasi PMDN/PMA dan Non Fasilitas		
4	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	94.872.000,00	93.619.064,00
	Output : Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Jumlah nilai realisasi investasi PMDN/PMA dan Non Fasilitas	361 M	968.702.041.674
2	program peningkatan pelayanan perizinan	428.364.000,00	411.705.218,00
1	Kegiatan Surveyance ISO 9001 : 2008	14.450.000,00	13.200.000,00
	Output : jumlah sertifikasi Manajemen ISO 9001:2008	1 buah	1 buah
	Outcome : perentase izin yang diterbitkan tepat waktu seseui SOP	97 %	97,79 %
2	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Perizinan	51.450.000,00	50.050.000,00
	Output : jumlah SIM untuk proses perijinan	20 izin	20 izin
	Outcome : perentase izin yang diterbitkan tepat waktu seseui SOP	97 %	97,79 %
3	Kegiatan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pelayanan Perizinan	181.232.000,00	171.792.843,00
	Output : Jumlah jenis izin yang dilayani	40 izin	40 izin
	Outcome : perentase izin yang diterbitkan tepat waktu seseui SOP	97 %	97,79 %
4	kegiatan Sosialisasi Tentang Perizinan	181.232.000,00	176.662.375,00
	Output : Jumlah peserta Sosialisasi	30 Kec/Kel	30 Kec/Kel
	Outcome : perentase izin yang diterbitkan tepat waktu seseui SOP	97 %	97,79 %

18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

a. Tujuan dan Sasaran

Perkembangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sarasannya berikut:

Tabel III.92
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun
Tahun 2018- 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
C	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga				
2	Pemuda dan Olah Raga				
2.1	Jumlah Klub Olah Raga	152	152	152	100
2.2	Jumlah gedung olahraga	5	5	5	100
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
18	Pemuda dan Olahraga				
18.1	Jumlah organisasi pemuda	3	3	6	200
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	3	100
18.3	Jumlah kegiatan olahraga	8	8	18	225
18.4	Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	100
18.5	Lapangan olahraga	83	83	83	100
18.6	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28	28	100
18.7	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	11	6	7	116
18.8	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	34	5	52	1040
18.9	Jumlah Peserta Olah Raga	20.394	19.000	19.266	101,4
18.10	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	100	100	100	100

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut adalah :

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Jumlah klub olahraga di Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 152 klub sama dengan kondisi Tahun 2018, dari rentang waktu awal periode RPJMD Tahun 2015 yang hanya sebanyak 14 klub dan di Tahun 2019 sebanyak 152 klub, antara lain :

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Bulu Tangkis	3 klub	15	Angkat Besi	3 klub
2	Tenis Lapangan	10 klub	16	Taekwondo	4 klub
3	Renang	2 klub	17	Panjat Tebing	2 klub
4	Atletik	1 klub	18	Judo	1 klub
5	Wushu	1 klub	19	Senam	4 klub
6	Pencak Silat	11 klub	20	Balap sepeda	1 klub
7	Catur	1 klub	21	Tinju	1 klub
8	Tenis Meja	1 klub	22	Menembak	1 klub
9	Panahan	1 klub	23	Karate	2 klub
10	Basket	2 klub	24	Sepatu Roda	5 klub
11	Bola Volly	2 klub	25	Drumband	42 klub
12	Sepak Bola	23 klub	26	Bilyard	5 klub
13	Sepak Takraw	10 klub	27	Sepak Bola Futsal	12 klub
14	Gulat	1 klub			

2. Jumlah Gedung Olahraga

Jumlah gedung olahraga di Kota Madiun Tahun 2019 antara lain :

- a. GOR Stadion Wilis
- b. GOR SMAN 1 Kota Madiun
- c. GOR SMAN 3 Kota Madiun
- d. GOR SMKN 2 Kota Madiun
- e. GOR Graha Cendekia

II. Aspek Pelayanan Umum

1. Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun Tahun 2019 sama dengan kondisi Tahun 2018, antara lain :

- a. Front Pemuda Kerakyatan
- b. Organisasi Generasi Muda "Pribumi"
- c. Organisasi Generasi Muda Pecinta Alam "Eskanda"
- d. Paguyuban Pakandayu
- e. Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
- f. Pramuka

2. Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 3 kegiatan, antara lain :

1. Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka
2. Lomba Gerak Jalan

3. Pembinaan putra putri berprestasi (kerjasama dengan TNI dan POLRI)

3. Jumlah kegiatan Olah raga

Jumlah kegiatan olahraga di Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 18 kegiatan, antara lain :

- 1) Lomba Bola voli kelurahan ;
- 2) Lomba bola voli pelajar SD, SMP ;
- 3) Lomba single event panahan pelajar SD, SMP ;
- 4) Lomba single event catur pelajar SD, SMP ;
- 5) Lomba single event renang pelajar SD, SMP ;
- 6) Lomba single event bulu angkis pelajar SD, SMP ;
- 7) Lomba single event sepak takraw pelajar SD, SMP ;
- 8) Lomba single event tenis meja pelajar SD, SMP ;
- 9) Lomba single event atletik pelajar SD, SMP ;
- 10) Lomba single event pencak silat pelajar SD, SMP ;
- 11) Lomba single event taekwondo pelajar SD, SMP ;
- 12) Lomba single event senam pelajar SD, SMP ;
- 13) Lomba single event tenis lapangan pelajar SD, SMP ;
- 14) Lomba single event karate pelajar SD, SMP ;
- 15) Lomba single event bola basket pelajar SD, SMP ;
- 16) Festival Seni Pencak Silat Nusantara ;
- 17) Lomba Bola Voli PKK ;
- 18) Charismatic 10K Run.

4. Gelanggang/ balai remaja

Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun Tahun 2019 masih sama dengan di Tahun 2018 sebanyak 3, antara lain :

1. GOR Parikesit
2. GOR SMAN 1 Kota Madiun
3. GOR SMAN 3 Kota Madiun

5. Lapangan olah raga

Lapangan olahraga di Kota Madiun Tahun 2019 masih sama dengan Tahun 2018 sebanyak 83 antara lain :

Lapangan	Lokasi	
Basket	1	SDN 02 Mojorejo
	2	SDN 05 Madiun Lor
	3	SMPN 03 Madiun
	4	SMPN 04 Madiun
	5	SMPN 05 Madiun
	6	SMPN 07 Madiun
	7	SMPN 08 Madiun
	8	SMPN 10 Madiun
	9	SMPN 11 Madiun
	10	SMPN 13 Madiun
	11	SMAN 01 Madiun
	12	SMAN 03 Madiun
	13	SMAN 05 Madiun
	14	SMKN 05 Madiun
	15	SMK PGRI 03 Madiun
Lompat Jauh	1	SDN Banjarejo
	2	SDN 02 Pandean
	3	SDN 01 Taman
	4	SDN 02 Mojorejo
	5	SDN 02 Manisrejo
	6	SDN 01 Klegen
	7	SDN 02 Klegen
	8	SDN 03 Klegen
	9	SDN 03 Nambangan Kidul
	10	SDN 04 Nambangan Kidul
	11	SDN 05 Madiun Lor
	12	SDN Ngegong
	13	SMPN 07 Madiun
	14	SMPN 08 Madiun
	15	SMPN 09 Madiun
	16	SMPN 11 Madiun
	17	SMAN 01 Madiun
	18	SMAN 03 Madiun
	19	SMAN 04 Madiun
	20	SMAN 05 Madiun
	21	SMKN 02 Madiun
	22	SMKN 04 Madiun
	23	SMKN 05 Madiun
Bulu Tangkis	1	SMPN 06 Madiun
	2	SMKN 02 Madiun
	3	Kelurahan Pandean
	4	Kelurahan Manisrejo

Lapangan	Lokasi
	5 Kelurahan Patihan
	6 Kelurahan Sogaten
	7 Kelurahan Kejuron
	8 Kelurahan Tawangrejo
Bola Voli	1 SDN Pilangbango
	2 SDN 02 Klegen
	3 SDN 02 Manisrejo
	4 SDN Banjarejo
	5 SMPN 04 Madiun
	6 SMAN 01 Madiun
	7 SMAN 04 Madiun
	8 SMAN 05 Madiun
	9 SMKN 02 Madiun
	10 SMKN 04 Madiun
	11 SMKN 05 Madiun
	12 SMPN 09 Madiun
Sepak Takraw	1 SMPN 07 Madiun
	2 SDN 03 Nambangan Kidul
	3 SDN 02 Pandean
	4 SDN 01 Manguharjo
Tennis	1 SMKN 01 Madiun
	2 SMKN 02 Madiun
	3 SMAN 01 Madiun
	4 SMAN 04 Madiun
	5 SMPN 01 Madiun
	6 SMPN 04 Madiun
Sepak Bola	1 Kelurahan Nambangan Kidul
	2 Kelurahan Demangan
	3 Kelurahan Pandean
	4 Kelurahan Winongo
	5 Kelurahan Rejomulyo
	6 Kelurahan Kanigoro
	7 Kelurahan Mojorejo
	8 Kelurahan Josenan 2 lapangan
	9 Kelurahan Manisrejo
	10 Kelurahan Pilangbango
	11 Kelurahan Madiun Lor
	12 Kelurahan Kejuron
	13 Kelurahan Tawangrejo
	14 Kelurahan Sogaten

6. Jumlah organisasi olahraga Tahun 2019 sebanyak 28 dengan jumlah tetap , sama dengan kondisi Tahun 2018.

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Bulu Tangkis	3 klub	15	Angkat Besi	3 klub
2	Tenis Lapangan	10 klub	16	Taekwondo	4 klub
3	Renang	2 klub	17	Panjat Tebing	2 klub
4	Atletik	1 klub	18	Judo	1 klub
5	Wushu	1 klub	19	Senam	4 klub
6	Pencak Silat	11 klub	20	Balap sepeda	1 klub
7	Catur	1 klub	21	Tinju	1 klub
8	Tenis Meja	1 klub	22	Menembak	1 klub
9	Panahan	1 klub	23	Karate	2 klub
10	Basket	2 klub	24	Sepatu Roda	5 klub
11	Bola Volly	2 klub	25	Drumband	42 klub
12	Sepak Bola	23 klub	26	Bilyard	5 klub
13	Sepak Takraw	10 klub	27	Sepak Bola Futsal	12 klub
14	Gulat	1 klub	28	KONI	1 klub

7. Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional Sejak Januari 2019, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah memberangkatkan para atlit berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat provinsi maupun nasional diantaranya cabang olahraga bola basket, pencak silat, Taekwondo dan masih banyak lagi cabang olahraga lainnya. Adapun Prestasi olahraga untuk Tahun 2019 di tingkat Nasional sebanyak 7 (tujuh) kejuaraan yaitu :

1. Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019:
 - a. 2 medali emas cabang olahraga atletik
 - b. 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw
 - c. 1 medali emas cabang olahraga pencak silat
 - d. 1 medali perunggu cabang olahraga pencak silat
 - e. 1 medali perunggu cabang olahraga catur

8. Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional Prestasi olahraga untuk Tahun 2019 di tingkat Nasional dan regional sebanyak 50 (lima puluh) kejuaraan yaitu :

- A. Kejuaraan PORPROV JATIM :
 - 1) 2 medali perunggu cabang olahraga angkat besi
 - 2) 1 medali perunggu cabang olahraga atletik (lompat jauh)
 - 3) 1 medali perunggu cabang olahraga billiard

- 4) 1 medali emas cabang olahraga gulat
- 5) 2 medali perunggu cabang olahraga gulat
- 6) 4 medali perunggu cabang olahraga judo
- 7) 1 medali perunggu cabang olahraga karate
- 8) 1 medali perak cabang olahraga karate
- 9) 4 medali perunggu cabang olahraga muathay
- 10) 1 medali perak cabang olahraga muathay
- 11) 2 medali emas cabang olahraga muathay
- 12) 1 medali perak cabang olahraga renang
- 13) 1 medali perunggu cabang olahraga senam
- 14) 3 medali perunggu cabang olahraga taekwondo
- 15) 2 medali perak cabang olahraga tenis meja
- 16) 1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja
- 17) 1 medali perak cabang olahraga tinju
- 18) 7 medali emas cabang olahraga jujitsu
- 19) 2 medali perak cabang olahraga jujitsu
- 20) 5 medali perunggu cabang olahraga jujitsu
- 21) 1 medali perak cabang olahraga judo beregu
- 22) 1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja beregu

B. Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019:

- 1) 2 medali emas cabang olahraga atletik
- 2) 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw
- 3) 1 medali emas cabang olahraga pencak silat

C. Jumlah peserta Olah Raga

Jumlah peserta event olahraga yang telah diselenggarakan di Tahun 2019 sebanyak 19.266 dari kegiatan berikut ini :

No	Perlombaan	Jumlah Peserta
1	Bola voli kelurahan	873 orang
2	Bola voli pelajar SD, SMP	760 orang
3	Single event panahan pelajar SD, SMP	310 orang
4	Single event catur pelajar SD, SMP	350 orang
5	Single event renang pelajar SD, SMP	242 orang
6	Single event bulu angkis pelajar SD, SMP	438 orang
7	Single event sepak takraw pelajar SD, SMP	651 orang
8	Single event tenis meja pelajar SD, SMP	278 orang
9	Single event atletik pelajar SD, SMP	4092 orang
10	Single event pencak silat pelajar SD, SMP	350 orang

No	Perlombaan	Jumlah Peserta
11	Single event taekwondo pelajar SD, SMP	300 orang
12	Single event senam pelajar SD, SMP	355 orang
13	Single event tenis lapangan pelajar SD, SMP	445 orang
14	Single event karate pelajar SD, SMP	442 orang
15	Single event bola basket pelajar SD, SMP	673 orang
16	Festival Seni Pencak Silat Nusantara	507 orang
17	Charismatic 10K Run	3000 orang
18	Gerak Jalan Kemerdekaan	3000 orang
19	Seleksi Paskibraka	850 orang
20	Pelatihan Putra Putri Berprestasi	550 orang
21	Workshop Pencak Silat	450 orang
22	Tour de Indonesia	350 orang

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan di **Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga** Kota Madiun pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	
1	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	1	Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan
		2	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
		3	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	3.659.350.000,00	3.522.136.788,00
1	Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan	959.350.000,00	917.226.392,00
	Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi	800 siswa	1.710
	Outcome : Jumlah kegiatan kepemudaan	3 event	3 event
2	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	2.500.000.000,00	2.408.567.396,00
	Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi	2000 orang	19.266 orang
	Outcome : Jumlah event olah raga yang diselenggarakan	4 event	18 event
3	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	200.000.000,00	196.343.000,00

No	Uraian	Target	Realisasi
	Output : Jumlah sarana prasarana olahraga yang diadakan	2 paket	2 paket
	Outcome : Jumlah event olahraga yang diselenggarakan	4 event	18 event

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kota Madiun memiliki banyak atlit yang potensial untuk dikembangkan bakat dan minat olahraganya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi dikarenakan untuk pembinaan dan pelatihan kepada para atlit belum terlalu optimal, maka diperlukan pembinaan dan pelatihan agar lebih mengasah keahliannya agar lebih bisa berprestasi baik tingkat provinsi, regional maupun nasional ;
2. Belum adanya penganggaran untuk pembinaan dan pelatihan 10 cabang olahraga unggulan.

Solusi :

1. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun memfasilitasi para atlit dengan melengkapi sarana prasarana olahraga secara bertahap pada setiap cabang olahraga serta memberikan sarana prasarana akomodasi bagi para atlit yang akan bertanding tingkat provinsi, regional maupun nasional ;
2. Telah disusunnya penganggaran Tahun 2020 untuk pembinaan dan pelatihan 10 cabang olahraga unggulan.

e. Penghargaan yang Diterima

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi
1	2 medali emas cabang olahraga atletik	PB Pasi Pusat
2	2 medali emas cabang olahraga sepak takraw	KONI Pusat
3	1 medali emas cabang olahraga pencak silat	KONI Pusat
4	2 medali perunggu cabang olahraga angkat besi	Dispora Provinsi Jawa Timur
5	1 medali perunggu cabang olahraga atletik (lompat jauh)	Dispora Provinsi Jawa Timur
6	1 medali perunggu cabang olahraga billiard	Dispora Provinsi Jawa Timur

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi
7	1 medali emas cabang olahraga gulat	Dispora Provinsi Jawa Timur
8	2 medali perunggu cabang olahraga gulat	Dispora Provinsi Jawa Timur
9	4 medali perunggu cabang olahraga judo	Dispora Provinsi Jawa Timur
10	1 medali perunggu cabang olahraga karate	Dispora Provinsi Jawa Timur
11	1 medali perak cabang olahraga karate	Dispora Provinsi Jawa Timur
12	4 medali perunggu cabang olahraga muathay	Dispora Provinsi Jawa Timur
13	1 medali perak cabang olahraga muathay	Dispora Provinsi Jawa Timur
14	2 medali emas cabang olahraga muathay	Dispora Provinsi Jawa Timur
15	1 medali perak cabang olahraga renang	Dispora Provinsi Jawa Timur
16	1 medali perunggu cabang olahraga senam	Dispora Provinsi Jawa Timur
17	3 medali perunggu cabang olahraga taekwondo	Dispora Provinsi Jawa Timur
18	2 medali perak cabang olahraga tenis meja	Dispora Provinsi Jawa Timur
19	1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja	Dispora Provinsi Jawa Timur
20	1 medali perak cabang olahraga tinju	Dispora Provinsi Jawa Timur
21	7 medali emas cabang olahraga jujitsu	Dispora Provinsi Jawa Timur
22	2 medali perak cabang olahraga jujitsu	Dispora Provinsi Jawa Timur
23	5 medali perunggu cabang olahraga jujitsu	Dispora Provinsi Jawa Timur
24	1 medali perak cabang olahraga judo ber regu	Dispora Provinsi Jawa Timur
25	1 medali peunggu cabang olahraga tenis meja ber regu	Dispora Provinsi Jawa Timur

19. URUSAN STATISTIK

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun juga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.93
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kota Madiun Tahun 2018 s.d. 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	%
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
19 Statistik					
19.1	Jumlah dokumen statistik Daerah yang tersedia	5	3	5	167%
19.2	Ada/tidaknya buku statistik tentang Kota Madiun	ada	ada	ada	ada
19.3	Dokumen Statistik daerah yang tersusun	3	2	3	150%

Sumber : Diskominfo Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Jumlah dokumen Statistik Daerah yang tersedia pada tahun 2019 adalah sebanyak 5 (lima) dokumen yaitu :
 - a. Madiun Dalam Angka Tahun 2019;
 - b. PDRB Kota Madiun Tahun 2019;
 - c. Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kota Madiun Tahun 2019;
 - d. Data Demografi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Kota Madiun Tahun 2019;
 - e. Data Evaluasi Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019;
2. Buku Statistik tentang Kota Madiun, ada yaitu Buku Madiun Dalam Angka yang disusun dan dipublikasi setiap tahunnya.
3. Dokumen Statistik daerah yang tersusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) dokumen, yaitu :

- a. Dokumen Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kota Madiun tahun 2019;
- b. Dokumen Statistik Sektoral Kota Madiun tahun 2019;
- c. Data Evaluasi Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Dinas Kominfo Kota Madiun pada tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	1 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

c. Realisasi program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Statistik di Dinas Kominfo Kota Madiun pada tahun 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	388.987.000,00	388.635.824,00
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	388.987.000,00	388.635.824,00
	Output : Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	3 dokumen
	Outcome : Persentase data statistik Daerah yang dipublikasikan	100%	100%

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
2. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah

Solusi :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan BPS dalam penyediaan data statistik daerah;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang terstruktur dengan seluruh Perangkat Daerah dalam pengumpulan dan penyusunan data statistik daerah, sehingga tercipta data terbuka pemerintah;
3. Melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kewenangan urusan statistik.

e. Penghargaan yang diterima

-

20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BUDAYA

a. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Budaya pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun sesuai dengan RPJMD 2014-2019 dan Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun tahun 2014-2019 bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pendidikan berbasis karakter dan pengembangan seni budaya lokal yang mempunyai sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas seni dan budaya daerah dalam rangka pengembangan kesenian daerah khususnya kesenian lokal Kota Madiun.

Dengan memiliki kesenian lokal yang merupakan salah satu cara untuk *nguri-uri* kebudayaan jawa dapat menumbuhkembangkan pendidikan karakter yang berdasarkan pada budi pekerti yang luhur dari para leluhur bagi semua peserta didik sehingga dapat membentengi diri arus globalisasi yang serba terbuka. Diharapkan nanti dengan perkembangan budaya lokal dapat meningkatkan akses ke tingkat nasional dan bahkan internasional.

Berikut perkembangan capaian kinerja sasaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Budaya Kota Madiun :

Tabel III.94
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Budaya di Kota Madiun Tahun 2018- 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	5	6	7	8
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
C	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga				
1	Kebudayaan				
1.1	Jumlah grup kesenian	93	93	97	104
1.2	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	100
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
20	Kebudayaan				
20.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	100	100	100	100
20.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	100	100	100	100
20.3	Jumlah Seni Budaya, Benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan	21	21	21	100
20.4	Jumlah Prestasi di bidang Seni dan Kebudayaan	12	7	8	115

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	5	6	7	8
20.5	Seni Budaya Lokal yang dikompetisikan	40	35	42	120
20.6	Jumlah Budaya Lokal yang dipentaskan	75	62	70	113
20.7	Jumlah Budaya Lokal yang dilestarikan	25	25	25	100
20.8	Jumlah Penonton dalam Pentas seni	81.100	22.150	38.473	174

Sumber Data: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Grup Kesenian

Jumlah grup kesenian Tahun 2019 sebanyak 97 yaitu :

No	Grup Kesenian	Jumlah	No	Grup Kesenian	Jumlah
1	Musik Rock	1 grup	12	Campursari	10 grup
2	Elektone	1 grup	13	Keroncong	6 grup
3	Barongsai	2 grup	14	Reog	22 grup
4	Theater	2 grup	15	Ketoprak Ludruk	1 grup
5	Jaranan	4 grup	16	Hadroh	4 grup
6	Ketoprak	3 grup	17	Dangdut	6 grup
7	Band	7 grup	18	Karawitan	6 grup
8	Tari dan Musik	6 grup	19	Dalang	4 grup
9	Gembrung	4 grup	20	Sanggar seni	3 grup
10	Cokekan	1 grup	21	Wayang orang	2 Grup
11	Dongkretek	2 grup			

2. Jumlah Gedung Kesenian

Jumlah gedung kesenian sampai dengan Tahun 2019 belum mengalami penambahan yaitu sebanyak 1 (satu) buah yang bernama Gedung Fatimah yang beralamat di Jalan Ringin Kota Madiun.

3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada Tahun 2019 sebanyak 58 (lima puluh delapan) festival yaitu :

1. Festival Vokal Lagu Madiun Nyaman dan Damai
2. Festival Dalang Lanjutan
3. Festival Dalang Pemula
4. Festival Vokal Sindenan
5. Festival Upacara Adat
6. Festival Seni Karawitan Tingkat Kota

7. Festival Dongeng Kesejarahan
 8. Festival Geguritan
 9. Festival Gembrung
 10. Festival Syubahanul Wathon
 11. Festival Tari Sufi
 12. Festival Puji-Pujian
 13. Festival Hadroh Banjari
 14. Festival Qosidah Modern
 15. Festival Wayang Kulit Kecamatan Manguharjo
 16. Festival Lagu Koes Plus Kecamatan Kartoharjo
 17. Festival Wayang Kulit Kecamatan Taman
 18. Festival Reog dan Karawitan Kelurahan Tawangrejo
 19. Festival Reog dan Gambyong Kelurahan Kelun
 20. Festival Reog dan Campursari Kelurahan Sukosari
 21. Festival Reog dan Uyon-Uyon Kelurahan Kartoharjo
 22. Festival Reog dan Campursari Kelurahan Oro Oro Ombo
 23. Festival Reog dan Campursari Kelurahan Nambangan Kidul
 24. Festival Reog Kelurahan Demangan
 25. Festival Reog Kelurahan Nambangan Lor
 26. Festival Reog Kelurahan Banjarejo
 27. Festival Tari, Reog dan Campursari Kelurahan Pangongangan
 28. Festival Gembrung, Reog, Hadroh Kelurahan Kuncen
 29. Festival Reog dan Jaranan Kelurahan Pilangbango
 30. Festival Reog dan Jaranan Kelurahan Mojorejo
 31. Festival Reog, Campursari dan Jaranan Kelurahan Madiun Lor
 32. Festival Uyon-Uyon, Gambyongan, dan Campursari Kelurahan Sogaten
 33. Festival Reog, Uyon-Uyon, Barongsai dan Dongkreng Kelurahan Pandean
 34. Festival Reog dan Tari Kelurahan Manguharjo
 35. Festival Wayang Kulit Kelurahan Patihan
 36. Festival Reog, Campursari, Tari, dan Hadroh Kelurahan Manisrejo
 37. Festival Campursari dan Reog Kelurahan Ngegong
 38. Festival Reog Kelurahan Josenan
 39. Festival Reog dan Campursari Kelurahan Klegen
-

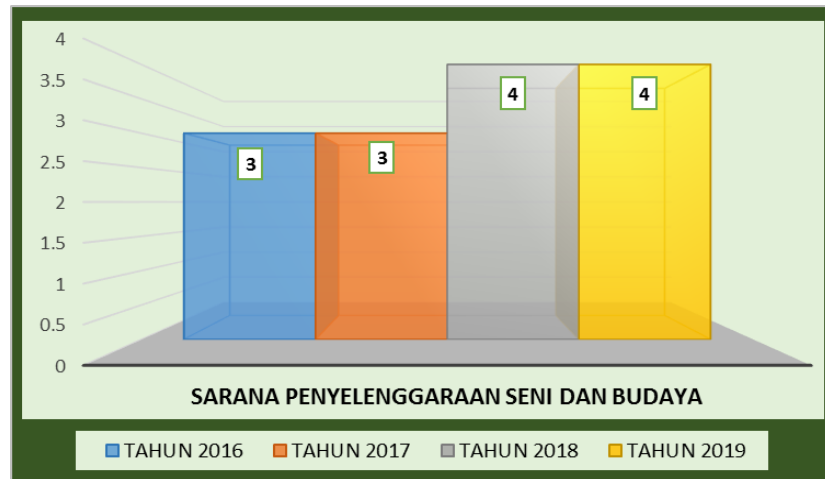
40. Festival Reog Kelurahan Kanigoro
41. Festival Reog Kelurahan Rejomulyo
42. Festival Band Pelajar
43. Festival Band Umum
44. Festival Lagu Anak
45. Festival Lagu Nasional
46. Festival Lagu Daerah
47. Festival Vokal Keroncong Pelajar
48. Festival Campursari Pelajar
49. Festival Vokal Keroncong Umum
50. Festival Campursari Umum
51. Festival Wayang Kulit
52. Festival Grebeg Maulud
53. Festival Perayaan Malam Tahun Baru
54. Festival Pentas Seni Periodik
55. Festival Campursari di Madioen Tempo Doeloe
56. Festival Dangdut di Madioen Tempo Doeloe
57. Festival Lagu-Lagu Koes Plus di Madioen Tempo Doeloe
58. Festival Band Nusantara di Madioen Tempo Doeloe



4. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Tahun 2019 sama dengan Tahun 2018 sebanyak 4, terdiri dari :

1. Seperangkat gamelan jawa pelog slendro
2. Seperangkat alat band
3. Seperangkat gamelan campursari
4. Seperangkat alat musik band modern



5. Jumlah seni budaya, benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Jumlah seni budaya, benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada Tahun 2019 sebanyak 21 (dua puluh satu) bangunan dan benda antara lain :

1. Makam dan Masjid Kuno Taman
2. Makam dan Masjid Kuno Kuncen
3. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Gamaliel Madiun
4. Kompleks Bakorwil
5. Kompleks Gereja Santo Cornelius
6. Kompleks Santo Bernadus
7. Rumah Kapiten Cina
8. SDN 05 Madiun Lor
9. SMPN 01 Kota Madiun
10. SMPN 13 Kota Madiun
11. SMPN 03 Kota Madiun
12. Stasiun Madiun
13. Balaikota
14. SDN 01 Kartoharjo
15. SDN 02 Kartoharjo
16. Rumah Keluarga Andi Wibisono
17. Klenteng Hwie Ing Kiong
18. Menara Air Sleko
19. SMAN 01 Kota Madiun
20. Kompleks Pabrik Gula Rejoagung
21. Kompleks Rumah Dinas Pabrik Gula Rejoagung

6. Jumlah prestasi di bidang seni dan kebudayaan

Jumlah prestasi di bidang seni dan budaya di Tahun 2019 diperoleh melalui event yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
2. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
3. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
4. Juara Penyaji Sabet Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
5. Juara Penyaji Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
6. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
7. Juara 3 Lomba Baca Puisi Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur
8. Juara 3 Lomba Teater Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur

7. Seni Budaya Lokal yang dikompertisikan

Seni budaya lokal yang dikompertisikan pada Tahun 2019 sebanyak 42 (empat puluh dua) seni, Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Tahun 2018 terdiri dari :

1. Festival Vokal Keroncong kategori pelajar
 2. Festival Vokal Campursari kategori pelajar
 3. Festival Lagu Anak
 4. Festival Lagu Nasional
 5. Festival Lagu Daerah
 6. Festival Band kategori pelajar
 7. Festival Band kategori umum
 8. Festival Gembrung
 9. Festival Syubahanul Wathon
 10. Festival Tari Sufi
 11. Festival Puji-Pujian
 12. Festival Hadroh Banjari
-

13. Festival Qosidah Modern
 14. Festival Dalang Anak tingkat kota
 15. Festival Geguritan
 16. Festival Dongeng Kesejarahan
 17. Festival Seni Karawitan tingkat kota
 18. Festival Upacara Adat
 19. Festival Vokal Sindenan
 20. Festival Dalang Pemula
 21. Festival Dalang Lanjutan
 22. Festival Vokal Lagu Madiun Nyaman dan Damai
 23. Festival Karawitan Anak tingkat provinsi
 24. Festival Karya Tari tingkat provinsi
 25. Festival Dalang Bocah tingkat provinsi
 26. Festival Dalang Bocah tingkat nasional
 27. Festival Seni Lukis Kertas (PSP KU 7-12)
 28. Festival Seni Patung (PSP KU 7-12)
 29. Festival Samproh (PSP KU 7-12)
 30. Festival Paduan Suara (PSP KU 7-12)
 31. Festival Cipta dan Baca Puisi (PSP KU 7-12)
 32. Festival Theater (PSP KU 7-12)
 33. Festival Tari (PSP KU 7-12)
 34. Festival Lukis Poster (PSP KU 13-15)
 35. Festival Paduan Suara (PSP KU 13-15)
 36. Festival Theatre Tradisi (PSP KU 13-15)
 37. Festival Tari (PSP KU 13-15)
 38. Festival Cipta dan Baca Puisi (PSP KU 13-15)
 39. Festival Design Tekstil (PSP KU 16-18)
 40. Festival Paduan Suara (PSP KU 16-18)
 41. Festival Musikalisasi Puisi (PSP KU 16-18)
 42. Festival Theater (PSP KU 16-18)
8. Jumlah Budaya Lokal yang dipentaskan
- Jumlah budaya lokal yang dipentaskan di Tahun 2019 antara lain :
1. Festival Vokal Lagu Madiun Nyaman dan Damai
 2. Festival Dalang Lanjutan
 3. Festival Dalang Pemula
-

4. Festival Vokal Sindenan
 5. Festival Upacara Adat
 6. Festival Seni Karawitan Tingkat Kota
 7. Festival Dongeng Kesejarahan
 8. Festival Geguritan
 9. Festival Gembrung
 10. Festival Syubahanul Wathon
 11. Festival Tari Sufi
 12. Festival Puji-Pujian
 13. Festival Hadroh Banjari
 14. Festival Qosidah Modern
 15. Festival Wayang Kulit Kecamatan Manguharjo
 16. Festival Lagu Koes Plus Kecamatan Kartoharjo
 17. Festival Wayang Kulit Kecamatan Taman
 18. Festival Reog dan Karawitan Kelurahan Tawangrejo
 19. Festival Reog dan Gambyong Kelurahan Kelun
 20. Festival Reog dan Campursari Kelurahan Sukosari
 21. Festival Reog dan Uyon-Uyon Kelurahan Kartoharjo
 22. Festival Reog dan Campursari Kelurahan Oro Oro Ombo
 23. Festival Reog dan Campursari Kelurahan Nambangan Kidul
 24. Festival Reog Kelurahan Demangan
 25. Festival Reog Kelurahan Nambangan Lor
 26. Festival Reog Kelurahan Banjarejo
 27. Festival Tari, Reog dan Campursari Kelurahan Pangongangan
 28. Festival Gembrung, Reog, Hadroh Kelurahan Kuncen
 29. Festival Reog dan Jaranan Kelurahan Pilangbango
 30. Festival Reog dan Jaranan Kelurahan Mojorejo
 31. Festival Reog, Campursari dan Jaranan Kelurahan Madiun Lor
 32. Festival Uyon-Uyon, Gambyongan, dan Campursari Kelurahan Sogaten
 33. Festival Reog, Uyon-Uyon, Barongsai dan Dongkrek Kelurahan Pandean
 34. Festival Reog dan Tari Kelurahan Manguharjo
 35. Festival Wayang Kulit Kelurahan Patihan
 36. Festival Reog, Campursari, Tari, dan Hadroh Kelurahan Manisrejo
-

37. Festival Campursari dan Reog Kelurahan Ngegong
 38. Festival Reog Kelurahan Josenan
 39. Festival Reog dan Campursari Kelurahan Klegen
 40. Festival Reog Kelurahan Kanigoro
 41. Festival Reog Kelurahan Rejomulyo
 42. Festival Band Pelajar
 43. Festival Band Umum
 44. Festival Lagu Anak
 45. Festival Lagu Nasional
 46. Festival Lagu Daerah
 47. Festival Vokal Keroncong Pelajar
 48. Festival Campursari Pelajar
 49. Festival Vokal Keroncong Umum
 50. Festival Campursari Umum
 51. Festival Wayang Kulit
 52. Festival Grebeg Maulud
 53. Festival Perayaan Malam Tahun Baru di 2 tempat
 54. Festival Pentas Seni Periodik
 55. Festival Campursari di Madioen Tempo Doeloe
 56. Festival Dangdut di Madioen Tempo Doeloe
 57. Festival Lagu-Lagu Koes Plus di Madioen Tempo Doeloe
 58. Festival Band Nusantara di Madioen Tempo Doeloe
 59. Sarasehan Budaya
 60. Pelatihan Bahasa Jawa
 61. Pementasan Kesenian di TMII
 62. Pelantikan Walikota Madiun Baru
 63. Aksi Cah Mediunan
 64. Pentas Seni Periodik sebanyak 7 kali
 65. Panggung Gembira INDOSIAR
 66. Upacara Hari Jadi Kota Madiun
 67. Charismatic Night Carnival
 68. Kenduri Akbar
 69. Ziarah Makam
 70. Sholawat 1000 rebana
-

9. Jumlah Budaya Lokal yang dilestarikan

Jumlah budaya lokal yang dilestarikan di Tahun 2018 adalah dengan nguri-uri budaya yang ada di masing-masing kelurahan dalam acara bersih desa yang diselenggarakan di 25 kelurahan antara lain :

1. Kelurahan Manguharjo
2. Kelurahan Pangongangan
3. Kelurahan Ngegong
4. Kelurahan Sogaten
5. Kelurahan Patihan
6. Kelurahan Madiun Lor
7. Kelurahan Nambangan Kidul
8. Kelurahan Pilangbango
9. Kelurahan Nambangan Lor
10. Kelurahan Kartoharjo
11. Kelurahan Tawangrejo
12. Kelurahan Oro Oro Ombo
13. Kelurahan Sukosari
14. Kelurahan Kelun
15. Kelurahan Klegen
16. Kelurahan Pandean
17. Kelurahan Mojorejo
18. Kelurahan Banjarejo
19. Kelurahan Demangan
20. Kelurahan Josenan
21. Kelurahan Kuncen
22. Kelurahan Manisrejo
23. Kelurahan Tawangrejo
24. Kelurahan Kanigoro
25. Kelurahan Winongo

10. Jumlah Penonton dalam Pentas seni

Jumlah penonton dalam pentas seni yang telah diselenggarakan selama Tahun 2019 sebanyak 63.450 orang dari kegiatan :

No	Festival	Jumlah Penonton
1	Vokal Lagu Madiun Nyaman dan Damai	128 orang
2	Dalang Lanjutan	209 orang
3	Dalang Pemula	241 orang

No	Festival	Jumlah Penonton
4	Vokal Sindenan	89 orang
5	Upacara Adat	247 orang
6	Seni Karawitan Tingkat Kota	329 orang
7	Dongeng Kesejarahan	102 orang
8	Geguritan	96 orang
9	Gembrung	375 orang
10	Syubahanul Wathon	285 orang
11	Tari Sufi	300 orang
12	Puji-Pujian	200 orang
13	Hadroh Banjari	300 orang
14	Qosidah Modern	350 orang
15	Wayang Kulit Kecamatan Manguharjo	1000 orang
16	Lagu Koes Plus Kecamatan Kartoharjo	1000 orang
17	Wayang Kulit Kecamatan Taman	1000 orang
18	Reog dan Karawitan Kelurahan Tawangrejo	500 orang
19	Reog dan Gambyong Kelurahan Kelun	500 orang
20	Reog dan Campursari Kelurahan Sukosari	500 orang
21	Reog dan Uyon-Uyon Kelurahan Kartoharjo	500 orang
22	Reog dan Campursari Kelurahan Oro Oro Ombo	500 orang
23	Reog dan Campursari Kelurahan Nambangan Kidul	500 orang
24	Reog Kelurahan Demangan	500 orang
25	Reog Kelurahan Nambangan Lor	500 orang
26	Reog Kelurahan Banjarejo	500 orang
27	Tari, Reog dan Campursari Kel. Pangongangan	500 orang
28	Gembrung, Reog, Hadroh Kelurahan Kuncen	500 orang
29	Reog dan Jaranan Kelurahan Pilangbango	500 orang
30	Reog dan Jaranan Kelurahan Mojorejo	500 orang
31	Reog, Campursari dan Jaranan Kel. Madiun Lor	500 orang
32	Uyon-Uyon, Gambyong, Campursari Kel. Sogaten	500 orang
33	Reog,Uyon-Uyon,Barongsai,Dongkrek Kel. Pandean	500 orang
34	Reog dan Tari Kelurahan Manguharjo	500 orang
35	Wayang Kulit Kelurahan Patihan	500 orang
36	Reog, Campursari, Tari, dan Hadroh Kel. Manisrejo	500 orang
37	Campursari dan Reog Kelurahan Ngegong	500 orang
38	Reog Kelurahan Josenan	500 orang
39	Reog dan Campursari Kelurahan Klegen	500 orang
40	Reog Kelurahan Kanigoro	500 orang
41	Reog Kelurahan Rejomulyo	500 orang
42	Band Pelajar	700 orang
43	Band Umum	750 orang
44	Lagu Anak	400 orang
45	Lagu Nasional	300 orang
46	Lagu Daerah	300 orang
47	Vokal Keroncong Pelajar	100 orang
48	Campursari Pelajar	100 orang
49	Vokal Keroncong Umum	100 orang

No	Festival	Jumlah Penonton
50	Campursari Umum	100 orang
51	Wayang Kulit 2 kali	2000 orang
52	Grebeg Maulud	400 orang
53	Perayaan Malam Tahun Baru di 2 tempat	2000 orang
54	Pentas Seni Periodik 8 kali	1600 orang
55	Campursari di Madioen Tempo Doeloe	300 orang
56	Dangdut di Madioen Tempo Doeloe	400 orang
57	Lagu-Lagu Koes Plus di Madioen Tempo Doeloe	200 orang
58	Band Nusantara di Madioen Tempo Doeloe	400 orang
59	Sarasehan Budaya	100 orang
60	Pelatihan Bahasa Jawa	100 orang
61	Pementasan Kesenian di TMII	400 orang
62	Pelantikan Walikota Madiun Baru	1000 orang
63	Aksi Cah Mediunan	1000 orang
64	Panggung Gembira INDOSIAR	4000 orang
65	Upacara Hari Jadi Kota Madiun	400 orang
66	Charismatic Night Carnival	2000 orang
67	Kenduri Akbar	600 orang
68	Ziarah Makam	100 orang
69	Sholawat 1000 rebana	400 orang

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Budaya yang dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
		2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
		3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
		2 Kegiatan Pembangunan Gedung
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1 Festival Seni
		2 Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya
		3 Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Budaya yang dilaksanakan **Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun** pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.310.000.000,00	1.193.364.732,00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.010.000.000,00	898.366.218,00
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket
	Outcome : Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	100 %	100 %
2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	300.000.000,00	294.998.514,00
	Output : Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	35 kali	81 kali
	Outcome : Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	100 %	100 %
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	725.000.000,00	258.395.777,00
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	189.777.013,00
	Output : Jumlah gedung	2 gedung	2 gedung
	Outcome : Prosentase barang-barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	75.000.000,00	47.361.764,00
	Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	22 unit sepeda motor dan 2 unit mobil	22 unit sepeda motor dan 2 unit mobil
	Outcome : Prosentase barang-barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	50.000.000,00	21.257.000,00
	Output : Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket
	Outcome : Prosentase barang-barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	70.000.000,00	14.000.000,00
1	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	20.000.000,00	14.000.000,00
	Output : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	1 paket
	Outcome : Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
2	Kegiatan Pembangunan Gedung	50.000.000,00	0,00
	Output : Jumlah dokumen DED	1 dokumen	1 dokumen

No	Uraian	Target	Realisasi
	Panggung permanen		
	Outcome : Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000,00	24.493.484,00
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	24.493.484,00
	Output : Jumlah dokumen	6	8
	Outcome : Prosentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Disbudparpora	100 %	134 %
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	5.889.912.723,00	5.769.989.038,00
1	Festival Seni	1.180.000.000,00	1.150.975.433,00
	Output : Jumlah festival seni yang diselenggarakan	8 festival	23 festival
	Outcome : Jumlah festival seni yang diselenggarakan	8 festival	23 festival
2	Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya	250.000.000,00	211.950.000,00
	Output : Jumlah bangunan/benda cagar budaya yang dilestarikan	2 unit	2 unit
	Outcome : Jumlah bangunan/benda cagar budaya yang dilestarikan	2 unit	2 unit
3	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	4.459.912.723,00	4.407.350.918,00
	Output : Jumlah pagelaran seni budaya yang dilaksanakan	30 pagelaran	54 pagelaran
	Outcome : Jumlah pagelaran seni budaya yang dilaksanakan	30 pagelaran	54 pagelaran

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum adanya pelimpahan wewenang baik asset maupun kepegawaian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sedangkan di dalam APBD telah disiapkan anggarannya baik untuk gaji Tenaga Kontrak dan Gaji Tenaga Upahan nya serta pemeliharaan GOR, Stadion dan Wisma Haji.
2. Kota Madiun memiliki kurang lebih ada 146 benda/bangunan yang diduga cagar budaya, namun benda/bangunan tersebut ada kendala dalam pelestarian dan penjagaannya dikarenakan masih menunggu proses ketetapan Kepala Daerah untuk benda/bangunan tersebut menjadi cagar budaya yang dipelihara dan dirawat oleh Pemerintah

Kota Madiun, sehingga belum optimal dalam pemeliharaan cagar budaya yang ada di Kota Madiun yang bisa lebih menarik wisatawan

Solusi :

1. Seiring dengan telah dilimpahkannya wewenang dalam kepengurusan GOR, Stadion dan Wisma Haji dan telah dilantiknya Pejabat yang berwenang mengurus GOR, Stadion dan Wisma Haji maka telah kami siapkan penganggaran untuk penggajian pegawai nya baik Tenaga Kontrak dan Tenaga Upahan serta anggaran untuk pemeliharaannya.
2. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama Masjid dan Makam Kuncen serta Masjid dan Makam Taman agar lebih terawat dan menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya serta berusaha untuk melakukan penelitian keabsahan benda/bangunan yang diduga cagar budaya yang masih tersisa untuk ditetapkan sebagai benda/bangunan cagar budaya yang bisa dilestarikan.

e. Penghargaan yang diterima

1. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
 2. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
 3. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
 4. Juara Penyaji Sabet Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
 5. Juara Penyaji Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
 6. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
 7. Juara 3 Lomba Baca Puisi Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur
 8. Juara 3 Lomba Teater Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur
-

21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, urusan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang dilaksanakan Dinas Kominfo pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan
1	program pengembangan tata kelola persandian	1 Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Persandian

c. Realisasi program dan Kegiatan

Realisasi program dan Kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kota Madiun tahun 2018 adalah :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pengembangan tata kelola persandian	150.000.000,00	132.637.946,00
	1 Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Persandian	150.000.000,00	132.637.946,00
	Output : Jumlah peserta pelatihan	34 OPD	34 OPD
	Outcome : Persentase Perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian	100%	100%

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
4. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

Solusi :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian;
2. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam bidang persandian.

22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan Misi di atas pada Bidang Urusan Perpustakaan dengan Misi “ **Mengembangkan Layanan Informasi Berbasis Pustaka Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi** ” dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca

Sasaran : Meningkatnya Masyarakat Gemar Membaca

Indikator tujuan dan sasaran : Prosentase Pengunjung Perpustakaan

Target 2019 : 22,19% atau 39.500 org

Rumus tujuan dan sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Perpustakaan selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah Orang dalam Populasi yg harus dilayani}} \times 100\%$$

* Jumlah Orang dlm Populasi yg harus dilayani: (Umur 5 th - 65 th) kurang lebih = 176.193 jiwa

Adapun perkembangan indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.95
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
21 Perpustakaan					
21.1	Jumlah perpustakaan	37	36	36	100%
21.2	Jumlah pengunjung perpustakaan	56,648	26,600	81.284	143%
21.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	49.172	45.255	51.986	106%
21.4	Persentase Peningkatan Jumlah Anggota Perpustakaan	25,23	8,76	15,43	176%
21.5	Persentase Pengunjung Perpustakaan	32,03	15	45,95	306%

Berdasarkan tabel diatas untuk indikator kinerja :

1. Jumlah Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan tidak mengalami penambahan sejak tahun 2015 sebanyak 37 unit perpustakaan Umum Kota Madiun, 3 Perpustakaan Kecamatan, 27 Perpustakaan Kelurahan dan 6 Taman Bacaan yang berada di 6 Kelurahan.

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2019 dengan target akhir RPJMD sebesar 26.600 orang tercapai 81.284 orang, capaian tersebut dipengaruhi dengan adanya kunjungan perpustakaan dari sekolah-sekolah, tambahan jam layanan hari Sabtu dan Minggu, kunjungan Rumah Pintar secara berkala dari TK dan PAUD se Kota Madiun serta adanya Layanan Perpustakaan Keliling dan Bis Pintar.

3. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah Koleksi buku pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun per 31 Desember 2019 sebanyak 51.986 eksemplar dengan target Tahun 2019 sebanyak 45.255 eksemplar.

4. Persentase Peningkatan Jumlah Anggota Perpustakaan

Pada tahun ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 jumlah anggota baru mengalami kenaikan dibandingkan pada periode yang sama (1 januari-31 Desember 2018), yakni pada tahun 2018 anggota

baru terdaftar sebanyak 4.322 orang. Sedangkan pada tahun 2019 tercatat anggota baru sebanyak 4.989 orang, mengalami kenaikan sebanyak 667 orang atau 15,43 % dibandingkan tahun 2018, capaian tersebut telah melebihi target tahun 2019 sebesar 8,76 %.

5. Prosentase Pengunjung Perpustakaan

Dengan adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dan kunjungan Rumah Pintar secara berkala serta adanya Layanan Perpustakaan Keliling dan Bis Pintar dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang tahun 2019 ditargetkan sebanyak 26.600 orang terealisasi 81.284 orang atau sebesar 45,95 % dihadapkan dengan populasi yang harus dilayani sebesar 176.193 orang.

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1	Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
		2	Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca
		3	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka dan Perbaikan Buku Perpustakaan Umum Daerah

c. Realisasi program dan Kegiatan

Realisasi program kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	669.922.304,00	600.289.187,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	509.922.304,00	440.414.847,00
	Output : Jumlah Peralatan	1	1
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160.000.000,00	159.874.340,00
	Output : Jumlah Koordinasi	135	94
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah	186.902.000,00	173.706.550,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	75.000.000,00	74.526.850,00
	Output : Jumlah Gedung	2	2
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	66.902.000,00	54.179.700,00
	Output : Jumlah Kendaraan yang dipelihara	22	22
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	45.000.000,00	45.000.000,00
	Output : Jumlah Sarana Prasarana yang dipelihara	90	86
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	518.000.000,00	497.343.540,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	518.000.000,00	497.343.540,00
	Output : Jumlah Paket		
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.835.200,00	32.910.204,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	33.835.200,00	32.910.204,00
	Output : Dokumen	10	10
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
5	program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1.356.996.880,00	1.198.025.204,00
1	Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	680.264.400,00	641.816.694,00
	Output : Jumlah Sosialisasi dan Promosi	16	16
	Outcome : Persentase Pengunjung Perpustakaan	22,19%	45,95%
2	Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	379.732.480,00	266.294.405,00
	Output : Jumlah Pengelola Perpustakaan	36	36
	Outcome : Persentase Pengunjung Perpustakaan	22,19%	45,95%
3	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka dan Perbaikan Buku Perpustakaan Umum Daerah	297.000.000,00	289.914.205,00
	Output Jumlah Bahan Pustaka	2.400	3.787
	Outcome : Persentase Pengunjung Perpustakaan	22,19%	45,95%

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

1. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan.
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Perpustakaan
3. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan
4. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi
5. Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal.

Solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programer pengolahan
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan;
4. Meningkatkan Jumlah Bahan Pustaka berupa konvensional dan Digital baik kualitas maupun kuantitas

23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

a. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan Misi di atas pada Bidang Urusan Kearsipan dengan Misi **“Memberdayakan dan melestarikan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan”** dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Pengelolaan Arsip

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Arsip In Aktif

Indikator tujuan dan sasaran : Prosentase Unit Kearsipan Yg Menyerahkan Arsip In Aktifnya

Target 2019 : 41,10 %

Rumus tujuan dan sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah Unit Kearsipan Yg Menyerahkan Arsip In Aktifnya}}{\text{Jumlah Unit Kearsipan}} \times 100\%$$

* Jumlah Unit Kearsipan (SKPD+Kelurahan+Sekolah) = 131 Unit Kearsipan

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.96
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Madiun Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
22 Kearsipan					
22.1	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang mendapatkan pelatihan	965	200	1165	583%
22.2	Jumlah Berkas Arsip in aktif yang dikelola	53,613	46,671	57.615	107%
22.3	Persentase Unit kearsipan yang menyerahkan arsip in aktifnya	43.51%	41.10%	48%	110%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas untuk indikator kinerja :

1. Jumlah SDM pengelola kearsipan

Jumlah SDM pengelola kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang mendapatkan pelatihan dan pengetahuan tentang pengelolaan arsip secara baku sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 1.165 orang atau telah mencapai 583%.

2. Jumlah Berkas Arsip in aktif yang dikelola

Jumlah berkas arsip in aktif yang dikelola pada depo arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 57.615 berkas yang berasal dari 57 unit kearsipan atau telah mencapai 107%

3. Persentase Unit kearsipan yang menyerahkan arsip in aktifnya

Persentase unit kearsipan yang menyerahkan arsip in aktifnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,9% dari yang di targetkan yaitu 41,10% terealisasi 48%. Hal ini disebabkan banyaknya OPD atau pencipta arsip yang menyerahkan arsip inaktifnya ke Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2019, adalah :

No	Program	Kegiatan	
1	program penyelamatan, peningkatan SDM dan layanan arsip daerah	1	Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
		2	Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

c. Realisasi program dan Kegiatan

Realisasi program kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2019, adalah :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program penyelamatan, peningkatan SDM dan layanan arsip daerah	474.719.560,00	396.770.373
1	Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	238.846.280,00	211.956.996

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah Unit Kearsipan	2 unit kearsipan	5 unit kearsipan
	Outcome :Jumlah berkas Arsip In Aktif yang dikelola	46.671 berkas	57.615 berkas
2	Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	235.873.280,00	184.813.377
	Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelola Kearsipan	200 orang	200 orang
	Outcome : Jumlah berkas Arsip In Aktif yang dikelola	46.671 berkas	57.615 berkas

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

1. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan maupun Kearsipan.
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Kearsipan
3. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kearsipan
4. Belum semua perangkat daerah memiliki unit pengelola arsip tersendiri sehingga keberadaan arsip baik dinamis dan statis belum mendapatkan penanganan secara khusus;
5. Kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan rendah. Pengadaan formasi pegawai belum mengacu kebutuhan personil sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan;
6. Fasilitas-fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di depo arsip dan unit kearsipan;
7. Kemampuan SDM pengelolaan kearsipan belum optimal.

Solusi :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programer pengolahan
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya kearsipan

B. Urusan Wajib yang dilaksanakan

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

a. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di Kota Madiun berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian dengan sasaran stabilnya produksi pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Secara garis besar, indikator utama dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan petani tersebut dihitung dengan indikator nilai tukar petani. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran stabilnya produksi pertanian dihitung menggunakan indikator produksi tanaman pangan pajale (padi, jagung, kedelai) dan produksi peternakan (daging).

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.97

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di Kota Madiun Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
C Urusan Pemerintahan Pilihan					
25 Pertanian					
25.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (persentase capaian produktivitas padi terhadap target RPJMD)	104	96	104	108,3
25.2	Cakupan bina kelompok petani	100	100	100	100
25.3	jumlah populasi ternak	85.813	82.362	89.052	108,1
25.4	jumlah hewan ternak yang halal dipotong per tahun (sapi dan kambing)	3.203	1.950	3.007	154,2
25.5	Rata-rata produktivitas sapi perah per ekor per hari (L)	11,67	11	11,67	106
25.6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	0,75	0,8	0,82	103
25.7	Rata-rata Peningkatan Pendapatan Petani Per Hektar	5.607.000	4.300.000	5.699.550	132,5
25.8	Jumlah Produk Pertanian Olahan yang dipasarkan	6	5	6	120%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
25.9	Jumlah Kelompok Petani	39	39	39	100
25.10	Jumlah Populasi Ternak dan peliharaan Kota Madiun yang mendapatkan pengobatan dan Vaksinasi	3.615	1.310	1.636	124,9
25.11	Produksi Padi Per Hektar	7,2	6,94	7,21	103,9
25.12	Jumlah Produksi daging	1.828,40	1.900	1.930,141	101,6
25.13	Jumlah SDM Peternakan yang diberikan penyuluhan (Peternak, Pedagang Daging dan Susu)	435	120	450	375
25.14	Produktivitas tanaman pangan (padi) per satuan luas	7,2	6,94	7,21	103,9
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
A	Fokus Kemampuan Ekonomi daerah				
2	Pertanian				
2.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	1.465.568	507.477	604.752	119,2%
2.2	Pengeluaran konsumsi pangan per kapita	42.91	44.9	41,90	93,3%
2.3	Nilai Tukar Petani (NTP)	1.06	1.06	1.068	100%
2.4	Luas wilayah produktif	1,015	1,007	1,010	100,3%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Dari sejumlah indikator tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Indikator ini dihitung dengan membandingkan capaian rata-rata produktivitas padi sampai Bulan Desember tahun 2019 (yaitu 7,21 ton/ha) dengan target RPJMD 2019 (sebesar 6,94 ton/ha) dikali 100%. Dengan demikian capaian produktivitas padi sampai Desember 2019 adalah 103,9% dibandingkan target akhir RPJMD. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 capaian produktivitas ini naik dari 103,1% menjadi 103,9%. Kenaikan tersebut karena dukungan musim dengan intensitas matahari dan pengairan yang cukup, tidak adanya ledakan populasi hama dan penyakit yang besar, serta peningkatan penggunaan pupuk organik yang ikut membantu terjaganya struktur dan kesuburan tanah.

2. Cakupan bina kelompok petani

Semua kelompok tani tanaman pangan di Kota Madiun yang berjumlah 39 kelompok berada dalam cakupan binaan melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan, pelatihan pada Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan, dengan demikian cakupan bina kelompok petani adalah 100%. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, cakupan bina kelompok tani tahun 2019 tetap stabil, artinya semua kelompok tani yang ditargetkan untuk dibina dapat tercapai. Capaian ini berkat dukungan kegiatan-kegiatan penyuluhan dari dinas, serta pendampingan dan anjangersana oleh petugas lapang/ penyuluh/ tenaga harian lepas penyuluh pertanian, seperti penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi, pemberian materi/ pelatihan budidaya tanaman, pemantauan hama penyakit tanaman, dan lain sebagainya.

Tabel III.98
Data Kelompok Tani di Kota Madiun Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok Tani (poktan)	Jumlah Gabungan Kelompok tani (gapoktan)	Cakupan Binaan Kelompok tani (poktan)	Persentase Cakupan Binaan Kelompok (%)
Kartoharjo	503	19	6	19	100
Manguharjo	358	12	5	12	100
Taman	276	8	4	8	100
Jumlah	1.137	39	15	39	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

3. jumlah populasi ternak

Jumlah populasi ternak diperoleh dengan menjumlahkan populasi ternak yang ada di Kota Madiun yaitu sapi/kerbau, kambing/domba, ayam buras/ ras petelur/ ras pedaging, itik/ entog, burung puyuh/dara dan lainnya. Populasi ternak sampai Desember tahun 2019 adalah 89.052 ekor mengalami kenaikan sebesar 3,6% dibanding dengan tahun 2018 yaitu 85.813 ekor. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan populasi peternak baru di Kota Madiun.

Tabel III.99
Jumlah Populasi Ternak Kota Madiun

Jenis Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)	
	2018	2019
Sapi/Kerbau	311	259
Kambing/ Domba	3.838	3.766
Ayam Buras	57.882	58.445
Ayam Ras Petelur	3.000	900
Ayam Ras Pedaging	6.750	6.750
Itik/ Entog	6.098	5.984
Burung Puyuh/Dara	7.460	12.460
Lainnya	484	488
Jumlah	85.813	89.052

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Kenaikan populasi ternak di Kota Madiun pada tahun 2019, khususnya populasi ayam buras dan Burung Puyuh/Dara karena semakin bertambahnya kegiatan untuk peternakan kegiatan di Kota Madiun. Selain itu adanya kepentingan peternak dengan pemahaman masyarakat sekitar terhadap polusi limbah peternakan dapat ditangani dengan baik khususnya untuk lokasi peternakan di sekitar pemukiman yang menyebabkan berkembangnya usaha peternakan di perkotaan.

4. Jumlah hewan ternak yang halal dipotong per tahun

Jumlah hewan ternak sapi dan kambing yang dipotong dihitung dari jumlah ternak yang dipotong di Kota Madiun, baik berasal dari populasi ternak lokal maupun populasi ternak luar Kota Madiun. Sampai Bulan Desember 2019, terdapat 3.007 ekor sapi dan kambing/domba yang dipotong di Kota Madiun. Data 2019, jumlah mengalami kenaikan sebesar 0,06% dibanding tahun 2018 (3.203 ekor). Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang merupakan data utuh satu tahun periode, maka penurunan ini disebabkan karena naiknya distribusi daging ke Kota Madiun untuk memenuhi permintaan konsumsi.

Tabel III.100
Jumlah Pematangan Ternak Sapi dan Kambing/Domba Kota Madiun

Jenis Ternak	Jumlah Ternak (Sapi dan Kambing/Domba) yang Dipotong (ekor)	
	2018	2019
Sapi	1.004	689
Kambing	1.785	1.831,25
Domba	414	486,75
Jumlah	3.203	3.007

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

5. Rata-rata produktivitas sapi perah per ekor per hari (L)

Rata-rata produktivitas susu sapi perah per ekor per hari dihitung berdasarkan jumlah produksi susu dibagi jumlah populasi ternak betina produktif dan jumlah hari perah. Sampai Bulan Desember 2019, rata-rata produktivitas sapi perah per ekor per hari adalah 11,67 liter/ekor/hari. Jumlah tersebut sama dengan tahun 2018 yaitu 11,67 liter/ekor/hari. Meskipun produksi susu stabil dan jumlah populasi sapi perah menurun, namun produktivitas susu per ekor sapi perah stabil di Kota Madiun. Hal ini disebabkan tidak digunakannya lagi koefisien standar produktivitas susu dari Provinsi Jatim yang lebih rendah tetapi mengacu data survey di lapangan. Selain itu juga disebabkan pengawasan mutu pakan ternak yang kontinu serta peningkatan pelayanan kesehatan ternak

Tabel III.101
Produktivitas sapi perah per ekor per hari (L)

	2018	2019
Produksi susu 1 tahun (Liter)	43.352,88	37.159,61
Betina produktif (%)	58	58
Populasi sapi perah (ekor)	21	18
Hari perah (hari)	305	305
Produktivitas sapi perah (Liter/ekor/hari)	11,67	11,67

6. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan mengingat laju pertumbuhan dan kontribusi sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang lebih tinggi. Bila data proyeksi kontribusi sektor pertanian tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi penurunan sekitar 0,03 dari 0,83 di tahun 2017 menjadi 0,80 di tahun 2018. Penurunan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian juga disebabkan menurunnya jumlah lahan produktif yang mengakibatkan turunya produksi pertanian yaitu dari 1.025 ha di tahun 2017 menjadi 1.015 ha di tahun 2018. Hal tersebut berimbas pada turunya PDRB sektor pertanian dan rendahnya pertumbuhan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman hortikultura dan perkebunan di Kota Madiun.

Tabel III.102
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian di Kota Madiun

Sektor/Sub Sektor	Pertumbuhan PDRB (%)	
	2017	2018
Sektor Pertanian	-1,28	1,92
Sub Sektor Tanaman Pangan	6,31	2,25
Sub Sektor Hortikultura	-14,62	2,41
Sub Sektor Perkebunan	-5,60	0,41
Sub Sektor Peternakan	7,65	1,49
Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	0,93	0,43

7. Rata-rata Peningkatan Pendapatan Petani Per Hektar

Rata-rata peningkatan pendapatan petani per hektar diperoleh dari selisih rata-rata pendapatan petani per hektar tahun ini dengan tahun lalu. Pendapatan petani per hektar dihitung dari rata-rata produktivitas atau produksi padi per hektar dikali dengan harga rata-rata gabah. Sampai akhir Desember 2019 diperoleh rata-rata produktivitas padi 7,21 ton/ha dan harga rata-rata gabah Rp.4.785/Kg sehingga diperoleh rata-rata pendapatan petani per hektar untuk satu kali musim tanam pada tahun 2019 adalah Rp. 34.499.850,-, sehingga pendapatan dalam 1 tahun (3 kali musim tanam) sebesar Rp. 103.499.500,-. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 32.580.000,- per musim atau Rp, 97.740.000,- per tahun, maka kenaikan pendapatan pada 2019 adalah Rp.5.799.550,-. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, pada tahun 2019 terjadi kenaikan pendapatan kurang lebih 3,3%. Kenaikan pendapatan ini disebabkan utamanya karena meningkatnya harga jual gabah sebesar 5,4% dalam kurun waktu 1 tahun dan stabilitas produktivitas padi dengan rata-rata 7,2 ton setiap tahunnya. Selain itu juga disebabkan penghematan biaya produksi karena adanya alokasi pupuk bersubsidi, substitus, pestisida kimia dan pestisida organik buatan kelompok tani sendiri.

Tabel III.103
Analisa Pendapatan Petani Padi Per Hektar Per Tahun

Analisa Per Hektar	2018	2019
Rata-Rata Produktivitas Padi (ton/ha)	7,20	7,21
Rata-Rata harga Gabah per kg (Rp./Kg)	4.525	4.785
Rata-Rata Pendapatan Per Musim (Rp./ha/tahun)	32.580.000	34.499.850
Rata-Rata Pendapatan Per tahun (3 musim tanam; Rp./ha/tahun)	97.740.000	103.499.500
Rata-Rata Kenaikan Pendapatan per Hektar per Tahun (Rp./ha/tahun)	5.607.000	5.799.550

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

8. Jumlah Produk Pertanian Olahan yang dipasarkan

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Madiun, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan budidaya perikanan dan mendapatkan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Untuk meningkatkan kemandirian pangan, kegiatan tersebut diarahkan untuk membuat pangan olahan.

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Produk pertanian olahan adalah produk hasil pertanian baik yang berasal dari tanaman pangan, perikanan, dan/atau peternakan yang dijadikan pangan olahan. Guna menjamin kualitas dan keamanan produk pertanian olahan yang dipasarkan, maka perlu mendapatkan ijin edar. Perijinan edar yang minimal dimiliki oleh produk pertanian olahan skala industri rumah tangga adalah ijin P-IRT.

Pada tahun 2019 terdapat 6 produk pertanian olahan yang dipasarkan dan sudah memiliki ijin P-IRT sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel III.104
Jenis produk pertanian yang dipasarkan

No	Jenis Produk	Kelurahan	Kecamatan
PRODUK OLAHAN PERTANIAN/ PETERNAKAN			
1	Sirup asam	Pilangbango	Kartoharjo
2	Sirup biluh UPPKS Sakinah	Mojorejo	Taman
3	Sirup jahe	Banjarejo	Taman
PRODUK OLAHAN PERIKANAN			
4	Abon lele Bibon	Namb. Kidul	Manguharjo
5	Serudeng ikan lele KRPL Sendang Lestari	Kuncen	Taman
6	Kroket Lele, Lele Crispy, Lele Kremes Yan's	Pangongangan	Manguharjo

9. Jumlah Kelompok Petani

Jumlah kelompok tani yang menjadi sasaran untuk kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis tahun 2019 berjumlah 39 kelompok tani. Jumlah ini tetap stabil bila dibandingkan tahun 2018. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan tahun 2019 meliputi pemberian materi/ pelatihan budidaya kepada petani, pendampingan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi, subsidi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), serta pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman melalui pelatihan agens hayati yang mencakup semua kelompok tani.

Tabel III.105
Jenis Sub Kegiatan Pada Kelompok Tani Tahun 2019

Jenis Kegiatan	Jumlah kelompok	
	2018	2019
Jumlah Total poktan/ gapoktan yang dibina	39 poktan/ 15 gapoktan	39 poktan/ 15 gapoktan
Demplot SLPTT	-	-
Percontohan SRI	-	-
Penyuluhan dan Pendampingan RDKK	15 gapoktan/ 39 poktan	15 gapoktan/ 39 poktan
Pendampingan PUAP	6 gapoktan	6 gapoktan
Subsidi AUTP	39 poktan	39 poktan
Praktek Pembuatan Pupuk Organik	3 poktan	3 poktan
Pemberian bantuan obat-obatan tanaman	39 poktan	39 poktan
Pelatihan Agens Hayati	39 poktan	39 poktan

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Keterangan: SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu); SRI (System of Rice Intensification); RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok); PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan); AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi); Agens Hayati: pengendalian hama penyakit dengan mikroorganisme bermanfaat.

10. Jumlah Populasi Ternak dan peliharaan Kota Madiun yang mendapatkan pengobatan dan Vaksinasi

Tabel III.106
Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Kota Madiun

Jenis Hewan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan (ekor)	
	2018	2019
Sapi/ Kerbau	442	604
Kambing/Domba	2.757	1.032
Ayam	275	0
Kucing	118	0
Anjing	23	0
Jumlah	3.615	1.636

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Jumlah populasi ternak dan peliharaan Kota Madiun yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan sampai dengan Bulan Desember 2019 adalah 1.636 ekor. Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan naik dari 3.615 ekor di tahun 2018 menjadi 1.636 ekor di tahun 2019 dengan persentase penurunan sebesar 54,7%. Hal ini dikarenakan tidak adanya penghitungan pada Hewan Ayam, Kucing dan Anjing.

11. Produksi Padi Per Hektar

Produksi padi per hektar atau disebut juga produktivitas adalah jumlah produksi tanaman padi dibagi dengan luas panen. Sampai dengan Bulan Desember 2019 diperoleh data luas panen 2.538 hektar, karena sebagian wilayah baru panen bulan Desember 2019. Adapun jumlah produksi padi sampai Bulan Desember 2019 18.297 ton, sehingga diperoleh produktivitas sebesar 7,21 ton/ha. Bila dibandingkan dengan data tahun 2018 produktivitas padi mengalami kenaikan dari 7,20 ton/ha menjadi 7,21 ton/ha atau naik sekitar 0,1%. Kenaikan produktivitas padi tersebut karena penggunaan varietas yang cenderung baik dalam jangka waktu tertentu. Selain itu kenaikan kualitas kesuburan tanah karena berkurangnya penggunaan pupuk kimia di beberapa wilayah serta perbaikan penanaman padi bekas areal tanam. Pada tahun 2019 juga dilakukan perhitungan ubinan padi pada kegiatan SLPTT yang mempunyai produktivitas tinggi, sehingga data produktivitas tahun 2019 mengalami kenaikan walaupun sedikit.

12. Jumlah Produksi daging

Jumlah produksi daging dihitung dari jumlah pemotongan ternak di Kota Madiun, baik dari ternak populasi domestik maupun ternak dari luar daerah. Jumlah produksi daging sampai akhir Bulan Desember 2019 sebesar 1.930,14 ton. Terjadi kenaikan sebesar 5,27% dari produksi daging dari Tahun 2018 sebesar 1828,4 ton. Target 2019 tercapai tetapi tidak signifikan dikarenakan frekuensi pemotongan di RPH berkurang akibatnya ketersediaan tenaga jagal menurun, dan peternak kesulitan untuk mengembangkan produksi peternakan dikarenakan polusi sebagai dampak dari usaha peternakannya. Serta berkurangnya lahan untuk usaha peternakan dipertanian karena bertambahnya kepadatan penduduk.

Tabel III.107
Jumlah Produksi Daging Kota Madiun

Jenis Ternak	Jumlah Produksi Daging (ton)	
	2018	2019
Sapi	196,2	134,6
Kambing	28,7	29,4
Domba	6,6	7,8
Babi	29,2	27,5
ayam buras	158,9	167,9
ayam petelur	28,1	30,9
ayam pedaging	1.269,6	1.413,441
Itik	82,9	89,8
Entok	16,7	17,6
Kelinci	1,6	1,5
burung dara	9,7	9,7
Jumlah	1.828,4	1.930,14

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

13. Jumlah SDM Peternakan (Pernak, Pedagang Daging dan Susu)

Jumlah SDM Peternakan di Kota Madiun yang mendapatkan penyuluhan di Kota Madiun sampai triwulan IV tahun 2019 berjumlah 450 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah SDM peternakan yang diberikan penyuluhan pada tahun 2019 meningkat sebanyak 15 orang.

Tabel III.108
SDM Peternakan Kota Madiun

	SDM Peternakan	
	2018	2019
Peternak (sapi, kambing/ domba, ayam pedaging, ayam petelur)	831 orang	805 orang
Pedagang Daging	40 orang	22 orang
Pemasok dan Produsen Susu	3 orang	4 orang
Jumlah Penyuluhan	14 kali	13 kali
Jumlah SDM Peternakan yang diberikan penyuluhan	435 orang	450 orang

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Peningkatan pembinaan ini karena meningkatnya jumlah dan jenis kegiatan penyuluhan peternakan di tahun 2019 yaitu sosialisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Adapun penyuluhan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah penerapan teknologi peternakan tepat guna, Sehingga kegiatan penyuluhan SDM peternakan mencakup kurang lebih 50% dari total SDM peternakan yang ada (805 orang)

14. Produktivitas tanaman pangan (padi) per satuan luas Satuan Luas

Rata-Rata produktivitas tanaman padi yang dipanen pada rentang Bulan Desember 2019 adalah 7,21 ton/ hektar. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, pada tahun 2019 terjadi kenaikan produktivitas tanaman padi dari 7,20 ton/ha menjadi 7,21 ton/ha atau naik sebesar 0,1%.

Tabel III.109
Produksi Padi Padi Per Kecamatan di Kota Madiun

Kecamatan	2018	2019
<u>Manguharjo</u>		
Produksi (ton)	5.971	5.890
Luas Panen (ha)	841	818
<u>Kartoharjo</u>		
Produksi (ton)	7.742	7.778
Luas Panen (ha)	1.086	1.077
<u>Taman</u>		
Produksi (ton)	3.905	4.629
Luas Panen (ha)	550	643
Kota Madiun		
Produksi (ton)	17.618	18.297
Luas Panen (ha)	2447	2.538
Produktivitas (ton/ha)	7,20	7.21

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Kenaikan produktivitas ini karena penggunaan varietas yang cenderung baik. Selain itu kenaikan kualitas kesuburan tanah karena pengurangan penggunaan pupuk kimia juga berpotensi menaikkan produktivitas tanaman. Penanaman padi pada bekas areal tebu juga membuat produktivitas tanaman dioptimalkan. Pada tahun 2019 juga dilakukan perhitungan ubinan padi pada kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) yang mempunyai produktivitas tinggi, sehingga data produktivitas tahun 2019 cenderung tinggi. Adapun rata-rata kontribusi produksi padi masing-masing wilayah terhadap total produksi adalah sebagai berikut : Kecamatan Kartoharjo sekitar 42,5%, Manguharjo sejumlah 32,2% dan taman kurang lebih 25,3%.

15. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani pada tahun 2019 adalah 1,068 yang diperoleh dari rasio jumlah yang diterima petani sebesar Rp.51.749.775,- dengan jumlah yang dibayarkan petani sebesar Rp. 48.441.500,-. Sedangkan jumlah yang dibayarkan petani berasal dari biaya produksi padi untuk

0,5 ha selama 1 tahun sebesar Rp. 29.017.750 dan pengeluaran rumah tangga petani selama 1 tahun sebesar Rp. 19.423.750,-.

Capaian NTP tahun 2019 adalah 100,7%. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 maka NTP meningkat dari 1.06 menjadi 1.068 di tahun 2019 atau naik sebesar 0,7%. Kenaikan NTP terjadi karena kenaikan pendapatan petani atau jumlah yang diterima petani sebesar 5,5%, sedangkan kenaikan jumlah yang dibayarkan petani hanya 4,8%. Kenaikan pendapatan petani disebabkan kenaikan harga gabah, stabilnya produktivitas padi, serta penghematan biaya produksi karena adanya alokasi pupuk bersubsidi, substitusi pestisida kimia dengan pestisida nabati, dan subsidi Asuransi Usaha Tani Padi.

Tabel III.110
Nilai Tukar Petani Kota Madiun

Biaya dan Pendapatan Petani dalam 1 Tahun / 0,5 ha	2018	2019
Biaya Produksi (Rp.)	27.150.000	29.017.750
Pengeluaran Rumah Tangga Petani (Rp.)	18.950.000	19.423.750
Jumlah yang dibayarkan petani (Rp.)	46.100.000	48.441.500
Jumlah yang diterima petani (Rp.)	48.870.000	51.749.775
NTP (indeks)	1,06	1,068

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Keterangan : Biaya dan pendapatan dihitung dengan asumsi rata-rata luas garap lahan pertanian 0,5 ha per musim tanam selama 1 tahun; rata-rata luas garap dihitung dari luas lahan sawah dibagi jumlah petani di Kota Madiun.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun pada Tahun 2019 :

No	Program	Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah

No	Program	Kegiatan	
5	program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
		2	Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
		3	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
		4	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
		5	Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
		6	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian
		7	kegiatan pembangunan/ perbaikan sumber-sumber air (jaringan irigasi tersier) DAK
6	program peningkatan produksi hasil peternakan dan pelayanan kesehatan hewan	1	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan
		2	Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		3	Penyuluhan Kualitas Gizi Pakan Ternak
		4	Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan
		5	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
		6	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

c. Realisasi program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang direalisasikan oleh **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1.022.063.520,00	959.072.527
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	757.513.520,00	694.550.527
	Output : Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan dan perkantoran	10 paket	10 paket
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	264.550.000,00	264.522.000
	Output : Jumlah koordinas dan konsultasi	131	154
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
2	program pemeliharaan barang milik daerah	311.208.000,00	304.703.800
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	210.000.000,00	206.411.000
	Output : Jumlah lokasi gedung dan bangunan	1 lokasi	1 lkasi
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	61.208.000,00	58.350.400
	Output : Jumlah kendaraan dinas	3 mobil dan 25 pajak sepeda motor	3 mobil dan 25 pajak sepeda motor
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	40.000.000,00	39.942.400
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor	55 unit	55 unit
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	222.250.000,00	222.242.000
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	222.250.000,00	222.242.000
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor	25 unit	33 unit
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	113.439.840,00	101.907.200
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	113.439.840,00	101.907.200
	Output : Jumlah dokumen	16 dokumen	20 dokumen
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
5	program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	4.447.080.000,00	3.918.483.712
1	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	181.000.000,00	155.339.610
	Output : Jumlah gapoktan penerima PUAP	6 gapoktan	15 gapoktan
	Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton
2	Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	197.400.000,00	177.479.786
	Output : Jumlah petani atau kelompok tani dan petugas	39 kelompok tani	39 kelompok tani

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	penyuluh yang dilatih		
	Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton
3	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	125.000.000,00	103.281.920
	Output : Jumlah gapoktan dan kelompok tani yang diberikan penyuluhan	39 kelompok tani dan 15 gapoktan	39 kelompok tani dan 15 gapoktan
	Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton
4	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	349.480.000,00	288.387.127
	Output : Jumlah sarana dan prasarana pertanian	3 paket (benih, obat kimia, isolat)	3 paket (benih, obat kimia, isolat)
	Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton
5	Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	95.000.000,00	80.542.680
	Output : Jumlah alokasi pembuatan pupuk	3 lokasi	3 lokasi
	Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton
6	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	3.499.200.000,00	3.113.452.589
	Output : Jumlah infrastruktur pendukung pertanian	4 paket	3 paket
	Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton
6	program peningkatan produksi hasil peternakan dan pelayanan kesehatan hewan	735.298.720,00	682.685.578
1	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan	50.000.000,00	44.703.684
	Output : Jumlah ternak yang mendapatkan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan serta penyuluhan	1200 ekor dan 1 penyuluhan	1636 ekor dan 1 penyuluhan
	Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton
2	Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	185.000.000,00	158.698.349
	Output : pemeriksaan daging, sosialisasi pemotongan hewan qurban, sampel air susu dan pangan olahan ternak	365 hari, 100 sampel makanan, 40 sampel air susu, 3 kali penyuluhan	365 hari, 100 sampel makanan, 50 sampel air susu, 3 kali penyuluhan
	Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton
3	Penyuluhan Kualitas Gizi Pakan Ternak	125.000.000,00	119.290.860
	Output : Jumlah bintek, monitoring, dan pengawasan mutu ternak	4 kali bintek dan 2 kali monev	4 kali bintek dan 2 kali monev
	Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
4	Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan	137.000.000,00	135.177.610
	Output : Jumlah bintek, kontes burung berkicau, dan monev	5 bintek, 1 kali kontes, 7 monev	5 bintek, 1 kali kontes, 6 monev
	Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton
5	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	97.300.000,00	94.261.435
	Output : Jumlah peternak pemanfaatan teknologi pakan	4 kali	4 kali
	Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton
6	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	140.998.720,00	130.553.640
	Output : Jumlah hewan peliharaan yang mendapatkan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan	250 ekor	221 ekor
	Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton

d. Permasalahan dan Solusi

Kualitas sumberdaya lahan pertanian semakin menurun dikarenakan struktur tanah yang telah jenuh dengan bahan kimia anorganik atau pupuk kimia/ buatan, maupun pestisida (obat tanaman) anorganik yang dapat mempengaruhi struktur, tekstur dan kesuburan tanah. Penggunaan bahan kimia dapat memperkeras tekstur tanah, mengganggu keseimbangan PH tanah, serta membunuh mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesuburan tanah. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah membatasi penggunaan bahan kimia dan mengimbangi dengan penggunaan bahan organik dengan tetap melaksanakan kegiatan dan pendampingan pembuatan pupuk organik serta penggunaan agens hayati maupun pestisida nabati. Penggunaan pupuk organik yang dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah, memperbanyak daya jerap air, dan memperbanyak suplai makanan bagi mikroorganisme tanah. Sedangkan penggunaan agens hayati yaitu mikroorganisme (nematode, jamur, bakteri dsb) yang bermanfaat dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit tanaman serta penggunaan pestisida nabati (dari rimpang toga, jarak, alang-alang dsb) yang lebih ramah lingkungan, dapat menggantikan penggunaan pestisida kimia.

Dalam rangka meningkatkan kebutuhan air irigasi, telah dilaksanakan pengembangan/ pembangunan jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi air tanah sumur pompa dalam dengan pembiayaan DAK 2015/2016. Adapun pembangunan sumur pompa dalam terdapat di kelompok tani kelurahan Rejomulyo, Tawangrejo, Kanigoro, Banjarejo,

Josenan dan Manisrejo. Namun demikian terdapat kendala dalam pembayaran penggunaan abonemen, yaitu terjadi kesalahpahaman antara petani dan dinas mengenai sistem pembayaran penggunaan sumur pompa dalam yang merupakan sarana/ prasarana produksi pertanian yang dibangun dengan biaya APBD Pemerintah Kota Madiun TA. 2016. Petani merasa keberatan dalam pembayaran abonemen listrik PLN untuk sumur pompa dalam. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah berupaya melakukan mediasi yang menghadirkan petani, PLN, dinas dan pejabat terkait. Berdasarkan hasil mediasi, terdapat wacana bahwa pembayaran abonemen listrik akan diupayakan didanai APBD Pemerintah Kota Madiun, namun sampai saat ini masih belum ada ketetapan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu untuk ke depannya, penyerahan bantuan kepada masyarakat hendaknya disertai pemberian informasi yang jelas mengenai hak kewajiban penerima. Selain itu pemberian bantuan pompa air yang menggunakan mesin diesel dirasa lebih efektif dan lebih dapat diterima serta tidak memberatkan petani.

Masih lemahnya sistem alih teknologi pertanian

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan tetap melakukan kegiatan penyuluhan rutin kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan), sebagai upaya untuk memberikan informasi teknologi terbaru dan sarana transfer teknologi kepada petani.

Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan senantiasa memberikan fasilitasi dalam pengajuan permohonan kredit petani dengan memberikan rekomendasi kredit pertanian kepada petani yang memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit modal usaha tani. Selain itu akan tetap dilaksanakan pendampingan kepada gapoktan yang mengelola dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), sehingga dana tersebut dapat lebih bermanfaat terutama sebagai pinjaman modal bagi anggota gapoktan.

Masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik dan lemahnya daya saing. Belum optimalnya fungsi gapoktan sebagai unit usaha petani menyebabkan masih lemahnya nilai tawar petani. Oleh karena itu perlu dilakukan pengoptimalan fungsi gapoktan yang tidak hanya sebagai tempat bertukar ide dan permasalahan pertanian namun juga sebagai unit bisnis pertanian. Sebagai contoh pengoptimalan penggunaan RMU (Rice Milling Unit) dan lantai jemur bagi anggota kelompok tani sehingga dapat menghasilkan gabah kering yang lebih

berkualitas dan produk beras siap jual sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke industri dan perumahan Alih fungsi lahan di perkotaan tidak dapat dihindari dalam suatu perkembangan wilayah perkotaan. Namun demikian perlu dilakukan pemetaan lahan produktif yang akan dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sehingga lokasi yang telah ditetapkan tersebut tidak boleh dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Adapun pemetaan dan penetapan lahan LP2B masih sedang berproses dan akan mengacu pada Perda RTRW tentang lahan pertanian abadi. Penetapan LP2B hendaknya memperhatikan tata letak lokasi yang tidak rawan untuk dialihfungsikan, infrastruktur pertanian yang telah terbangun, serta tingkat kesuburan tanah di wilayah tersebut.

Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak dapat diprediksi Fluktuasi iklim yang tidak dapat diprediksi sedikit banyak akan mempengaruhi produktivitas tanaman dan produksi tanaman pangan. Untuk mengatasi dampak kerugian gagal panen karena anomali iklim seperti banjir, kekeringan maupun ledakan organisme pengganggu tanaman, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah meluncurkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Adapun biaya premi asuransi tersebut 80% ditanggung oleh pemerintah sedangkan petani hanya diwajibkan membayar 20%-nya. Namun untuk Kota Madiun 20% biaya premi tersebut akan dibayar menggunakan dana APBD II Pemerintah Daerah Kota Madiun melalui kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun TA. 2019 kepada pihak penyedia jasa layanan yang ditunjuk yaitu PT. Jasindo.

Kemampuan SDM petani masih rendah, sehingga pola produksi belum berorientasi bisnis Kemampuan petani dapat ditingkatkan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan/ bimbingan teknis serta melalui sosialisasi dan penyuluhan dari tenaga penyuluh lapangan pertanian mengenai teknologi baru. Selain itu perlu dilakukan pendampingan dalam kegiatan produksi pertanian untuk menghasilkan produk sekunder melalui teknologi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, misalnya produksi beras organik atau beras sehat yang siap dilepas di pasar. Konsistensi kegiatan penyuluhan dan kontinuitas kegiatan pendampingan kepada petani, harus dipertahankan demi perubahan dan perbaikan pola pikir petani terhadap pemanfaatan teknologi baru.

Rendahnya penerapan teknologi peternakan tepatguna dan rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Peningkatan penerapan teknologi peternakan serta teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilakukan melalui kegiatan transfer teknologi peternakan kepada masyarakat peternak, pedagang daging dan susu dalam kegiatan penyuluhan/ bimtek/ pelatihan dan studi banding peternakan. Penyuluhan tidak hanya bersifat teknis budidaya namun juga akan menyangkut bidang pengolahan hasil peternakan seperti pembuatan kefir, yogurt, abon, nugget, dendeng. Selain itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus memfasilitasi pengajuan kredit peternakan melalui penerbitan rekomendasi permohonan kredit usaha peternakan.

Muncul penyakit hewan menular yang bersifat emergensi Penyakit hewan menular yang bersifat emergensi dapat dikendalikan dengan pemeriksaan rutin hewan/ ternak yang dibudidayakan di masyarakat serta pemeriksaan hewan/ ternak yang masuk di Kota Madiun melalui monitoring lalu lintas ternak. Pemeriksaan kesehatan hewan pada ternak besar meliputi pemeriksaan gigi dan mulut, air liur, mata, kebersihan kandang, serta pemberian vaksinasi pada unggas. Pencegahan penyakit hewan peliharaan telah dilakukan sejak tahun 2018 dengan memberikan vaksin rabies gratis. Selain itu penanganan pengaduan/ pelaporan dari masyarakat harus dilakukan dengan tepat dan cepat agar mencegah terjadinya penyebaran wabah penyakit.

Belum optimalnya pengawasan produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) Pengoptimalan pengawasan produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dilakukan dengan pemeriksaan *post mortem* (ternak yang akan diembelih) dan *ante mortem* (daging hasil sembelihan) pada pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan. Sedangkan pengawasan produk daging hasil pemotongan yang dilakukan di luar RPH, dilakukan melalui kegiatan periksa ulang daging harian di Pasar Besar dan Pasar Sleko Kota Madiun. Pengawasan produk peternakan juga dilakukan dengan pengambilan dan pemeriksaan sample makanan seperti bakso, mie ayam, rawon, soto menggunakan *pork screening test* untuk diketahui kandungan babi atau kehalalannya.

Ancaman penurunan populasi ternak sapi Populasi ternak cenderung semakin menurun setiap tahunnya karena semakin terbatasnya lahan dan peran kepentingan masyarakat dengan usaha peternakan di pemukiman terhadap limbah dan polusi udara yang dihasilkan. Oleh karena itu perlu dikembangkan usaha peternakan ramah lingkungan/

bebas polusi limbah. Peternakan ramah lingkungan dapat dikembangkan melalui pemberian pakan fermentasi yang mampu mengurangi bau kotoran ternak, peningkatan kebersihan kandang dan perlakuan/ pemberian prebiotik terhadap limbah peternakan, sehingga keberlanjutan usaha peternakan di Kota Madiun dapat terjaga.

Masih belum tertibnya peredaran obat hewan dan pakan ternak di masyarakat Pengawasan peredaran obat dan pakan ternak telah dilakukan dengan mengambil sample obat dan pakan di toko/kios dan poultry shop secara periodik. Untuk pemeriksaan tanggal kadaluarsa dan kesesuaian label dengan isi cukup diberikan teguran lisan atau teguran tertulis. Sedangkan khusus pemeriksaan kandungan sample pakan ternak dikirim ke laboratorium pengawasan mutu pakan di Provinsi.

Dengan mengotimalkan peran petugas lapangan dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada petani dan peternak, serta penggunaan teknologi pertanian dan peternakan ramah lingkungan, diharapkan keberlanjutan kegiatan pertanian dan peternakan di Kota Madiun akan terjaga, sehingga target kinerja tahun yang akan datang dapat tercapai.

e. Penghargaan yang diterima

Pada Tahun 2019 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun mengikuti lomba tingkat Provinsi Jawa Timur, namun tidak mendapatkan kejuaraan. Untuk tingkat Kota Madiun mendapatkan kejuaraan :

1. Juara 2 Lomba Kebersihan Tingkat OPD
 2. Juara 2 PPID Awards Tingkat OPD
-

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Madiun yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan sasaran stabilnya produksi perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun indikator utama untuk mengukur kinerja sasaran tersebut adalah jumlah produksi perikanan yang meliputi produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.111
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Madiun
Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
C	Urusan Pemerintahan Pilihan				
23	Kelautan dan Perikanan				
23.1	Jumlah Produksi perikanan	343,9	361	361.3	100,1%
23.2	Tingkat Konsumsi Ikan	15,1	15.4	15.41	100,06
23.3	Jumlah SDM (Petani Ikan)	247	200	250	125

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Berdasarkan data-data yang disajikan pada data tabel di atas, untuk masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Produksi ikan

Jumlah produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya yang berasal dari kegiatan budidaya ikan air tawar di kolam dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan di sungai. Berdasarkan Tabel IV di atas produksi perikanan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,81% dibandingkan tahun 2018 tetapi tidak signifikan, hal ini dikarenakan musim kemarau yang terlalu panjang sehingga mempengaruhi produksi budidaya ikan di kolam maupun tangkap.

2. Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan menurut Food and Agriculture Organization (FAO) dapat dihitung dengan menggunakan dua pendekatan yaitu berdasarkan ketersediaan ikan dan berdasarkan survei konsumen. Untuk penghitungan konsumsi ikan di Kota Madiun, digunakan metode perhitungan berdasarkan ketersediaan ikan, dibagi jumlah penduduk, dengan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Konsumsi Ikan} &= \frac{\text{Ketersediaan Ikan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ \text{Ketersediaan Ikan} &= \text{produksi perikanan (budidaya dan tangkap)} \\ &+ \text{pasokan dari luar (impor)} - \text{pengiriman ikan keluar daerah (ekspor)} \\ &+ \text{stok} \\ &= \frac{274.800 + 86.500 + (3.893.025 \text{ kg} - 1.076.840 \text{ kg}) + 54.195}{209.672 \text{ orang (konsumtif)}} \\ &= 15,41 \text{ Kg/kapita/th} \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel IV di atas tingkat Konsumsi ikan di Kota Madiun mencapai target yang ditetapkan pada 2019 yaitu sebesar 15,41 kg/kapita/tahun. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan konsumsi ikan sebesar 2,01%. Pencapaian target tersebut didukung adanya kegiatan sosialisasi peningkatan konsumsi ikan di masyarakat terutama pada siswa Sekolah Dasar di Kota Madiun. Selain itu kebutuhan konsumsi ikan juga didukung oleh tersedianya produksi perikanan budidaya yang cukup memadai di pasaran. Secara garis besar, tingkat konsumsi ikan per kapita di Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun nilainya tidak signifikan.

Namun demikian tingkat konsumsi ikan di Kota Madiun masih rendah dari target Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sebesar kurang lebih 31,7 kg/ kapita/ tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan yang mengandung nilai gizi yang tinggi dan sangat baik bagi kesehatan dan kecerdasan. Selain itu juga harus diimbangi dengan peningkatan produksi ikan daerah yang akan mendukung ketersediaan ikan di daerah.

3. Jumlah SDM (Petani Ikan)

Jumlah sumber daya perikanan dihitung dari jumlah rumah tangga yang melaksanakan kegiatan budidaya perikanan. Berdasarkan Tabel di atas, jumlah petani ikan tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2018 ada penurunan 8% dibandingkan Tahun 2019, hal ini dikarenakan jumlah target SDM Petani ikan mengalami kenaikan Target yaitu 200 orang pada Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018 hanya 185 orang.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah:

No	Program	Kegiatan
1	program peningkatan produksi dan pengolahan/ pemasaran hasil perikanan	1 Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
		2 Kegiatan Pembenihan Ikan
		3 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan
		4 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional
		5 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya
		6 Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

c. Realisasi program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang perikanan yang direalisasikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program peningkatan produksi dan pengolahan/ pemasaran hasil perikanan	519.600.000,00	461.357.279
	1 Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	60.000.000,00	53.650.333
	Output : Jumlah kelompok pembudidaya yang diberikan pendampingan	2 penyuluhan	2 penyuluhan
	Outcome : Jumlah produksi perikanan	361 ton	357,7 ton
	2 Kegiatan Pembenihan Ikan	116.000.000,00	108.615.690

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah benih yang di hasilkan BBI	275.000 ekor	
	Outcome : Jumlah produksi perikanan	361 ton	357,7 ton
3	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan	50.000.000,00	41.817.845
	Output : Jumlah pemasar ikan yang diberikan pelatihan	1 kali bintek	1 kali bintek
	Outcome : Jumlah produksi perikanan	361 ton	357,7 ton
4	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional	55.000.000,00	48.296.052
	Output : Jumlah pengolah ikan yang di berikan pelatihan	3 kali pelatihan	3 kali pelatihan
	Outcome : Jumlah produksi perikanan	361 ton	357,7 ton
5	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	55.600.000,00	42.170.773
	Output : Jumlah pembudidaya ikan yang di beri pelatihan	1 kali penyuluhan	1 kali penyuluhan
	Outcome : Jumlah produksi perikanan		
6	Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	183.000.000,00	169.806.586
	Output : Tingkat konsumsi ikan, jumlah peserta lomba masak, dan jumlah siswa sekolah disosialisasi gemar ikan	15 kg/kapita/th, 15 peserta lomba masak, 200 siswa sosialisasi	15,18 kg/kapita/th, 15 peserta lomba masak, 200 siswa sosialisasi
	Outcome : Jumlah produksi perikanan	361 ton	357,7 ton

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pembangunan bidang dan urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM perikanan
Sumber daya petani ikan maupun petugas perikanan di Kota Madiun masih sangat terbatas, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dalam upaya meningkatkan minat dan pengetahuan SDM perikanan dilakukan bimtek/ sosialisasi dan studi banding yang mengikutsertakan masyarakat petani ikan serta petugas perikanan. Petani ikan akan dilatih mengenai teknologi budidaya ikan serta teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui kegiatan pengembangan olahan berbahan dasar ikan dan lomba masak ikan.
- Kurangnya penerapan teknologi perikanan
Penerapan teknologi perikanan khususnya teknologi perbenihan ikan di Balai Benih Ikan akan lebih dimaksimalkan sesuai dengan prosedur dan teknik budidaya yang benar, misalnya pengelompokan ikan/ grading

berdasarkan ukuran ikan yang lebih baik, perhitungan kepadatan ikan dalam kolam untuk efektifitas penyerapan makanan dan pembakaran energi bagi ikan sehingga mengoptimalkan ukuran/ bobot ikan, pengukuran PH dan kualitas air kolam secara periodik, seleksi induk ikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah produksi benih yang dihasilkan. Adapun penerapan teknologi budiadaya dan pengolahan ikan di masyarakat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis/ pelatihan diantaranya bimtek kolam bundar, penanangan rantai dingin produk perikanan untuk menjaga kualitas dan kesegaran ikan saat dikirim dan sebagainya. Pendampingan dan monitoring ke pembudidaya ikan dan penangkap ikan akan dilakukan secara rutin untuk updating data, untuk melakukan pembinaan/ anjongsana kepada petani ikan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada.

- Kurangnya akses permodalan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun mendukung kegiatan usaha perikanan melalui pemberian rekomendasi kredit bagi petani ikan. Selain itu juga memberikan dukungan sarana kios, kafe dan kolam ikan dengan biaya sewa yang cukup terjangkau.

- Kurang optimalnya kelembagaan perikanan

Peningkatan peran kelembagaan perikanan dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan kelompok pembudidaya ikan dalam kegiatan penyuluhan/ sosialisasi yang diadakan di dinas. Selain itu akan dilakukan upaya peningkatan kelas terhadap kelompok petani ikan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha secara bersama-sama dengan tujuan peningkatan produktivitas sekaligus peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

Dengan demikian, seiring tumbuhnya minat masyarakat untuk berbudiaya ikan, berkembangnya perbenihan ikan di Kota Madiun, dan peluang pasar perikanan, diharapkan target kinerja tahun mendatang dapat tercapai.

- e. Penghargaan yang diterima

Pada Tahun 2019 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun mengikuti Duta Gemar Ikan Tahun 2019 di Tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendapatkan Juara 2 Putri Gemar Ikan Tahun 2019.

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Bidang pariwisata Kota Madiun selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kemajuan seiring dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana pariwisata, objek-objek wisata alam dan objek-objek wisata lainnya yang lebih bervariasi. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan pariwisata selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel III.112
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Di Kota Madiun Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	5	6	7	8
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
C	Urusan Pemerintahan Pilihan				
24	Pariwisata				
24.1	Kunjungan wisata	411.237	269.000	421.753	157
24.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	8,63	6,29	8,68	138
24.3	Jumlah Promosi Pariwisata	5	3	5	167
24.4	Jumlah Event Kepariwisataaan	12	10	12	120

Sumber Data : Disbudparpora Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut dijelaskan/ diuraikan sebagai berikut :

1. Kunjungan wisata

Data kunjungan wisata sampai dengan Bulan Desember 2019 sebanyak 421.75 orang. Dari data dalam tabel diatas dapat diketahui dari realisasi Tahun 2018 sebesar 411.237 sedangkan di Tahun 2019 sebesar 421.753, yang berarti jumlah kunjungan wisatawan Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar 10.516 atau sebesar 2,5 %.

2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap total PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB Tahun 2019 sebesar 8,68% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 6,29% atau dengan

capaian kinerja 138%. Naik 0,05% jika dibandingkan dengan kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada jasa usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta jasa lainnya di Kota Madiun.

3. Jumlah Promosi Pariwisata yang dilaksanakan sampai dengan Bulan Desember 2019 sebanyak 5 (lima) promosi adalah sebagai berikut :
 - Pameran dalam acara Majapahit Travel Fair (MTF) ;
 - Pameran Hari Jadi Provinsi ;
 - Festival Pecel Pincuk ;
 - Pameran Madiun Kreatif ;
 - Pameran Madioen Tempo Doeloe.
4. Jumlah Event Pariwisata yang dilaksanakan sampai dengan Bulan Desember 2019 sebanyak 12 (dua belas) event adalah sebagai berikut :
 - a) Seleksi Raka Raki di tingkat Provinsi Jawa Timur ;
 - b) Festival Pecel Pincuk sebanyak 4 kali ;
 - c) Pameran Majapahit Travel Fair (MTF) ;
 - d) Monitoring dan evaluasi pariwisata ;
 - e) Pelatihan SDM Kakang Mbakyu ;
 - f) Seleksi, karantina, gebyar ekspresi sampai dengan grand final Kakang Mbakyu 2019,
 - g) Bintek sertifikasi karyawan dari usaha pariwisata ;
 - h) Pameran Hari Jadi Provinsi di Surabaya ;
 - i) Pameran Madioen Tempo Doeloe ;
 - j) Pameran Madiun Kreatif ;
 - k) Karnaval Apeksi Semarang ;
 - l) Festival Jajanan Nusantara..

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di **Disbudparpora** pada Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	1 Kegiatan Pemberdayaan Generasi Muda Bidang Kepariwisata
		2 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

No	Program	Kegiatan
		3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pariwisata
		4 Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas
		5 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kemitraan di Bidang Pariwisata

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direalisasikan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di **Disbudparpora** pada Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	2.172.902.080,00	1.656.267.059,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Generasi Muda Bidang Kepariwisata	640.000.000,00	542.068.670,00
	Output : Jumlah peserta	100 orang	139 orang
	Outcome : Jumlah fasilitasi dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	9 event	12 event
2	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	882.902.080,00	783.580.380,00
	Output : Jumlah promosi pariwisata yang diselenggarakan	5 kali	5 kali
	Outcome : Jumlah fasilitasi dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	9 event	12 event
3	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pariwisata	100.000.000,00	61.843.291,00
	Output : Dokumen hasil monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Jumlah fasilitasi dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	9 event	12 event
4	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas	240.000.000,00	199.489.227,00
	Output : Jumlah festival pariwisata	1 festival	4 festival
	Outcome : Jumlah fasilitasi dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	9 event	12 event
5	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kemitraan di Bidang Pariwisata	310.000.000,00	69.285.491,00
	Output : Jumlah peserta	120 orang	90 orang
	Outcome : Jumlah fasilitasi dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	9 event	12 event

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Tidak terlaksananya event Gebyar Batik dan Fashion Show.
2. Di Kota Madiun belum banyak memiliki obyek wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan untuk berkunjung di Kota Madiun, sehingga diperlukan promosi kepariwisataan terutama di dalam Kota Madiun yang mampu menarik minat wisatawan luar kota untuk berkunjung ke Kota Madiun yang harus meningkat dan menimbulkan ketertarikan yang besar baik bagi masyarakat Kota Madiun sendiri maupun di luar Kota Madiun.

Solusi :

1. Tahun 2020 direncanakan dilaksanakan gebyar batik dengan format berbeda yaitu Batik Fashion on The Street.
 2. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun menyelenggarakan event promosi di dalam Kota Madiun salah satunya adalah “Madiun Tempo Doeloe” untuk menggali sejarah Kota Madiun agar bisa menarik wisatawan luar Kota Madiun untuk menyaksikan dan menikmati acara tersebut.
-

4. URUSAN PERDAGANGAN

a. Tujuan dan Sasaran

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan Meningkatkan kapasitas pasar dan perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal.

Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kota Madiun adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.113
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat						
	Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor serta industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB	23,21%	23,86%	25,93%	108,68%

Sumber : BPS Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan diatas, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap total nilai PDRB Kota Madiun atas dasar harga berlaku yaitu harga satu tahun dasar tertentu, dalam hal ini harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran menurut lapangan usaha pada tahun 2019 sebesar 25,93%

diperoleh dari nilai kategori perdagangan sebesar 3.658.646,6 dibanding total nilai PDRB keseluruhan kategori sebesar 14.108.321,5. Secara umum, kategori perdagangan dari tahun 2018 cenderung meningkat sebesar 2,72%.

Dengan adanya kegiatan gerakan kembali ke pasar Dinas Perdagangan berusaha mewujudkan kontribusi sektor perdagangan eceran mampu meraih angka pertumbuhan perdagangan yang lebih baik. Diharapkan agar masyarakat melalui pendidikan pelatihan belanja ke pasar oleh putra putri sekolah mampu mewujudkan harapan bahwa belanja di pasar bukan hal jelek daripada belanja di pasar-pasar modern.

Melalui kegiatan pameran dagang Dinas Perdagangan berusaha meningkatkan perekonomian kecil dan menengah dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk berkontribusi dalam peran serta peningkatan perekonomian daerah. Pameran dagang merupakan salah satu wadah bagi usaha kecil dan menengah untuk lebih berprestasi dan meningkatkan produk usaha yang dihasilkan, sehingga perekonomian daerah dapat berkembang lebih baik.

Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah pada tahun 2018 sampai tahun 2019 di Kota Madiun adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.114
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kota Madiun Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	5	6	7	8
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
C	Urusan Pemerintahan Pilihan				
26	Perdagangan				
1	Cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal	100	75	100	133.33
2	omset pasar tradisional	547.949. 142.888	627.011. 000.000	3.052.811. 451.281	205.38
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	23,56	23,86	26,06	109%
4	Ekspor Bersih Perdagangan	1	1	1	100
5	Jumlah Komoditi yang dipamerkan	15	17	17	100
6	Cakupan PKL yang dibina	100	75	100	133.33

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	5	6	7	8
7	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal yang dimonitor	1	1	1	100
8	Jumlah kelompok perdagangan/usaha informal	35	35	35	100
9	Intensitas tera timbangan	2	2	2	100

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan diatas, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Cakupan bina kelompok perdagangan / usaha informal

Cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal merupakan salah satu kegiatan untuk pembinaan kelompok usaha perdagangan dalam hal ini adalah kelompok usaha informal yaitu paguyuban PKL. Dengan perhitungan jumlah paguyuban PKL yang telah dibina dibanding target jumlah paguyuban PKL yang ada. Tahun 2018 cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal adalah sebesar 100%, yaitu 33 paguyuban PKL yang mendapat binaan dari target 33 paguyuban, dan tahun 2019 sebesar 100% yaitu pembinaan 35 paguyuban PKL untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan Dinas Perdagangan sebagai motivasi PKL untuk lebih menjaga kualitas tempat dagangan dan produk dagangan. Realisasi Cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal Tahun 2018 sebesar 100% dan realisasi tahun 2019 sebesar 100% tidak mengalami kenaikan, kenaikan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas PKL yang ada di Kota Madiun

2. **Omset pasar tradisional** merupakan bagian dari volume usaha perdagangan yang harus diketahui sebagai salah satu indikator pengukuran keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Pencapaian omset pasar tradisional pada tahun 2018 sebesar Rp. 547.949.142.888,00 dan tahun 2019 sebesar Rp. 3.052.811.451.281,00 Kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 105,38%.

Pembinaan pedagang pasar tradisional perlu dilaksanakan dalam bentuk penguatan daya saing terhadap semakin meningkatnya

system pelayanan pada pasar-pasar modern. Pemahaman terhadap metode pemasaran atau ilmu tentang dasar-dasar promosi untuk peningkatan jumlah omset dan pengunjung pasar menjadi salah satu faktor meningkatkan daya jual yang ada pada pasar tradisional.

Sebagai upaya peningkatan daya jual pasar tradisional, Pemerintah telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan promosi dan peningkatan daya jual berupa kegiatan Gerakan kembali Ke Pasar yang dilaksanakan dengan bekerja sama sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun. Serta Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional yang dilakukan pada beberapa lokasi pasar tradisional yang ada di Kota Madiun dengan tujuan agar pasar tradisional lebih meningkatkan daya jualnya.

3. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap total nilai PDRB Kota Madiun atas dasar harga berlaku yaitu harga satu tahun dasar tertentu, dalam hal ini harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran menurut lapangan usaha pada tahun 2019 sebesar 26,06% diperoleh dari nilai kategori perdagangan sebesar 3.702.617,1 dibanding total nilai PDRB keseluruhan kategori sebesar 14.208.213,5. Secara umum, kategori perdagangan dari tahun 2018 cenderung meningkat sebesar 2,85%.

4. **Ekspor bersih Perdagangan** di Kota Madiun tetap hanya 1 (satu) komoditi yaitu dari PT. INKA berupa gerbong kereta api dan perlengkapannya.
 5. **Jumlah komoditi yang dipamerkan** merupakan salah satu bentuk capaian usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Kota Madiun. Semakin banyak komoditi yang dihasilkan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi dengan upaya mengenalkan komoditi baru yang dihasilkan kepada pihak-pihak pelaku ekonomi diluar Kota Madiun. Salah satu cara yang digunakan yaitu mengenalkan produk-pruduk yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Madiun melalui pameran-pameran dagang yang diselenggarakan di luar Kota Madiun. Pada awal RPJMD komoditi yang diikutkan dalam pameran dagang sebanyak
-

12 komoditi, dan pada tahun 2019 jumlah komoditi yang diikutkan dalam pameran dagang sebanyak 17 komoditi dagang. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah komoditi dagangan yang ikut dipamerkan adalah dengan adanya kegiatan pembinaan terhadap pengusaha dan calon pengusaha kecil melalui Kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan. Jenis komoditi yang ikut dipamerkan :

Kelompok Makanan :

1. Kelompok Mamin Olahan
2. Kelompok Sambel Pecel
3. Lempeng/ Krupuk Puli
4. Kelompok Madu Mongso
5. Kelompok Bluder/roti tradisional
6. Kelompok Aneka Kue Kering
7. Kelompok Brem
8. Kelompok Jamu Tradisional

Kelompok Kerajinan :

9. Kelompok Bordir
10. Kelompok Kerajinan Kayu
11. Kelompok Kerajinan Batik
12. Kelompok Kerajinan Paiyet
13. Kelompok Songket
14. Kerajinan rajut
15. Kelompok kaos khas Kota Madiun
16. Batik lukis
17. Wayang kulit

6. **Cakupan PKL yang dibina** merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun. Capaian cakupan PKL yang dibina pada tahun 2018 sebesar 100% dan pada tahun 2019 capaian cakupan PKL yang dibina sebesar 100%. Dengan perhitungan jumlah PKL yang menerima pembinaan dari Dinas Perdagangan dibanding jumlah PKL keseluruhan yang ada di Kota Madiun sesuai data Dinas Perdagangan yaitu sebesar 925 orang PKL sehingga pada tahun 2019 seluruh PKL yang ada di Kota Madiun telah menerima pembinaan untuk meningkatkan kualitasnya. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan adanya pembinaan secara
-

bersama melalui Kegiatan Pembinaan PKL yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan pada tahun 2019 telah diselenggarakan lomba PKL, dengan tujuan untuk mengasah keterampilan PKL terhadap kebersihan, inovasi, dan pelayanan dagangannya. Dengan sendirinya PKL akan berlomba untuk meningkatkan kualitas dagangannya sesuai petunjuk atau persyaratan yang dilombakan.

7. **Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal** yang dimonitor tetap 1 (satu) kepada Peredaran Rokok, Kegiatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal atau tanpa pita cukai di tempat-tempat eceran melalui diadakan pengawasan oleh Tim yang terdiri dari Disperindangkoppar, Satpol PP, Dishubkominfo dan SKPD lain yang terlibat.
8. Jumlah kelompok perdagangan/usaha informal merupakan jumlah kelompok atau paguyuban PKL yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Jumlah Paguyuban pada tahun 2018 adalah sebanyak 35 paguyuban PKL dan pada tahun 2019 sebanyak 35 paguyuban PKL. Peningkatan ini merupakan bagian dari usaha untuk mentertibkan PKL yang ada sesuai Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sehingga PKL dapat melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk walikota yang telah diberlakukan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Madiun pada Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
		2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

No	Program	Kegiatan
		3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
3	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1 Kegiatan Pameran Dagang
		2 Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk
		3 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (DBH-CHT)
		4 Kegiatan Membangun Jejaring dengan Exportir
		5 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan
		6 Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan
		7 Kegiatan Pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
		8 Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
		9 Kegiatan Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
6	Program Pembinaan PKL dan Asongan	1 Kegiatan Pembinaan PKL
7	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	1 Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/Modal di Pasar
		2 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
		3 Kegiatan Program Pasar Bersih (PROPASIH)
		4 Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar-Pasar di Kota Madiun
		5 Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional
		6 Kegiatan Gerakan Kembali Ke Pasar
		7 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pendukung Pasar-pasar
		8 Kegiatan Pendataan Pengunjung Pasar yang dikelola Dinas Pasar

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh **Dinas Perdagangan Kota Madiun** pada Tahun 2019, sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	914.180.232,00	866.939.753,00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	471.167.944,00	434.499.197,00
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8 jenis
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	443.012.288,00	432.440.556,00
	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	82 kali	88 kali
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	548.152.598,00	368.047.933,00
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	48.598.118,00	42.629.200,00
	Output : Jumlah gedung dan bangunan dalam kondisi baik	3 gedung	3 gedung
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	403.347.408,00	246.857.153,00
	Output : Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	40 unit	40 unit
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	96.207.072,00	78.561.580,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	47 unit alat kantor, 4 software, jaringan telekomunikasi dan repeater	47 unit alat kantor, 4 software, jaringan telekomunikasi dan repeater
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	83.591.440,00	26.073.566,00
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	83.591.440,00	26.073.566,00
	Output : Penyusunan laporan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen

No	Uraian	Target	Realisasi
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95.000.000,00	93.498.000,00
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	95.000.000,00	93.498.000,00
	Output : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	14 unit alat kantor	14 unit alat kantor
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.011.645.000,00	783.911.615,00
1	Kegiatan Pameran Dagang	169.937.040,00	135.817.318,00
	Output : Jumlah produk yang dipamerkan	13 jenis	13 jenis
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
2	Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk	330.527.040,00	251.604.585,00
	Output : Jumlah partisipasi dalam pameran perdagangan	3 kota	3 kota
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
3	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (DBH-CHT)	41.288.816,00	30.512.900,00
	Output : Jumlah informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Nihil	Nihil
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
4	Kegiatan Membangun Jejaring dengan Exportir	37.750.520,00	27.101.400,00
	Output: Jumlah pengusaha	50 pengusaha	50 pengusaha
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
5	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	55.925.744,00	31.779.600,00
	Output : Jumlah lokasi yang diawasi	3 pasar	3 pasar
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
6	Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan	36.778.144,00	21.998.106,00
	Output : Jumlah perijinan perdagangan	100 perijinan	100 perijinan

No	Uraian	Target	Realisasi
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
7	Kegiatan Pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	20.753.280,00	18.357.326,00
	Output : Jumlah alat UTTP yang diawasi	1000 UTTP	1000 UTTP
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
8	Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	23.753.280,00	23.282.898,00
	Output : Jumlah barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diawasi	300 buah	300 buah
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
9	Kegiatan Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	294.931.136,00	243.457.482,00
	Output : Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang di kantor, diluar kantor dan di tempat pakai	7000 UTTP	7000 UTTP
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
6	Program Pembinaan PKL dan Asongan	129.812.040,00	109.316.611,00
1	Kegiatan Pembinaan PKL	129.812.040,00	109.316.611,00
	Output : Jumlah PKL yang dibina	600 PKL	600 PKL
	Outcome : Persentase peningkatan Pembinaan PKL dan Asongan	100%	100 %
7	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	6.033.588.464.00	4.196.450.525.00
1	Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/Modal di Pasar	215.924.944.00	174.999.326.00
	Output : Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Outcome : Omset Pasar Tradisional	522.509.000.000	547.949.142.888
2	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	532.129.240.00	403.372.967.00
	Output : Jumlah pasar yang dikembangkan Sarana dan Prasarannya	17 pasar	17 pasar
	Outcome : Tercapaiannya peningkatan PAD sesuai dengan potensi	Rp. 3.400.000.000	Rp. 3.928.311.923
3	Kegiatan Program Pasar Bersih (PROPASIH)	1.432.846.560,00	1.417.811.604,00
	Output : Jumlah Pasar yang dibersihkan oleh unsur masyarakat	17 pasar	17 pasar
	Outcome : Jumlah pengunjung pasar tradisional	1.750.000	8.723.865
4	Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar-Pasar di Kota Madiun	866.795.760,00	771.570.060,00
	Output : Jumlah Pasar yang dijaga petugas keamanan	17 pasar	17 pasar
	Outcome : Omzet Pasar Tradisional	522.509.000.000	547.949.142.888

No	Uraian	Target	Realisasi
5	Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional	424.657.280.00	383.089.251.00
	Output : Jumlah pasar yang mengikuti gebyar undian dan pemberian cenderamata kepada wajib retribusi sewa pasar tradisional	7 pasar	7 pasar
	Outcome : Omzet Pasar Tradisional	522.509.000.000	547.949.142.888
6	Kegiatan Gerakan Kembali Ke Pasar	350.494.000,00	331.205.730,00
	Output : Jumlah peserta yang dilibatkan dalam kegiatan gerakan kembali ke pasar	600 Peserta	600 Peserta
	Outcome : Omzet Pasar Tradisional	522.509.000.000	547.949.142.888
7	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pendukung Pasar-pasar	588.990.680,00	525.733.587,00
	Output : Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan , pemeliharaan bangunan, listrik dan fasilitas pendukung pasar-pasar	17 Pasar	17 Pasar
	Outcome : Omzet Pasar Tradisional	522.509.000.000	547.949.142.888

d. Permasalahan dan Solusi

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun relatif stabil dengan nilai diatas 5 persen. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain di wlayah Karesidenan Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun merupakan yang tertinggi. (data demografi ekonomi dan social budaya Kota Madiun Tahun 2018) sehingga sebagai Dinas yang mengurus urusan perdagangan maka mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dengan mengetahui jumlah pertumbuhan ekonomi melalui data perputaran uang yang beredar di Kota Madiun.
2. Dengan adanya beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Kota Madiun, antara lain API (Akademi Perkereta Apian) akan ikut memacu dalam Pertumbuhan Ekonomi.
3. Dengan berdirinya beberapa Mall seperti Sun City, Madiun Plaza, Timbul Jaya Plaza, Carrefour, President Plaza, Lawu Plaza semakin mengisyaratkan status Kota Madiun ini sebagai Kota Perdagangan sehingga menambah dan membuat iklim Investasi di kota ini menjadi tumbuh subur. Maka tidak heran jika di Kota ini banyak ditemukan Mall dan Pusat Perdagangan, begitu juga sentra Kuliner dan Hiburan yang semakin menjamur, dan mengisyaratkan Kota ini seakan tidak ada matinya. Sarat akan aktivitas perekonomian yang semakin dinamis berubah mengikuti arah kemajuan zaman.

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

a. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian di Kota Madiun diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun.

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun. Sesuai dengan bidang kewenangannya, Dinas Tenaga Kerja memiliki tujuan yang hendak dicapai berdasarkan hasil analisa yang telah ditetapkan sesuai pada koridor Visi dan Misi. Adapun Tujuan yang diambil Dinas Tenaga Kerja dalam mengemban tugas di bidang perindustrian adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagakerjaan
2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis
3. Meningkatkan nilai PDRB di sektor perindustrian.

Dinas Tenaga Kerja dalam menentukan tujuan tersebut memiliki sasaran yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi dan misi dinas. Adapun sasaran Dinas Tenaga Kerja yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kompetensi dan daya saing ketenagakerjaan
2. Terwujudnya Jaminan Kesejahteraan Ketenagakerjaan
3. Meningkatkan nilai PDRB di sektor perindustrian.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.115
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat						
	Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor serta industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	17,48%*	17.20%	17.83%	103%

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut dapat diuraikan berikut :

1. Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB

Sektor Industri merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap PDRB di Kota Madiun setelah sektor perdagangan dan Lembaga Keuangan lainnya. Sektor industri dapat menyerap tenaga kerja terbesar, dengan laju pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Di Kota Madiun perkembangan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018. Dimana pada tahun 2018 sebesar 17,48 % dan mengalami kenaikan sebesar 0,35 % di tahun 2019 yang mencapai perolehan sebanyak 17,83 % dan capaian kinerja sebanyak 103,6 %.

Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.116
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian di Kota Madiun Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
C	Urusan Pemerintahan Pilihan				
27	Perindustrian				
27.1	Pertumbuhan industry	7,4	5,25	7,43	141,5%
27.2	Cakupan bina kelompok pengrajin	18	18	18	100%
27.3	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	17,48%*	17,20%	17,83 %	103%
27.4	Frekuensi Pemeriksaan Kadar Tar dan Nikotin dalam satu Tahun	4	4	4	100%
27.5	Jumlah IKM dan IRT	363	295	390	132%
27.6	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	0,02	0,03	0,03	100%
27.7	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang ESDM	2	2	2	100

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut dapat diuraikan berikut :

1. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri di Kota Madiun pada tahun 2019 sebesar 7,43 % dari target pertumbuhan industri 5,25 %. Perhitungan pertumbuhan industri dapat dihitung dari data jumlah IKM tahun 2019 dikurang data jumlah IKM tahun 2018 dibanding jumlah IKM tahun 2018 dikali 100%. Selisih perolehan pertumbuhan industri dari tahun 2019 dibanding tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,03 %. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan IKM di Kota Madiun dimana pada tahun 2019 jumlah IKM di Kota Madiun sebanyak 390 IKM. Kenaikan IKM ini disebabkan menjamurnya pebisnis-pebisnis muda yang memiliki inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan usaha-usaha baru.

2. Cakupan bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin di tahun 2019 sebesar 18 kelompok pengrajin, hal ini sama dengan jumlah kelompok pengrajin tahun 2018. Apabila dikaitkan dengan target tahun 2019, maka cakupan bina kelompok pengrajin ini capaian kinerjanya 100%.

Pencapaian kinerja ini dikarenakan adanya bermunculan kelompok pengrajin – pengrajin baru dengan jenis bahan dan hasil kerajinan atau barang yang sama. Jenis kelompok pengrajin Tahun 2019 antara lain :

- a. Kelompok IKM pengrajin kayu,
- b. Kelompok IKM pengrajin tahu,
- c. Kelompok IKM pengolahan makanan,
- d. Kelompok IKM sambel pecel,
- e. Kelompok IKM membuat tempe kripik Sogaten,
- f. Kelompok IKM Batik Tulis,
- g. Kelompok IKM Batik Warna Alami,
- h. Kelompok IKM Rajut,
- i. Kelompok IMK Snock,
- j. Kelompok IMK Mebeler/ Furniture,
- k. Kelompok IKM Bordir Lukis,
- l. Kelompok IKM Souvenir,
- m. Kelompok IKM Krupuk Lembeng,
- n. Kelompok IKM Tempe Sayur,
- o. Kelompok IKM Kalin Lukis,
- p. Kelompok IKM Jamu,
- q. Kelompok IKM Anyaman Plastik,
- r. Kelompok IKM membuat tempe kripik Sidodadi.

Pencapaian kinerja yang 100 % ini juga disebabkan adanya pemberdayaan IKM serta pembinaan dan pengawasan IKM, dimana IKM diberikan informasi serta motivasi guna kemajuan IKM di Kota Madiun.

3. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor Industri merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap PDRB di Kota Madiun setelah sektor perdagangan dan Lembaga Keuangan lainnya. Sektor industri dapat menyerap tenaga kerja terbesar, dengan laju pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Di Kota Madiun perkembangan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018. Dimana pada tahun 2018 sebesar 17,48 % dan mengalami kenaikan sebesar 0,35 % di tahun 2019 yang mencapai perolehan sebanyak 17,83 % dan capaian kinerja sebanyak 103 %.

4. Frekwensi Pemeriksaan Kadar Tar dan Nikotin dalam satu tahun

Sebagian besar penduduk di Indonesia adalah pecandu rokok dan sebagian besar dari mereka mengetahui efek negatif dari rokok. Disisi lain rokok memberikan kontribusi terhadap negara berupa cukai rokok sangat besar. Akan tetapi kampanye anti rokok dari pemerintah demi kesehatan juga ditingkatkan.

Kita ketahui bersama bahwa rokok mengandung elemen yang komposisinya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan dan elemen yang paling berbahaya dalam kandungan rokok adalah zat nikotin, tar dan karbon monoksida.

Berdasarkan bahaya kandungan rokok tersebut, pemerintah perlu kiranya mencari cara guna mengurangi atau membatasi kandungan kadar tar dan nikotin.

Mensikapi bahaya kadar tar dan nikotin, Pemerintah Kota Madiun mengadakan uji laboratorium kadar tar dan nikotin untuk mengetahui jumlah kadar tar dan nikotin didalam rokok. Pengujian kadar tar dan nikotin dilakukan setiap 3 bulan sekali di Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau di Jember. Setiap tahun, pelaksanaan uji lab kadar tar dan nikotin dilakukan secara rutin berkala 3 bulan sekali.

Pengadaan uji laboratorium kadar tar dan nikotin dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja di setiap tahun nya tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dengan kata lain disetiap tahun targetkan sebanyak 4 kali dan dilaksanakan sebanyak 4 kali juga.

5. Jumlah IKM dan IRT

Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun mempunyai urusan pemerintahan di bidang perindustian dimana di dalam tugas pokok dan fungsi diantaranya menangani urusan Industri Kecil Menengah dan Industri Rumah Tangga. Berkaitan dengan penanganan tersebut, perlu kiranya mengetahui jumlah dari IKM dan IRT yang ada di Kota Madiun. Pada tahun 2019 jumlah IKM dan IRT di Kota Madiun sebanyak 390 IKM / IRT dengan target jumlah IKM / IRT sebanyak 295 IKM / IRT. Jika dilihat di tahun 2018, jumlah IKM/ IRT mengalami kenaikan sebanyak 27 IKM/ IRT dimana IKM/ IRT di tahun 2018 sebanyak 363 IKM/ IRT. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi di

Kota Madiun dan adanya fasilitasi dari Pemerintah Kota Madiun dibidang industri dengan diadakannya pembinaan, pelatihan- pelatihan maupun pameran – pameran yang telah diadakan secara Lokal dan Nasional.

6. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam kategori pertambangan dan penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

7. Jumlah Laporan Pengawasan Bidang ESDM

Untuk mengetahui jumlah pemakaian dari air, listrik dan telpon di gedung-gedung pemerintahan di Kota madiun. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh informasi penghematan energi setiap bulan. Dari data yang masuk tersebut akan didokumentasikan berupa laporan hemat energi. Laporan tersebut dilaporkan ke pemerintah propinsi disetiap akhir tahun. Ditahun 2018 dan Tahun 2019 dilaksanakan 2 laporan penghematan yaitu penghematan energi dan penghematan BBM, dimana sejak tahun 2016, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan pembuatan laporan penghematan BBM diambil alih menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian di Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun pada tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	
1	program pengembangan industri kecil menengah	1	Kegiatan Sosialisasi Penerapan Standart Produk Industri Manufactur
		2	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan menengah tingkat lokal dan nasional
		3	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Tingkat Nasional (INACRAFT)
		4	Kegiatan pelatihan peningkatan Ketrampilan Teknik Perbengkelan
		5	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi IKM/IRT melalui pelatihan makanan olahan

No	Program	Kegiatan	
		6	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan bagi IKM/IRT melalui pelatihan peningkatan Produksi Souvenir
		7	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui good manufacturing practies DBH-CHT
		8	kegiatan fasilitas pemberdayaan IKM/IRT oleh dekranasda
		9	kegiatan pengembangan industri kreatif
		10	kegiatan gizi sosialisasi dan fasilitasi uji nilai gizi produk makanan olahan

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direalisasi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian di Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun pada tahun 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pengembangan industri kecil menengah	1.152.354.000,00	
1	Kegiatan Sosialisasi Penerapan Standart Produk Industri Manufactur	75.750.000,00	71.511.670,-
	Output : jumlah peserta sosialisasi	20	20
	Outcome :meningkatkan pertumbuhan sektor industri	295	390
2	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan menengah tingkat lokal dan nasional	165.000.000,00	150.707.132,-
	Output : jumlah keikut sertaan dalam pameran	1 kegiatan	1 kegiatan
	Outcome : meningkatkan pertumbuhan sektor industri	295	390
3	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Tingkat Nasional (INACRAFT)	158.765.000,00	143.321.450,-
	Output :jumlah keikutsertaan dalam pameran	1 kegiatan	1 kegiatan
	Outcome : meningkatkan pertumbuhan sektor industri	295	390
4	Kegiatan pelatihan peningkatan Ketrampilan Teknik Perbengkelan	98.483.000,00	94.663.603,-
	Output :Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan	10	10
	Outcome :Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor Industri	295	390
5	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi IKM/IRT melalui pelatihan makanan olahan	46.702.000,00	39.090.897,-

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan	10	10
	Outcome : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor Industri	295	390
6	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan bagi IKM/IRT melalui pelatihan peningkatan Produksi Souvenir	58.654.000,00	53.841.069,-
	Output : Jumlah IKM / IRT yang mengikuti pelatihan	30	30
	Outcome : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor Industri	295	390
7	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui good manufacturing practies DBH-CHT	100.000.000,00	76.966.614,-
	Output : frekuensi pemeriksaan kadar tar dan nikotin	4 pengujian	4 pengujian
	Outcome : meningkatnya pertumbuhan industri	295	390
8	kegiatan fasilitas pemberdayaan IKM/IRT oleh dekranasda	300.000.000,00	271.998.775,-
	Output : jumlah keikut sertaan deskranasda	4 kegiatan	4 kegiatan
	Outcome : meningkatkan pertumbuhan sektor industri	295	390
9	kegiatan pengembangan industri kreatif	65.000.000,00	58.317.416,-
	Output : Jumlah peserta pengembangan Kreatif	20 kegiatan	20 kegiatan
	Outcome : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor Industri	295	390
10	kegiatan sosialisasi dan fasilitasi uji nilai gizi produk makanan olahan	84.000.000,00	78.824.869,-
	Output : jumlah peserta sosialisasi	20 kegiatan	20 kegiatan
	Outcome : meningkatnya pertumbuhan industri	295	390

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang sampai saat ini dihadapi adalah merubah sebagian mindset pengusaha untuk melakukan inovasi usaha sesuai perkembangan. Adapun solusi saat ini memberikan pemberdayaan, pembinaan serta melakukan promosi guna mengembangkan mindset pengusaha.

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

a. Tujuan dan Sasaran

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.117
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
C Urusan Pemerintahan Pilihan					
28 Ketransmigrasian					
28.1	Jumlah Sosialisasi	1	1	1	100%
28.2	Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja	1	1	1	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut dapat diuraikan berikut :

1. Jumlah Sosialisasi

Kegiatan Ketransmigrasian dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dengan kegiatan sosialisasi ketransmigrasian yang ditujukan kepada masyarakat Kota Madiun. Pada tahun 2019, kegiatan sosialisasi ketransmigrasian dilaksanakan 1 kali pelaksanaan dengan peserta dari 3 kecamatan dengan peserta terdiri dari masing- masing kecamatan yang dihadiri 36 orang sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 108 peserta. Jika dilihat dari tahun 2018 tidak mengalami perubahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dimana pada tahun 2018 juga dilaksanakan 1 kali pelaksanaan sosialisasi.

Untuk pelaksanaan sosialisasi di tahun 2019 dilaksanakan sekali pelaksanaan dikarenakan adanya kuota transmigran dari pemerintah pusat ke pemerintah propinsi Jawa Timur hanya 64 peserta dan yang diutamakan pemerintah kabupaten dan diprioritaskan petani. Selain itu animo masyarakat Kota Madiun untuk mengikuti kegiatan transmigrasi sangat rendah.

2. Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja

Indikator peningkatan kesempatan kerja yang terkait dengan bidang transmigrasi adalah perbandingan antara pendaftar kegiatan transmigrasi setiap tahun dibanding dengan peserta transmigrasi yang mendapatkan rekomendasi ke pemerintah propinsi.

Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi peserta transmigrasi ke pemerintah propinsi.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi di **Dinas Tenaga Kerja** pada tahun 2019 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	
1	program ketransmigrasian	1	Kegiatan Penyelenggaraan Ketransmigrasian

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direalisasikan pada Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi di **Dinas Tenaga Kerja** pada tahun 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program ketransmigrasian	29.764.480,00	29.294.352
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Ketransmigrasian	29.764.480,00	29.294.352
	Output : jumlah program ketrasmigrasian	1 sosialisasi	1 sosialisasi
	Outcome : prosentase pencari kerja yang di tempatkan	79%	85,52%

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Target penempatan transmigrasi ditentukan oleh pemerintah propinsi
2. Penempatan transmigrasi semakin menurun karena adanya otonomi daerah
3. Diutamakan disektor pertanian

Solusi

1. Mengirim data calon transmigrasi ke propinsi
2. Memberikan rekomendasi kepada peserta transmigrasi yang memenuhi syarat setelah adanya verifikasi dari pemerintah propinsi

C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. UNSUR STAF

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah menyelenggarakan Fungsi Penunjang Unsur Staf.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good and clean governance pada penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk mencapai tujuan Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan dengan sasaran meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan dan meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah.

Indikator kinerja sasaran yang utama adalah prosentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.118
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa						
1.	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	B	BB	B	96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,85	79,5	88,45	100%

Sumber Data : Bagian Organisasi, Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka telah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Tim Nasional EPPD pada Pemerintah Kota Madiun tiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, Pemerintah Kota Madiun meraih nilai 3,3056 dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang memperoleh nilai 3,2399.

No	Tahun	Peringkat	Skor	Status
1	2015	1	3,3702	Sangat Tinggi
2	2016	5	3,2055	Sangat Tinggi
3	2017	N/A	-	-
4	2018	25	3,2399	Sangat Tinggi
5	2019	7	3,3056	Sangat Tinggi

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kategori hasil penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :

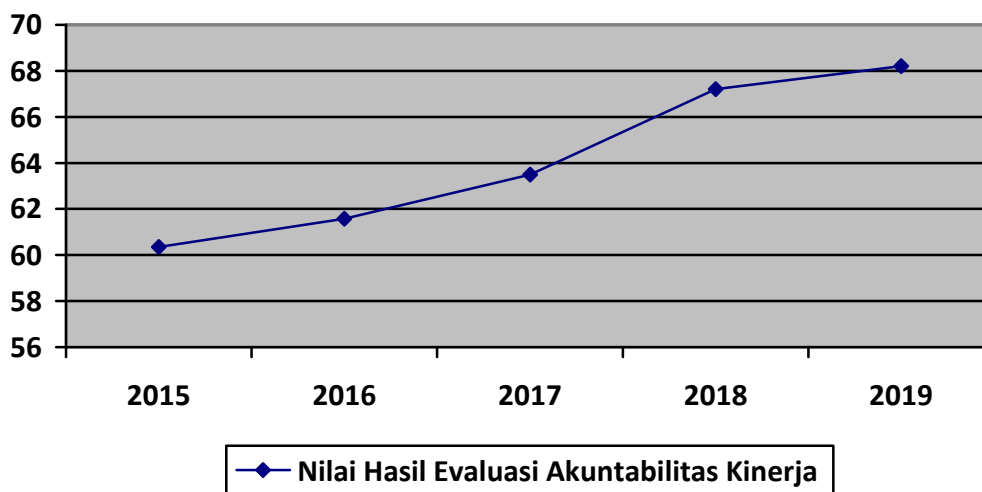
No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1 .	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2 .	A	>80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4 .	B	>60 -70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5 .	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
6.	C	>30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Adapun komponen-komponen penilaian SAKIP diuraikan sebagai berikut :

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	17,40	22,43	21,65	22,43	23,32
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,42	15,52	16,82	17,24	17,25
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,43	8,78	9,81	10,17	10,18
d.	Evaluasi Internal	10	4,57	4,49	4,16	6,23	6,24
e.	Capaian Kinerja	20	11,53	10,35	11,06	11,14	11,21
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,35	61,58	63,50	67,21	68,20
Tingkat Hasil Evaluasi			B	B	B	B	B

Grafik III.6
 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Madiun
 Tahun 2015-2019



Secara umum terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tabel dan grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut (Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018) realisasi kerjanya mengalami kenaikan namun secara kategori nilai akuntabilitas Pemerintah Kota Madiun masih tetap bernilai B.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat

terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Variabel penelitian ini terbagi menjadi beberapa aspek, diantaranya :

A. Variabel Indikator Pelayanan Publik 9 (sembilan) ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, antara lain:

1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
 3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
 4. Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
 6. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
 7. Perilaku Pelaksana Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
-

9. Sarana dan prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Kesembilan unsur pelayanan diatas dijabarkan dalam beberapa item pertanyaan. Selanjutnya responden memberikan penilaian harapan dan kepuasannya, melalui skala likert (1-4) sebagai berikut :

- Pada bagian harapan, responden menilai harapan atau ekspektasi dengan pilihan jawaban :

STP (1) = Sangat Tidak Penting, berarti harapan sangat rendah.

TP (2) = Tidak Penting, berarti harapan rendah.

P (3) = Penting, berarti harapan tinggi.

SP (4) = Sangat Penting, berarti harapan sangat tinggi

- Pada bagian kepuasan, responden memberikan penilaian dengan pilihan jawaban :

STP (1) = Sangat Tidak Puas

TP (2) = Tidak Puas

P (3) = Puas

SP (4) = Sangat Puas

B. Variabel Demografi Responden

Pada bagian ini responden akan ditanya dengan pertanyaan tertutup seputar kondisi demografinya, yang meliputi : jenis kelamin, usia, pekerjaan utama, pendidikan terakhir, pengeluaran rumah tangga, lama tinggal di Kota Madiun.

C. Saran dan Harapan Masyarakat

Pada bagian ini, penyedia jasa akan menggali secara kualitatif, saran dan harapan yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan infrastruktur dan kesesuaian persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Madiun.

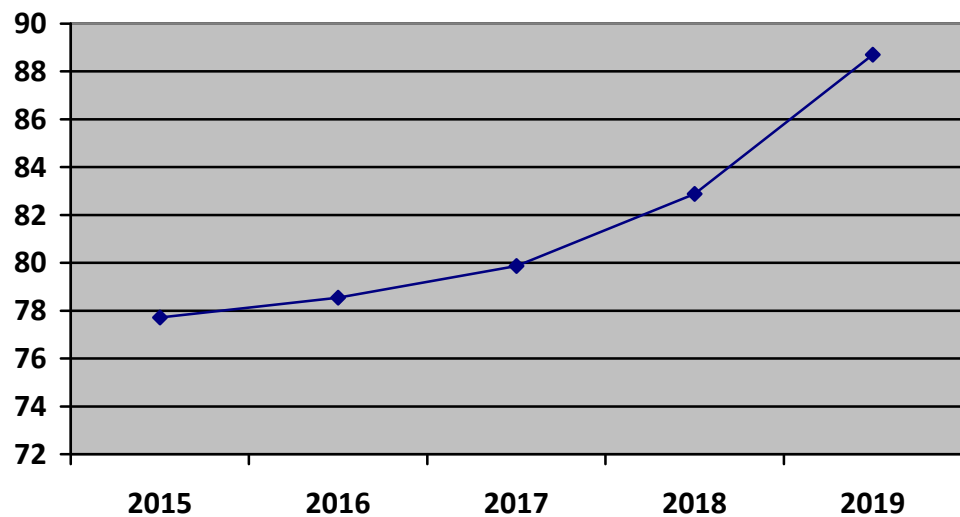
Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran pada nilai indeks kepuasan konsumen dan mengacu pada pengelompokkan kinerja unit pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel III.119
 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik
4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik

Grafik III.7
 Perkembangan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2015-2019



Pada grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut (Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) realisasi kinerjanya mengalami kenaikan apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.120
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Unsur Staf pada Tahun 2018 s.d. 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1 Otonomi Daerah					
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,93	6,2	5,69	84%
2	Indeks Pembangunan Manusia	80,13	79,63	80,15	101%
3	Laju Inflasi	4,78	4-6	2,71	
4	PDRB Perkapita	68,94	67,69	68,94	135%
B Fungsi Penunjang Pemerintahan					
29 Unsur Staf					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.85	79.5	88,45	100%
2	Prosentase capaian SPM	89,58	81,5	82,76	101,5%
3	Perubahan kelembagaan dan Tupoksi SKPD	ada	ada	ada	ada
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	B	96%
5	Persentase SKPD yang memiliki SOTK sesuai standart yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Pedoman dan Prosedur Kerja Ketatalaksanaan	1	1	1	100%
7	Prosentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sesuai dengan Road Map RB	60	100	100	100%
8	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu	100,00%	83,63%	100,00%	119%
9	Persentase Jumlah Kelembagaan yang sesuai dengan Perundang- undangan	100	100	100	100%
10	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kota yang baik	100	100	100	100%
11	Nilai EKPPD	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	200%
12	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bidang Pemerintahan	356	582	605	103,95%
13	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan daerah Lain	4	4	4	100%
14	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Otodana	10	5	12	240%
15	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	100	100	100	100 %
16	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100	100	100	100%
17	Persentase PD yang telah dilakukan Anjab dan ABK	100	100	100	101%
II ASPEK DAYA SAING DAERAH					
A Fokus Kemampuan Ekonomi daerah					
1 Otonomi Daerah					

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00338	0,00341	0,0028	84,8%
2	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100	100	100	100%

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Madiun

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun selama kurun waktu terakhir relatif stabil dengan nilai diatas 5 persen. Pada tahun 2019 sebesar 5,69. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun yang masih relatif tinggi ini menggambarkan bahwa regulasi dan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah daerah, secara riil mampu menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan ekonomi daerah, dan juga mencerminkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi daerah yang baik.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kota madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu, Indeks Kesehatan, Angka Harapan hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel III.121
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s.d. 2018

Indeks	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
IPM	79,48	80,01	80,13	80,15	80,88
Angka Harapan Hidup	72,41	72,44	72,54	72,54	72,75
Angka Harapan Lama Sekolah	14,06	14,19	14,20	14,20	14,39
Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,08	11,09	11,10	11,10	11,13
Daya Beli (000 Rp)	14.723	15.300	15.415	15.415	16.040

Sumber Data : BPS Kota Madiun

IPM Kota Madiun mengalami kenaikan selama rentang waktu lima tahun terakhir, dan terus meningkat setiap tahunnya. Capaian IPM Kota Madiun sebesar 79,48 persen pada tahun 2015, dan pada Tahun 2019 IPM Kota Madiun mencapai 80,88. IPM di atas 80 persen merupakan kategori sangat tinggi. Sedang, dibawah 60 masuk kategori rendah.

IPM Kota madiun terus mengalami tren positif, dan diprediksi juga masih terjadi beberapa tahun kedepan. Hal itu dapat dilihat dari capaian sejumlah item yang mengalami tren serupa seperti bidang kesehatan dan pendidikan.

3. Laju Inflasi

Tingkat Inflasi Kota Madiun tahun kalender 2019 adalah sebesar 2,2 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen pada kelompok Bahan Makanan sebesar 1,05 persen, kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa sebesar 0,59 persen, kelompok Kesehatan sebesar 0,23 persen, dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,17 persen. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga mengalami deflasi sebesar 0,01 persen, kelompok Sandang sebesar 0,06 persen dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,07 persen.

Kenaikan Indeks Harga Konsumen di Kota Madiun dipicu oleh naiknya harga pada beberapa komoditas yang dominan diantaranya: telur ayam ras, tarif kereta api, bawang merah, pepaya, dan tomat sayur.

4. PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu. Secara konsepsional PDRB Perkapita, diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama
-

B. Fungsi Penunjang Pemerintahan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Variabel penelitian ini terbagi menjadi beberapa aspek, diantaranya :

- A. Variabel Indikator Pelayanan Publik 9 (sembilan) ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, antara lain:
1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
 3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
 4. Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
 6. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
 7. Perilaku Pelaksana Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
 9. Sarana dan prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
-

Kesembilan unsur pelayanan diatas dijabarkan dalam beberapa item pertanyaan. Selanjutnya responden memberikan penilaian harapan dan kepuasannya, melalui skala likert (1-4) sebagai berikut :

- Pada bagian harapan, responden menilai harapan atau ekspektasi dengan pilihan jawaban :

STP (1) = Sangat Tidak Penting, berarti harapan sangat rendah.

TP (2) = Tidak Penting, berarti harapan rendah.

P (3) = Penting, berarti harapan tinggi.

SP (4) = Sangat Penting, berarti harapan sangat tinggi

- Pada bagian kepuasan, responden memberikan penilaian dengan pilihan jawaban :

STP (1) = Sangat Tidak Puas

TP (2) = Tidak Puas

P (3) = Puas

SP (4) = Sangat Puas

B. Variabel Demografi Responden

Pada bagian ini responden akan ditanya dengan pertanyaan tertutup seputar kondisi demografinya, yang meliputi : jenis kelamin, usia, pekerjaan utama, pendidikan terakhir, pengeluaran rumah tangga, lama tinggal di Kota Madiun.

C. Saran dan Harapan Masyarakat

Pada bagian ini, penyedia jasa akan menggali secara kualitatif, saran dan harapan yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan infrastruktur dan kesesuaian persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Madiun.

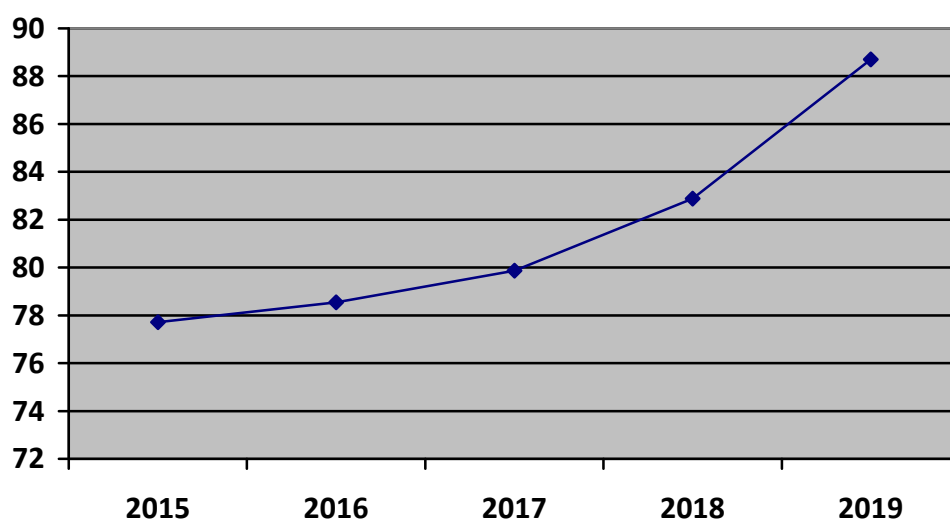
Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran pada nilai indeks kepuasan konsumen dan mengacu pada pengelompokkan kinerja unit pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel III.122

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik
4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik

Grafik III.8
Perkembangan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Madiun
Tahun 2015-2019



Pada grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut (Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) realisasi kinerjanya mengalami kenaikan apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019 sebesar 82,76 %, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 81,5%.

3. Perubahan Kelembagaan dan Tupoksi SKPD

Perubahan kelembagaan dan tupoksi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2019 masih dalam tahap proses penetapan peraturan walikota yang direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2020. Terdapat 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah yang masuk dalam perubahan kelembagaan dan tupoksi, diantaranya yaitu :

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 3) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- 4) Dinas Lingkungan Hidup
- 5) Kecamatan dan
- 6) Kelurahan

Pada tahun 2020 akan dilakukan perubahan SOTK terhadap 4 Perangkat Daerah yaitu :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
 3. RSUD
 4. Badan Kepegawaian Daerah
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

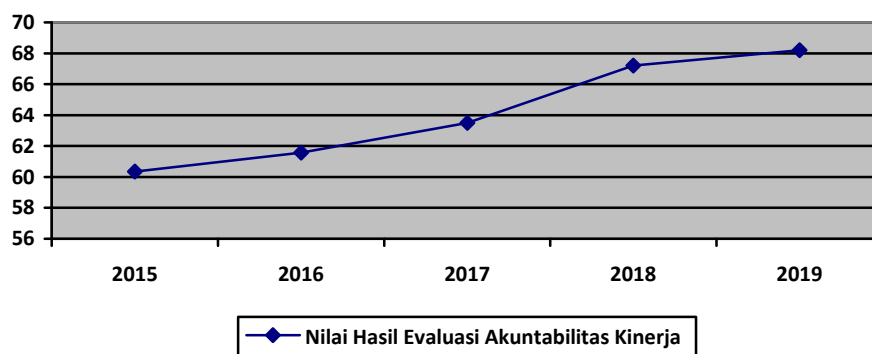
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kategori hasil penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1 .	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2 .	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4 .	B	>60 -70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5 .	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Adapun komponen-komponen penilaian SAKIP diuraikan sebagai berikut :

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	17,40	22,43	21,65	22,43	23,32
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,42	15,52	16,82	17,24	17,25
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,43	8,78	9,81	10,17	10,18
d.	Evaluasi Internal	10	4,57	4,49	4,16	6,23	6,24
e.	Capaian Kinerja	20	11,53	10,35	11,06	11,14	11,21
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,35	61,58	63,50	67,21	68,20
Tingkat Hasil Evaluasi			B	B	B	B	B

Grafik III.9
 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Madiun
 Tahun 2015-2019



Secara umum terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tabel dan grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut (Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018) realisasi kinerjanya mengalami kenaikan namun secara kategori nilai akuntabilitas Pemerintah Kota Madiun masih tetap bernilai B.

5. Persentase SKPD yang memiliki SOTK sesuai standart yang ditetapkan

SOTK Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. SOTK secara kewenangan dan besaran sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

6. Jumlah Pedoman dan Prosedur Kerja Ketatalaksanaan

Realisasi pada Tahun 2018 untuk indikator jumlah pedoman dan prosedur kerja ketatalaksanaan dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota tentang Penetapan SOP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sedangkan target untuk Tahun 2019 terdapat 1 (satu) dokumen dan realisasi Tahun 2019 yaitu telah disusun Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebanyak 1 (satu) dokumen.

7. Prosentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sesuai dengan Road Map RB

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019 pada Delapan Area Perubahan yang meliputi :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dari 8 (delapan) area perubahan tersebut pada Tahun 2019 terdapat 60 kegiatan rencana aksi dengan target 100 dengan realisasi presentase capaian kinerja 100 %. Pencapaian kinerja tersebut didorong oleh adanya Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensinya masing-masing, selain itu juga didukung

oleh sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai sangat menentukan berkalitas atau tidaknya suatu pelayanan yang diberikan masyarakat, dan adanya koordinasi antar Perangkat Daerah untuk bersinergi dalam mencapai rencana perubahan.

8. Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu

Berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, batas akhir pengiriman Laporan Kinerja pada akhir bulan Maret. Dengan dasar asas ketaatan dan kepatuhan tersebut seluruh Perangkat Daerah mampu menyelesaikan Laporan Kinerja tepat waktu dan menyampaikan Laporan tersebut dalam esr.menpan.go.id per tanggal 31 Maret 2019 sehingga persentase SKPD yang menyelesaikan Laporan Kinerja tepat waktu yaitu 100%.

9. Persentase Jumlah Kelembagaan yang sesuai dengan Perundang-undangan

Besaran jumlah kelembagaan sudah disesuaikan dengan kriteria yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Madiun Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	NOMOR PERWAL	PERANGKAT DAERAH
1.	14 September 2018	21	Sekretariat Daerah
2.	14 September 2018	22	Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
3.	14 September 2018	23	Inspektorat
4.	14 September 2018	24	Dinas Pendidikan
5.	14 September 2018	25	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
6.	14 September 2018	26	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
7.	14 September 2018	27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	14 September 2018	28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	TANGGAL	NOMOR PERWAL	PERANGKAT DAERAH
9.	14 September 2018	29	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
10.	14 September 2018	30	Dinas Perdagangan
11.	14 September 2018	31	Dinas Tenaga Kerja
12.	14 September 2018	32	Dinas Komunikasi dan Informatika
13.	14 September 2018	33	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14.	14 September 2018	34	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15.	14 September 2018	35	Dinas Perhubungan
16.	14 September 2018	36	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.	14 September 2018	37	Dinas Lingkungan Hidup
18.	14 September 2018	38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	14 September 2018	39	Satuan Polisi Pamong Praja
20.	14 September 2018	40	Badan Kepegawaian Daerah
21.	14 September 2018	41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
22.	14 September 2018	42	Badan Pendapatan Daerah
23.	14 September 2018	43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24.	14 September 2018	44	Kecamatan
25.	14 September 2018	45	Rumah Sakit Umum Daerah
26.	14 September 2018	46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27.	14 September 2018	47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

10. Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintahan Kota dapat terlaksana dengan baik. Termasuk dalam cakupan ini adalah tersedianya sarana pendukung untuk Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten dan Pejabat terkait seperti Mobil Dinas dan Rumah Dinas dalam kondisi baik dan layak pakai.

11. Nilai EKPPD

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebesar 3,3056 lebih tinggi jika dibandingkan pada Tahun 2018 yaitu sebesar 3,2399.

12. Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah optimis dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, karena pelayanan kedinasan mengikuti agenda kegiatan pimpinan. Jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Bidang Pemerintahan dari kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019, meliputi :

a. Pelaksanaan Hari Besar Nasional 9 kegiatan, terdiri atas :

- 1) Hari Pendidikan Nasional
- 2) Hari Kebangkitan Nasional
- 3) Hari Kartini
- 4) Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
- 5) Hari Sumpah Pemuda
- 6) Hari Ibu
- 7) Hari Pahlawan
- 8) Hari Lahirnya Pancasila
- 9) Hari Kesaktian Pancasila

b. Pelaksanaan kegiatan undangan kedinasan, antara lain meliputi :

- 1) Undangan kedinasan dari unsur intern OPD Pemerintah Kota Madiun
 - 2) Undangan kedinasan dari unsur ekstern Pemerintah Kota Madiun
- Guna menunjang kesadaran masyarakat dan instansi vertikal dan horisontal mengenai pentingnya keprotokolan dalam setiap kegiatan yang melibatkan Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah, maka Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keprotokolan yang bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara Istana Kepresidenan Yogyakarta.

13. Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Daerah Lain

Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Daerah Lain pada Tahun 2019 sebanyak 44 kegiatan. Kegiatan fasilitasi kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh Bagian Adm Pemerintahan antara lain :

- Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)

Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Ke VII Tahun 2019 dilaksanakan di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. JKPI merupakan wadah koordinasi antar semua Kota/ Kabupaten pusaka di Indonesia. yang bertujuan untuk bersama-sama melestarikan pusaka alam dan budaya tersebut sebagai modal dasar untuk membangun masa depan.

Banyaknya kegiatan positif yang dinaungi oleh JKPI khususnya dalam pengembangan daerah yang maju namun tetap dengan budaya masing-masing membuat Kota Madiun aktif mengikuti seluruh kegiatan JKPI yang diadakan setiap tahun sekali.

- **Rakor Komisariat Wilayah IV**
Kegiatan Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2019 dilaksanakan di Kota Batu. Rakor Komwil IV membahas terkait isu-isu strategis, masalah serta solusi yang dihadapi oleh Daerah anggota Komwil IV tersebut. Hasil dari isu tersebut menjadi bahan Rakernas APEKSI.
- **Rakernas APEKSI**
Rapat kerja Nasional yang diikuti oleh seluruh anggota Rakor Komwil se-Indonesia pada tahun 2019 dilaksanakan di Kota Semarang. Rakernas APEKSI membahas issue strategis hasil dari Rakor Komwil yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing Rakor Komwil. Selain membahas permasalahan issue, kegiatan Rakernas APEKSI juga menampilkan pawai budaya masing-masing daerah dan bazar expo produk unggulan masing-masing daerah.
- **Fasilitasi Kesepakatan Bersama**
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum memfasilitasi semua OPD dilingkup Kota Madiun yang mempunyai kerjasama baik dengan Government maupun non Government. Selama tahun 2019 jumlah kerjasama MoU yang difasilitasi sebanyak 12 Kesepakatan Bersama.
- **Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri**
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum memfasilitasi penerimaan kunjungan kerja legislatif dari beberapa daerah. Selama tahun 2019 daerah yang pernah melakukan kunjungan kerja ke Kota Madiun adalah Kab. Tuban, Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Batang, Kab. Purworejo, Kab. Pemalang, Kab. Temanggung, Pemerintah Kota Banjarbaru, Kab. Magelang, Kota Surakarta, Kab. Sumedang, Kab. Bantul, Kabupaten Boyolali, Kab. Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Rembang, Kab. Mojokerto, Kab. Demak, Kab. Rembang, Kab. Sidoarjo, Kab. Jepara, Kab. Lumajang, Kab. Tegal, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Kendal, Pemerintah Kota Cirebon, Kab. Sleman.

14. Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Otoda

Fasilitas Pelaksanaan Otoda meliputi :

- Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Pada tahun 2019 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sebanyak 6 kali.

- Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil
Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil meliputi Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan, Lomba Kelurahan Tingkat Kota dan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur.
- Bintek Administrasi Kelurahan
- Koordinasi Penyusunan LKPJ Walikota
- Penyusunan LPPD Kota Madiun
- Penyusunan ILPPD Kota Madiun
- Penyusunan EKPPD Kota Madiun
- Peringatan Hari Otonomi Daerah
- Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur
- Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kunjungan Kerja Walikota Madiun ke Kelurahan pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu ke Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Tawangrejo.
- Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan

15. Persentase Perda yang dilakukan konsultasi publik

Jumlah usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah/Propemperda Tahun 2019 telah melalui konsultasi public dan telah 100% ditetapkan menjadi Perda.

$$\frac{\text{Jumlah Perda yang dikonsultasi publik}}{\text{Jumlah Perda yang ditetapkan}} \times 100 \% = \frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$$

16. Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik direalisasikan dengan adanya Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Gelar Pameran Pelayanan Publik, Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik, dan Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik. Target persentase pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun 2019 adalah 100 dengan realisasi 100 dengan capaian kinerja 100 % sama halnya dengan tahun sebelumnya pada tahun 2018.

17. Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan Anjab dan ABK

Target persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan ANJAB dan ABK pada Tahun 2019 adalah 100% dan realisasinya pada tahun 2019 yaitu 100%. Pada Tahun 2019 telah dilakukan Anjab dan ABK seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga disertai penginputan Anjab dan ABK ke dalam aplikasi SIMJAB.

C. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Rasio Tempat ibadah per satuan penduduk

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rasio tempat ibadah per satuan penduduk telah mengalami penurunan dari tahun 2018, hal ini dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah penduduk sedangkan jumlah tempat ibadah tidak mengalami perubahan. Dalam data tersebut juga di tahun 2019 rasio tempat ibadah per satuan penduduk belum mencapai target RPJMD.

2. Persentase Perda yang disahkan tepat waktu

Jumlah usulan Propemperda Tahun 2019 telah menjadi prioritas dan telah 100% ditetapkan menjadi Perda.

Tabel III.123
Peraturan Daerah Kota Madiun
Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Perda yang dikonsultasi publik	17 Raperda
2	Perda ditetapkan	17 Perda
3	Usulan Propemperda	9 Raperda
4	Perda ditetapkan	17 Perda

Dikarenakan proses Perda itu harus sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 maka bisa terjadi dari mulai pembahasan sampai dengan mendapatkan nomor register akan lintas tahun sehingga antara jumlah Propemperda dengan jumlah yang ditetapkan tidak sama. Namun demikian semua Raperda yang telah selesai dibahas akan ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan Program Pembentukan Perda (Propemperda).

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Unsur Staf yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah :

No	Program	Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1 kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
		2 kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
		3 kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program penataan daerah otonom baru	1 Kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah
		2 Kegiatan Bintek Administrasi Kelurahan
		3 Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur
		4 Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil
		5 Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
		6 Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
		7 Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ Walikota
		8 Kegiatan Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun
		9 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan
6	program peningkatan kerjasama antar daerah pemerintah daerah	1 Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU
		2 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)
		3 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)
		4 Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri

Program dan kegiatan Unsur Staf yang dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program penataan peraturan perundang-undangan	1	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah
		2	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
		3	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Program dan kegiatan Unsur Staf yang dilaksanakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun pada tahun 2019 adalah :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
			kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	1	Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik
		2	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan
		3	kegiatan pembinaan pelayanan publik
5	program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah	1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

No	Program	Kegiatan
		2 Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja
		3 Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		4 kegiatan penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota madiun
		5 kegiatan analisis jabatan

Program dan kegiatan Unsur Staf yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah :

No	Program	Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
		4 kegiatan pemeliharaan rumah dinas
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2 kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		3 kegiatan rehab gedung dan bangunan
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	1 kegiatan keprotokolan acara Pemerintah Kota
		2 kegiatan peningkatan kesegaran jasmani Sekretariat

Program dan kegiatan Unsur Staf yang dilaksanakan Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah :

No	Program	Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3 kegiatan pemeliharaan rutin/

No	Program	Kegiatan
		berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana kantor	1 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana aparatur
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program stabilisasi ekonomi daerah	1 Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
		2 Kegiatan Pembinaan BUMD
		3 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
		4 Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan melalui forum tatap muka, media elektronik, media cetak
		5 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
		6 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang Lembaga Keuangan
6	program peningkatan kualitas hidup beragama	1 Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji
		2 Kegiatan Peningkatan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan
		3 Kegiatan pengiriman khafilah MTQ

Program dan kegiatan Unsur Staf yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun pada tahun 2019 adalah :

No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
		2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
		3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5	Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional
		2 Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
		3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

No	PROGRAM	KEGIATAN	
		4	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standart Kegiatan Konstruksi
		5	Kegiatan Operasional ULP

c. Realisasi program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan Unsur Staf yang direalisasikan oleh **Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah** Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	538.291.000,00	522.544.034
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	308.291.000,00	291.730.768
	Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	4 jenis	4 jenis
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai	B	B
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	230.000.000,00	229.906.416
	Output : Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	22 kali	67 kali
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai Baik	B	B
2	program pemeliharaan barang milik daerah	33.974.000,00	33.071.000,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	2.000.000,00	1.952.500
	Output : Pemasangan Wallpaper Bagian Adm. Pemerintahan Umum	1 paket	1 paket
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai Baik	B	B
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	18.674.000,00	17.818.500
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit kendaraan roda empat dan 3 unit kendaraan roda dua	1 unit kendaraan roda empat dan 3 unit kendaraan roda dua
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai Baik	B	B
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	13.300.000,00	13.300.000,00
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	4 jenis barang	4 jenis barang
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai Baik	B	B

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	30.000.000,00	29.409.500,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	30.000.000,00	29.409.500,00
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	3 jenis barang	3 jenis barang
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai Baik	B	B
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.417.000,00	7.316.375,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	7.417.000,00	7.316.375,00
	Output : Jumlah Dokumen	4 dokumen	4 dokumen
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Bag/ Adm. Pem. Umum dinilai baik	B	B
5	program penataan daerah otonom baru	1.475.861.000,00	1.347.277.377,00
1	Kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah	29.425.000,00	29.090.727,00
	Output : Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah	1 kali	1 kali
	Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
2	Kegiatan Bintek Administrasi Kelurahan	116.630.000,00	110.611.625,00
	Output : Terlaksananya Bintek tentang administrasi kelurahan	150 peserta	150 peserta
	Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja tepat waktu	100%	100%
3	Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	58.533.000,00	56.554.418,00
	Output : Upacara Peringatan Hari Provinsi Jawa Timur	1 kali	1 kali
	Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
4	Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil	200.520.000,00	186.098.158
	Output : Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi Kelurahan berhasil	Tingkat kota=3 kelurahan, tingkat provinsi=1 kelurahan	Tingkat kota=3 kelurahan
	Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
5	Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	208.973.000,00	196.592.107,00
	Output : Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	6 kali	6 kali
	Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
6	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	677.840.000,00	551.905.303,00
	Output : Jumlah Kunjungan Kerja Walikota ke Kelurahan	6 kali	6 kali
	Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
7	Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ Walikota	66.600.000,00	65.044.490
	Output : Buku LKPJ Walikota Madiun	1 Dokumen	1 Dokumen
	Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
8	Kegiatan Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	102.340.000,00	98.581.796,00
	Output : Dokumen LPPD, ILPPD, dan EKPPD Kota Madiun Tahun 2015	3 Dokumen	3 Dokumen
	Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
9	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan	15.000.000,00	14.598.753,00
	Output : Dokumen Memori Serah Terima Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
6	program peningkatan kerjasama antar daerah pemerintah daerah	251.515.000,00	246.251.770,00
1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU	20.313.000,00	19.758.372,00
	Output : Jumlah MoU	5 dokumen	9 dokumen
	Outcome : Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	12 kali	12 kali
2	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)	59.813.000,00	59.227.843,00
	Output : Rakernas APEKSI, Muskomwil APEKSI dan Rakor JKPI	3 kali	3 kali
	Outcome : Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	4 kali	4 kali
3	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)	26.163.000,00	23.726.008,00
	Output : Rakor Pawitan Dirogo	1 kali	1 kali
	Outcome : Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	4 kali	4 kali
4	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri	145.226.000,00	143.539.547,00
	Output : Jumlah penerimaan kunjungan kerja di Kota madiun	20 kali	31 kali

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	4 kali	4 kali

Realisasi program dan kegiatan yang direalisasikan oleh **Bagian Hukum Sekretariat Daerah** Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	368.624.000,00	324.309.192,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	238.624.000,00	195.613.102,00
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	130.000.000,00	128.696.090,00
	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	60 kali
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah	40.009.600,00	31.126.450,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	2.500.000,00	0,00
	Output :Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	1 unit	0,00
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	20.547.600,00	16.253.950,00
	Output :Jumlah kendaraan dinas	1 unit	1 unit
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	16.962.000,00	14.872.500,00
	Output : Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	26 unit	26 unit
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.600.000,00	2.500.000,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	2.600.000,00	2.500.000,00
	Output :Jumlah sarana dan prasarana kantor	2 buah	2 buah
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.122.880,00	32.274.974,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	33.122.880,00	32.274.974,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output :Jumlah dokumen	5 dokumen	5 dokumen
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
5	program penataan peraturan perundang-undangan	1.031.424.964,00	
1	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	249.137.120,00	212.614.499,00
	Output : Jumlah raperda/perda, dokumen kompilasi dan sosialisasi	3 jenis	3 jenis
	Outcome :Persentase perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%
2	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	466.295.464,00	390.963.764,00
	Output :Jumlah pembinaan kadarkum,penyuluhan hokum dan penyelesaian kasus sengketa hukum	3 jenis	3 jenis
	Outcome : Persentase perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%
3	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	315.992.380,00	314.203.886,00
	Output : Jumlah himpunan lembaran daerah, bulletin informasi, lembaran lepas perda dan buku peraturan perundang-undangan	3 jenis	3 jenis
	Outcome : Persentase perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%

Realisasi program dan kegiatan Unsur Staf yang direalisasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	478.452.516,00	472.557.687,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	186.765.516,00	180.919.552,00
	Output : Jumlah peralatan penunjang	9	9
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	291.687.000,00	291.638.135,00
	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	42	42
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah	38.500.000,00	32.650.153,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	2.000.000,00	1.667.250,00
	Output : Jumlah gedung yang representatif	1	1
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	21.500.000,00	15.982.903,00
	Output : Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	6	6
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	15.000.000,00	15.000.000,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai	5	5
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	68.000.000,00	67.000.000,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	68.000.000,00	67.000.000,00
	Output : Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3	3
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
4	program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	732.228.000,00	700.883.839,00
1	Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik	288.123.000,00	271.513.608,00
	Output : Jumlah dokumen hasil evaluasi pelayanan publik	14	14
	Outcome : Prosentase PD yang tertib administrasi ketatalaksanaan	100%	100%
2	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	124.820.000,00	120.773.662,00
	Output : Jumlah dokumen Hasil pembinaan dan evaluasi yang disusun	1	1
	Outcome : Prosentase PD yang tertib administrasi ketatalaksanaan	100%	100%
3	kegiatan pembinaan pelayanan publik	319.285.000,00	308.596.569,00
	Output : Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	28	28
	Outcome : Prosentase PD yang tertib administrasi ketatalaksanaan	100%	100%
5	program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah	1.024.657.000,00	867.649.175,00
1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	310.000.000,00	191.591.446,00
	Output : Jumlah dokumen yang disusun	3	3
	Outcome : Prosentase PD dengan Nilai Akuntabilitas baik	100%	100%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
2	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	200.000.000,00	181.455.595,00
	Output : Jumlah Aparatur yang dibina dan keikutsertaan Gelar Budaya Kinerja	203	203
	Outcome : Prosentase PD dengan Nilai Akuntabilitas baik	100%	100%
3	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	114.657.000,00	110.388.079,00
	Output : Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	1	1
	Outcome : Prosentase PD dengan Nilai Akuntabilitas baik	100%	100%
4	kegiatan penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota madiun	200.000.000,00	194.950.444,00
	Output : Jumlah rancangan perda/perwal SOTK yang disusun	6	6
	Outcome : Prosentase PD dengan Nilai Akuntabilitas baik	100%	100%
5	kegiatan analisis jabatan	200.000.000,00	189.263.611
	Output : Jumlah dokumen yang disusun	28	28
	Outcome : Prosentase PD dengan Nilai Akuntabilitas baik	100%	100%

Realisasi program dan kegiatan Unsur Staf yang direalisasikan oleh **Bagian Umum Sekretariat Daerah** Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah :

No	Uraian	Target	Realisasi
1	program pelayanan administrasi perkantoran	6.687.797.770,00	5.906.104.281,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	4.269.926.770,00	3.508.425.032,00
	Output : Jumlah Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa	4 BP 19 BBJ	4 BP 19 BBJ
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2.417.871.000,00	2.397.679.249,00
	Output : Jumlah Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	563	701
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
2	program pemeliharaan barang milik daerah	3.461.009.400,00	2.544.651.688,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	479.369.500,00	417.977.114,00
	Output : Jumlah Pekerjaan	5 paket	5 paket
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	1.131.220.000,00	685.554.081,00

No	Uraian	Target	Realisasi
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas	38 unit	38 unit
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	230.880.000,00	166.001.000,00
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	10 Jenis	10 Jenis
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
4	kegiatan pemeliharaan rumah dinas	1.619.539.900,00	1.275.119.493,00
	Output : Jumlah Rumah Dinas	4 RD	4 RD
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8.430.568.688,00	7.719.607.349,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	3.979.014.280,00	3.555.508.564,00
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	113 unit	113 unit
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4.054.521.680,00	3.781.012.224,00
	Output : Jumlah Pakaian Dinas	3.725 potong	3.725 potong
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
3	kegiatan rehab gedung dan bangunan	397.032.728,00	383.086.561,00
	Output : Jumlah Gedung	2 Gedung	2 Gedung
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	145.008.000,00	126.900.606,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	145.008.000,00	126.900.606,00
	Output : Jumlah Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
5	program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	3.404.532.480,00	3.147.236.052,00
1	Kegiatan Keprotokolan acara Pemerintah Kota	3.140.426.160,00	2.898.483.821,00
	Output : Jumlah Acara HBN dan Kegiatan Pemkot Madiun	537 kegiatan & 1 pelatihan	559 kegiatan & 1 pelatihan
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	104,09 %
2	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani sekretariat	264.106.320,00	248.752.231,00
	Output : Jumlah Senam Yang Dilaksanakan	45 kali	45 kali
	Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %

Realisasi program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah :

No	Uraian	Target	Realisasi
1	program pelayanan administrasi perkantoran	458.257.540,00	330.601.042,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	278.257.540,00	150.601.042,00
	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Paket	8 Paket
	Outcome : Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100 %	100 %
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	180.000.000,00	180.000.000,00
	Output : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	50 kali	50 kali
	Outcome : Presentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100 %	100 %
2	program pemeliharaan barang milik daerah	33.042.000,00	25.208.452,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	2.000.000,00	229.500,00
	Output : Jumlah Gedung	1 unit	1 unit
	Outcome : Presentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100 %	100 %
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	21.842.000,00	19.498.452,00
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas	11	10
	Outcome : Presentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100%	90,9%
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	9.200.000,00	5.480.500,00
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	8 Laptop, 3 Unit AC 3 unit Printer, 1 Unit Mesn Ketik	8 Laptop, 3 Unit AC 3 unit Printer
	Outcome : Presentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100 %	93,3%
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.093.760,00	8.966.381,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	14.093.760,00	8.966.381,00
	Output : Jumlah Dokumen yang Dikerjakan	5 Dokumen (RKT, Renja, PK, Lap.Triwulan, LKJ)	5 Dokumen
	Outcome : Presentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100%

No	Uraian	Target	Realisasi
4	program stabilisasi ekonomi daerah	1.169.000.000,00	858.396.669,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	150.000.000,00	120.948.360,00
	Output : Jumlah Informasi yang disampaikan	3 jenis	3 jenis
	Outcome : Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	4 kegiatan	4 kegiatan
2	Kegiatan Pembinaan BUMD	150.000.000,00	106.567.187,00
	Output : Kontribusi PAD	3 BUMD	3 BUMD
	Outcome : Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	4 Kegiatan	4 Kegiatan
3	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	150.000.000,00	73.643.000,00
	Output : Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	12 Kali	12 kali
	Outcome : Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	6 Kegiatan	6 kegiatan
4	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan melalui forum tatap muka, media elektronik, media cetak	350.000.000,00	324.200.000,00
	Output : Jumlah Informasi yang Disampaikan	3 Macam	3 macam
	Outcome : Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	6 Kegiatan	6 Kegiatan
5	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	309.000.000,00	182.609.043,00
	Output : Jumlah Kegiatan Pengembangan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
	Outcome : Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	4 kegiatan	4 kegiatan
6	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang Lembaga Keuangan	60.000.000,00	50.429.079,00
	Output : Jumlah LKM yang sesuai kriteria	200 badan hukum	200 badan hukum
	Outcome : Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	6 Kegiatan	6 Kegiatan
5	program peningkatan kualitas hidup beragama	4.080.000.000,00	3.351.987.593,00
1	Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji	250.000.000,00	167.850.000
	Output :Jumlah Calon Jamaah Haji yang Terdaftar	250 Orang	197 Orang
	Outcome : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	2 Kali	2 kali
2	Kegiatan Peningkatan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan	3.580.000.000,00	3.019.573.593,00

No	Uraian	Target	Realisasi
	Output : Jumlah PHBI dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	13 Kegiatan	13
	Outcome : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	13 Kegiatan	13
3	Kegiatan pengiriman khafilah MTQ	250.000.000,00	164.564.000,00
	Output : Jumlah Peserta yang Menjadi Juara Tingkat Kota	10 Orang	11 Orang
	Outcome : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	2 Kali	2 kali

Realisasi program dan kegiatan yang direalisasikan oleh **Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah** Kota Madiun pada tahun 2019 adalah :

NO	PROGRAM KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	490.034.780	483.862.122
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	334.894.780	330.550.722
	Output : Jenis Barang dan Jasa Kantor	6 paket	6 paket
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	155.140.000	153.311.400
	Output : : Jumlah koordinasi dan onsultasi keluar daerah	1 Tahunan	1 Tahunan
	Outcome Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	361.680.000	355.631.870
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	317.000.000	313.369.500
	Output : Jumlah Gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	24.680.000	22.267.070
	Output : Jenis/Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	7	7
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	20.000.000	19.995.300
	Output : Jenis/Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	31	31
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	232.700.000	231.928.000
1	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	232.700.000	231.928.000
	Output : Jenis/Jumlah sarana dan prasarana	28 unit	28 unit
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %

NO	PROGRAM KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.752.000	21.738.229
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.752.000	21.738.229
	Output : Jumlah Dokumen	5 dokumen	5 dokumen
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
5	Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	701.985.760	658.901.293
1	Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	55.184.000	44.454.493
	Output : Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Prosentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	100 %	100 %
2	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	140.752.000	132.023.857
	Output : Jumlah personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa	150 orang	150 orang
	Outcome : Prosentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	100 %	100 %
3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	117.903.000	116.702.201
	Output : Buku Laporan Bulanan	20 laporan	20 laporan
	Outcome : Jumlah SKPD yang melaporkan Progres Fisik tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan	100 %	100 %
4	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standar Kegiatan Konstruksi	211.486.000	198.096.104
	Output : Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok
	Outcome : Prosentase Jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	100 %	100 %
5	Kegiatan Operasional ULP	176.660.760	167.624.638
	Output : Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilelang	150 paket	150 paket
	Outcome : Prosentase Jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	100 %	100 %

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a. Hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kota Madiun yang mendapat kategori B pada Tahun 2019. Pada dasarnya nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 mengalami kenaikan dari nilai 67,21 pada Tahun 2018 menjadi 68,20 pada Tahun 2019. Namun secara kategori nilai hasil evaluasi bernilai tetap yaitu berkategori B. Secara Umum Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan Sistem Sakip sebagai pelaksanaan manajemen kinerja, namun penerapan tersebut belum sepenuhnya mampu

- menggambarkan efektifitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja pada perumusan sasaran strategis kualitas indikator kinerja serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja
- b. Jumlah dan kualitas tenaga analisa kelembagaan yang belum memadai
 - c. Jumlah dan kualitas tenaga analisa jabatan yang belum memadai
 - d. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting anjab, ABK dan Penataan Kelembagaan
 - e. masih belum terpenuhinya tenaga administrasi dan keuangan;
 - f. masih kurangnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan;
 - g. masih belum terpenuhinya tenaga teknis untuk publikasi produk hukum;
 - h. masih belum terpenuhinya tenaga teknis untuk penyuluhan hukum.

Solusi

- menyesuaikan seluruh dokumen perencanaan kinerja RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan tetap mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti orientasi pada manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*) serta mekanisme cascade kinerja.
 - Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah sehingga penyusunan IKU mestinya mengacu pada kinerja tersebut.
 - Cascade kinerja agar dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD, sehingga penyusunan IKU semestinya mengacu kepada Cascade kinerja tersebut.
 - Menyempurnakan aplikasi Simonev, E-Sakip dan E-Planning sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, disamping itu perlu mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada baik yang terkait dengan kinerja, keuangan maupun penilaian individu, agar memudahkan manajemen maupun Pegawai dalam penerapan manajemen kinerja.
 - Menyempurnakan penyajian laporan kinerja Perangkat Daerah Kota Madiun sehingga penyajian analisis terhadap tidak tercapainya target
-

sudah memadai dan memanfaatkan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan

- Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal dengan meningkatkan kapasitas evaluator inpektorat sehingga mampu memberikan saran perbaikan yang konstruktif kepada Peraturan Daerah.
- Mendorong penerapan budaya kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan menyusun indikator kinerja yang selaras dengan kinerja Organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP).
- Penguatan budaya kinerja ini sebaiknya dilakukan dengan pelaksanaan review kinerja berjenjang secara berkala pada seluruh Perangkat daerah
- perlu meningkatkan kualitas dan memberdayakan SDM yang tersedia secara optimal untuk kelancaran pelaksanaan tugas

e. Penghargaan yang diterima

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi
1	Peringkat ke-7 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional	Kementerian Dalam Negeri
2	Juara II Lomba Kelurahan	Provinsi Jawa Timur
3	Juara 3 Lomba Kelurahan Sadar Hukum	Kementerian Hukum dan HAM /tingkat provinsi Jatim
4	TOP 45 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	Provinsi Jawa Timur
5	Penghargaan Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Melihat konteks seperti ini, maka pola hubungan yang dikembangkan adalah kemitraan atau *partnership*.

Hubungan kemitraan pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan semata akan tetapi juga mengacu pada nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dijalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan transparan.

Pelayanan eksekutif terhadap legislatif dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Seperti kegiatan-kegiatan berikut ini yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Madiun pada 2018 sampai dengan 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.124
Perkembangan Kegiatan DPRD Kota Madiun

No	Uraian	2018	2019
1.	Pembahasan Raperda	46	18
2.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	76	53
3.	Rapat-Rapat alat kelengkapan Dewan	40	58
4.	Rapat Paripurna	58	58
5.	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	10	10
6.	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota	8	5
7.	Fasilitasi penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	235	235
8.	Reses	3	2
9.	Kegiatan Fraksi	11	18

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Madiun

a. Program dan Kegiatan

Program Kegiatan pada urusan otonomi daerah dalam rangka pelayanan legislatif yang dilaksanakan oleh **Sekretariat DPRD** Kota Madiun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor
		4	kegiatan pemeliharaan rumah dinas
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		3	kegiatan pembangunan gedung
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan kapasitas DPRD	1	Kegiatan Fraksi
		2	Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD
		3	Kegiatan Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
		4	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
		5	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
		6	Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
		7	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
		8	Kegiatan Reses
		9	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna

b. Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan

Realisasi program Kegiatan pada urusan otonomi daerah dalam rangka pelayanan legislatif yang dilaksanakan oleh **Sekretariat DPRD** Kota Madiun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	6.405.063.000,00	4.747.424.768,00
	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	3.477.531.000,00	2.170.206.976,00
	Output : Jumlah peralatan dan	14 paket	14 paket

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	perlengkapan kantor		
	Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100 %	100%
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2.927.532.000,00	2.577.217.792,00
	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47 kali	164 kali
	Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100 %	348 %
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1.752.468.258,00	1.084.677.062,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	518.834.658,00	480.048.416,00
	Output : Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	2 unit	2 unit
	Outcome : Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	100 %	100 %
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	281.603.600,00	238.257.505,00
	Output : Jumlah kendaraan yang dirawat	5 unit	5 unit
	Outcome : Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	100 %	100%
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	386.500.000,00	135.025.754,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	10 jenis	10 jenis
	Outcome : Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	100%	100%
4	kegiatan pemeliharaan rumah dinas	565.530.000,00	231.345.387,00
	Output : Jumlah rumah dinas yang dikelola	1 unit	1 unit
	Outcome : Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	100%	100%
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	16.915.181.000,00	15.892.486.913,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	15.298.635.000,00	14.365.212.213,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibeli	10 jenis	10 jenis
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100%
2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	335.836.000,00	251.554.700,00
	Output : Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD	5 jenis	5 jenis
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
3	kegiatan pembangunan gedung	1.280.710.000,00	1.275.720.000,0
	Output : Jumlah gedung yang akan dibangun	1 unit	1 unit
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23.665.000,00	18.931.231,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	23.665.000,00	18.931.231,00
	Output : Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	10 dok	10 dok
	Outcome : Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
5	program peningkatan kapasitas DPRD	16.302.273.600,00	12.601.931.552,00
1	Kegiatan Fraksi	49.334.000,00	46.956.249,00
	Output : Jumlah Pemandangan Umum dan Pemandangan Akhir Fraksi	22 kali	22 kali
	Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	100%
2	Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	1.478.518.000,00	1.472.336.067,00
	Output : Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publik	135 kali	235 kali
	Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	174%
3	Kegiatan Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	44.635.000,00	34.281.185,00
	Output : Jumlah hearing/rapat kerja/dengar pendapat dengan Pemda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama	50 kali	53 kali
	Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	106%
4	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.086.310.000,00	2.636.165.598,00
	Output : Jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan menjadi Perda	13 raperda	18 raperda
	Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100 %	138%
5	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	5.015.427.000,00	4.042.036.955,00
	Output : Jumlah kunjungan kerja dalam satu tahun	10 kali	10 kali
	Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100 %	100%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.623.669.000,00	1.897.351.494,00
	Output : Jumlah diklat, bintek, dan workshop dalam satu tahun	10 kali	10 kali
	Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	100%
7	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	3.058.596.600,00	1.623.351.795,00
	Output : Jumlah rapat komisi, rapat pimpinan, rapat gabungan komisi, rapat gabungan pimpinan, rapat badan musyawarah, badan anggaran, badan kehormatan, badan legislasi, dan panitia khusus	40 kali	58 kali
	Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	145%
8	Kegiatan Reses	573.150.000,00	520.920.000,00
	Output : Jumlah kegiatan reses	2 kali	2 kali
	Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	100%
9	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	372.634.000,00	328.532.209,00
	Output : Jumlah rapat paripurna	32 kali	58 kali
	Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	181%

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2019 adalah :

➤ Permasalahan :

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun sudah berjalan tiga tahun. Ada beberapa masukan, perlu adanya penyesuaian besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

➤ Solusi :

Sekretariat DPRD bekerja sama dengan pihak ketiga (Penyedia Jasa Penilai) telah melaksanakan appraisal sebagai dasar penyesuaian tunjangan dimaksud. Hasil penyesuaian terhadap tunjangan tersebut berlaku mulai Tahun Anggaran 2020.

3. PENGAWAS

a. Tujuan dan Sasaran

Fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Madiun dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Madiun. Tujuan Inspektorat Kota Madiun dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan RPJMD periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan anggaran;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kota Madiun dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2014-2019) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan tujuan " *Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan anggaran*" maka ditetapkan sasaran Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan instansi pemerintah;
2. Berdasarkan tujuan " *Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah*" telah ditetapkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Inspektorat Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.125

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Fungsi Penunjang Pemerintahan di Kota Madiun pada Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
D	Fungsi Penunjang Pemerintahan				
30	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
30.1	Persentase Entitas yang melakukan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja dengan Baik	83,33	84	84,26	100,31%
30.2	Persentase temuan (kasus) Keuangan Hasil audit yang telah ditindak lanjuti	100	100	100	100,00%
30.3	Persentase SKPD yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja secara baik	100	100	100	100,00%

Sumber Data : Inspektorat Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja yang baik

Sampai dengan bulan Desember 2019 Inspektorat Kota Madiun telah melaksanakan pengawasan internal secara berkala pada 54 obyek pemeriksaan dan indikator kinerja Persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik sebesar **84,26 %**. Dan capaian kinerjanya sebesar **100,31 %** dari target yang ditetapkan pada tahun kelima (target akhir) RPJMD sebesar 84%.

Pada tahun 2018 indikator kinerja Persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik sebesar **83,33 %**. Dan capaian kinerjanya sebesar **100,40 %** dari target yang ditetapkan pada tahun ketiga RPJMD sebesar 82%. Dengan ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan, pengelolaan barang daerah dan pelaksanaan kegiatan fisik.

Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendukung sebagai berikut :

- Pembinaan yang dilaksanakan BPKAD dan Inspektorat (yang selain melakukan pemeriksaan juga melakukan pembinaan salah satunya terkait pengelolaan keuangan) terbukti efektif;
- Adanya kemauan dari OPD untuk melakukan pengelolaan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut :

- Masih adanya obyek pemeriksaan yang kurang memperhatikan temuan hasil pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga masih ditemukan kesalahan yang berulang;
- Masih kurangnya kuantitas SDM Aparatur Pengawas dan kualitas SDM AparaturPengawas yang tidak merata.

2. Persentase temuan (kasus) keuangan hasil audit yang telah ditindak lanjuti

Pada tahun 2019 Persentase Persentase temuan (kasus) Keuangan Hasil audit yang telah ditindaklanjuti sebesar 100 % sesuai dengan target, sehingga capaian kinerjanya 100%. Tindaklanjuti

tersebut akan dilakukan verifikasi oleh BPK-RI dan APIP pada saat acara pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pengawasan internal dan eksternal yang dilaksanakan setiap semester dan dalam pelaksanaan pemantauan, selain memantau hasil pemeriksaan tahun berjalan juga memantau tindak lanjut sisa temuan tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2018 Persentase temuan (kasus) Keuangan Hasil audit yang telah ditindaklanjuti sebesar 100 %, sesuai dengan target.

Pada dasarnya setiap ada temuan hasil pemeriksaan, obyek pemeriksaan senantiasa menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan tersebut (100%). Namun demikian pada saat pemutakhiran/pemantauan yang dilaksanakan setiap semester, terdapat kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- Masih adanya sisa temuan tahun sebelumnya yang masih belum selesai ditindaklanjuti, sehingga menambah jumlah temuan tahun berjalan;
- Ada beberapa rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI yang tidak bisa secara langsung selesai ditindaklanjuti dalam satu tahun, melainkan harus menunggu tahun berikutnya karena masih dalam proses perencanaan.

Namun demikian Inspektorat secara intensif melakukan penagihan tindak lanjut baik secara langsung maupun dengan memberikan surat teguran kepada obyek pemeriksaan untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

3. Persentase SKPD yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja secara baik.

Pada tahun 2019 Persentase SKPD yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja secara baik sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Demikian halnya pada tahun 2018 indikator kinerja tersebut capaian kinerjanya sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan pada tahun keempat RPJMD sebesar 100%.

Adapun faktor pendukung pada capaian tersebut adalah :

- Bappeda sebagai leading sector kegiatan perencanaan di lingkungan Pemerintah Daerah, telah melakukan pembinaan secara berkala dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan periode 2014-2019 melalui kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN dan RB;
- Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai leading sector pembinaan SAKIP juga memfasilitasi desk paparan SAKIP dan kelengkapan dokumen SAKIP dengan Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
- Inspektorat Kota Madiun dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP yang juga memberikan arahan kepada OPD terkait penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang baik.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada fungsi penunjang pemerintahan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan **Inspektorat Kota Madiun** pada tahun 2019 adalah :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1	Kegiatan Evaluasi Sakip PD
		2	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi
		3	Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi
		4	kegiatan optimalisasi saber pungi
6	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
		2	Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan
7	program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh **Inspektorat Kota Madiun** pada tahun 2019 adalah :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	896.114.000,00	859.238.206,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	467.131.000,00	430.255.206,00
	Output : Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	428.983.000,00	428.983.000,00
	Output : Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	57 kali	77 kali
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
2	program pemeliharaan barang milik daerah	56.892.000,00	56.493.800,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Output : Jumlah bangunan gedung/kantor yang terpelihara/bahan pemeliharaan yang terbeli	1 paket	1 paket
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	24.892.000,00	24.493.800,00
	Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 unit	1 unit
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	30.000.000,00	30.000.00,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	5 jenis	5 jenis
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	110.600.000,00	110.275.000,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	110.600.000,00	110.275.000,00
	Output : jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi	2 jenis	2 jenis
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	92.348.000,00	88.087.276,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	92.348.000,00	88.087.276,00
	Output : jumlah dokumen evaluasi	11 dokumen	11 dokumen

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	dan laporan		
	Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
5	program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	860.164.000,00	834.734.026,00
1	Kegiatan Evaluasi Sakip PD	81.290.000,00	80.830.000,00
	Output : Jumlah OPD yang dievaluasi dokumen SAKIPnya	34 OPD	34 OPD
	Outcome : Persentase OPD yang telah menerapkan SAKIP	100%	100%
2	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	70.900.000,00	60.571.550,00
	Output : Jumlah dokumen laporan Gratifikasi	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Persentase OPD yang telah menerapkan SAKIP	100%	100%
3	Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi	190.974.000,00	184.852.476,00
	Output : Jumlah dokumen hasil penilaian , verifikasi dan evaluasi	3 dokumen	3 dokumen
	Outcome : Persentase OPD yang telah menerapkan SAKIP	100%	100%
4	kegiatan optimalisasi saber pungli	517.000.000,00	508.480.000,00
	Output : Jumlah laporan kegiatan Saber Pungli	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Persentase OPD yang telah menerapkan SAKIP	100%	100%
6	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	465.935.000,00	442.873.846,00
1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	259.435.000,00	242.879.288,00
	Output : jumlah entitas yang telah diperiksa	54 obyek pemeriksaan	54 obyek pemeriksaan
	Outcome : Persentase entitas yang telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	84%	84,26%
2	Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	206.500.000,00	199.994.558,00
	Output : Jumlah dokumen laporan hasil reviu	8 dokumen	8 dokumen
	Outcome : Persentase entitas yang telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	84%	84,26%
7	program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	410.893.000,00	382.373.646,00
1	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	410.893.000,00	382.373.646,00
	Output : jumlah aparatur pengawas yang mengikuti bimtek	20 orang	24 orang
	Outcome : persentase aparatur pengawas yang mengikuti bimtek dan bersertifikat	100%	100%

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pembangunan fungsi penunjang Inspektorat dan solusinya adalah :

Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern pada OPD

BPKP Pusat telah melaksanakan Quality Assurance (QA) terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Madiun dengan hasil QA 3,0375 (terdefinisi). Sampai dengan saat ini Inspektorat Kota Madiun bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait Monitoring Pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sedangkan saat ini Inspektorat Kota Madiun dalam proses melaksanakan QA (Quality Assurance) terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota dan masih mengalami kendala sebagai berikut :

- Bukti pendukung parameter sub unsur SPIP belum sepenuhnya dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang dimonitoring, sehingga Tim monitoring Pelaksanaan SPIP kesulitan dalam melaksanakan karena kekurangan data dukung;
- Perangkat Daerah belum mendokumentasikan kegiatan yang termasuk dalam sub unsur SPIP dengan baik dan terstruktur;
- Tim Assesor APIP masih perlu peningkatan kualitas untuk persiapan sebagai Tim penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Solusi yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah :

- Mengoptimalkan sub unsur yang menjadi bahan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan mendokumentasikan dengan baik terhadap bukti pendukung atas pemenuhan parameter sub unsur SPIP dalam bentuk softcopy dan hardcopy secara rapi dan terstruktur;
 - Mengadakan Bimbingan Teknis guna mengoptimalkan kualitas Tim Assesor APIP untuk persiapan sebagai Tim penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
-

4. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN SERTA PELATIHAN

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam rangka untuk mencapai Misi Pemerintah Kota Madiun, ditetapkan Tujuan Strategis pada Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, baik itu kemudahan prosedur dan persyaratan, kepastian pelayanan, waktu penyelesaian, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mewujudkan hal ini pelayanan kepegawaian memanfaatkan Teknologi Informasi.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Sipil Negara yang kompeten, berpengetahuan, profesional, disiplin serta taat pada peraturan peundangan-undangan yang berlaku.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun disusun berdasarkan hasil indentifikasi potensi permasalahan internal dan eksternal dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis BKD Kota Madiun sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Akurat dan tepat waktu.

2. Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan PNS.

3. Meningkatnya Kualitas Pegawai yang Mengarah pada Peningkatan Kinerja Aparatur.

4. Meningkatnya kompetensi, pengetahuan dan keterampilan aparatur.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.126
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kota Madiun
Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
D	Fungsi Penunjang Pemerintahan				
33	Kepegawaian, Pendidikan serta Pelatihan				
33.1	Persentase Kasus Pelanggaran disiplin pegawai	0,39	0,43	0,18	104%
33.2	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	80,79	82,5	85,63	103,79%
33.3	Persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016	89,13	95	98,71	103,9%
33.4	Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi	100	100	100	100%
33.5	Persentase Peningkatan SDM Aparatur	100	100	118,14	118,14%
33.6	Persentase Realisasi Penataan Pegawai	43,12	9	22,63	251,4%
33.7	Persentase Penyelesaian administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan	100	93	135,36	146,6%

Sumber data : BKD Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai

Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun yaitu *kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian dan kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi*. Jumlah pelanggaran disiplin kurang dari yang diperkirakan pada masa akhir periode RPJMD. Pada Tahun Anggaran 2019 diperkirakan persentase pelanggaran disiplin pegawai sebesar 0,43% (4,3 per 1000 pegawai).

Untuk realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 pelanggaran disiplin pegawai mencapai sebesar 0,18% (1,8 per 1000 pegawai), dan jumlah realisasi tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar 0,39 (3,9 per 1000 pegawai).

Dengan demikian menunjukkan bahwa peran pengawasan internal oleh Perangkat Daerah telah berjalan dengan baik dan didukung dengan adanya remunerasi yang mengharuskan setiap pegawai melakukan absen dengan alat finger print maka disiplin pegawai pemerintah kota madiun meningkat. Adapun data Penjatuhan Hukuman Disiplin dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	KETERANGAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Hukuman Disiplin Berat	7	4	6	7	3
2	Hukuman Disiplin Sedang	2	3	2	4	0
3	Hukuman Disiplin Ringan	-	-	3	3	3
	Jumlah	9	7	11	13	6

- Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya

Indikator Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Target dari indikator kinerja ini pada tahun anggaran 2019 adalah 82.5% dan terealisasi sebesar 85.63%.

Perkembangan Jumlah Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang mengikuti Diklat Kepemimpinan di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Diklat	Sudah Mengikuti Diklatpim					Belum Mengikuti Diklatpim				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Diklatpim IV	337	355	329	327	17	125	68	78	100	7
Diklatpim III	35	69	66	66	74	25	36	37	24	13
Diklatpim II	18	21	14	15	332	7	7	10	13	0

Dari data di atas diperoleh kesimpulan bahwa target indikator Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya, telah tercapai.

- Persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun melaksanakan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan menerbitkan Peraturan Struktur Organisasi Tata Kerja berupa Peraturan Daerah. Peraturan tersebut merupakan

landasan hukum untuk menyusun struktur organisasi OPD dari staf sampai dengan pejabat struktural. Dengan adanya beberapa perubahan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi Tata Kerja pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2018, maka terjadi perubahan jumlah total jabatan pada tahun 2018 sejumlah 561 berubah menjadi 544 jabatan yang terdiri dari Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Pengawas (Eselon III) dan Jabatan Administrator (Eselon IV).

Target Indikator Persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016 pada Tahun 2019 adalah sebesar 95% dan terealisasi sebesar 98,71%. Dengan capaian tersebut maka untuk target RPJM telah tercapai. Jumlah Capaian tersebut dihitung dari Jumlah Jabatan sebanyak 544 telah terisi sebanyak 537 jabatan. Masih ada beberapa jabatan yang belum terisi yaitu untuk Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II) sebanyak 6 dan Jabatan Administrator (Eselon IV) sebanyak 1. Untuk kekosongan Jabatan tersebut diatas direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

4. Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi

Indikator Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi didukung oleh kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yaitu kegiatan Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, Diklatpim Tingkat II. Indikator kinerja ini pada tahun anggaran BKD menargetkan 100% dan dapat merealisasikan seluruh kegiatan di atas, sehingga indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Pejabat yang telah dikirim untuk mengikuti Diklatpim dimaksud telah mengikuti diklat dengan baik dan lulus semuanya.

5. Persentase Peningkatan SDM Aparatur

Indikator Persentase Peningkatan SDM Aparatur dilaksanakan oleh kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yaitu Kegiatan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. Indikator ini diukur dari banyaknya Peserta Diklat yang dikirim atau yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun. Pada Tahun 2019 indikator ini menargetkan 100% dan terealisasi 118,14%.

Rincian Kegiatan yang menunjang indikator Peningkatan SDM Aparatur dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.127
Data Kegiatan Diklat
Tahun 2019

No	Nama Kegiatan Diklat	Target	Realisasi
1	Diklatpim Tingkat II	2	2
2	Diklatpim Tingkat III	5	5
3	Diklatpim Tingkat IV	30	28
4	Diklat Prajabatan	171	171
5	Diklat Pengadaan Barang Jasa	64	72
6	Diklat Fron Liner	35	35
7	Assesment Pegawai	15	24
8	Pengiriman Diklat Teknis dan Fungional	57	82
9	Diklat Kearsipan	34	34
10	EDD	80	78
11	Pembekalan CPNS	171	171
12	Wokshop Rakor Kepegawaian dan Wokshop Penguatan Jabatan Fungsional untuk Jabatan Fungsional	130	236
	Total	794	938

6. Persentase Realisasi Penataan Pegawai

Pendukung Indikator Jumlah Penataan Pegawai yang terealisasi adalah semua kegiatan dalam Program Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Aparatur. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah Penempatan Pegawai, Pembinaan Pegawai. Tahun Anggaran 2019 BKD menargetkan indikator ini sebesar 9% terealisasi sebesar 22,63%. Prosentase tersebut didapat dari Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional, Kenaikan Jabatan Fungsional, Pindah Pegawai antar Kab/Kota antar Provinsi, Ijin Bebas Jabatan/Masa Persiapan Pensiun, Penunjukan Plt dan Plh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Sekolah, Kebijakan Administrasi Petikan II Keputusan, Kebijakan Teknis pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan penerbitan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Administrasi Pengangkatan PNS dibandingkan dengan Jumlah seluruh PNS Kota madiun sebanyak 3.287.

Indikator realisasi penataan pegawai mengalami kenaikan yang sangat signifikan dikarenakan dengan adanya peningkatan dalam capaian yang lebih besar dari target yg telah ditetapkan seperti pengangkatan

dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural, Pengangkatan, Pemberhentian, Pembebasan Sementara dan Pengangkatan Kembali dalam Jab. Fungsional, Pindah Pegawai antar Kab/Kota antar Provinsi, Penunjukan Plt. dan Plh. Kepala Satuan Kerja/Kepala Sekolah, Kebijakan Administrasi Petikan II Keputusan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat capaian Indikator Persentase Realisasi Penataan Pegawai dalam table berikut ini:

Tabel III.128
Data Capaian Penataan Pegawai
Tahun 2019

No	Nama Kegiatan Diklat	Realisasi
1	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural	269
2	Pengangkatan, Pemberhentian, Pembebasan Sementara dan Pengangkatan Kembali dalam Jab. Fungsional	21
3	Kenaikan Jabatan Fungsional	61
4	Pindah Pegawai Non Struktural dan Fungsional Satuan Kerja	253
5	Pindah Pegawai antar Kab/Kota antar Provinsi	18
6	Ijin Bebas Jabatan/Masa Persiapan Pensiun	2
7	Penunjukan Plt dan Plh Kepala Satuan Kerja/Kepala Sekolah	19
8	Kebijakan Administrasi Petikan II Keputusan	96
9	Kebijakan Teknis pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan penerbitan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	7
10	Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS	0
Total		744

7. Persentase Penyelesaian administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan

Kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase Penyelesaian administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan adalah Kegiatan meliputi penyelesaian Administrasi Kepegawaian dan Kegiatan Update Data Pegawai dalam SAPK. Adapun Sub Kegiatan-Kegiatan tersebut adalah

- Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- Pemrosesan Perpanjangan Tenaga Kontrak Kerja
- Pengajuan Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG)
- Administrasi E-LHKPN
- Menghimpun, Meneliti dan Menyusun SKP Pegawai
- Pengajuan Penerbitan KARIS/KARSU

- Administrasi Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Anak
- Pengajuan Penerbitan Ijin Perkawinan
- Administrasi Laporan Perkawinan
- Administrasi Penerbitan Cuti Kepala SKPD dan Arsip Cuti Pegawai

Kegiatan yang tersebut diatas adalah kegiatan yang menunjang Indikator Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan praturan. Tahun Anggaran 2019 BKD menargetkan indikator ini sebesar 93% dan terealisasi sebesar 135,36%.

b. Program dan Kegiatan

Program Kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan serta Pelatihan yang dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian Daerah** Kota Madiun pada Tahun 2019, sebagai berikut :

No	Program		Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
		4	kegiatan pemeliharaan dan biaya operasional gedung diklat
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan rehab gedung dan bangunan
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian	1	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK
		2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
6	program peningkatan kapasitas SDM aparatur	1	Kegiatan Assesment Pegawai
		2	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Workshop Pengembangan Aparatur
		3	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III
		4	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

No	Program		Kegiatan
		5	Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional
		6	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II
		7	Kegiatan Diklat Prajabatan CPNS
		8	kegiatan pembekalan CPNS
7	program pembinaan dan pengembangan aparatur	1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
		2	Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian
		3	Kegiatan Pengadaan CPNS
8	program penataan aparatur	1	Kegiatan Penempatan Pegawai
9	program fasilitasi kesejahteraan PNS	1	Kegiatan Pemberhentian PNS yang Pensiun
		2	Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan serta Pelatihan yang direalisasikan oleh **Badan Kepegawaian Daerah** Kota Madiun pada Tahun 2019, sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1.450.658.400,00	1.311.298.461,00
	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	842.848.000,00	735.184.012,00
	Output : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Jenis	13 Jenis
	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	B	B
	2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	607.810.400,00	576.114.449,00
	Output : Jumlah Perjalanan Dinas	102	145
	Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	B	B
2	program pemeliharaan barang milik daerah	237.596.400,00	218.809.828,00
	1 kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	44.000.000,00	43.998.800,00
	Output : Jumlah Gedung	2 gedung	2 gedung
	Outcome : Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	B	B
	2 kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	20.540.000,00	18.325.700,00
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas	20 kendaraan	37 kendaraan
	Outcome : Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	B	B
	3 kegiatan pemeliharaan rutin/	24.800.000,00	24.606.800,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	berkala sarana prasarana kantor		
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	9 Jenis	42 Jenis
	Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	B	B
4	kegiatan pemeliharaan dan biaya operasional gedung diklat	148.256.400,00	131.878.528,00
	Output : Jumlah Acara	300 Acara	198 Acara
	Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana balai diklat yang representatif	B	B
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	472.900.000,00	457.699.850,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	192.900.000,00	192.199.850,00
	Output : Jenis Barang	8 Jenis	8 Jenis
	Outcome : Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
2	kegiatan rehab gedung dan bangunan	280.000.000,00	265.500.000,00
	Output : Jumlah Gedung	2 Gedung	2 Gedung
	Outcome : Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.371.800,00	49.485.391,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	50.371.800,00	49.485.391,00
	Output : Jumlah Dokumen laporan	7 Dokumen Laporan	7 Dokumen Laporan
	Outcome : Meningkatnya Kinerja BKD	100%	100%
5	program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian	203.300.900,00	190.936.492,00
1	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	156.593.400,00	152.502.492,00
	Output : Jumlah Dokumen Yang di Update	3.500	6.325
	Outcome : Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	93%	135.36%
2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	46.707.500,00	38.434.000,00
	Output : Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Tepat Waktu	100%	90.1%
	Outcome : Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	93%	135.36%
6	program peningkatan kapasitas SDM aparatur	4.824.742.200,00	4.671.417.579,00
1	Kegiatan Assesment Pegawai	210.450.000,00	191.846.000,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Assessment	15	24
	Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
2	Kegiatan BinteK/Sosialisasi/Workshop	61.500.000,00	37.740.500,00
	Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Workshop	130	236
	Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
3	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	192.680.000,00	188.960.000,00
	Output : Jumlah Peserta Diklatpim Tk. III	5 PNS	5 PNS
	Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
4	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	529.919.000,00	523.777.431,00
	Output : Jumlah Peserta Diklatpim Tk. IV	30 PNS	28 PNS
	Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
5	Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	1.290.010.200,00	1.242.464.648,00
	Output : Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	270	301
	Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
6	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	100.710.000,00	94.860.000,00
	Output : Jumlah Peserta Diklatpim Tk. II	2 PNS	2 PNS
	Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
7	Kegiatan Diklat Prajabatan CPNS	2.404.350.000,00	2.356.646.000,00
	Output : Jumlah Peserta Diklat Prajabatan	171 PNS	171 PNS
	Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
8	Kegiatan Pembekalan CPNS	35.123.000,00	35.123.000,00
	Output : Jumlah Peserta Diklat Pembekalan CPNS	171 PNS	171 PNS
	Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
7	program pembinaan dan pengembangan aparatur	956.479.100,00	323.757.051,00
1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	61.564.800,00	52.083.958,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah PNS Penerima Penghargaan Satya Lancana Karya Satya	100 PNS	107 PNS
	Outcome : Meningkatnya Kinerja Disiplin Pegawai	0.43%	0.18%
2	Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	9.380.000,00	8.339.500,00
	Output : Jumlah Permasalahan Kepegawaian selesai ditangani	50	38
	Outcome : Meningkatnya Kinerja Disiplin Pegawai	0.43%	0.18%
3	Kegiatan Pengadaan CPNS	885.534.300,00	263.333.593,00
	Output : Jumlah Peserta	7000 orang	4.426 orang
	Outcome : Meningkatnya Kinerja Disiplin Pegawai	0.43%	0.18%
8	program penataan aparatur	364.489.200,00	251.609.775,00
1	Kegiatan Penempatan Pegawai	364.489.200,00	251.609.775,00
	Output : Jumlah Mutasi Kepegawaian Struktural dan Fungsional	378	744
	Outcome : Terwujudnya Pembinaan dan Penataan Pegawai yang mengarah pada peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	100 %	104.04 %
9	program fasilitasi kesejahteraan PNS	84.640.000,00	79.339.676,00
1	Kegiatan Pemberhentian PNS yang Pensiun	39.160.000,00	37.871.676,00
	Output : Jumlah Surat Keputusan Pensiun	191 SK	202 SK
	Outcome : Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan PNS	100%	105.76%
2	Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS	45.480.000	41.468.000
	Output : Jumlah SK KP dan Kenaikan Gaji Berkala	1.882	2.062
	Outcome : Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan PNS	100%	109.56%

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Untuk Anggaran Kegiatan Pengadaan CPNS Tahun 2019 sebesar Rp. 885.534.300,00 hanya dapat terserap sebesar Rp. 263.333.593,00 yaitu hanya sebesar 29,73 %. Hal tersebut disebabkan Jadwal untuk Pengadaan CPNS tahun 2019 dari BKN mundur dari rencana jadwal semula, sehingga rangkaian dari kegiatan Pengadaan CPNS untuk pelaksanaan Test Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (SKB) baru dapat dilaksanakan di Tahun 2020.

5. KEUANGAN

a. Tujuan dan sasaran

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan administrasi Keuangan di Kota Madiun adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Indikator kinerja sasaran yang utama adalah prosentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD.

Tujuan merupakan penjabaran atau imlementasi dari misi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Mewujudkan peningkatan pelayanan
3. Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah yang Good and Clean Governance

Berdasarkan tujuan di maksud, untuk memberikan arah dan tolok ukur dari tujuan yang telah di rumuskan agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang ingin di capai maka ditetapkan sasarannya adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah
4. Meningkatnya penerimaan pajak daerah

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada BKPAD Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.129
Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa						
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	100%

Sumber data : BPKAD Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Opini BPK terhadap laporan Keuangan daerah

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Madiun memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018, hal ini dikarenakan SKPD Pemerintah Kota Madiun dalam menangani pengelolaan keuangan dan aset secara tertib baik dari administrasi dan pelaporan keuangannya (akuntabel).

Adapun perkembangan pencapaian kinerja pembangunan daerah yang diukur dengan indikator kinerja adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.130
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Kota Madiun
Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
D	Fungsi Penunjang Pemerintahan				
32	Keuangan				
1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100
2	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	ya	ya	ya	100
3	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan Tepat Waktu	100	100	100	100
4	Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu	ya	ya	ya	100
5	Persentase peningkatan PAD	0,42	20	9,15	45,75
6	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Landasan Hukum	100	100	100	100
7	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah daerah	100	100	100	100
8	Persentase Peningkatan Pajak daerah Non PBB	107,07	100	112,05	112,05
9	Persentase Penerimaan PBB	112,62	95	106,01	111,5
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
C	Fokus Iklim Investasi				
4	Keuangan				
4.1	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	9	9	9	100

Sumber data : BPKAD Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Opini BPK terhadap laporan Keuangan

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Madiun memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018, hal ini dikarenakan :

- a. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun dapat diyakini kewajarannya ;
- b. Realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun berakhir sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Madiun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018. Keberhasilan atas prestasi dimaksud tidak lepas dari peranan seluruh unit kerja atau SKPD Pemerintah Kota Madiun dalam menangani pengelolaan keuangan dan aset secara tertib baik dari administrasi dan pelaporan keuangannya (akuntabel).

2. Pengesahan Perda APBD

Pengesahan APBD untuk anggaran 2018-2019 ditetapkan secara tepat waktu dalam arti penetapan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, terbukti dari :

- a) Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan 27 Desember 2018.
- b) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan 17 Desember 2019.

3. Persentase SKPD yang menyelesaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu

Perkembangan SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, hampir semua SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2018 secara tepat waktu yaitu mencapai 100%, terdapat 34 SKPD yang tertib. Selanjutnya pada tahun 2020, semua SKPD telah menyampaikan laporan fungsional

keuangan tahun 2019 secara tepat waktu yaitu mencapai 100%, atau sebanyak 34 SKPD tertib. Pencapaian persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan SKPD sama dengan tahun yang lalu dan ini dipengaruhi oleh pemahaman bendahara pengeluaran dalam penatausahaan keuangan sehingga SKPD segera menyelesaikan tanggung jawab pelaporan tahun 2018 baik secara kinerja dan keuangan.

4. Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun disampaikan ke BPK RI yaitu selambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pada tahun 2018-2019 penyampaian LKPD secara tepat waktu. LKPD Kota Madiun Tahun 2018-2019 disampaikan tepat waktu, yaitu :

- a) LKPD Kota Madiun Tahun 2018 disampaikan pada tanggal 23 Maret 2019 dengan Nomor Surat : 900/ 893/401.202/2019;
- b) LKPD Kota Madiun Tahun 2019 disampaikan pada tanggal 29 Januari 2020 dengan Nomor Surat : 900/337/401.202/2020;

5. Persentase peningkatan PAD

Peningkatan PAD dipengaruhi oleh perolehan pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Adapun perkembangan persentase PAD sebagai berikut : Pada tahun 2018 peningkatan PAD sebesar 0,42% dengan perolehan sebesar Rp. 230.847.977.146,73 sedangkan pada tahun 2019, realisasi PAD sebesar Rp.252.048.556.223,83 sehingga terdapat peningkatan 9,15%. Namun secara realisasi PAD 2019 dibandingkan target mencapai 111,31%.

6. Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Landasan Hukum

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Madiun sudah sesuai dengan landasan hukum baik dari peraturan pusat maupun daerah, sehingga capaian tahun 2018-2019 adalah 100%. Landasan hukum dimaksud, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
-

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- d) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- e) Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, berisi penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual
- f) Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, berisi penyempurnaan penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual

7. Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah daerah

Perkembangan jumlah aset yang dikelola Pemda tahun 2019 mengalami kenaikan. Capaian jumlah aset pada tahun 2018 sebanyak 1.232.378 buah menjadi tahun 2019 sebanyak 1.348.428 dan seluruhnya dikelola pemerintah daerah Kota Madiun, sehingga capaiannya 100% pada tahun 2018-2019.

8. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah :

Prosentase peningkatan Pajak Daerah, indikator sasaran penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2017 s/d Tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

- P-APBD Tahun 2017 target Rp. 42.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 56.768.620.233,44 (135,16%)
- P-APBD Tahun 2018 target Rp. 58.750.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 62.901.493.531,41 (107,07%)
- P-APBD Tahun 2019 target Rp. 82.332.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 91.07.191.655,45 (110,62 %)

Berdasarkan hal tersebut diatas peningkatan Pajak Daerah Non PBB dari Tahun 2017 s/d Tahun 2019 mengalami peningkatan

9. Prosentase Penerimaan PPB Perkotaan :

Prosentase penerimaan Pajak PBB Perkotaan indikator sasaran penerimaan Pajak PBB Perkotaan tahun anggaran 2017 s/d tahun 2019 sebagai berikut :

- P-APBD Tahun 2017 target Rp. 16.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.456.211.452,- (115,35%)

- P-APBD Tahun 2018 target Rp. 18.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.553.210.830,- (112,62%)
- P-APBD Tahun 2019 target Rp. 19.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.671.858.858,- (106,01%)

Berdasarkan hal tersebut diatas, sasaran peningkatan Pajak Daerah PBB Perkotaan dari Tahun 2017 s/d Tahun 2019 mengalami peningkatan yang mana target pendapatan tahun anggaran 2019 P-APBD menjadi Rp. 82.332.000.000,- maka langkah langkah ataupun upaya upaya yang dilakukan untuk memenuhi target adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan basis data PBB dan Non PBB sehingga setiap ada perubahan Wajib Pajak bisa mengikuti (Update data)
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan melaporkan secara tertib setiap bulan kepada Badan Pendapatan daerah
3. Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak
4. Mengoptimalkan petugas pungut untuk melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak

10. Jumlah dan Macam Pajak Daerah :

Dari aspek daya saing daerah dengan focus investasi, terdapat 9 jenis pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
 6. Pajak Parkir
 7. Pajak Air Bawah Tanah (ABT)
 8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 9. Pajak Bumi dan Bangunan
-

Adapun target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 adalah :

NO	JENIS PAJAK	TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel	6.505.000.000,00	6.626.179.761,00	101,86 %
2	Pajak Restoran	10.750.000.000,00	12.986.705.054,18	120,81 %
3	Pajak Hiburan	1.802.000.000,00	2.332.473.974,00	129,44 %
4	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.837.373.634,87	122,49 %
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	20.125.000.000,00	20.627.903.089,64	102,50 %
6	Pajak Parkir	1.750.000.000,00	1.911.580.014,00	109,23 %
7	Pajak Air Bawah Tanah (ABT)	300.000.000,00	330.002.129,20	110,00 %
8	BPHTB	20.100.000.000,00	23.753.115.140,56	118,17 %
9	PBB	19.500.000.000,00	20.671.858.858,00	106,01 %
	Jumlah	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	110,62 %

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan yang dilaksanakan Oleh **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	1	Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D
		2	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/ Kas Daerah
6	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
		2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		3	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

No	Program	Kegiatan	
		4	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5	Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
7	program pengelolaan anggaran daerah	1	Penyusunan DPA dan DPPA
		2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
		3	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
		4	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah
		5	Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus
8	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	1	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah
		2	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Barang Milik Daerah dengan Realisasi Belanja Modal
		3	kegiatan optimalisasi, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
		4	kegiatan perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Oleh **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah	1	Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi
		2	Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT
		3	Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu
		4	Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Terpadu

No	Program	Kegiatan	
		5	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah
		6	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan
		7	kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah
5	program peningkatan pendataan dan potensi pajak daerah	1	kegiatan pemeliharaan basis data PBB
		2	kegiatan pemeliharaan basis data objek pajak daerah
		3	kegiatan pemeliharaan frame reklame

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan Kegiatan **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	17.650.289.000,00	14.335.045.212,82
	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	17.250.289.000,00	13.935.131.983,82
	Output : Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	7 jenis	7 jenis
	2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	400.000.000,00	399.913.229,00
	Output : jumlah perjalanan dinas keluar daerah	100 kali	135 kali
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	100 kali	135 kali
2	program pemeliharaan barang milik daerah	165.500.000,00	100.176.999,00
	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	50.000.000,00	15.570.000,00
	Output : jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	1 gedung	1 gedung
	2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	55.000.000,00	34.703.999,00
	Output :Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	45 kendaraan dinas	45 kendaraan dinas
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	45 kendaraan dinas	45 kendaraan dinas
	3 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	60.500.000,00	49.903.000,00
	Output :Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	11 jenis barang	11 jenis barang
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	11 jenis barang	11 jenis barang

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	105.000.000,00	89.169.000,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	105.000.000,00	89.169.000,00
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	6 jenis barang	6 jenis barang
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	6 jenis barang	6 jenis barang
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.900.000,00	41.235.190,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	47.900.000,00	41.235.190,00
	Output : Jumlah dokumen	8 dokumen	8 dokumen
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	8 dokumen	8 dokumen
5	program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	233.406.000,00	231.883065,00
1	Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D	107.306.000,00	107.003.443,00
	Output : Jumlah dokumen pengeluaran kas	3 jenis dokumen (Anggaran kas, SPD dan SP2D)	3 jenis dokumen (Anggaran kas, SPD dan SP2D)
	Outcome :Presentase penerbitan SP2D tepat waktu	3 jenis dokumen (Anggaran kas, SPD dan SP2D)	3 jenis dokumen (Anggaran kas, SPD dan SP2D)
2	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/ Kas Daerah	126.100.000,00	124.879.622,00
	Output : Jumlah dokumen administrasi gaji	50 dokumen gaji/ kasda	103 dokumen gaji/ kasda
	Outcome : Presentase penerbitan SP2D tepat waktu	50 dokumen gaji/ kasda	103 dokumen gaji/ kasda
6	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.209.000.000,00	1.076.534.252,00
1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	110.000.000,00	98.971.036,00
	Output : Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	3 dokumen	4 dokumen
	Outcome :Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	3 dokumen	4 dokumen
2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	292.200.000,00	272.047.764,00
	Output : Jumlah produk hukum	2 produk hukum (Perda dan Perwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD)

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	2 produk hukum (Perda dan Perwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD)
3	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	31.600.000,00	26.717.347,00
	Output : Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 buku	2 buku
	Outcome : Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	2 buku	2 buku
4	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	238.800.000,00	167.598.105,00
	Output : Jumlah peserta bintek	400 orang	400 orang
	Outcome : Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	400 orang	400 orang
5	Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	536.400.000,00	511.200.000,0
	Output : Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan daerah	30 kali	62 kali
	Outcome : Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	30 kali	62 kali
7	program pengelolaan anggaran daerah	742.821.500,00	694.134.513,00
1	Penyusunan DPA dan DPPA	51.100.000,00	50.328.755,00
	Output : Jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran	3 dokumen	3 dokumen
	Outcome :Pengesahan Dokumen DPA dan DPPA	3 dokumen	3 dokumen
2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	229.927.500,00	213.409.974,00
	Output : Jumlah produk hukum	2 produk hukum (Perda dan Perwal APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal APBD)
	Outcome : Pengesahan perda APBD tepat waktu	2 produk hukum (Perda dan Perwal APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal APBD)
3	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	184.294.000,00	160.535.564,00
	Output : Jumlah produk hukum	2 produk hukum (Perda dan Perwal perubahan APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal perubahan APBD)
	Outcome :Pengesahan Perda P APBD tepat waktu	2 produk hukum (Perda dan Perwal perubahan APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal perubahan APBD)
4	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	131.680.000,00	129.814.334,00
	Output : Jumlah penambahan/perbaikan fitur dalam aplikasi	4 fitur	5 fitur

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : Pengesahan APBD tepat waktu	4 fitur	5 fitur
5	Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus	145.820.000,00	140.045.886,00
	Output : Jumlah dokumen standar biaya	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Pengesahan APBD tepat Waktu	1 dokumen	1 dokumen
8	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	3.678.450.000,00	3.131.383.706,93
1	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah	3.000.000.000,00	2.683.025.017,44
	Output : Jumlah aset daerah yang diasuransikan	2 jenis aset (bangunan gedung dan kendaraan dinas)	2 jenis aset (bangunan gedung dan kendaraan dinas)
	Outcome :Presentase aset yang diasuransikan	2 jenis aset (bangunan gedung dan kendaraan dinas)	2 jenis aset (bangunan gedung dan kendaraan dinas)
2	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Barang Milik Daerah dengan Realisasi Belanja Modal	33.400.000,00	27.171.197,00
	Output : Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	18 buku	18 buku
	Outcome : Presentase peningkatan Nilai aset pemda	18 buku	18 buku
3	kegiatan optimalisasi, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah	424.100.000,00	360.175.977,49
	Output : Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	2 tanah/bangunan	2 tanah/bangunan
	Outcome : Presentase peningkatan Nilai aset pemda	2 tanah/bangunan	2 tanah/bangunan
4	kegiatan perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	220.950.000,00	61.011.515,00
	Output : Jumlah dokumen perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	2 dokumen	2 dokumen
	Outcome : Jumlah produk hukum	2 dokumen	2 dokumen

Realisasi program dan Kegiatan **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	713.092.000,00	666.562.348,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	624.627.000,00	578.121.975,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	13 Jenis	13 Jenis
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Bapenda	100 %	92,55 %
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	88.465.000,00	88.440.373,00
	Output : Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah	15 Kali	20 Kali
	Outcome : Nilai akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah	100 %	99,97 %
2	program pemeliharaan barang milik daerah	115.840.000,00	90.014.275,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	23.063.000,00	21.884.375,00
	Output : Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	1 Unit
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	100 %	94,89 %
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	55.625.000,00	37.446.900,00
	Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 Unit	2 Unit
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	100 %	67,32 %
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	37.152.000,00	30.683.000,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	2 Unit	2 Unit
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	100 %	82,59 %
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	140.552.000,00	139.076.160,00
1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	140.552.000,00	139.076.160,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana aparatur	10 Buah	10 Buah
	Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	100 %	98,95 %
4	program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah	999.655.000,00	838.435.750,00
1	Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi	277.900.000,00	264.253.250,00
	Output : Pemberian hadiah gebyar undian PBB	217 WP	217 WP
	Outcome : Pemberian hadiah gebyar undian PBB	100 %	95,09 %
2	Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT	25.000.000,00	22.100.000,00
	Output : Jumlah penerbitan SPPT dan penyampaian SPPT	60.000 SPPT	55.853 SPPT

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	kepada Wajib Pajak		
	Outcome : Jumlah penerimaan pajak	100 %	88,40 %
3	Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	104.500.000,00	101.500.000,00
	Output : Penyelesaian permohonan keringanan, keberatan, pembatalan dan pembetulan bagi wajib pajak	1.500 Berkas	1.500 Berkas
	Outcome : Prosentase peningkatan pajak daerah	100 %	97,13 %
4	Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Terpadu	74.000.000,00	64.175.000,00
	Output :Penyebarluasan informasi perpajakan daerah	1 Paket	1 Paket
	Outcome : Prosentase peningkatan pajak daerah	100 %	86,72 %
5	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	17.680.000,00	12.580.000,00
	Output : Jumlah surat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak	150 Petugas Pungut	150 Petugas Pungut
	Outcome : Capaian penerimaan pajak	100 %	71,15 %
6	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	469.975.000,00	343.227.500,00
	Output : Jumlah pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB sehingga wajib pajak tepat waktu pembayarannya	3.300 WP	3.300 WP
	Outcome : capaian penerimaan pajak	100 %	73,03 %
7	kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah	30.600.000,00	30.600.000,00
	Output : Wajib Pajak daerah tepat waktu pembayarannya	2 Dokumen	2 Dokumen
	Outcome : Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	100 %	100 %
5	program peningkatan pendataan dan potensi pajak daerah	97.175.000,00	61.601.400,00
1	kegiatan pemeliharaan basis data PBB	12.325.000,00	6.650.000,00
	Output : Tersedianya basis data yang update	60.000 WP	60.000 WP
	Outcome : Prosentase ketersediaan basis data pajak daerah	100 %	53,96 %
2	kegiatan pemeliharaan basis data objek pajak daerah	9.850.000,00	6.650.000,00
	Output : Jumlah wajib pajak	150 WP	150 WP
	Outcome : Prosentase ketersediaan basis data pajak daerah	100 %	67,51 %

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Pada Kegiatan Perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah dengan anggaran sebesar Rp. 220.950.000,00 dan mengalami realisasi sebesar Rp. 61.011.515,00. Hal ini disebabkan karena proses kerjasama dengan pihak ke III dalam penilaian appraisal aset daerah dengan mendatangkan tenaga ahli tidak dapat dilaksanakan.
2. Kurangnya kwantitas SDM petugas pungut
3. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan
4. Belum optimalnya penggalian potensi terhadap pajak daerah
5. Kurangnya akurasi data pajak daerah

Solusi

1. Pada tahun anggaran berikutnya akan kami cermati dalam perencanaan kerjasama agar realisasi anggaran bisa sesuai capaian kerja yang diharapkan.
 2. Kwantitas SDM petugas pungut yang ada merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi pajak diatas target yang ada, dengan tuntutan selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun .
Sesuai tingkat kondisi kwantitas SDM di Pemerintah Kota Madiun maka untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Mengambil langkah yaitu memaksimalkan kwantitas SDM yang ada semaksimal mungkin dengan pembagian tugas secara tepat dan terbagi habis.
 3. Solusi atas pemahaman wajib pajak tentang perpajakan yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan pelayanan perpajakan daerah di tempat pelayanan pajak daerah terpadu dengan harapan dapat membantu penyelesaian pengajuan permohonan oleh wajib pajak
 - Kegiatan sosialisasi penyebaran informasi perpajakan daerah dengan sasaran bahwa penyebaran informasi sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan daerah
-

4. Solusi terhadap belum optimalnya penggalian potensi terhadap pajak daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan kegiatan sebagai berikut:
 - Kegiatan pengamanan penerimaan pajak daerah dengan hasil yang diharapkan sebagai upaya untuk pengamanan target penerimaan pajak daerah
 - Kegiatan pemberian hadiah gebyar undian PBB dan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran yang tepat waktu
 5. Solusi keakurasian data pajak daerah yaitu sebagai berikut :
 - Kegiatan pemeliharaan basis data dan obyek pajak merupakan upaya untuk mewujudkan pemutakiran data pendaftaran SPTPD dan peremajaan
 - Kegiatan pemeliharaan basis data PBB merupakan upaya untuk mewujudkan keakuratan data subyek dan obyek pajak dalam basis data SPOP, LSPOP, Peta dan pemutakiran basis data SISMIOP
-

6. PERENCANAAN

a. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui rumusan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.131
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Kota Madiun
Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	%
		TAHUN 2018		TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
D Fungsi Penunjang Pemerintahan					
31 Perencanaan					
31.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda	Ya	Ya	Ya	100
31.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	Ada	Ada	100
31.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	Ada	Ada	100
31.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	100	100	100	100
31.5	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	100	100
31.6	Persentase hasil musrenbang yang diakomodasi	47	50	50	100
31.7	Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja	100	100	100	100
31.8	Persentase SKPD bidang ekonomi yang menyusun RENJA	100	100	100	100
31.9	Persentase SKPD bidang sosial budaya yang menyusun RENJA	100	100	100	100
31.10	Persentase SKPD Bidang Fisik dan Prasarana yang menyusun RENJA	100	100	100	100
31.11	Persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD	100	100	100	100
31.12	Dokumen data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersedia	6	5	5	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
31.13	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengakomodir Kepentingan Masyarakat Kota Madiun	21	57	57	100
31.14	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	7	7	7	100
31.15	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	16	15	15	100
31.16	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	7	5	5	100

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan Perda RPJPD telah tersedia yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E).
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan Perda RPJMD telah tersedia, yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019.
3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan Peraturan Kepala Daerah RKPd telah tersedia, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2020.
4. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd Program sejumlah 105 yang tercantum dalam RPJMD sudah terakomodir seluruhnya (100%) dalam RKPd.
5. Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu Pelaksanaan musrenbang telah dilaksanakan tepat waktu, mulai dengan pelaksanaan musrenbang kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat Kota dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu

pada akhir Maret 2019 telah dilaksanakan Musrenbang Kota Madiun guna penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2019.

6. Persentase hasil musrenbang yang di akomodasi dalam APBD.
Pada Tahun 2019 ini, BAPPEDA menargetkan 46% usulan dalam musrenbang Kota Madiun dapat diakomodir dalam APBD. Usulan hasil rekapitulasi musrenbang Kota Madiun Tahun 2019 adalah sebanyak 5.338 dan yang diakomodir dalam RKPD adalah sebesar 2.821 usulan, sehingga target 50% tahun ini dapat tercapai sebesar 47%. Target tersebut meningkat tiap tahunnya, mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Pada Tahun 2019, 50% usulan masyarakat diharapkan dapat diakomodir dalam Dokumen RKPD.
 7. Prosentase OPD yang menyusun Dokumen Renja
Setiap tahun pada periode 2014-2019, Seluruh OPD Kota Madiun menyusun Dokumen Renja (100%) yaitu sejumlah 34 OPD.
 8. Persentase SKPD bidang ekonomi yang menyusun RENJA
Bidang Ekonomi BAPPEDA mengkoordinir instansi Pemerintah Kota Madiun sebagai berikut :
 1. Dinas Perdagangan
 2. Bagian Adm. Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
 3. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro
 4. Dinas Tenaga Kerja
 5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 6. Badan Pendapatan DaerahDari 6 (enam) instansi tersebut, seluruhnya menyusun Renja setiap tahun pada Periode RPJMD 2014-2019, sehingga capaian kinerja tiap tahun maupun rata-rata 5 tahun adalah 100%.
 9. Persentase SKPD bidang sosial budaya yang menyusun RENJA
Bidang Sosial Budaya BAPPEDA mengkoordinir instansi Pemerintah Kota Madiun sebagai berikut :
 1. RSUD
 2. Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak
 3. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
 4. Dinas Pendidikan
-

Dari 4 (empat) instansi tersebut, seluruhnya menyusun Renja setiap tahun pada Periode RPJMD 2014-2019, sehingga capaian kinerja tiap tahun maupun rata-rata 5 tahun adalah 100%.

10. Persentase SKPD Bidang Fisik dan Prasarana yang menyusun RENJA

1. Dinas PU dan TR
2. Dinas Perkim
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. BPBD Kota Madiun

Dari 5 (lima) instansi tersebut, seluruhnya menyusun Renja setiap tahun pada Periode RPJMD 2014-2019, sehingga capaian kinerja tiap tahun maupun rata-rata 5 tahun adalah 100%.

11. Prosentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD, sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut

SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN 2	TARGET 3	CAPAIAN KINERJA 4
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kontribusi RKPD terhadap RPJMD	100%	100%
	Tingkat kontribusi Renstra OPD terhadap RPJMD	100%	100%
	Tingkat kontribusi Renja OPD terhadap RKPD	100%	100%
	Tingkat kontribusi APBD terhadap RKPD	100%	100%
	Prosentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%

Dari tabel tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 1, yaitu Tingkat kontribusi RKPD terhadap RPJMD, diukur dengan menggunakan perhitungan : Jumlah program dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah program dalam RPJMD, jumlah program dalam RKPD adalah 105 program, dan program yang tertera pada RPJMD yaitu pada tahun 2019 sejumlah 105, maka capaiannya adalah 100%.

Indikator 2, yaitu Tingkat kontribusi Renstra OPD terhadap RPJMD, diukur dengan menggunakan perhitungan : Jumlah program dalam renstra OPD dibandingkan dengan jumlah program dalam RPJMD,

jumlah program dalam RKPD adalah 105 program, dan 105 program yang tertera pada RPJMD telah terdistribusikan/tercatat seluruhnya dalam Renstra OPD Pemerintah Kota Madiun, maka capaiannya adalah 100%.

Indikator 3, yaitu Tingkat kontribusi Renja OPD terhadap RKPD, diukur dengan menggunakan perhitungan : Jumlah program yang terdapat RPJMD (105) diakomodir dalam RKPD (105 program) , kemudian dijabarkan dalam Renstra masing-masing OPD. Renstra masing-masing OPD tersebut diakomodir ke dalam Renja masing-masing OPD tiap tahun , maka capaiannya adalah 100%.

Indikator 4, yaitu Tingkat kontribusi APBD terhadap RKPD, diukur dengan menggunakan perhitungan : Jumlah program yang terdapat dalam RKPD apakah seluruhnya telah tercantum dalam APBD. Pada tahun 2017 jumlah program dalam RKPD adalah 105 program. Akan tetapi, terdapat 1 program yang tidak dilaksanakan yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah yang menjadi/termasuk Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Maka capaiannya adalah 105 program dibandingkan/dibagi dengan 105 program, sehingga capaiannya adalah 100%.

Indikator 5, yaitu Prosentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan, diukur dengan menggunakan perhitungan : membandingkan Jumlah program yang dilaksanakan oleh OPD pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah program yang direncanakan dalam RKPD. Pada tahun 2019 program yang terdapat dalam RKPD adalah 105 program dan pada saat laporan Evaluasi seluruh program tersebut telah terlaksana 105 program oleh masing-masing OPD, maka capaiannya adalah 100 %

12. Pada Tahun 2019 Dokumen data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersedia 6 Dokumen data dan Informasi yang tersedia, diantaranya adalah:

- dokumen kajian dan penelitian bidang Eksosbud
- dokumen kajian dan penelitian bidang Fisik Prasarana (2 dokumen kajian)
- dokumen laporan Perkembangan dan Pembangunan

- dokumen data dan potensi Kota Madiun
- dokumen Laporan SIPD

Setiap tahun selama periode 5 tahun, Rata-rata Penyusunan Dokumen data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebanyak 5(lima) dokumen. Pada Tahun 2019 kajian/penelitian bidang prasarana wilayah sebanyak 2 (berbeda dari tahun-tahun sebelumnya) yang hanya 1 kajian.

13. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengakomodir Kepentingan Masyarakat Kota Madiun

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat meliputi dokumen-dokumen perencanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Berdasarkan peraturan tersebut, BAPPEDA yang memiliki urusan perencanaan wajib menyusun dokumen-dokumen perencanaan tiap tahun (mulai awal periode sampai akhir periode) yang meliputi :

- a. RKPD (dan RKPD-P), sejumlah 2 dokumen;
- b. KUA (dan KUPA), sejumlah 2 dokumen;
- c. PPAS (dan PPAS-P), sejumlah 2 dokumen;
- d. Laporan evaluasi bulanan (realisasi fisik keuangan dan capaian kinerja), sejumlah 12 dokumen, evaluasi triwulan sebanyak 3 dokumen;
- e. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sejumlah 1 dokumen.
- f. Dokumen hasil verifikasi OPD sebanyak 34

14. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Setiap Tahun Program perencanaan bidang ekonomi paling tidak menyusun 2 dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Selain itu terdapat 5 dokumen lainnya pada Bidang Ekonomi yaitu :

1. Buku Ekonomi dalam angka
 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi SDGs (Sustainable Development Goals)
-

3. Dokumen SOP (3) :
 - SOP Penyusunan SK CSR
 - SOP Pelaksanaan CSR
 - SOP verifikasi usulan CSR
4. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi (2 dokumen) :
 - Dokumen Laporan Kegiatan Pengembangan CSR
 - Dokumen Monitoring dan Evaluasi SDGs (Sustainable Development Goals)

15. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Setiap Tahun Program perencanaan pembangunan Sosial Budaya menyusun 2 dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan pada tahun 2019 juga menyusun dokumen lainnya pada bidang Sosial dan Budaya yaitu :

1. Dokumen LP2KD (Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sebanyak 2 dokumen;
 2. Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 1 dokumen;
 3. Dokumen Hasil Verifikasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 3 dokumen.
 - Dokumen Hasil Verifikasi Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) se Kota Madiun
 - Dokumen Hasil Verifikasi GENDER ANALISIS PATHWAY se Kota Madiun
 - Dokumen Hasil Verifikasi Term Of Reference (KAK) se Kota Madiun
 4. Dokumen SOP Bidang Sosial Budaya (4 dokumen) :
 - SOP Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Transmigrasi.
 - SOP Verifikasi Perencanaan Urusna Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
-

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Transmigrasi.

- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
 - SOP Rapat Koordinasi TKPK
5. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sosial Budaya (5 dokumen) :
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Tim TKPK (2 laporan);
 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (1 laporan);
 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (1 laporan);
 - Laporan Pelaksanaan Pengembangan Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (1 laporan);
12. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
- Setiap Tahun Program perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah menyusun 2 dokumen. Pada tahun 2019 Program perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah menyusun dokumen lainnya sebanyak 3 dokumen pada bidang Prasarana Wilayah yaitu :
1. Dokumen Monitoring dan Pelaporan Rencana Tata Ruang.
 2. Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman.
 3. Survey Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
 4. Laporan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah.
 5. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK (3 dokumen)

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang Perencanaan yang dilaksanakan pada 2019, adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program perencanaan pembangunan daerah	1	kegiatan perencanaan pemerintahan umum
		2	kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan
6	program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	1	kegiatan perencanaan umum tata ruang dan lingkungan hidup
		2	kegiatan perencanaan sarana prasarana perkotaan
		3	program perencanaan pembangunan ekonomi
		4	kegiatan perencanaan bidang ekonomi
7	program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1	kegiatan perencanaan bidang sosial budaya
8	program pengembangan kajian dan penelitian	1	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum
		2	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana

a. Realisasi Program Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang Perencanaan yang dilaksanakan pada Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1.278.207.840,00	1.115.718.957,00
	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	826.902.000,00	701.413.277,00
	Output : Peralatan Barang dan Jasa Kantor	11 paket	11 paket
	Outcome : terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	451.305.840,00	451.305.685,00
	Output : Jumlah perjalanan Dinas	9 kali	9 kali
	Outcome : terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah	101.575.600,00	93.436.450,00
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.983.100,00
	Output : jumlah gedung yang diperbaiki	1 gedung	1 gedung
	Outcome : presentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	31.035.000,00	22.983.100,00
	Output: Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	28 Kendaraan	28 Kendaraan
	Outcome : presentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	45.540.000,00	45.527.250,00
	Output : jumlah sarpras kantor yang layak pakai	1 paket	1 paket
	Outcome : presentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	440.400.000,00	412.243.600,00
1	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	445.400.000,00	412.243.600,00
	Output : jumlah paket peralatan	1 paket	3 paket
	Outcome : presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 %	100 %
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	96.096.800,00	86.270.563,00
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	96.096.800,00	86.270.563,00
	Output : Dokumen yang disusun	12 dokumen	12 dokumen
	Outcome : prosentase dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
5	program perencanaan pembangunan daerah	1.515.484.400,00	1.469.429.059,00
1	Kegiatan Perencanaan Pemerintahan Umum	1.396.390.400,00	1.367.797.606,00
	Output : jumlah dokumen	7 dokumen	7 dokumen
	Outcome : tingkat kontribusi RKPD terhadap RPJMD	100 %	100 %

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	2 Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	119.094.000,00	101.631.453,00
	Output : jumlah dokumen	5 dokumen	5 dokumen
	Outcome : persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan.	100 %	100 %
6	program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	338.531.600,00	319.591.361
	1 Kegiatan Perencanaan Umum Tata ruang dan Lingkungan Hidup	220.109.600,00	209.941.687,00
	Output : jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : tingkat kontribusi Renstra OPD terhadap RPJMD	100%	100%
	2 Kegiatan Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan	118.422.000,00	109.649.674,00
	Output : jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Outcome : tingkat kontribusi Renstra OPD terhadap RPJMD	100%	100%
7	program perencanaan pembangunan ekonomi, social, dan budaya	135.718.000,00	192.921.322
	1 Kegiatan Perencanaan Ekonomi	135.718.000,00	119.818.270,00
	Output : jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : tingkat kontribusi Renstra OPD terhadap RPJMD	100%	100%
	2 Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	120.276.000,00	73.103.052,00
	Output : jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Outcome : tingkat kontribusi Renstra OPD terhadap RPJMD	100 %	100 %
8	program pengembangan kajian dan penelitian	824.964.800,00	735.711.645,00
	1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana	551.476.400,00	495.645.006,00
	Output : jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Outcome : Tingkat kontribusi APBD terhadap RKPD	100%	100%
	2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum	273.488.400,00	240.066.639,00
	Output : jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Outcome : Tingkat kontribusi APBD terhadap RKPD	100%	100%

7. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui rumusan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program. Indikator kinerja sasaran yang utama adalah prosentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.132
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kota Madiun Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	5	6	7	8
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
D	Fungsi Penunjang Pemerintahan				
34	Penelitian dan Pengembangan				
34.1	Jumlah Kajian dan Penelitian	2	2	4	200

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Kajian dan Penelitian

Setiap tahun Program Penelitian dan Pengembangan menyusun kajian/penelitian 2 dokumen, tapi pada tahun 2019 melakukan 4 kajian yaitu :

- Kajian/penelitian mengenai bidang eksosbud dan pemerintahan umum : Evaluasi pelaksanaan remunerasi di kota madiun
- Kajian/penelitian bidang fisik dan prasarana : Optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah guna pengembangan kawasan mayjend sungkono
- Kajian gulun di kota madiun
- Kajian peceland/ kampung pecel di kota madiun

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan pada Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	1	Kegiatan Penyusunan Kajian/ Penelitian Bidang Eksosbud dan Pemerintahan Umum
		2	Kegiatan Penyusunan Kajian/ Penelitian Bidang Fisik dan Prasarana

c. Realisasi Program Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan pada Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	824.964.800,00	735.711.645,00
1	Kegiatan Penyusunan Kajian/ Penelitian Bidang Fisik dan Prasarana	551.476.400,00	495.645.006,00
	Output : 2 dokumen		
	Outcome : Tingkat kontribusi APBD terhadap RKPD		
2	Kegiatan Penyusunan Kajian/ Penelitian Bidang Eksosbud dan Pemerintahan Umum	273.488.400,00	240.066.639,00
	Output : 2 dokumen		
	Outcome : Tingkat kontribusi APBD terhadap RKPD		

8. KECAMATAN

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Kartoharjo, Manguharjo dan Taman menyelenggarakan Fungsi Penunjang Kecamatan.

Tujuan Pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari misi yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Sedangkan Sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun. Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Kecamatan di Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Berbasis Pada Partisipasi Masyarakat

Tujuan 1 : Mendorong dan Meningkatkan Partisipasi Seluruh Pemangku Kepentingan Untuk Terlibat Aktif Dalam Pembangunan Daerah

Sasaran : 1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah
2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat

Misi 2 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan 1 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Sasaran : 1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi dan fasilitasi
2 Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan

Indikator kinerja sasaran yang utama adalah prosentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.133
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Kecamatan di Kota Madiun
Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
D	Fungsi Penunjang Pemerintahan				
36	Kecamatan				
36.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan (LPM)	5	5	5	100%
36.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	43,436	37.226	43.436	100%
36.3	LPM berprestasi	11,11	11	11,11	101%
36.4	PKK aktif	31	31	31	100%
36.5	Posyandu aktif	389	270	389	144%
36.6	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	3	3	3	100%
36.7	Prosentase LPMD/Organisasi Pemberdayaan yang aktif menjalankan fungsinya	100	100%	100%	100%
36.8	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	100	100%	100%	100%
36.9	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100	100%	100%	100%
36.10	Jumlah LPMK Aktif	27	27	27	27
36.11	Jumlah Posyandu Balita	270	270	270	270
36.12	Jumlah Alat yang dipromosikan	1	1	1	1
36.13	Jumlah LKK Sehat	27	27	27	27

Sumber Data : Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas untuk Indikator kinerja sasaran :

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan (LPM)

Untuk Indikator ini tercapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 5 kelompok binaan lembaga pemberdayaan (LPM) terealisasi sebanyak 5 kelompok. Kelompok binaan terdiri dari LKK, LPMK, Karang Werda, Karang taruna dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Faktor pendorong keberhasilan tercapainya indikator ini adalah karena peran aktif dari unsur masyarakat yang tergabung dalam 5 kelompok binaan lembaga pemberdayaan ini.

2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Untuk indikator rata-rata jumlah anggota binaan PKK pada tahun 2019 di Kecamatan se Kota Madiun terus mengalami peningkatan, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Tahun 2019
1	Kartoharjo	16.646
2	Taman	15.675
3	Manguharjo	11.115
	Jumlah	43.436

Faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya partisipasi dan peran serta aktif masyarakat terutama dari unsur PKK.

3. LPM berprestasi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berprestasi di kecamatan se Kota Madiun berdasarkan Perlombaan Kelurahan Berhasil pada tahun 2019 adalah :

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Kecamatan Kartoharjo	Kelurahan Klegen
		Kelurahan Sukosari
		Kelurahan Kelun
2	Kecamatan Taman	Kelurahan Mojorejo
		Kelurahan Kejuron
		Kelurahan Pandean
3	Kecamatan Manguharjo	Kelurahan Pangongangan
		Kelurahan Patihan
		Kelurahan Ngegong

4. PKK aktif

Untuk indikator PKK aktif di Kota Madiun pada tahun 2019, terdapat 10 PKK aktif yang terdiri dari 9 PKK kelurahan dan PKK Tingkat Kecamatan. Faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah karena adanya partisipasi dan peran serta aktif dari PKK di 27 kelurahan, 3 Kecamatan dan 1 PKK Tingkat Kota.

5. Posyandu aktif

Berdasarkan data Tahun 2018, data posyandu aktif yang ada di Kota Madiun adalah sebanyak 389 posyandu dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan	Puskesmas	Posyandu Balita			Posyandu Lansia
		Aktif	Tidak	Jumlah	Aktif
Kartoharjo	Oro-Oro Ombo	37	2	39	24
	Tawangrejo	28	-	28	21
Taman	Banjarejo	54	2	56	23
	Demangan	65	2	67	31
Manguharjo	Manguharjo	51	-	51	22
	Patihan	24	5	29	9
Jumlah		259	11	270	130

6. Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
 Pada tahun 2019 Program pada Kecamatan yang mendukung Swadaya masyarakat terdapat 3 program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban, Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan, dan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan dimana masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan serta aktif dalam musrenbang dari mulai tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan untuk mengajukan usulan-usulan dari masyarakat baik usulan untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
7. Prosentase LPMD/Organisasi Pemberdayaan yang aktif menjalankan fungsinya
 Untuk indikator prosentase LPMD yang aktif menjalankan fungsinya di Kecamatan pada tahun 2018 adalah sebesar 100%, dimana prosentase ini sesuai dengan target pada tahun 2018 yaitu sebesar 100%. LPMD yang aktif adalah LPMK di 27 kelurahan pada Kecamatan se Kota Madiun. Faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya partisipasi dan peran aktif masyarakat terutama dari unsur LPMK.
8. Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan
 Untuk Indikator Kinerja Prosentase Kehadiran dalam peserta penguatan Lembaga Kemasyarakatan pada tahun 2019 targetnya sudah tercapai/ terealisasi sebesar 100%, hal ini dikarenakan lembaga kemasyarakatan perlu mendapatkan serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dengan jalan mengikuti sosialisasi, bimbingan

teknis, lokakarya dan sebagainya yang menyangkut tentang informasi yang terkait dengan pemerintahan daerah.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator tersebut adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terutama unsur ketua RT, ketua RW, ketua karang taruna, ketua LPMK, Tokoh Masyarakat dan Lurah akan pentingnya penguatan lembaga kemasyarakatan yang nantinya akan diimplementasikan di wilayahnya masing-masing.

9. Jumlah Alat yang dipromosikan

Alat yang dipromosikan merupakan alat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan ekonomi/home industri. Faktor pendukung tercapainya indikator tersebut adalah meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam menciptakan alat teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dalam hal menunjang kesejahteraan ekonomi.

10. Jumlah LKK Sehat

LKK merupakan Lembaga Keuangan kelurahan di mana pengurusnya adalah terdiri dari anggota masyarakat yang berfungsi untuk membantu meminjamkan dana kepada anggota masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi syarat dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat. Faktor pendukung tercapainya indikator tersebut adalah adanya peran serta aktif LKK dalam menunjang ekonomi kelurahan. Pada tahun 2019 LKK sehat yang ada di seluruh kecamatan di Kota Madiun sejumlah 27 LKK yang tersebar di 27 kelurahan di Kota Madiun.

11. Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Untuk Indikator Kinerja Prosentase Kehadiran dalam perencanaan pembangunan kelurahan pada tahun 2019 targetnya sudah tercapai/terrealisasi sebesar 100%, hal ini dikarenakan antusias masyarakat untuk ikut serta aktif dalam memberikan usulan perencanaan pembangunan sangat besar. Dari mulai Musrenbang kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, dimana faktor pendukung tercapainya indikator tersebut adalah meningkatnya partisipasi masyarakat terutama unsur Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Tim

Penggerak PKK, Ketua Pokja I sampai dengan IV, Ketua Karang taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Lurah, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam proses perencanaan pembangunan yang terimplementasi dalam Musrenbang dari mulai tingkat RT, RW, Kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pembangunan dari masyarakat yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan.

12. Jumlah LPMK Aktif

Pada tahun 2019, LPMK aktif di seluruh kecamatan di Kota Madiun tersebar pada 27 Kelurahan. Sejumlah 27 orang masing-masing kelurahan aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan di Kota Madiun.

13. Jumlah Posyandu Balita

Posyandu Balita di Kota Madiun pada tahun 2019 adalah sebanyak 270 posyandu yang tersebar pada tiga kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan	Puskesmas	Posyandu Balita
Kartoharjo	Oro-Oro Ombo	39
	Tawangrejo	28
Taman	Banjarejo	56
	Demangan	67
Manguharjo	Manguharjo	51
	Patihan	29
Jumlah		270

b. Program dan Kegiatan

Program Kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
		2 kegiatan penyusunan buku kecamatan dalam angka
		3 kegiatan penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan
4	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	1 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan
5	program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	1 Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan
6	program penyelenggaraan kelurahan	1 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor
		2 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo
		3 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul
		4 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor
		5 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong
		6 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan
		7 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan
		8 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten
		9 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo
7	program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	1 Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program Kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Taman Kota Madiun pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
		2 kegiatan penyusunan buku kecamatan dalam angka
		3 kegiatan penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan
4	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	1 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan
5	program penyelenggaraan kelurahan	1 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo
		2 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean
		3 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo
		4 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen
		5 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo
		6 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron
		7 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan
		8 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan
		9 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman
6	program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	1 Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program Kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
		2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
		3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
		2	Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		2	Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan
		3	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka
5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
6	Program Penyelenggaraan Kelurahan	1	Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo
		2	Penyelenggaraan Kelurahan Klegen
		3	Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro
		4	Penyelenggaraan Kelurahan Oro-oro Ombo
		5	Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo
		6	Penyelenggaraan Kelurahan Pilang Bango
		7	Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari
		8	Penyelenggaraan Kelurahan Kelun
		9	Penyelenggaraan Kelurahan Tawang Rejo
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan	1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan
8	Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan	1	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang kecamatan yang dilaksanakan oleh **Kecamatan Manguharjo** Kota Madiun pada tahun 2019 :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1.098.422.400,00	894.624.843,00
	1 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	974.600.400,00	775.454.394,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	7 Jenis
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	123.822.000,00	110.170.449,00
	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1936 kali	1454 kali
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah	176.377.200,00	115.560.316,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	71.298.000,00	50.055.576,00
	Output : Jumlah gedung	1 Gedung	1 Gedung
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	59.779.200,00	39.862.40,00
	Output : Jumlah kendaraan dinas	16 unit	16 unit
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	45.300.000,00	25.642.000,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor	3 jenis	3 jenis
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	101.505.600,00	97.875.794,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	43.120.800,00	42.708.683,00
	Output : jumlah dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen
	Outcome : jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
2	kegiatan penyusunan buku kecamatan dalam angka	29.192.400,00	28.717.875,00
	Output : jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Outcome : jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
3	kegiatan penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	29.192.400,00	26.449.236,00
	Output : jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Outcome : jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
4	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	129.511.520,00	128.444.909,00
1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	129.511.520,00	128.444.909,00
	Output : Jumlah pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan	10 kali	10 Kali
	Outcome : Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota	100%	100%
5	program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	71.365.020,00	62.833.744,00
1	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	71.365.020,00	62.833.744,00
	Output : Jumlah pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan	9 Kali	9 Kali
	Outcome : Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota	100%	100%
6	program penyelenggaraan kelurahan	8.601.110.810,00	7.069.355.549,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	956.749.800,00	791.365.795,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Madiun Lor	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	984.188.090,00	805.429.425,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
3	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	1.023.256.940,00	859.041.477,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan kidul	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
4	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	1.116.187.080,00	925.468.470,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Lor	100%	100%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
5	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	860.762.740,00	698.860.603,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Ngegong	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
6	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	866.600.800,00	696.921.049,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Pangongangan	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
7	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	878.807.940,00	729.283.241,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Patihan	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
8	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	921.630.440,00	769.474.478,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Sogaten	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
9	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	992.926.980,00	793.511.011,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Winongo	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
7	program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	380.339.240,00	280.550.000,00
1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	380.339.240,00	280.550.000,00
	Output : Prosentase kehadiran peserta Koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	100%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi	12 Kali	12 Kali

Realisasi program kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang kecamatan yang dilaksanakan oleh **Kecamatan Taman** Kota Madiun pada tahun 2019 :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1.016.228.428,00	782.626.274,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	916.435.428,00	682.833.274,00
	Output : Jumlah peralatan kantor	9 paket	9 paket
	Outcome : terselesainya Permohonan Rekomendasi di Kec.	9 paket	9 paket
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99.793.000,00	99.793.000,00
	Output : Jumlah Koordinasi keluar daerah	21 kali	21 kali
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah	119.948.000,00	105.312.925,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00
	Output : Jumlah Gedung dan Bangunan	1 unit	1 unit
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	48.448.000,00	38.589.650,00
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas	16	16
	Outcome : Prosentase jumlah kendaraan dalam kondisi baik	100%	100%
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	36.500.000,00	31.723.275,00
	Output : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	97.079.040,00	96.084.336,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	41.395.968,00	41.378.160,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Jumlah Dokumen	8 Dok	8 Dok
	Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	8 dok	8 dok
2	kegiatan penyusunan buku kecamatan dalam angka	27.841.536,00	27.498.096,00
	Output :Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen
3	kegiatan penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	27.841.536,00	27.208.0080,00
	Output : Jumlah Dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen
4	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	160.808.596,00	158.311.032,00
1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	160.808.596,00	158.311.032,00
	Output :Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan kecamatan	10 kali	10 kali
	Outcome :Tingkat Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
5	program penyelenggaraan kelurahan	7.875.206.020,00	6.754.703.503,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	936.227.640,00	850.140.739,00
	Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	909.132.680,00	813.027.087,00
	Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
3	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	844.534.040,00	751.220.558,00
	Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
4	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen	715.549.420,00	543.264.394,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
5	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo	973.398.560,00	822.132.723,00
	Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
6	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron	913.213.680,00	786.398.642,00
	Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
7	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan	820.765.560,00	712.605.417,00
	Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
8	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan	844.759.400,00	735.347.360,00
	Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
9	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman	917.625.040,00	740.566.583,00
	Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
6	program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	154.401.296,00	143.865.365,00
11	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	154.401.296,00	143.865.365,00
	Output : Prosentase kehadiran peserta	100%	100%
	Outcome : Prosentase konflik masyarakat yang tertangani	100%	100%

Realisasi program kegiatan pada penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang kecamatan yang dilaksanakan oleh **Kecamatan Kartoharjo** Kota Madiun pada tahun 2019 :

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.151.076.350,00	977.117.160,00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.053.115.350,00	883.056.611,00
	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	7 jenis
	Outcome : Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%
2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	97.961.000,00	94.060.549,00
	Output : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	16 kali	16 kali
	Outcome : Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	96.053.600,00	93.489.659,00
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	34.998.000,00
	Output : Jumlah Gedung/ Bangunan	1 gedung	1 gedung
	Outcome : Prosentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100%	100%
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	30.653.600,00	28.093.259,00
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas	2 unit mobil, 14 unit motor	2 unit mobil, 14 unit motor
	Outcome : Prosentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100%	100%
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	30.400.000,00	30.398.400,00
	Output : Jumlah Sarana Prasarana Kantor	3 jenis	3 jenis
	Outcome : Prosentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100%	100%
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	259.950.000,00	240.766.000,00
1	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	174.950.000,00	173.566.000,00
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	2 paket	2 paket
	Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
2	Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	85.000.000,00	67.200.000,00

No	Uraian	Target	Realisasi
	Output : Jumlah Gedung	1 gedung	1 gedung
	Outcome : Prosentase pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	62.964.000,00	58.093.980,00
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.273.600,00	27.888.044,00
	Output : Jumlah dokumen	8 dokumen	8 dokumen
	Outcome : Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
2	Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	22.883.280,00	20.594.956,00
	Output : Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Outcome : Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
3	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	9.807.120,00	9.610.980,00
	Output : Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	222.462.600,00	157.035.000,00
1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	222.462.600,00	157.035.000,00
	Output : Prosentase kehadiran peserta koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	100%
	Outcome : Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	370 orang	370 orang
6	Program Penyelenggaraan Kelurahan	8.571.398.430,08	7.563.633.070,00
1	Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	913.840.800,00	799.700.312,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
2	Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	1.038.835.510,00	905.888.668,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Klegen	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan	100%	100%

No	Uraian	Target	Realisasi
	rekomendasi di kelurahan		
3	Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro	1.040.438.440,00	895.279.986,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kanigoro	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
4	Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo	976.466.800,00	840.059.466,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
5	Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	1.004.175.540,00	931.973.086,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
6	Penyelenggaraan Kelurahan Pilang Bango	917.051.340,08	788.979.853,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pilangbango	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
7	Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	871.594.440,00	774.784.362,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Sukosari	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
8	Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	929.073.040,00	838.741.986,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kelun	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
9	Penyelenggaraan Kelurahan Tawang Rejo	879.922.520,00	788.225.351,00
	Output : Prosentase	100%	100%

No	Uraian	Target	Realisasi
	terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo		
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan	104.255.580,00	95.017.500,00
1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	104.255.580,00	95.017.500,00
	Output : Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	10 kali	10 kali
	Outcome : Prosentase kehadiran dalam perencanaan pembangunan kelurahan	100%	100%
8	Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan	48.696.540,00	43.477.500,00
1	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	48.696.540,00	43.477.500,00
	Output : Jumlah pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan	1 kali	1 kali
	Outcome : Prosentase kehadiran peserta penguatan lembaga kemasyarakatan	100%	100%

d. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian dari warga masyarakat semakin menurun sebagai akibat dari berkembangannya semangat matrealistis dan individualis.

Solusi :

Adapun Solusi yang diambil yaitu diusahakan menumbuhkembangkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, termasuk meningkatkan interaksi sosial diantara sesama warga masyarakat, melalui program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan BBGRM, kegiatan lomba-lomba di kelurahan, kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya dan lain-lain.

2. Permasalahan

Kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat disebabkan karena kurangnya sumberdaya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang masih kurang baik dari segi kuantitas dan kualitas, masih kurang optimalnya koordinasi baik antar instansi maupun antara kecamatan/kelurahan dengan masyarakat, kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan masih kurangnya fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan meningkatkan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan baik dari kuantitas maupun kualitas, mengoptimalkan koordinasi baik antar instansi maupun antara kecamatan/kelurahan dengan masyarakat mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan menambah ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

e. Penghargaan yang diterima

Penghargaan yang diterima kelurahan di wilayah Kecamatan di Kota Madiun tahun 2019 yaitu:

1. Juara II Lomba Kelurahan Berhasil Tingkat Provinsi oleh Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo
 2. Penghargaan Kelurahan Berseri Kategori Pratama Tingkat Provinsi oleh Kelurahan Taman Kecamatan Taman
 3. Juara II Lomba BBGRM Tingkat Provinsi oleh kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo
-

BADAN USAHA MILIK DAERAH

✚ PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun

Adalah Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 yang bergerak dalam bidang Usaha Jasa Perbankan yang mempunyai tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit.

Tujuan didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan hidup masyarakat.

Pelaksanaan operasional PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dalam pelaksanaannya telah sesuai keadaan, potensi dan kemampuan yang ada dan terus berupaya memacu pendapatan dan peningkatan pelayanan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat di bidang pelayanan jasa perbankan diharapkan kegiatan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun akan bisa berkembang pesat seiring perkembangan pembangunan, khususnya di Kota Madiun dan umumnya di sekitar Kota Madiun.

Potensi pengembangan usaha PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun adalah :

1. Membantu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kota Madiun, TNI, Polri dalam memperoleh fasilitas kredit.
2. Sebagai Lembaga Perbankan yang ikut membantu melayani dan mengembangkan semua sektor ekonomi melalui kredit umum.
3. Ikut mensukseskan program ekonomi kerakyatan Pemerintah Kota Madiun lewat kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan Koperasi.

Untuk perkembangan kondisi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PERKEMBANGAN KONDISI
PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN
Tahun 2019 (Sebelum Audit)

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan (Rp)	Tumbuh %
1.	Penyaluran Kredit	63.869.453.332	66.461.964.644	2.592.511.312	4,06 %
2.	Penghimpunan Dana				
	a). Tabungan	14.226.790.475	12.907.130.334	(1.319.660.141)	(0,09) %
	b). Deposito	37.913.000.000	43.124.171.000	5.211.171.000	13,75 %
3.	Asset	93.007.072.050	97.119.016.024	4.111.943.974	4,43 %
4.	Hutang	53.909.915.748	58.083.107.186	4.173.191.438	7,74 %
5.	Ekuitas	39.097.156.301	39.035.908.837	(61.247.464)	(0,16) %
6.	Pendapatan	12.689.814.784	13.059.796.803	369.982.019	2,92 %
7.	Biaya	8.538.739.894	10.243.011.197	1.704.271.303	19,96 %
8.	Laba / Rugi	4.151.074.890	2.816.785.606	(1.334.289.284)	(32,14) %
9.	PAD Yang Disetor ke APBD	2.075.537.445	1.549.232.083	(526.305.362)	(25,36) %

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyaluran Kredit

Penyaluran Kredit dalam kurun waktu Tahun 2019 Rp 66.461.964.644 dibanding dengan Tahun 2018 Rp. 63.869.453.332 ada kenaikan Rp 2.592.511.312 atau tumbuh 4,06 % ,kenaikan ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat, pengaruh suku bunga kredit yang murah dan pelayanan kredit yang cepat.

2. Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana dari masyarakat dalam kurun waktu Tahun 2019 Rp 56.031.301.334 dibanding dengan Tahun 2018 Rp 52.139.790.474 ada kenaikan Rp. 3.891.510.860 atau tumbuh 7,46 %. Terbagi dari Tabungan dan Deposito, yaitu:

a. Tabungan

Penghimpun dana berupa Tabungan dalam kurun waktu Tahun 2019 Rp 12.907.130.334 dibanding dengan Tahun 2018 Rp 14.366.121.592 ada penurunan Rp 1.319.660.141 atau turun 0,09 %, hal ini disebabkan terdapat beberapa tabungan yang dipindahkan ke deposito setelah mencapai jumlah tertentu dan banyaknya penarikan tabungan menjelang akhir tahun.

b. Deposito

Penghimpun dana berupa Deposito dalam kurun waktu Tahun 2019 Rp 43.124.171.000 dibanding dengan Tahun 2018 Rp 37.913.000.000 ada kenaikan Rp 5.211.171.000 atau tumbuh 13,75 %, hal ini disebabkan kepercayaan dari masyarakat dalam menempatkan depositonya pada PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

3. Asset

Asset dalam kurun waktu Tahun 2019 Rp 97.119.016.024 dibandingkan dengan Tahun 2018 Rp 93.007.072.050 ada kenaikan atau Rp 4.111.943.974 tumbuh 4,43 %, hal ini disebabkan karena meningkatnya kredit yang diberikan dan penambahan inventaris pada Tahun 2019.

4. Hutang

Hutang dalam kurun waktu Tahun 2019 Rp 58.083.107.186 dibandingkan dengan Tahun 2018 Rp 53.909.915.748 ada kenaikan Rp 6.776.914.915 atau tumbuh 7,74 %, hal ini disebabkan kenaikan dari dana pihak ketiga berupa deposito.

5. Ekuitas

Ekuitas dalam kurun waktu Tahun 2019 Rp. 39.035.908.837 dibanding dengan Tahun 2018 Rp. 39.097.156.301 ada penurunan Rp. 61.247.464 atau turun 0,16 %, hal ini disebabkan karena penurunan laba pada Tahun 2019.

6. Pendapatan

Pendapatan dalam kurun waktu Tahun 2019 Rp. 13.059.796.803 dibanding dengan Tahun 2018 Rp. 12.689.814.784 ada kenaikan Rp. 369.982.019 atau tumbuh 2,92 %, hal ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan dari kredit yang diberikan.

7. Biaya

Biaya dalam kurun waktu Tahun 2019 Rp. 10.243.011.197 dibanding dengan Tahun 2018 Rp 8.538.739.894 ada kenaikan Rp. 1.704.271.303 atau turun 4,03 %, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya penyisihan kerugian atas kredit yang diberikan dan kenaikan biaya penyisihan kerugian atas penempatan pada bank lain

8. Laba / Rugi

Labanya / Ruginya dalam kurun waktu Tahun 2019 Rp 2.8167.606 dibanding dengan Tahun 2018 Rp 4.151.074.899 ada penurunan Rp 1.334.289.284 atau turun 32,14 %, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya penyisihan kerugian atas kredit yang diberikan dan kenaikan biaya penyisihan kerugian atas penempatan bank lain.

9. PAD yang disetor ke APBD

PAD yang disetor ke Pemkot pada Tahun 2019 Rp 1.549.232.083 dibanding dengan Tahun 2018 Rp 2.075.537.445 ada penurunan Rp. 526.305.362 atau 25,36 %, hal ini disebabkan karena turunnya laba di Tahun 2019.

Untuk mendukung kinerja dalam kurun waktu Tahun 2019 perkembangan jumlah pegawai PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun.

No	Jabatan	2018	2019	Naik / Turun
1.	Direksi	1 Orang	1 Orang	-
2.	SPI	2 Orang	2 Orang	-
3.	Kepala Bagian	4 Orang	4 Orang	-
4.	Kapala Sub. Bagian	8 Orang	8 Orang	-
5.	Kepala Kas	8 Orang	8 Orang	-
6.	Staf	23 Orang	23 Orang	-
	Jumlah	45 Orang	45 Orang	-

Permasalahan

Permasalahan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun masih banyak yang dihadapi dan tantangan yang berat agar bisa Survive, antara lain :

1. Jaringan kantor seperti Kantor Cabang sangat diperlukan untuk lebih mendekatkan kepada pelayanan, dan memperluas daerah operasional BPR, selama ini kantor Operasional yang dimiliki adalah 1 (Satu) Kantor Pusat, dan 8 (Delapan) Kantor Kas semua di Kota Madiun belum memiliki Kantor Cabang.
2. SDM adalah merupakan pilar utama dalam menjaga eksistensi suatu BPR untuk bisa terus tumbuh dan eksis dalam industri perbankan, peran SDM sangat besar dalam rangka pencapaian perusahaan.
3. Banyaknya kompetitor sebagai pesaing seperti Bank Umum yang membiayai untuk pangsa pasar BPR, sama-sama BPR, Lembaga Keuangan Non Bank seperti Koperasi, Danamon KSP, Pegadaian dan Lembaga Pembiayaan Keuangan, begitu pula lembaga tidak resmi seperti ijon, rentenir.

4. Masih cukup tingginya angka NPL (Non Performing Loan) yang merupakan indikator nilai tunggakan angsuran kredit di Bank Daerah Kota Madiun.

Solusi

Solusi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, harus bisa menempatkan keberadaan BPR dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, antara lain :

1. Menyediakan Jasa Keuangan seperti pinjaman dan simpanan dengan karakteristik BPR yang melayani kepada usaha UMK yang mudah dijangkau oleh masyarakat Mikro Kecil Menengah yang pelayanannya dengan sistem dan prosedur yang cepat, mudah dan tetap menjaga unsur kehati-hatian dengan meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah, yaitu antara lain :
 - a. Meningkatkan kepuasan kepada customer dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan nasabah dengan sistem tangkap bola.
 - b. Meningkatkan pemasaran / promosi BPR baik dengan penyebaran dan pengenalan langsung oleh petugas kepada sasaran masyarakat yang potensial, guna meningkatkan Image/ Citra BPR lebih baik lagi, juga memiliki Edukasi / Literasi Keuangan.
 - c. Memberikan imbalan suku bunga yang memadai sesuai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam produk Tabungan dan Deposito.
 - d. Mengupayakan untuk Ekspansi jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang baru.
 - e. Inovasi dan pengembangan produk baru.
 - f. Mengupayakan penurunan NPL (Non Performing Loan) dengan berbagai cara seperti melakukan pengeplangan agunan, pelelangan agunan melalui KPKNL dan melakukan gugatan ke pengadilan.

✚ **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA TAMAN SARI**

a. Kondisi Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun. Pendirian Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Taman Sari adalah untuk :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; dan
- b. Memperoleh laba

Dengan kegiatan usaha yang meliputi :

- a. Jasa penyediaan air minum;
- b. Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan/atau Air Minum Isi Ulang
- c. Pendayagunaan Lahan

Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun memanfaatkan sumber air baku dari air tanah dalam yang tersebar di 13 (tiga belas) lokasi di wilayah Kota Madiun. Kapasitas produksi terbesar berada di Instalasi Ngrowo yang dilengkapi dengan menara air. Instalasi lain yang juga dilengkapi dengan menara air adalah Instalasi Kapuas yang merupakan peninggalan Belanda. Dengan kapasitas produksi sebesar 375,27 l/det dan panjang pipa mencapai 557.822 meter PDAM telah mampu melayani 96,1 % dari jumlah penduduk di wilayah perkotaan.

b. VISI dan MISI

Visi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun adalah :
"MENJADI PERUSAHAAN YANG SEHAT, MANDIRI, PRIMA DALAM PELAYANAN"

Penjelasan :

- 1) Yang dimaksud dengan Perusahaan yang SEHAT adalah : PDAM dalam kondisi keuangan yang baik dan menurut ketentuan penilaian kinerja dinilai sehat sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Yang dimaksud dengan Perusahaan yang MANDIRI adalah : Keuangan PDAM dalam kondisi mampu membiayai hutang-hutangnya baik hutang

jangka panjang maupun jangka pendek melalui keuangan PDAM sendiri.

- 3) Yang dimaksud dengan Perusahaan yang PRIMA DALAM PELAYANAN : PDAM akan selalu tanggap, sigap dan santun dalam menjaga pelayanan terbaik untuk pelanggan sehingga pelanggan merasakan kepuasan terhadap pelayanan PDAM.

Misi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun adalah :
 ”MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA PELANGGAN DAN KONTRIBUSI KEPADA PEMERINTAH SEBAGAI PERUSAHAAN YANG SEHAT”

Penjelasan :

1. Yang dimaksud dengan MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA PELANGGAN adalah : PDAM selalu akan mengutamakan pelayanan terhadap keluhan-keluhan pelanggan sehingga pelanggan menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan PDAM.
2. Yang dimaksud dengan KONTRIBUSI KEPADA PEMERINTAH SEBAGAI PERUSAHAAN YANG SEHAT adalah : Apabila kondisi keuangan PDAM dalam kondisi sehat yang berarti kondisi keuangan memperoleh laba maka akan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah berupa setoran laba untuk Pendapatan Asli Daerah.

c. Data Kepegawaian

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT GOLONGAN	JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL	JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL
125	SLTP : 5 SLTA : 103 S1 : 17	Kontrak : 21 A3 : 0 A4 : 2 B1 : 11 B2 : 16 B3 : 4 B4 : 29 C1 : 22 C2 : 7 C3 : 5 C4 : 3 D1 : 1 D2 : 3 D3 : 1 D4 : 0	26	4

d. Program Dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 bidang Cipta Karya bahwa pada tahun 2019 bisa tercapai pelayanan akses air minum 100%, PDAM menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan di bidang air minum dengan sasaran dan target pada penambahan jumlah pelanggan (cakupan pelayanan) serta peningkatan pendapatan.

Di samping itu Perumda Air Minum Tirta Taman Sari telah menyusun Corporate Plan tahun 2018-2022 yang berisi program kerja perusahaan selama 5 (lima) tahunan.

Untuk mendukung program perusahaan maka pada tahun 2019 dilaksanakan kegiatan :

1. Kegiatan sambungan rumah gratis sebanyak 496 SR.

Pemberian bantuan dilaksanakan dalam rangka menyambut Ulang Tahun PDAM dan Pemerintah Kota Madiun bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Madiun yang belum berlangganan PDAM.

2. Pengembangan jaringan pipa distribusi sepanjang 5.746 meter.

Program pengembangan jaringan bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi pelanggan baru di wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan dan bagi wilayah yang memerlukan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan sehingga kebutuhan air tercukupi secara kuantitas dan kontinuitas.

3. Penambahan Kapasitas Produksi

Pada tahun 2019 PDAM melaksanakan pembangunan sumur dalam dengan kapasitas 30 liter/detik di jl. Sawahan kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo.

Penambahan kapasitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan khususnya peningkatan suplai air di wilayah Madiun barat khususnya kelurahan Manguharjo, Winongo dan Ngegong pada saat jam puncak.

e. Perkembangan Kondisi PDAM

Untuk Perkembangan kondisi PDAM Kota Madiun sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Instalasi	Satuan	2018	2019
1	Jumlah Pelanggan		39.231	40.118
	- Sosial Umum	SR	55	58
	- Sosial Khusus	SR	654	657
	- Rumah Tangga	SR	36.992	37.874
	- Instansi Pemerintah	SR	222	230
	- Niaga Kecil	SR	1.275	1.267
	- Niaga Besar	SR	29	28
	- Industri Kecil	SR	4	4
2	Penduduk Terlayani	jiwa	198.080	202.620
3	Tingkat Pelayanan	%	93,95	96,10
4	Jumlah Sumur Dalam	unit	26	27
5	Panjang Pipa	meter	552.076	557.822
6	Kapasitas Produksi	m3	11.475.804	11.834.524
7	Air yang terjual	m3	9.706.814	10.006.723
8	Air yang Hilang	m3	1.768.990	1.827.801
9	Kehilangan Air	%	15,41	15,44
10	Jumlah Pegawai	Orang	127	125
11	Nilai Kinerja		69,00	75,40
12	Pendapatan Operasi	Rp. Juta	37.858.316.900,00	39.144.401.232,00
13	Laba Setelah Pajak	Rp. Juta	10.384.631.072,28	11.923.366.053,66
14	PAD yang Disetor ke Pemkot	Rp. Juta	5.711.547.089,75	6.557.851.329,51

Sumber : PDAM Kota Madiun

Data Tahun 2018 setelah Audit ; Data Tahun 2019 sebelum Audit

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penambahan sambungan baru sepanjang tahun 2019 meningkat dari 39.231 SR menjadi 40.118 SR. Penambahan ini didukung oleh adanya program sambungan rumah gratis dan adanya keringanan pembayaran biaya pasang baru (diangsur).
2. Penduduk terlayani sepanjang tahun 2019 meningkat dari 198.080 jiwa menjadi 202.620 jiwa.
3. Tingkat pelayanan sepanjang tahun 2019 meningkat dari 93,95 % menjadi 96,10 % dengan asumsi 1 pelanggan untuk 5 jiwa.
4. Jumlah sumur dalam pada tahun 2019 bertambah dari 26 unit menjadi 27 unit, karena ada pembangunan 1 (satu) sumur dalam di Jl. Sawahan kelurahan Nambangan Lor kecamatan Manguharjo. Pembangunan ini bertujuan untuk menambah kapasitas produksi, khususnya untuk menambah suplai air di wilayah kelurahan Manguharjo, Winongo dan Ngegong serta untukantisipasi pesatnya pertumbuhan pembangunan di wilayah tersebut (sekitar ring road).

5. Panjang pipa sepanjang tahun 2019 meningkat dari 552.076 meter menjadi 557.822 meter.
 6. Kapasitas produksi sepanjang tahun 2019 mengalami kenaikan dari 11.475.804 m³ menjadi 11.834.524 m³, kenaikan volume produksi seiring dengan adanya penambahan jumlah pelanggan.
 7. Jumlah air terjual sepanjang tahun 2019 meningkat dari 9.706.814 m³ menjadi 10.006.723 m³. Kenaikan air terjual ini selain karena adanya penambahan jumlah pelanggan juga disebabkan oleh meningkatnya tingkat konsumsi pelanggan karena terjadinya kemarau panjang.
 8. Sepanjang tahun 2019 Volume air yang hilang meningkat dari 1.768.990 m³ menjadi 1.827.801 m³ dan prosentase air yang hilang meningkat dari 15,41 % menjadi 15,44 %. Tingkat kehilangan air masih memenuhi Inmendagri No:690-149/1985 tentang usaha mengurangi kebocoran dalam pengelolaan air minum di PDAM hingga 20%. Kehilangan air akan berbanding lurus dengan produksi dan konsumsi air. Selain itu juga disebabkan terjadinya kebocoran air sebagai akibat adanya kegiatan proyek saluran drainase dimana jaringan pipa PDAM banyak yang terputus pada saat kegiatan penggalian.
 9. Sepanjang tahun 2019 terjadi penurunan jumlah pegawai dari 127 orang menjadi 125 orang, pengurangan ini disebabkan memasuki masa purna tugas.
 10. Pada tahun 2019 nilai kinerja sesuai Kepmendagri nomer 47 Tahun 1999 mengalami kenaikan dari 69,00 menjadi 75,40. Nilai tersebut berubah dari kategori *BAIK* menjadi *BAIK SEKALI*.
Kenaikan tersebut karena adanya bonus nilai pada indikator :
 - Aspek keuangan : peningkatan Rasio Laba, Efektifitas Penagihan
 - Aspek Operasional Indikator : Cakupan Pelayanan, Kapasitas Produksi dan Peneraan Meter.
 11. Pendapatan yang diterima PDAM Kota Madiun pada tahun 2019 meningkat dari Rp. 37.858.316.900,00 menjadi Rp. 39.144.401.232,00, hal ini disebabkan adanya kenaikan jumlah pelanggan, efisiensi biaya operasional, efisiensi produksi air dan diversifikasi usaha (pembayaran rekening PDAM melalui PPOB).
-

12. Laba setelah pajak pada tahun 2019 meningkat dari Rp. 10.384.631.072,28 menjadi Rp. 11.923.366.053,66 hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan perusahaan.
13. PAD yang disetorkan ke Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2019 meningkat dari Rp. 5.711.547.089,75 menjadi Rp. 6.557.851.329,51 hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan dan laba perusahaan.

f. Penghargaan yang diterima

Penghargaan ZERO ACCIDENT (Kecelakaan Nihil) Tahun 2019.

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan.

Hal ini disebabkan karena tingkat pelayanan pada akhir tahun 2019 telah mencapai 96,10 %, hampir mencapai titik jenuh karena telah mendekati 100 %. Kondisi Kota Madiun yang sangat mudah mengambil air tanah membuat sebagian besar masyarakat menggunakan sumur dangkal sebagai alternative dalam mendapatkan air bersih. Sehingga semakin berat untuk mendapatkan pelanggan baru.

2. Tingginya koefisien jam puncak ($c=2,5$).

Koefisien jam puncak menunjukkan meningkatnya pemakaian air pada saat jam puncak hingga mencapai 2,5 kali rata-rata pemakaian air. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tekanan air pada saat jam puncak walaupun kedua reservoir sudah dioptimalkan, sehingga pada saat jam puncak akan mengalami sedikit penurunan tekanan air terutama di daerah kritis.

Solusi :

1.
 - a. Bekerjasama dengan pengembang perumahan (developer) untuk pemasangan jaringan perpipaan dan sambungan rumah baru.
 - b. Mengadakan penyuluhan akan pentingnya air bersih bagi kesehatan kepada masyarakat kota Madiun.
 - c. Mengadakan program pasang baru gratis.
 2.
 - a. Membangun sumur baru untuk menambah kapasitas produksi.
 - b. Melaksanakan rehabilitasi jaringan pipa distribusi untuk meningkatkan debit air sehingga kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi setiap saat.
-

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN

Dengan telah dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.

Pendirian Perumda Aneka Usaha dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. Tujuan pendirian Perumda Aneka Usaha untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperoleh laba.

Bidang usaha Perumda Aneka Usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 adalah percetakan, perbengkelan, SPBU dan Perumda Aneka Usaha dapat membentuk usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Kerja

1. Bidang SDM

Melakukan pembinaan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari demi peningkatan kinerja dan pelayanan kepada konsumen.

2. Bidang administrasi

Melakukan pembenahan sistem pelaporan sehingga sesuai dengan standart ketentuan yang berlaku.

3. Bidang sarana dan prasarana

Melakukan penggantian mesin dispenser SPBU, renovasi kanopi dan pembuatan tottem SPBU yang sesuai standart Pertamina, juga pembangunan minimarket (Alfamart) di area SPBU.

Dari pembenahan tersebut berdampak positif pada perkembangan perusahaan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan sebesar 22,27% atau sebesar Rp. 20.945.530.404 pada tahun 2019.

Perkembangan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.134
Perkembangan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun
Tahun 2018 – Tahun 2019

NO	Uraian	2018 (setelah audit)	2019 (sebelum audit)
1	Asset	3.532.610.782	5.905.111.192
2	Hutang	14.806.985	9.503.000
3	Ekuitas	3.141.233.064	5.266.767.470
4	Pendapatan	94.027.555.711	114.973.086.115
5	Biaya	3.271.359.514	3.294.990.534
6	(Rugi)/Laba	1.261.350.119	1.634.614.501

Berdasarkan tabel diatas perkembangan Perumda Aneka Usaha tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Asset pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 naik sebesar Rp.2.372.500.410 atau 67,16% dari Rp.3.532.610.782 menjadi Rp.5.905.111.192, hal ini dikarenakan adanya peningkatan laba, investasi berupa renovasi kanopi dan pembuatan tottem standart Pertamina, pembelian 3 unit mesin dispenser dan penambahan sarana dan prasarana (Alfamart dan lain-lain);
2. Hutang/kewajiban jangka pendek pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 turun yaitu dari Rp.14.806.985 menjadi Rp.9.503.000;
3. Ekuitas pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 naik sebesar Rp.2.125.534.406,- atau 67,66% dari Rp.3.141.233.064 menjadi Rp.5.266.767.470, hal ini dikarenakan adanya penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun dan laba perusahaan yang masih ditahan;
4. Pendapatan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 naik sebesar Rp.20.945.530.404,- atau 22,27% dari Rp.94.027.555.711; menjadi Rp.114.973.086.115; hal ini dikarenakan adanya peningkatan omset dari penjualan BBM;
5. Biaya pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 naik sebesar Rp.23.631.020,- dari Rp.3.271.359.514 menjadi Rp.3.294.990.534;
6. Laba pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 naik sebesar Rp. 373.264.382 atau 29.59% dari Rp.1.261.350.119 menjadi Rp. 1.634.614.501.

Kendala-kendala yang dihadapi Perumda Aneka Usaha dalam melaksanakan program perusahaan :

- **Unit Percetakan**

Pada Tahun 2019 unit percetakan untuk sementara dinonaktifkan, hal ini dikarenakan SDM yang ada tidak memadai, dan kondisi mesin cetak yang sudah ketinggalan jaman serta terdampak era digitalisasi.

- **Unit SPBU**

Perilaku pegawai dalam pelayanan kepada konsumen belum maksimal, kedisiplinan dan ketrampilan pegawai masih rendah.

Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, Pangkat Golongan, Jumlah Pejabat struktural dan Fungsional

Pada Tahun 2019 jumlah karyawan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun sebanyak 36 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.135
Jumlah Karyawan Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Tahun 2019

No	Bagian	Jumlah	Keterangan
1.	Direktur Utama	1	Pegawai tetap 19 orang
2.	Bagian Umum dan Kepegawaian	2	Pegawai kontrak 16 orang
3.	Bagian Keuangan	2	
4.	Bagian SPBU	31	
Jumlah		36	

Jumlah semua karyawan Perumda Aneka Usaha tahun 2019 adalah 36 orang terdiri dari 1 orang Direksi, 19 orang pegawai tetap dan 16 orang pegawai kontrak.

Permasalahan dan Solusi

Secara umum Perumda Aneka Usaha dalam kegiatan usahanya pada tahun 2019 tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Bidang SDM

Perilaku pegawai dalam pelayanan kepada konsumen belum maksimal, kedisiplinan dan ketrampilan pegawai masih rendah.

2. Bidang Manajemen

Sistem pelaporan keuangan belum sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Bangunan bekas cucian mobil belum dimanfaatkan.

Upaya dan Solusi

Dari permasalahan-permasalahan diatas upaya dan solusi yang ditempuh Perumda Aneka Usaha antara lain :

1. Telah dilakukan pelatihan kedisiplinan pegawai melalui pembinaan, pelatihan akuntansi guna penyempurnaan sistem pelaporan, pelatihan perpajakan dan pelatihan-pelatihan lain yang dapat mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai;
 2. Memotivasi kepada pegawai SPBU untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada konsumen;
 3. Telah dilakukan penggantian mesin dispenser untuk menjamin kualitas dan ketepatan takaran BBM;
 4. Segera diupayakan pemanfaatan lokasi bekas cucian mobil dengan menggandeng pihak ketiga agar dapat memberi manfaat dan menambah sumber pendapatan Perumda Aneka Usaha.
-

✚ URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

a. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Madiun berorientasi untuk “*Mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan*” yang diarahkan untuk mencapai tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan
2. Mengembangkan nilai keagamaan, kepedulian dan kesalehan sosial

Sasaran :

1. Meningkatnya peran aktif organisasi masyarakat (Ormas) dalam pembangunan
2. Meningkatnya stabilitas daerah
3. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.136

Perkembangan Kinerja Sasaran berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat						
2.	Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas tertangani	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Bakesbang Kota Madiun

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan

Indikator Kinerja Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan di wilayah Kota Madiun tidak terjadi Konflik bermotif SARA, dengan target 100% konflik SARA dapat diselesaikan dengan realisasi 0% karena tidak terjadi konflik SARA dengan perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik bermotif SARA yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kejadian Konflik bermotif SARA seluruhnya}} \times 100$$

$$= \frac{0}{0} \times 100 = 100\%$$

2. Angka kriminalitas tertangani angka kriminalitas datanya diperoleh dari Polresta Madiun dengan perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah kejadian tindak kriminal yang ditangani dalam setahun}}{\text{Jumlah kejadian tindak kriminal seluruhnya}} \times 100$$

$$= \frac{163}{163} \times 100 = 100\%$$

Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.137

Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah pada Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Madiun Tahun 2018-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
2 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
2.1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	100	100%	100%	100
II ASPEK PELAYANAN UMUM					
D Fungsi Penunjang Pemerintahan					
35 Kesatuan Bangsa dan Politik					
35.1	jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan	16	16	11	68,7
35.2	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	7	7	10	143
35.3	Jumlah Kemitraan dengan elemen Masyarakat	9	9	9	100
35.4	Prosentase Parpol yang memahami Regulasi	100	100	100	100
35.5	Prosentase Gangguan Kamtibmas yang Terpantau	100	100	100	100
III ASPEK DAYA SAING DAERAH					
C Fokus Iklim Investasi					
1 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1.1	Angka kriminalitas	5.05	19.98	5,04	0,25

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6
1.2	Jumlah demonstrasi	8	10	5	5
1.3	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat	17	17	17	17
5	Kesatuan Bangsa dan Politik				
5.1	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	0	0	0	0
5.2	Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan	100	100	100	100

Sumber Data: Bakesbang Kota Madiun

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

- Angka kriminalitas tertangani angka kriminalitas datanya diperoleh dari Polresta Madiun dengan perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah kejadian tindak kriminal yang ditangani dalam setahun}}{\text{Jumlah kejadian tindak kriminal seluruhnya}} \times 100$$

$$= \frac{106}{106} \times 100 = 100\%$$
- Indikator Kinerja **jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan** Jumlah Partai Politik peserta Pemilu untuk tahun 2019 berjumlah 16 Parpol, setelah dilaksanakan Pemilu legislatif tahun 2019 yang lolos di kursi DPRD tinggal 11 Parpol, target dan realisasi mengalami penurunan ataupun kenaikan berdasarkan hasil Pemilu karena indikator ini sifatnya lima tahunan ada perubahan setelah ada Pemilu. Penganggarannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dana, laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) Untuk Tahun 2019 yang mendapat bantuan keuangan 12 Partai Politik.
- Indikator Kinerja **Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP** dalam setian tahun Bakesbangpol melakukan pembinaan terhadap Orkemas/LSM sebanyak 4 kali, baik terhadap pengurus maupun anggota Orkemas/LSM.
 - Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Pemuda dilaksanakan 1 kali dalam bentuk pembinaan kepada pengurus Orkemas/LSM

- b. Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun dalam bentuk sarasehan. Untuk tahun ini mengalami penurunan dalam pertemuannya tahun yang lalu bisa melaksanakan 6 kali dalam setahun sedangkan untuk tahun ini hanya bisa melaksanakan 3 kali karena anggarannya dikurangi kita harus menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ada.
- c. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 6 kali dalam 1 tahun dalam bentuk coffee morning yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, juga ditujukan dalam pembinaan LSM yang ada di Kota Madiun
4. Indikator Kinerja **Jumlah Kemitraan dengan elemen Masyarakat** Indikator Program yang terdiri dari beberapa kegiatan, target dan realisasi 9 kemitraan yang terdiri dari : FKUB, FPK, Toga, Tomas, Pelajar/generasi muda, Perguruan pencak silat, Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, LSM/Orkemas
5. Indikator Kinerja **Prosentase Parpol dan Orkemas yang memahami Regulasi** Indikator Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Masyarakat target dan realisasi tahun sebelum sampai dengan tahun ini 100% setiap pengurus Parpol dan Orkemas harus memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
6. *Indikator Kinerja Prosentase Gangguan Kamtibmas yang Terpantau* target tahun 2019 100% sedangkan direalisasi tahun 2019 100%. dengan pemantaun dalam satu bulan 6 tempat rawan gangguan Kamtibmas jadi dalam setahun berjumlah 72 tempat rawan gangguan Kamtibmas yang dipantau. Dalam pelaksanaannya pemantauan kita bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Polresta Madiun , Kejaksaan Madiun, Korem 081/Dhirotsaha Jaya Madiun dan Kodim 0803 Madiun untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan perhitungan
- $$= \frac{\text{Jumlah gangguan kamtibmas yang terpantau}}{\text{gangguan kamtibmas yang tidak terjadi}} \times 100$$
- $$= \frac{72}{72} \times 100 = 100\%$$
7. Indikator Kinerja **Konflik Horizontal di dalam masyarakat** Indikator Kinerja Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Target dan realisasi 0, Bakesbangpol mempunyai Peta Rawan Konflik suatu kajian tentang wilayah rawan konflik di Kota Madiun. Hasil yang diharapkan dari

Pemetaan rawan konflik adalah untuk mengantisipasi terjadinya potensi konflik terutama memberikan gambaran dan pemetaan rawan konflik di Kota Madiun sehingga Bakesbangpol berani target 0 tidak terjadi konflik di Kota Madiun.

8. Indikator Kinerja **Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan** di wilayah Kota Madiun tidak terjadi Konflik bermotif SARA, dengan target 100% konflik SARA dapat diselesaikan dengan realisasi 0% karena tidak terjadi konflik SARA , dengan perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik bermotif SARA yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kejadian Konflik bermotif SARA seluruhnya}} \times 100$$

$$= \frac{0}{0} \times 100 = 100\%$$

9. **Angka kriminalitas** untuk tahun 2019 target 19.98 realisasi 5,04% dengan perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100$$

$$= \frac{106}{210.115} \times 100 = 5,04\%$$

10. **Jumlah demonstrasi**, target 2018 11 demo (aksi damai) untuk realisasi tahun 2018 5 demo (aksi damai) target 2019 10 demo (aksi damai) untuk realisasi tahun 2019 5 demo (aksi damai) untuk setiap tahunnya kita tidak bisa memprediksi jumlah demo (aksi damai) dan kita tidak bisa memaksa kelompok atau golongan untuk tidak mengadakan demo (aksi damai), kita hanya memantau dan memonitor dengan keamanan terkait yaitu Polresta Madiun , Kejaksaan Madiun, Korem 081/Dhirotsaha Jaya Madiun dan Kodim 0803 Madiun dan selama ini berjalan aman dan tertib.

11. Indikator Kinerja **Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat**
Indikator kinerja Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, Jumlah angka kriminalitas yang ada di masyarakat 17 kriminal, angka tersebut kita peroleh dari Polresta Madiun

- a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa Kota Madiun** pada kurun waktu tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
4	program pendidikan politik masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol
		2	Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat
		3	Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM
		4	Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM dan Pemuda
		5	kegiatan posko dan monitoring pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden
5	program pengembangan wawasan kebangsaan	1	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
		2	Kegiatan Pemantapan Idiologi dan HAM
6	program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
		2	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
		3	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
		4	Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan
		5	Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkuat NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja
		6	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
7	program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	1	Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan
		2	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

No	Program	Kegiatan
		3 Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
		4 Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi cegah dini dan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas
		5 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey/ Penelitian

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa Kota Madiun** pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	670.381.626,00	495.822.607,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	550.381.626,00	375.968.857,00
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis
	Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120.000.000,00	119.853.750,00
	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	69 kali	60 kali
	Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah	78.789.200,00	67.689.500,00
1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	4.000.000,00	3.950.000,00
	Output : Jumlah gedung/ bangunan yang terpelihara	1 gedung	1 gedung
	Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	39.789.200,00	29.044.500,00
	Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	24 unit	24 unit
	Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	35.000.000,00	34.695.000,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	7 jenis	7 jenis

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	97.392.640,00	38.159.000,00
1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	97.392.640,00	38.159.000,00
	Output : Jenis dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	12 dokumen	12 dokumen
	Outcome : Persentase dokumen perencanaan /laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
4	program pendidikan politik masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	833.136.148,00	801.330.051,00
1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	24.381.684,00	19.167.080,00
	Output : Jumlah peserta Pengelolaan		
	Outcome : Persentase parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%
2	Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat	199.364.048,00	191.372.927,00
	Output : Jumlah peserta penyuluhan		
	Outcome : Persentase parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%
3	Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM	45.015.184,00	43.257.517,00
	Output : Jumlah pengurus orkemas /LSM yang memperoleh pembinaan	300 orang	300 orang
	Outcome : Persentase parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%
4	Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM dan Pemuda	42.969.344,00	40.725.968,00
	Output : Jumlah peserta sarasehan	300 orang	300 orang
	Outcome : Persentase parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%
5	kegiatan posko dan monitoring pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden	521.405.888,00	506.806.559,00
	Output : Petugas Caraka	715 orang	715 orang
	Outcome : Persentase parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%
5	program pengembangan wawasan	205.818.052,00	197.153.729,00

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	kebangsaan		
1	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	158.895.368,00	154.568.421,00
	Output : Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	680 orang	680 orang
	Outcome : Konflik horizontal di dalam masyarakat	0	0
2	Kegiatan Pemantapan Idiologi dan HAM	46.922.684,00	42.585.308,00
	Output : Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	200 orang
	Outcome : Konflik horizontal di dalam masyarakat	0	0
6	program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	663.726.664,00	566.390.109,00
1	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	353.995.768,00	338.794.465,00
	Output : Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	400 orang	400 orang
	Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	9
2	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	64.424.944,00	56.129.174,00
	Output : Jumlah peserta sarasehan	230 orang	230 orang
	Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	9
3	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	64.073.004,00	21.252.208,00
	Output : Jumlah pertemuan FKUB	3 kali	1 kali
	Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	9
4	Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	65.961.092,00	58.536.282,00
	Output : Jumlah peserta sarasehan	230 orang	230 orang
	Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	9
5	Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkuat NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	70.624.384,00	52.238.800,00
	Output : Jumlah peserta pembinaan	300 orang	300 orang
	Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	9
6	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	44.647.472,00	39.439.180,00
	Output : Jumlah peserta sarasehan	175 orang	175 orang
	Outcome : Jumlah kemitraan	9	9

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	dengan elemen masyarakat		
7	program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	574.829.974,00	441.160.908,00
1	Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	111.084.302,00	101.254.108,00
	Output : Jumlah rakor dan sosialisasi	2 kali	2 kali
	Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	17	17
2	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	382.680.136,00	274.639.623,00
	Output : Jumlah rakor dan sosialisasi	13 kali	11 kali
	Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	17	17
3	Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	11.285.184,00	-
	Output : Jumlah pemantauan Kamtibmas	72 kali	72 kali
	Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	17	17
4	Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi cegah dini dan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas	58.495.168,00	55.671.717,00
	Output : Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	200 orang
	Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	17	17
5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey/Penelitian	11.285.184,00	9.595.460,00,00
	Output : Jumlah ijin survey/penelitian yang dimonitor	250 ijin	387 ijin
	Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	17	17

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama tidak dapat diserap secara maksimal karena FKUB ada dana hibah dan bentuk kegiatan hampir sama oleh karena itu yang diserap dari anggaran hibah sedangkan di kegiatan tidak diserap untuk efisiensi penggunaan anggaran.
2. Ada kegiatan yang isinya hanya Uang Kinerja Kegiatan, karena UKK sudah tercukupi di kegiatan lain sehingga tidak diserap, sedangkan yang anggarannya masih/tidak serap itu sisa UKK di masing-masing kegiatan (ada 1 kegiatan yang isinya hanya UKK yang seharusnya sudah

dihilangkan pada waktu RDP dengan DPRD ternyata waktu keluar DPA masih muncul sehingga anggaran tidak diserap yaitu Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Solusi

Untuk Perencanaan kedepannya lebih ditingkatkan dan untuk pengajuan anggaran lebih teliti lagi sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti diatas untuk kedepannya

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan bertujuan memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Departemen/ Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kota Madiun untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Kegiatan Peanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

A. DASAR HUKUM

Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur No : SP DIPA - 018.11.3.059444/2019 tanggal 5 Desember 2018

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan dari Badan Ketahanan Pangan yang dananya bersumber dari APBN melingkupi :

1. Program :
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Kegiatan :
Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL)

D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Lokasi
Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2019 dilaksanakan di Kota Madiun pada 2 Kecamatan.
2. Waktu
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2019 dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2019.

E. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mendapatkan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebesar Rp 75.000.000,00 kepada kelompok Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL) penerima manfaat sebagai berikut:

1. Kelompok KRPL Permata Hijau Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo ;
2. Kelompok KRPL Mulya Sejahtera Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo ;
3. Kelompok KRPL Wanita Niti Boga Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman ;
4. Kelompok KRPL Respati Manis Hijau Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman ; dan
5. Kelompok KRPL Sukokaryo Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman.

F. SKPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan adalah Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

G. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

Jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah 6 orang, terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 6 orang PNS. Dengan tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 1 orang, S1 (Sarjana) sebanyak 4 orang dan S2 (Magister) sebanyak 1 orang.

Berdasarkan Golongan/Pangkat, pegawai yang melaksanakan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari:

- Pegawai golongan IV sebanyak 1 orang
- Pegawai golongan III sebanyak 5 orang

H. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tidak ada permasalahan yang berarti yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, karena tidak ada kendala dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. DASAR HUKUM

Melaksanakan program prioritas Nasional, yaitu :

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Dengan dasar hukum pelaksanaan :

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dengan dasar hukum pelaksanaan :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ;

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai

3. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

a. Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

b. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

c. Undang Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit

d. Undang Undang No: 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013

e. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

f. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

g. Peraturan presiden No. 34 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara

h. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.

i. Peraturan menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan

- j. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

1. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program dari Kementerian Sosial RI
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program dari Kementerian Sosial yang merupakan program lintas kementerian dibawah koordinasi Menko PMK
3. Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program dari Kementerian Kesehatan dan Kemensos RI

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemberian Bantuan Sosial bersyarat untuk keluarga tidak mampu dengan indeks bantuan sesuai jumlah kategori yang ada dalam satu keluarga. Keluarga dengan komponen Kesehatan sejumlah Rp. 2.400.000/tahun/kategori. Keluarga dengan komponen pendidikan sejumlah Rp. 900.000/tahun/ kategori anak SD,sejumlah Rp. 1.500.000/tahun/kategori anak SMP dan sejumlah Rp 2.000.000,-/tahun/kategori anak SMA. Sedangkan keluarga dengan komponen Kesejahteraan Sosial mendapat bantuan sejumlah Rp 2.400.000/tahun/kategori Disabilitas atau Kategori Lansia.

Jumlah Penerima Manfaat PKH Kota Madiun pada tahun 2019 sebanyak 3.269 keluarga.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pemberian bantuan pangan dengan mekanisme non tunai sejumlah Rp. 110.000/bulan/keluarga. Jumlah Penerima manfaat BPNT Kota Madiun sejumlah 4.833 keluarga.

3. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Merupakan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu yang memberikan jaminan pemberian layanan pengobatan gratis kelas 3 untuk 29.201 jiwa penduduk Kota Madiun. Bidang sosial bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi penerima manfaat KIS.

D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah KPM PKH pada akhir tahun 2019 sebanyak 3.269. Penyaluran bantuan telah dilakukan sesuai dengan tahapan dengan realisasi : ada 1 KPM yang belum menerima bantuan dikarenakan terdapat perbedaan data rekening yang ada diKPM dengan data yang ada pada system bank.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan rutin diterima setiap bulan sebesar Rp 110.000,-

E. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sumber Anggaran : APBN

Jumlah Anggaran : Rp. 10.900.350.000,-

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sumber Anggaran : APBN

Jumlah Anggaran : Rp. 6.379.560.000,-

F. SKPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DN GOLONGAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
A. SDM PELAKSANA PKH			
1	TRI YUNIWATI, S.IP	S1	KOORDINATOR KOTA
2	FEPI ARYANI S.Sos	S1	PEKERJA SOSIAL SUPERVISOR
3	WIDARTO SETIAWAN, A.Md	D3	DATA BASE ADMINISTRATION
4	MARSISWO DIRGANTORO, A.Md	D3	DATA BASE ADMINISTRATION
5	AGUS MISRI ACHMADI, IR.	S1	PENDAMPING
6	AGUS SUPRIYANTO, A.Md	D3	PENDAMPING
7	ALIF NURHIDAYAH, S.Pd.Si	S1	PENDAMPING
8	AMRINA MARDIYANTI, S.PAR	S1	PENDAMPING
9	RAHMAT PRAYITNO, S.Pd.I	S1	PENDAMPING
10	RISMA HASNA YUNITA, SP	S1	PENDAMPING
11	JUAF TIKA, S.Tr.Sos	D4	PENDAMPING
B. SDM PELAKSANA BPNT			
1	WAHYU SULISTYONO,SE	S1	KOORDINATOR TKS
2	ERNA ERMAWATI	SMA	TKSK KARTOHARJO
3	WIWIK SUMARTININGSIH	SMA	TKSK MANGUHARJO
4	NUR DAYAT	SMA	TKSK TAMAN

H. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

NO	SARPRAS	JUMLAH	KONDISI
1	SERVER	1 UNIT	SERING MATI KARENA VOLTASE TIDAK STABIL DAN SUHU RUANGAN KURANG DINGIN
2	KOMPUTER PC	2 UNIT	BAIK
3	TABLET	1 UNIT	BAIK

I. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Masih terdapat data yang belum sesuai dengan kondisi riil di masyarakat, masih dijumpai inclusion error dan exclusion error sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang terus mengalami perubahan status sosial ekonomi.

Untuk mengatasi masalah tersebut Kementerian Sosial mempunyai kegiatan pemutakhiran data terpadu setiap 6 bulan sekali, untuk mengakomodir dan exclusion error untuk di mutakhirkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS NG) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

J. HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU DILAPORKAN

1. MANFAAT

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

- PKH bertujuan untuk memberikan transfer sosial bagi orang miskin dan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan memberikan insentif pada keluarga miskin untuk berinvestasi dalam modal sumber daya manusia anak-anak mereka;
- PKH mempromosikan perubahan sosial melalui
- Insentif perubahan perilaku melalui prasyarat kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan ibu hamil atau ibu menyusui untuk pencairan bantuan
- Memfasilitasi sesi FDS yang di antaranya berfokus pada mempromosikan pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik, praktik pengasuhan, perilaku kesehatan
- Memberikan layanan inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas berat

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai;
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Memberikan jaminan kesehatan yang komprehensif (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif), berjenjang (rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, rawat jalan spesialis di rumah sakit dan rawat inap di rumah sakit), tanpa batasan nilai rupiah.

Mengganti biaya layanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis pasien, tetapi membatasi jenis layanan (kosmetika dan fertilitas) dan tanpa iur biaya (peserta tidak harus membayar biaya apapun). Jenis pelayanan yang dicakup relatif komprehensif termasuk layanan kasus katastrofik seperti operasi jantung, hemodialisa dan operasi cesar, sehingga upaya mencapai kesejahteraan masyarakat terus menjadi prioritas utama pemerintah.

2. PENGARUH KE MASYARAKAT

Program Nasional sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena mendapat jaminan sosial dan bantuan sosial yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama bagi PMKS yang tentunya merupakan masyarakat tidak mampu dan rentan.

Perlunya Program dampingan untuk mendukung program nasional sehingga lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial.

BAB V

PENUTUP

Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2019 dan capaian kinerjanya serta permasalahan dan solusinya diwujudkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Periode Tahun 2019 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2019 ini merupakan laporan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Sistematika penulisan LKPJ ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Madiun Tahun 2019, menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup menggembirakan yang ditandai adanya peningkatan indikator-indikator kinerja dengan harapan dapat membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya berbagai kendala dan permasalahan. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target dan perolehan hasil yang optimal.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun, semoga dapat memberikan manfaat dan semoga Allah Subhanahuwata'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridhonya kepada kita semua dalam memajukan Kota Madiun yang Sejahtera.
